



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Pasal 2

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan yang memuat:

- a. laporan realisasi anggaran;
- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. neraca;
- d. laporan operasional;
- e. laporan arus kas;
- f. laporan perubahan ekuitas; dan
- g. catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD.

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah sebagai berikut:

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah minus Rp10.098.396.437,89 (sepuluh miliar sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus tiga puluh tujuh koma delapan puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran pendapatan setelah perubahan sebesar Rp639.329.112.828,00 (enam ratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta seratus dua belas ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah); dan



2. realisasi sebesar Rp629.230.716.390,11 (enam ratus dua puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam belas ribu tiga ratus sembilan puluh koma sebelas rupiah);
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah minus Rp34.700.796.268,36 (tiga puluh empat miliar tujuh ratus juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus enam puluh delapan koma tiga puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp698.078.854.364,51 (enam ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus enam puluh empat koma lima puluh satu rupiah); dan
 2. realisasi sebesar Rp663.378.058.096,15 (enam ratus enam puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima puluh delapan ribu sembilan puluh enam koma lima belas rupiah);
- c. selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah Rp24.602.399.830,47 (dua puluh empat miliar enam ratus dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh koma empat puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran defisit setelah perubahan sebesar Rp58.749.741.536,51 (lima puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima ratus tiga puluh enam koma lima puluh satu rupiah); dan
 2. realisasi defisit sebesar Rp34.147.341.706,04 (tiga puluh empat miliar seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus enam koma empat rupiah);
- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp310.638.237,00 (tiga ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp58.749.741.536,51 (lima puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima ratus tiga puluh enam koma lima puluh satu rupiah); dan
 2. realisasi sebesar Rp59.060.379.773,51 (lima puluh sembilan miliar enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga koma lima puluh satu rupiah);

Se

- e. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp310.638.237,00 (tiga ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp58.749.741.536,51 (lima puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima ratus tiga puluh enam koma lima puluh satu rupiah); dan
 2. realisasi sebesar Rp59.060.379.773,51 (lima puluh sembilan miliar enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga koma lima puluh satu rupiah).

Pasal 4

- (1) Uraian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Lampiran I memuat laporan realisasi anggaran yang terdiri atas:
 1. ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi;
 2. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 3. rincian APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; dan
 4. rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintah Daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub kegiatan;
 - b. Lampiran II memuat laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. Lampiran III memuat laporan operasional;
 - d. Lampiran IV memuat laporan perubahan ekuitas;
 - e. Lampiran V memuat neraca;
 - f. Lampiran VI memuat laporan arus kas;
 - g. Lampiran VII memuat catatan atas laporan keuangan;
 - h. Lampiran VIII memuat daftar rekapitulasi piutang Daerah;
 - i. Lampiran IX memuat daftar rekapitulasi penyisihan piutang tak tertagih;
 - j. Lampiran X memuat daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
 - k. Lampiran XI memuat daftar penyertaan modal (investasi) Daerah;

- l. Lampiran XII memuat daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII memuat daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV memuat daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV memuat daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI memuat daftar dana cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII memuat daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII memuat daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX memuat daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- t. Lampiran XX memuat ikhtisar laporan keuangan BUMD terdiri atas:
 - 1. ikhtisar laporan keuangan (neraca) BUMD; dan
 - 2. ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) BUMD.

Pasal 5

Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2024 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki pada tanggal 4 Agustus 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki pada tanggal 4 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



MARZANHUS ARVAN OHY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
TAHUN 2025 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 1/W.I/2025

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

Untuk mendukung terwujudnya tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan negara/daerah, pengelolaan keuangan negara/daerah perlu diselenggarakan secara terbuka dan bertanggungjawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah mempunyai dampak langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan sumbangan yang besar dalam upaya mewujudkan *Good Governance*. Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*), maka dituntut adanya pembenahan dan penyempurnaan disegala bidang dalam proses penyelenggaraan pemerintahan umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya, yang diwujudkan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan sumber daya yang *akuntabel* dan *transparan*. Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengangkatan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Sehingga akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang dan berbagai kebijakan yang menyangkut proses penyusunan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai dapat terpenuhi.

Laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan pemerintah merupakan hasil proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan, dengan tujuan untuk kepentingan:

- a. akuntabilitas, mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;
- b. manajemen, membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat;
- c. transparansi, memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan;
- d. keseimbangan antargenerasi, membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Dalam rangka mengimplementasikan penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan daerah sampai dengan menghasilkan laporan keuangan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tujuan pelaporan keuangan itu sendiri, maka pemerintah Daerah telah menyusun laporan keuangan, berupa:

- a. laporan realisasi anggaran.
- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih.
- c. neraca.
- d. laporan operasional.
- e. laporan arus kas.
- f. laporan perubahan ekuitas.
- g. catatan atas laporan keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p
Cukup jelas.

Huruf q
Cukup jelas.

Huruf r
Cukup jelas.

Huruf s
Cukup jelas.

Huruf t
Ikhtisar laporan keuangan BUMD memuat informasi tentang aset/aktiva, kewajiban, dan ekuitas dari BUMD.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
SELATAN NOMOR

DAFTAR ISI

Lampiran I	Laporan Realisasi Anggaran	1
Lampiran I.1	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi	3
Lampiran I.2	Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan	11
Lampiran I.3	Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan	13
Lampiran I.4	Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan...	160
Lampiran II	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	234
Lampiran III	Laporan Operasional	235
Lampiran IV	Laporan Perubahan Ekuitas	237
Lampiran V	Neraca	238
Lampiran VI	Laporan Arus Kas	240
Lampiran VII	Catatan atas Laporan Keuangan	242
Lampiran VIII	Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah	418
Lampiran IX	Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih	419
Lampiran X	Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir	420
Lampiran XI	Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	421
Lampiran XII	Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah	422
Lampiran XIII	Daftar Rekapitulasi Aset Tetap	424
Lampiran XIV	Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan	425
Lampiran XV	Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya	427
Lampiran XVI	Daftar Dana Cadangan Daerah	429
Lampiran XVII	Daftar Kewajiban Jangka Pendek	430
Lampiran XVIII	Daftar Kewajiban Jangka Panjang	432
Lampiran XIX	Daftar Sub Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2024 dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya	433
Lampiran XX.1	Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) BUMD	434
Lampiran XX.2	Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) BUMD	435

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Tahun Anggaran 2024.

Nomor : 1 Tahun 2025
Tanggal : 4 Agustus 2025



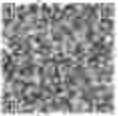
PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
4	PENDAPATAN DAERAH	639.329.112.828,00	629.230.716.390,11	(10.098.396.437,89)	98,42
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	20.088.894.856,00	22.196.440.925,11	2.109.446.069,11	110,50
4.1.01	Pajak Daerah	4.750.287.502,00	6.073.470.873,00	1.323.183.371,00	127,85
4.1.02	Retribusi Daerah	10.448.422.400,00	11.273.645.225,00	824.222.825,00	107,88
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	840.020.357,00	640.020.357,00	0,00	100,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Seh	4.249.264.597,00	4.211.304.470,11	(37.960.126,89)	99,11
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	612.741.829.148,00	602.860.004.972,00	(9.880.924.176,00)	98,39
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	587.361.302.813,00	586.294.366.350,00	(1.066.934.203,00)	99,82
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	25.380.526.335,00	16.565.638.622,00	(8.813.989.913,00)	65,27
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.498.288.824,00	4.171.370.493,00	(2.326.918.331,00)	64,18
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	500.000,00	500.000,00	0
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6.498.288.824,00	4.170.870.493,00	(2.327.418.331,00)	64,18
5	BELANJA DAERAH	696.078.854.364,51	663.378.058.086,15	(34.700.796.288,36)	95,03
5.1	BELANJA OPERASI	489.870.178.801,73	480.184.563.686,15	(9.685.615.115,58)	98,04
5.1.01	Belanja Pegawai	243.650.092.253,45	225.870.587.199,00	(17.979.505.054,45)	92,62
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	195.577.295.643,00	184.112.128.485,15	(11.465.167.157,85)	94,14
5.1.04	Belanja Subsidi	696.000.000,00	696.000.000,00	0,00	100,00
5.1.05	Belanja Hibah	33.771.589.845,28	33.727.951.322,00	(43.638.523,28)	99,87
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	16.174.601.260,00	15.977.296.500,00	(197.304.760,00)	98,78
5.2	BELANJA MODAL	102.179.279.599,78	96.714.591.885,00	(5.464.687.714,78)	94,61
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.308.877.428,00	14.610.106.510,00	(698.570.918,00)	95,45
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	14.227.325.121,78	12.753.623.470,00	(1.473.701.651,78)	89,64
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	71.629.355.052,00	70.346.498.753,00	(1.282.856.299,00)	98,21
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	115.022.000,00	114.339.000,00	(683.000,00)	98,83
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	900.000.000,00	890.024.250,00	(9.975.750,00)	98,89
5.3	BELANJA TIDAK TERUGA	2.852.134.000,00	1.861.945.000,00	(1.190.189.000,00)	65,27
5.3.01	Belanja Tidak Tertuga	2.852.134.000,00	1.861.945.000,00	(1.190.189.000,00)	65,27

CS



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.4	BELANJA TRANSFER	103.177.281.903,00	102.818.957.425,00	(360.304.538,00)	99,85
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	801.380.142,00	587.031.875,00	(214.353.267,00)	73,25
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	102.375.879.821,00	102.229.925.550,00	(145.951.271,00)	99,86
	SURPLUS / DEFISIT	(58.749.741.536,51)	(34.147.341.706,04)	24.602.399.830,47	0
	PEMBIAYAAN				
6.1	FENERISMAAN PEMBIAYAAN	58.749.741.536,51	58.060.379.773,51	310.638.237,00	100,53
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	45.570.594.736,51	45.881.232.973,51	310.638.237,00	100,68
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	13.179.146.800,00	13.179.146.800,00	0,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	58.749.741.536,51	58.060.379.773,51	310.638.237,00	100,53
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(0,00)	24.913.038.067,47	24.913.038.067,47	0

BUPATI KOLAANG MONGONDOW SELATAN

ISKANDAR KAMARU



Lampiran I.1 : Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Tahun Anggaran 2024

Nomor : 1 Tahun 2025
Tanggal : 4 Agustus 2025



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Tahun Anggaran 2024

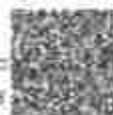
KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
4	PENDAPATAN DAERAH	639.329.112.826,00	629.230.718.390,11	(10.098.398.437,89)	98,42
4.1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	10.215.988.400,00	11.076.721.725,00	860.735.325,00	108,43
4.1.02	KESEHATAN	10.114.470.400,00	11.034.842.535,00	920.372.135,00	109,10
4.1.02.1-02.0-00.0-00.01	DINAS KESEHATAN	10.114.470.400,00	11.034.842.535,00	920.372.135,00	109,10
4.1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	101.518.000,00	41.879.190,00	(59.638.810,00)	41,25
4.1.03.1-03.0-00.0-00.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	101.518.000,00	41.879.190,00	(59.638.810,00)	41,25
4.2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	40.000.000,00	500.000,00	(39.500.000,00)	1,25
4.2.18	PENANAMAN MODAL	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	0
4.2.18.2-18.0-00.0-00.01	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	0
4.2.19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	0,00	500.000,00	500.000,00	0
4.2.19.2-19.0-00.0-00.01	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	0,00	500.000,00	500.000,00	0
4.3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	430.352.000,00	326.057.900,00	(104.294.100,00)	75,77
4.3.25	KELAUTAN DAN PERIKANAN	245.400.000,00	125.400.000,00	(120.000.000,00)	51,10
4.3.25.3-25.0-00.0-00.01	DINAS PERIKANAN	245.400.000,00	125.400.000,00	(120.000.000,00)	51,10
4.3.26	PAHAWISATA	5.000.000,00	3.734.400,00	(1.265.600,00)	74,69
4.3.26.3-26.0-00.0-00.01	DINAS PAHAWISATA	5.000.000,00	3.734.400,00	(1.265.600,00)	74,69
4.3.31	PERINDUSTRIAN	179.952.000,00	196.923.500,00	16.971.500,00	109,43
4.3.31.3-31.3-30.0-00.01	DINAS PERINDUSTRIAN	179.952.000,00	196.923.500,00	16.971.500,00	109,43
4.4	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	52.786.000,00	32.682.000,00	(20.104.000,00)	61,88
4.4.01	SEKRETARIAT DAERAH	52.786.000,00	32.682.000,00	(20.104.000,00)	61,88
4.4.01.4-01.0-00.0-00.01	SEKRETARIAT DAERAH	52.786.000,00	32.682.000,00	(20.104.000,00)	61,88
4.5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	628.589.968.426,00	617.794.774.765,11	(10.795.213.662,89)	98,28
4.5.02	KELUANGAN	628.589.968.426,00	617.794.774.765,11	(10.795.213.662,89)	98,28
4.5.02.5-02.0-00.0-00.01	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	628.589.968.426,00	617.794.774.765,11	(10.795.213.662,89)	98,28
5	BELANJA DAERAH	688.078.854.364,51	663.378.058.096,15	(24.700.796.268,36)	95,03
5.1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	371.806.103.557,28	352.208.614.987,15	(19.597.488.570,13)	94,73
5.1.01	PENDIDIKAN	129.879.270.446,78	122.927.664.657,00	(6.951.605.789,78)	94,65
5.1.01.1-01.2-22.0-00.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	129.879.270.446,78	122.927.664.657,00	(6.951.605.789,78)	94,65



bu

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.1.01.1-01.2-22.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	119.504.087.890,00	112.146.726.796,00	(7.357.361.094,00)	94,64
5.1.01.1-01.2-22.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	87.890.267.485,00	81.727.328.006,00	(6.162.939.479,00)	93,31
5.1.01.1-01.2-22.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.494.271.425,00	28.021.039.966,00	(473.231.459,00)	98,34
5.1.01.1-01.2-22.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	2.353.029.000,00	2.351.358.824,00	(1.670.176,00)	99,93
5.1.01.1-01.2-22.0-00.01.1.06	Belanja Bantuan Sosial	68.000.000,00	47.000.000,00	(19.000.000,00)	70,68
5.1.01.1-01.2-22.0-00.01.2	BELANJA MODAL	11.375.202.558,78	10.780.937.661,00	(594.264.897,78)	94,78
5.1.01.1-01.2-22.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.777.606.000,00	1.760.265.361,00	(17.340.639,00)	98,92
5.1.01.1-01.2-22.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.181.674.556,78	8.811.739.590,00	(369.935.066,78)	96,74
5.1.01.1-01.2-22.0-00.01.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	115.922.000,00	114.339.000,00	(1.583.000,00)	98,53
5.1.01.1-01.2-22.0-00.01.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	360.000.000,00	294.594.000,00	(65.406.000,00)	81,83
5.1.02	KESEHATAN	114.485.391.153,50	105.240.232.208,15	(9.245.159.945,35)	91,92
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01	DINAS KESEHATAN	114.485.391.153,50	105.240.232.208,15	(9.245.159.945,35)	91,92
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	103.135.478.438,50	95.338.094.184,15	(7.797.384.254,35)	92,44
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	54.345.816.375,00	50.546.288.721,00	(3.799.527.654,00)	93,01
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.789.662.063,50	44.792.805.463,15	(3.996.856.598,35)	91,81
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	11.349.912.715,00	9.901.138.024,00	(1.448.774.691,00)	87,24
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.258.869.452,00	6.703.826.024,00	(555.043.428,00)	92,35
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.091.043.263,00	3.197.312.000,00	(893.731.263,00)	78,15
5.1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	82.825.054.367,00	81.704.262.550,00	(1.120.771.817,00)	98,65
5.1.03.1-03.0-00.0-00.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	82.825.054.367,00	81.704.262.550,00	(1.120.771.817,00)	98,65
5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	19.255.967.485,00	18.418.129.825,00	(837.837.660,00)	95,65
5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	3.595.921.977,00	3.417.032.612,00	(178.889.365,00)	95,03
5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.983.437.138,00	12.326.488.663,00	(656.948.475,00)	94,94
5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	2.676.608.350,00	2.674.608.350,00	(2.000.000,00)	99,93
5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	63.569.086.902,00	63.286.152.725,00	(282.934.177,00)	99,55
5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.210.860,00	49.578.000,00	(632.860,00)	98,74
5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	523.344.000,00	523.026.000,00	(318.000,00)	99,94
5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.2.04	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi	62.395.532.052,00	62.116.118.475,00	(277.413.577,00)	99,56
5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	600.000.000,00	595.430.250,00	(4.569.750,00)	99,24
5.1.04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	32.582.204.156,00	31.114.534.791,00	(1.467.669.365,00)	95,50
5.1.04.1-04.2-10.0-00.01	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	32.582.204.156,00	31.114.534.791,00	(1.467.669.365,00)	95,50
5.1.04.1-04.2-10.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	23.784.130.056,00	23.338.942.511,00	(444.177.545,00)	98,13
5.1.04.1-04.2-10.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	1.663.436.244,00	1.601.518.377,00	(61.917.867,00)	96,28
5.1.04.1-04.2-10.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.888.683.812,00	6.512.424.134,00	(376.259.678,00)	94,54
5.1.04.1-04.2-10.0-00.01.1.06	Belanja Bantuan Sosial	15.032.000.000,00	15.026.000.000,00	(6.000.000,00)	99,96
5.1.04.1-04.2-10.0-00.01.2	BELANJA MODAL	8.798.064.100,00	7.774.592.280,00	(1.023.471.820,00)	88,37
5.1.04.1-04.2-10.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	194.261.100,00	176.212.000,00	(18.049.100,00)	90,71
5.1.04.1-04.2-10.0-00.01.2.04	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi	8.603.823.000,00	7.598.380.280,00	(1.005.442.720,00)	88,31
5.1.05	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	7.561.244.703,00	7.077.840.670,00	(483.404.033,00)	93,61
5.1.05.1-05.0-00.0-00.01	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.029.059.710,00	2.798.415.817,00	(229.643.893,00)	92,42

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.1.05.1.05.0.00.0.00.01.1	BELANJA OPERASI	3.028.058.710,00	2.799.415.817,00	(229.643.893,00)	92,42
5.1.05.1.05.0.00.0.00.01.1.01	Belanja Pegawai	1.976.826.000,00	1.828.344.866,00	(148.581.334,00)	92,48
5.1.05.1.05.0.00.0.00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.052.233.710,00	971.171.151,00	(81.062.559,00)	92,30
5.1.05.1.05.0.00.0.00.02	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	4.532.184.893,00	4.278.424.253,00	(253.760.740,00)	94,40
5.1.05.1.05.0.00.0.00.02.1	BELANJA OPERASI	4.532.184.893,00	4.278.424.253,00	(253.760.740,00)	94,40
5.1.05.1.05.0.00.0.00.02.1.01	Belanja Pegawai	2.028.516.453,00	1.795.820.753,00	(232.695.700,00)	88,52
5.1.05.1.05.0.00.0.00.02.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.503.668.540,00	2.482.797.500,00	(20.871.040,00)	99,17
5.1.06	SOSIAL	4.474.938.731,00	4.144.060.711,00	(330.878.020,00)	92,61
5.1.06.1.06.0.00.0.00.01	DINAS SOSIAL	4.474.938.731,00	4.144.060.711,00	(330.878.020,00)	92,61
5.1.06.1.06.0.00.0.00.01.1	BELANJA OPERASI	4.451.898.241,00	4.121.960.711,00	(330.336.530,00)	92,58
5.1.06.1.06.0.00.0.00.01.1.01	Belanja Pegawai	2.338.318.829,00	2.197.633.822,00	(140.684.807,00)	93,98
5.1.06.1.06.0.00.0.00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.247.470.352,00	1.219.630.389,00	(27.845.963,00)	97,77
5.1.06.1.06.0.00.0.00.01.1.03	Belanja Bantuan Sosial	868.101.260,00	704.296.500,00	(161.804.760,00)	81,32
5.1.06.1.06.0.00.0.00.01.2	BELANJA MODAL	23.042.490,00	22.500.000,00	(542.490,00)	97,65
5.1.06.1.06.0.00.0.00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.042.490,00	22.500.000,00	(542.490,00)	97,65
5.2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	46.824.248.568,50	46.892.063.103,00	(1.932.185.465,50)	96,04
5.2.09	PANGAN	3.862.190.278,00	3.767.243.406,00	(94.946.872,00)	97,54
5.2.09.2.09.0.00.0.00.01	DINAS KETAHANAN PANGAN	3.862.190.278,00	3.767.243.406,00	(94.946.872,00)	97,54
5.2.09.2.09.0.00.0.00.01.1	BELANJA OPERASI	3.862.190.278,00	3.767.243.406,00	(94.946.872,00)	97,54
5.2.09.2.09.0.00.0.00.01.1.01	Belanja Pegawai	1.691.630.899,00	1.607.517.812,00	(84.113.087,00)	95,03
5.2.09.2.09.0.00.0.00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.473.959.379,00	1.463.125.594,00	(10.833.785,00)	99,26
5.2.09.2.09.0.00.0.00.01.1.04	Belanja Subsidi	696.600.000,00	696.600.000,00	0,00	100,00
5.2.11	LINGKUNGAN HIDUP	5.470.804.850,00	5.272.020.980,00	(198.783.870,00)	96,37
5.2.11.2.11.0.00.0.00.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	5.470.804.850,00	5.272.020.980,00	(198.783.870,00)	96,37
5.2.11.2.11.0.00.0.00.01.1	BELANJA OPERASI	4.940.804.850,00	4.542.020.980,00	(398.783.870,00)	95,89
5.2.11.2.11.0.00.0.00.01.1.01	Belanja Pegawai	2.113.286.024,00	1.975.803.457,00	(137.484.567,00)	93,49
5.2.11.2.11.0.00.0.00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.727.518.826,00	2.866.217.523,00	(138.698.703,00)	97,75
5.2.11.2.11.0.00.0.00.01.2	BELANJA MODAL	630.000.000,00	630.000.000,00	0,00	100,00
5.2.11.2.11.0.00.0.00.01.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	630.000.000,00	630.000.000,00	0,00	100,00
5.2.12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.132.402.451,00	3.027.543.519,00	(104.858.932,00)	96,65
5.2.12.2.12.0.00.0.00.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.132.402.451,00	3.027.543.519,00	(104.858.932,00)	96,65
5.2.12.2.12.0.00.0.00.01.1	BELANJA OPERASI	3.045.152.451,00	2.940.443.519,00	(104.708.932,00)	96,56
5.2.12.2.12.0.00.0.00.01.1.01	Belanja Pegawai	1.919.792.858,00	1.819.395.858,00	(100.396.999,00)	94,77
5.2.12.2.12.0.00.0.00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.125.359.795,00	1.121.047.661,00	(4.312.134,00)	99,62
5.2.12.2.12.0.00.0.00.01.2	BELANJA MODAL	87.250.000,00	87.100.000,00	(150.000,00)	99,83
5.2.12.2.12.0.00.0.00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	87.250.000,00	87.100.000,00	(150.000,00)	99,83
5.2.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.148.746.929,00	3.921.842.699,00	(226.904.230,00)	94,53
5.2.13.2.13.0.00.0.00.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.148.746.929,00	3.921.842.699,00	(226.904.230,00)	94,53
5.2.13.2.13.0.00.0.00.01.1	BELANJA OPERASI	4.102.126.929,00	3.875.397.699,00	(226.729.230,00)	94,47
5.2.13.2.13.0.00.0.00.01.1.01	Belanja Pegawai	1.883.772.584,00	1.801.402.634,00	(82.369.950,00)	95,63



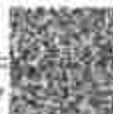
KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.2.13.2-13.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.218.354.365,00	2.073.994.665,00	(144.359.500,00)	93,49
5.2.13.2-13.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	46.620.000,00	46.545.000,00	(75.000,00)	99,84
5.2.13.2-13.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.620.000,00	46.545.000,00	(75.000,00)	99,84
5.2.14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	7.763.334.567,00	7.398.189.782,00	(365.134.785,00)	95,05
5.2.14.2-14.2-08.0-00.01	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7.763.334.567,00	7.398.189.782,00	(365.134.785,00)	95,05
5.2.14.2-14.2-08.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	6.948.589.567,00	6.585.914.782,00	(362.674.785,00)	94,78
5.2.14.2-14.2-08.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	2.031.445.888,00	1.887.111.422,00	(144.334.267,00)	92,89
5.2.14.2-14.2-08.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.917.153.878,00	4.698.803.260,00	(218.350.518,00)	95,56
5.2.14.2-14.2-08.0-00.01.2	BELANJA MODAL	834.735.000,00	812.285.000,00	(22.450.000,00)	97,31
5.2.14.2-14.2-08.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	834.735.000,00	812.285.000,00	(22.450.000,00)	97,31
5.2.15	PERHUBUNGAN	3.630.955.881,00	3.505.412.386,00	(125.543.295,00)	96,54
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01	DINAS PERHUBUNGAN	3.630.955.881,00	3.505.412.386,00	(125.543.295,00)	96,54
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	3.600.042.181,00	3.475.441.386,00	(123.600.795,00)	96,57
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	1.793.632.541,00	1.707.572.936,00	(86.059.605,00)	95,20
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.806.408.640,00	1.768.868.450,00	(37.541.190,00)	97,92
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	30.913.500,00	28.971.000,00	(1.942.500,00)	93,72
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.913.500,00	28.971.000,00	(1.942.500,00)	93,72
5.2.16	KOMUNIKASI & INFORMATIKA	6.191.748.625,00	6.074.450.937,00	(117.297.688,00)	98,11
5.2.16.2-16.2-21.2-20.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6.191.748.625,00	6.074.450.937,00	(117.297.688,00)	98,11
5.2.16.2-16.2-21.2-20.01.1	BELANJA OPERASI	6.191.748.625,00	6.074.450.937,00	(117.297.688,00)	98,11
5.2.16.2-16.2-21.2-20.01.1.01	Belanja Pegawai	2.366.685.725,00	2.268.397.712,00	(98.288.013,00)	95,85
5.2.16.2-16.2-21.2-20.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.825.062.900,00	3.806.053.225,00	(19.009.675,00)	99,50
5.2.17	KOPERASI USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5.956.186.857,00	5.727.876.443,00	(228.310.414,00)	96,17
5.2.17.2-17.3-32.2-07.01	DINAS KOPERASI DAN UKM, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	5.956.186.857,00	5.727.876.443,00	(228.310.414,00)	96,17
5.2.17.2-17.3-32.2-07.01.1	BELANJA OPERASI	5.883.027.867,00	5.854.718.443,00	(28.309.424,00)	99,12
5.2.17.2-17.3-32.2-07.01.1.01	Belanja Pegawai	1.822.629.817,00	1.847.789.890,00	(74.838.927,00)	98,11
5.2.17.2-17.3-32.2-07.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.726.001.560,00	3.562.129.953,00	(143.871.607,00)	95,14
5.2.17.2-17.3-32.2-07.01.1.05	Belanja Hibah	234.396.000,00	224.798.500,00	(9.597.500,00)	96,91
5.2.17.2-17.3-32.2-07.01.2	BELANJA MODAL	73.158.990,00	73.158.000,00	(990,00)	100,00
5.2.17.2-17.3-32.2-07.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	73.158.990,00	73.158.000,00	(990,00)	100,00
5.2.18	PENANAMAN MODAL	2.911.607.660,50	2.765.896.248,00	(145.711.412,50)	95,00
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.911.607.660,50	2.765.896.248,00	(145.711.412,50)	95,00
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	2.556.633.640,50	2.412.244.248,00	(144.589.392,50)	94,34
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	1.800.635.900,00	1.795.267.423,00	(104.868.477,00)	94,48
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	656.197.740,50	616.476.625,00	(39.720.915,50)	93,95
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	354.774.020,00	353.652.000,00	(1.122.020,00)	99,68
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	354.774.020,00	353.652.000,00	(1.122.020,00)	99,68
5.2.19	KEPEMUDAAN DAN OLARAHAGA	3.364.596.771,00	3.162.499.382,00	(202.097.389,00)	93,99
5.2.19.2-19.0-00.0-00.01	DINAS PEMUDA DAN OLARAHAGA	3.364.596.771,00	3.162.499.382,00	(202.097.389,00)	93,99

60



KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.2.19.2-19.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	3.219.355.821,00	3.030.825.482,00	(188.530.339,00)	94,14
5.2.19.2-19.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	1.440.083.245,00	1.343.518.580,00	(96.564.665,00)	93,29
5.2.19.2-19.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.751.577.876,00	1.659.512.422,00	(91.965.454,00)	94,75
5.2.19.2-19.0-00.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	27.694.500,00	27.694.500,00	0,00	100,00
5.2.19.3-19.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	145.241.150,00	131.873.900,00	(13.367.250,00)	90,86
5.2.19.3-19.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	145.241.150,00	131.873.900,00	(13.367.250,00)	90,86
5.2.23	PERPUSTAKAAN	2.371.873.899,00	2.268.997.321,00	(102.876.578,00)	95,67
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01	DINAS PERPUSTAKAAN	2.371.873.899,00	2.268.997.321,00	(102.876.578,00)	95,67
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	2.350.306.399,00	2.247.829.821,00	(102.476.578,00)	95,63
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	1.652.431.895,00	1.568.599.799,00	(83.832.096,00)	94,95
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	697.874.504,00	678.630.022,00	(19.244.482,00)	97,24
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.2	BELANJA MODAL	21.367.500,00	21.367.500,00	0,00	100,00
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.367.500,00	21.367.500,00	0,00	100,00
5.3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	17.770.871.726,28	16.768.732.682,00	(1.002.139.044,28)	94,36
5.3.25	KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.839.306.286,00	4.708.261.377,00	(131.044.909,00)	97,29
5.3.25.3-25.0-00.0-00.01	DINAS PERIKANAN	4.839.306.286,00	4.708.261.377,00	(131.044.909,00)	97,29
5.3.25.3-25.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	4.839.306.286,00	4.708.261.377,00	(131.044.909,00)	97,29
5.3.25.3-25.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	1.854.404.841,00	1.851.043.671,00	(102.381.170,00)	94,71
5.3.25.3-25.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	619.111.445,00	592.817.708,00	(26.293.739,00)	95,75
5.3.25.3-25.0-00.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	2.265.790.000,00	2.264.400.000,00	(1.390.000,00)	99,94
5.3.26	PARAWISATA	2.939.844.609,00	2.813.640.961,00	(126.203.648,00)	95,71
5.3.26.3-26.0-00.0-00.01	DINAS PARIWISATA	2.939.844.609,00	2.813.640.961,00	(126.203.648,00)	95,71
5.3.26.3-26.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	2.897.138.609,00	2.770.984.961,00	(126.153.648,00)	95,65
5.3.26.3-26.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	2.008.682.109,00	1.911.926.009,00	(96.766.100,00)	95,18
5.3.26.3-26.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	888.446.500,00	859.058.952,00	(29.387.548,00)	96,69
5.3.26.3-26.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	42.706.000,00	42.656.000,00	(50.000,00)	99,88
5.3.26.3-26.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.706.000,00	42.656.000,00	(50.000,00)	99,88
5.3.27	PERTANIAN	6.582.126.756,00	6.009.901.863,00	(572.224.893,00)	91,31
5.3.27.3-27.0-00.0-00.01	DINAS PERTANIAN	6.582.126.756,00	6.009.901.863,00	(572.224.893,00)	91,31
5.3.27.3-27.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	6.580.846.756,00	6.009.901.863,00	(570.944.893,00)	91,32
5.3.27.3-27.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	5.267.942.928,00	4.786.531.646,00	(501.311.282,00)	90,52
5.3.27.3-27.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.292.903.830,00	1.223.270.217,00	(69.633.613,00)	94,61
5.3.27.3-27.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	1.280.000,00	0,00	(1.280.000,00)	0
5.3.27.3-27.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.280.000,00	0,00	(1.280.000,00)	0
5.3.31	PERINDUSTRIAN	3.409.594.073,28	3.236.928.481,00	(172.665.592,28)	94,94
5.3.31.3-31.3-30.0-00.01	DINAS PERINDUSTRIAN	3.409.594.073,28	3.236.928.481,00	(172.665.592,28)	94,94
5.3.31.3-31.3-30.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	3.147.424.073,28	2.983.905.481,00	(163.518.592,28)	94,80
5.3.31.3-31.3-30.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	1.887.707.846,00	1.812.873.631,00	(74.834.215,00)	96,04
5.3.31.3-31.3-30.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	720.871.790,00	636.087.850,00	(84.803.930,00)	88,24
5.3.31.3-31.3-30.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	538.844.447,28	534.964.000,00	(3.980.447,28)	99,26

Ev





3

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG)
5.3.1.3.1-3.30-0.00.01.2	BELAJA MODAL	262.170.000,00	253.123.000,00	9.047.000,00
5.3.1.3.1-3.30-0.00.01.2.02	Belanja Modal Perawatan dan Meran	52.170.000,00	51.390.000,00	800.000,00
5.3.1.3.1-3.30-0.00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	210.000.000,00	201.773.000,00	8.227.000,00
5.4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	63.442.042.934,00	60.322.878.307,00	3.119.164.623,00
5.4.M	SEKRETARIAT DAERAH	35.757.094.738,00	33.420.819.803,00	2.336.478.935,00
5.4.M.4-01-0.00-0.00.01	SEKRETARIAT DAERAH	35.757.094.738,00	33.420.819.803,00	2.336.478.935,00
5.4.M.4-01-0.00-0.00.01.01	Belanja Pegawai	12.868.438.734,00	12.168.794.410,00	699.704.324,00
5.4.M.4-01-0.00-0.00.01.02	Belanja Barang dan Jasa	20.882.064.465,00	19.298.370.823,00	1.589.713.642,00
5.4.M.4-01-0.00-0.00.01.06	Belanja Bantuan Sosial	210.000.000,00	200.000.000,00	10.000.000,00
5.4.M.4-01-0.00-0.00.01.2	BELAJA MODAL	1.788.271.638,00	1.757.510.570,00	31.761.068,00
5.4.M.4-01-0.00-0.00.01.2.02	Belanja Modal Perawatan dan Meran	1.568.588.239,00	1.537.737.600,00	30.850.639,00
5.4.M.4-01-0.00-0.00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	219.683.399,00	219.772.970,00	(219.300,00)
5.4.M.4-02-0.00-0.00.02	SEKRETARIAT OPD	27.564.948.196,00	26.302.082.498,00	1.262.865.698,00
5.4.M.4-02-0.00-0.00.02.01	BELAJA OPERASI	20.454.022.098,00	24.587.844.898,00	(4.133.822.800,00)
5.4.M.4-02-0.00-0.00.02.02	Belanja Pegawai	6.607.604.887,00	6.998.234.999,00	(390.630.112,00)
5.4.M.4-02-0.00-0.00.02.03	Belanja Barang dan Jasa	13.846.417.211,00	13.889.609.899,00	(43.192.688,00)
5.4.M.4-02-0.00-0.00.02.04	BELAJA MODAL	2.230.318.190,00	2.214.217.800,00	16.100.390,00
5.4.M.4-02-0.00-0.00.02.05	Belanja Modal Perawatan dan Meran	2.230.318.190,00	2.214.217.800,00	16.100.390,00
5.5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	141.404.357.205,45	133.889.807.721,00	7.514.549.484,45
5.5.01	PERENCANAAN	8.891.222.244,00	8.450.757.940,00	440.484.304,00
5.5.01.5-01.5-05-0.00.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	8.891.222.244,00	8.450.757.940,00	440.484.304,00
5.5.01.5-01.5-05-0.00.01.1	BELAJA OPERASI	8.852.985.878,00	8.287.110.940,00	565.874.938,00
5.5.01.5-01.5-05-0.00.01.1.01	Belanja Pegawai	4.236.605.487,00	4.041.814.833,00	194.790.654,00
5.5.01.5-01.5-05-0.00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.616.380.391,00	4.245.296.107,00	371.084.284,00
5.5.01.5-01.5-05-0.00.01.2	BELAJA MODAL	188.266.630,00	183.647.000,00	4.619.630,00
5.5.01.5-01.5-05-0.00.01.2.02	Belanja Modal Perawatan dan Meran	188.266.630,00	183.647.000,00	4.619.630,00
5.5.02	KEUANGAN	127.588.862.419,45	120.502.400.485,00	7.086.461.934,45
5.5.02.5-02-0.00-0.00.01	BADAK PENGOLOAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	127.588.862.419,45	120.502.400.485,00	7.086.461.934,45
5.5.02.5-02-0.00-0.00.01.1	BELAJA OPERASI	21.456.059.956,45	15.983.948.560,00	5.472.111.396,45
5.5.02.5-02-0.00-0.00.01.1.01	Belanja Pegawai	9.785.720.378,45	9.545.713.403,00	239.006.975,45
5.5.02.5-02-0.00-0.00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.700.338.578,00	9.418.235.157,00	2.282.104.421,00
5.5.02.5-02-0.00-0.00.01.2	BELAJA MODAL	80.106.500,00	59.549.500,00	20.557.000,00
5.5.02.5-02-0.00-0.00.01.2.02	Belanja Modal Perawatan dan Meran	80.106.500,00	59.549.500,00	20.557.000,00
5.5.02.5-02-0.00-0.00.01.3	BELAJA TIDAK TERDUGA	2.852.134.000,00	1.661.945.000,00	1.190.189.000,00
5.5.02.5-02-0.00-0.00.01.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.852.134.000,00	1.661.945.000,00	1.190.189.000,00
5.5.02.5-02-0.00-0.00.01.4	BELAJA TRANSFER	103.177.261.983,00	102.916.857.425,00	260.404.558,00
5.5.02.5-02-0.00-0.00.01.4.01	Belanja Bagi Hasil	801.385.492,00	587.831.875,00	213.553.617,00
5.5.02.5-02-0.00-0.00.01.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	102.375.876.491,00	102.328.925.550,00	46.950.870,50
5.3.1.3.1-3.30-0.00.01.2	BERTAMBAH / (BERKURANG)	(%)	(Rp)	(%)

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.5.01	KEPEGAWAIAN	4.927.472.542,00	4.706.749.296,00	(220.723.246,00)	95,52
5.5.01.5-03.5-04.0-00.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	4.927.472.542,00	4.706.749.296,00	(220.723.246,00)	95,52
5.5.01.5-03.5-04.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	4.903.385.542,00	4.683.419.296,00	(219.966.246,00)	95,51
5.5.01.5-03.5-04.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	3.185.363.881,00	2.963.646.178,00	(201.717.503,00)	93,67
5.5.01.5-03.5-04.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.718.021.661,00	1.699.773.118,00	(18.248.543,00)	98,94
5.5.01.5-03.5-04.0-00.01.2	BELANJA MODAL	24.087.000,00	23.330.000,00	(757.000,00)	96,89
5.5.01.5-03.5-04.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.087.000,00	23.330.000,00	(757.000,00)	96,89
5.6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	12.756.108.828,00	12.532.406.725,00	(223.702.103,00)	98,25
5.6.01	INSPEKTORAT	12.756.108.828,00	12.532.406.725,00	(223.702.103,00)	98,25
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01	INSPEKTORAT DAERAH	12.756.108.828,00	12.532.406.725,00	(223.702.103,00)	98,25
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	12.566.518.728,00	12.343.252.480,00	(223.266.248,00)	98,22
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	6.731.845.111,00	6.573.358.440,00	(158.486.671,00)	97,65
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.834.673.617,00	5.769.843.960,00	(64.829.657,00)	98,89
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	189.590.100,00	189.204.325,00	(385.775,00)	99,80
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	189.590.100,00	189.204.325,00	(385.775,00)	99,80
5.7	UNSUR KEWILAYAHAN	13.292.501.311,00	12.575.936.404,00	(716.564.907,00)	94,61
5.7.01	KECAMATAN	13.292.501.311,00	12.575.936.404,00	(716.564.907,00)	94,61
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01	KECAMATAN PINOLOSAN	1.956.238.381,00	1.798.991.944,00	(157.246.437,00)	91,95
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	1.942.468.381,00	1.790.821.944,00	(151.646.437,00)	91,91
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	1.619.213.565,00	1.489.462.554,00	(129.751.006,00)	91,99
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	329.254.821,00	301.439.390,00	(27.815.431,00)	91,55
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	7.770.000,00	7.770.000,00	0,00	100,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.770.000,00	7.770.000,00	0,00	100,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02	KECAMATAN PINOLOSAN TIMUR	2.049.116.842,00	1.942.592.205,00	(97.524.437,00)	95,22
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.1	BELANJA OPERASI	2.049.116.842,00	1.942.592.205,00	(97.524.437,00)	95,22
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.1.01	Belanja Pegawai	1.667.034.442,00	1.614.074.205,00	(52.960.237,00)	96,82
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.1.02	Belanja Barang dan Jasa	379.082.200,00	328.518.000,00	(44.564.200,00)	88,06
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03	KECAMATAN HELUMO	1.566.862.911,00	1.467.752.406,00	(99.110.505,00)	93,67
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.1	BELANJA OPERASI	1.540.352.271,00	1.441.241.908,00	(99.110.363,00)	93,57
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.1.01	Belanja Pegawai	1.196.683.959,00	1.107.916.156,00	(88.767.803,00)	92,58
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.1.02	Belanja Barang dan Jasa	343.668.312,00	333.325.750,00	(10.342.562,00)	96,99
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.2	BELANJA MODAL	26.510.640,00	26.510.500,00	(140,00)	100,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.510.640,00	26.510.500,00	(140,00)	100,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04	KECAMATAN POSIGADAN	2.094.520.740,00	1.895.548.145,00	(98.972.595,00)	95,27
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.1	BELANJA OPERASI	2.094.520.740,00	1.895.548.145,00	(98.972.595,00)	95,27
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.1.01	Belanja Pegawai	1.727.923.270,00	1.566.653.622,00	(161.269.648,00)	96,45
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.1.02	Belanja Barang dan Jasa	366.597.470,00	328.894.523,00	(37.702.947,00)	89,72
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05	KECAMATAN BOLAANG UKI	1.998.057.303,00	1.900.828.463,00	(97.228.840,00)	95,13
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.1	BELANJA OPERASI	1.998.057.303,00	1.900.828.463,00	(97.228.840,00)	95,13
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.1.01	Belanja Pegawai	1.618.816.823,00	1.543.727.313,00	(75.089.510,00)	95,36

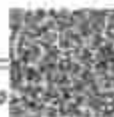
SW



KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.1.02	Belanja Barang dan Jasa	379.240.800,00	357.101.150,00	(22.139.650,00)	94,16
5.7.01.7-01.0-00.0-00.06	KECAMATAN PIMOLOSAN TENGAH	1.757.700.442,00	1.691.820.902,00	(65.879.540,00)	96,25
5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.1	BELANJA OPERASI	1.749.890.372,00	1.684.820.902,00	(65.069.470,00)	96,28
5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.1.01	Belanja Pegawai	1.401.773.822,00	1.344.168.152,00	(57.585.670,00)	95,89
5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.1.02	Belanja Barang dan Jasa	348.116.750,00	340.652.750,00	(7.464.000,00)	97,85
5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.2	BELANJA MODAL	7.816.070,00	7.000.000,00	(816.070,00)	89,56
5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.2.02	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	7.816.070,00	7.000.000,00	(816.070,00)	89,56
5.7.01.7-01.0-00.0-00.07	KECAMATAN TOMINI	1.878.998.892,00	1.778.702.339,00	(100.296.553,00)	94,66
5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.1	BELANJA OPERASI	1.878.998.892,00	1.778.702.339,00	(100.296.553,00)	94,66
5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.1.01	Belanja Pegawai	1.519.326.313,00	1.470.026.589,00	(49.299.724,00)	96,78
5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.1.02	Belanja Barang dan Jasa	359.672.579,00	308.675.750,00	(50.996.829,00)	85,82
5.8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	26.780.620.234,00	26.417.698.173,00	(362.922.061,00)	98,74
5.8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	26.780.620.234,00	26.417.698.173,00	(362.922.061,00)	98,74
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	26.780.620.234,00	26.417.698.173,00	(362.922.061,00)	98,74
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	26.780.620.234,00	26.417.698.173,00	(362.922.061,00)	98,74
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	881.862.470,00	828.580.828,00	(53.271.642,00)	93,62
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.223.530.416,00	1.941.880.997,00	(281.649.419,00)	87,33
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	25.675.227.348,00	25.660.227.348,00	(15.000,00)	99,90
6	PEMBIAYAAN DAERAH	58.749.741.536,51	59.060.363.578,51	310.622.042,00	100,53
6.1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	0,00	16.195,00	16.195,00	0
6.1.01	PENDIDIKAN	0,00	16.195,00	16.195,00	0
6.1.01.1-01.2-22.0-00.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0,00	16.195,00	16.195,00	0
6.1.01.1-01.2-22.0-00.01.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	16.195,00	16.195,00	0
6.1.01.1-01.2-22.0-00.01.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	16.195,00	16.195,00	0
6.5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	58.749.741.536,51	59.060.363.578,51	310.622.042,00	100,53
6.5.02	KEUANGAN	58.749.741.536,51	59.060.363.578,51	310.622.042,00	100,53
6.5.02.5-02.0-00.0-00.01	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	58.749.741.536,51	59.060.363.578,51	310.622.042,00	100,53
6.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	58.749.741.536,51	59.060.363.578,51	310.622.042,00	100,53
6.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	46.670.594.736,51	46.861.216.778,51	210.622.042,00	100,68
6.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1.02	Penerimaan Dana Cadangan	13.179.146.800,00	13.179.146.800,00	0,00	100,00

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ISKANDAR KAMARUDDIN



Lampiran 1.2 : Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Tahun Anggaran 2024

Nomor : 1 Tahun 2025
Tanggal : 4 Agustus 2025



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	(%)	REALISASI 2023
PENDAPATAN - LRA	639.329.112.828,00	629.230.718.390,11	98,42	550.993.406.926,21
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	20.088.994.856,00	22.198.440.925,11	110,50	21.060.974.474,21
Pendapatan Pajak Daerah	4.750.287.502,00	6.073.470.873,00	127,85	7.358.403.697,00
Pendapatan Retribusi Daerah	10.448.422.400,00	11.273.645.225,00	107,89	9.049.035.543,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	640.020.357,00	640.020.257,00	100,00	532.969.455,00
Lain-lain PAD yang Sah	4.249.264.597,00	4.211.304.470,11	99,11	4.118.565.779,21
PENDAPATAN TRANSFER	612.741.829.148,00	602.860.904.972,00	98,39	525.894.086.045,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	587.361.302.613,00	586.294.368.350,00	99,82	507.809.340.110,00
Dana Perimbangan	524.970.635.613,00	512.267.844.350,00	97,58	439.590.536.110,00
Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	-	6.313.683.000,00
Dana Desa	62.390.667.000,00	62.285.601.000,00	99,83	61.905.121.000,00
Insentif Fisikal	-	11.740.923.000,00	-	-
Pendapatan Transfer Antar Daerah	25.380.526.535,00	16.566.536.622,00	65,27	18.084.745.935,00
Pendapatan Bagi Hasil	25.380.526.535,00	16.566.536.622,00	65,27	18.084.745.935,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.498.288.824,00	4.171.370.483,00	64,19	4.038.346.407,00
Pendapatan Hibah	-	500.000,00	-	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	6.498.288.824,00	4.170.870.483,00	64,18	4.038.346.407,00
BELANJA	698.078.854.364,51	663.378.058.096,15	95,03	564.100.504.056,00
BELANJA OPERASI	489.870.178.801,73	460.184.563.685,15	93,94	385.677.888.668,00
Belanja Pegawai	243.600.092.353,45	223.670.587.199,00	92,82	202.467.128.676,00
Belanja Barang dan Jasa	195.577.295.643,00	184.112.128.465,15	94,14	167.626.124.422,00
Belanja Subsidi	696.600.000,00	696.600.000,00	100,00	-
Belanja Hibah	33.771.589.645,28	33.727.351.522,00	99,87	6.046.729.170,00
Belanja Bantuan Sosial	16.174.601.360,00	13.977.296.500,00	86,78	7.537.906.400,00

Handwritten signature

URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	(%)	REALISASI 2023
BELANJA MODAL	102.179.279.599,78	98.714.591.985,00	96,61	75.186.425.871,00
Belanja Modal Tanah	-	-	-	694.407.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.306.677.426,00	14.510.106.510,00	95,45	13.719.412.601,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	14.227.325.121,78	12.753.623.470,00	89,64	11.924.655.670,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	71.629.355.052,00	70.346.498.755,00	98,21	47.729.991.400,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	115.922.000,00	114.339.000,00	98,63	1.117.959.200,00
Belanja Modal Aset Lainnya	900.000.000,00	890.024.250,00	98,89	-
BELANJA TAK TERDUGA	2.852.134.000,00	1.661.945.000,00	58,27	687.000.000,00
Belanja Tak Terduga	2.852.134.000,00	1.661.945.000,00	58,27	687.000.000,00
BELANJA TRANSFER	103.177.261.963,00	102.816.957.425,00	99,65	102.549.189.517,00
Belanja Bagi Hasil	801.385.142,00	587.011.875,00	73,25	703.058.917,00
Belanja Bantuan Keuangan	102.375.876.821,00	102.229.925.550,00	99,86	101.846.130.600,00
SURPLUS / (DEFISIT)	(58.749.741.536,51)	(34.147.341.706,04)	58,13	(13.107.097.129,79)
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	58.749.741.536,51	59.060.379.773,51	100,54	66.177.691.866,30
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun-Sebelumnya	45.570.594.736,51	45.881.232.973,51	100,69	64.356.838.666,30
Pencairan Dana Cadangan	13.179.146.800,00	13.179.146.800,00	100,00	1.820.853.200,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-	7.500.000.000,00
Perliberikan Dana Cadangan	-	-	-	7.500.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO	58.749.741.536,51	59.060.379.773,51	100,54	58.677.691.866,30
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	24.913.038.067,47	-	45.570.594.736,51

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ISKANDAR KAMARU

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Tahun Anggaran 2024

Nomor : 1 Tahun 2025
Tanggal : 4 Agustus 2025

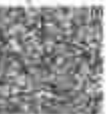


PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Tahun Anggaran 2024

Urusan Pemerintahan : 1.01 PENDIDIKAN
Organisasi : 1-01.2-22.0-00.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	129.879.270.446,78	122.927.664.657,00	(6.951.605.789,78)	94,65	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	87.922.408.415,00	82.038.022.188,00	(5.884.386.227,00)	93,30	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	87.236.347.840,00	81.381.948.886,00	(5.854.398.954,00)	93,30	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	87.183.707.465,00	81.337.670.506,00	(5.846.036.959,00)	93,29	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	87.183.707.465,00	81.337.670.506,00	(5.846.036.959,00)	93,29	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	87.183.707.465,00	81.337.670.506,00	(5.846.036.959,00)	93,29	
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	54.640.375,00	54.278.380,00	(361.995,00)	99,34	
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	54.640.375,00	54.278.380,00	(361.995,00)	99,34	
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	44.890.000,00	44.890.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.750.375,00	9.388.380,00	(361.995,00)	96,29	
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	87.148.025,00	86.440.000,00	(708.025,00)	99,19	
01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	87.148.025,00	86.440.000,00	(708.025,00)	99,19	
01.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	87.148.025,00	86.440.000,00	(708.025,00)	99,19	
01.2.03.06.5.1.01	Belanja Pegawai	83.400.000,00	83.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.748.025,00	3.040.000,00	(708.025,00)	81,09	
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	350.000,00	0,00	(350.000,00)	0	
01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	350.000,00	0,00	(350.000,00)	0	
01.2.05.11.5.1	BELANJA OPERASI	350.000,00	0,00	(350.000,00)	0	
01.2.05.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.000,00	0,00	(350.000,00)	0	
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	19.960.000,00	19.957.800,00	(2.200,00)	99,99	
01.2.07.00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.960.000,00	19.957.800,00	(2.200,00)	99,99	

Handwritten signature



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.207.06.5.2	BELANJA MODAL	19.960.000,00	19.957.800,00	(2.200,00)	99,99	
01.207.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.960.000,00	19.957.800,00	(2.200,00)	99,99	
01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	371.129.950,00	331.383.850,00	(39.747.070,00)	89,29	
01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54.214.440,00	43.792.818,00	(10.421.622,00)	80,78	
01.208.02.5.1	BELANJA OPERASI	54.214.440,00	43.792.818,00	(10.421.622,00)	80,78	
01.208.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.214.440,00	43.792.818,00	(10.421.622,00)	80,78	
01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	316.919.510,00	287.590.262,00	(29.329.248,00)	90,75	
01.208.04.5.1	BELANJA OPERASI	316.919.510,00	287.590.262,00	(29.329.248,00)	90,75	
01.208.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	316.919.510,00	287.590.262,00	(29.329.248,00)	90,75	
01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	205.472.600,00	205.292.600,00	(180.000,00)	99,91	
01.209.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	205.472.600,00	205.292.600,00	(180.000,00)	99,91	
01.209.01.5.1	BELANJA OPERASI	205.472.600,00	205.292.600,00	(180.000,00)	99,91	
01.209.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	205.472.600,00	205.292.600,00	(180.000,00)	99,91	
02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	40.213.467.811,78	39.221.673.024,00	(991.594.787,78)	97,53	
02.201	Pengkalaan Pendidikan Sekolah Dasar	20.363.624.876,78	19.841.898.101,00	(521.726.575,78)	97,44	
02.201.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/ITU	253.240.000,00	248.753.000,00	(4.487.000,00)	98,23	
02.201.03.5.2	BELANJA MODAL	253.240.000,00	248.753.000,00	(4.487.000,00)	98,23	
02.201.03.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	253.240.000,00	248.753.000,00	(4.487.000,00)	98,23	
02.201.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	371.603.257,00	91.862.450,00	(279.940.807,00)	24,67	
02.201.04.5.2	BELANJA MODAL	371.603.257,00	91.862.450,00	(279.940.807,00)	24,67	
02.201.04.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	371.603.257,00	91.862.450,00	(279.940.807,00)	24,67	
02.201.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	993.197.000,00	984.242.000,00	(8.955.000,00)	99,10	
02.201.06.5.1	BELANJA OPERASI	337.000.000,00	336.600.000,00	(400.000,00)	99,88	
02.201.06.5.1.01	Belanja Pegawai	37.000.000,00	36.600.000,00	(400.000,00)	98,92	
02.201.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	100,00	
02.201.06.5.2	BELANJA MODAL	656.197.000,00	647.642.000,00	(8.555.000,00)	98,70	
02.201.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	88.800.000,00	88.245.000,00	(555.000,00)	99,36	
02.201.06.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	567.397.000,00	559.397.000,00	(8.000.000,00)	98,59	
02.201.07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah / Guru/Pengajar Sekolah	199.784.000,00	199.709.000,00	(75.000,00)	99,96	
02.201.07.5.2	BELANJA MODAL	199.784.000,00	199.709.000,00	(75.000,00)	99,96	
02.201.07.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	199.784.000,00	199.709.000,00	(75.000,00)	99,96	
02.201.11	Rahabitasasi Soding/Berat Perpustakaan Sekolah	211.027.999,78	209.888.000,00	(1.139.999,78)	99,46	
02.201.11.5.2	BELANJA MODAL	211.027.999,78	209.888.000,00	(1.139.999,78)	99,46	
02.201.11.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	211.027.999,78	209.888.000,00	(1.139.999,78)	99,46	

6a



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.201.13	Rehabilitasi Seding/Berat Rumah Diriae Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	599.463.000,00	599.238.000,00	(225.000,00)	99,96	
02.201.13.5.2	BELANJA MODAL	599.463.000,00	599.238.000,00	(225.000,00)	99,96	
02.201.13.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	599.463.000,00	599.238.000,00	(225.000,00)	99,96	
02.201.16	Pengadaan Peralengkapan Sekolah	130.425.000,00	130.000.000,00	(425.000,00)	99,67	
02.201.16.5.2	BELANJA MODAL	130.425.000,00	130.000.000,00	(425.000,00)	99,67	
02.201.16.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	130.425.000,00	130.000.000,00	(425.000,00)	99,67	
02.201.21	Penyediaan Biaya Personel Peserta Didiri Sekolah Dasar	29.000.000,00	20.000.000,00	(9.000.000,00)	68,97	
02.201.21.5.1	BELANJA OPERASI	29.000.000,00	20.000.000,00	(9.000.000,00)	68,97	
02.201.21.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	29.000.000,00	20.000.000,00	(9.000.000,00)	68,97	
02.201.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	88.656.000,00	84.924.300,00	(3.731.700,00)	95,79	
02.201.25.5.1	BELANJA OPERASI	88.656.000,00	84.924.300,00	(3.731.700,00)	95,79	
02.201.25.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.656.000,00	84.924.300,00	(3.731.700,00)	95,79	
02.201.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	3.031.294.000,00	3.029.629.200,00	(1.574.800,00)	99,95	
02.201.26.5.1	BELANJA OPERASI	3.031.294.000,00	3.029.629.200,00	(1.574.800,00)	99,95	
02.201.26.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.031.294.000,00	3.029.629.200,00	(1.574.800,00)	99,95	
02.201.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	452.021.200,00	420.927.400,00	(31.093.800,00)	93,12	
02.201.27.5.1	BELANJA OPERASI	452.021.200,00	420.927.400,00	(31.093.800,00)	93,12	
02.201.27.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	452.021.200,00	420.927.400,00	(31.093.800,00)	93,12	
02.201.27.5.2	BELANJA MODAL	24.975.000,00	24.808.500,00	(166.500,00)	99,33	
02.201.27.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.975.000,00	24.808.500,00	(166.500,00)	99,33	
02.201.28	Pembinaan Kolaborasi dan Manajemen Sekolah	2.031.047.420,00	1.947.351.168,00	(83.696.252,00)	95,88	
02.201.28.5.1	BELANJA OPERASI	2.031.047.420,00	1.947.351.168,00	(83.696.252,00)	95,88	
02.201.28.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.031.047.420,00	1.947.351.168,00	(83.696.252,00)	95,88	
02.201.28.5.2	BELANJA MODAL	300.000.000,00	294.594.000,00	(5.406.000,00)	98,20	
02.201.28.5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	300.000.000,00	294.594.000,00	(5.406.000,00)	98,20	
02.201.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	6.654.200.000,00	6.652.860.583,00	(1.339.417,00)	99,98	
02.201.29.5.1	BELANJA OPERASI	6.654.200.000,00	6.652.860.583,00	(1.339.417,00)	99,98	
02.201.29.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.285.584.300,00	6.285.213.898,00	(370.402,00)	99,99	
02.201.29.5.1.05	Belanja Hibah	236.680.000,00	235.979.724,00	(700.276,00)	99,70	
02.201.29.5.2	BELANJA MODAL	1.151.935.700,00	1.151.868.961,00	(246.739,00)	99,98	
02.201.29.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.103.859.950,00	1.103.736.961,00	(122.989,00)	99,99	
02.201.29.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	48.075.750,00	47.960.000,00	(125.750,00)	99,74	
02.201.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	142.140.000,00	137.080.000,00	(5.060.000,00)	96,44	
02.201.30.5.1	BELANJA OPERASI	142.140.000,00	137.080.000,00	(5.060.000,00)	96,44	
02.201.30.5.1.01	Belanja Pegawai	142.140.000,00	137.080.000,00	(5.060.000,00)	96,44	
02.201.31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	1.049.218.000,00	982.491.000,00	(66.727.000,00)	93,54	

60



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.201.31.5.1	BELANJA OPERASI	1.108.000,00	1.020.000,00	(88.000,00)	92,06	
02.201.31.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.108.000,00	1.020.000,00	(88.000,00)	92,06	
02.201.31.5.2	BELANJA MODAL	1.048.110.000,00	981.471.000,00	(66.639.000,00)	93,64	
02.201.31.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.048.110.000,00	981.471.000,00	(66.639.000,00)	93,64	
02.201.46	Pengadaan Perangkat Lunak Peserta Didik	2.389.491.800,00	2.387.543.000,00	(1.948.800,00)	99,92	
02.201.46.5.1	BELANJA OPERASI	2.389.491.800,00	2.387.543.000,00	(1.948.800,00)	99,92	
02.201.46.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.389.491.800,00	2.387.543.000,00	(1.948.800,00)	99,92	
02.201.51	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.737.906.000,00	1.715.479.000,00	(22.427.000,00)	98,71	
02.201.51.5.2	BELANJA MODAL	1.737.906.000,00	1.715.479.000,00	(22.427.000,00)	98,71	
02.201.51.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.737.906.000,00	1.715.479.000,00	(22.427.000,00)	98,71	
02.202	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	12.318.281.950,00	12.027.440.678,00	(290.851.272,00)	97,64	
02.202.04	Perbaikan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	908.571.000,00	854.974.000,00	(53.597.000,00)	94,10	
02.202.04.5.2	BELANJA MODAL	908.571.000,00	854.974.000,00	(53.597.000,00)	94,10	
02.202.04.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	908.571.000,00	854.974.000,00	(53.597.000,00)	94,10	
02.202.06	Perbaikan Laboratorium	1.281.586.300,00	1.233.466.000,00	(48.120.300,00)	96,25	
02.202.06.5.2	BELANJA MODAL	1.281.586.300,00	1.233.466.000,00	(48.120.300,00)	96,25	
02.202.06.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.281.586.300,00	1.233.466.000,00	(48.120.300,00)	96,25	
02.202.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Peralatan dan Utilitas Sekolah	199.865.000,00	199.790.000,00	(75.000,00)	99,96	
02.202.24.5.2	BELANJA MODAL	199.865.000,00	199.790.000,00	(75.000,00)	99,96	
02.202.24.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	199.865.000,00	199.790.000,00	(75.000,00)	99,96	
02.202.27	Pengadaan Perangkat Lunak Sekolah	171.147.700,00	171.030.000,00	(117.700,00)	99,93	
02.202.27.5.1	BELANJA OPERASI	171.147.700,00	171.030.000,00	(117.700,00)	99,93	
02.202.27.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	171.147.700,00	171.030.000,00	(117.700,00)	99,93	
02.202.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	37.500.000,00	27.000.000,00	(10.500.000,00)	72,00	
02.202.32.5.1	BELANJA OPERASI	37.500.000,00	27.000.000,00	(10.500.000,00)	72,00	
02.202.32.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	37.500.000,00	27.000.000,00	(10.500.000,00)	72,00	
02.202.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.063.244.750,00	986.991.050,00	(86.253.700,00)	93,77	
02.202.38.5.1	BELANJA OPERASI	296.473.500,00	265.435.000,00	(31.038.500,00)	89,53	
02.202.38.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	296.473.500,00	265.435.000,00	(31.038.500,00)	89,53	
02.202.38.5.2	BELANJA MODAL	766.771.250,00	721.556.050,00	(45.215.200,00)	94,11	
02.202.38.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	707.000.000,00	672.792.050,00	(34.207.950,00)	95,16	
02.202.38.5.2.05	Belanja Modal Aneka Taraf Lainnya	59.771.250,00	58.764.000,00	(1.007.250,00)	98,31	
02.202.38	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.133.073.700,00	1.112.432.900,00	(20.640.800,00)	98,18	
02.202.38.5.1	BELANJA OPERASI	1.133.073.700,00	1.112.432.900,00	(20.640.800,00)	98,18	
02.202.38.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.133.073.700,00	1.112.432.900,00	(20.640.800,00)	98,18	
02.202.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	83.000.000,00	29.933.591,00	(53.066.409,00)	35,81	
02.202.40.5.1	BELANJA OPERASI	83.000.000,00	29.933.591,00	(53.066.409,00)	35,81	

Sw



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.202.40.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.580.000,00	29.933.581,00	(53.656.409,00)	35,81	
02.202.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	2.288.032.600,00	2.254.084.998,00	(33.947.602,00)	98,52	
02.202.41.5.1	BELANJA OPERASI	2.288.032.600,00	2.254.084.998,00	(33.947.602,00)	98,52	
02.202.41.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.288.032.600,00	2.254.084.998,00	(33.947.602,00)	98,52	
02.202.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	3.843.170.000,00	3.841.838.639,00	(1.233.361,00)	99,97	
02.202.42.5.1	BELANJA OPERASI	3.336.032.950,00	3.335.513.539,00	(719.411,00)	99,98	
02.202.42.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.103.712.950,00	3.103.681.439,00	(81.511,00)	100,00	
02.202.42.5.1.05	Belanja Hibah	232.320.000,00	231.882.100,00	(657.900,00)	99,72	
02.202.42.5.2	BELANJA MODAL	307.137.050,00	306.623.100,00	(513.950,00)	99,83	
02.202.42.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	299.062.050,00	298.998.100,00	(63.950,00)	99,98	
02.202.42.5.2.05	Belanja Modal Asej Trlap Lainnya	8.075.000,00	7.625.000,00	(450.000,00)	94,43	
02.202.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	273.630.000,00	272.020.000,00	(1.610.000,00)	99,41	
02.202.43.5.1	BELANJA OPERASI	273.630.000,00	272.020.000,00	(1.610.000,00)	99,41	
02.202.43.5.1.01	Belanja Pegawai	46.230.000,00	44.620.000,00	(1.610.000,00)	96,52	
02.202.43.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	227.400.000,00	227.400.000,00	0,00	100,00	
02.202.62	Pengadaan Peningkatan Peserta Didik	1.234.880.900,00	1.233.781.500,00	(1.099.400,00)	99,91	
02.202.62.5.1	BELANJA OPERASI	1.234.880.900,00	1.233.781.500,00	(1.099.400,00)	99,91	
02.202.62.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.234.880.900,00	1.233.781.500,00	(1.099.400,00)	99,91	
02.203	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	6.716.411.185,00	6.574.555.495,00	(144.855.690,00)	97,84	
02.203.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	212.091.500,00	211.829.500,00	(262.000,00)	99,88	
02.203.02.5.1	BELANJA OPERASI	212.091.500,00	211.829.500,00	(262.000,00)	99,88	
02.203.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.132.500,00	17.132.500,00	0,00	100,00	
02.203.02.5.1.05	Belanja Hibah	194.959.000,00	194.697.000,00	(262.000,00)	99,87	
02.203.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	50.000.000,00	49.950.000,00	(50.000,00)	99,90	
02.203.12.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	49.950.000,00	(50.000,00)	99,90	
02.203.12.5.1.05	Belanja Hibah	50.000.000,00	49.950.000,00	(50.000,00)	99,90	
02.203.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	655.350.000,00	617.302.150,00	(38.047.850,00)	94,02	
02.203.15.5.1	BELANJA OPERASI	655.350.000,00	617.302.150,00	(38.047.850,00)	94,02	
02.203.15.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	655.350.000,00	617.302.150,00	(38.047.850,00)	94,02	
02.203.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	1.102.848.000,00	1.068.941.297,00	(33.906.703,00)	96,83	
02.203.16.5.1	BELANJA OPERASI	1.102.848.000,00	1.068.941.297,00	(33.906.703,00)	96,83	
02.203.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.102.848.000,00	1.068.941.297,00	(33.906.703,00)	96,83	
02.203.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	1.955.347.685,00	1.955.980.298,00	(39.387.387,00)	99,03	
02.203.17.5.1	BELANJA OPERASI	1.955.347.685,00	1.955.980.298,00	(39.387.387,00)	99,03	
02.203.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.955.347.685,00	1.955.980.298,00	(39.387.387,00)	99,03	
02.203.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	1.533.880.000,00	1.533.840.500,00	(39.500,00)	100,00	
02.203.18.5.1	BELANJA OPERASI	1.533.880.000,00	1.533.728.500,00	(39.500,00)	100,00	

En



KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.03.18.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.826.000,00	19.786.500,00	(39.500,00)	99,80	
02.2.03.18.5.1.05	Belanja Hibah	1.510.940.000,00	1.510.940.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.18.5.2	BELANJA MODAL	3.114.000,00	3.114.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.18.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.114.000,00	3.114.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	617.904.000,00	585.091.750,00	(32.812.250,00)	94,69	
02.2.03.19.5.1	BELANJA OPERASI	617.904.000,00	585.091.750,00	(32.812.250,00)	94,69	
02.2.03.19.5.1.01	Belanja Pegawai	52.900.000,00	43.067.500,00	(9.832.500,00)	81,41	
02.2.03.19.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	565.004.000,00	542.024.250,00	(22.979.750,00)	96,93	
02.2.03.41	Perigaraan Penlengkapan Peserta Didik	251.990.000,00	251.640.000,00	(350.000,00)	99,86	
02.2.03.41.5.1	BELANJA OPERASI	251.990.000,00	251.640.000,00	(350.000,00)	99,86	
02.2.03.41.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	251.990.000,00	251.640.000,00	(350.000,00)	99,86	
02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	812.140.000,00	777.978.750,00	(34.161.250,00)	95,79	
02.2.04.14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan tptg Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	181.600.000,00	163.443.750,00	(18.156.250,00)	90,00	
02.2.04.14.5.1	BELANJA OPERASI	181.600.000,00	163.443.750,00	(18.156.250,00)	90,00	
02.2.04.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	181.600.000,00	163.443.750,00	(18.156.250,00)	90,00	
02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	630.540.000,00	614.535.000,00	(16.005.000,00)	97,46	
02.2.04.17.5.1	BELANJA OPERASI	630.540.000,00	614.535.000,00	(16.005.000,00)	97,46	
02.2.04.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	395.000.000,00	395.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.17.5.1.05	Belanja Hibah	126.130.000,00	126.130.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.17.5.2	BELANJA MODAL	107.410.000,00	91.405.000,00	(16.005.000,00)	85,10	
02.2.04.17.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	107.410.000,00	91.405.000,00	(16.005.000,00)	85,10	
02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	583.258.220,00	562.702.567,00	(20.555.653,00)	96,48	
02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	583.258.220,00	562.702.567,00	(20.555.653,00)	96,48	
02.2.01.01	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Perwujudan Kebudayaan	458.234.220,00	448.369.547,00	(9.864.673,00)	97,85	
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	458.234.220,00	448.369.547,00	(9.864.673,00)	97,85	
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	458.234.220,00	448.369.547,00	(9.864.673,00)	97,85	
02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	125.024.000,00	114.332.720,00	(10.691.280,00)	91,45	
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	125.024.000,00	114.332.720,00	(10.691.280,00)	91,45	
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.024.000,00	114.332.720,00	(10.691.280,00)	91,45	
05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	1.160.125.000,00	1.108.066.900,00	(52.058.100,00)	95,51	
05.2.01	Pemertajean Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	63.564.000,00	62.946.900,00	(617.100,00)	99,03	
05.2.01.02	Penetapan Cagar Budaya	63.564.000,00	62.946.900,00	(617.100,00)	99,03	
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	63.564.000,00	62.946.900,00	(617.100,00)	99,03	
05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.564.000,00	62.946.900,00	(617.100,00)	99,03	
05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	1.096.571.000,00	1.045.120.000,00	(51.451.000,00)	95,31	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
05.202.01	Pelindungan Cagar Budaya	1.090.571.000,00	1.045.120.000,00	(51.451.000,00)	95,31	
05.202.01.5.1	BELANJA OPERASI	450.000,00	0,00	(450.000,00)	0	
05.202.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	0,00	(450.000,00)	0	
05.202.01.5.2	BELANJA MODAL	1.096.121.000,00	1.045.120.000,00	(51.001.000,00)	95,35	
05.202.01.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.096.121.000,00	1.045.120.000,00	(51.001.000,00)	95,35	
	SURPLUS / DEFISIT	(129.879.270.446,78)	(122.927.664.857,00)	6.951.605.589,78	0	
	PEMBIAYAAN					
00.603.00.6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	16.195,00	16.195,00	0	
00.603.00.6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	16.195,00	16.195,00	0	
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	16.195,00	16.195,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(129.879.270.446,78)	(122.927.648.662,00)	6.951.621.884,78	0	

64





PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2024

Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN

SKPD : 1-02.0-00.0-00.01 DINAS KESEHATAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	10.114.470.400,00	11.034.842.535,00	920.372.135,00	109,10	
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10.114.470.400,00	11.034.842.535,00	920.372.135,00	109,10	
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	10.114.470.400,00	11.034.842.535,00	920.372.135,00	109,10	
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	114.485.391.153,50	105.240.232.208,15	(9.245.158.945,35)	91,92	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	60.899.213.423,00	56.369.138.132,00	(4.530.075.291,00)	92,56	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	53.208.928.615,00	49.539.690.818,00	(3.669.237.797,00)	93,10	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	52.114.961.365,00	49.458.583.818,00	(3.656.377.547,00)	93,12	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	52.114.961.365,00	49.458.583.818,00	(3.656.377.547,00)	93,12	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	52.114.961.365,00	49.458.583.818,00	(3.656.377.547,00)	93,12	
01.2.02.03	Penaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	93.967.250,00	81.107.000,00	(12.860.250,00)	86,31	
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	93.967.250,00	81.107.000,00	(12.860.250,00)	86,31	
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	84.840.000,00	72.450.000,00	(12.390.000,00)	85,40	
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.127.250,00	8.657.000,00	(470.250,00)	94,85	
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	168.210.000,00	163.760.000,00	(4.450.000,00)	97,35	
01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	168.210.000,00	163.760.000,00	(4.450.000,00)	97,35	
01.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	168.210.000,00	163.760.000,00	(4.450.000,00)	97,35	
01.2.03.06.5.1.01	Belanja Pegawai	167.650.000,00	163.200.000,00	(4.450.000,00)	97,35	
01.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	560.000,00	560.000,00	0,00	100,00	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	292.292.890,00	266.811.097,00	(25.481.793,00)	91,32	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.730.890,00	7.353.300,00	(6.377.590,00)	53,53	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	13.730.890,00	7.353.300,00	(6.377.590,00)	53,53	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.730.890,00	7.353.300,00	(6.377.590,00)	53,53	



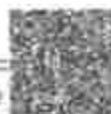
60

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPOD	258.562.000,00	259.457.797,00	(9.104.203,00)	96,61	
01.206.09.5.1	BELANJA OPERASI	258.562.000,00	259.457.797,00	(9.104.203,00)	96,61	
01.206.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	258.562.000,00	259.457.797,00	(9.104.203,00)	96,61	
01.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.046.187.808,00	4.263.564.575,00	(782.623.233,00)	84,49	
01.207.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	999.000,00	999.000,00	0,00	100,00	
01.207.06.5.2	BELANJA MODAL	999.000,00	999.000,00	0,00	100,00	
01.207.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	999.000,00	999.000,00	0,00	100,00	
01.207.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.891.850,00	35.578.300,00	(313.550,00)	99,13	
01.207.10.5.2	BELANJA MODAL	35.891.850,00	35.578.300,00	(313.550,00)	99,13	
01.207.10.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.891.850,00	35.578.300,00	(313.550,00)	99,13	
01.207.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.009.296.958,00	4.226.987.275,00	(782.309.683,00)	84,36	
01.207.11.5.1	BELANJA OPERASI	30.784.185,00	30.175.275,00	(608.910,00)	98,02	
01.207.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.784.185,00	30.175.275,00	(608.910,00)	98,02	
01.207.11.5.2	BELANJA MODAL	4.978.512.773,00	4.196.312.000,00	(781.700.773,00)	84,30	
01.207.11.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.009.297.200,00	999.500.000,00	(9.797.200,00)	99,03	
01.207.11.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.969.215.573,00	3.197.312.000,00	(771.903.573,00)	80,55	
01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.901.577.290,00	1.846.304.072,00	(55.273.218,00)	97,09	
01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Lain-lain	163.022.500,00	159.653.672,00	(3.368.828,00)	97,93	
01.208.02.5.1	BELANJA OPERASI	163.022.500,00	159.653.672,00	(3.368.828,00)	97,93	
01.208.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	163.022.500,00	159.653.672,00	(3.368.828,00)	97,93	
01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.738.554.790,00	1.686.650.400,00	(51.904.390,00)	97,01	
01.208.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.738.554.790,00	1.686.650.400,00	(51.904.390,00)	97,01	
01.208.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.738.554.790,00	1.686.650.400,00	(51.904.390,00)	97,01	
01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	292.016.820,00	289.007.670,00	(3.009.150,00)	99,07	
01.209.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	47.484.500,00	44.590.700,00	(2.893.800,00)	93,91	
01.209.01.5.1	BELANJA OPERASI	47.484.500,00	44.590.700,00	(2.893.800,00)	93,91	
01.209.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.484.500,00	44.590.700,00	(2.893.800,00)	93,91	
01.209.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	222.384.500,00	222.355.000,00	(38.500,00)	99,96	
01.209.02.5.1	BELANJA OPERASI	222.384.500,00	222.355.000,00	(38.500,00)	99,96	
01.209.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	222.384.500,00	222.355.000,00	(38.500,00)	99,96	



64

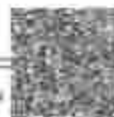
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.209.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.352.500,00	16.347.500,00	(5.000,00)	99,97	
01.209.06.5.1	BELANJA OPERASI	16.352.500,00	16.347.500,00	(5.000,00)	99,97	
01.209.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.352.500,00	16.347.500,00	(5.000,00)	99,97	
01.209.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.785.320,00	5.714.370,00	(70.950,00)	98,77	
01.209.09.5.1	BELANJA OPERASI	5.785.320,00	5.714.370,00	(70.950,00)	98,77	
01.209.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.785.320,00	5.714.370,00	(70.950,00)	98,77	
02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	47.213.888.780,50	42.836.733.851,15	(4.377.135.929,35)	90,73	
02.201	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UPM dan UKP Kawenangan Daerah Kabupaten/Kota	9.213.458.892,00	8.545.990.273,00	(667.468.619,00)	92,76	
02.201.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Peralatan Pendukungnya	12.678.022,00	0,00	(12.678.022,00)	0	
02.201.01.5.2	BELANJA MODAL	12.678.022,00	0,00	(12.678.022,00)	0	
02.201.01.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	12.678.022,00	0,00	(12.678.022,00)	0	
02.201.02	Pembangunan Puskesmas	109.149.670,00	0,00	(109.149.670,00)	0	
02.201.02.5.2	BELANJA MODAL	109.149.670,00	0,00	(109.149.670,00)	0	
02.201.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	109.149.670,00	0,00	(109.149.670,00)	0	
02.201.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12.371.850,00	12.371.850,00	0,00	100,00	
02.201.10.5.1	BELANJA OPERASI	12.371.850,00	12.371.850,00	0,00	100,00	
02.201.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.371.850,00	12.371.850,00	0,00	100,00	
02.201.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Perunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	5.344.404.800,00	4.841.618.725,00	(502.786.075,00)	90,59	
02.201.14.5.2	BELANJA MODAL	5.344.404.800,00	4.841.618.725,00	(502.786.075,00)	90,59	
02.201.14.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.344.404.800,00	4.841.618.725,00	(502.786.075,00)	90,59	
02.201.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Perunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	63.485.000,00	56.428.914,00	(7.056.086,00)	88,89	
02.201.20.5.1	BELANJA OPERASI	63.485.000,00	56.428.914,00	(7.056.086,00)	88,89	
02.201.20.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.485.000,00	56.428.914,00	(7.056.086,00)	88,89	
02.201.23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	3.652.390.350,00	3.616.590.784,00	(35.799.566,00)	99,02	
02.201.23.5.1	BELANJA OPERASI	3.652.390.350,00	3.616.590.784,00	(35.799.566,00)	99,02	
02.201.23.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.652.390.350,00	3.616.590.784,00	(35.799.566,00)	99,02	
02.201.26	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	18.980.000,00	18.980.000,00	0,00	100,00	
02.201.26.3.1	BELANJA OPERASI	18.980.000,00	18.980.000,00	0,00	100,00	



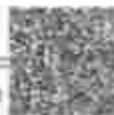
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.20.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.980.000,00	18.980.000,00	0,00	100,00	
02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan LKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	37.453.138.338,50	33.787.219.548,15	(3.665.918.789,35)	90,21	
02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	223.670.000,00	210.750.000,00	(12.920.000,00)	94,22	
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	223.670.000,00	210.750.000,00	(12.920.000,00)	94,22	
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	223.670.000,00	210.750.000,00	(12.920.000,00)	94,22	
02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100.687.400,00	79.956.400,00	(20.731.000,00)	79,41	
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	100.687.400,00	79.956.400,00	(20.731.000,00)	79,41	
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.687.400,00	79.956.400,00	(20.731.000,00)	79,41	
02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	33.845.350,00	29.200.000,00	(4.645.350,00)	86,27	
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	33.845.350,00	29.200.000,00	(4.645.350,00)	86,27	
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.845.350,00	29.200.000,00	(4.645.350,00)	86,27	
02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	35.552.000,00	31.946.300,00	(3.605.700,00)	89,86	
02.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	35.552.000,00	31.946.300,00	(3.605.700,00)	89,86	
02.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.552.000,00	31.946.300,00	(3.605.700,00)	89,86	
02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	341.535.450,00	325.424.500,00	(16.110.950,00)	95,28	
02.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	341.535.450,00	325.424.500,00	(16.110.950,00)	95,28	
02.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	341.535.450,00	325.424.500,00	(16.110.950,00)	95,28	
02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	7.284.000,00	6.210.800,00	(1.073.200,00)	85,27	
02.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	7.284.000,00	6.210.800,00	(1.073.200,00)	85,27	
02.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.284.000,00	6.210.800,00	(1.073.200,00)	85,27	
02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	35.552.000,00	35.546.000,00	(6.000,00)	99,98	
02.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	35.552.000,00	35.546.000,00	(6.000,00)	99,98	
02.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.552.000,00	35.546.000,00	(6.000,00)	99,98	
02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	9.672.000,00	9.052.800,00	(619.200,00)	93,60	
02.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI	9.672.000,00	9.052.800,00	(619.200,00)	93,60	
02.2.02.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.672.000,00	9.052.800,00	(619.200,00)	93,60	
02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	178.613.775,00	178.571.250,00	(42.525,00)	99,98	
02.2.02.09.5.1	BELANJA OPERASI	178.613.775,00	178.571.250,00	(42.525,00)	99,98	
02.2.02.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	178.613.775,00	178.571.250,00	(42.525,00)	99,98	
02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	49.920.000,00	48.160.000,00	(1.760.000,00)	96,48	
02.2.02.10.5.1	BELANJA OPERASI	49.920.000,00	48.160.000,00	(1.760.000,00)	96,48	
02.2.02.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.920.000,00	48.160.000,00	(1.760.000,00)	96,48	
02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	504.170.150,00	190.214.000,00	(313.956.150,00)	37,73	
02.2.02.11.5.1	BELANJA OPERASI	504.170.150,00	190.214.000,00	(313.956.150,00)	37,73	
02.2.02.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	504.170.150,00	190.214.000,00	(313.956.150,00)	37,73	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.202.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Tinggi HIV	40.015.450,00	36.500.000,00	(3.515.450,00)	91,21	
02.202.12.5.1	BELANJA OPERASI	40.015.450,00	36.500.000,00	(3.515.450,00)	91,21	
02.202.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.015.450,00	36.500.000,00	(3.515.450,00)	91,21	
02.202.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat	2.023.539.347,00	1.691.223.800,00	(332.315.547,00)	83,59	
02.202.15.5.1	BELANJA OPERASI	2.023.539.347,00	1.691.223.800,00	(332.315.547,00)	83,59	
02.202.15.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.023.539.347,00	1.691.223.800,00	(332.315.547,00)	83,59	
02.202.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	385.320.450,00	334.611.000,00	(50.709.450,00)	86,84	
02.202.17.5.1	BELANJA OPERASI	385.320.450,00	334.611.000,00	(50.709.450,00)	86,84	
02.202.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	385.320.450,00	334.611.000,00	(50.709.450,00)	86,84	
02.202.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	176.454.000,00	160.689.000,00	(15.765.000,00)	91,07	
02.202.18.5.1	BELANJA OPERASI	176.454.000,00	160.689.000,00	(15.765.000,00)	91,07	
02.202.18.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176.454.000,00	160.689.000,00	(15.765.000,00)	91,07	
02.202.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	386.581.550,00	363.370.900,00	(23.210.650,00)	93,51	
02.202.20.5.1	BELANJA OPERASI	386.581.550,00	363.370.900,00	(23.210.650,00)	93,51	
02.202.20.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	386.581.550,00	363.370.900,00	(23.210.650,00)	93,51	
02.202.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.584.311.215,00	1.452.793.500,00	(131.517.715,00)	91,70	
02.202.25.5.1	BELANJA OPERASI	1.584.311.215,00	1.452.793.500,00	(131.517.715,00)	91,70	
02.202.25.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.584.311.215,00	1.452.793.500,00	(131.517.715,00)	91,70	
02.202.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	27.857.555.351,50	26.654.978.039,15	(2.202.677.312,35)	92,09	
02.202.26.5.1	BELANJA OPERASI	27.086.298.749,50	24.925.748.039,15	(2.160.550.710,35)	92,02	
02.202.26.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.086.298.749,50	24.925.748.039,15	(2.160.550.710,35)	92,02	
02.202.26.5.2	BELANJA MODAL	771.256.602,00	729.129.999,00	(42.126.603,00)	94,54	
02.202.26.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	771.256.602,00	729.129.999,00	(42.126.603,00)	94,54	
02.202.28	Pengambilan dan Pengiriman Specimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	46.900.000,00	45.500.000,00	(1.300.000,00)	97,22	
02.202.28.5.1	BELANJA OPERASI	46.900.000,00	45.500.000,00	(1.300.000,00)	97,22	
02.202.28.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.900.000,00	45.500.000,00	(1.300.000,00)	97,22	
02.202.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.801.697.000,00	1.402.879.481,00	(398.817.519,00)	77,86	
02.202.33.5.1	BELANJA OPERASI	1.801.697.000,00	1.402.879.481,00	(398.817.519,00)	77,86	
02.202.33.5.1.01	Belanja Pegawai	978.365.010,00	852.054.903,00	(126.310.107,00)	87,09	
02.202.33.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	823.331.990,00	550.824.578,00	(272.507.412,00)	66,90	
02.202.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	34.865.000,00	34.865.000,00	0,00	100,00	
02.202.34.5.1	BELANJA OPERASI	34.865.000,00	34.865.000,00	0,00	100,00	
02.202.34.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.865.000,00	34.865.000,00	0,00	100,00	
02.202.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ruban Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	72.480.450,00	69.550.000,00	(2.930.450,00)	95,96	
02.202.36.5.1	BELANJA OPERASI	72.480.450,00	69.550.000,00	(2.930.450,00)	95,96	
02.202.36.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.480.450,00	69.550.000,00	(2.930.450,00)	95,96	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.202.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Diri dan Responi Wabah	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	0	
02.202.37.5.1	BELANJA OPERASI	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	0	
02.202.37.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	0	
02.202.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosa	77.450.450,00	68.590.000,00	(8.860.450,00)	88,56	
02.202.40.5.1	BELANJA OPERASI	77.450.450,00	68.590.000,00	(8.860.450,00)	88,56	
02.202.40.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.450.450,00	68.590.000,00	(8.860.450,00)	88,56	
02.202.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHV)	16.510.000,00	11.410.000,00	(5.100.000,00)	69,11	
02.202.41.5.1	BELANJA OPERASI	16.510.000,00	11.410.000,00	(5.100.000,00)	69,11	
02.202.41.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.510.000,00	11.410.000,00	(5.100.000,00)	69,11	
02.202.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	193.182.500,00	149.994.400,00	(43.188.100,00)	77,64	
02.202.42.5.1	BELANJA OPERASI	193.182.500,00	149.994.400,00	(43.188.100,00)	77,64	
02.202.42.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	193.182.500,00	149.994.400,00	(43.188.100,00)	77,64	
02.202.44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	164.713.450,00	161.110.000,00	(3.603.450,00)	97,81	
02.202.44.5.1	BELANJA OPERASI	164.713.450,00	161.110.000,00	(3.603.450,00)	97,81	
02.202.44.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	164.713.450,00	161.110.000,00	(3.603.450,00)	97,81	
02.202.46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.066.760.000,00	1.003.222.500,00	(63.537.500,00)	94,04	
02.202.46.5.1	BELANJA OPERASI	1.066.760.000,00	1.003.222.500,00	(63.537.500,00)	94,04	
02.202.46.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.066.760.000,00	1.003.222.500,00	(63.537.500,00)	94,04	
02.203	Penyenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	547.271.750,00	503.523.929,00	(43.747.821,00)	92,01	
02.203.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	547.271.750,00	503.523.929,00	(43.747.821,00)	92,01	
02.203.02.5.1	BELANJA OPERASI	450.251.750,00	406.523.929,00	(43.727.821,00)	90,29	
02.203.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	450.251.750,00	406.523.929,00	(43.727.821,00)	90,29	
02.203.02.5.2	BELANJA MODAL	97.020.000,00	97.000.000,00	(20.000,00)	99,96	
02.203.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	97.020.000,00	97.000.000,00	(20.000,00)	99,96	
03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	5.996.643.950,00	5.667.238.422,00	(329.405.528,00)	94,50	
03.202	Perencanaan Kebutuhan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKF dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	5.174.783.150,00	4.675.328.650,00	(499.454.500,00)	90,35	
03.202.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	4.933.300.150,00	4.637.465.850,00	(295.834.300,00)	94,00	
03.202.02.5.1	BELANJA OPERASI	4.933.300.150,00	4.637.465.850,00	(295.834.300,00)	94,00	
03.202.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.933.300.150,00	4.637.465.850,00	(295.834.300,00)	94,00	
03.202.03	Pembinaan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan	241.453.000,00	237.863.000,00	(3.590.000,00)	98,51	
03.202.03.5.1	BELANJA OPERASI	241.453.000,00	237.863.000,00	(3.590.000,00)	98,51	
03.202.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	241.453.000,00	237.863.000,00	(3.590.000,00)	98,51	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.203	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	822.000.000,00	821.909.772,00	(181.028,00)	99,98	
03.203.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	822.000.000,00	821.909.772,00	(181.028,00)	99,98	
03.203.01.5.1	BELANJA OPERASI	822.000.000,00	821.909.772,00	(181.028,00)	99,98	
03.203.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	822.000.000,00	821.909.772,00	(181.028,00)	99,98	
04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	250.401.000,00	214.497.300,00	(35.903.700,00)	85,66	
04.203	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	67.380.000,00	64.775.000,00	(2.605.000,00)	96,13	
04.203.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	67.380.000,00	64.775.000,00	(2.605.000,00)	96,13	
04.203.01.5.1	BELANJA OPERASI	67.380.000,00	64.775.000,00	(2.605.000,00)	96,13	
04.203.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.380.000,00	64.775.000,00	(2.605.000,00)	96,13	
04.206	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	183.021.000,00	149.722.300,00	(33.298.700,00)	81,81	
04.206.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Bersedar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	183.021.000,00	149.722.300,00	(33.298.700,00)	81,81	
04.206.01.5.1	BELANJA OPERASI	183.021.000,00	149.722.300,00	(33.298.700,00)	81,81	
04.206.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	183.021.000,00	149.722.300,00	(33.298.700,00)	81,81	
05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	125.063.000,00	122.624.505,00	(2.438.495,00)	98,06	
05.201	Advokasi, Pemberdayaan, Kamitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	49.016.505,00	(983.495,00)	98,03	
05.201.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kamitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	50.000.000,00	49.016.505,00	(983.495,00)	98,03	
05.201.01.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	49.016.505,00	(983.495,00)	98,03	
05.201.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.016.505,00	(983.495,00)	98,03	

6



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	75.063.000,00	73.607.998,00	(1.455.002,00)	98,06	
05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	75.063.000,00	73.607.998,00	(1.455.002,00)	98,06	
05.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	75.063.000,00	73.607.998,00	(1.455.002,00)	98,06	
05.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.063.000,00	73.607.998,00	(1.455.002,00)	98,06	
	SURPLUS / DEFISIT	(104.370.920.753,50)	(94.205.389.673,15)	10.165.531.080,35	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(104.370.920.753,50)	(94.205.389.673,15)	10.165.531.080,35	0	

Sw



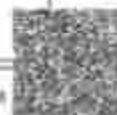


PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2024

Urusan Pemerintahan : 1.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
SKPD : 1-03.0-00.0-00.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	101.516.000,00	41.879.190,00	(59.636.810,00)	41,25	
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	101.516.000,00	41.879.190,00	(59.636.810,00)	41,25	
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	5.000.000,00	41.879.190,00	36.879.190,00	637,58	
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	96.516.000,00	0,00	(96.516.000,00)	0	
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	82.825.054.367,00	81.704.262.550,00	(1.120.771.817,00)	98,55	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.893.078.497,00	3.697.603.522,00	(195.474.975,00)	94,98	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.495.821.977,00	3.318.932.612,00	(176.889.365,00)	94,88	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.467.661.977,00	3.288.772.612,00	(178.889.365,00)	94,84	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.467.661.977,00	3.288.772.612,00	(178.889.365,00)	94,84	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3.467.661.977,00	3.288.772.612,00	(178.889.365,00)	94,84	
01.2.02.03	Pelaksanaan Pekerjaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	28.160.000,00	28.160.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	28.160.000,00	28.160.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	27.960.000,00	27.960.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.03.06.5.1.01	Belanja Pegawai	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	79.088.770,00	78.049.300,00	(120.470,00)	98,82	
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.115.770,00	3.082.000,00	(33.770,00)	98,92	
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.115.770,00	3.082.000,00	(33.770,00)	98,92	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.208.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.115.770,00	3.082.000,00	(33.770,00)	98,92	
01.208.08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.954.000,00	75.867.300,00	(86.700,00)	99,89	
01.208.08.5.1	BELANJA OPERASI	75.954.000,00	75.867.300,00	(86.700,00)	99,89	
01.208.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.954.000,00	75.867.300,00	(86.700,00)	99,89	
01.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Perungjung Unsurin Pemerintah Daerah	50.210.850,00	49.578.000,00	(632.850,00)	98,74	
01.207.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.210.850,00	49.578.000,00	(632.850,00)	98,74	
01.207.06.5.2	BELANJA MODAL	50.210.850,00	49.578.000,00	(632.850,00)	98,74	
01.207.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.210.850,00	49.578.000,00	(632.850,00)	98,74	
01.208	Penyediaan Jasa Perungjung Unsurin Pemerintahan Daerah	192.595.900,00	183.763.400,00	(8.832.500,00)	95,41	
01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	63.664.200,00	54.889.400,00	(8.774.800,00)	86,22	
01.208.02.5.1	BELANJA OPERASI	63.664.200,00	54.889.400,00	(8.774.800,00)	86,22	
01.208.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.664.200,00	54.889.400,00	(8.774.800,00)	86,22	
01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	128.931.700,00	128.874.000,00	(57.700,00)	99,96	
01.208.04.5.1	BELANJA OPERASI	128.931.700,00	128.874.000,00	(57.700,00)	99,96	
01.208.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.931.700,00	128.874.000,00	(57.700,00)	99,96	
01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perungjung Unsurin Pemerintahan Daerah	51.980.000,00	44.980.210,00	(6.999.790,00)	86,53	
01.209.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perbrangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	51.980.000,00	44.980.210,00	(6.999.790,00)	86,53	
01.209.01.5.1	BELANJA OPERASI	51.980.000,00	44.980.210,00	(6.999.790,00)	86,53	
01.209.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.980.000,00	44.980.210,00	(6.999.790,00)	86,53	
02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	8.366.518.902,00	8.208.645.096,00	(157.873.804,00)	98,11	
02.201	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.374.209.902,00	5.258.509.794,00	(117.700.108,00)	97,81	
02.201.12	Rahabilitasi Bendungan	2.529.946.000,00	2.413.347.000,00	(116.599.000,00)	95,39	
02.201.12.5.1	BELANJA OPERASI	76.966.000,00	76.800.000,00	(166.000,00)	99,76	
02.201.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.966.000,00	76.800.000,00	(166.000,00)	99,76	
02.201.12.5.2	BELANJA MODAL	2.452.980.000,00	2.336.547.000,00	(116.433.000,00)	95,25	
02.201.12.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.452.980.000,00	2.336.547.000,00	(116.433.000,00)	95,25	
02.201.15	Pembangunan Tanggul Sungai	1.132.106.000,00	1.131.119.000,00	(987.000,00)	99,91	
02.201.15.5.2	BELANJA MODAL	1.132.106.000,00	1.131.119.000,00	(987.000,00)	99,91	
02.201.15.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.132.106.000,00	1.131.119.000,00	(987.000,00)	99,91	
02.201.93	Normalisasi/Restorasi Sungai	1.712.157.902,00	1.712.043.794,00	(114.108,00)	99,99	
02.201.93.5.1	BELANJA OPERASI	291.792.000,00	291.734.794,00	(57.206,00)	99,98	
02.201.93.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	291.792.000,00	291.734.794,00	(57.206,00)	99,98	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.93.5.2	BELANJA MODAL	1.420.365.902,00	1.420.309.000,00	(56.902,00)	100,00	
02.2.01.93.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.420.365.902,00	1.420.309.000,00	(56.902,00)	100,00	
02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.992.309.000,00	2.952.135.304,00	(40.173.696,00)	98,69	
02.2.02.04	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	799.465.000,00	787.542.450,00	(11.922.550,00)	98,51	
02.2.02.04.5.2	BELANJA MODAL	799.465.000,00	787.542.450,00	(11.922.550,00)	98,51	
02.2.02.04.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	799.465.000,00	787.542.450,00	(11.922.550,00)	98,51	
02.2.02.23	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	1.004.568.000,00	992.568.000,00	(12.000.000,00)	98,81	
02.2.02.23.5.1	BELANJA OPERASI	1.004.568.000,00	992.568.000,00	(12.000.000,00)	98,81	
02.2.02.23.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.004.568.000,00	992.568.000,00	(12.000.000,00)	98,81	
02.2.02.32	Pengelolaan dan Pongresian Alokasi Air Irigasi	1.188.276.000,00	1.172.028.854,00	(16.247.146,00)	98,63	
02.2.02.32.5.1	BELANJA OPERASI	788.276.000,00	774.592.854,00	(13.683.146,00)	98,26	
02.2.02.32.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	788.276.000,00	774.592.854,00	(13.683.146,00)	98,26	
02.2.02.32.5.2	BELANJA MODAL	400.000.000,00	397.434.000,00	(2.566.000,00)	99,36	
02.2.02.32.5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	400.000.000,00	397.434.000,00	(2.566.000,00)	99,36	
03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	19.302.644.645,00	19.038.639.861,00	(264.004.784,00)	98,63	
03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota	19.302.644.645,00	19.038.639.861,00	(264.004.784,00)	98,63	
03.2.01.25	Perencanaan Rancangan, Kebijakan, Strategi dan Teknik Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	471.558.000,00	430.938.641,00	(40.619.359,00)	91,39	
03.2.01.25.5.1	BELANJA OPERASI	271.558.000,00	232.942.591,00	(38.615.409,00)	85,78	
03.2.01.25.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	271.558.000,00	232.942.591,00	(38.615.409,00)	85,78	
03.2.01.25.5.2	BELANJA MODAL	200.000.000,00	197.996.250,00	(2.003.750,00)	98,99	
03.2.01.25.5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	200.000.000,00	197.996.250,00	(2.003.750,00)	98,99	
03.2.01.29	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	17.599.588.087,00	17.381.170.820,00	(218.417.267,00)	98,76	
03.2.01.29.5.1	BELANJA OPERASI	717.850.000,00	548.998.300,00	(170.851.700,00)	76,20	
03.2.01.29.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	717.850.000,00	548.998.300,00	(170.851.700,00)	76,20	
03.2.01.29.5.2	BELANJA MODAL	18.881.738.087,00	18.834.172.520,00	(47.565.567,00)	99,72	
03.2.01.29.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	18.881.738.087,00	18.834.172.520,00	(47.565.567,00)	99,72	
03.2.01.29	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	682.968.558,00	678.000.000,00	(4.968.558,00)	99,27	
03.2.01.29.5.1	BELANJA OPERASI	420.000.000,00	416.000.000,00	(4.000.000,00)	99,05	
03.2.01.29.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	420.000.000,00	416.000.000,00	(4.000.000,00)	99,05	
03.2.01.29.5.2	BELANJA MODAL	262.968.558,00	262.000.000,00	(968.558,00)	99,63	
03.2.01.29.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	262.968.558,00	262.000.000,00	(968.558,00)	99,63	
03.2.01.32	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	548.530.000,00	548.530.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.32.5.2	BELANJA MODAL	548.530.000,00	548.530.000,00	0,00	100,00	

bu



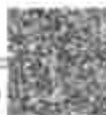
KODE REKESING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.01.32.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi	548.530.000,00	548.530.000,00	0,00	100,00	
05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	5.542.245.905,00	5.483.533.455,00	(58.712.450,00)	98,94	
05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (Jalan Daerah Kabupaten/Kota)	5.542.245.905,00	5.483.533.455,00	(58.712.450,00)	98,94	
05.2.01.23	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	5.485.805.905,00	5.447.533.455,00	(48.272.450,00)	99,12	
05.2.01.23.5.1	BELANJA OPERASI	1.535.806.000,00	1.531.832.450,00	(3.973.550,00)	99,74	
05.2.01.23.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.535.806.000,00	1.531.832.450,00	(3.973.550,00)	99,74	
05.2.01.23.5.2	BELANJA MODAL	3.958.959.905,00	3.915.701.005,00	(44.298.900,00)	98,88	
05.2.01.23.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi	3.958.959.905,00	3.915.701.005,00	(44.298.900,00)	98,88	
05.2.01.26	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	46.440.000,00	36.000.000,00	(10.440.000,00)	77,52	
05.2.01.36.5.1	BELANJA OPERASI	46.440.000,00	36.000.000,00	(10.440.000,00)	77,52	
05.2.01.36.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.440.000,00	36.000.000,00	(10.440.000,00)	77,52	
06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	969.337.000,00	962.593.850,00	(6.743.150,00)	99,30	
06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Tertutup/Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	969.337.000,00	962.593.850,00	(6.743.150,00)	99,30	
06.2.01.12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	969.337.000,00	962.593.850,00	(6.743.150,00)	99,30	
06.2.01.12.5.2	BELANJA MODAL	969.337.000,00	962.593.850,00	(6.743.150,00)	99,30	
06.2.01.12.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi	969.337.000,00	962.593.850,00	(6.743.150,00)	99,30	
08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	2.738.612.350,00	2.545.665.293,00	(192.947.057,00)	92,95	
08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	2.738.612.350,00	2.545.665.293,00	(192.947.057,00)	92,95	
08.2.01.18	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	683.344.000,00	682.057.000,00	(287.000,00)	99,96	
08.2.01.18.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	199.713.000,00	(287.000,00)	99,86	
08.2.01.18.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	199.713.000,00	(287.000,00)	99,86	
08.2.01.18.5.2	BELANJA MODAL	483.344.000,00	483.344.000,00	0,00	100,00	
08.2.01.18.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	483.344.000,00	483.344.000,00	0,00	100,00	
08.2.01.19	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	81.674.000,00	0,00	(81.674.000,00)	0	
08.2.01.19.5.1	BELANJA OPERASI	81.674.000,00	0,00	(81.674.000,00)	0	
08.2.01.19.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.674.000,00	0,00	(81.674.000,00)	0	

40



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
08.201.20	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	1.096.448.350,00	1.096.129.350,00	(2.320.000,00)	99,79	
08.201.20.5.1	BELANJA OPERASI	1.096.448.350,00	1.096.129.350,00	(2.320.000,00)	99,79	
08.201.20.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	39.680.000,00	(320.000,00)	99,20	
08.201.20.5.1.05	Belanja Hibah	1.056.448.350,00	1.056.448.350,00	(2.000.000,00)	99,81	
08.201.21	Pembangunan, Pemeliharaan, Pelestarian dan Pembonjangan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	449.871.000,00	449.553.000,00	(318.000,00)	99,94	
08.201.21.5.1	BELANJA OPERASI	449.871.000,00	449.871.000,00	0,00	100,00	
08.201.21.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	449.871.000,00	449.871.000,00	0,00	100,00	
08.201.21.5.2	BELANJA MODAL	40.000.000,00	39.682.000,00	(318.000,00)	99,21	
08.201.21.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.000.000,00	39.682.000,00	(318.000,00)	99,21	
08.201.23	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan	385.274.000,00	276.925.943,00	(108.348.057,00)	71,88	
08.201.23.5.1	BELANJA OPERASI	385.274.000,00	276.925.943,00	(108.348.057,00)	71,88	
08.201.23.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	385.274.000,00	276.925.943,00	(108.348.057,00)	71,88	
09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	2.584.048.750,00	2.527.355.913,00	(56.693.837,00)	97,81	
09.201	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	2.584.048.750,00	2.527.355.913,00	(56.693.837,00)	97,81	
09.201.08	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Persekitaran, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	2.199.074.000,00	2.198.373.000,00	(701.000,00)	99,97	
09.201.08.5.1	BELANJA OPERASI	1.999.074.000,00	1.999.074.000,00	0,00	100,00	
09.201.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.999.074.000,00	1.999.074.000,00	0,00	100,00	
09.201.08.5.2	BELANJA MODAL	200.000.000,00	199.299.000,00	(701.000,00)	99,65	
09.201.08.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jalangan, dan Irigasi	200.000.000,00	199.299.000,00	(701.000,00)	99,65	
09.201.09	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Persekitaran, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	384.975.750,00	328.982.913,00	(55.992.837,00)	85,46	
09.201.09.5.1	BELANJA OPERASI	384.975.750,00	328.982.913,00	(55.992.837,00)	85,46	
09.201.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	384.975.750,00	328.982.913,00	(55.992.837,00)	85,46	
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	38.485.356.900,00	38.351.943.754,00	(113.413.146,00)	99,71	
10.201	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	38.485.356.900,00	38.351.943.754,00	(113.413.146,00)	99,71	
10.201.32	Pembangunan Jalan	1.989.362.000,00	1.989.362.000,00	0,00	100,00	
10.201.32.5.2	BELANJA MODAL	1.989.362.000,00	1.989.362.000,00	0,00	100,00	
10.201.32.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jalangan, dan Irigasi	1.989.362.000,00	1.989.362.000,00	0,00	100,00	

ku



KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
10.2.01.33	Rekonstruksi Jalan	23.466.768.900,00	33.399.292.204,00	(97.376.696,00)	99,74	
10.2.01.33.5.1	BELANJA OPERASI	3.807.218.300,00	3.741.843.104,00	(65.676.196,00)	98,28	
10.2.01.33.5.1.01	Belanja Pegawai	78.900.000,00	78.900.000,00	0,00	100,00	
10.2.01.33.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.112.260.300,00	2.048.564.104,00	(63.696.196,00)	96,99	
10.2.01.33.5.1.05	Belanja Hibah	1.818.159.000,00	1.818.159.000,00	0,00	100,00	
10.2.01.33.5.2	BELANJA MODAL	20.678.449.600,00	28.657.749.100,00	(21.790.500,00)	99,83	
10.2.01.33.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Inggas	20.679.449.600,00	29.657.749.100,00	(21.790.500,00)	99,93	
10.2.01.38	Pemeliharaan Rutin Jembatan	99.799.000,00	94.799.550,00	(4.999.450,00)	95,00	
10.2.01.38.5.2	BELANJA MODAL	99.799.000,00	94.799.550,00	(4.999.450,00)	95,00	
10.2.01.38.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Inggas	99.799.000,00	94.799.550,00	(4.999.450,00)	95,00	
10.2.01.40	Pembangunan Jembatan	99.441.000,00	99.441.000,00	0,00	100,00	
10.2.01.40.5.2	BELANJA MODAL	99.441.000,00	99.441.000,00	0,00	100,00	
10.2.01.40.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Inggas	99.441.000,00	99.441.000,00	0,00	100,00	
10.2.01.46	Pemeliharaan Rutin Jalan	2.789.996.000,00	2.768.949.000,00	(21.047.000,00)	99,25	
10.2.01.46.5.1	BELANJA OPERASI	889.996.000,00	889.996.000,00	0,00	100,00	
10.2.01.46.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	889.996.000,00	889.996.000,00	0,00	100,00	
10.2.01.46.5.2	BELANJA MODAL	1.900.000.000,00	1.878.953.000,00	(21.047.000,00)	98,89	
10.2.01.46.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Inggas	1.900.000.000,00	1.878.953.000,00	(21.047.000,00)	98,89	
12	PROGRAM PENYELENGARAAN PENATAAN RUANG	963.210.418,00	888.302.004,00	(74.908.414,00)	92,22	
12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	963.210.418,00	888.302.004,00	(74.908.414,00)	92,22	
12.2.01.05	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	963.210.418,00	888.302.004,00	(74.908.414,00)	92,22	
12.2.01.05.3.1	BELANJA OPERASI	963.210.418,00	888.302.004,00	(74.908.414,00)	92,22	
12.2.01.05.3.1.02	Belanja Barang dan Jasa	963.210.418,00	888.302.004,00	(74.908.414,00)	92,22	
	SURPLUS / DEFISIT	(82.723.538.367,00)	(81.862.403.360,00)	1.061.135.007,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(82.723.538.367,00)	(81.862.403.360,00)	1.061.135.007,00	0	

64





PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2024

Urusan Pemerintahan : 1.04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

SKPD : 1-04.2-10.0-00.01 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	32.582.204.156,00	31.114.534.791,00	(1.467.669.365,00)	95,50	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.987.515.824,00	2.869.198.578,00	(118.317.246,00)	96,04	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.805.295.244,00	1.750.518.377,00	(54.776.867,00)	96,97	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.782.855.244,00	1.728.438.377,00	(54.417.867,00)	96,95	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.782.855.244,00	1.728.438.377,00	(54.417.867,00)	96,95	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.782.855.244,00	1.728.438.377,00	(54.417.867,00)	96,95	
01.2.02.03	Pelaksanaan Perencanaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	22.430.000,00	22.080.000,00	(350.000,00)	98,44	
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	22.430.000,00	22.080.000,00	(350.000,00)	98,44	
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	22.080.000,00	22.080.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.000,00	0,00	(350.000,00)	0	
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	58.500.000,00	51.000.000,00	(7.500.000,00)	87,18	
01.2.03.06	Perencanaan Barang Milik Daerah pada SKPD	58.500.000,00	51.000.000,00	(7.500.000,00)	87,18	
01.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	58.500.000,00	51.000.000,00	(7.500.000,00)	87,18	
01.2.03.06.5.1.01	Belanja Pegawai	58.500.000,00	51.000.000,00	(7.500.000,00)	87,18	
01.2.08	Administrasi Umum Perangkat Daerah	720.149.080,00	711.628.201,00	(8.520.879,00)	98,82	
01.2.08.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	114.000,00	0,00	(114.000,00)	0	
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	114.000,00	0,00	(114.000,00)	0	
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.000,00	0,00	(114.000,00)	0	
01.2.08.02	Penyediaan Perawatan dan Peningkatan Kantor	5.832.680,00	3.908.000,00	(1.924.680,00)	67,00	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	5.832.680,00	3.908.000,00	(1.924.680,00)	67,00	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.832.680,00	3.908.000,00	(1.924.680,00)	67,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.413.250,00	410.000,00	(3.003.250,00)	12,01	
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	3.413.250,00	410.000,00	(3.003.250,00)	12,01	
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.413.250,00	410.000,00	(3.003.250,00)	12,01	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cebakan dan Penggandaan	31.096.650,00	30.070.800,00	(1.025.850,00)	96,70	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	31.096.650,00	30.070.800,00	(1.025.850,00)	96,70	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.096.650,00	30.070.800,00	(1.025.850,00)	96,70	
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	678.692.500,00	677.239.401,00	(2.453.099,00)	99,64	
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	678.692.500,00	677.239.401,00	(2.453.099,00)	99,64	
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	678.692.500,00	677.239.401,00	(2.453.099,00)	99,64	
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	194.261.100,00	176.212.000,00	(18.049.100,00)	90,71	
01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	78.377.100,00	76.500.000,00	(1.877.100,00)	97,61	
01.2.07.02.5.2	BELANJA MODAL	78.377.100,00	76.500.000,00	(1.877.100,00)	97,61	
01.2.07.02.5.2.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	78.377.100,00	76.500.000,00	(1.877.100,00)	97,61	
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	115.884.000,00	99.712.000,00	(16.172.000,00)	86,04	
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	115.884.000,00	99.712.000,00	(16.172.000,00)	86,04	
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	115.884.000,00	99.712.000,00	(16.172.000,00)	86,04	
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	156.569.200,00	137.056.900,00	(18.532.300,00)	88,09	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.789.200,00	13.056.900,00	(9.732.300,00)	57,29	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	22.789.200,00	13.056.900,00	(9.732.300,00)	57,29	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.789.200,00	13.056.900,00	(9.732.300,00)	57,29	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	132.800.000,00	124.000.000,00	(8.800.000,00)	93,37	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	132.800.000,00	124.000.000,00	(8.800.000,00)	93,37	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.800.000,00	124.000.000,00	(8.800.000,00)	93,37	
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.730.000,00	42.763.100,00	(10.966.900,00)	79,63	
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.330.000,00	39.483.100,00	(846.900,00)	97,90	
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	40.330.000,00	39.483.100,00	(846.900,00)	97,90	
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.330.000,00	39.483.100,00	(846.900,00)	97,90	
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.400.000,00	3.300.000,00	(10.100.000,00)	24,63	
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	13.400.000,00	3.300.000,00	(10.100.000,00)	24,63	
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.400.000,00	3.300.000,00	(10.100.000,00)	24,63	
03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	256.914.520,00	225.771.433,00	(31.143.087,00)	87,88	
03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	103.062.960,00	82.830.520,00	(20.232.440,00)	80,37	

GA

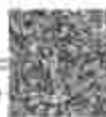


KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.04	Penyediaan Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	25.210.500,00	16.152.520,00	(9.057.980,00)	64,07	
03.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	25.210.500,00	16.152.520,00	(9.057.980,00)	64,07	
03.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.210.500,00	16.152.520,00	(9.057.980,00)	64,07	
03.2.02.14	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	77.852.460,00	66.678.000,00	(11.174.460,00)	85,65	
03.2.02.14.5.1	BELANJA OPERASI	77.852.460,00	66.678.000,00	(11.174.460,00)	85,65	
03.2.02.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.852.460,00	66.678.000,00	(11.174.460,00)	85,65	
03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	153.851.560,00	142.940.913,00	(10.910.647,00)	92,91	
03.2.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Perumahan/Perumahan Permukiman Kumuh	153.851.560,00	142.940.913,00	(10.910.647,00)	92,91	
03.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	153.851.560,00	142.940.913,00	(10.910.647,00)	92,91	
03.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.851.560,00	142.940.913,00	(10.910.647,00)	92,91	
04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	18.284.281.495,00	18.135.797.000,00	(148.484.495,00)	99,19	
04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	18.284.281.495,00	18.135.797.000,00	(148.484.495,00)	99,19	
04.2.01.01	Pertbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	18.284.281.495,00	18.135.797.000,00	(148.484.495,00)	99,19	
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	18.284.281.495,00	18.135.797.000,00	(148.484.495,00)	99,19	
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.252.281.495,00	3.109.797.000,00	(142.484.495,00)	95,62	
04.2.01.01.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	15.032.000.000,00	15.026.000.000,00	(6.000.000,00)	99,96	
05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	10.703.501.109,00	9.534.554.780,00	(1.168.946.329,00)	89,08	
05.2.01	Usulan Penyelenggaraan PSU Perumahan	10.703.501.109,00	9.534.554.780,00	(1.168.946.329,00)	89,08	
05.2.01.09	Kerja Sama Penyediaan / Pengelolaan PSU Perumahan	10.703.501.109,00	9.534.554.780,00	(1.168.946.329,00)	89,08	
05.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	2.099.678.109,00	1.936.174.500,00	(163.503.609,00)	92,21	
05.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.099.678.109,00	1.936.174.500,00	(163.503.609,00)	92,21	
05.2.01.09.5.2	BELANJA MODAL	8.603.823.000,00	7.598.380.280,00	(1.005.442.720,00)	88,31	
05.2.01.09.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi	8.603.823.000,00	7.598.380.280,00	(1.005.442.720,00)	88,31	
10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	349.991.408,00	349.213.000,00	(778.408,00)	99,78	
10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	349.991.408,00	349.213.000,00	(778.408,00)	99,78	
10.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	349.991.408,00	349.213.000,00	(778.408,00)	99,78	
10.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	349.991.408,00	349.213.000,00	(778.408,00)	99,78	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
10.201.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	349.991.408,00	349.213.000,00	(778.408,00)	99,78	
	SURPLUS / DEFISIT	(32.582.204.196,00)	(21.114.534.791,00)	1.467.669.365,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(32.582.204.196,00)	(21.114.534.791,00)	1.467.669.365,00	0	

Sw





PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2024

Urusan Pemerintahan : 1.05 KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

SKPD : 1-05 0-00 0-00.01 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	3.029.058.710,00	2.799.415.817,00	(229.643.893,00)	92,42	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.548.683.710,00	2.363.848.417,00	(184.835.293,00)	93,52	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.950.773.500,00	1.816.844.666,00	(133.928.834,00)	92,66	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.952.826.000,00	1.809.044.666,00	(143.781.334,00)	92,64	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.952.826.000,00	1.809.044.666,00	(143.781.334,00)	92,64	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.952.826.000,00	1.809.044.666,00	(143.781.334,00)	92,64	
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.947.500,00	7.800.000,00	(147.500,00)	98,14	
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	7.947.500,00	7.800.000,00	(147.500,00)	98,14	
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	147.500,00	0,00	(147.500,00)	0	
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	16.540.000,00	11.400.000,00	(5.140.000,00)	68,92	
01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16.540.000,00	11.400.000,00	(5.140.000,00)	68,92	
01.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	16.540.000,00	11.400.000,00	(5.140.000,00)	68,92	
01.2.03.06.5.1.01	Belanja Pegawai	16.200.000,00	11.400.000,00	(4.800.000,00)	70,37	
01.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	340.000,00	0,00	(340.000,00)	0	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	306.948.000,00	303.996.950,00	(2.951.050,00)	99,04	
01.2.06.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	306.948.000,00	303.996.950,00	(2.951.050,00)	99,04	
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	306.948.000,00	303.996.950,00	(2.951.050,00)	99,04	
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	306.948.000,00	303.996.950,00	(2.951.050,00)	99,04	
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	182.734.410,00	172.456.613,00	(10.277.797,00)	94,38	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.020.250,00	22.395.613,00	(7.624.637,00)	74,60	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.208.02.5.1	BELANJA OPERASI	30.020.250,00	22.385.813,00	(7.624.637,00)	74,60	
01.208.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.020.250,00	22.385.813,00	(7.624.637,00)	74,60	
01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	152.714.160,00	150.061.000,00	(2.653.160,00)	98,26	
01.208.04.5.1	BELANJA OPERASI	152.714.160,00	150.061.000,00	(2.653.160,00)	98,26	
01.208.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.714.160,00	150.061.000,00	(2.653.160,00)	98,26	
01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Peringkat Urusan Pemerintahan Daerah	51.657.800,00	78.950.188,00	(2.737.612,00)	96,65	
01.209.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.462.800,00	42.545.188,00	(1.917.612,00)	95,69	
01.209.01.5.1	BELANJA OPERASI	44.462.800,00	42.545.188,00	(1.917.612,00)	95,69	
01.209.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.462.800,00	42.545.188,00	(1.917.612,00)	95,69	
01.209.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.225.000,00	36.405.000,00	(820.000,00)	97,80	
01.209.02.5.1	BELANJA OPERASI	37.225.000,00	36.405.000,00	(820.000,00)	97,80	
01.209.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.225.000,00	36.405.000,00	(820.000,00)	97,80	
03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	480.378.000,00	415.767.400,00	(64.608.600,00)	86,55	
03.202	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	382.083.900,00	385.531.200,00	(16.552.700,00)	95,67	
03.202.06	Peningkatan Kapasitas Tim Respon Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	310.948.900,00	308.401.600,00	(2.547.300,00)	99,18	
03.202.06.5.1	BELANJA OPERASI	310.948.900,00	308.401.600,00	(2.547.300,00)	99,18	
03.202.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	310.948.900,00	308.401.600,00	(2.547.300,00)	99,18	
03.202.17	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	71.135.000,00	57.129.800,00	(14.005.400,00)	80,31	
03.202.17.5.1	BELANJA OPERASI	71.135.000,00	57.129.800,00	(14.005.400,00)	80,31	
03.202.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.135.000,00	57.129.800,00	(14.005.400,00)	80,31	
03.203	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	52.029.000,00	28.046.100,00	(23.982.900,00)	53,90	
03.203.09	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	52.029.000,00	28.046.100,00	(23.982.900,00)	53,90	
03.203.09.5.1	BELANJA OPERASI	52.029.000,00	28.046.100,00	(23.982.900,00)	53,90	
03.203.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.029.000,00	28.046.100,00	(23.982.900,00)	53,90	
03.204	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	46.263.100,00	22.190.100,00	(24.073.000,00)	47,97	
03.204.10	Koordinasi penanganan Pasca-bencana Kabupaten/Kota	46.263.100,00	22.190.100,00	(24.073.000,00)	47,97	
03.204.10.5.1	BELANJA OPERASI	46.263.100,00	22.190.100,00	(24.073.000,00)	47,97	
03.204.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.263.100,00	22.190.100,00	(24.073.000,00)	47,97	
	SURPLUS / DEFISIT	(3.029.059.710,00)	(2.798.415.817,00)	229.643.893,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(3.029.059.710,00)	(2.798.415.817,00)	229.643.893,00	0	



44



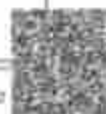
PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2024

Urusan Pemerintahan : 1.05 KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

BKPD : 1-05.0-00.0-00.02 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.0	BELANJA DAERAH	4.532.164.000,00	4.278.424.263,00	(253.739.737,00)	94,40	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.517.827.818,00	2.279.340.903,00	(238.486.915,00)	90,54	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.021.931.453,00	1.789.026.753,00	(232.904.700,00)	88,48	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.014.116.453,00	1.781.226.753,00	(232.889.700,00)	88,44	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.014.116.453,00	1.781.226.753,00	(232.889.700,00)	88,44	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.014.116.453,00	1.781.226.753,00	(232.889.700,00)	88,44	
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.815.000,00	7.800.000,00	(15.000,00)	99,81	
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	7.815.000,00	7.800.000,00	(15.000,00)	99,81	
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000,00	0,00	(15.000,00)	0	
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.03.06.5.1.01	Belanja Pegawai	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	238.182.960,00	237.078.650,00	(2.086.310,00)	99,13	
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.865.580,00	1.844.700,00	(20.880,00)	98,88	
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.865.580,00	1.844.700,00	(20.880,00)	98,88	
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.865.580,00	1.844.700,00	(20.880,00)	98,88	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.781.500,00	2.772.700,00	(2.008.800,00)	57,99	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	4.781.500,00	2.772.700,00	(2.008.800,00)	57,99	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.781.500,00	2.772.700,00	(2.008.800,00)	57,99	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.206.08	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	232.515.880,00	232.459.250,00	(56.630,00)	99,98	
01.206.08.5.1	BELANJA OPERASI	232.515.880,00	232.459.250,00	(56.630,00)	99,98	
01.206.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	232.515.880,00	232.459.250,00	(56.630,00)	99,98	
01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.479.765,00	74.419.500,00	(3.060.265,00)	96,05	
01.208.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	575.000,00	570.000,00	(5.000,00)	99,13	
01.208.01.5.1	BELANJA OPERASI	575.000,00	570.000,00	(5.000,00)	99,13	
01.208.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	575.000,00	570.000,00	(5.000,00)	99,13	
01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.050.000,00	3.000.000,00	(50.000,00)	98,36	
01.208.02.5.1	BELANJA OPERASI	3.050.000,00	3.000.000,00	(50.000,00)	98,36	
01.208.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.050.000,00	3.000.000,00	(50.000,00)	98,36	
01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	73.854.765,00	70.849.500,00	(3.005.265,00)	95,93	
01.208.04.5.1	BELANJA OPERASI	73.854.765,00	70.849.500,00	(3.005.265,00)	95,93	
01.208.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.854.765,00	70.849.500,00	(3.005.265,00)	95,93	
01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	172.453.440,00	172.218.000,00	(235.440,00)	99,86	
01.209.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.237.800,00	44.212.800,00	(25.000,00)	99,94	
01.209.01.5.1	BELANJA OPERASI	44.237.800,00	44.212.800,00	(25.000,00)	99,94	
01.209.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.237.800,00	44.212.800,00	(25.000,00)	99,94	
01.209.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	121.046.500,00	120.998.200,00	(50.300,00)	99,96	
01.209.02.5.1	BELANJA OPERASI	121.046.500,00	120.998.200,00	(50.300,00)	99,96	
01.209.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.046.500,00	120.998.200,00	(50.300,00)	99,96	
01.209.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.189.140,00	7.009.000,00	(180.140,00)	97,77	
01.209.09.5.1	BELANJA OPERASI	7.189.140,00	7.009.000,00	(180.140,00)	97,77	
01.209.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.189.140,00	7.009.000,00	(180.140,00)	97,77	
02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.627.557.375,00	1.613.890.850,00	(13.666.525,00)	99,16	
02.201	Pananganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.579.785.375,00	1.566.243.850,00	(13.541.525,00)	99,14	
02.201.15	Pencegahan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	1.579.785.375,00	1.566.243.850,00	(13.541.525,00)	99,14	
02.201.15.5.1	BELANJA OPERASI	1.579.785.375,00	1.566.243.850,00	(13.541.525,00)	99,14	

4



KODE REKENING	URAYAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.15.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.579.785.375,00	1.566.243.850,00	(13.541.525,00)	99,14	
02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten / Kota	47.772.000,00	47.847.000,00	(125.000,00)	99,74	
02.2.03.06	Perimbangan Kapasitas dan Karier PPNS	47.772.000,00	47.847.000,00	(125.000,00)	99,74	
02.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	47.772.000,00	47.847.000,00	(125.000,00)	99,74	
02.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.772.000,00	47.847.000,00	(125.000,00)	99,74	
04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	387.000.000,00	385.192.500,00	(1.807.500,00)	99,53	
04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Peranginan Bahan Berbahaya dan Beracun Kabakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	387.000.000,00	385.192.500,00	(1.807.500,00)	99,53	
04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kabakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	387.000.000,00	385.192.500,00	(1.807.500,00)	99,53	
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	387.000.000,00	385.192.500,00	(1.807.500,00)	99,53	
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	387.000.000,00	385.192.500,00	(1.807.500,00)	99,53	
	SURPLUS / DEFISIT	(4.532.184.993,00)	(4.278.424.253,00)	253.760.740,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(4.532.184.993,00)	(4.278.424.253,00)	253.760.740,00	0	

4





PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2024

Urusan Pemerintahan : 1.06 SOSIAL

SKPD : 1-06.0-00.0-00.01 DINAS SOSIAL

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	4.474.036.731,00	4.144.060.711,00	(330.876.020,00)	92,61	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.676.297.361,00	2.727.212.071,00	(151.085.290,00)	94,75	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.325.117.629,00	2.163.433.822,00	(141.683.807,00)	93,91	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.316.318.629,00	2.175.633.822,00	(140.684.807,00)	93,93	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.316.318.629,00	2.175.633.822,00	(140.684.807,00)	93,93	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.316.318.629,00	2.175.633.822,00	(140.684.807,00)	93,93	
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8.799.000,00	7.800.000,00	(999.000,00)	88,55	
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	8.799.000,00	7.800.000,00	(999.000,00)	88,55	
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	999.000,00	0,00	(999.000,00)	0	
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.03.06.5.1.01	Belanja Pegawai	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	237.655.750,00	234.658.118,00	(2.997.632,00)	98,82	
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.409.250,00	5.239.768,00	(2.169.482,00)	70,72	
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	7.409.250,00	5.239.768,00	(2.169.482,00)	70,72	
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.409.250,00	5.239.768,00	(2.169.482,00)	70,72	
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	230.246.500,00	229.618.350,00	(627.150,00)	99,73	
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	230.246.500,00	229.618.350,00	(627.150,00)	99,73	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.08.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	230.246.500,00	229.619.350,00	(627.150,00)	99,73	
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.307.612,00	24.764.123,00	(543.489,00)	97,85	
01.2.07.05	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.307.612,00	24.764.123,00	(543.489,00)	97,85	
01.2.07.05.5.1	BELANJA OPERASI	2.285.122,00	2.264.123,00	(999,00)	99,96	
01.2.07.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.285.122,00	2.264.123,00	(999,00)	99,96	
01.2.07.05.5.2	BELANJA MODAL	23.042.490,00	22.500.000,00	(542.490,00)	97,65	
01.2.07.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.042.490,00	22.500.000,00	(542.490,00)	97,65	
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	201.108.870,00	197.482.808,00	(3.626.062,00)	98,20	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	201.108.870,00	197.482.808,00	(3.626.062,00)	98,20	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	201.108.870,00	197.482.808,00	(3.626.062,00)	98,20	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	201.108.870,00	197.482.808,00	(3.626.062,00)	98,20	
01.2.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.907.500,00	72.472.200,00	(2.435.300,00)	96,75	
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	74.907.500,00	72.472.200,00	(2.435.300,00)	96,75	
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	74.907.500,00	72.472.200,00	(2.435.300,00)	96,75	
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.907.500,00	72.472.200,00	(2.435.300,00)	96,75	
02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	253.248.750,00	248.250.000,00	(4.998.750,00)	98,03	
02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	253.248.750,00	248.250.000,00	(4.998.750,00)	98,03	
02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kemasyarakatan Kabupaten/Kota	253.248.750,00	248.250.000,00	(4.998.750,00)	98,03	
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	253.248.750,00	248.250.000,00	(4.998.750,00)	98,03	
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	253.248.750,00	248.250.000,00	(4.998.750,00)	98,03	
04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	42.865.800,00	42.321.900,00	(543.900,00)	98,73	
04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Paralel Sosial	42.865.800,00	42.321.900,00	(543.900,00)	98,73	
04.2.02.05	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	42.865.800,00	42.321.900,00	(543.900,00)	98,73	
04.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	42.865.800,00	42.321.900,00	(543.900,00)	98,73	
04.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.865.800,00	42.321.900,00	(543.900,00)	98,73	
05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	63.446.820,00	61.301.190,00	(2.145.630,00)	96,62	
05.2.02	Pengkajian Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	63.446.820,00	61.301.190,00	(2.145.630,00)	96,62	
05.2.02.02	Pengkajian Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	63.446.820,00	61.301.190,00	(2.145.630,00)	96,62	
05.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	63.446.820,00	61.301.190,00	(2.145.630,00)	96,62	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
05.202.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.446.820,00	81.301.190,00	(2.145.630,00)	98,62	
05.202.03	Facilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	450.310.800,00	345.310.800,00	(105.000.000,00)	78,88	
05.202.03.5.1	BELANJA OPERASI	450.310.800,00	345.310.800,00	(105.000.000,00)	78,88	
05.202.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	310.800,00	310.800,00	0,00	100,00	
05.202.03.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	450.000.000,00	345.000.000,00	(105.000.000,00)	78,87	
05.202.04	Facilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	417.301.280,00	360.496.500,00	(56.804.780,00)	86,39	
05.202.04.5.1	BELANJA OPERASI	417.301.280,00	360.496.500,00	(56.804.780,00)	86,39	
05.202.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
05.202.04.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	416.101.280,00	359.296.500,00	(56.804.780,00)	86,35	
06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	369.467.940,00	359.168.250,00	(10.299.690,00)	97,21	
06.201	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	369.467.940,00	359.168.250,00	(10.299.690,00)	97,21	
06.201.01	Penyediaan Makanan	280.108.500,00	278.970.750,00	(1.137.750,00)	99,59	
06.201.01.5.1	BELANJA OPERASI	280.108.500,00	278.970.750,00	(1.137.750,00)	99,59	
06.201.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	280.108.500,00	278.970.750,00	(1.137.750,00)	99,59	
06.201.02	Penyediaan Sandang	89.359.440,00	80.197.500,00	(9.161.940,00)	89,75	
06.201.02.5.1	BELANJA OPERASI	89.359.440,00	80.197.500,00	(9.161.940,00)	89,75	
06.201.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.359.440,00	80.197.500,00	(9.161.940,00)	89,75	
	SURPLUS / DEFISIT	(4.474.938.731,00)	(4.144.060.711,00)	330.878.020,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKEMAAAN	(4.474.938.731,00)	(4.144.060.711,00)	330.878.020,00	0	

W





PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

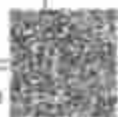
Tahun Anggaran 2024

Urusan Pemerintahan : 2.09 PANGAN

SKPD : 2-09.0-00.0-00.01 DINAS KETAHANAN PANGAN

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	3.852.190.270,00	3.767.243.406,00	(84.946.872,00)	97,54	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.077.653.829,00	1.989.190.148,00	(88.463.681,00)	95,74	
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	662.500,00	637.500,00	(25.000,00)	96,23	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	662.500,00	637.500,00	(25.000,00)	96,23	
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	662.500,00	637.500,00	(25.000,00)	96,23	
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	662.500,00	637.500,00	(25.000,00)	96,23	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.677.930.899,00	1.593.717.812,00	(84.213.087,00)	94,97	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.672.550.899,00	1.588.437.812,00	(84.113.087,00)	94,97	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.672.550.899,00	1.588.437.812,00	(84.113.087,00)	94,97	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.672.550.899,00	1.588.437.812,00	(84.113.087,00)	94,97	
01.2.02.03	Pelaksanaan Perencanaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.380.000,00	5.280.000,00	(100.000,00)	98,14	
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	5.380.000,00	5.280.000,00	(100.000,00)	98,14	
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	0,00	(100.000,00)	0	
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.03.05	Perencanaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.03.05.5.1.01	Belanja Pegawai	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	261.676.500,00	261.462.000,00	(214.500,00)	99,92	
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	261.676.500,00	261.462.000,00	(214.500,00)	99,92	
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	261.676.500,00	261.462.000,00	(214.500,00)	99,92	

LN



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.208.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	201.676.500,00	201.462.000,00	(214.500,00)	99,92	
01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.770.930,00	76.832.636,00	(3.838.094,00)	95,25	
01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.490.100,00	6.708.336,00	(3.781.764,00)	63,95	
01.208.02.5.1	BELANJA OPERASI	10.490.100,00	6.708.336,00	(3.781.764,00)	63,95	
01.208.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.490.100,00	6.708.336,00	(3.781.764,00)	63,95	
01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	70.280.830,00	70.224.500,00	(56.330,00)	99,92	
01.208.04.5.1	BELANJA OPERASI	70.280.830,00	70.224.500,00	(56.330,00)	99,92	
01.208.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.280.830,00	70.224.500,00	(56.330,00)	99,92	
01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.812.800,00	42.640.000,00	(172.800,00)	99,60	
01.209.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.812.800,00	42.640.000,00	(172.800,00)	99,60	
01.209.01.5.1	BELANJA OPERASI	42.812.800,00	42.640.000,00	(172.800,00)	99,60	
01.209.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.812.800,00	42.640.000,00	(172.800,00)	99,60	
03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.771.306.849,00	1.764.823.458,00	(6.483.391,00)	99,63	
03.201	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	738.260.037,50	734.707.026,00	(1.562.011,50)	99,70	
03.201.06	Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produksi dan Konsumsi di Kabupaten/Kota	730.315.037,50	729.687.026,00	(628.011,50)	99,91	
03.201.06.5.1	BELANJA OPERASI	730.315.037,50	729.687.026,00	(628.011,50)	99,91	
03.201.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.715.037,50	33.087.026,00	(628.011,50)	98,14	
03.201.06.5.1.04	Belanja Subsidi	696.600.000,00	696.600.000,00	0,00	100,00	
03.201.14	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	5.954.000,00	5.020.000,00	(934.000,00)	84,31	
03.201.14.5.1	BELANJA OPERASI	5.954.000,00	5.020.000,00	(934.000,00)	84,31	
03.201.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.954.000,00	5.020.000,00	(934.000,00)	84,31	
03.202	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	947.016.000,00	947.016.000,00	0,00	100,00	
03.202.03	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	947.016.000,00	947.016.000,00	0,00	100,00	
03.202.03.5.1	BELANJA OPERASI	947.016.000,00	947.016.000,00	0,00	100,00	
03.202.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	947.016.000,00	947.016.000,00	0,00	100,00	
03.204	Pelaksanaan Partisipasi Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	88.021.811,50	63.100.432,00	(4.921.379,50)	94,41	
03.204.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	13.219.570,00	11.862.400,00	(1.357.170,00)	89,73	

SW



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.204.01.5.1	BELANJA OPERASI	13.219.579,00	11.862.400,00	(1.357.179,00)	89,73	
03.204.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.219.579,00	11.862.400,00	(1.357.179,00)	89,73	
03.204.02	Pembudayaan Masyarakat dalam Penganteragamaan Konsumsi Pangan Bertindak Sumber Daya Lokal	88.662.232,50	86.198.032,00	(3.464.200,50)	95,03	
03.204.02.5.1	BELANJA OPERASI	88.662.232,50	86.198.032,00	(3.464.200,50)	95,03	
03.204.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.662.232,50	86.198.032,00	(3.464.200,50)	95,03	
03.204.03	Kordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	5.140.000,00	5.040.000,00	(100.000,00)	98,05	
03.204.03.5.1	BELANJA OPERASI	5.140.000,00	5.040.000,00	(100.000,00)	98,05	
03.204.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.140.000,00	5.040.000,00	(100.000,00)	98,05	
05	PROGRAM PENGAWASAR KEAMANAN PANGAN	13.229.800,00	13.229.800,00	0,00	100,00	
05.201	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	13.229.800,00	13.229.800,00	0,00	100,00	
05.201.06	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	13.229.800,00	13.229.800,00	0,00	100,00	
05.201.09.5.1	BELANJA OPERASI	13.229.800,00	13.229.800,00	0,00	100,00	
05.201.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.229.800,00	13.229.800,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / DEFISIT	(3.862.190.278,00)	(3.767.243.406,00)	94.946.872,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(3.862.190.278,00)	(3.767.243.406,00)	94.946.872,00	0	

lw





PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2024

Urusan Pemerintahan : 2.11 LINGKUNGAN HIDUP

SKPD : 2-11.0-00.0-00.01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	5.470.804.850,00	5.272.020.980,00	(198.783.870,00)	96,37	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.629.074.750,00	2.477.487.423,00	(151.587.327,00)	94,23	
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.283.500,00	7.073.500,00	(210.000,00)	97,13	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	986.000,00	986.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	986.000,00	986.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	986.000,00	986.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	997.500,00	997.500,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	997.500,00	997.500,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	997.500,00	997.500,00	0,00	100,00	
01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	990.000,00	990.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	990.000,00	990.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	990.000,00	990.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	997.500,00	787.500,00	(210.000,00)	78,95	
01.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	997.500,00	787.500,00	(210.000,00)	78,95	
01.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	997.500,00	787.500,00	(210.000,00)	78,95	
01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	990.000,00	990.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	990.000,00	990.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	990.000,00	990.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.522.500,00	1.522.500,00	0,00	100,00	
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.522.500,00	1.522.500,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.201.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.522.500,00	1.522.500,00	0,00	100,00	
01.201.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
01.201.07.5.1	BELANJA OPERASI	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
01.201.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
01.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.108.416.024,00	1.967.901.457,00	(140.514.567,00)	93,33	
01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.091.698.024,00	1.954.203.457,00	(137.494.567,00)	93,43	
01.202.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.091.698.024,00	1.954.203.457,00	(137.494.567,00)	93,43	
01.202.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.091.698.024,00	1.954.203.457,00	(137.494.567,00)	93,43	
01.202.02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.015.000,00	10.015.000,00	0,00	100,00	
01.202.02.5.1	BELANJA OPERASI	10.015.000,00	10.015.000,00	0,00	100,00	
01.202.02.5.1.01	Belanja Pegawai	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
01.202.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.215.000,00	2.215.000,00	0,00	100,00	
01.202.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.121.500,00	1.934.000,00	(1.187.500,00)	61,96	
01.202.05.5.1	BELANJA OPERASI	3.121.500,00	1.934.000,00	(1.187.500,00)	61,96	
01.202.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.121.500,00	1.934.000,00	(1.187.500,00)	61,96	
01.202.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.591.500,00	1.649.000,00	(1.942.500,00)	45,91	
01.202.07.5.1	BELANJA OPERASI	3.591.500,00	1.649.000,00	(1.942.500,00)	45,91	
01.202.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.591.500,00	1.649.000,00	(1.942.500,00)	45,91	
01.203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	14.124.000,00	14.124.000,00	0,00	100,00	
01.203.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14.124.000,00	14.124.000,00	0,00	100,00	
01.203.06.5.1	BELANJA OPERASI	14.124.000,00	14.124.000,00	0,00	100,00	
01.203.06.5.1.01	Belanja Pegawai	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	100,00	
01.203.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	324.000,00	324.000,00	0,00	100,00	
01.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	315.854.800,00	314.374.800,00	(1.480.000,00)	99,53	
01.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.995.000,00	2.959.000,00	(36.000,00)	98,80	
01.206.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.995.000,00	2.959.000,00	(36.000,00)	98,80	
01.206.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.995.000,00	2.959.000,00	(36.000,00)	98,80	
01.206.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.152.800,00	9.558.800,00	(594.000,00)	93,78	
01.206.05.5.1	BELANJA OPERASI	10.152.800,00	9.558.800,00	(594.000,00)	93,78	
01.206.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.152.800,00	9.558.800,00	(594.000,00)	93,78	
01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	302.667.000,00	301.857.000,00	(810.000,00)	99,73	
01.206.09.5.1	BELANJA OPERASI	302.667.000,00	301.857.000,00	(810.000,00)	99,73	
01.206.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	302.667.000,00	301.857.000,00	(810.000,00)	99,73	
01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	133.248.960,00	126.060.100,00	(7.188.860,00)	94,60	
01.208.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.208.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	100,00	
01.208.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	100,00	
01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.140.000,00	6.140.000,00	0,00	100,00	
01.208.02.5.1	BELANJA OPERASI	6.140.000,00	6.140.000,00	0,00	100,00	
01.208.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.140.000,00	6.140.000,00	0,00	100,00	
01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	125.628.960,00	118.440.100,00	(7.188.860,00)	94,28	
01.208.04.5.1	BELANJA OPERASI	125.628.960,00	118.440.100,00	(7.188.860,00)	94,28	
01.208.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.628.960,00	118.440.100,00	(7.188.860,00)	94,28	
01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.147.496,00	48.063.566,00	(2.083.930,00)	95,82	
01.209.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43.620.000,00	41.526.100,00	(2.093.900,00)	95,20	
01.209.01.5.1	BELANJA OPERASI	43.620.000,00	41.526.100,00	(2.093.900,00)	95,20	
01.209.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.620.000,00	41.526.100,00	(2.093.900,00)	95,20	
01.209.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.918.300,00	3.918.300,00	0,00	100,00	
01.209.06.5.1	BELANJA OPERASI	3.918.300,00	3.918.300,00	0,00	100,00	
01.209.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.918.300,00	3.918.300,00	0,00	100,00	
01.209.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.609.196,00	2.609.196,00	0,00	100,00	
01.209.09.5.1	BELANJA OPERASI	2.609.196,00	2.609.196,00	0,00	100,00	
01.209.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.609.196,00	2.609.196,00	0,00	100,00	
03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	610.373.600,00	605.169.112,00	(5.204.488,00)	99,15	
03.201	Pencegahan Pencemaran dari atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	610.373.600,00	605.169.112,00	(5.204.488,00)	99,15	
03.201.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	610.373.600,00	605.169.112,00	(5.204.488,00)	99,15	
03.201.01.5.1	BELANJA OPERASI	610.373.600,00	605.169.112,00	(5.204.488,00)	99,15	
03.201.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	610.373.600,00	605.169.112,00	(5.204.488,00)	99,15	
05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	101.919.000,00	101.909.750,00	(9.250,00)	99,99	
05.202	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	101.919.000,00	101.909.750,00	(9.250,00)	99,99	
05.202.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	101.919.000,00	101.909.750,00	(9.250,00)	99,99	
05.202.02.5.1	BELANJA OPERASI	101.919.000,00	101.909.750,00	(9.250,00)	99,99	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
05.202.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.919.000,00	101.909.750,00	(9.250,00)	99,99	
11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.129.437.500,00	2.087.454.885,00	(41.982.605,00)	98,03	
11.201	Pengelolaan Sampah	2.093.210.000,00	2.053.774.895,00	(39.435.305,00)	98,12	
11.201.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten / Kota	1.402.775.000,00	1.393.817.895,00	(8.957.105,00)	99,38	
11.201.07.5.1	BELANJA OPERASI	772.775.000,00	763.817.895,00	(8.957.105,00)	98,84	
11.201.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	772.775.000,00	763.817.895,00	(8.957.105,00)	98,84	
11.201.07.5.2	BELANJA MODAL	630.000.000,00	630.000.000,00	0,00	100,00	
11.201.07.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Inpas	630.000.000,00	630.000.000,00	0,00	100,00	
11.201.09	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	690.435.000,00	659.956.800,00	(30.478.200,00)	95,59	
11.201.09.5.1	BELANJA OPERASI	690.435.000,00	659.956.800,00	(30.478.200,00)	95,59	
11.201.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	690.435.000,00	659.956.800,00	(30.478.200,00)	95,59	
11.203	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Didukung/dilaksanakan oleh Pihak Swasta	36.227.500,00	33.680.000,00	(2.547.500,00)	92,97	
11.203.03	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	36.227.500,00	33.680.000,00	(2.547.500,00)	92,97	
11.203.03.5.1	BELANJA OPERASI	36.227.500,00	33.680.000,00	(2.547.500,00)	92,97	
11.203.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.227.500,00	33.680.000,00	(2.547.500,00)	92,97	
	SURPLUS / DEFISIT	(5.470.804.850,00)	(5.272.020.980,00)	198.783.870,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(5.470.804.850,00)	(5.272.020.980,00)	198.783.870,00	0	

4





PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2024

Urusan Pemerintahan : 2.12 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SKPD : 2-12.0-00.0-00.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

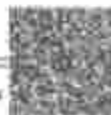
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	3.132.402.451,00	3.027.543.510,00	(104.858.942,00)	96,05	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.643.036.411,00	2.538.679.519,00	(104.356.792,00)	96,05	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.906.547.656,00	1.806.147.858,00	(100.399.798,00)	94,73	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.895.512.658,00	1.799.115.858,00	(100.396.798,00)	94,71	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.895.512.656,00	1.799.115.856,00	(100.396.798,00)	94,71	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.895.512.656,00	1.799.115.856,00	(100.396.798,00)	94,71	
01.2.02.03	Penaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.035.000,00	7.032.000,00	(3.000,00)	99,96	
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	7.035.000,00	7.032.000,00	(3.000,00)	99,96	
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	6.480.000,00	6.480.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	555.000,00	552.000,00	(3.000,00)	99,66	
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.03.06.5.1.01	Belanja Pegawai	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	418.654.000,00	417.988.011,00	(665.989,00)	99,84	
01.2.06.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	418.654.000,00	417.988.011,00	(665.989,00)	99,84	
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	418.654.000,00	417.988.011,00	(665.989,00)	99,84	
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	418.654.000,00	417.988.011,00	(665.989,00)	99,84	
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87.250.000,00	87.100.000,00	(150.000,00)	99,83	
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	87.250.000,00	87.100.000,00	(150.000,00)	99,83	

SW



KODE REKENING	URATAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	87.250.000,00	87.100.000,00	(150.000,00)	99,83	
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Perbaikan dan Mesin	87.250.000,00	87.100.000,00	(150.000,00)	99,83	
01.2.08	Penyediaan Jasa Perungjung Urusan Pemerintahan Daerah	132.899.455,00	129.990.750,00	(2.908.705,00)	97,81	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	132.899.455,00	129.990.750,00	(2.908.705,00)	97,81	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	132.899.455,00	129.990.750,00	(2.908.705,00)	97,81	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.899.455,00	129.990.750,00	(2.908.705,00)	97,81	
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perungjung, Urusan Pemerintahan Daerah	83.885.300,00	83.653.000,00	(232.300,00)	99,72	
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	48.945.200,00	48.715.000,00	(230.200,00)	99,53	
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	48.945.200,00	48.715.000,00	(230.200,00)	99,53	
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.945.200,00	48.715.000,00	(230.200,00)	99,53	
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34.940.100,00	34.938.000,00	(2.100,00)	99,99	
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	34.940.100,00	34.938.000,00	(2.100,00)	99,99	
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.940.100,00	34.938.000,00	(2.100,00)	99,99	
02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	389.392.920,00	389.266.500,00	(126.420,00)	99,97	
02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	389.392.920,00	389.266.500,00	(126.420,00)	99,97	
02.2.01.05	Pencetakan, Penubuhan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	389.392.920,00	389.266.500,00	(126.420,00)	99,97	
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	389.392.920,00	389.266.500,00	(126.420,00)	99,97	
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	389.392.920,00	389.266.500,00	(126.420,00)	99,97	
04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	99.973.120,00	99.597.400,00	(375.720,00)	99,62	
04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	99.973.120,00	99.597.400,00	(375.720,00)	99,62	
04.2.01.02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	99.973.120,00	99.597.400,00	(375.720,00)	99,62	
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	99.973.120,00	99.597.400,00	(375.720,00)	99,62	
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.973.120,00	99.597.400,00	(375.720,00)	99,62	
	SURPLUS / DEFISIT	(3.132.402.451,00)	(3.027.543.519,00)	104.858.932,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(3.132.402.451,00)	(3.027.543.519,00)	104.858.932,00	0	

5





PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2024

Urusan Pemerintahan : 2.13 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

SKPD : 2-13.0-00.0-00.01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

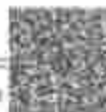
KODE REKENING	URAZAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	4.148.746.929,00	3.921.942.609,00	(226.804.230,00)	94,53	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.854.445.214,00	3.703.959.661,00	(150.485.553,00)	96,10	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.876.972.564,00	1.793.602.634,00	(83.369.730,00)	95,56	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.868.172.564,00	1.785.802.634,00	(82.369.730,00)	95,59	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.868.172.564,00	1.785.802.634,00	(82.369.730,00)	95,59	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.868.172.564,00	1.785.802.634,00	(82.369.730,00)	95,59	
01.2.02.03	Penaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8.800.000,00	7.800.000,00	(1.000.000,00)	88,54	
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	8.800.000,00	7.800.000,00	(1.000.000,00)	88,54	
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0	
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.03.06.5.1.01	Belanja Pegawai	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	366.896.440,00	366.536.054,00	(360.386,00)	99,90	
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.402.700,00	8.194.000,00	(208.700,00)	97,52	
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	8.402.700,00	8.194.000,00	(208.700,00)	97,52	
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.402.700,00	8.194.000,00	(208.700,00)	97,52	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.922.740,00	3.922.150,00	(590,00)	99,98	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	3.922.740,00	3.922.150,00	(590,00)	99,98	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.922.740,00	3.922.150,00	(590,00)	99,98	

Sw



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	354.571.000,00	354.419.904,00	(151.096,00)	99,96	
01.206.09.5.1	BELANJA OPERASI	354.571.000,00	354.419.904,00	(151.096,00)	99,96	
01.206.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	354.571.000,00	354.419.904,00	(151.096,00)	99,96	
01.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usaha Pemerintah Daerah	46.829.000,00	46.549.000,00	(75.000,00)	99,84	
01.207.05	Pengadaan Mebel	19.980.000,00	19.980.000,00	0,00	100,00	
01.207.05.5.2	BELANJA MODAL	19.980.000,00	19.980.000,00	0,00	100,00	
01.207.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.980.000,00	19.980.000,00	0,00	100,00	
01.207.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.640.000,00	26.569.000,00	(75.000,00)	99,72	
01.207.06.5.2	BELANJA MODAL	26.640.000,00	26.569.000,00	(75.000,00)	99,72	
01.207.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.640.000,00	26.569.000,00	(75.000,00)	99,72	
01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah	1.514.755.520,00	1.449.429.123,00	(65.326.397,00)	95,69	
01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.500.000,00	14.537.779,00	(21.962.221,00)	39,83	
01.208.02.5.1	BELANJA OPERASI	36.500.000,00	14.537.779,00	(21.962.221,00)	39,83	
01.208.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.500.000,00	14.537.779,00	(21.962.221,00)	39,83	
01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.478.255.520,00	1.434.891.344,00	(43.364.176,00)	97,07	
01.208.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.478.255.520,00	1.434.891.344,00	(43.364.176,00)	97,07	
01.208.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.478.255.520,00	1.434.891.344,00	(43.364.176,00)	97,07	
01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah	41.400.690,00	40.046.650,00	(1.354.040,00)	96,73	
01.209.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Desa atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.430.000,00	34.076.000,00	(1.354.000,00)	96,18	
01.209.01.5.1	BELANJA OPERASI	35.430.000,00	34.076.000,00	(1.354.000,00)	96,18	
01.209.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.430.000,00	34.076.000,00	(1.354.000,00)	96,18	
01.209.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.970.690,00	5.970.650,00	(40,00)	100,00	
01.209.10.5.1	BELANJA OPERASI	5.970.690,00	5.970.650,00	(40,00)	100,00	
01.209.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.970.690,00	5.970.650,00	(40,00)	100,00	
03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	21.322.850,00	0,00	(21.322.850,00)	0	
03.201	Fasilitas Kerja Sama antar Desa	21.322.850,00	0,00	(21.322.850,00)	0	
03.201.01	Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	21.322.850,00	0,00	(21.322.850,00)	0	
03.201.01.5.1	BELANJA OPERASI	21.322.850,00	0,00	(21.322.850,00)	0	
03.201.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.322.850,00	0,00	(21.322.850,00)	0	
04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	233.300.375,00	196.867.700,00	(36.432.675,00)	84,38	
04.201	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	233.300.375,00	196.867.700,00	(36.432.675,00)	84,38	
04.201.02	Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa	31.272.000,00	8.794.000,00	(22.477.100,00)	28,12	

64



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
04.201.02.5.1	BELANJA OPERASI	31.272.000,00	8.794.900,00	(22.477.100,00)	28,12	
04.201.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.272.000,00	8.794.900,00	(22.477.100,00)	28,12	
04.201.03	Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	21.300.000,00	21.300.000,00	0,00	100,00	
04.201.03.5.1	BELANJA OPERASI	21.300.000,00	21.300.000,00	0,00	100,00	
04.201.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.300.000,00	21.300.000,00	0,00	100,00	
04.201.04	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	93.210.000,00	93.007.300,00	(202.700,00)	99,78	
04.201.04.5.1	BELANJA OPERASI	93.210.000,00	93.007.300,00	(202.700,00)	99,78	
04.201.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.210.000,00	93.007.300,00	(202.700,00)	99,78	
04.201.15	Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa	51.111.700,00	38.037.700,00	(13.074.000,00)	74,42	
04.201.15.5.1	BELANJA OPERASI	51.111.700,00	38.037.700,00	(13.074.000,00)	74,42	
04.201.15.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.111.700,00	38.037.700,00	(13.074.000,00)	74,42	
04.201.18	Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	36.406.675,00	35.727.800,00	(678.875,00)	98,14	
04.201.18.5.1	BELANJA OPERASI	36.406.675,00	35.727.800,00	(678.875,00)	98,14	
04.201.18.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.406.675,00	35.727.800,00	(678.875,00)	98,14	
05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	30.678.480,00	21.115.338,00	(18.563.152,00)	53,22	
05.201	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	30.678.480,00	21.115.338,00	(18.563.152,00)	53,22	
05.201.03	Peningkatan Kapasitas Kelengkapan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	23.024.890,00	5.100.000,00	(17.924.890,00)	22,15	
05.201.03.5.1	BELANJA OPERASI	23.024.890,00	5.100.000,00	(17.924.890,00)	22,15	
05.201.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.024.890,00	5.100.000,00	(17.924.890,00)	22,15	
05.201.06	Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	16.653.600,00	16.015.338,00	(638.262,00)	96,17	
05.201.06.5.1	BELANJA OPERASI	16.653.600,00	16.015.338,00	(638.262,00)	96,17	
05.201.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.653.600,00	16.015.338,00	(638.262,00)	96,17	
	SURPLUS / DEFISIT	(4.148.746.929,00)	(3.921.942.899,00)	226.804.230,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(4.148.746.929,00)	(3.921.942.899,00)	226.804.230,00	0	





PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2024

Urusan Pemerintahan : 2.14 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

SKPD : 2-14-2-08.0-00.01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.0	BELANJA DAERAH	7.783.334.567,00	7.388.185.782,00	(395.134.785,00)	95,05	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.507.850.789,00	2.319.600.309,00	(188.250.480,00)	92,49	
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.029.000,00	14.737.650,00	(3.291.350,00)	91,74	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.061.000,00	5.998.000,00	(63.000,00)	98,96	
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.061.000,00	5.998.000,00	(63.000,00)	98,96	
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.061.000,00	5.998.000,00	(63.000,00)	98,96	
01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahaan RKA-SKPD	6.019.000,00	5.843.650,00	(175.350,00)	97,09	
01.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	6.019.000,00	5.843.650,00	(175.350,00)	97,09	
01.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.019.000,00	5.843.650,00	(175.350,00)	97,09	
01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.949.000,00	2.896.000,00	(3.053.000,00)	48,68	
01.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	5.949.000,00	2.896.000,00	(3.053.000,00)	48,68	
01.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.949.000,00	2.896.000,00	(3.053.000,00)	48,68	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.016.151.089,00	1.873.816.622,00	(144.334.467,00)	92,85	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.005.045.689,00	1.860.711.422,00	(144.334.267,00)	92,80	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.005.045.689,00	1.860.711.422,00	(144.334.267,00)	92,80	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.005.045.689,00	1.860.711.422,00	(144.334.267,00)	92,80	
01.2.02.03	Penaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13.105.400,00	13.105.200,00	(200,00)	100,00	
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	13.105.400,00	13.105.200,00	(200,00)	100,00	
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.905.400,00	2.905.200,00	(200,00)	99,99	

96



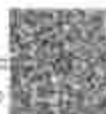
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	18.480.000,00	16.200.000,00	(2.280.000,00)	87,56	
01.203.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	18.480.000,00	16.200.000,00	(2.280.000,00)	87,56	
01.203.06.5.1	BELANJA OPERASI	18.480.000,00	16.200.000,00	(2.280.000,00)	87,56	
01.203.06.5.1.01	Belanja Pegawai	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	100,00	
01.203.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.280.000,00	0,00	(2.280.000,00)	0	
01.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	94.566.000,00	88.495.400,00	(6.070.600,00)	94,04	
01.206.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.100.000,00	6.000.000,00	(100.000,00)	98,36	
01.206.02.5.1	BELANJA OPERASI	100.000,00	0,00	(100.000,00)	0	
01.206.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	0,00	(100.000,00)	0	
01.206.02.5.2	BELANJA MODAL	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
01.206.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
01.206.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.000.000,00	7.000.000,00	(1.000.000,00)	87,50	
01.206.05.1	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	7.000.000,00	(1.000.000,00)	87,50	
01.206.05.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	7.000.000,00	(1.000.000,00)	87,50	
01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.466.000,00	76.495.400,00	(3.970.600,00)	95,07	
01.206.09.5.1	BELANJA OPERASI	60.466.000,00	76.495.400,00	(3.970.600,00)	95,07	
01.206.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.466.000,00	76.495.400,00	(3.970.600,00)	95,07	
01.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17.586.200,00	14.340.800,00	(3.247.600,00)	81,54	
01.207.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.100.000,00	6.950.000,00	(150.000,00)	97,89	
01.207.06.5.1	BELANJA OPERASI	100.000,00	0,00	(100.000,00)	0	
01.207.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	0,00	(100.000,00)	0	
01.207.06.5.2	BELANJA MODAL	7.000.000,00	6.950.000,00	(50.000,00)	99,29	
01.207.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.000.000,00	6.950.000,00	(50.000,00)	99,29	
01.207.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.486.200,00	7.390.800,00	(3.097.600,00)	70,47	
01.207.11.5.1	BELANJA OPERASI	10.486.200,00	7.390.800,00	(3.097.600,00)	70,47	
01.207.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.486.200,00	7.390.800,00	(3.097.600,00)	70,47	
01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	181.236.500,00	161.362.837,00	(29.873.663,00)	89,04	
01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.110.000,00	8.242.437,00	(5.867.563,00)	58,42	
01.208.02.5.1	BELANJA OPERASI	14.110.000,00	8.242.437,00	(5.867.563,00)	58,42	
01.208.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.110.000,00	8.242.437,00	(5.867.563,00)	58,42	
01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	167.126.500,00	143.120.400,00	(24.006.100,00)	85,64	
01.208.04.5.1	BELANJA OPERASI	167.126.500,00	143.120.400,00	(24.006.100,00)	85,64	
01.208.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	167.126.500,00	143.120.400,00	(24.006.100,00)	85,64	
01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	159.800.000,00	159.647.200,00	(152.800,00)	99,90	

63



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinak atau Kendaraan Dinas Jabatan	159.800.000,00	159.647.200,00	(152.800,00)	99,90	
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	159.800.000,00	159.647.200,00	(152.800,00)	99,90	
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	159.800.000,00	159.647.200,00	(152.800,00)	99,90	
02	PROGRAM PENGARUBUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.989.300,00	0,00	(1.989.300,00)	0	
02.2.01	Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	1.989.300,00	0,00	(1.989.300,00)	0	
02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	1.989.300,00	0,00	(1.989.300,00)	0	
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.989.300,00	0,00	(1.989.300,00)	0	
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.989.300,00	0,00	(1.989.300,00)	0	
02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	680.600.852,00	641.400.000,00	(39.200.852,00)	94,24	
02.2.02	Penataan Perkotaan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	680.600.852,00	641.400.000,00	(39.200.852,00)	94,24	
02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	59.600.000,00	59.400.000,00	(200.000,00)	99,66	
02.2.02.12.5.1	BELANJA OPERASI	59.600.000,00	59.400.000,00	(200.000,00)	99,66	
02.2.02.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.600.000,00	59.400.000,00	(200.000,00)	99,66	
02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	75.600.000,00	75.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.13.5.1	BELANJA OPERASI	75.600.000,00	75.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.600.000,00	75.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.18	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Keluarga Kencana	545.400.852,00	506.400.000,00	(39.000.852,00)	92,85	
02.2.02.18.5.1	BELANJA OPERASI	545.400.852,00	506.400.000,00	(39.000.852,00)	92,85	
02.2.02.18.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	545.400.852,00	506.400.000,00	(39.000.852,00)	92,85	
03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	74.909.800,00	72.649.800,00	(2.260.000,00)	96,98	
03.2.01	Peneguhan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	33.000.000,00	32.780.000,00	(220.000,00)	99,33	
03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	33.000.000,00	32.780.000,00	(220.000,00)	99,33	
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	33.000.000,00	32.780.000,00	(220.000,00)	99,33	
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	32.780.000,00	(220.000,00)	99,33	
03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	20.110.000,00	19.870.000,00	(240.000,00)	98,81	
03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	20.110.000,00	19.870.000,00	(240.000,00)	98,81	
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	20.110.000,00	19.870.000,00	(240.000,00)	98,81	

9/3



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.110.000,00	19.870.000,00	(240.000,00)	98,81	
03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	21.799.800,00	19.999.800,00	(1.800.000,00)	91,74	
03.2.03.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	21.799.800,00	19.999.800,00	(1.800.000,00)	91,74	
03.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	21.799.800,00	19.999.800,00	(1.800.000,00)	91,74	
03.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.799.800,00	19.999.800,00	(1.800.000,00)	91,74	
03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.700.688.976,00	2.681.925.500,00	(78.764.476,00)	97,15	
03.2.01	Peaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sosial Kearifan Budaya Lokal	1.039.200.000,00	1.031.260.500,00	(7.939.500,00)	99,24	
03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	80.000.000,00	79.330.500,00	(669.500,00)	99,18	
03.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000,00	79.330.500,00	(669.500,00)	99,18	
03.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	79.330.500,00	(669.500,00)	99,18	
03.2.01.10	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	347.200.000,00	347.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.10.5.1	BELANJA OPERASI	347.200.000,00	347.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	347.200.000,00	347.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.11	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minlok)	105.000.000,00	104.730.000,00	(270.000,00)	99,74	
03.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	105.000.000,00	104.730.000,00	(270.000,00)	99,74	
03.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.000.000,00	104.730.000,00	(270.000,00)	99,74	
03.2.01.12	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.12.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.13	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.14	Advokasi Program Bangsa Kencana oleh proja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	297.000.000,00	290.000.000,00	(7.000.000,00)	97,64	
03.2.01.14.5.1	BELANJA OPERASI	297.000.000,00	290.000.000,00	(7.000.000,00)	97,64	
03.2.01.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	297.000.000,00	290.000.000,00	(7.000.000,00)	97,64	
03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	243.000.000,00	243.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.04	Penggerakan Kader Instansi Masyarakat Pedesaan (IMP)	243.000.000,00	243.000.000,00	0,00	100,00	

SW



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	243.000.000,00	243.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	243.000.000,00	243.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1.071.225.000,00	1.019.415.000,00	(51.810.000,00)	95,16	
03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	11.700.000,00	6.490.000,00	(5.210.000,00)	55,47	
03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	11.700.000,00	6.490.000,00	(5.210.000,00)	55,47	
03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.700.000,00	6.490.000,00	(5.210.000,00)	55,47	
03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	245.595.000,00	221.335.000,00	(24.260.000,00)	90,12	
03.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	245.595.000,00	221.335.000,00	(24.260.000,00)	90,12	
03.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	245.595.000,00	221.335.000,00	(24.260.000,00)	90,12	
03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	799.030.000,00	776.700.000,00	(22.330.000,00)	97,21	
03.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	50.000,00	0,00	(50.000,00)	0	
03.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000,00	0,00	(50.000,00)	0	
03.2.03.06.5.2	BELANJA MODAL	798.980.000,00	776.700.000,00	(22.280.000,00)	97,21	
03.2.03.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	798.980.000,00	776.700.000,00	(22.280.000,00)	97,21	
03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	14.900.000,00	14.890.000,00	(10.000,00)	99,93	
03.2.03.08.5.1	BELANJA OPERASI	14.900.000,00	14.890.000,00	(10.000,00)	99,93	
03.2.03.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.900.000,00	14.890.000,00	(10.000,00)	99,93	
03.2.04	Pembentayan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	407.264.976,00	388.250.000,00	(19.014.976,00)	95,33	
03.2.04.01	Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	73.014.976,00	54.000.000,00	(19.014.976,00)	73,96	
03.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	73.014.976,00	54.000.000,00	(19.014.976,00)	73,96	
03.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.014.976,00	54.000.000,00	(19.014.976,00)	73,96	
03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00	
03.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00	
03.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00	
03.2.04.05	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Sangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	330.500.000,00	330.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.04.05.5.1	BELANJA OPERASI	330.500.000,00	330.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.04.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	330.500.000,00	330.500.000,00	0,00	100,00	

LA



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	621.853.750,00	619.121.873,00	(2.732.877,00)	99,58	
04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	448.854.400,00	448.479.630,00	(374.770,00)	99,92	
04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	448.854.400,00	448.479.630,00	(374.770,00)	99,92	
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	424.099.400,00	423.844.630,00	(254.770,00)	99,94	
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	424.099.400,00	423.844.630,00	(254.770,00)	99,94	
04.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	22.755.000,00	22.635.000,00	(120.000,00)	99,47	
04.2.01.03.5.2.02	Belanja Modal Perakitan dan Mesin	22.755.000,00	22.635.000,00	(120.000,00)	99,47	
04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	174.999.350,00	172.641.443,00	(2.357.907,00)	98,65	
04.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	174.999.350,00	172.641.443,00	(2.357.907,00)	98,65	
04.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	174.999.350,00	172.641.443,00	(2.357.907,00)	98,65	
04.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.999.350,00	172.641.443,00	(2.357.907,00)	98,65	
04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (K5)	810.300.000,00	749.385.000,00	(60.915.000,00)	92,48	
04.2.01	Pelaksanaan Pembanguan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	300.000.000,00	239.085.000,00	(60.915.000,00)	79,70	
04.2.01.18	Pengadaan Secara Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKS, BKR, BKL, PPKS, PKR dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	300.000.000,00	239.085.000,00	(60.915.000,00)	79,70	
04.2.01.18.5.1	BELANJA OPERASI	300.000.000,00	239.085.000,00	(60.915.000,00)	79,70	
04.2.01.18.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	239.085.000,00	(60.915.000,00)	79,70	
04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembanguan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	510.300.000,00	510.300.000,00	0,00	100,00	
04.2.02.05	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Bertindak Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/belahiran, Bayi/tda/Balita)	243.000.000,00	243.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.02.05.1	BELANJA OPERASI	243.000.000,00	243.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.02.05.1.02	Belanja Barang dan Jasa	243.000.000,00	243.000.000,00	0,00	100,00	

SW



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
04.2.02.05	Pendampingan Keluarga Bersiko Stunting (Termasuk remaja Calon Penganin/Calon PUS) Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Biduk/Balita)	257.300.000,00	257.300.000,00	0,00	100,00	
04.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	257.300.000,00	257.300.000,00	0,00	100,00	
04.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	257.300.000,00	257.300.000,00	0,00	100,00	
06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	325.140.100,00	314.118.100,00	(11.022.000,00)	96,81	
06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	325.140.100,00	314.118.100,00	(11.022.000,00)	96,81	
06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	325.140.100,00	314.118.100,00	(11.022.000,00)	96,81	
06.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	325.140.100,00	314.118.100,00	(11.022.000,00)	96,81	
06.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	325.140.100,00	314.118.100,00	(11.022.000,00)	96,81	
	SURPLUS / DEFISIT	(7.783.334.567,00)	(7.398.198.782,00)	385.134.785,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(7.783.334.567,00)	(7.398.198.782,00)	385.134.785,00	0	

SW





PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2024

Urusan Pemerintahan : 2.15 PERHUBUNGAN

SKPD : 2.15.0-00.0-00.01 DINAS PERHUBUNGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	3.830.955.681,00	3.505.412.388,00	(125.543.293,00)	96,54	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.803.439.181,00	2.895.111.185,00	(108.327.695,00)	96,14	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.789.057.541,00	1.690.772.936,00	(98.284.605,00)	95,15	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.789.992.541,00	1.685.972.936,00	(94.019.605,00)	95,25	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.789.992.541,00	1.685.972.936,00	(94.019.605,00)	95,25	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.789.992.541,00	1.685.972.936,00	(94.019.605,00)	95,25	
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.065.000,00	7.800.000,00	(2.265.000,00)	77,50	
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	10.065.000,00	7.800.000,00	(2.265.000,00)	77,50	
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	9.840.000,00	7.800.000,00	(2.040.000,00)	79,27	
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	225.000,00	0,00	(225.000,00)	0	
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.03.06.5.1.01	Belanja Pegawai	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	508.603.500,00	508.260.600,00	(342.900,00)	99,93	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.635.000,00	1.250.000,00	(3.385.000,00)	26,97	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	4.635.000,00	1.250.000,00	(3.385.000,00)	26,97	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.635.000,00	1.250.000,00	(3.385.000,00)	26,97	
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	508.603.500,00	508.260.600,00	(342.900,00)	99,93	
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	508.603.500,00	508.260.600,00	(342.900,00)	99,93	
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	508.603.500,00	508.260.600,00	(342.900,00)	99,93	

Handwritten signature



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	175.241.670,00	162.554.900,00	(12.687.070,00)	92,78	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.060.000,00	6.400.000,00	(5.660.000,00)	53,07	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	12.060.000,00	6.400.000,00	(5.660.000,00)	53,07	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.060.000,00	6.400.000,00	(5.660.000,00)	53,07	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	163.181.670,00	156.154.900,00	(7.027.070,00)	95,69	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	163.181.670,00	156.154.900,00	(7.027.070,00)	95,69	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	163.181.670,00	156.154.900,00	(7.027.070,00)	95,69	
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	321.101.470,00	315.473.050,00	(5.628.420,00)	98,25	
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.050.000,00	37.721.200,00	(2.328.800,00)	94,19	
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	40.050.000,00	37.721.200,00	(2.328.800,00)	94,19	
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.050.000,00	37.721.200,00	(2.328.800,00)	94,19	
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	266.980.000,00	263.682.850,00	(3.297.150,00)	98,77	
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	266.980.000,00	263.682.850,00	(3.297.150,00)	98,77	
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	266.980.000,00	263.682.850,00	(3.297.150,00)	98,77	
01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.071.470,00	14.069.000,00	(2.470,00)	99,98	
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	14.071.470,00	14.069.000,00	(2.470,00)	99,98	
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.071.470,00	14.069.000,00	(2.470,00)	99,98	
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	827.516.500,00	810.301.200,00	(17.215.300,00)	97,92	
02.2.02	Penyediaan Peralengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	30.913.500,00	28.971.000,00	(1.942.500,00)	93,72	
02.2.02.02	Penyediaan Peralengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	30.913.500,00	28.971.000,00	(1.942.500,00)	93,72	
02.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	30.913.500,00	28.971.000,00	(1.942.500,00)	93,72	
02.2.02.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.913.500,00	28.971.000,00	(1.942.500,00)	93,72	
02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	6.890.000,00	0,00	(6.890.000,00)	0	
02.2.06.14	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	6.890.000,00	0,00	(6.890.000,00)	0	
02.2.06.14.5.1	BELANJA OPERASI	6.890.000,00	0,00	(6.890.000,00)	0	
02.2.06.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.890.000,00	0,00	(6.890.000,00)	0	
02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	789.713.000,00	761.330.200,00	(28.382.800,00)	96,41	

SW



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.09.02	Pengentrian dan Pengewasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	789.713.000,00	781.330.200,00	(8.382.800,00)	98,94	
02.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	789.713.000,00	781.330.200,00	(8.382.800,00)	98,94	
02.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	789.713.000,00	781.330.200,00	(8.382.800,00)	98,94	
	SURPLUS / DEFISIT	(3.630.955.661,00)	(3.505.412.386,00)	125.543.295,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(3.630.955.661,00)	(3.505.412.386,00)	125.543.295,00	0	

SW





PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2024

Urusan Pemerintahan : 2.16 KOMUNIKASI & INFORMATIKA

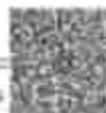
SKPD : 2-16.2-21.2-20.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	6.191.748.625,00	6.074.450.937,00	(117.297.688,00)	98,11	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.847.996.725,00	2.746.965.574,00	(101.011.151,00)	96,45	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.355.285.725,00	2.256.987.712,00	(98.288.013,00)	95,83	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.345.085.725,00	2.246.797.712,00	(98.288.013,00)	95,81	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.345.085.725,00	2.246.797.712,00	(98.288.013,00)	95,81	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.345.085.725,00	2.246.797.712,00	(98.288.013,00)	95,81	
01.2.02.03	Pelaksanaan Perencanaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.03.06	Perencanaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.03.06.5.1.01	Belanja Pegawai	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	330.836.000,00	329.686.862,00	(1.149.138,00)	99,65	
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	330.836.000,00	329.686.862,00	(1.149.138,00)	99,65	
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	330.836.000,00	329.686.862,00	(1.149.138,00)	99,65	
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	330.836.000,00	329.686.862,00	(1.149.138,00)	99,65	
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	111.625.000,00	110.425.000,00	(1.500.000,00)	98,86	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.200.000,00	29.960.000,00	(1.240.000,00)	99,50	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	30.200.000,00	29.960.000,00	(1.240.000,00)	99,50	

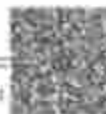


SW

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.208.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.200.000,00	28.900.000,00	(1.240.000,00)	95,89	
01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	81.725.000,00	81.465.000,00	(260.000,00)	99,58	
01.208.04.5.1	BELANJA OPERASI	81.725.000,00	81.465.000,00	(260.000,00)	99,58	
01.208.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.725.000,00	81.465.000,00	(260.000,00)	99,58	
01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Peruntukan Urusan Pemerintahan Daerah	38.550.000,00	38.476.000,00	(74.000,00)	99,81	
01.209.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.550.000,00	38.476.000,00	(74.000,00)	99,81	
01.209.01.5.1	BELANJA OPERASI	38.550.000,00	38.476.000,00	(74.000,00)	99,81	
01.209.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.550.000,00	38.476.000,00	(74.000,00)	99,81	
02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.590.492.000,00	2.589.867.800,00	(624.200,00)	99,98	
02.201	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.590.492.000,00	2.589.867.800,00	(624.200,00)	99,98	
02.201.07	Layanan Hubungan Media	2.540.482.000,00	2.539.867.800,00	(624.200,00)	99,98	
02.201.07.5.1	BELANJA OPERASI	2.540.482.000,00	2.539.867.800,00	(624.200,00)	99,98	
02.201.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.540.482.000,00	2.539.867.800,00	(624.200,00)	99,98	
02.201.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
02.201.08.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
02.201.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	53.057.000,00	47.267.900,00	(5.789.100,00)	89,09	
02.201	Penyenggaraan Perumahan untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	38.643.000,00	35.414.600,00	(3.228.400,00)	91,65	
02.201.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	24.829.000,00	23.630.500,00	(1.198.500,00)	95,17	
02.201.03.5.1	BELANJA OPERASI	24.829.000,00	23.630.500,00	(1.198.500,00)	95,17	
02.201.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.829.000,00	23.630.500,00	(1.198.500,00)	95,17	
02.201.04	Persiapan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	13.814.000,00	11.784.100,00	(2.029.900,00)	85,31	
02.201.04.5.1	BELANJA OPERASI	13.814.000,00	11.784.100,00	(2.029.900,00)	85,31	
02.201.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.814.000,00	11.784.100,00	(2.029.900,00)	85,31	
02.202	Pemefapani Pola Hubungan Komunikasi Sandi Anbar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	14.414.000,00	11.853.300,00	(2.560.700,00)	82,23	
02.202.01	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	14.414.000,00	11.853.300,00	(2.560.700,00)	82,23	
02.202.01.5.1	BELANJA OPERASI	14.414.000,00	11.853.300,00	(2.560.700,00)	82,23	
02.202.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.414.000,00	11.853.300,00	(2.560.700,00)	82,23	
03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	700.202.900,00	690.329.663,00	(9.873.237,00)	98,59	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	418.086.900,00	412.936.564,00	(5.150.336,00)	98,77	
03.2.01.03	Penyediaan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	418.086.900,00	412.936.564,00	(5.150.336,00)	98,77	
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	418.086.900,00	412.936.564,00	(5.150.336,00)	98,77	
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	418.086.900,00	412.936.564,00	(5.150.336,00)	98,77	
03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	282.136.000,00	277.393.099,00	(4.742.901,00)	98,32	
03.2.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	142.972.000,00	141.984.000,00	(988.000,00)	99,31	
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	142.972.000,00	141.984.000,00	(988.000,00)	99,31	
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.972.000,00	141.984.000,00	(988.000,00)	99,31	
03.2.02.08	Penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	139.164.000,00	135.409.099,00	(3.754.901,00)	97,30	
03.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI	139.164.000,00	135.409.099,00	(3.754.901,00)	97,30	
03.2.02.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.164.000,00	135.409.099,00	(3.754.901,00)	97,30	
	SURPLUS / DEFISIT	(6.191.748.825,00)	(6.074.450.937,00)	117.297.888,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(6.191.748.825,00)	(6.074.450.937,00)	117.297.888,00	0	





PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2024

Urusan Pemerintahan : 2.17 KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

SKPD : 2.17.3-32.2-07.01 DINAS KOPERASI DAN UKM, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

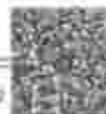
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	5.956.186.857,00	5.727.876.443,00	(228.310.414,00)	96,17	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.357.995.002,00	2.289.382.490,00	(79.632.512,00)	96,64	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.908.429.917,00	1.832.789.990,00	(73.639.927,00)	96,14	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.896.229.917,00	1.822.589.990,00	(73.639.927,00)	96,12	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.896.229.917,00	1.822.589.990,00	(73.639.927,00)	96,12	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.896.229.917,00	1.822.589.990,00	(73.639.927,00)	96,12	
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	16.200.000,00	15.000.000,00	(1.200.000,00)	92,59	
01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16.200.000,00	15.000.000,00	(1.200.000,00)	92,59	
01.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	16.200.000,00	15.000.000,00	(1.200.000,00)	92,59	
01.2.03.06.5.1.01	Belanja Pegawai	16.200.000,00	15.000.000,00	(1.200.000,00)	92,59	
01.2.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	219.170.000,00	217.867.900,00	(1.302.100,00)	99,41	
01.2.05.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	219.170.000,00	217.867.900,00	(1.302.100,00)	99,41	
01.2.05.09.5.1	BELANJA OPERASI	219.170.000,00	217.867.900,00	(1.302.100,00)	99,41	
01.2.05.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	219.170.000,00	217.867.900,00	(1.302.100,00)	99,41	
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	73.289.859,00	73.158.000,00	(131.859,00)	99,82	
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	73.289.859,00	73.158.000,00	(131.859,00)	99,82	
01.2.07.06.5.1	BELANJA OPERASI	130.889,00	0,00	(130.889,00)	0	



44

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.207.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.889,00	0,00	(130.889,00)	0	
01.207.06.5.2	BELANJA MODAL	73.158.990,00	73.158.000,00	(990,00)	100,00	
01.207.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	73.158.990,00	73.158.000,00	(990,00)	100,00	
01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	112.610.376,00	110.608.900,00	(2.001.476,00)	98,22	
01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.000.000,00	1.121.900,00	(1.878.100,00)	37,40	
01.208.02.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	1.121.900,00	(1.878.100,00)	37,40	
01.208.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	1.121.900,00	(1.878.100,00)	37,40	
01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	109.610.376,00	109.485.000,00	(125.376,00)	99,89	
01.208.04.5.1	BELANJA OPERASI	109.610.376,00	109.485.000,00	(125.376,00)	99,89	
01.208.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.610.376,00	109.485.000,00	(125.376,00)	99,89	
01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.294.850,00	38.939.700,00	(1.355.150,00)	96,64	
01.209.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.294.850,00	38.939.700,00	(1.355.150,00)	96,64	
01.209.01.5.1	BELANJA OPERASI	40.294.850,00	38.939.700,00	(1.355.150,00)	96,64	
01.209.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.294.850,00	38.939.700,00	(1.355.150,00)	96,64	
02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	31.459.600,00	30.481.500,00	(978.100,00)	96,89	
02.201	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	31.459.600,00	30.481.500,00	(978.100,00)	96,89	
02.201.04	Penatausahaan Perencanaan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	31.459.600,00	30.481.500,00	(978.100,00)	96,89	
02.201.04.5.1	BELANJA OPERASI	31.459.600,00	30.481.500,00	(978.100,00)	96,89	
02.201.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.459.600,00	30.481.500,00	(978.100,00)	96,89	
03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	99.974.000,00	98.466.200,00	(1.507.800,00)	98,49	
03.201	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	99.974.000,00	98.466.200,00	(1.507.800,00)	98,49	
03.201.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	99.974.000,00	98.466.200,00	(1.507.800,00)	98,49	
03.201.02.5.1	BELANJA OPERASI	99.974.000,00	98.466.200,00	(1.507.800,00)	98,49	
03.201.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.974.000,00	98.466.200,00	(1.507.800,00)	98,49	
05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.856.201.600,00	2.780.736.000,00	(75.465.600,00)	97,36	
05.202	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	2.856.201.600,00	2.780.736.000,00	(75.465.600,00)	97,36	
05.202.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	2.856.201.600,00	2.780.736.000,00	(75.465.600,00)	97,36	
05.202.05.5.1	BELANJA OPERASI	2.856.201.600,00	2.780.736.000,00	(75.465.600,00)	97,36	
05.202.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.856.201.600,00	2.780.736.000,00	(75.465.600,00)	97,36	

44



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	147.827.277,00	131.268.400,00	(16.558.877,00)	88,80	
06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	147.827.277,00	131.268.400,00	(16.558.877,00)	88,80	
06.2.01.05	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	147.827.277,00	131.268.400,00	(16.558.877,00)	88,80	
06.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	147.827.277,00	131.268.400,00	(16.558.877,00)	88,80	
06.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	147.827.277,00	131.268.400,00	(16.558.877,00)	88,80	
07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	234.396.000,00	224.798.500,00	(9.597.500,00)	95,91	
07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	234.396.000,00	224.798.500,00	(9.597.500,00)	95,91	
07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensial dan Pengembangan Usaha Mikro	234.396.000,00	224.798.500,00	(9.597.500,00)	95,91	
07.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	234.396.000,00	224.798.500,00	(9.597.500,00)	95,91	
07.2.01.04.5.1.05	Belanja Hibah	234.396.000,00	224.798.500,00	(9.597.500,00)	95,91	
08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	218.333.378,00	173.763.353,00	(44.570.025,00)	79,59	
08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	218.333.378,00	173.763.353,00	(44.570.025,00)	79,59	
08.2.01.06	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	218.333.378,00	173.763.353,00	(44.570.025,00)	79,59	
08.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	218.333.378,00	173.763.353,00	(44.570.025,00)	79,59	
08.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	218.333.378,00	173.763.353,00	(44.570.025,00)	79,59	
	SURPLUS / DEFISIT	(5.956.186.857,00)	(5.727.876.443,00)	228.310.414,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKEHAAN	(5.956.186.857,00)	(5.727.876.443,00)	228.310.414,00	0	





PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2024

Urusan Pemerintahan : 2.18 PENANAMAN MODAL

SKPD : 2-18 0-00.0-00.01 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	0	
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	0	
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	0	NULL
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	2.911.607.660,50	2.765.898.248,00	(145.711.412,50)	95,00	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.701.391.002,00	2.557.835.905,00	(143.555.097,00)	94,69	
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.778.800,00	6.257.750,00	(1.521.050,00)	80,45	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.998.550,00	1.998.250,00	(300,00)	99,98	
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.998.550,00	1.998.250,00	(300,00)	99,98	
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.998.550,00	1.998.250,00	(300,00)	99,98	
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	700.050,00	700.000,00	(50,00)	99,72	
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	700.050,00	700.000,00	(50,00)	99,72	
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	700.050,00	700.000,00	(50,00)	99,72	
01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	761.750,00	681.750,00	(80.000,00)	89,50	
01.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	761.750,00	681.750,00	(80.000,00)	89,50	
01.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	761.750,00	681.750,00	(80.000,00)	89,50	
01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	761.750,00	691.500,00	(70.250,00)	90,78	
01.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	761.750,00	691.500,00	(70.250,00)	90,78	
01.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	761.750,00	691.500,00	(70.250,00)	90,78	
01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	761.750,00	668.250,00	(93.500,00)	87,73	
01.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	761.750,00	668.250,00	(93.500,00)	87,73	
01.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	761.750,00	668.250,00	(93.500,00)	87,73	

SW



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	960.900,00	0,00	(960.900,00)	0	
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	960.900,00	0,00	(960.900,00)	0	
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	960.900,00	0,00	(960.900,00)	0	
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.825.050,00	1.518.000,00	(307.050,00)	83,18	
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	1.825.050,00	1.518.000,00	(307.050,00)	83,18	
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.825.050,00	1.518.000,00	(307.050,00)	83,18	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.888.677.100,00	1.781.967.423,00	(106.709.677,00)	94,35	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.878.534.300,00	1.774.167.423,00	(104.366.877,00)	94,44	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.878.534.300,00	1.774.167.423,00	(104.366.877,00)	94,44	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.878.534.300,00	1.774.167.423,00	(104.366.877,00)	94,44	
01.2.02.03	Pelaksanaan Perencanaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8.593.200,00	7.800.000,00	(793.200,00)	90,77	
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	8.593.200,00	7.800.000,00	(793.200,00)	90,77	
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	8.301.600,00	7.800.000,00	(501.600,00)	93,95	
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	291.600,00	0,00	(291.600,00)	0	
01.2.02.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	999.600,00	0,00	(999.600,00)	0	
01.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	999.600,00	0,00	(999.600,00)	0	
01.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	999.600,00	0,00	(999.600,00)	0	
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	550.000,00	0,00	(550.000,00)	0	
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	550.000,00	0,00	(550.000,00)	0	
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	550.000,00	0,00	(550.000,00)	0	
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.03.06.5.1.01	Belanja Pegawai	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.865.965,00	9.154.200,00	(1.711.765,00)	84,25	
01.2.05.01	Peningkatan Sains dan Prasana Disiplin Pegawai	749.750,00	0,00	(749.750,00)	0	
01.2.05.01.5.1	BELANJA OPERASI	749.750,00	0,00	(749.750,00)	0	
01.2.05.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	749.750,00	0,00	(749.750,00)	0	
01.2.05.10	Sosialisasi Penurunan Penundang- Undangan	7.028.915,00	6.068.100,00	(960.815,00)	86,33	
01.2.05.10.5.1	BELANJA OPERASI	7.028.915,00	6.068.100,00	(960.815,00)	86,33	
01.2.05.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.028.915,00	6.068.100,00	(960.815,00)	86,33	
01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Penurunan Penundang-Undangan	3.087.300,00	3.086.100,00	(1.200,00)	99,96	
01.2.05.11.5.1	BELANJA OPERASI	3.087.300,00	3.086.100,00	(1.200,00)	99,96	
01.2.05.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.087.300,00	3.086.100,00	(1.200,00)	99,96	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	256.762.820,00	244.279.732,00	(11.502.887,00)	95,50	



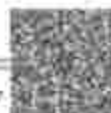
KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.112.260,00	1.664.000,00	(1.448.260,00)	53,47	
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.112.260,00	1.664.000,00	(1.448.260,00)	53,47	
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.112.260,00	1.664.000,00	(1.448.260,00)	53,47	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.999.697,00	8.794.350,00	(205.347,00)	97,72	
01.2.06.05.1	BELANJA OPERASI	8.999.697,00	8.794.350,00	(205.347,00)	97,72	
01.2.06.05.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.999.697,00	8.794.350,00	(205.347,00)	97,72	
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Penerbitan Perundang-undangan	2.079.150,00	0,00	(2.079.150,00)	0	
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.079.150,00	0,00	(2.079.150,00)	0	
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.079.150,00	0,00	(2.079.150,00)	0	
01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	3.199.750,00	3.180.000,00	(19.750,00)	99,76	
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	3.199.750,00	3.180.000,00	(19.750,00)	99,76	
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.199.750,00	3.180.000,00	(19.750,00)	99,76	
01.2.06.09	Perencanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	221.527.300,00	220.477.132,00	(1.050.168,00)	99,53	
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	221.527.300,00	220.477.132,00	(1.050.168,00)	99,53	
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	221.527.300,00	220.477.132,00	(1.050.168,00)	99,53	
01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	16.864.472,00	10.184.250,00	(6.680.222,00)	60,39	
01.2.06.11.5.1	BELANJA OPERASI	16.864.472,00	10.184.250,00	(6.680.222,00)	60,39	
01.2.06.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.864.472,00	10.184.250,00	(6.680.222,00)	60,39	
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Perorangan Usaha Pemerintah Daerah	354.774.020,00	353.652.000,00	(1.122.020,00)	99,68	
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	354.774.020,00	353.652.000,00	(1.122.020,00)	99,68	
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	354.774.020,00	353.652.000,00	(1.122.020,00)	99,68	
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	354.774.020,00	353.652.000,00	(1.122.020,00)	99,68	
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah	100.507.100,00	99.064.100,00	(9.443.000,00)	91,30	
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	290.800,00	0,00	(290.800,00)	0	
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	290.800,00	0,00	(290.800,00)	0	
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	290.800,00	0,00	(290.800,00)	0	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.099.250,00	37.306.100,00	(4.793.150,00)	88,61	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	42.099.250,00	37.306.100,00	(4.793.150,00)	88,61	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.099.250,00	37.306.100,00	(4.793.150,00)	88,61	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	66.117.050,00	61.758.000,00	(4.359.050,00)	93,41	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	66.117.050,00	61.758.000,00	(4.359.050,00)	93,41	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.117.050,00	61.758.000,00	(4.359.050,00)	93,41	
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perorangan Usaha Pemerintahan Daerah	61.205.388,00	49.860.700,00	(11.544.688,00)	81,14	

Sw



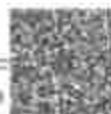
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.980.000,00	40.955.000,00	(25.000,00)	99,94	
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	40.980.000,00	40.955.000,00	(25.000,00)	99,94	
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.980.000,00	40.955.000,00	(25.000,00)	99,94	
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9.998.000,00	0,00	(9.998.000,00)	0	
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	9.998.000,00	0,00	(9.998.000,00)	0	
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.998.000,00	0,00	(9.998.000,00)	0	
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.892.200,00	8.705.700,00	(186.500,00)	97,90	
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	8.892.200,00	8.705.700,00	(186.500,00)	97,90	
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.892.200,00	8.705.700,00	(186.500,00)	97,90	
01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.335.188,00	0,00	(1.335.188,00)	0	
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	1.335.188,00	0,00	(1.335.188,00)	0	
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.335.188,00	0,00	(1.335.188,00)	0	
02	PROGRAM PENGEMBANGAN KLIM PENANAMAN MODAL	610.900,00	609.700,00	(1.200,00)	99,80	
02.2.02	Pembuatan Peta Pibemi Investasi Kabupaten/Kota	610.900,00	609.700,00	(1.200,00)	99,80	
02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	610.900,00	609.700,00	(1.200,00)	99,80	
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	610.900,00	609.700,00	(1.200,00)	99,80	
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	610.900,00	609.700,00	(1.200,00)	99,80	
03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	13.451.638,00	13.409.300,00	(42.338,00)	99,69	
03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	13.451.638,00	13.409.300,00	(42.338,00)	99,69	
03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	13.451.638,00	13.409.300,00	(42.338,00)	99,69	
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	13.451.638,00	13.409.300,00	(42.338,00)	99,69	
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.451.638,00	13.409.300,00	(42.338,00)	99,69	
05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	60.727.826,00	60.720.963,00	(6.863,00)	99,99	
05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	60.727.826,00	60.720.963,00	(6.863,00)	99,99	
05.2.01.06	Perencanaan Penanaman Modal	60.727.826,00	60.720.963,00	(6.863,00)	99,99	
05.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	60.727.826,00	60.720.963,00	(6.863,00)	99,99	
05.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.727.826,00	60.720.963,00	(6.863,00)	99,99	
06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	135.426.294,50	133.320.380,00	(2.105.914,50)	98,44	

SW



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
05.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	135.426.294,50	133.320.380,00	(2.105.914,50)	98,44	
06.2.01.02	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	135.426.294,50	133.320.380,00	(2.105.914,50)	98,44	
06.2.01.02.5.1	SELANJA OPERASI	135.426.294,50	133.320.380,00	(2.105.914,50)	98,44	
06.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.426.294,50	133.320.380,00	(2.105.914,50)	98,44	
	SURPLUS / DEFISIT	(2.871.807.680,00)	(2.705.896.248,00)	105.711.412,50	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(2.871.807.680,00)	(2.705.896.248,00)	105.711.412,50	0	

Sw





PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2024

Urusan Pemerintahan : 2.19 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

SKPD : 2-19.0-00.0-00.01 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

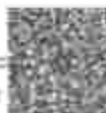
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	500.000,00	500.000,00	0	
00.0.00.00.4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	500.000,00	500.000,00	0	
00.0.00.00.4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	500.000,00	500.000,00	0	
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	3.354.596.771,00	3.162.499.382,00	(202.097.389,00)	93,99	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.813.981.335,00	1.681.209.025,00	(132.752.310,00)	92,70	
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.398.500,00	5.988.000,00	(1.398.500,00)	81,07	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.482.000,00	2.425.000,00	(57.000,00)	97,70	
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.482.000,00	2.425.000,00	(57.000,00)	97,70	
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.482.000,00	2.425.000,00	(57.000,00)	97,70	
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.000.000,00	988.000,00	(12.000,00)	98,80	
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	988.000,00	(12.000,00)	98,80	
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	988.000,00	(12.000,00)	98,80	
01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.000.000,00	900.000,00	(100.000,00)	90,00	
01.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	900.000,00	(100.000,00)	90,00	
01.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	900.000,00	(100.000,00)	90,00	
01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	995.500,00	750.000,00	(245.500,00)	75,34	
01.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	995.500,00	750.000,00	(245.500,00)	75,34	
01.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	995.500,00	750.000,00	(245.500,00)	75,34	
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	900.000,00	0,00	(900.000,00)	0	
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	900.000,00	0,00	(900.000,00)	0	
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	0,00	(900.000,00)	0	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.000.000,00	925.000,00	(75.000,00)	92,50	
01.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	925.000,00	(75.000,00)	92,50	
01.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	925.000,00	(75.000,00)	92,50	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.436.948.245,00	1.341.378.560,00	(95.571.685,00)	93,33	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.420.883.245,00	1.325.518.560,00	(95.364.685,00)	93,29	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.420.883.245,00	1.325.518.560,00	(95.364.685,00)	93,29	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.420.883.245,00	1.325.518.560,00	(95.364.685,00)	93,29	
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.998.000,00	5.866.500,00	(131.500,00)	97,81	
01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	5.998.000,00	5.866.500,00	(131.500,00)	97,81	
01.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.998.000,00	5.866.500,00	(131.500,00)	97,81	
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8.070.000,00	7.940.000,00	(130.000,00)	98,39	
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	8.070.000,00	7.940.000,00	(130.000,00)	98,39	
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	270.000,00	140.000,00	(130.000,00)	51,85	
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	997.000,00	852.500,00	(144.500,00)	85,51	
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	997.000,00	852.500,00	(144.500,00)	85,51	
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	997.000,00	852.500,00	(144.500,00)	85,51	
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.000.000,00	899.000,00	(101.000,00)	89,90	
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	899.000,00	(101.000,00)	89,90	
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	899.000,00	(101.000,00)	89,90	
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	11.400.000,00	10.209.000,00	(1.200.000,00)	89,47	
01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.400.000,00	10.209.000,00	(1.200.000,00)	89,47	
01.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	11.400.000,00	10.209.000,00	(1.200.000,00)	89,47	
01.2.03.06.5.1.01	Belanja Pegawai	11.400.000,00	10.209.000,00	(1.200.000,00)	89,47	
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.888.000,00	2.268.000,00	(6.620.000,00)	25,52	
01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.800.000,00	1.778.000,00	(22.000,00)	98,78	
01.2.05.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.800.000,00	1.778.000,00	(22.000,00)	98,78	
01.2.05.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.778.000,00	(22.000,00)	98,78	
01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3.794.000,00	490.000,00	(3.304.000,00)	12,92	
01.2.05.09.5.1	BELANJA OPERASI	3.794.000,00	490.000,00	(3.304.000,00)	12,92	
01.2.05.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.794.000,00	490.000,00	(3.304.000,00)	12,92	
01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3.294.000,00	0,00	(3.294.000,00)	0	
01.2.05.11.5.1	BELANJA OPERASI	3.294.000,00	0,00	(3.294.000,00)	0	
01.2.05.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.294.000,00	0,00	(3.294.000,00)	0	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	77.153.500,00	74.991.550,00	(2.161.950,00)	97,20	
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.965.000,00	11.430.000,00	(535.000,00)	95,37	
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	11.965.000,00	11.430.000,00	(535.000,00)	95,37	
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.965.000,00	11.430.000,00	(535.000,00)	95,37	
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	450.000,00	397.500,00	(52.500,00)	88,33	
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	450.000,00	397.500,00	(52.500,00)	88,33	
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	397.500,00	(52.500,00)	88,33	
01.2.06.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.043.000,00	5.965.000,00	(1.078.000,00)	84,69	
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	7.043.000,00	5.965.000,00	(1.078.000,00)	84,69	
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.043.000,00	5.965.000,00	(1.078.000,00)	84,69	
01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	2.987.500,00	2.800.000,00	(187.500,00)	93,72	
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	2.987.500,00	2.800.000,00	(187.500,00)	93,72	
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.987.500,00	2.800.000,00	(187.500,00)	93,72	
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54.686.000,00	54.399.050,00	(286.950,00)	99,47	
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	54.686.000,00	54.399.050,00	(286.950,00)	99,47	
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.686.000,00	54.399.050,00	(286.950,00)	99,47	
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Perungjung Urusan Pemerintahan Daerah	57.527.840,00	50.229.090,00	(7.298.750,00)	87,31	
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.992.750,00	32.990.000,00	(2.002.750,00)	94,28	
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	34.992.750,00	32.990.000,00	(2.002.750,00)	94,28	
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.992.750,00	32.990.000,00	(2.002.750,00)	94,28	
01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	22.535.090,00	17.239.090,00	(5.296.000,00)	76,50	
01.2.07.07.5.2	BELANJA MODAL	22.535.090,00	17.239.090,00	(5.296.000,00)	76,50	
01.2.07.07.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.535.090,00	17.239.090,00	(5.296.000,00)	76,50	
01.2.08	Penyediaan Jasa Perungjung Urusan Pemerintahan Daerah	155.233.250,00	143.589.625,00	(11.643.625,00)	92,14	
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.960.000,00	0,00	(4.960.000,00)	0	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	4.960.000,00	0,00	(4.960.000,00)	0	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.960.000,00	0,00	(4.960.000,00)	0	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	149.273.250,00	143.589.625,00	(5.683.625,00)	96,19	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	149.273.250,00	143.589.625,00	(5.683.625,00)	96,19	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.273.250,00	143.589.625,00	(5.683.625,00)	96,19	
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perungjung Urusan Pemerintahan Daerah	59.024.000,00	51.866.200,00	(7.157.800,00)	87,87	



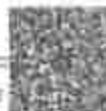
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.209.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.980.000,00	41.891.200,00	(88.800,00)	99,79	
01.209.01.5.1	BELANJA OPERASI	41.980.000,00	41.891.200,00	(88.800,00)	99,79	
01.209.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.980.000,00	41.891.200,00	(88.800,00)	99,79	
01.209.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000,00	0,00	(50.000,00)	0	
01.209.06.5.1	BELANJA OPERASI	50.000,00	0,00	(50.000,00)	0	
01.209.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000,00	0,00	(50.000,00)	0	
01.209.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.994.000,00	5.725.000,00	(6.269.000,00)	47,73	
01.209.09.5.1	BELANJA OPERASI	11.994.000,00	5.725.000,00	(6.269.000,00)	47,73	
01.209.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.994.000,00	5.725.000,00	(6.269.000,00)	47,73	
01.209.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000,00	4.250.000,00	(750.000,00)	85,00	
01.209.10.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.250.000,00	(750.000,00)	85,00	
01.209.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.250.000,00	(750.000,00)	85,00	
02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	181.825.750,00	162.114.667,00	(19.711.083,00)	89,16	
02.201	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	181.825.750,00	162.114.667,00	(19.711.083,00)	89,16	
02.201.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	102.667.000,00	96.704.987,00	(3.962.013,00)	96,14	
02.201.01.5.1	BELANJA OPERASI	102.667.000,00	96.704.987,00	(3.962.013,00)	96,14	
02.201.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.667.000,00	96.704.987,00	(3.962.013,00)	96,14	
02.201.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	79.158.750,00	63.409.700,00	(15.749.050,00)	80,10	
02.201.03.5.1	BELANJA OPERASI	79.158.750,00	63.409.700,00	(15.749.050,00)	80,10	
02.201.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.158.750,00	63.409.700,00	(15.749.050,00)	80,10	
03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	1.309.209.686,00	1.319.175.670,00	(9.034.016,00)	96,35	
03.201	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	203.318.286,00	185.765.460,00	(17.552.826,00)	91,37	
03.201.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	203.318.286,00	185.765.460,00	(17.552.826,00)	91,37	
03.201.03.5.1	BELANJA OPERASI	115.604.976,00	104.320.550,00	(11.284.326,00)	90,24	
03.201.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.910.476,00	76.626.150,00	(11.284.326,00)	87,16	



Sw

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.201.03.5.1.05	Belanja Hibah	27.694.500,00	27.694.500,00	0,00	100,00	
03.201.03.5.2	BELANJA MODAL	87.713.310,00	81.444.810,00	(6.268.500,00)	92,85	
03.201.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	87.713.310,00	81.444.810,00	(6.268.500,00)	92,85	
03.202	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	1.165.525.400,00	1.133.410.210,00	(32.481.190,00)	97,21	
03.202.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	118.525.000,00	104.742.000,00	(11.783.000,00)	88,89	
03.202.01.5.1	BELANJA OPERASI	118.525.000,00	104.742.000,00	(11.783.000,00)	88,89	
03.202.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.525.000,00	104.742.000,00	(11.783.000,00)	88,89	
03.202.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	44.130.000,00	28.955.000,00	(15.175.000,00)	65,61	
03.202.02.5.1	BELANJA OPERASI	44.130.000,00	28.955.000,00	(15.175.000,00)	65,61	
03.202.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.130.000,00	28.955.000,00	(15.175.000,00)	65,61	
03.202.03	Partisipasi dan Kekutaertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	1.005.236.400,00	999.713.210,00	(5.523.190,00)	99,45	
03.202.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.005.236.400,00	999.713.210,00	(5.523.190,00)	99,45	
03.202.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.005.236.400,00	999.713.210,00	(5.523.190,00)	99,45	
	SURPLUS / DEFISIT	(3.364.596.771,00)	(3.161.999.382,00)	202.597.389,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(3.364.596.771,00)	(3.161.999.382,00)	202.597.389,00	0	

LW





PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2024

Urusan Pemerintahan : 2.23 PERPUSTAKAAN

SKPD : 2-23.2-24.0-00.01 DINAS PERPUSTAKAAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.000.00.5	BELANJA DAERAH	2.371.673.899,00	2.268.987.321,00	(102.676.578,00)	95,67	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.014.639.589,00	1.919.153.568,00	(95.506.003,00)	95,21	
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.342.500,00	5.342.500,00	0,00	100,00	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.152.500,00	2.152.500,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.152.500,00	2.152.500,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.152.500,00	2.152.500,00	0,00	100,00	
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	100,00	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.641.431.895,00	1.557.599.799,00	(83.832.096,00)	94,89	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.635.751.895,00	1.552.319.799,00	(83.432.096,00)	94,90	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.635.751.895,00	1.552.319.799,00	(83.432.096,00)	94,90	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.635.751.895,00	1.552.319.799,00	(83.432.096,00)	94,90	
01.2.02.03	Penaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.680.000,00	5.280.000,00	(400.000,00)	92,96	
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	5.680.000,00	5.280.000,00	(400.000,00)	92,96	
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	0,00	(400.000,00)	0	
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	100,00	



SW

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.203.06	Ponatasuhan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	100,00	
01.203.06.5.1	BELANJA OPERASI	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	100,00	
01.203.06.5.1.01	Belanja Pegawai	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	100,00	
01.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	72.241.350,00	69.769.820,00	(2.471.530,00)	96,58	
01.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.315.350,00	0,00	(1.315.350,00)	0	
01.206.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.315.350,00	0,00	(1.315.350,00)	0	
01.206.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.315.350,00	0,00	(1.315.350,00)	0	
01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.926.000,00	69.769.820,00	(1.156.180,00)	98,37	
01.206.09.5.1	BELANJA OPERASI	70.926.000,00	69.769.820,00	(1.156.180,00)	98,37	
01.206.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.926.000,00	69.769.820,00	(1.156.180,00)	98,37	
01.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Peruntang Usaha Pemerintah Daerah	21.367.500,00	21.367.500,00	0,00	100,00	
01.207.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.367.500,00	21.367.500,00	0,00	100,00	
01.207.06.5.2	BELANJA MODAL	21.367.500,00	21.367.500,00	0,00	100,00	
01.207.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.367.500,00	21.367.500,00	0,00	100,00	
01.208	Penyediaan Jasa Peruntang Usaha Pemerintahan Daerah	175.500.000,00	170.005.097,00	(5.494.903,00)	96,87	
01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000,00	9.005.097,00	(2.994.903,00)	75,04	
01.208.02.5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	9.005.097,00	(2.994.903,00)	75,04	
01.208.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	9.005.097,00	(2.994.903,00)	75,04	
01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	163.500.000,00	161.000.000,00	(2.500.000,00)	98,47	
01.208.04.5.1	BELANJA OPERASI	163.500.000,00	161.000.000,00	(2.500.000,00)	98,47	
01.208.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	163.500.000,00	161.000.000,00	(2.500.000,00)	98,47	
01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Peruntang Usaha Pemerintahan Daerah	87.376.324,00	82.668.850,00	(4.707.474,00)	94,61	
01.209.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.983.000,00	38.022.750,00	(1.960.250,00)	95,10	
01.209.01.5.1	BELANJA OPERASI	39.983.000,00	38.022.750,00	(1.960.250,00)	95,10	
01.209.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.983.000,00	38.022.750,00	(1.960.250,00)	95,10	
01.209.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertahan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42.063.000,00	39.390.300,00	(2.672.700,00)	93,65	
01.209.02.5.1	BELANJA OPERASI	42.063.000,00	39.390.300,00	(2.672.700,00)	93,65	
01.209.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.063.000,00	39.390.300,00	(2.672.700,00)	93,65	
01.209.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.330.324,00	5.255.800,00	(74.524,00)	98,60	
01.209.09.5.1	BELANJA OPERASI	5.330.324,00	5.255.800,00	(74.524,00)	98,60	



SW

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.09.09.5.1.02.02	Belanja Barang dan Jasa	5.330.324,00	5.255.800,00	(74.524,00)	98,60	
02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	270.609.330,00	270.348.321,00	(261.009,00)	99,90	
02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	270.609.330,00	270.348.321,00	(261.009,00)	99,90	
02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	270.609.330,00	270.348.321,00	(261.009,00)	99,90	
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	270.609.330,00	270.348.321,00	(261.009,00)	99,90	
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	270.609.330,00	270.348.321,00	(261.009,00)	99,90	
02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	86.405.000,00	80.495.434,00	(5.909.566,00)	93,16	
02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	86.405.000,00	80.495.434,00	(5.909.566,00)	93,16	
02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	51.526.000,00	48.561.434,00	(2.964.566,00)	94,25	
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	51.526.000,00	48.561.434,00	(2.964.566,00)	94,25	
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.526.000,00	48.561.434,00	(2.964.566,00)	94,25	
02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	34.879.000,00	31.934.000,00	(2.945.000,00)	91,56	
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	34.879.000,00	31.934.000,00	(2.945.000,00)	91,56	
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.879.000,00	31.934.000,00	(2.945.000,00)	91,56	
	SURPLUS / DEFISIT	(2.371.673.899,00)	(2.265.997.321,00)	102.676.578,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(2.371.673.899,00)	(2.265.997.321,00)	102.676.578,00	0	

LN





PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2024

Urusan Pemerintahan : 3.25 KELAUTAN DAN PERIKANAN
SKPD : 3-25 0-00 0-00 01 DINAS PERIKANAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	245.400.000,00	125.400.000,00	(120.000.000,00)	51,10	
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	245.400.000,00	125.400.000,00	(120.000.000,00)	51,10	
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	105.000.000,00	0,00	(105.000.000,00)	0	NULL
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	140.400.000,00	125.400.000,00	(15.000.000,00)	89,32	NULL
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	4.038.306.280,00	4.708.281.377,00	(131.044.909,00)	97,29	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.481.170.031,00	2.380.448.371,00	(127.726.660,00)	94,85	
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	490.000,00	210.000,00	(280.000,00)	42,86	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	210.000,00	210.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	210.000,00	210.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	210.000,00	210.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	70.000,00	0,00	(70.000,00)	0	
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	70.000,00	0,00	(70.000,00)	0	
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000,00	0,00	(70.000,00)	0	
01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	70.000,00	0,00	(70.000,00)	0	
01.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	70.000,00	0,00	(70.000,00)	0	
01.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000,00	0,00	(70.000,00)	0	
01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	70.000,00	0,00	(70.000,00)	0	
01.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	70.000,00	0,00	(70.000,00)	0	
01.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000,00	0,00	(70.000,00)	0	
01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	70.000,00	0,00	(70.000,00)	0	
01.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	70.000,00	0,00	(70.000,00)	0	



SW

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000,00	0,00	(70.000,00)	0	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.937.179.841,00	1.833.143.671,00	(104.036.170,00)	94,63	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.925.604.841,00	1.824.643.671,00	(100.961.170,00)	94,76	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.925.604.841,00	1.824.643.671,00	(100.961.170,00)	94,76	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.875.604.841,00	1.824.643.671,00	(100.961.170,00)	94,76	
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11.575.000,00	8.500.000,00	(3.075.000,00)	73,43	
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	11.575.000,00	8.500.000,00	(3.075.000,00)	73,43	
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	10.200.000,00	7.800.000,00	(2.400.000,00)	76,47	
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.375.000,00	700.000,00	(675.000,00)	50,91	
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	19.050.000,00	18.600.000,00	(450.000,00)	97,64	
01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	19.050.000,00	18.600.000,00	(450.000,00)	97,64	
01.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	19.050.000,00	18.600.000,00	(450.000,00)	97,64	
01.2.03.06.5.1.01	Belanja Pegawai	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	0,00	(450.000,00)	0	
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13.613.200,00	13.593.300,00	(19.900,00)	99,85	
01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	13.613.200,00	13.593.300,00	(19.900,00)	99,85	
01.2.05.11.5.1	BELANJA OPERASI	13.613.200,00	13.593.300,00	(19.900,00)	99,85	
01.2.05.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.613.200,00	13.593.300,00	(19.900,00)	99,85	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	297.338.092,00	290.443.300,00	(6.894.792,00)	97,68	
01.2.06.02	Penyediaan Perawatan dan Penghapusan Kantor	356.000,00	70.000,00	(286.000,00)	19,66	
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	356.000,00	70.000,00	(286.000,00)	19,66	
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	356.000,00	70.000,00	(286.000,00)	19,66	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.292.000,00	6.375.000,00	(1.917.000,00)	76,88	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	8.292.000,00	6.375.000,00	(1.917.000,00)	76,88	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.292.000,00	6.375.000,00	(1.917.000,00)	76,88	
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	288.690.090,00	283.998.300,00	(4.691.790,00)	98,37	
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	288.690.090,00	283.998.300,00	(4.691.790,00)	98,37	
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	288.690.090,00	283.998.300,00	(4.691.790,00)	98,37	
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	171.870.400,00	159.407.500,00	(12.462.900,00)	92,75	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	171.870.400,00	159.407.500,00	(12.462.900,00)	92,75	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	171.870.400,00	159.407.500,00	(12.462.900,00)	92,75	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	171.870.400,00	159.407.500,00	(12.462.900,00)	92,75	
01.2.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	41.637.500,00	38.081.600,00	(3.555.900,00)	91,39	
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.480.000,00	35.469.600,00	(3.010.400,00)	92,18	
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	38.480.000,00	35.469.600,00	(3.010.400,00)	92,18	

Sw



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.480.000,00	35.469.900,00	(3.010.400,00)	92,18	
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan; Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertahan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.157.500,00	2.582.000,00	(575.500,00)	81,77	
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	3.157.500,00	2.582.000,00	(575.500,00)	81,77	
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.157.500,00	2.582.000,00	(575.500,00)	81,77	
03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	2.316.387.255,00	2.313.138.506,00	(3.248.749,00)	99,86	
03.2.01	Pengalihan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dijati Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	2.304.285.155,00	2.301.062.906,00	(3.222.249,00)	99,86	
03.2.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	2.092.717.475,00	2.091.462.906,00	(1.254.569,00)	99,94	
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	2.092.717.475,00	2.091.462.906,00	(1.254.569,00)	99,94	
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.927.475,00	36.682.906,00	(244.569,00)	99,28	
03.2.01.02.5.1.05	Belanja Hibah	2.055.790.000,00	2.054.800.000,00	(990.000,00)	99,95	
03.2.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	211.567.680,00	209.600.000,00	(1.967.680,00)	99,07	
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	211.567.680,00	209.600.000,00	(1.967.680,00)	99,07	
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.567.680,00	0,00	(1.567.680,00)	0	
03.2.01.03.5.1.05	Belanja Hibah	210.000.000,00	209.600.000,00	(400.000,00)	99,81	
03.2.03	Pengalihan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	12.102.100,00	12.075.600,00	(26.500,00)	99,78	
03.2.03.02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	12.102.100,00	12.075.600,00	(26.500,00)	99,78	
03.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	12.102.100,00	12.075.600,00	(26.500,00)	99,78	
03.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.102.100,00	12.075.600,00	(26.500,00)	99,78	
06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	41.740.000,00	41.673.500,00	(66.500,00)	99,84	
06.2.03	Penyediaan dan Penyelenggaraan Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	41.740.000,00	41.673.500,00	(66.500,00)	99,84	
06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Petaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	41.740.000,00	41.673.500,00	(66.500,00)	99,84	
06.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	41.740.000,00	41.673.500,00	(66.500,00)	99,84	
06.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.740.000,00	41.673.500,00	(66.500,00)	99,84	
	SURPLUS / DEFISIT	(4.583.906.265,00)	(4.582.881.377,00)	11.044.908,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(4.583.906.265,00)	(4.582.881.377,00)	11.044.908,00	0	

SW





PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2024

Urusan Pemerintahan : 3.26 PARIWISATA
SKPD : 3-26.0-00.0-00.01 DINAS PARIWISATA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	5.000.000,00	3.734.400,00	(1.265.600,00)	74,88	
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.000.000,00	3.734.400,00	(1.265.600,00)	74,88	
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0	
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	3.734.400,00	3.734.400,00	0	
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	2.939.844.608,00	2.813.640.961,00	(126.203.648,00)	95,71	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.889.802.509,00	2.567.228.150,00	(122.574.459,00)	88,84	
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.782.500,00	12.690.000,00	(92.500,00)	99,28	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.100.000,00	1.078.500,00	(21.500,00)	98,05	
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.100.000,00	1.078.500,00	(21.500,00)	98,05	
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.078.500,00	(21.500,00)	98,05	
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.880.000,00	1.878.400,00	(1.600,00)	99,92	
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.880.000,00	1.878.400,00	(1.600,00)	99,92	
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.880.000,00	1.878.400,00	(1.600,00)	99,92	
01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.342.000,00	1.312.600,00	(29.400,00)	97,81	
01.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.342.000,00	1.312.600,00	(29.400,00)	97,81	
01.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.342.000,00	1.312.600,00	(29.400,00)	97,81	
01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	1.162.500,00	1.159.220,00	(3.280,00)	99,72	
01.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.162.500,00	1.159.220,00	(3.280,00)	99,72	
01.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.162.500,00	1.159.220,00	(3.280,00)	99,72	
01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.578.000,00	1.561.280,00	(16.720,00)	98,94	
01.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.578.000,00	1.561.280,00	(16.720,00)	98,94	



SW

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.578.000,00	1.561.260,00	(16.720,00)	98,94	
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Realisasi Kinerja SKPD	2.586.500,00	2.573.200,00	(13.300,00)	99,49	
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.586.500,00	2.573.200,00	(13.300,00)	99,49	
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.586.500,00	2.573.200,00	(13.300,00)	99,49	
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.133.600,00	3.127.040,00	(6.460,00)	99,79	
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	3.133.600,00	3.127.040,00	(6.460,00)	99,79	
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.133.600,00	3.127.040,00	(6.460,00)	99,79	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.992.842.109,00	1.902.075.449,00	(90.766.660,00)	95,45	
01.2.02.01	Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN	1.981.452.109,00	1.890.886.009,00	(90.566.100,00)	95,42	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.981.452.109,00	1.890.886.009,00	(90.566.100,00)	95,42	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.981.452.109,00	1.890.886.009,00	(90.566.100,00)	95,42	
01.2.02.03	Pelebaran Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11.390.000,00	11.389.440,00	(560,00)	100,00	
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	11.390.000,00	11.389.440,00	(560,00)	100,00	
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	11.040.000,00	11.040.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.000,00	349.440,00	(560,00)	99,84	
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	16.200.000,00	10.209.000,00	(6.000.000,00)	62,96	
01.2.03.08	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16.200.000,00	10.209.000,00	(6.000.000,00)	62,96	
01.2.03.08.5.1	BELANJA OPERASI	16.200.000,00	10.209.000,00	(6.000.000,00)	62,96	
01.2.03.08.5.1.01	Belanja Pegawai	16.200.000,00	10.209.000,00	(6.000.000,00)	62,96	
01.2.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	327.612.000,00	323.655.893,00	(3.956.107,00)	98,79	
01.2.05.08	Facilitas Kunjungan Tamu	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0	
01.2.05.08.5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0	
01.2.05.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0	
01.2.05.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	325.612.000,00	323.655.893,00	(1.956.107,00)	99,40	
01.2.05.09.5.1	BELANJA OPERASI	325.612.000,00	323.655.893,00	(1.956.107,00)	99,40	
01.2.05.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	325.612.000,00	323.655.893,00	(1.956.107,00)	99,40	
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.986.000,00	42.656.000,00	(330.000,00)	99,23	
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.986.000,00	42.656.000,00	(330.000,00)	99,23	
01.2.07.06.5.1	BELANJA OPERASI	280.000,00	0,00	(280.000,00)	0	
01.2.07.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	280.000,00	0,00	(280.000,00)	0	
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	42.706.000,00	42.656.000,00	(50.000,00)	99,88	
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.706.000,00	42.656.000,00	(50.000,00)	99,88	
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	246.130.000,00	237.750.000,00	(8.380.000,00)	96,62	
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	570.000,00	500.000,00	(70.000,00)	87,72	
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	570.000,00	500.000,00	(70.000,00)	87,72	
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	570.000,00	500.000,00	(70.000,00)	87,72	



4

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.560.000,00	6.000.000,00	(560.000,00)	91,46	
01.208.02.5.1	BELANJA OPERASI	6.560.000,00	6.000.000,00	(560.000,00)	91,46	
01.208.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.560.000,00	6.000.000,00	(560.000,00)	91,46	
01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	241.000.000,00	231.250.000,00	(9.750.000,00)	95,95	
01.208.04.5.1	BELANJA OPERASI	241.000.000,00	231.250.000,00	(9.750.000,00)	95,95	
01.208.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	241.000.000,00	231.250.000,00	(9.750.000,00)	95,95	
01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Utusan Pemerintahan Daerah	49.250.000,00	38.200.500,00	(11.049.500,00)	77,56	
01.209.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.580.000,00	37.350.500,00	(7.229.500,00)	83,78	
01.209.01.5.1	BELANJA OPERASI	44.580.000,00	37.350.500,00	(7.229.500,00)	83,78	
01.209.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.580.000,00	37.350.500,00	(7.229.500,00)	83,78	
01.209.06	Pemeliharaan, Peralatan dan Mesin Lainnya	4.670.000,00	850.000,00	(3.820.000,00)	18,20	
01.209.06.5.1	BELANJA OPERASI	4.670.000,00	850.000,00	(3.820.000,00)	18,20	
01.209.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.670.000,00	850.000,00	(3.820.000,00)	18,20	
03	PROGRAM PEMASARAN PARWISATA	250.042.000,00	246.412.811,00	(3.629.189,00)	98,55	
03.201	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	250.042.000,00	246.412.811,00	(3.629.189,00)	98,55	
03.201.06	Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	250.042.000,00	246.412.811,00	(3.629.189,00)	98,55	
03.201.06.5.1	BELANJA OPERASI	250.042.000,00	246.412.811,00	(3.629.189,00)	98,55	
03.201.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.042.000,00	246.412.811,00	(3.629.189,00)	98,55	
	SURPLUS / DEFISIT	(2.934.844.809,00)	(2.809.906.561,00)	124.938.248,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(2.934.844.809,00)	(2.809.906.561,00)	124.938.248,00	0	

4





PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2024

Urusan Pemerintahan : 3.27 PERTANIAN

SKPD : 3-27.0-00.0-00.01 DINAS PERTANIAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	6.582.126.756,00	6.009.901.563,00	(572.224.895,00)	91,31	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.036.737.573,00	5.491.271.363,00	(545.466.610,00)	90,96	
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.031.525,00	15.196.800,00	(132.725,00)	99,13	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.446.550,00	3.362.150,00	(84.400,00)	97,55	
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.446.550,00	3.362.150,00	(84.400,00)	97,55	
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.446.550,00	3.362.150,00	(84.400,00)	97,55	
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.984.575,00	2.984.200,00	(375,00)	99,99	
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	2.984.575,00	2.984.200,00	(375,00)	99,99	
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.984.575,00	2.984.200,00	(375,00)	99,99	
01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.988.500,00	2.987.500,00	(1.000,00)	99,97	
01.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	2.988.500,00	2.987.500,00	(1.000,00)	99,97	
01.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.988.500,00	2.987.500,00	(1.000,00)	99,97	
01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	2.953.750,00	2.953.600,00	(150,00)	99,99	
01.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	2.953.750,00	2.953.600,00	(150,00)	99,99	
01.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.953.750,00	2.953.600,00	(150,00)	99,99	
01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.958.150,00	2.911.350,00	(46.800,00)	98,42	
01.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	2.958.150,00	2.911.350,00	(46.800,00)	98,42	
01.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.958.150,00	2.911.350,00	(46.800,00)	98,42	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.258.142.928,00	4.757.831.646,00	(1.500.311.282,00)	90,47	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.258.142.928,00	4.757.831.646,00	(1.500.311.282,00)	90,47	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.258.142.928,00	4.757.831.646,00	(1.500.311.282,00)	90,47	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.202.01.5.1.01	Belanja Pegawai	5.259.142.928,00	4.757.831.646,00	(501.311.282,00)	90,47	
01.202.03	Politisian Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	29.089.370,00	27.804.500,00	(1.284.870,00)	95,58	
01.202.03.5.1	BELANJA OPERASI	29.089.370,00	27.804.500,00	(1.284.870,00)	95,58	
01.202.03.5.1.01	Belanja Pegawai	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00	
01.202.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.889.370,00	17.604.500,00	(1.284.870,00)	93,20	
01.203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	22.963.875,00	22.963.750,00	(125,00)	100,00	
01.203.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	22.963.875,00	22.963.750,00	(125,00)	100,00	
01.203.06.5.1	BELANJA OPERASI	22.963.875,00	22.963.750,00	(125,00)	100,00	
01.203.06.5.1.01	Belanja Pegawai	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	100,00	
01.203.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.363.875,00	4.363.750,00	(125,00)	100,00	
01.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	301.704.500,00	299.364.000,00	(2.340.500,00)	99,22	
01.206.09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	301.704.500,00	299.364.000,00	(2.340.500,00)	99,22	
01.206.09.5.1	BELANJA OPERASI	301.704.500,00	299.364.000,00	(2.340.500,00)	99,22	
01.206.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	301.704.500,00	299.364.000,00	(2.340.500,00)	99,22	
01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah	181.845.775,00	184.757.787,00	(7.088.008,00)	96,31	
01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.600.000,00	7.205.267,00	(1.394.733,00)	83,78	
01.208.02.5.1	BELANJA OPERASI	8.600.000,00	7.205.267,00	(1.394.733,00)	83,78	
01.208.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.600.000,00	7.205.267,00	(1.394.733,00)	83,78	
01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	183.245.775,00	177.552.500,00	(5.693.275,00)	96,89	
01.208.04.5.1	BELANJA OPERASI	183.245.775,00	177.552.500,00	(5.693.275,00)	96,89	
01.208.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	183.245.775,00	177.552.500,00	(5.693.275,00)	96,89	
01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah	210.660.000,00	183.350.900,00	(33.309.100,00)	84,83	
01.209.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	87.460.000,00	56.425.700,00	(31.034.300,00)	64,52	
01.209.01.5.1	BELANJA OPERASI	87.460.000,00	56.425.700,00	(31.034.300,00)	64,52	
01.209.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.460.000,00	56.425.700,00	(31.034.300,00)	64,52	
01.209.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	129.200.000,00	126.925.200,00	(2.274.800,00)	98,24	
01.209.03.5.1	BELANJA OPERASI	129.200.000,00	126.925.200,00	(2.274.800,00)	98,24	
01.209.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.200.000,00	126.925.200,00	(2.274.800,00)	98,24	
02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	43.674.000,00	27.137.000,00	(16.537.000,00)	62,14	
02.201	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	6.130.000,00	2.180.000,00	(3.950.000,00)	35,56	
02.201.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, TeknologI dan Spesifik Lokasi	3.900.000,00	0,00	(3.900.000,00)	0	
02.201.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.900.000,00	0,00	(3.900.000,00)	0	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.201.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	0,00	(3.900.000,00)	0	
02.201.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	2.230.000,00	2.180.000,00	(50.000,00)	97,76	
02.201.02.5.1	BELANJA OPERASI	2.230.000,00	2.180.000,00	(50.000,00)	97,76	
02.201.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.230.000,00	2.180.000,00	(50.000,00)	97,76	
02.202	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisma Kewanjangan Kabupaten/Kota	22.984.000,00	22.797.000,00	(10.187.000,00)	69,12	
02.202.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan / Tanaman	29.584.000,00	19.437.000,00	(10.147.000,00)	65,70	
02.202.02.5.1	BELANJA OPERASI	29.584.000,00	19.437.000,00	(10.147.000,00)	65,70	
02.202.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.584.000,00	19.437.000,00	(10.147.000,00)	65,70	
02.202.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	3.400.000,00	3.360.000,00	(40.000,00)	98,82	
02.202.03.5.1	BELANJA OPERASI	3.400.000,00	3.360.000,00	(40.000,00)	98,82	
02.202.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	3.360.000,00	(40.000,00)	98,82	
02.205	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten / Kota	4.560.000,00	2.160.000,00	(2.400.000,00)	47,37	
02.205.09	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	4.560.000,00	2.160.000,00	(2.400.000,00)	47,37	
02.205.09.5.1	BELANJA OPERASI	4.560.000,00	2.160.000,00	(2.400.000,00)	47,37	
02.205.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.560.000,00	2.160.000,00	(2.400.000,00)	47,37	
03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.280.000,00	0,00	(1.280.000,00)	0	
03.202	Pembangunan Prasarana Pertanian	1.280.000,00	0,00	(1.280.000,00)	0	
03.202.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	1.280.000,00	0,00	(1.280.000,00)	0	
03.202.03.5.2	BELANJA MODAL	1.280.000,00	0,00	(1.280.000,00)	0	
03.202.03.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.280.000,00	0,00	(1.280.000,00)	0	
05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	30.050.000,00	30.000.000,00	(50.000,00)	99,83	
05.201	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	30.050.000,00	30.000.000,00	(50.000,00)	99,83	
05.201.07	Penanggulangan Bencana Alam Bidang Perernakan dan kesehatan hewan	30.050.000,00	30.000.000,00	(50.000,00)	99,83	
05.201.07.5.1	BELANJA OPERASI	30.050.000,00	30.000.000,00	(50.000,00)	99,83	
05.201.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.050.000,00	30.000.000,00	(50.000,00)	99,83	
07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	470.384.785,00	461.493.500,00	(8.891.285,00)	98,11	
07.201	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	470.384.785,00	461.493.500,00	(8.891.285,00)	98,11	
07.201.01	Peningkatan Kapasitas Ketenagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	462.504.785,00	457.743.500,00	(4.821.285,00)	98,96	
07.201.01.5.1	BELANJA OPERASI	462.504.785,00	457.743.500,00	(4.821.285,00)	98,96	



54

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
07.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	482.564.785,00	457.743.500,00	(4.821.285,00)	38,98	
07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kalahbagaan Petani di Kecamatan dan Desa	7.820.000,00	3.750.000,00	(4.070.000,00)	47,95	
07.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	7.820.000,00	3.750.000,00	(4.070.000,00)	47,95	
07.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.820.000,00	3.750.000,00	(4.070.000,00)	47,95	
	SURPLUS / DEFISIT	(6.582.126.758,00)	(6.009.981.863,00)	572.224.895,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBAYAAN TAHUN BERKENAAN	(6.582.126.758,00)	(6.009.981.863,00)	572.224.895,00	0	



SW



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2024

Urusan Pemerintahan : 3-31 PERINDUSTRIAN

SKPD : 3-31.3-30.0-00.01 DINAS PERINDUSTRIAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	179.952.000,00	196.923.500,00	16.971.500,00	109,43	
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	179.952.000,00	196.923.500,00	16.971.500,00	109,43	
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	179.952.000,00	196.923.500,00	16.971.500,00	109,43	NULL
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	3.409.594.073,28	3.230.928.481,00	(172.665.592,28)	94,94	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.388.915.526,00	2.312.008.781,00	(76.906.745,00)	96,78	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.870.730.246,00	1.796.829.031,00	(73.910.215,00)	96,05	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.659.543.846,00	1.796.173.631,00	(73.370.215,00)	96,05	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.659.543.846,00	1.796.173.631,00	(73.370.215,00)	96,05	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.659.543.846,00	1.796.173.631,00	(73.370.215,00)	96,05	
01.2.02.03	Penaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11.195.400,00	10.655.400,00	(540.000,00)	95,18	
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	11.195.400,00	10.655.400,00	(540.000,00)	95,18	
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	11.040.000,00	10.500.000,00	(540.000,00)	95,11	
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	155.400,00	155.400,00	0,00	100,00	
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	17.124.000,00	16.200.000,00	(924.000,00)	94,60	
01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	17.124.000,00	16.200.000,00	(924.000,00)	94,60	
01.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	17.124.000,00	16.200.000,00	(924.000,00)	94,60	
01.2.03.06.5.1.01	Belanja Pegawai	17.124.000,00	16.200.000,00	(924.000,00)	94,60	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	271.398.500,00	270.193.400,00	(1.205.100,00)	99,55	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.998.000,00	2.998.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	2.998.000,00	2.998.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.998.000,00	2.998.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	268.398.500,00	267.193.400,00	(1.205.100,00)	99,55	



W

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	268.398.500,00	267.193.400,00	(1.205.100,00)	99,55	
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	268.398.500,00	267.193.400,00	(1.205.100,00)	99,55	
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Perungjung Urusan Pemerintah Daerah	52.483.000,00	51.640.000,00	(823.000,00)	98,43	
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52.483.000,00	51.640.000,00	(823.000,00)	98,43	
01.2.07.06.5.1	BELANJA OPERASI	293.000,00	290.000,00	(3.000,00)	98,98	
01.2.07.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	293.000,00	290.000,00	(3.000,00)	98,98	
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	52.170.000,00	51.350.000,00	(820.000,00)	98,43	
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.170.000,00	51.350.000,00	(820.000,00)	98,43	
01.2.08	Penyediaan Jasa Perungjung Urusan Pemerintahan Daerah	129.547.780,00	129.506.350,00	(42.430,00)	99,97	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.000.000,00	3.994.750,00	(5.250,00)	99,87	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	3.994.750,00	(5.250,00)	99,87	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	3.994.750,00	(5.250,00)	99,87	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	125.547.780,00	125.510.600,00	(37.180,00)	99,97	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	125.547.780,00	125.510.600,00	(37.180,00)	99,97	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.547.780,00	125.510.600,00	(37.180,00)	99,97	
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perungjung Urusan Pemerintahan Daerah	47.645.000,00	47.641.000,00	(4.000,00)	99,99	
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	47.645.000,00	47.641.000,00	(4.000,00)	99,99	
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	47.645.000,00	47.641.000,00	(4.000,00)	99,99	
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.645.000,00	47.641.000,00	(4.000,00)	99,99	
02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	584.881.447,28	578.837.900,00	(6.043.547,28)	98,97	
02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	584.881.447,28	578.837.900,00	(6.043.547,28)	98,97	
02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Penyalangan Industri	46.037.000,00	43.973.900,00	(2.063.100,00)	95,52	
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	46.037.000,00	43.973.900,00	(2.063.100,00)	95,52	
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.037.000,00	43.973.900,00	(2.063.100,00)	95,52	
02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	538.844.447,28	534.864.000,00	(3.980.447,28)	99,26	
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	538.844.447,28	534.864.000,00	(3.980.447,28)	99,26	
02.2.01.04.5.1.05	Belanja Hibah	538.844.447,28	534.864.000,00	(3.980.447,28)	99,26	
03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	435.797.100,00	346.083.800,00	(89.713.300,00)	79,41	
03.2.01	Pembangunan dan Penguasaan Sarana Distribusi Perdagangan	435.797.100,00	346.083.800,00	(89.713.300,00)	79,41	



6w

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	291.641.700,00	201.328.400,00	(89.713.300,00)	69,24	
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	81.641.700,00	155.400,00	(81.486.300,00)	0,19	
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.641.700,00	155.400,00	(81.486.300,00)	0,19	
03.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	210.000.000,00	201.773.000,00	(8.227.000,00)	96,08	
03.2.01.01.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	210.000.000,00	201.773.000,00	(8.227.000,00)	96,08	
03.2.01.02	Facilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	144.155.400,00	144.155.400,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	144.155.400,00	144.155.400,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144.155.400,00	144.155.400,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / DEFISIT	(3.229.642.073,28)	(3.040.004.981,00)	189.637.092,28	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(3.229.642.073,28)	(3.040.004.981,00)	189.637.092,28	0	

42





PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2024

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH

SKPD : 4-01.0-00.0-00.01 SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	52.786.000,00	32.662.000,00	(20.124.000,00)	61,88	
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	52.786.000,00	32.662.000,00	(20.124.000,00)	61,88	
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	52.786.000,00	32.662.000,00	(20.124.000,00)	61,88	NULIL
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	35.757.054.738,00	33.420.615.603,00	(2.336.478.935,00)	93,47	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	32.520.581.118,00	30.337.253.058,00	(2.183.428.860,00)	93,29	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.421.273.297,00	11.784.149.344,00	(637.123.953,00)	94,87	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.380.359.797,00	11.745.297.344,00	(635.062.453,00)	94,87	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	12.380.359.797,00	11.745.297.344,00	(635.062.453,00)	94,87	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	12.380.359.797,00	11.745.297.344,00	(635.062.453,00)	94,87	
01.2.02.03	Penaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Sertifikasi Keuangan SKPD	40.913.500,00	38.652.000,00	(2.061.500,00)	94,46	
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	40.913.500,00	38.652.000,00	(2.061.500,00)	94,46	
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	33.240.000,00	31.390.000,00	(1.850.000,00)	94,43	
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.673.500,00	7.462.000,00	(211.500,00)	97,24	
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	37.351.425,00	36.574.400,00	(777.025,00)	97,92	
01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	37.351.425,00	36.574.400,00	(777.025,00)	97,92	
01.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	37.351.425,00	36.574.400,00	(777.025,00)	97,92	
01.2.03.06.5.1.01	Belanja Pegawai	35.400.000,00	35.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.951.425,00	1.174.400,00	(777.025,00)	60,18	
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21.912.000,00	11.253.400,00	(10.658.600,00)	51,36	
01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	21.912.000,00	11.253.400,00	(10.658.600,00)	51,36	
01.2.05.11.5.1	BELANJA OPERASI	21.912.000,00	11.253.400,00	(10.658.600,00)	51,36	

SW



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.205.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.912.000,00	11.253.400,00	(10.658.600,00)	51,36	
01.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.063.677.545,00	5.002.243.820,00	(60.833.725,00)	98,80	
01.206.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.995.000,00	4.975.000,00	(20.000,00)	99,80	
01.206.02.5.2	BELANJA MODAL	4.995.000,00	4.975.000,00	(20.000,00)	99,80	
01.206.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.995.000,00	4.975.000,00	(20.000,00)	99,80	
01.206.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggantian	8.993.045,00	8.339.000,00	(654.045,00)	92,73	
01.206.05.1	BELANJA OPERASI	8.993.045,00	8.339.000,00	(654.045,00)	92,73	
01.206.05.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.993.045,00	8.339.000,00	(654.045,00)	92,73	
01.206.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	683.890.000,00	633.112.500,00	(50.777.500,00)	92,58	
01.206.08.1	BELANJA OPERASI	683.890.000,00	633.112.500,00	(50.777.500,00)	92,58	
01.206.08.1.02	Belanja Barang dan Jasa	683.890.000,00	633.112.500,00	(50.777.500,00)	92,58	
01.206.09	Peningkatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.365.199.500,00	4.355.817.320,00	(9.382.180,00)	99,79	
01.206.09.1	BELANJA OPERASI	4.365.199.500,00	4.355.817.320,00	(9.382.180,00)	99,79	
01.206.09.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.365.199.500,00	4.355.817.320,00	(9.382.180,00)	99,79	
01.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.563.693.239,00	1.532.762.600,00	(30.830.639,00)	98,00	
01.207.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	252.100.000,00	252.100.000,00	0,00	100,00	
01.207.01.5.2	BELANJA MODAL	252.100.000,00	252.100.000,00	0,00	100,00	
01.207.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	252.100.000,00	252.100.000,00	0,00	100,00	
01.207.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.311.493.239,00	1.280.662.600,00	(30.830.639,00)	97,65	
01.207.06.5.2	BELANJA MODAL	1.311.493.239,00	1.280.662.600,00	(30.830.639,00)	97,65	
01.207.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.311.493.239,00	1.280.662.600,00	(30.830.639,00)	97,65	
01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.633.190.358,00	5.867.372.804,00	(965.817.754,00)	88,44	
01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	353.650.000,00	307.794.730,00	(45.855.270,00)	87,03	
01.208.02.5.1	BELANJA OPERASI	353.650.000,00	307.794.730,00	(45.855.270,00)	87,03	
01.208.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	353.650.000,00	307.794.730,00	(45.855.270,00)	87,03	
01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.279.540.358,00	5.359.577.874,00	(919.962.484,00)	85,35	
01.208.04.5.1	BELANJA OPERASI	6.279.540.358,00	5.359.577.874,00	(919.962.484,00)	85,35	
01.208.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.279.540.358,00	5.359.577.874,00	(919.962.484,00)	85,35	
01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.654.195.572,00	2.631.879.013,00	(22.316.559,00)	91,86	
01.209.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.738.291.880,00	1.587.981.751,00	(150.310.129,00)	91,35	
01.209.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.738.291.880,00	1.587.981.751,00	(150.310.129,00)	91,35	
01.209.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.738.291.880,00	1.587.981.751,00	(150.310.129,00)	91,35	
01.209.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	161.806.500,00	83.593.781,00	(78.212.719,00)	51,66	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.208.06.5.1	BELANJA OPERASI	161.806.600,00	83.593.781,00	(78.212.719,00)	51,86	
01.208.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.806.600,00	83.593.781,00	(78.212.719,00)	51,86	
01.208.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	964.057.192,00	960.003.481,00	(4.053.711,00)	99,58	
01.208.09.5.1	BELANJA OPERASI	744.113.892,00	740.230.511,00	(3.883.381,00)	99,48	
01.208.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	744.113.892,00	740.230.511,00	(3.883.381,00)	99,48	
01.209.06.5.2	BELANJA MODAL	219.983.300,00	219.772.970,00	(210.330,00)	99,90	
01.209.06.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	219.983.300,00	219.772.970,00	(210.330,00)	99,90	
01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	732.637.177,00	663.579.743,00	(69.057.434,00)	90,57	
01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	196.038.937,00	167.980.406,00	(28.058.531,00)	85,69	
01.2.11.01.5.1	BELANJA OPERASI	196.038.937,00	167.980.406,00	(28.058.531,00)	85,69	
01.2.11.01.5.1.01	Belanja Pegawai	196.038.937,00	167.980.406,00	(28.058.531,00)	85,69	
01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	297.018.240,00	294.900.000,00	(2.118.240,00)	99,29	
01.2.11.02.5.1	BELANJA OPERASI	297.018.240,00	294.900.000,00	(2.118.240,00)	99,29	
01.2.11.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	297.018.240,00	294.900.000,00	(2.118.240,00)	99,29	
01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	18.100.000,00	14.032.677,00	(4.067.323,00)	77,53	
01.2.11.03.5.1	BELANJA OPERASI	18.100.000,00	14.032.677,00	(4.067.323,00)	77,53	
01.2.11.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.100.000,00	14.032.677,00	(4.067.323,00)	77,53	
01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	221.480.000,00	186.666.660,00	(34.813.340,00)	84,28	
01.2.11.04.5.1	BELANJA OPERASI	221.480.000,00	186.666.660,00	(34.813.340,00)	84,28	
01.2.11.04.5.1.01	Belanja Pegawai	221.400.000,00	186.666.660,00	(34.733.340,00)	84,31	
01.2.11.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000,00	0,00	(80.000,00)	0	
01.2.12	Fasilitas Kerumah tanggungan Sekretariat Daerah	1.385.695.280,00	1.215.599.030,00	(170.096.250,00)	87,72	
01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	794.702.960,00	735.953.830,00	(58.749.130,00)	92,61	
01.2.12.01.5.1	BELANJA OPERASI	794.702.960,00	735.953.830,00	(58.749.130,00)	92,61	
01.2.12.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	794.702.960,00	735.953.830,00	(58.749.130,00)	92,61	
01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	582.254.320,00	470.987.200,00	(111.267.120,00)	80,89	
01.2.12.02.5.1	BELANJA OPERASI	582.254.320,00	470.987.200,00	(111.267.120,00)	80,89	
01.2.12.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	582.254.320,00	470.987.200,00	(111.267.120,00)	80,89	
01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	8.738.000,00	8.658.000,00	(80.000,00)	99,08	
01.2.12.03.5.1	BELANJA OPERASI	8.738.000,00	8.658.000,00	(80.000,00)	99,08	
01.2.12.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.738.000,00	8.658.000,00	(80.000,00)	99,08	
01.2.13	Penataan Organisasi	216.545.750,00	213.852.880,00	(2.692.870,00)	97,85	

44



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.13.01	Pengelolaan Ketenagaan dan Analisa Jabatan	25.781.000,00	25.007.800,00	(773.400,00)	97,00	
01.2.13.01.5.1	BELANJA OPERASI	25.781.000,00	25.007.800,00	(773.400,00)	97,00	
01.2.13.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.781.000,00	25.007.800,00	(773.400,00)	97,00	
01.2.13.02	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	55.780.750,00	53.425.280,00	(2.355.470,00)	95,78	
01.2.13.02.5.1	BELANJA OPERASI	55.780.750,00	53.425.280,00	(2.355.470,00)	95,78	
01.2.13.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.780.750,00	53.425.280,00	(2.355.470,00)	95,78	
01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	135.184.000,00	133.620.000,00	(1.564.000,00)	98,84	
01.2.13.03.5.1	BELANJA OPERASI	135.184.000,00	133.620.000,00	(1.564.000,00)	98,84	
01.2.13.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.184.000,00	133.620.000,00	(1.564.000,00)	98,84	
01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.13.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.13.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.578.209.475,00	1.578.286.224,00	(923.251,00)	99,94	
01.2.14.01	Fasilitas Keprotokolan	736.948.875,00	736.931.204,00	(17.671,00)	100,00	
01.2.14.01.5.1	BELANJA OPERASI	736.948.875,00	736.931.204,00	(17.671,00)	100,00	
01.2.14.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	736.948.875,00	736.931.204,00	(17.671,00)	100,00	
01.2.14.02	Fasilitas Komunikasi Pimpinan	370.053.000,00	369.758.263,00	(294.737,00)	99,92	
01.2.14.02.5.1	BELANJA OPERASI	370.053.000,00	369.758.263,00	(294.737,00)	99,92	
01.2.14.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	370.053.000,00	369.758.263,00	(294.737,00)	99,92	
01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	472.207.600,00	471.596.757,00	(610.843,00)	99,87	
01.2.14.03.5.1	BELANJA OPERASI	472.207.600,00	471.596.757,00	(610.843,00)	99,87	
01.2.14.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	472.207.600,00	471.596.757,00	(610.843,00)	99,87	
02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	2.773.313.000,00	2.624.476.497,00	(148.836.503,00)	94,63	
02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	2.445.843.000,00	2.298.035.718,00	(147.807.282,00)	93,96	
02.2.02.01	Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1.422.133.400,00	1.372.864.253,00	(99.269.147,00)	96,52	
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.422.133.400,00	1.372.864.253,00	(99.269.147,00)	96,52	
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.212.133.400,00	1.122.864.253,00	(89.269.147,00)	92,64	
02.2.02.01.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	210.000.000,00	200.000.000,00	(10.000.000,00)	95,24	
02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	1.023.709.600,00	975.171.465,00	(48.538.135,00)	95,26	
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.023.709.600,00	975.171.465,00	(48.538.135,00)	95,26	
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.023.709.600,00	975.171.465,00	(48.538.135,00)	95,26	
02.2.03	Fasilitas dan Koordinasi Hukum	327.470.000,00	326.440.779,00	(1.029.221,00)	99,89	
02.2.03.01	Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	48.360.000,00	48.352.100,00	(7.900,00)	99,98	
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	48.360.000,00	48.352.100,00	(7.900,00)	99,98	
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.360.000,00	48.352.100,00	(7.900,00)	99,98	
02.2.03.02	Fasilitas Bantuan Hukum	243.646.000,00	242.689.979,00	(956.021,00)	99,61	
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	243.646.000,00	242.689.979,00	(956.021,00)	99,61	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.203.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	243.646.000,00	242.689.979,00	(956.021,00)	99,81	
02.203.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	35.464.000,00	35.398.700,00	(65.300,00)	99,82	
02.203.03.5.1	BELANJA OPERASI	35.464.000,00	35.398.700,00	(65.300,00)	99,82	
02.203.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.464.000,00	35.398.700,00	(65.300,00)	99,82	
03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	493.100.620,00	498.886.248,00	(4.214.372,00)	99,99	
03.201	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	73.629.620,00	70.837.498,00	(2.792.122,00)	96,21	
03.201.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	73.629.620,00	70.837.498,00	(2.792.122,00)	96,21	
03.201.02.5.1	BELANJA OPERASI	73.629.620,00	70.837.498,00	(2.792.122,00)	96,21	
03.201.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.629.620,00	70.837.498,00	(2.792.122,00)	96,21	
03.202	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	129.995.800,00	129.982.100,00	(13.700,00)	99,99	
03.202.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	129.995.800,00	129.982.100,00	(13.700,00)	99,99	
03.202.02.5.1	BELANJA OPERASI	129.995.800,00	129.982.100,00	(13.700,00)	99,99	
03.202.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.995.800,00	129.982.100,00	(13.700,00)	99,99	
03.203	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	259.475.200,00	258.066.650,00	(1.408.550,00)	99,46	
03.203.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	155.462.400,00	155.389.900,00	(72.500,00)	99,95	
03.203.01.5.1	BELANJA OPERASI	155.462.400,00	155.389.900,00	(72.500,00)	99,95	
03.203.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	155.462.400,00	155.389.900,00	(72.500,00)	99,95	
03.203.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	79.474.000,00	78.590.250,00	(883.750,00)	98,89	
03.203.02.5.1	BELANJA OPERASI	79.474.000,00	78.590.250,00	(883.750,00)	98,89	
03.203.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.474.000,00	78.590.250,00	(883.750,00)	98,89	
03.203.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	24.538.800,00	24.086.500,00	(452.300,00)	98,16	
03.203.03.5.1	BELANJA OPERASI	24.538.800,00	24.086.500,00	(452.300,00)	98,16	
03.203.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.538.800,00	24.086.500,00	(452.300,00)	98,16	
	SURPLUS / DEFISIT	(35.794.308.738,00)	(33.387.953.803,00)	2.316.354.935,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(35.794.308.738,00)	(33.387.953.803,00)	2.316.354.935,00	0	





PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2024

Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD

SKPD : 4-02.0-00.0-00.02 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KODE REKENING	URAZAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	27.684.945.196,00	26.002.062.496,00	(782.885.699,00)	97,17	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.308.605.326,00	19.636.966.633,00	(751.638.693,00)	96,31	
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52.427.040,00	50.686.900,00	(1.741.040,00)	96,68	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	42.095.800,00	40.794.200,00	(1.301.600,00)	96,91	
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	42.095.800,00	40.794.200,00	(1.301.600,00)	96,91	
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.095.800,00	40.794.200,00	(1.301.600,00)	96,91	
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	841.500,00	837.800,00	(3.700,00)	99,56	
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	841.500,00	837.800,00	(3.700,00)	99,56	
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	841.500,00	837.800,00	(3.700,00)	99,56	
01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.748.250,00	1.428.750,00	(319.500,00)	81,72	
01.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.748.250,00	1.428.750,00	(319.500,00)	81,72	
01.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.748.250,00	1.428.750,00	(319.500,00)	81,72	
01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.141.190,00	2.078.500,00	(62.690,00)	97,07	
01.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	2.141.190,00	2.078.500,00	(62.690,00)	97,07	
01.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.141.190,00	2.078.500,00	(62.690,00)	97,07	
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.652.900,00	2.634.550,00	(18.350,00)	99,31	
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.652.900,00	2.634.550,00	(18.350,00)	99,31	
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.652.900,00	2.634.550,00	(18.350,00)	99,31	
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.948.300,00	2.913.100,00	(35.200,00)	98,81	
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	2.948.300,00	2.913.100,00	(35.200,00)	98,81	



Ln

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.201.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.948.300,00	2.913.100,00	(35.200,00)	98,81	
01.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.050.358.823,00	1.986.170.528,00	(74.188.295,00)	96,40	
01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.041.487.148,00	1.967.813.028,00	(73.674.120,00)	96,39	
01.202.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.041.487.148,00	1.967.813.028,00	(73.674.120,00)	96,39	
01.202.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.041.487.148,00	1.967.813.028,00	(73.674.120,00)	96,39	
01.202.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	16.105.000,00	16.080.000,00	(25.000,00)	99,84	
01.202.03.5.1	BELANJA OPERASI	16.105.000,00	16.080.000,00	(25.000,00)	99,84	
01.202.03.5.1.01	Belanja Pegawai	16.080.000,00	16.080.000,00	0,00	100,00	
01.202.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000,00	0,00	(25.000,00)	0	
01.202.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.087.800,00	1.070.200,00	(17.600,00)	98,38	
01.202.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.087.800,00	1.070.200,00	(17.600,00)	98,38	
01.202.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.087.800,00	1.070.200,00	(17.600,00)	98,38	
01.202.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.678.875,00	1.207.300,00	(471.575,00)	71,91	
01.202.07.5.1	BELANJA OPERASI	1.678.875,00	1.207.300,00	(471.575,00)	71,91	
01.202.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.678.875,00	1.207.300,00	(471.575,00)	71,91	
01.203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	100,00	
01.203.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	100,00	
01.203.06.5.1	BELANJA OPERASI	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	100,00	
01.203.06.5.1.01	Belanja Pegawai	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	100,00	
01.205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.896.000,00	12.885.600,00	(10.400,00)	99,92	
01.205.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12.896.000,00	12.885.600,00	(10.400,00)	99,92	
01.205.11.5.1	BELANJA OPERASI	12.896.000,00	12.885.600,00	(10.400,00)	99,92	
01.205.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.896.000,00	12.885.600,00	(10.400,00)	99,92	
01.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	526.370.720,00	517.873.650,00	(8.496.870,00)	98,39	
01.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.314.470,00	21.263.000,00	(51.470,00)	99,76	
01.206.01.5.1	BELANJA OPERASI	21.314.470,00	21.263.000,00	(51.470,00)	99,76	
01.206.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.314.470,00	21.263.000,00	(51.470,00)	99,76	
01.206.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	128.621.250,00	120.177.500,00	(8.443.750,00)	93,44	
01.206.08.5.1	BELANJA OPERASI	128.621.250,00	120.177.500,00	(8.443.750,00)	93,44	
01.206.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.621.250,00	120.177.500,00	(8.443.750,00)	93,44	
01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	376.435.000,00	376.433.350,00	(1.650,00)	100,00	
01.206.09.5.1	BELANJA OPERASI	376.435.000,00	376.433.350,00	(1.650,00)	100,00	
01.206.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	376.435.000,00	376.433.350,00	(1.650,00)	100,00	

SW



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.211.853.690,00	2.207.567.800,00	(4.285.890,00)	99,91	
01.207.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.545.500.000,00	1.545.500.000,00	0,00	100,00	
01.207.01.5.2	BELANJA MODAL	1.545.500.000,00	1.545.500.000,00	0,00	100,00	
01.207.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.545.500.000,00	1.545.500.000,00	0,00	100,00	
01.207.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	321.896.490,00	320.917.800,00	(980.690,00)	99,70	
01.207.06.5.1	BELANJA OPERASI	630.000,00	0,00	(630.000,00)	0	
01.207.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	630.000,00	0,00	(630.000,00)	0	
01.207.06.5.2	BELANJA MODAL	321.266.490,00	320.917.800,00	(350.690,00)	99,89	
01.207.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	321.266.490,00	320.917.800,00	(350.690,00)	99,89	
01.207.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	344.455.200,00	341.150.000,00	(3.305.200,00)	99,04	
01.207.11.5.2	BELANJA MODAL	344.455.200,00	341.150.000,00	(3.305.200,00)	99,04	
01.207.11.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	344.455.200,00	341.150.000,00	(3.305.200,00)	99,04	
01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.583.180.900,00	2.484.142.389,00	(99.038.511,00)	96,92	
01.208.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.938.600,00	3.330.000,00	(1.608.600,00)	67,43	
01.208.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.938.600,00	3.330.000,00	(1.608.600,00)	67,43	
01.208.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.938.600,00	3.330.000,00	(1.608.600,00)	67,43	
01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	152.042.620,00	146.880.188,00	(5.162.431,00)	96,50	
01.208.02.5.1	BELANJA OPERASI	152.042.620,00	146.880.188,00	(5.162.431,00)	96,50	
01.208.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.042.620,00	146.880.188,00	(5.162.431,00)	96,50	
01.208.03	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlangkapan Kantor	96.001.680,00	67.273.250,00	(28.728.430,00)	70,08	
01.208.03.5.1	BELANJA OPERASI	76.299.180,00	60.623.250,00	(15.675.930,00)	79,45	
01.208.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.299.180,00	60.623.250,00	(15.675.930,00)	79,45	
01.208.03.5.2	BELANJA MODAL	19.702.500,00	6.650.000,00	(13.052.500,00)	33,75	
01.208.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.702.500,00	6.650.000,00	(13.052.500,00)	33,75	
01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.310.198.000,00	2.266.658.950,00	(43.539.050,00)	98,12	
01.208.04.5.1	BELANJA OPERASI	2.310.198.000,00	2.266.658.950,00	(43.539.050,00)	98,12	
01.208.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.310.198.000,00	2.266.658.950,00	(43.539.050,00)	98,12	
01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	310.885.720,00	314.058.600,00	(3.127.120,00)	99,48	
01.209.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	216.435.000,00	215.226.000,00	(1.209.000,00)	99,44	
01.209.01.5.1	BELANJA OPERASI	216.435.000,00	215.226.000,00	(1.209.000,00)	99,44	
01.209.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	216.435.000,00	215.226.000,00	(1.209.000,00)	99,44	
01.209.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.132.700,00	15.086.850,00	(45.850,00)	99,50	
01.209.06.5.1	BELANJA OPERASI	15.132.700,00	15.086.850,00	(45.850,00)	99,50	

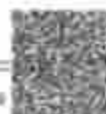


KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.132.700,00	15.058.850,00	(73.850,00)	99,50	
01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	84.118.020,00	83.775.750,00	(342.270,00)	99,59	
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	84.118.020,00	83.775.750,00	(342.270,00)	99,59	
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.118.020,00	83.775.750,00	(342.270,00)	99,59	
01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	7.989.385.533,00	7.417.841.871,00	(571.543.662,00)	92,73	
01.2.15.01	Peryelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	7.536.237.533,00	7.000.541.971,00	(535.695.562,00)	92,89	
01.2.15.01.5.1	BELANJA OPERASI	7.536.237.533,00	7.000.541.971,00	(535.695.562,00)	92,89	
01.2.15.01.5.1.01	Belanja Pegawai	7.536.237.533,00	7.000.541.971,00	(535.695.562,00)	92,89	
01.2.15.02	Penyediaan Pakailin Dinas dan Atribut DPRD	373.121.000,00	372.499.900,00	(621.100,00)	99,83	
01.2.15.02.5.1	BELANJA OPERASI	373.121.000,00	372.499.900,00	(621.100,00)	99,83	
01.2.15.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	373.121.000,00	372.499.900,00	(621.100,00)	99,83	
01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	90.007.000,00	44.900.000,00	(45.107.000,00)	49,89	
01.2.15.03.5.1	BELANJA OPERASI	90.007.000,00	44.900.000,00	(45.107.000,00)	49,89	
01.2.15.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.007.000,00	44.900.000,00	(45.107.000,00)	49,89	
01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	4.632.666.000,00	4.631.869.095,00	(796.905,00)	99,98	
01.2.16.03	Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	4.632.666.000,00	4.631.869.095,00	(796.905,00)	99,98	
01.2.16.03.5.1	BELANJA OPERASI	4.632.666.000,00	4.631.869.095,00	(796.905,00)	99,98	
01.2.16.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.632.666.000,00	4.631.869.095,00	(796.905,00)	99,98	
02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	7.296.342.870,00	7.285.065.865,00	(11.277.005,00)	99,57	
02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	757.245.720,00	744.205.410,00	(13.040.310,00)	98,28	
02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	275.480.000,00	265.593.110,00	(9.886.890,00)	96,42	
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	275.480.000,00	265.593.110,00	(9.886.890,00)	96,42	
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	275.480.000,00	265.593.110,00	(9.886.890,00)	96,42	
02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	17.482.500,00	17.337.500,00	(145.000,00)	99,17	
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	17.482.500,00	17.337.500,00	(145.000,00)	99,17	
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.482.500,00	17.337.500,00	(145.000,00)	99,17	
02.2.01.03	Peryelenggaraan Kajian Penunjang- U ndangan	44.516.920,00	42.270.100,00	(2.246.820,00)	94,95	
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	44.516.920,00	42.270.100,00	(2.246.820,00)	94,95	
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.516.920,00	42.270.100,00	(2.246.820,00)	94,95	
02.2.01.04	Fasilitas Penyusunan Paragraf/Ketertarikan Naskah Akademik	417.200.000,00	417.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	417.200.000,00	417.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	417.200.000,00	417.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	2.586.300,00	1.804.700,00	(781.600,00)	69,78	
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	2.586.300,00	1.804.700,00	(781.600,00)	69,78	
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.586.300,00	1.804.700,00	(781.600,00)	69,78	
02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	162.211.630,00	150.997.800,00	(11.213.700,00)	93,04	



Ln

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.202.01	Pembahasan KUA dan PPAS	18.731.250,00	18.887.500,00	(43.750,00)	99,77	
02.202.01.5.1	BELANJA OPERASI	18.731.250,00	18.887.500,00	(43.750,00)	99,77	
02.202.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.731.250,00	18.887.500,00	(43.750,00)	99,77	
02.202.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	18.731.250,00	18.875.000,00	(56.250,00)	99,70	
02.202.02.5.1	BELANJA OPERASI	18.731.250,00	18.875.000,00	(56.250,00)	99,70	
02.202.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.731.250,00	18.875.000,00	(56.250,00)	99,70	
02.202.03	Pembahasan APBD	28.687.250,00	28.513.000,00	(174.250,00)	99,39	
02.202.03.5.1	BELANJA OPERASI	28.687.250,00	28.513.000,00	(174.250,00)	99,39	
02.202.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.687.250,00	28.513.000,00	(174.250,00)	99,39	
02.202.04	Pembahasan APBD Perubahan	28.687.250,00	28.410.300,00	(276.950,00)	99,03	
02.202.04.5.1	BELANJA OPERASI	28.687.250,00	28.410.300,00	(276.950,00)	99,03	
02.202.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.687.250,00	28.410.300,00	(276.950,00)	99,03	
02.202.05	Pembahasan Laporan Semester	28.687.250,00	27.966.400,00	(720.850,00)	97,49	
02.202.05.5.1	BELANJA OPERASI	28.687.250,00	27.966.400,00	(720.850,00)	97,49	
02.202.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.687.250,00	27.966.400,00	(720.850,00)	97,49	
02.202.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	28.687.250,00	28.345.600,00	(341.650,00)	98,81	
02.202.06.5.1	BELANJA OPERASI	28.687.250,00	28.345.600,00	(341.650,00)	98,81	
02.202.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.687.250,00	28.345.600,00	(341.650,00)	98,81	
02.204	Peningkatan Kapasitas DPRD	5.474.834.700,00	5.461.600.000,00	(13.034.700,00)	99,76	
02.204.01	Orientasi DPRD	440.457.500,00	434.768.250,00	(5.688.250,00)	98,71	
02.204.01.5.1	BELANJA OPERASI	440.457.500,00	434.768.250,00	(5.688.250,00)	98,71	
02.204.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	440.457.500,00	434.768.250,00	(5.688.250,00)	98,71	
02.204.02	Pendalaman Tugas DPRD	4.371.140.000,00	4.365.597.750,00	(5.542.250,00)	99,87	
02.204.02.5.1	BELANJA OPERASI	4.371.140.000,00	4.365.597.750,00	(5.542.250,00)	99,87	
02.204.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.371.140.000,00	4.365.597.750,00	(5.542.250,00)	99,87	
02.204.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	360.070.000,00	360.000.000,00	(70.000,00)	99,98	
02.204.04.5.1	BELANJA OPERASI	360.070.000,00	360.000.000,00	(70.000,00)	99,98	
02.204.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	360.070.000,00	360.000.000,00	(70.000,00)	99,98	
02.204.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	117.003.000,00	117.000.000,00	(3.000,00)	100,00	
02.204.05.5.1	BELANJA OPERASI	117.003.000,00	117.000.000,00	(3.000,00)	100,00	
02.204.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.003.000,00	117.000.000,00	(3.000,00)	100,00	
02.204.06	Ponyelenggaraan Hubungan Masyarakat	170.163.200,00	170.000.000,00	(163.200,00)	99,90	
02.204.06.5.1	BELANJA OPERASI	170.163.200,00	170.000.000,00	(163.200,00)	99,90	
02.204.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.163.200,00	170.000.000,00	(163.200,00)	99,90	
02.204.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	3.108.000,00	2.680.000,00	(428.000,00)	86,23	
02.204.07.5.1	BELANJA OPERASI	3.108.000,00	2.680.000,00	(428.000,00)	86,23	
02.204.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.108.000,00	2.680.000,00	(428.000,00)	86,23	
02.204.08	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12.693.000,00	11.553.000,00	(1.140.000,00)	91,02	
02.204.08.5.1	BELANJA OPERASI	12.693.000,00	11.553.000,00	(1.140.000,00)	91,02	
02.204.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.693.000,00	11.553.000,00	(1.140.000,00)	91,02	



lw

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	127.500,00	0,00	(127.500,00)	0	
02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	127.500,00	0,00	(127.500,00)	0	
02.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	127.500,00	0,00	(127.500,00)	0	
02.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.500,00	0,00	(127.500,00)	0	
02.2.08	Facilitasi Tugas DPRD	912.123.450,00	908.862.655,00	(3.460.795,00)	99,62	
02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	899.493.400,00	896.629.255,00	(2.864.145,00)	99,90	
02.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	899.493.400,00	896.629.255,00	(2.864.145,00)	99,90	
02.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	899.493.400,00	896.629.255,00	(2.864.145,00)	99,90	
02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	5.000.550,00	4.673.400,00	(327.150,00)	93,46	
02.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.550,00	4.673.400,00	(327.150,00)	93,46	
02.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.550,00	4.673.400,00	(327.150,00)	93,46	
02.2.08.03	Facilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	4.938.000,00	4.200.000,00	(738.000,00)	85,05	
02.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	4.938.000,00	4.200.000,00	(738.000,00)	85,05	
02.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.938.000,00	4.200.000,00	(738.000,00)	85,05	
02.2.08.04	Facilitasi Tugas Pimpinan DPRD	2.041.500,00	1.160.000,00	(881.500,00)	56,82	
02.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	2.041.500,00	1.160.000,00	(881.500,00)	56,82	
02.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.041.500,00	1.160.000,00	(881.500,00)	56,82	
02.2.08.05	Facilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	650.000,00	0,00	(650.000,00)	0	
02.2.08.05.5.1	BELANJA OPERASI	650.000,00	0,00	(650.000,00)	0	
02.2.08.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	650.000,00	0,00	(650.000,00)	0	
	SURPLUS / DEFISIT	(27.664.948.196,00)	(26.902.062.498,00)	762.885.698,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(27.664.948.196,00)	(26.902.062.498,00)	762.885.698,00	0	

44





PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

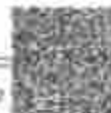
Tahun Anggaran 2024

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN

SKPD : 5-01.5-05.0-00.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KODE REKENING	URATAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	8.891.322.244,00	8.453.757.940,00	(440.564.304,00)	95,05	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.188.548.934,00	4.933.839.586,00	(254.710.338,00)	95,09	
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.025.045,00	26.500.000,00	(2.435.045,00)	91,58	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.689.640,00	12.456.700,00	(1.232.940,00)	90,99	
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	13.689.640,00	12.456.700,00	(1.232.940,00)	90,99	
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.689.640,00	12.456.700,00	(1.232.940,00)	90,99	
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.776.185,00	2.330.000,00	(446.185,00)	83,93	
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	2.776.185,00	2.330.000,00	(446.185,00)	83,93	
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.776.185,00	2.330.000,00	(446.185,00)	83,93	
01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.953.710,00	2.498.550,00	(457.160,00)	84,52	
01.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	2.953.710,00	2.498.550,00	(457.160,00)	84,52	
01.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.953.710,00	2.498.550,00	(457.160,00)	84,52	
01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	2.148.080,00	2.102.500,00	(46.580,00)	97,83	
01.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	2.148.080,00	2.102.500,00	(46.580,00)	97,83	
01.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.148.080,00	2.102.500,00	(46.580,00)	97,83	
01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.393.180,00	2.301.000,00	(92.180,00)	96,15	
01.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	2.393.180,00	2.301.000,00	(92.180,00)	96,15	
01.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.393.180,00	2.301.000,00	(92.180,00)	96,15	
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.973.270,00	4.813.250,00	(160.020,00)	96,78	
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	4.973.270,00	4.813.250,00	(160.020,00)	96,78	
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.973.270,00	4.813.250,00	(160.020,00)	96,78	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.218.236.487,00	4.023.214.533,00	(195.021.954,00)	95,38	
01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.207.805.487,00	4.013.014.533,00	(194.790.954,00)	95,37	
01.202.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.207.805.487,00	4.013.014.533,00	(194.790.954,00)	95,37	
01.202.01.5.1.01	Belanja Pegawai	4.207.805.487,00	4.013.014.533,00	(194.790.954,00)	95,37	
01.202.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penjualan/Verifikasi Keuangan SKPD	10.451.000,00	10.200.000,00	(251.000,00)	97,79	
01.202.03.5.1	BELANJA OPERASI	10.451.000,00	10.200.000,00	(251.000,00)	97,79	
01.202.03.5.1.01	Belanja Pegawai	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00	
01.202.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	251.000,00	0,00	(251.000,00)	0	
01.203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	18.650.000,00	18.600.000,00	(50.000,00)	99,73	
01.203.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	18.650.000,00	18.600.000,00	(50.000,00)	99,73	
01.203.06.5.1	BELANJA OPERASI	18.650.000,00	18.600.000,00	(50.000,00)	99,73	
01.203.06.5.1.01	Belanja Pegawai	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	100,00	
01.203.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000,00	0,00	(50.000,00)	0	
01.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	230.987.310,00	229.961.890,00	(735.420,00)	99,88	
01.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.324.500,00	3.211.000,00	(113.500,00)	96,59	
01.206.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.324.500,00	3.211.000,00	(113.500,00)	96,59	
01.206.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.324.500,00	3.211.000,00	(113.500,00)	96,59	
01.206.08	Facilitas Kunjungan Tamu	2.212.500,00	2.187.500,00	(25.000,00)	98,87	
01.206.08.5.1	BELANJA OPERASI	2.212.500,00	2.187.500,00	(25.000,00)	98,87	
01.206.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.212.500,00	2.187.500,00	(25.000,00)	98,87	
01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	225.160.310,00	224.563.390,00	(596.920,00)	99,73	
01.206.09.5.1	BELANJA OPERASI	225.160.310,00	224.563.390,00	(596.920,00)	99,73	
01.206.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	225.160.310,00	224.563.390,00	(596.920,00)	99,73	
01.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Perungjung Unsur Pemerintah Daerah	198.484.965,00	183.647.000,00	(14.837.965,00)	92,52	
01.207.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.511.505,00	31.450.000,00	(2.061.505,00)	93,85	
01.207.02.5.1	BELANJA OPERASI	53.330,00	0,00	(53.330,00)	0	
01.207.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.330,00	0,00	(53.330,00)	0	
01.207.02.5.2	BELANJA MODAL	33.458.175,00	31.450.000,00	(2.008.175,00)	94,00	
01.207.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.458.175,00	31.450.000,00	(2.008.175,00)	94,00	
01.207.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	164.973.460,00	152.197.000,00	(12.776.460,00)	92,26	
01.207.06.5.1	BELANJA OPERASI	75.000,00	0,00	(75.000,00)	0	
01.207.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000,00	0,00	(75.000,00)	0	
01.207.06.5.2	BELANJA MODAL	164.898.460,00	152.197.000,00	(12.701.460,00)	92,30	
01.207.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	164.898.460,00	152.197.000,00	(12.701.460,00)	92,30	
01.208	Penyediaan Jasa Perungjung Unsur Pemerintahan Daerah	440.255.227,00	403.001.573,00	(37.253.654,00)	91,54	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komersial: Sumber Daya Air dan Listrik	97.242.000,00	67.673.473,00	(29.568.527,00)	69,59	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	97.242.000,00	67.673.473,00	(29.568.527,00)	69,59	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.242.000,00	67.673.473,00	(29.568.527,00)	69,59	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	343.013.227,00	335.328.100,00	(7.685.127,00)	97,76	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	343.013.227,00	335.328.100,00	(7.685.127,00)	97,76	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	343.013.227,00	335.328.100,00	(7.685.127,00)	97,76	
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah	53.290.900,00	48.914.500,00	(4.376.400,00)	91,79	
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Penunjang Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.490.300,00	44.076.000,00	(414.300,00)	99,07	
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	44.490.300,00	44.076.000,00	(414.300,00)	99,07	
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.490.300,00	44.076.000,00	(414.300,00)	99,07	
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.250.000,00	858.500,00	(1.391.500,00)	38,16	
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	2.250.000,00	858.500,00	(1.391.500,00)	38,16	
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	858.500,00	(1.391.500,00)	38,16	
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.550.600,00	3.980.000,00	(2.570.600,00)	60,76	
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	6.550.600,00	3.980.000,00	(2.570.600,00)	60,76	
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.550.600,00	3.980.000,00	(2.570.600,00)	60,76	
02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.441.885.710,00	1.350.471.343,00	(91.414.367,00)	93,66	
02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.148.008.560,00	1.077.705.943,00	(70.302.617,00)	93,86	
02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	18.481.500,00	12.100.000,00	(6.381.500,00)	65,47	
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	18.481.500,00	12.100.000,00	(6.381.500,00)	65,47	
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.481.500,00	12.100.000,00	(6.381.500,00)	65,47	
02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah	9.672.100,00	9.410.000,00	(262.100,00)	97,29	
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	9.672.100,00	9.410.000,00	(262.100,00)	97,29	
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.672.100,00	9.410.000,00	(262.100,00)	97,29	
02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	27.716.700,00	19.354.500,00	(8.362.200,00)	69,83	
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	27.716.700,00	19.354.500,00	(8.362.200,00)	69,83	
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.716.700,00	19.354.500,00	(8.362.200,00)	69,83	
02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1.092.138.260,00	1.036.841.443,00	(55.296.817,00)	94,94	
02.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	1.092.138.260,00	1.036.841.443,00	(55.296.817,00)	94,94	
02.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.092.138.260,00	1.036.841.443,00	(55.296.817,00)	94,94	

SW



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.202	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	242.829.500,00	222.871.500,00	(19.957.950,00)	91,78	
02.202.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	202.829.500,00	190.681.600,00	(12.147.900,00)	94,00	
02.202.02.5.1	BELANJA OPERASI	202.829.500,00	190.681.600,00	(12.147.900,00)	94,00	
02.202.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	202.829.500,00	190.681.600,00	(12.147.900,00)	94,00	
02.202.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	39.999.650,00	32.209.900,00	(7.789.750,00)	80,53	
02.202.03.5.1	BELANJA OPERASI	39.999.650,00	32.209.900,00	(7.789.750,00)	80,53	
02.202.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.999.650,00	32.209.900,00	(7.789.750,00)	80,53	
02.203	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	51.048.000,00	49.893.900,00	(1.154.100,00)	97,74	
02.203.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	51.048.000,00	49.893.900,00	(1.154.100,00)	97,74	
02.203.03.5.1	BELANJA OPERASI	51.048.000,00	49.893.900,00	(1.154.100,00)	97,74	
02.203.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.048.000,00	49.893.900,00	(1.154.100,00)	97,74	
02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	370.471.246,00	362.263.100,00	(8.208.146,00)	97,78	
02.203	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	165.906.735,00	160.509.950,00	(5.396.785,00)	96,75	
02.203.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	165.906.735,00	160.509.950,00	(5.396.785,00)	96,75	
02.203.04.5.1	BELANJA OPERASI	165.906.735,00	160.509.950,00	(5.396.785,00)	96,75	
02.203.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	165.906.735,00	160.509.950,00	(5.396.785,00)	96,75	
02.204	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	204.564.511,00	201.753.150,00	(2.811.361,00)	98,63	
02.204.03	Diseminasi Jaring, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	204.564.511,00	201.753.150,00	(2.811.361,00)	98,63	
02.204.03.5.1	BELANJA OPERASI	204.564.511,00	201.753.150,00	(2.811.361,00)	98,63	
02.204.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	204.564.511,00	201.753.150,00	(2.811.361,00)	98,63	
03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.890.415.354,00	1.804.183.901,00	(86.231.453,00)	95,44	
03.201	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	465.152.520,00	426.973.800,00	(38.178.720,00)	91,79	
03.201.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	239.185.130,00	218.811.180,00	(20.374.950,00)	91,48	
03.201.07.5.1	BELANJA OPERASI	239.185.130,00	218.811.180,00	(20.374.950,00)	91,48	
03.201.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	239.185.130,00	218.811.180,00	(20.374.950,00)	91,48	

64



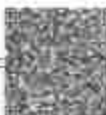
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	225.966.390,00	208.162.513,00	(17.803.877,00)	92,12	
03.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	225.966.390,00	208.162.513,00	(17.803.877,00)	92,12	
03.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	225.966.390,00	208.162.513,00	(17.803.877,00)	92,12	
03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	516.399.494,00	486.227.769,00	(29.171.725,00)	94,54	
03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	283.316.921,00	268.260.469,00	(15.056.452,00)	94,69	
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	283.316.921,00	268.260.469,00	(15.056.452,00)	94,69	
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	283.316.921,00	268.260.469,00	(15.056.452,00)	94,69	
03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	71.017.548,00	67.181.800,00	(3.835.748,00)	94,60	
03.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	71.017.548,00	67.181.800,00	(3.835.748,00)	94,60	
03.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.017.548,00	67.181.800,00	(3.835.748,00)	94,60	
03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	98.142.000,00	90.959.200,00	(7.182.800,00)	92,68	
03.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	98.142.000,00	90.959.200,00	(7.182.800,00)	92,68	
03.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.142.000,00	90.959.200,00	(7.182.800,00)	92,68	
03.2.02.06	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	63.923.025,00	61.626.300,00	(2.296.725,00)	96,72	
03.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	63.923.025,00	61.626.300,00	(2.296.725,00)	96,72	
03.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.923.025,00	61.626.300,00	(2.296.725,00)	96,72	
03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	908.863.940,00	868.982.439,00	(19.881.501,00)	97,81	
03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	615.615.120,00	595.902.455,00	(19.712.665,00)	96,80	
03.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	615.615.120,00	595.902.455,00	(19.712.665,00)	96,80	
03.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	615.615.120,00	595.902.455,00	(19.712.665,00)	96,80	
03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Peringkat Daerah Bidang Kewilayahan	0,00	0,00	0,00	0	
03.2.03.07.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0	
03.2.03.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0	
03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	293.248.220,00	293.079.364,00	(168.236,00)	99,94	
03.2.03.08.5.1	BELANJA OPERASI	293.248.220,00	293.079.364,00	(168.236,00)	99,94	

Sw



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
05.203.08.5.1.02	Belanja Barang dari Jasa	283.248.220,00	283.079.304,00	(168.236,00)	99,94	
	SURPLUS / DEFISIT	(8.881.322.244,00)	(8.450.757.940,00)	440.564.304,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(8.881.322.244,00)	(8.450.757.940,00)	440.564.304,00	0	

CA





PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2024

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN

SKPD : 5-02.0-00.0-00.01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		ASAS HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	529.589.988.428,00	617.794.774.785,11	(10.795.213.002,89)	99,28	
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9.346.870.456,00	10.762.899.300,11	1.413.128.844,11	115,11	
00.0.00.00.4.1.01	Pajak Daerah	4.750.287.502,00	6.073.470.873,00	1.323.183.371,00	127,85	
00.0.00.00.4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	640.020.357,00	640.020.357,00	0,00	100,00	
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	3.956.562.597,00	4.049.398.070,11	89.835.473,11	102,27	
00.0.00.00.4.2	PENDAPATAN TRANSFER	612.741.829.148,00	602.860.904.872,00	(9.880.924.176,00)	98,39	
00.0.00.00.4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	587.361.302.613,00	586.294.368.350,00	(1.066.934.263,00)	99,82	
00.0.00.00.4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	25.380.526.535,00	16.566.536.522,00	(8.813.989.913,00)	65,27	
00.0.00.00.4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.498.268.824,00	4.170.870.493,00	(2.327.418.331,00)	64,18	
00.0.00.00.4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6.498.268.824,00	4.170.870.493,00	(2.327.418.331,00)	64,18	
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	127.585.562.419,45	120.502.400.485,00	(7.083.161.934,45)	94,45	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.171.812.061,45	11.361.425.754,00	(4.810.386.307,45)	70,25	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.765.699.878,45	6.524.837.903,00	(3.241.061.975,45)	66,81	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.670.800.378,45	6.429.793.403,00	(3.241.006.975,45)	66,49	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	9.670.800.378,45	6.429.793.403,00	(3.241.006.975,45)	66,49	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	9.670.800.378,45	6.429.793.403,00	(3.241.006.975,45)	66,49	
01.2.02.03	Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	94.899.500,00	94.844.500,00	(55.000,00)	99,94	
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	94.899.500,00	94.844.500,00	(55.000,00)	99,94	
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	79.320.000,00	79.320.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.579.500,00	15.524.500,00	(55.000,00)	99,63	
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	47.765.000,00	38.600.000,00	(11.165.000,00)	76,63	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	47.765.000,00	36.600.000,00	(11.165.000,00)	76,63	
01.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	47.765.000,00	36.600.000,00	(11.165.000,00)	76,63	
01.2.03.06.5.1.01	Belanja Pegawai	45.600.000,00	36.600.000,00	(9.000.000,00)	80,26	
01.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.165.000,00	0,00	(2.165.000,00)	0	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.476.112.050,00	1.731.421.062,00	(744.690.988,00)	69,97	
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.197.500,00	16.180.000,00	(37.500,00)	99,77	
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	16.197.500,00	16.180.000,00	(37.500,00)	99,77	
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.197.500,00	16.180.000,00	(37.500,00)	99,77	
01.2.06.06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.498.950,00	24.742.750,00	(4.757.200,00)	83,87	
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	29.498.950,00	24.742.750,00	(4.757.200,00)	83,87	
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.498.950,00	24.742.750,00	(4.757.200,00)	83,87	
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.430.414.800,00	1.690.518.312,00	(739.896.288,00)	69,56	
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	2.430.414.800,00	1.690.518.312,00	(739.896.288,00)	69,56	
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.430.414.800,00	1.690.518.312,00	(739.896.288,00)	69,56	
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Perunggasan Urusan Pemerintahan Daerah	60.106.500,00	59.549.500,00	(557.000,00)	99,07	
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.106.500,00	59.549.500,00	(557.000,00)	99,07	
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	60.106.500,00	59.549.500,00	(557.000,00)	99,07	
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.106.500,00	59.549.500,00	(557.000,00)	99,07	
01.2.08	Penyediaan Jasa Perunggasan Urusan Pemerintahan Daerah	3.686.562.133,00	2.933.963.988,00	(732.598.144,00)	80,03	
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Sunk Meliyurat	1.675.000,00	1.625.000,00	(50.000,00)	97,33	
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.675.000,00	1.625.000,00	(50.000,00)	97,33	
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.675.000,00	1.625.000,00	(50.000,00)	97,33	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	151.000.000,00	96.935.291,00	(54.064.709,00)	64,20	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	151.000.000,00	96.935.291,00	(54.064.709,00)	64,20	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.000.000,00	96.935.291,00	(54.064.709,00)	64,20	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.613.687.133,00	2.635.203.698,00	(978.483.435,00)	80,89	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	3.613.687.133,00	2.635.203.698,00	(978.483.435,00)	80,89	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.613.687.133,00	2.635.203.698,00	(978.483.435,00)	80,89	
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perunggasan Urusan Pemerintahan Daerah	155.586.500,00	75.253.300,00	(80.313.200,00)	48,37	
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55.000.000,00	40.117.300,00	(14.882.700,00)	72,94	
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	55.000.000,00	40.117.300,00	(14.882.700,00)	72,94	
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	40.117.300,00	(14.882.700,00)	72,94	
01.2.09.06	Pemeliharaan Perawatan dan Mesin Lainnya	78.016.500,00	12.805.000,00	(65.411.500,00)	16,16	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.209.05.5.1	BELANJA OPERASI	78.016.500,00	12.805.000,00	(65.411.500,00)	16,16	
01.209.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.016.500,00	12.805.000,00	(65.411.500,00)	16,16	
01.209.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana / Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.550.000,00	22.531.000,00	(19.000,00)	99,92	
01.209.11.5.1	BELANJA OPERASI	22.550.000,00	22.531.000,00	(19.000,00)	99,92	
01.209.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.550.000,00	22.531.000,00	(19.000,00)	99,92	
02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	109.455.592.696,00	107.430.991.152,00	(2.024.601.544,00)	98,15	
02.201	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.756.874.120,00	1.509.108.974,00	(247.567.146,00)	85,91	
02.201.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	46.950.900,00	43.592.295,00	(3.358.605,00)	92,85	
02.201.01.5.1	BELANJA OPERASI	46.950.900,00	43.592.295,00	(3.358.605,00)	92,85	
02.201.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.950.900,00	43.592.295,00	(3.358.605,00)	92,85	
02.201.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	30.669.845,00	27.712.300,00	(2.957.545,00)	90,36	
02.201.02.5.1	BELANJA OPERASI	30.669.845,00	27.712.300,00	(2.957.545,00)	90,36	
02.201.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.669.845,00	27.712.300,00	(2.957.545,00)	90,36	
02.201.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1.091.362.230,00	889.993.279,00	(201.368.951,00)	81,55	
02.201.07.5.1	BELANJA OPERASI	1.091.362.230,00	889.993.279,00	(201.368.951,00)	81,55	
02.201.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.091.362.230,00	889.993.279,00	(201.368.951,00)	81,55	
02.201.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	543.951.815,00	515.367.300,00	(28.584.515,00)	94,75	
02.201.08.5.1	BELANJA OPERASI	543.951.815,00	515.367.300,00	(28.584.515,00)	94,75	
02.201.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	543.951.815,00	515.367.300,00	(28.584.515,00)	94,75	
02.201.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	43.739.330,00	32.441.800,00	(11.297.530,00)	74,17	
02.201.09.5.1	BELANJA OPERASI	43.739.330,00	32.441.800,00	(11.297.530,00)	74,17	
02.201.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.739.330,00	32.441.800,00	(11.297.530,00)	74,17	
02.202	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.900.179.597,00	1.519.372.298,00	(380.807.299,00)	79,96	
02.202.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1.057.983.492,00	842.267.760,00	(215.715.732,00)	79,61	
02.202.01.5.1	BELANJA OPERASI	256.598.350,00	255.235.905,00	(1.362.445,00)	99,47	
02.202.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	256.598.350,00	255.235.905,00	(1.362.445,00)	99,47	
02.202.01.5.4	BELANJA TRANSFER	801.385.142,00	587.031.875,00	(214.353.267,00)	73,25	
02.202.01.5.4.01	Belanja Bagi Hasil	801.385.142,00	587.031.875,00	(214.353.267,00)	73,25	
02.202.05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	399.765.775,00	291.850.239,00	(107.915.536,00)	73,03	
02.202.05.5.1	BELANJA OPERASI	399.765.775,00	291.850.239,00	(107.915.536,00)	73,03	
02.202.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	399.765.775,00	291.850.239,00	(107.915.536,00)	73,03	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Perencanaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Akras Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyeloran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	134.507.030,00	119.941.943,00	(14.565.087,00)	89,17	
02.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	134.507.030,00	119.941.943,00	(14.565.087,00)	89,17	
02.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.507.030,00	119.941.943,00	(14.565.087,00)	89,17	
02.2.02.11	Perubahan Penatanganan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	307.923.100,00	285.212.276,00	(42.710.824,00)	96,13	
02.2.02.11.5.1	BELANJA OPERASI	307.923.100,00	285.212.276,00	(42.710.824,00)	96,13	
02.2.02.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	307.923.100,00	285.212.276,00	(42.710.824,00)	96,13	
02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	570.226.358,00	510.541.390,00	(59.684.968,00)	89,55	
02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	227.030.931,00	175.540.540,00	(51.490.391,00)	77,36	
02.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	227.030.931,00	175.540.540,00	(51.490.391,00)	77,36	
02.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	227.030.931,00	175.540.540,00	(51.490.391,00)	77,36	
02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	230.044.512,00	223.897.100,00	(6.147.412,00)	97,24	
02.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	230.044.512,00	223.897.100,00	(6.147.412,00)	97,24	
02.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	230.044.512,00	223.897.100,00	(6.147.412,00)	97,24	
02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	113.152.915,00	111.303.750,00	(1.849.165,00)	98,37	
02.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	113.152.915,00	111.303.750,00	(1.849.165,00)	98,37	
02.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.152.915,00	111.303.750,00	(1.849.165,00)	98,37	
02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	105.226.510.821,00	103.891.870.550,00	(1.334.640.271,00)	99,73	
02.2.04.08	Analisa Perencanaan dan Penyusunan Bantuan Keuangan	102.375.876.821,00	102.229.925.550,00	(145.951.271,00)	99,86	
02.2.04.08.5.4	BELANJA TRANSFER	102.375.876.821,00	102.229.925.550,00	(145.951.271,00)	99,86	
02.2.04.08.5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	102.375.876.821,00	102.229.925.550,00	(145.951.271,00)	99,86	
02.2.04.09	Pengelolaan Dana Daerah dan Mendesak	2.852.134.000,00	1.661.945.000,00	(1.190.189.000,00)	58,27	
02.2.04.09.5.1	BELANJA OPERASI	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0	
02.2.04.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0	
02.2.04.09.5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.852.134.000,00	1.661.945.000,00	(1.190.189.000,00)	58,27	
02.2.04.09.5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.852.134.000,00	1.661.945.000,00	(1.190.189.000,00)	58,27	
03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	939.168.882,00	781.254.284,00	(157.914.598,00)	83,18	

Handwritten signature

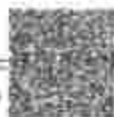


KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.01	Pengelolaan Barang Milk Daerah	929.168.662,00	781.254.284,00	(157.914.378,00)	83,19	
03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	159.995.803,00	154.576.700,00	(5.419.103,00)	96,61	
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	159.995.803,00	154.576.700,00	(5.419.103,00)	96,61	
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	159.995.803,00	154.576.700,00	(5.419.103,00)	96,61	
03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milk Daerah	17.022.162,00	11.653.800,00	(5.368.362,00)	68,44	
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	17.022.162,00	11.653.800,00	(5.368.362,00)	68,44	
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.022.162,00	11.653.800,00	(5.368.362,00)	68,44	
03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milk Daerah	33.512.000,00	32.249.550,00	(1.262.450,00)	96,23	
03.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	33.512.000,00	32.249.550,00	(1.262.450,00)	96,23	
03.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.512.000,00	32.249.550,00	(1.262.450,00)	96,23	
03.2.01.05	Penelaahan Barang Milk Daerah	103.431.800,00	74.253.850,00	(29.178.150,00)	71,79	
03.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	103.431.800,00	74.253.850,00	(29.178.150,00)	71,79	
03.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.431.800,00	74.253.850,00	(29.178.150,00)	71,79	
03.2.01.07	Pengamanan Barang Milk Daerah	301.602.305,00	295.721.700,00	(5.880.605,00)	98,05	
03.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	301.602.305,00	295.721.700,00	(5.880.605,00)	98,05	
03.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	301.602.305,00	295.721.700,00	(5.880.605,00)	98,05	
03.2.01.08	Penilaian Barang Milk Daerah	65.971.800,00	42.162.800,00	(23.808.800,00)	63,91	
03.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	65.971.800,00	42.162.800,00	(23.808.800,00)	63,91	
03.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.971.800,00	42.162.800,00	(23.808.800,00)	63,91	
03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milk Daerah	151.838.583,00	110.072.100,00	(41.866.483,00)	72,45	
03.2.01.10.5.1	BELANJA OPERASI	151.838.583,00	110.072.100,00	(41.866.483,00)	72,45	
03.2.01.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.838.583,00	110.072.100,00	(41.866.483,00)	72,45	
03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milk Daerah	16.767.757,00	11.245.000,00	(5.522.757,00)	67,06	
03.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	16.767.757,00	11.245.000,00	(5.522.757,00)	67,06	
03.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.767.757,00	11.245.000,00	(5.522.757,00)	67,06	
03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milk Daerah	22.177.284,00	18.960.484,00	(3.216.800,00)	85,50	
03.2.01.12.5.1	BELANJA OPERASI	22.177.284,00	18.960.484,00	(3.216.800,00)	85,50	
03.2.01.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.177.284,00	18.960.484,00	(3.216.800,00)	85,50	
03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milk Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	66.748.568,00	30.158.500,00	(36.591.068,00)	45,18	
03.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	66.748.568,00	30.158.500,00	(36.591.068,00)	45,18	
03.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.748.568,00	30.158.500,00	(36.591.068,00)	45,18	
04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.018.989.000,00	928.729.295,00	(90.259.705,00)	91,14	
04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.018.989.000,00	928.729.295,00	(90.259.705,00)	91,14	
04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	308.386.180,00	229.725.350,00	(78.660.830,00)	74,49	
04.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	308.386.180,00	229.725.350,00	(78.660.830,00)	74,49	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
04.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	308.358.180,00	229.725.350,00	(78.632.830,00)	74,49	
04.2.01.14	Pembiayaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	710.602.820,00	699.003.945,00	(11.598.875,00)	98,37	
04.2.01.14.5.1	BELANJA OPERASI	710.602.820,00	699.003.945,00	(11.598.875,00)	98,37	
04.2.01.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	710.602.820,00	699.003.945,00	(11.598.875,00)	98,37	
	SURPLUS / DEFISIT	501.004.428.008,55	497.292.374.280,11	(3.712.051.728,44)	99,26	
	PEMBIAYAAN					
00.000.00.6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	58.749.741.536,51	59.090.363.578,51	310.622.042,00	100,83	
00.000.00.6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	45.570.594.736,51	45.881.216.778,51	310.622.042,00	100,68	
00.000.00.6.1.02	Pencarian Dana Cadangan	13.179.146.800,00	13.179.146.800,00	0,00	100,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	58.749.741.536,51	59.090.363.578,51	310.622.042,00	100,83	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	599.754.167.545,06	556.392.737.858,62	(3.461.428.686,44)	99,39	

Sr





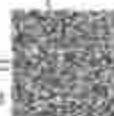
PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2024

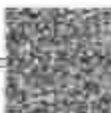
Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN

SKPD : 5-03.5-04.0-00.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

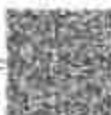
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	4.927.472.542,00	4.706.749.296,00	(220.723.246,00)	95,52	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.632.357.261,00	3.616.794.862,00	(215.562.379,00)	94,36	
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.707.000,00	2.694.500,00	(12.500,00)	99,54	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.707.000,00	2.694.500,00	(12.500,00)	99,54	
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.707.000,00	2.694.500,00	(12.500,00)	99,54	
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.707.000,00	2.694.500,00	(12.500,00)	99,54	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.179.509.061,00	2.977.781.576,00	(201.727.383,00)	93,66	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.163.763.681,00	2.962.046.178,00	(201.717.503,00)	93,62	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.163.763.681,00	2.962.046.178,00	(201.717.503,00)	93,62	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3.163.763.681,00	2.962.046.178,00	(201.717.503,00)	93,62	
01.2.02.03	Pelaksanaan Perencanaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15.745.380,00	15.735.500,00	(9.880,00)	99,94	
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	15.745.380,00	15.735.500,00	(9.880,00)	99,94	
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.945.380,00	7.935.500,00	(9.880,00)	99,88	
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	14.572.000,00	14.556.000,00	(16.000,00)	99,89	
01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14.572.000,00	14.556.000,00	(16.000,00)	99,89	
01.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	14.572.000,00	14.556.000,00	(16.000,00)	99,89	
01.2.03.06.5.1.01	Belanja Pegawai	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	772.000,00	756.000,00	(16.000,00)	97,89	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	337.744.730,00	337.461.347,00	(283.383,00)	99,92	



KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.718.430,00	6.641.000,00	(77.430,00)	98,85	
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.718.430,00	6.641.000,00	(77.430,00)	98,85	
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.718.430,00	6.641.000,00	(77.430,00)	98,85	
01.2.06.09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	331.026.300,00	330.820.347,00	(205.953,00)	99,94	
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	331.026.300,00	330.820.347,00	(205.953,00)	99,94	
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	331.026.300,00	330.820.347,00	(205.953,00)	99,94	
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah	24.087.000,00	23.330.000,00	(757.000,00)	96,86	
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.087.000,00	23.330.000,00	(757.000,00)	96,86	
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	24.087.000,00	23.330.000,00	(757.000,00)	96,86	
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.087.000,00	23.330.000,00	(757.000,00)	96,86	
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah	218.828.950,00	208.781.600,00	(12.047.350,00)	94,49	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	114.000.000,00	109.994.600,00	(4.005.400,00)	96,49	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	114.000.000,00	109.994.600,00	(4.005.400,00)	96,49	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.000.000,00	109.994.600,00	(4.005.400,00)	96,49	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	104.828.950,00	98.787.000,00	(6.041.950,00)	92,33	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	104.828.950,00	98.787.000,00	(6.041.950,00)	92,33	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.828.950,00	98.787.000,00	(6.041.950,00)	92,33	
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah	54.908.520,00	54.169.757,00	(738.763,00)	98,69	
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.526.000,00	37.819.457,00	(706.543,00)	98,17	
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	38.526.000,00	37.819.457,00	(706.543,00)	98,17	
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.526.000,00	37.819.457,00	(706.543,00)	98,17	
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.382.520,00	16.370.300,00	(12.220,00)	99,93	
01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI	16.382.520,00	16.370.300,00	(12.220,00)	99,93	
01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.382.520,00	16.370.300,00	(12.220,00)	99,93	
02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	264.386.870,00	264.242.600,00	(144.270,00)	99,95	
02.2.01	Pengadaan, Pemeliharaan dan Informasi Kepegawaian ASN	218.477.000,00	218.386.000,00	(91.000,00)	99,96	
02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	218.477.000,00	218.386.000,00	(91.000,00)	99,96	
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	218.477.000,00	218.386.000,00	(91.000,00)	99,96	
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	218.477.000,00	218.386.000,00	(91.000,00)	99,96	
02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	45.908.870,00	45.856.600,00	(52.270,00)	99,88	
02.2.02.02	Pengelompokan Kenaikan Pangkat ASN	45.908.870,00	45.856.600,00	(52.270,00)	99,88	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	45.909.870,00	45.898.800,00	(53.270,00)	99,88	
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.909.870,00	45.898.800,00	(53.270,00)	99,88	
02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	830.728.411,00	825.711.814,00	(5.016.597,00)	99,40	
02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	830.728.411,00	825.711.814,00	(5.016.597,00)	99,40	
02.2.02.07	Penyenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	830.728.411,00	825.711.814,00	(5.016.597,00)	99,40	
02.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	830.728.411,00	825.711.814,00	(5.016.597,00)	99,40	
02.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	830.728.411,00	825.711.814,00	(5.016.597,00)	99,40	
	SURPLUS / DEFISIT	(4.927.472.542,00)	(4.706.749.296,00)	220.723.246,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(4.927.472.542,00)	(4.706.749.296,00)	220.723.246,00	0	



Sw



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2024

Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT

SKPD : 6-01.0-00.0-00.01 INSPEKTORAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	12.758.108.828,00	12.532.408.729,00	(225.700.100,00)	98,25	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.642.595.796,00	8.432.482.475,00	(210.113.321,00)	97,57	
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.862.023,00	2.800.000,00	(2.062.023,00)	57,58	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	788.100,00	710.000,00	(78.100,00)	90,09	
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	788.100,00	710.000,00	(78.100,00)	90,09	
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	788.100,00	710.000,00	(78.100,00)	90,09	
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	657.475,00	772.500,00	(84.975,00)	90,09	
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	657.475,00	772.500,00	(84.975,00)	90,09	
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	657.475,00	772.500,00	(84.975,00)	90,09	
01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	789.488,00	0,00	(789.488,00)	0	
01.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	789.488,00	0,00	(789.488,00)	0	
01.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	789.488,00	0,00	(789.488,00)	0	
01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	774.225,00	697.500,00	(76.725,00)	90,09	
01.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	774.225,00	697.500,00	(76.725,00)	90,09	
01.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	774.225,00	697.500,00	(76.725,00)	90,09	
01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	632.645,00	620.000,00	(12.645,00)	98,00	
01.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	632.645,00	620.000,00	(12.645,00)	98,00	
01.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	632.645,00	620.000,00	(12.645,00)	98,00	
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	642.890,00	0,00	(642.890,00)	0	
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	642.890,00	0,00	(642.890,00)	0	



57

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	642.000,00	0,00	(642.000,00)	0	
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	377.400,00	0,00	(377.400,00)	0	
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	377.400,00	0,00	(377.400,00)	0	
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	377.400,00	0,00	(377.400,00)	0	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.734.383.737,00	6.575.660.190,00	(158.733.547,00)	97,64	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.706.115.111,00	6.547.628.440,00	(158.486.671,00)	97,64	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.706.115.111,00	6.547.628.440,00	(158.486.671,00)	97,64	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	6.706.115.111,00	6.547.628.440,00	(158.486.671,00)	97,64	
01.2.02.03	Penaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	25.409.150,00	25.248.000,00	(163.150,00)	99,36	
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	25.409.150,00	25.248.000,00	(163.150,00)	99,36	
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	16.080.000,00	16.080.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.329.150,00	9.168.000,00	(163.150,00)	98,25	
01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	390.000,00	390.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	390.000,00	390.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	390.000,00	390.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	557.500,00	530.000,00	(27.500,00)	95,07	
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	557.500,00	530.000,00	(27.500,00)	95,07	
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	557.500,00	530.000,00	(27.500,00)	95,07	
01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemerkasaan	1.463.813,00	1.452.000,00	(11.813,00)	99,19	
01.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.463.813,00	1.452.000,00	(11.813,00)	99,19	
01.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.463.813,00	1.452.000,00	(11.813,00)	99,19	
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	448.183,00	403.750,00	(44.433,00)	90,09	
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	448.183,00	403.750,00	(44.433,00)	90,09	
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	448.183,00	403.750,00	(44.433,00)	90,09	
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.880.378,00	12.760.000,00	(120.378,00)	98,99	
01.2.03.05	Rakonnitasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	799.200,00	720.000,00	(79.200,00)	90,09	
01.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	799.200,00	720.000,00	(79.200,00)	90,09	
01.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	799.200,00	720.000,00	(79.200,00)	90,09	
01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.081.178,00	12.030.000,00	(51.178,00)	99,58	
01.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	12.081.178,00	12.030.000,00	(51.178,00)	99,58	
01.2.03.06.5.1.01	Belanja Pegawai	9.650.000,00	9.650.000,00	0,00	100,00	
01.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.431.178,00	2.380.000,00	(51.178,00)	97,89	
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	388.700,00	388.700,00	0,00	100,00	
01.2.05.03	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	388.700,00	0,00	(388.700,00)	0	
01.2.05.03.5.1	BELANJA OPERASI	388.700,00	0,00	(388.700,00)	0	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.205.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	388.700,00	0,00	(388.700,00)	0	
01.205.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	778.485.850,00	767.258.592,00	(11.229.058,00)	98,56	
01.205.09.5.1	BELANJA OPERASI	778.485.850,00	767.258.592,00	(11.229.058,00)	98,56	
01.205.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	778.485.850,00	767.258.592,00	(11.229.058,00)	98,56	
01.205.11	Simbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100.207.400,00	89.202.543,00	(11.004.857,00)	89,02	
01.205.11.5.1	BELANJA OPERASI	100.207.400,00	89.202.543,00	(11.004.857,00)	89,02	
01.205.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.207.400,00	89.202.543,00	(11.004.857,00)	89,02	
01.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	578.901.307,00	577.159.825,00	(1.341.382,00)	99,77	
01.206.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.091.120,00	11.047.000,00	(44.120,00)	99,60	
01.206.02.5.1	BELANJA OPERASI	213.120,00	198.000,00	(18.120,00)	91,50	
01.206.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	213.120,00	198.000,00	(18.120,00)	91,50	
01.206.02.5.2	BELANJA MODAL	10.878.000,00	10.852.000,00	(26.000,00)	99,79	
01.206.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.878.000,00	10.852.000,00	(26.000,00)	99,79	
01.206.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	124.487,00	0,00	(124.487,00)	0	
01.206.05.5.1	BELANJA OPERASI	124.487,00	0,00	(124.487,00)	0	
01.206.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.487,00	0,00	(124.487,00)	0	
01.206.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	8.943.050,00	8.818.850,00	(126.400,00)	98,18	
01.206.08.5.1	BELANJA OPERASI	8.943.050,00	8.818.850,00	(126.400,00)	98,18	
01.206.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.943.050,00	8.818.850,00	(126.400,00)	98,18	
01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	560.342.880,00	558.296.275,00	(1.046.375,00)	99,81	
01.206.09.5.1	BELANJA OPERASI	560.342.880,00	558.296.275,00	(1.046.375,00)	99,81	
01.206.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	560.342.880,00	558.296.275,00	(1.046.375,00)	99,81	
01.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungut Urahan Pemerintah Daerah	178.416.950,00	178.352.325,00	(1.064.625,00)	99,41	
01.207.05	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	178.416.950,00	178.352.325,00	(1.064.625,00)	99,41	
01.207.05.5.1	BELANJA OPERASI	704.850,00	0,00	(704.850,00)	0	
01.207.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	704.850,00	0,00	(704.850,00)	0	
01.207.05.5.2	BELANJA MODAL	178.712.100,00	178.352.325,00	(359.775,00)	99,80	
01.207.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	178.712.100,00	178.352.325,00	(359.775,00)	99,80	
01.208	Penyediaan Jasa Pemungut Urahan Pemerintahan Daerah	13.648.871,00	13.589.750,00	(58.921,00)	99,57	
01.208.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.648.871,00	13.589.750,00	(58.921,00)	99,57	
01.208.01.5.1	BELANJA OPERASI	13.648.871,00	13.589.750,00	(58.921,00)	99,57	
01.208.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.648.871,00	13.589.750,00	(58.921,00)	99,57	
01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.357.420,00	3.356.500,00	(1.920,00)	99,94	
01.208.02.5.1	BELANJA OPERASI	3.357.420,00	3.356.500,00	(1.920,00)	99,94	
01.208.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.357.420,00	3.356.500,00	(1.920,00)	99,94	



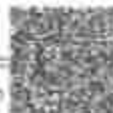
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	176.225.910,00	165.205.500,00	(13.020.410,00)	92,69	
01.208.04.5.1	BELANJA OPERASI	176.225.910,00	165.205.500,00	(13.020.410,00)	92,69	
01.208.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176.225.910,00	165.205.500,00	(13.020.410,00)	92,69	
01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.237.650,00	47.160.150,00	(11.077.500,00)	80,98	
01.209.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.650.800,00	47.160.150,00	(3.490.650,00)	93,11	
01.209.01.5.1	BELANJA OPERASI	50.650.800,00	47.160.150,00	(3.490.650,00)	93,11	
01.209.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.650.800,00	47.160.150,00	(3.490.650,00)	93,11	
01.209.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.586.850,00	0,00	(7.586.850,00)	0	
01.209.06.5.1	BELANJA OPERASI	7.586.850,00	0,00	(7.586.850,00)	0	
01.209.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.586.850,00	0,00	(7.586.850,00)	0	
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	3.680.777.173,00	3.677.758.050,00	(3.019.123,00)	99,92	
02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.934.482.973,00	2.951.588.050,00	(2.894.923,00)	99,90	
02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	967.917.415,00	967.859.700,00	(57.715,00)	99,99	
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	967.917.415,00	967.859.700,00	(57.715,00)	99,99	
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	967.917.415,00	967.859.700,00	(57.715,00)	99,99	
02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	875.298.680,00	875.175.000,00	(123.680,00)	99,99	
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	875.298.680,00	875.175.000,00	(123.680,00)	99,99	
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	875.298.680,00	875.175.000,00	(123.680,00)	99,99	
02.2.01.03	Revisi Laporan Kinerja	494.353.585,00	494.276.950,00	(76.635,00)	99,98	
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	494.353.585,00	494.276.950,00	(76.635,00)	99,98	
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	494.353.585,00	494.276.950,00	(76.635,00)	99,98	
02.2.01.04	Revisi Laporan Keuangan	43.499.867,00	43.270.150,00	(229.717,00)	99,47	
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	43.499.867,00	43.270.150,00	(229.717,00)	99,47	
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.499.867,00	43.270.150,00	(229.717,00)	99,47	
02.2.01.05	Pengawasan Desa	264.629.220,00	264.240.000,00	(389.220,00)	99,85	
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	264.629.220,00	264.240.000,00	(389.220,00)	99,85	
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	264.629.220,00	264.240.000,00	(389.220,00)	99,85	
02.2.01.06	Kerja Sama Pengawasan Internal	88.175.018,00	87.905.000,00	(1.270.018,00)	98,58	
02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	88.175.018,00	87.905.000,00	(1.270.018,00)	98,58	
02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.175.018,00	87.905.000,00	(1.270.018,00)	98,58	
02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APD	179.609.188,00	178.861.250,00	(747.938,00)	99,58	
02.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	179.609.188,00	178.861.250,00	(747.938,00)	99,58	
02.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	179.609.188,00	178.861.250,00	(747.938,00)	99,58	
02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	746.294.200,00	746.170.000,00	(124.200,00)	99,98	
02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	746.294.200,00	746.170.000,00	(124.200,00)	99,98	



4

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	746.294.200,00	746.170.000,00	(124.200,00)	99,98	
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	746.294.200,00	746.170.000,00	(124.200,00)	99,98	
03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	432.735.859,00	422.166.200,00	(10.569.659,00)	97,56	
03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	84.355.176,00	83.741.100,00	(614.076,00)	99,27	
03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	80.539.688,00	80.126.700,00	(412.988,00)	99,49	
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	80.539.688,00	80.126.700,00	(412.988,00)	99,49	
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.539.688,00	80.126.700,00	(412.988,00)	99,49	
03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	3.815.438,00	3.814.400,00	(201.038,00)	94,73	
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	3.815.438,00	3.814.400,00	(201.038,00)	94,73	
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.815.438,00	3.814.400,00	(201.038,00)	94,73	
03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	348.380.733,00	338.425.100,00	(9.955.633,00)	97,14	
03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	248.825.700,00	246.130.000,00	(2.695.700,00)	98,92	
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	248.825.700,00	246.130.000,00	(2.695.700,00)	98,92	
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	248.825.700,00	246.130.000,00	(2.695.700,00)	98,92	
03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	7.487.120,00	6.597.800,00	(889.520,00)	88,00	
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	7.487.120,00	6.597.800,00	(889.520,00)	88,00	
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.487.120,00	6.597.800,00	(889.520,00)	88,00	
03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	83.258.763,00	77.307.600,00	(5.951.163,00)	92,65	
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	83.258.763,00	77.307.600,00	(5.951.163,00)	92,65	
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.258.763,00	77.307.600,00	(5.951.163,00)	92,65	
03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	8.798.150,00	8.388.900,00	(409.250,00)	95,35	
03.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	8.798.150,00	8.388.900,00	(409.250,00)	95,35	
03.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.798.150,00	8.388.900,00	(409.250,00)	95,35	
	SURPLUS / DEFISIT	(12.756.108.828,00)	(12.532.406.725,00)	223.702.103,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(12.756.108.828,00)	(12.532.406.725,00)	223.702.103,00	0	

62





PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2024

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN

SKPD : 7-01 0-00 0-00.01 KECAMATAN PINOLOSIAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.000.00.5	BELANJA DAERAH	1.656.238.381,00	1.798.891.844,00	(157.546.437,00)	91,95	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.923.388.506,00	1.775.354.444,00	(148.034.062,00)	92,30	
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.440.000,00	2.710.000,00	(730.000,00)	78,78	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	530.000,00	500.000,00	(30.000,00)	94,34	
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	530.000,00	500.000,00	(30.000,00)	94,34	
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	530.000,00	500.000,00	(30.000,00)	94,34	
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	600.000,00	500.000,00	(100.000,00)	83,33	
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	600.000,00	500.000,00	(100.000,00)	83,33	
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	500.000,00	(100.000,00)	83,33	
01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	600.000,00	500.000,00	(100.000,00)	83,33	
01.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	600.000,00	500.000,00	(100.000,00)	83,33	
01.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	500.000,00	(100.000,00)	83,33	
01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	710.000,00	210.000,00	(500.000,00)	29,58	
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	710.000,00	210.000,00	(500.000,00)	29,58	



SN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	710.000,00	210.000,00	(500.000,00)	29,58	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.814.488.360,00	1.484.212.554,00	(130.255.806,00)	91,80	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.606.133.580,00	1.478.402.554,00	(129.731.026,00)	91,92	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.606.133.580,00	1.478.402.554,00	(129.731.026,00)	91,92	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.606.133.580,00	1.478.402.554,00	(129.731.026,00)	91,82	
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	550.000,00	400.000,00	(150.000,00)	72,73	
01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	550.000,00	400.000,00	(150.000,00)	72,73	
01.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	550.000,00	400.000,00	(150.000,00)	72,73	
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatbusaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.524.800,00	6.450.000,00	(74.800,00)	98,85	
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	6.524.800,00	6.450.000,00	(74.800,00)	98,85	
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.244.800,00	1.170.000,00	(74.800,00)	93,88	
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	600.000,00	300.000,00	(300.000,00)	50,00	
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	600.000,00	300.000,00	(300.000,00)	50,00	
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	300.000,00	(300.000,00)	50,00	
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	660.000,00	660.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	660.000,00	660.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	660.000,00	660.000,00	0,00	100,00	
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.800.000,00	8.300.000,00	(500.000,00)	94,32	
01.2.03.06	Penatbusaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.800.000,00	8.300.000,00	(500.000,00)	94,32	
01.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	8.800.000,00	8.300.000,00	(500.000,00)	94,32	
01.2.03.06.5.1.01	Belanja Pegawai	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	50,00	
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.674.000,00	3.803.800,00	(70.400,00)	98,18	
01.2.05.03	Perencanaan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	580.000,00	580.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.03.5.1	BELANJA OPERASI	580.000,00	580.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	580.000,00	580.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.11	Bindegan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3.294.000,00	3.223.800,00	(70.400,00)	97,86	
01.2.05.11.5.1	BELANJA OPERASI	3.294.000,00	3.223.800,00	(70.400,00)	97,86	
01.2.05.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.294.000,00	3.223.800,00	(70.400,00)	97,86	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	181.248.750,00	148.992.200,00	(112.257.550,00)	92,40	
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.325.250,00	2.300.000,00	(25.250,00)	98,91	
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.325.250,00	2.300.000,00	(25.250,00)	98,91	
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.325.250,00	2.300.000,00	(25.250,00)	98,91	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.620.500,00	1.880.000,00	(740.500,00)	71,74	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.206.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.620.500,00	1.880.000,00	(740.500,00)	71,74	
01.206.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.620.500,00	1.880.000,00	(740.500,00)	71,74	
01.206.06	Fasilitas Kegiatan Timbu	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
01.206.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
01.206.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	154.604.000,00	143.112.200,00	(11.491.800,00)	92,57	
01.206.09.5.1	BELANJA OPERASI	154.604.000,00	143.112.200,00	(11.491.800,00)	92,57	
01.206.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.604.000,00	143.112.200,00	(11.491.800,00)	92,57	
01.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usaha Pemerintah Daerah	7.770.000,00	7.770.000,00	0,00	100,00	
01.207.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.770.000,00	7.770.000,00	0,00	100,00	
01.207.06.3.2	BELANJA MODAL	7.770.000,00	7.770.000,00	0,00	100,00	
01.207.06.3.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.770.000,00	7.770.000,00	0,00	100,00	
01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah	85.243.996,00	82.560.090,00	(2.683.906,00)	96,85	
01.208.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	505.000,00	420.000,00	(85.000,00)	83,17	
01.208.01.5.1	BELANJA OPERASI	505.000,00	420.000,00	(85.000,00)	83,17	
01.208.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	505.000,00	420.000,00	(85.000,00)	83,17	
01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.500.000,00	2.726.934,00	(773.066,00)	77,91	
01.208.02.5.1	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	2.726.934,00	(773.066,00)	77,91	
01.208.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	2.726.934,00	(773.066,00)	77,91	
01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	81.238.996,00	79.413.156,00	(1.825.840,00)	97,75	
01.208.04.5.1	BELANJA OPERASI	81.238.996,00	79.413.156,00	(1.825.840,00)	97,75	
01.208.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.238.996,00	79.413.156,00	(1.825.840,00)	97,75	
01.209	Pemeliharaan Sarung Milik Daerah Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah	38.542.400,00	37.006.000,00	(1.536.400,00)	96,01	
01.209.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.056.000,00	35.556.000,00	(1.499.000,00)	95,95	
01.209.01.5.1	BELANJA OPERASI	37.056.000,00	35.556.000,00	(1.499.000,00)	95,95	
01.209.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.056.000,00	35.556.000,00	(1.499.000,00)	95,95	
01.209.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.487.400,00	1.450.000,00	(37.400,00)	97,49	
01.209.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.487.400,00	1.450.000,00	(37.400,00)	97,49	
01.209.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.487.400,00	1.450.000,00	(37.400,00)	97,49	
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	11.957.375,00	7.796.000,00	(4.162.375,00)	65,19	
02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	11.957.375,00	7.796.000,00	(4.162.375,00)	65,19	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.201.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	9.130.000,00	5.980.000,00	(3.150.000,00)	65,50	
02.201.01.5.1	BELANJA OPERASI	9.130.000,00	5.980.000,00	(3.150.000,00)	65,50	
02.201.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.130.000,00	5.980.000,00	(3.150.000,00)	65,50	
02.201.02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.827.375,00	1.815.000,00	(1.012.375,00)	64,19	
02.201.02.5.1	BELANJA OPERASI	2.827.375,00	1.815.000,00	(1.012.375,00)	64,19	
02.201.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.827.375,00	1.815.000,00	(1.012.375,00)	64,19	
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.815.000,00	2.015.000,00	(800.000,00)	71,58	
03.201	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2.815.000,00	2.015.000,00	(800.000,00)	71,58	
03.201.03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.815.000,00	2.015.000,00	(800.000,00)	71,58	
03.201.03.5.1	BELANJA OPERASI	2.815.000,00	2.015.000,00	(800.000,00)	71,58	
03.201.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.815.000,00	2.015.000,00	(800.000,00)	71,58	
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	18.077.500,00	13.527.500,00	(4.550.000,00)	74,83	
06.201	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	18.077.500,00	13.527.500,00	(4.550.000,00)	74,83	
06.201.02	Facilitasi Administrasi Tatal Pemerintahan Desa	2.747.500,00	2.747.500,00	0,00	100,00	
06.201.02.5.1	BELANJA OPERASI	2.747.500,00	2.747.500,00	0,00	100,00	
06.201.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.747.500,00	2.747.500,00	0,00	100,00	
06.201.03	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendeaygunaan Aset Desa	6.700.000,00	6.000.000,00	(3.700.000,00)	61,86	
06.201.03.5.1	BELANJA OPERASI	6.700.000,00	6.000.000,00	(3.700.000,00)	61,86	
06.201.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.700.000,00	6.000.000,00	(3.700.000,00)	61,86	
06.201.11	Facilitasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Keterlibatan Umat	2.815.000,00	2.815.000,00	0,00	100,00	
06.201.11.5.1	BELANJA OPERASI	2.815.000,00	2.815.000,00	0,00	100,00	
06.201.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.815.000,00	2.815.000,00	0,00	100,00	
06.201.12	Facilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	2.815.000,00	1.965.000,00	(850.000,00)	69,80	
06.201.12.5.1	BELANJA OPERASI	2.815.000,00	1.965.000,00	(850.000,00)	69,80	
06.201.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.815.000,00	1.965.000,00	(850.000,00)	69,80	
	SURPLUS / DEFISIT	(1.956.238.381,00)	(1.798.691.944,00)	157.546.437,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(1.956.238.381,00)	(1.798.691.944,00)	157.546.437,00	0	

62





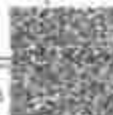
PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2024

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN

SKPD : 7-01.0-00.0-00.02 KECAMATAN PINOLISIAN TIMUR

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	2.040.116.542,00	1.942.592.205,00	(97.524.437,00)	95,22	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.016.710.342,00	1.929.071.805,00	(87.638.437,00)	95,65	
01.2.01	Pencapaian, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.741.000,00	0,00	(2.741.000,00)	0	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	395.000,00	0,00	(395.000,00)	0	
01.2.01.01.3.1	BELANJA OPERASI	395.000,00	0,00	(395.000,00)	0	
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	395.000,00	0,00	(395.000,00)	0	
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	669.500,00	0,00	(669.500,00)	0	
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	669.500,00	0,00	(669.500,00)	0	
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	669.500,00	0,00	(669.500,00)	0	
01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	360.000,00	0,00	(360.000,00)	0	
01.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	360.000,00	0,00	(360.000,00)	0	
01.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	360.000,00	0,00	(360.000,00)	0	
01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	389.500,00	0,00	(389.500,00)	0	
01.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	389.500,00	0,00	(389.500,00)	0	
01.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	389.500,00	0,00	(389.500,00)	0	
01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	355.000,00	0,00	(355.000,00)	0	
01.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	355.000,00	0,00	(355.000,00)	0	
01.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	355.000,00	0,00	(355.000,00)	0	
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Hasil Realisasi Kerja SKPD	572.000,00	0,00	(572.000,00)	0	
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	572.000,00	0,00	(572.000,00)	0	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.201.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	572.000,00	0,00	(572.000,00)	0	
01.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.652.295.897,00	1.810.571.705,00	(54.724.192,00)	96,71	
01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.852.754.442,00	1.999.794.205,00	(52.960.237,00)	96,80	
01.202.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.852.754.442,00	1.999.794.205,00	(52.960.237,00)	96,80	
01.202.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.652.754.442,00	1.599.794.205,00	(52.960.237,00)	96,80	
01.202.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	420.000,00	0,00	(420.000,00)	0	
01.202.02.5.1	BELANJA OPERASI	420.000,00	0,00	(420.000,00)	0	
01.202.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	420.000,00	0,00	(420.000,00)	0	
01.202.03	Pelaksanaan Perencanaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.486.455,00	9.577.500,00	(908.955,00)	91,33	
01.202.03.5.1	BELANJA OPERASI	10.486.455,00	9.577.500,00	(908.955,00)	91,33	
01.202.03.5.1.01	Belanja Pegawai	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	100,00	
01.202.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.206.455,00	4.297.500,00	(908.955,00)	82,54	
01.202.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	195.000,00	0,00	(195.000,00)	0	
01.202.05.5.1	BELANJA OPERASI	195.000,00	0,00	(195.000,00)	0	
01.202.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	195.000,00	0,00	(195.000,00)	0	
01.202.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.440.000,00	1.200.000,00	(240.000,00)	83,33	
01.202.07.5.1	BELANJA OPERASI	1.440.000,00	1.200.000,00	(240.000,00)	83,33	
01.202.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.440.000,00	1.200.000,00	(240.000,00)	83,33	
01.203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
01.203.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
01.203.06.5.1	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
01.203.06.5.1.01	Belanja Pegawai	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
01.205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11.751.600,00	6.100.000,00	(5.651.600,00)	51,91	
01.205.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	843.100,00	0,00	(843.100,00)	0	
01.205.03.5.1	BELANJA OPERASI	843.100,00	0,00	(843.100,00)	0	
01.205.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	843.100,00	0,00	(843.100,00)	0	
01.205.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	727.500,00	0,00	(727.500,00)	0	
01.205.09.5.1	BELANJA OPERASI	727.500,00	0,00	(727.500,00)	0	
01.205.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	727.500,00	0,00	(727.500,00)	0	
01.205.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10.181.000,00	6.100.000,00	(4.081.000,00)	59,92	
01.205.11.5.1	BELANJA OPERASI	10.181.000,00	6.100.000,00	(4.081.000,00)	59,92	
01.205.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.181.000,00	6.100.000,00	(4.081.000,00)	59,92	
01.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	189.057.000,00	189.232.570,00	(9.824.430,00)	94,19	
01.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.052.000,00	0,00	(1.052.000,00)	0	
01.206.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.052.000,00	0,00	(1.052.000,00)	0	

SW



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.206.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.052.000,00	0,00	(1.052.000,00)	0	
01.206.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	0	
01.206.05.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	0	
01.206.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	0	
01.206.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	960.000,00	0,00	(960.000,00)	0	
01.206.08.5.1	BELANJA OPERASI	960.000,00	0,00	(960.000,00)	0	
01.206.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	960.000,00	0,00	(960.000,00)	0	
01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	154.045.000,00	159.232.570,00	(4.812.430,00)	97,07	
01.206.09.5.1	BELANJA OPERASI	154.045.000,00	159.232.570,00	(4.812.430,00)	97,07	
01.206.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.045.000,00	159.232.570,00	(4.812.430,00)	97,07	
01.208	Penyediaan Jasa Perancang Urusan Pemerintahan Daerah	110.309.905,00	105.844.630,00	(4.465.275,00)	95,95	
01.208.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	397.500,00	0,00	(397.500,00)	0	
01.208.01.5.1	BELANJA OPERASI	397.500,00	0,00	(397.500,00)	0	
01.208.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	397.500,00	0,00	(397.500,00)	0	
01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
01.208.02.5.1	BELANJA OPERASI	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
01.208.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	106.612.405,00	102.544.630,00	(4.067.775,00)	96,18	
01.208.04.5.1	BELANJA OPERASI	106.612.405,00	102.544.630,00	(4.067.775,00)	96,18	
01.208.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.612.405,00	102.544.630,00	(4.067.775,00)	96,18	
01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perancang Urusan Pemerintahan Daerah	48.554.940,00	38.323.000,00	(10.231.940,00)	78,93	
01.209.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.430.000,00	30.207.000,00	(7.223.000,00)	80,70	
01.209.01.5.1	BELANJA OPERASI	37.430.000,00	30.207.000,00	(7.223.000,00)	80,70	
01.209.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.430.000,00	30.207.000,00	(7.223.000,00)	80,70	
01.209.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	0	
01.209.06.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	0	
01.209.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	0	
01.209.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.124.940,00	8.116.000,00	(8.940,00)	99,89	
01.209.09.5.1	BELANJA OPERASI	8.124.940,00	8.116.000,00	(8.940,00)	99,89	
01.209.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.124.940,00	8.116.000,00	(8.940,00)	99,89	
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	14.481.800,00	9.420.300,00	(5.061.500,00)	65,05	
02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	14.481.800,00	9.420.300,00	(5.061.500,00)	65,05	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	13.820.300,00	9.420.300,00	(4.400.000,00)	68,16	
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	13.820.300,00	9.420.300,00	(4.400.000,00)	68,16	
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.820.300,00	9.420.300,00	(4.400.000,00)	68,16	
02.2.01.02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	661.500,00	0,00	(661.500,00)	0	
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	661.500,00	0,00	(661.500,00)	0	
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	661.500,00	0,00	(661.500,00)	0	
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	656.500,00	0,00	(656.500,00)	0	
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	656.500,00	0,00	(656.500,00)	0	
03.2.01.03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	656.500,00	0,00	(656.500,00)	0	
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	656.500,00	0,00	(656.500,00)	0	
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	656.500,00	0,00	(656.500,00)	0	
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	640.000,00	0,00	(640.000,00)	0	
04.7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	640.000,00	0,00	(640.000,00)	0	
04.7.03.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	640.000,00	0,00	(640.000,00)	0	
04.7.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	640.000,00	0,00	(640.000,00)	0	
04.7.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	640.000,00	0,00	(640.000,00)	0	
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.628.000,00	4.100.000,00	(3.528.000,00)	53,75	
06.2.01	Facilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.628.000,00	4.100.000,00	(3.528.000,00)	53,75	
06.2.01.02	Facilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	700.500,00	0,00	(700.500,00)	0	
06.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	700.500,00	0,00	(700.500,00)	0	
06.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	700.500,00	0,00	(700.500,00)	0	
06.2.01.03	Facilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6.250.000,00	4.100.000,00	(2.150.000,00)	65,60	
06.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	6.250.000,00	4.100.000,00	(2.150.000,00)	65,60	
06.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.250.000,00	4.100.000,00	(2.150.000,00)	65,60	
06.2.01.12	Facilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Komersial	677.500,00	0,00	(677.500,00)	0	
06.2.01.12.5.1	BELANJA OPERASI	677.500,00	0,00	(677.500,00)	0	
06.2.01.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	677.500,00	0,00	(677.500,00)	0	
	SURPLUS / DEFISIT	(2.040.116.842,00)	(1.942.592.205,00)	97.524.437,00	0	
	DISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(2.040.116.842,00)	(1.942.592.205,00)	97.524.437,00	0	

fa





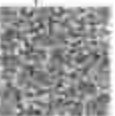
PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran: 2024

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN

SKPD : 7-01.0-00.0-00.03 KECAMATAN HELUMO

KODE REKENING	URATAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	1.566.882.911,00	1.457.752.406,00	(99.110.505,00)	93,67	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.549.100.161,00	1.454.072.406,00	(95.027.755,00)	93,87	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.191.982.311,00	1.102.509.806,00	(89.372.505,00)	92,50	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.184.803.959,00	1.096.036.156,00	(88.767.803,00)	92,51	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.184.803.959,00	1.096.036.156,00	(88.767.803,00)	92,51	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.184.803.959,00	1.096.036.156,00	(88.767.803,00)	92,51	
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.178.352,00	6.573.650,00	(604.702,00)	91,58	
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	7.178.352,00	6.573.650,00	(604.702,00)	91,58	
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.898.352,00	1.293.650,00	(604.702,00)	68,15	
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.030.000,00	6.710.000,00	(320.000,00)	95,45	
01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.030.000,00	6.710.000,00	(320.000,00)	95,45	
01.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	7.030.000,00	6.710.000,00	(320.000,00)	95,45	
01.2.03.06.5.1.01	Belanja Pegawai	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	430.000,00	110.000,00	(320.000,00)	25,58	
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.547.500,00	6.169.400,00	(378.100,00)	94,23	
01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6.547.500,00	6.169.400,00	(378.100,00)	94,23	
01.2.05.11.5.1	BELANJA OPERASI	6.547.500,00	6.169.400,00	(378.100,00)	94,23	
01.2.05.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.547.500,00	6.169.400,00	(378.100,00)	94,23	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	196.048.680,00	197.171.600,00	(877.080,00)	99,59	
01.2.06.02	Penyediaan Perawatan dan Perongkapan Kendor	26.610.640,00	26.510.900,00	(100.140,00)	99,62	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.206.02.5.1	BELANJA OPERASI	100.000,00	0,00	(100.000,00)	0	
01.206.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	0,00	(100.000,00)	0	
01.206.02.5.2	BELANJA MODAL	26.510.640,00	26.510.500,00	(140,00)	100,00	
01.206.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.510.640,00	26.510.500,00	(140,00)	100,00	
01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	171.438.040,00	170.661.100,00	(776.940,00)	99,55	
01.206.09.5.1	BELANJA OPERASI	171.438.040,00	170.661.100,00	(776.940,00)	99,55	
01.206.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	171.438.040,00	170.661.100,00	(776.940,00)	99,55	
01.206	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	106.057.220,00	102.753.600,00	(2.303.620,00)	97,81	
01.206.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.100.000,00	6.000.000,00	(100.000,00)	98,36	
01.206.02.5.1	BELANJA OPERASI	6.100.000,00	6.000.000,00	(100.000,00)	98,36	
01.206.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.100.000,00	6.000.000,00	(100.000,00)	98,36	
01.206.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	96.957.220,00	96.753.600,00	(2.203.620,00)	97,77	
01.206.04.5.1	BELANJA OPERASI	96.957.220,00	96.753.600,00	(2.203.620,00)	97,77	
01.206.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.957.220,00	96.753.600,00	(2.203.620,00)	97,77	
01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.434.450,00	38.658.000,00	(1.776.450,00)	95,61	
01.209.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.434.450,00	38.658.000,00	(1.776.450,00)	95,61	
01.209.01.5.1	BELANJA OPERASI	40.434.450,00	38.658.000,00	(1.776.450,00)	95,61	
01.209.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.434.450,00	38.658.000,00	(1.776.450,00)	95,61	
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.933.200,00	3.360.000,00	(583.200,00)	85,17	
02.201	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3.933.200,00	3.360.000,00	(583.200,00)	85,17	
02.201.01	Koordinasi/Ginergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3.933.200,00	3.360.000,00	(583.200,00)	85,17	
02.201.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.933.200,00	3.360.000,00	(583.200,00)	85,17	
02.201.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.933.200,00	3.360.000,00	(583.200,00)	85,17	
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.835.350,00	580.000,00	(3.255.350,00)	15,12	
03.201	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	3.835.350,00	580.000,00	(3.255.350,00)	15,12	
03.201.03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.835.350,00	580.000,00	(3.255.350,00)	15,12	
03.201.03.5.1	BELANJA OPERASI	3.835.350,00	580.000,00	(3.255.350,00)	15,12	
03.201.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.835.350,00	580.000,00	(3.255.350,00)	15,12	

SW



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
08	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	9.994.200,00	9.750.000,00	(244.200,00)	97,56	
08.201	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9.994.200,00	9.750.000,00	(244.200,00)	97,56	
08.201.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6.805.500,00	6.750.000,00	(55.500,00)	99,18	
08.201.03.5.1	BELANJA OPERASI	6.805.500,00	6.750.000,00	(55.500,00)	99,18	
08.201.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.805.500,00	6.750.000,00	(55.500,00)	99,18	
08.201.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	3.188.700,00	3.000.000,00	(188.700,00)	94,08	
08.201.09.5.1	BELANJA OPERASI	3.188.700,00	3.000.000,00	(188.700,00)	94,08	
08.201.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.188.700,00	3.000.000,00	(188.700,00)	94,08	
	SURPLUS / DEFISIT	(1.566.862.911,00)	(1.667.752.406,00)	98.111.525,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(1.566.862.911,00)	(1.467.752.406,00)	99.110.505,00	0	

CSY





PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2024

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN

SKPD : 7-01 0-00.0-00.04 KECAMATAN POSIGADAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	2.094.520.740,00	1.995.548.145,00	(98.972.595,00)	95,27	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.089.448.240,00	1.983.988.145,00	(85.460.095,00)	95,57	
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.540.000,00	468.000,00	(2.080.000,00)	18,11	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	440.000,00	200.000,00	(240.000,00)	45,45	
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	440.000,00	200.000,00	(240.000,00)	45,45	
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	440.000,00	200.000,00	(240.000,00)	45,45	
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0	
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0	
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0	
01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	500.000,00	260.000,00	(240.000,00)	52,00	
01.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	500.000,00	260.000,00	(240.000,00)	52,00	
01.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	260.000,00	(240.000,00)	52,00	
01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	430.000,00	0,00	(430.000,00)	0	
01.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	430.000,00	0,00	(430.000,00)	0	
01.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	430.000,00	0,00	(430.000,00)	0	
01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	670.000,00	0,00	(670.000,00)	0	
01.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	670.000,00	0,00	(670.000,00)	0	
01.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	670.000,00	0,00	(670.000,00)	0	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.721.258.770,00	1.661.198.122,00	(60.060.648,00)	96,51	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.714.843.270,00	1.654.813.822,00	(60.029.448,00)	96,50	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.714.843.270,00	1.654.813.822,00	(60.029.448,00)	96,50	

Sw



KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.202.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.714.843.270,00	1.654.813.522,00	(60.029.748,00)	96,50	
01.202.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.425.500,00	6.385.500,00	(40.000,00)	99,38	
01.202.03.5.1	BELANJA OPERASI	6.425.500,00	6.385.500,00	(40.000,00)	99,38	
01.202.03.5.1.01	Belanja Pegawai	5.280.000,00	5.240.000,00	(40.000,00)	99,24	
01.202.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.145.500,00	1.145.500,00	0,00	100,00	
01.203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.028.350,00	6.800.000,00	(2.428.350,00)	75,10	
01.203.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.028.350,00	6.800.000,00	(2.428.350,00)	75,10	
01.203.06.5.1	BELANJA OPERASI	9.028.350,00	6.800.000,00	(2.428.350,00)	75,10	
01.203.06.5.1.01	Belanja Pegawai	7.800.000,00	6.800.000,00	(1.200.000,00)	84,82	
01.203.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.228.350,00	0,00	(1.228.350,00)	0	
01.205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.302.000,00	0,00	(3.302.000,00)	0	
01.205.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3.302.000,00	0,00	(3.302.000,00)	0	
01.205.11.5.1	BELANJA OPERASI	3.302.000,00	0,00	(3.302.000,00)	0	
01.205.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.302.000,00	0,00	(3.302.000,00)	0	
01.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	189.348.500,00	161.692.000,00	(7.656.500,00)	95,48	
01.206.06	Fasilitas Kunjungan Tamu	4.630.500,00	3.478.200,00	(1.152.300,00)	75,11	
01.206.06.5.1	BELANJA OPERASI	4.630.500,00	3.478.200,00	(1.152.300,00)	75,11	
01.206.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.630.500,00	3.478.200,00	(1.152.300,00)	75,11	
01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	164.718.000,00	158.213.800,00	(6.504.200,00)	96,05	
01.206.09.5.1	BELANJA OPERASI	164.718.000,00	158.213.800,00	(6.504.200,00)	96,05	
01.206.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	164.718.000,00	158.213.800,00	(6.504.200,00)	96,05	
01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114.333.940,00	109.023.690,00	(5.310.250,00)	95,36	
01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.800.000,00	10.900.000,00	(1.900.000,00)	85,16	
01.208.02.5.1	BELANJA OPERASI	12.800.000,00	10.900.000,00	(1.900.000,00)	85,16	
01.208.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.800.000,00	10.900.000,00	(1.900.000,00)	85,16	
01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	101.533.940,00	98.123.690,00	(3.410.250,00)	96,64	
01.208.04.5.1	BELANJA OPERASI	101.533.940,00	98.123.690,00	(3.410.250,00)	96,64	
01.208.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.533.940,00	98.123.690,00	(3.410.250,00)	96,64	
01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.028.680,00	45.013.333,00	(4.015.347,00)	90,70	
01.209.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.980.000,00	38.433.333,00	(4.546.667,00)	89,42	
01.209.01.5.1	BELANJA OPERASI	42.980.000,00	38.433.333,00	(4.546.667,00)	89,42	
01.209.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.980.000,00	38.433.333,00	(4.546.667,00)	89,42	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.648.680,00	6.580.000,00	(68.680,00)	99,00	
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	6.648.680,00	6.580.000,00	(68.680,00)	99,00	
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.648.680,00	6.580.000,00	(68.680,00)	99,00	
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	12.207.500,00	9.600.000,00	(2.607.500,00)	78,64	
02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12.207.500,00	9.600.000,00	(2.607.500,00)	78,64	
02.2.01.01	Koordinasi/Strategi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	10.997.500,00	9.600.000,00	(1.397.500,00)	87,29	
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.997.500,00	9.600.000,00	(1.397.500,00)	87,29	
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.997.500,00	9.600.000,00	(1.397.500,00)	87,29	
02.2.01.02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.210.000,00	0,00	(1.210.000,00)	0	
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.210.000,00	0,00	(1.210.000,00)	0	
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.210.000,00	0,00	(1.210.000,00)	0	
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.210.000,00	0,00	(1.210.000,00)	0	
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1.210.000,00	0,00	(1.210.000,00)	0	
03.2.01.03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.210.000,00	0,00	(1.210.000,00)	0	
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.210.000,00	0,00	(1.210.000,00)	0	
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.210.000,00	0,00	(1.210.000,00)	0	
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	11.655.000,00	1.960.000,00	(9.695.000,00)	16,82	
06.2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.655.000,00	1.960.000,00	(9.695.000,00)	16,82	
06.2.01.02	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.210.000,00	210.000,00	(1.000.000,00)	17,36	
06.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.210.000,00	210.000,00	(1.000.000,00)	17,36	
06.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.210.000,00	210.000,00	(1.000.000,00)	17,36	
06.2.01.03	Facilitasi Pengkajian Keuangan Desa dan Penyediaan Aset Desa	7.500.000,00	1.750.000,00	(5.750.000,00)	23,33	
06.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	1.750.000,00	(5.750.000,00)	23,33	
06.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	1.750.000,00	(5.750.000,00)	23,33	
06.2.01.11	Facilitasi Penyelenggaraan Kelembagaan dan Kemandirian Umum	1.210.000,00	0,00	(1.210.000,00)	0	
06.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	1.210.000,00	0,00	(1.210.000,00)	0	
06.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.210.000,00	0,00	(1.210.000,00)	0	

hw



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
05.2.01.12	Facilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan	1.210.000,00	0,00	(1.210.000,00)	0	
05.2.01.12.5.1	BELANJA OPERASI	1.210.000,00	0,00	(1.210.000,00)	0	
05.2.01.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.210.000,00	0,00	(1.210.000,00)	0	
05.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	525.000,00	0,00	(525.000,00)	0	
05.2.01.17.5.1	BELANJA OPERASI	525.000,00	0,00	(525.000,00)	0	
05.2.01.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	525.000,00	0,00	(525.000,00)	0	
	SURPLUS / DEFISIT	(2.094.520.740,00)	(1.995.548.145,00)	98.972.595,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(2.094.520.740,00)	(1.995.548.145,00)	98.972.595,00	0	

5/2





PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2024

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN

SKPD : 7.01.0-00.0-00.05 KECAMATAN BOLAANG UKI

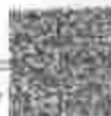
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	1.998.057.303,00	1.800.828.483,00	(07.228.840,00)	90,13	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.948.410.823,00	1.860.808.783,00	(95.803.840,00)	95,09	
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.667.000,00	3.232.000,00	(435.000,00)	88,14	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	735.000,00	735.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	735.000,00	735.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang (tan Jasa)	735.000,00	735.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	735.000,00	335.000,00	(400.000,00)	45,58	
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	735.000,00	335.000,00	(400.000,00)	45,58	
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	735.000,00	335.000,00	(400.000,00)	45,58	
01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	735.000,00	700.000,00	(35.000,00)	95,24	
01.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	735.000,00	700.000,00	(35.000,00)	95,24	
01.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	735.000,00	700.000,00	(35.000,00)	95,24	
01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	731.000,00	731.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	731.000,00	731.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	731.000,00	731.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	731.000,00	731.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	731.000,00	731.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	731.000,00	731.000,00	0,00	100,00	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.823.275.723,00	1.548.179.413,00	(75.096.310,00)	95,37	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.806.938.823,00	1.531.847.313,00	(75.089.310,00)	95,33	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.806.938.823,00	1.531.847.313,00	(75.089.310,00)	95,33	

lw



KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.202.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.806.938.823,00	1.531.847.313,00	(75.089.310,00)	95,33	
01.202.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.718.000,00	1.718.000,00	0,00	100,00	
01.202.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.718.000,00	1.718.000,00	0,00	100,00	
01.202.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.718.000,00	1.718.000,00	0,00	100,00	
01.202.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13.017.500,00	13.010.500,00	(7.000,00)	99,95	
01.202.03.5.1	BELANJA OPERASI	13.017.500,00	13.010.500,00	(7.000,00)	99,95	
01.202.03.5.1.01	Belanja Pegawai	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	100,00	
01.202.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.737.500,00	7.730.500,00	(7.000,00)	99,91	
01.202.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.603.600,00	1.603.600,00	0,00	100,00	
01.202.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.603.600,00	1.603.600,00	0,00	100,00	
01.202.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.603.600,00	1.603.600,00	0,00	100,00	
01.203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.870.000,00	7.870.000,00	0,00	100,00	
01.203.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.870.000,00	7.870.000,00	0,00	100,00	
01.203.06.5.1	BELANJA OPERASI	7.870.000,00	7.870.000,00	0,00	100,00	
01.203.06.5.1.01	Belanja Pegawai	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	100,00	
01.203.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.270.000,00	1.270.000,00	0,00	100,00	
01.208	Administrasi Umum Perangkat Daerah	177.833.800,00	160.570.800,00	(17.063.200,00)	90,39	
01.208.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.186.650,00	1.126.650,00	(60.000,00)	94,94	
01.208.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.186.650,00	1.126.650,00	(60.000,00)	94,94	
01.208.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.186.650,00	1.126.650,00	(60.000,00)	94,94	
01.208.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.867.150,00	3.842.150,00	(25.000,00)	99,35	
01.208.05.5.1	BELANJA OPERASI	3.867.150,00	3.842.150,00	(25.000,00)	99,35	
01.208.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.867.150,00	3.842.150,00	(25.000,00)	99,35	
01.208.08	Facilitas Kunjungan Tamu	6.906.500,00	6.857.500,00	(51.000,00)	99,26	
01.208.08.5.1	BELANJA OPERASI	6.906.500,00	6.857.500,00	(51.000,00)	99,26	
01.208.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.906.500,00	6.857.500,00	(51.000,00)	99,26	
01.208.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	166.671.500,00	148.744.300,00	(16.927.200,00)	89,78	
01.208.09.5.1	BELANJA OPERASI	166.671.500,00	148.744.300,00	(16.927.200,00)	89,78	
01.208.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	166.671.500,00	148.744.300,00	(16.927.200,00)	89,78	
01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah	95.302.800,00	94.493.470,00	(809.330,00)	99,15	
01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.596.400,00	5.787.870,00	(808.530,00)	87,74	
01.208.02.5.1	BELANJA OPERASI	6.596.400,00	5.787.870,00	(808.530,00)	87,74	
01.208.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.596.400,00	5.787.870,00	(808.530,00)	87,74	
01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	88.706.400,00	88.706.600,00	(800,00)	100,00	
01.208.04.5.1	BELANJA OPERASI	88.706.400,00	88.706.600,00	(800,00)	100,00	

42



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.208.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.705.400,00	88.705.800,00	(600,00)	100,00	
01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.661.300,00	36.461.300,00	(2.200.000,00)	94,31	
01.209.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.530.000,00	34.430.000,00	(2.100.000,00)	94,25	
01.209.01.5.1	BELANJA OPERASI	36.530.000,00	34.430.000,00	(2.100.000,00)	94,25	
01.209.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.530.000,00	34.430.000,00	(2.100.000,00)	94,25	
01.209.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.131.300,00	2.031.300,00	(100.000,00)	95,31	
01.209.09.5.1	BELANJA OPERASI	2.131.300,00	2.031.300,00	(100.000,00)	95,31	
01.209.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.131.300,00	2.031.300,00	(100.000,00)	95,31	
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	17.952.975,00	17.352.975,00	(600.000,00)	96,66	
02.201	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	17.952.975,00	17.352.975,00	(600.000,00)	96,66	
02.201.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	11.909.000,00	11.909.000,00	0,00	100,00	
02.201.01.5.1	BELANJA OPERASI	11.909.000,00	11.909.000,00	0,00	100,00	
02.201.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.909.000,00	11.909.000,00	0,00	100,00	
02.201.02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6.043.975,00	5.443.975,00	(600.000,00)	90,07	
02.201.02.5.1	BELANJA OPERASI	6.043.975,00	5.443.975,00	(600.000,00)	90,07	
02.201.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.043.975,00	5.443.975,00	(600.000,00)	90,07	
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	8.208.930,00	8.759.930,00	(450.000,00)	95,11	
03.201	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	8.208.930,00	8.759.930,00	(450.000,00)	95,11	
03.201.03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8.208.930,00	8.759.930,00	(450.000,00)	95,11	
03.201.03.5.1	BELANJA OPERASI	8.208.930,00	8.759.930,00	(450.000,00)	95,11	
03.201.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.208.930,00	8.759.930,00	(450.000,00)	95,11	
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	24.483.775,00	23.908.775,00	(575.000,00)	97,65	
06.201	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	24.483.775,00	23.908.775,00	(575.000,00)	97,65	
06.201.02	Facilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5.208.775,00	5.208.775,00	0,00	100,00	
06.201.02.5.1	BELANJA OPERASI	5.208.775,00	5.208.775,00	0,00	100,00	
06.201.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.208.775,00	5.208.775,00	0,00	100,00	

g



KODE REKENING	URAZAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
06.201.03	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendeaygunaan Aset Desa	9.025.000,00	9.000.000,00	(25.000,00)	99,72	
06.201.03.5.1	BELANJA OPERASI	9.025.000,00	9.000.000,00	(25.000,00)	99,72	
06.201.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.025.000,00	9.000.000,00	(25.000,00)	99,72	
06.201.11	Facilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.835.000,00	5.385.000,00	(450.000,00)	92,29	
06.201.11.5.1	BELANJA OPERASI	5.835.000,00	5.385.000,00	(450.000,00)	92,29	
06.201.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.835.000,00	5.385.000,00	(450.000,00)	92,29	
06.201.12	Facilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4.415.000,00	4.315.000,00	(100.000,00)	97,73	
06.201.12.5.1	BELANJA OPERASI	4.415.000,00	4.315.000,00	(100.000,00)	97,73	
06.201.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.415.000,00	4.315.000,00	(100.000,00)	97,73	
	SURPLUS / DEFISIT	(1.968.057.303,00)	(1.900.828.463,00)	97.228.840,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(1.968.057.303,00)	(1.900.828.463,00)	97.228.840,00	0	

Sw





PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

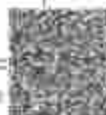
Tahun Anggaran 2024

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN

SKPD : 7.01.0-00.0-00.06 KECAMATAN PINOLOSIAN TENGAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.000.00.5	BELANJA DAERAH	1.757.706.442,00	1.691.620.902,00	(65.885.540,00)	96,25	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.719.683.267,00	1.658.140.382,00	(61.542.885,00)	96,42	
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.601.000,00	4.288.000,00	(313.000,00)	92,72	
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.421.000,00	1.421.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.421.000,00	1.421.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.421.000,00	1.421.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.005.000,00	1.005.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.005.000,00	1.005.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.005.000,00	1.005.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.145.000,00	810.000,00	(335.000,00)	70,74	
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.145.000,00	810.000,00	(335.000,00)	70,74	
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.145.000,00	810.000,00	(335.000,00)	70,74	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.394.933.622,00	1.327.348.152,00	(57.584.470,00)	95,85	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.388.693.622,00	1.321.108.152,00	(57.584.470,00)	95,85	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.388.693.622,00	1.321.108.152,00	(57.584.470,00)	95,85	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.388.693.622,00	1.321.108.152,00	(57.584.470,00)	95,85	

SW



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.202.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.240.000,00	6.240.000,00	0,00	100,00	
01.202.03.5.1	BELANJA OPERASI	6.240.000,00	6.240.000,00	0,00	100,00	
01.202.03.5.1.01	Belanja Pegawai	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	100,00	
01.202.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	960.000,00	960.000,00	0,00	100,00	
01.203	Administrasi Barang Milk Daerah pada Perangkat Daerah	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	100,00	
01.203.06	Penatausahaan Barang Milk Daerah pada SKPD	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	100,00	
01.203.06.5.1	BELANJA OPERASI	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	100,00	
01.203.06.5.1.01	Belanja Pegawai	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
01.203.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
01.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	174.887.875,00	173.964.700,00	(923.175,00)	99,47	
01.206.08	Facilitas Kunjungan Tamu	6.995.875,00	6.937.500,00	(58.375,00)	99,17	
01.206.08.5.1	BELANJA OPERASI	6.995.875,00	6.937.500,00	(58.375,00)	99,17	
01.206.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.995.875,00	6.937.500,00	(58.375,00)	99,17	
01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	167.892.000,00	167.027.200,00	(864.800,00)	99,48	
01.206.09.5.1	BELANJA OPERASI	167.892.000,00	167.027.200,00	(864.800,00)	99,48	
01.206.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	167.892.000,00	167.027.200,00	(864.800,00)	99,48	
01.207	Pengadaan Barang Milk Daerah Perunggang Urusan Pemerintah Daerah	7.816.070,00	7.000.000,00	(816.070,00)	89,56	
01.207.06	Pengadaan Peralatan dari Mesin Lainnya	7.816.070,00	7.000.000,00	(816.070,00)	89,56	
01.207.06.5.2	BELANJA MODAL	7.816.070,00	7.000.000,00	(816.070,00)	89,56	
01.207.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.816.070,00	7.000.000,00	(816.070,00)	89,56	
01.208	Penyediaan Jasa Perunggang Urusan Pemerintahan Daerah	83.887.000,00	83.887.000,00	0,00	100,00	
01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	83.887.000,00	83.887.000,00	0,00	100,00	
01.208.04.5.1	BELANJA OPERASI	83.887.000,00	83.887.000,00	0,00	100,00	
01.208.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.887.000,00	83.887.000,00	0,00	100,00	
01.209	Pemeliharaan Barang Milk Daerah Perunggang Urusan Pemerintahan Daerah	44.257.700,00	42.373.500,00	(1.884.200,00)	95,74	
01.209.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.100.000,00	35.376.500,00	(1.723.500,00)	95,35	
01.209.01.5.1	BELANJA OPERASI	37.100.000,00	35.376.500,00	(1.723.500,00)	95,35	
01.209.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.100.000,00	35.376.500,00	(1.723.500,00)	95,35	
01.209.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.297.700,00	2.137.000,00	(160.700,00)	93,01	
01.209.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.297.700,00	2.137.000,00	(160.700,00)	93,01	
01.209.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.297.700,00	2.137.000,00	(160.700,00)	93,01	
01.209.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.860.000,00	4.860.000,00	0,00	100,00	
01.209.09.5.1	BELANJA OPERASI	4.860.000,00	4.860.000,00	0,00	100,00	

SW



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.209.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.860.000,00	4.860.000,00	0,00	100,00	
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	11.773.550,00	11.773.550,00	0,00	100,00	
02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	11.773.550,00	11.773.550,00	0,00	100,00	
02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	11.773.550,00	11.773.550,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	11.773.550,00	11.773.550,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.773.550,00	11.773.550,00	0,00	100,00	
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	26.249.625,00	21.907.000,00	(4.342.625,00)	83,46	
06.2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	26.249.625,00	21.907.000,00	(4.342.625,00)	83,46	
06.2.01.02	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.988.250,00	2.109.000,00	(879.250,00)	70,58	
06.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	2.988.250,00	2.109.000,00	(879.250,00)	70,58	
06.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.988.250,00	2.109.000,00	(879.250,00)	70,58	
06.2.01.03	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10.446.875,00	10.438.500,00	(8.375,00)	99,92	
06.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	10.446.875,00	10.438.500,00	(8.375,00)	99,92	
06.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.446.875,00	10.438.500,00	(8.375,00)	99,92	
06.2.01.11	Facilitasi Penyelenggaraan Keterlambatan dan Keterlambatan Umum	4.199.000,00	3.060.000,00	(1.139.000,00)	72,87	
06.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	4.199.000,00	3.060.000,00	(1.139.000,00)	72,87	
06.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.199.000,00	3.060.000,00	(1.139.000,00)	72,87	
06.2.01.12	Facilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	6.983.500,00	4.849.500,00	(2.134.000,00)	69,44	
06.2.01.12.5.1	BELANJA OPERASI	6.983.500,00	4.849.500,00	(2.134.000,00)	69,44	
06.2.01.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.983.500,00	4.849.500,00	(2.134.000,00)	69,44	
06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1.632.000,00	1.450.000,00	(182.000,00)	88,85	
06.2.01.17.5.1	BELANJA OPERASI	1.632.000,00	1.450.000,00	(182.000,00)	88,85	
06.2.01.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.632.000,00	1.450.000,00	(182.000,00)	88,85	
	SURPLUS / DEFISIT	(1.757.706.442,00)	(1.691.820.902,00)	65.885.540,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(1.757.706.442,00)	(1.691.820.902,00)	65.885.540,00	0	

CPW





PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2024

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN

SKPD : 7-01.0-00.0-00.07 KECAMATAN TOMINI

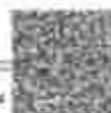
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	1.878.998.892,00	1.778.792.339,00	(100.206.553,00)	94,66	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.448.348.817,00	1.783.582.339,00	(84.764.478,00)	95,41	
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	738.370,00	0,00	(738.370,00)	0	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	280.850,00	0,00	(280.850,00)	0	
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	280.850,00	0,00	(280.850,00)	0	
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	280.850,00	0,00	(280.850,00)	0	
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	182.595,00	0,00	(182.595,00)	0	
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	182.595,00	0,00	(182.595,00)	0	
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	182.595,00	0,00	(182.595,00)	0	
01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	294.925,00	0,00	(294.925,00)	0	
01.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	294.925,00	0,00	(294.925,00)	0	
01.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	294.925,00	0,00	(294.925,00)	0	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.313.906.313,00	1.461.028.589,00	(52.879.724,00)	96,51	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.505.046.313,00	1.455.746.589,00	(49.299.724,00)	96,72	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.505.046.313,00	1.455.746.589,00	(49.299.724,00)	96,72	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.505.046.313,00	1.455.746.589,00	(49.299.724,00)	96,72	
01.2.02.03	Pelaksanaan Perencanaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8.860.000,00	5.280.000,00	(3.580.000,00)	59,59	
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	8.860.000,00	5.280.000,00	(3.580.000,00)	59,59	
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.580.000,00	0,00	(3.580.000,00)	0	
01.2.03	Administrasi Bidang Milk Daerah pada Perangkat Daerah	9.070.000,00	9.090.000,00	(70.000,00)	99,23	

SW



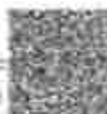
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.070.000,00	9.000.000,00	(70.000,00)	99,23	
01.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	9.070.000,00	9.000.000,00	(70.000,00)	99,23	
01.2.03.06.5.1.01	Belanja Pegawai	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000,00	0,00	(70.000,00)	0	
01.2.05	Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah	16.120.000,00	15.688.400,00	(431.600,00)	97,32	
01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	16.120.000,00	15.688.400,00	(431.600,00)	97,32	
01.2.05.11.5.1	BELANJA OPERASI	16.120.000,00	15.688.400,00	(431.600,00)	97,32	
01.2.05.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.120.000,00	15.688.400,00	(431.600,00)	97,32	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	154.706.000,00	146.117.000,00	(8.589.000,00)	94,45	
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	154.706.000,00	146.117.000,00	(8.589.000,00)	94,45	
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	154.706.000,00	146.117.000,00	(8.589.000,00)	94,45	
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.706.000,00	146.117.000,00	(8.589.000,00)	94,45	
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	105.134.890,00	87.400.000,00	(17.734.890,00)	83,13	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.640.000,00	12.400.000,00	(2.240.000,00)	84,70	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	14.640.000,00	12.400.000,00	(2.240.000,00)	84,70	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.640.000,00	12.400.000,00	(2.240.000,00)	84,70	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	90.494.890,00	75.000.000,00	(15.494.890,00)	82,88	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	90.494.890,00	75.000.000,00	(15.494.890,00)	82,88	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.494.890,00	75.000.000,00	(15.494.890,00)	82,88	
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	48.671.244,00	44.350.350,00	(4.320.894,00)	91,12	
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.251.244,00	34.055.350,00	(4.195.894,00)	89,03	
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	38.251.244,00	34.055.350,00	(4.195.894,00)	89,03	
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.251.244,00	34.055.350,00	(4.195.894,00)	89,03	
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.420.000,00	7.295.000,00	(125.000,00)	98,32	
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	7.420.000,00	7.295.000,00	(125.000,00)	98,32	
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.420.000,00	7.295.000,00	(125.000,00)	98,32	
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	19.408.000,00	10.270.000,00	(9.138.000,00)	52,92	
02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	19.408.000,00	10.270.000,00	(9.138.000,00)	52,92	

Ca



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	11.670.000,00	10.270.000,00	(1.400.000,00)	88,00	
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	11.670.000,00	10.270.000,00	(1.400.000,00)	88,00	
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.670.000,00	10.270.000,00	(1.400.000,00)	88,00	
02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.738.000,00	0,00	(7.738.000,00)	0	
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	7.738.000,00	0,00	(7.738.000,00)	0	
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.738.000,00	0,00	(7.738.000,00)	0	
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	632.500,00	0,00	(632.500,00)	0	
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	632.500,00	0,00	(632.500,00)	0	
03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	632.500,00	0,00	(632.500,00)	0	
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	632.500,00	0,00	(632.500,00)	0	
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	632.500,00	0,00	(632.500,00)	0	
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	902.500,00	0,00	(902.500,00)	0	
04.7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	902.500,00	0,00	(902.500,00)	0	
04.7.03.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	902.500,00	0,00	(902.500,00)	0	
04.7.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	902.500,00	0,00	(902.500,00)	0	
04.7.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	902.500,00	0,00	(902.500,00)	0	
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	9.609.075,00	4.850.000,00	(4.659.075,00)	51,00	
06.2.01	Facilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9.609.075,00	4.850.000,00	(4.659.075,00)	51,00	
06.2.01.02	Facilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	972.500,00	0,00	(972.500,00)	0	
06.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	972.500,00	0,00	(972.500,00)	0	
06.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	972.500,00	0,00	(972.500,00)	0	
06.2.01.03	Facilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Peninggunaan Aset Desa	7.634.075,00	4.850.000,00	(2.784.075,00)	63,53	
06.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	7.634.075,00	4.850.000,00	(2.784.075,00)	63,53	
06.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.634.075,00	4.850.000,00	(2.784.075,00)	63,53	
06.2.01.12	Facilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Komasyarakatan	902.500,00	0,00	(902.500,00)	0	
06.2.01.12.5.1	BELANJA OPERASI	902.500,00	0,00	(902.500,00)	0	
06.2.01.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	902.500,00	0,00	(902.500,00)	0	
	SURPLUS / DEFISIT	(1.878.998.892,00)	(1.778.792.339,00)	100.206.553,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(1.878.998.892,00)	(1.778.792.339,00)	100.206.553,00	0	

SW





PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2024

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
SKPD : 8-01.0-00.0-00.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	28.790.820.234,00	28.417.898.173,00	(372.922.061,00)	98,74	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.072.747.040,00	989.085.283,00	(83.661.757,00)	92,30	
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.700.925,00	2.600.750,00	(1.100.175,00)	70,27	
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.240.925,00	1.202.500,00	(38.425,00)	96,90	
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.240.925,00	1.202.500,00	(38.425,00)	96,90	
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.240.925,00	1.202.500,00	(38.425,00)	96,90	
01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	807.500,00	803.250,00	(4.250,00)	99,47	
01.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	807.500,00	803.250,00	(4.250,00)	99,47	
01.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	807.500,00	803.250,00	(4.250,00)	99,47	
01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	847.500,00	0,00	(847.500,00)	0	
01.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	847.500,00	0,00	(847.500,00)	0	
01.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	847.500,00	0,00	(847.500,00)	0	
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	805.000,00	595.000,00	(210.000,00)	73,91	
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	805.000,00	595.000,00	(210.000,00)	73,91	
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	805.000,00	595.000,00	(210.000,00)	73,91	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	847.462.470,00	805.589.828,00	(41.872.642,00)	95,06	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	830.382.470,00	788.509.828,00	(41.872.642,00)	94,96	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	830.382.470,00	788.509.828,00	(41.872.642,00)	94,96	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	830.382.470,00	788.509.828,00	(41.872.642,00)	94,96	

CW



KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	17.080.000,00	17.080.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	17.080.000,00	17.080.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	18.080.000,00	18.080.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	35.400.000,00	21.000.000,00	(14.400.000,00)	59,32	
01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	35.400.000,00	21.000.000,00	(14.400.000,00)	59,32	
01.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	35.400.000,00	21.000.000,00	(14.400.000,00)	59,32	
01.2.03.06.5.1.01	Belanja Pegawai	35.400.000,00	21.000.000,00	(14.400.000,00)	59,32	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	98.370.345,00	83.351.000,00	(15.019.345,00)	84,73	
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.593.205,00	11.285.000,00	(8.308.205,00)	57,60	
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	19.593.205,00	11.285.000,00	(8.308.205,00)	57,60	
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.593.205,00	11.285.000,00	(8.308.205,00)	57,60	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.489.890,00	6.885.000,00	(6.584.890,00)	51,11	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	13.489.890,00	6.885.000,00	(6.584.890,00)	51,11	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.489.890,00	6.885.000,00	(6.584.890,00)	51,11	
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.307.450,00	65.181.000,00	(126.450,00)	99,81	
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	65.307.450,00	65.181.000,00	(126.450,00)	99,81	
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.307.450,00	65.181.000,00	(126.450,00)	99,81	
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.634.500,00	41.224.500,00	(6.410.000,00)	86,54	
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.634.500,00	1.912.000,00	(722.500,00)	72,58	
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.634.500,00	1.912.000,00	(722.500,00)	72,58	
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.634.500,00	1.912.000,00	(722.500,00)	72,58	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	45.000.000,00	39.312.500,00	(5.687.500,00)	87,36	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	45.000.000,00	39.312.500,00	(5.687.500,00)	87,36	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	39.312.500,00	(5.687.500,00)	87,36	
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.178.800,00	35.319.185,00	(4.859.615,00)	87,91	
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.178.800,00	35.319.185,00	(4.859.615,00)	87,91	
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	40.178.800,00	35.319.185,00	(4.859.615,00)	87,91	
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.178.800,00	35.319.185,00	(4.859.615,00)	87,91	
02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.702.045.470,00	1.617.313.262,00	(84.732.208,00)	95,02	
02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.702.045.470,00	1.617.313.262,00	(84.732.208,00)	95,02	
02.2.01.08	Pemberlakuan Pasikbraka	1.702.045.470,00	1.617.313.262,00	(84.732.208,00)	95,02	

En



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	1.702.045.470,00	1.817.313.282,00	(84.732.208,00)	95,02	
02.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.702.045.470,00	1.817.313.282,00	(84.732.208,00)	95,02	
03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	25.782.414.724,00	25.760.993.548,00	(21.421.178,00)	99,92	
03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	25.782.414.724,00	25.760.993.548,00	(21.421.178,00)	99,92	
03.2.01.02	Perumusan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	289.822.909,00	288.333.033,00	(1.289.876,00)	99,55	
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	289.822.909,00	288.333.033,00	(1.289.876,00)	99,55	
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.539.876,00	250.000,00	(1.289.876,00)	16,24	
03.2.01.02.5.1.05	Belanja Hibah	288.083.033,00	288.083.033,00	0,00	100,00	
03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	25.449.748.815,00	25.447.410.515,00	(2.338.300,00)	99,99	
03.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	25.449.748.815,00	25.447.410.515,00	(2.338.300,00)	99,99	
03.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.604.600,00	85.266.200,00	(2.338.300,00)	97,33	
03.2.01.04.5.1.05	Belanja Hibah	25.362.144.315,00	25.362.144.315,00	0,00	100,00	
03.2.01.06	Pelaksanaan tugas Pokjokrasi	43.043.000,00	25.250.000,00	(17.793.000,00)	58,66	
03.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	43.043.000,00	25.250.000,00	(17.793.000,00)	58,66	
03.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.043.000,00	25.250.000,00	(17.793.000,00)	58,66	
04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	30.650.000,00	0,00	(30.650.000,00)	0	
04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	30.650.000,00	0,00	(30.650.000,00)	0	
04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendalangan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	30.650.000,00	0,00	(30.650.000,00)	0	
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	30.650.000,00	0,00	(30.650.000,00)	0	

92



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
04.201.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.650.000,00	0,00	(5.650.000,00)	0	
04.201.03.5.1.05	Belanja Hibah	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	0	
06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	192.783.000,00	50.306.100,00	(142.456.900,00)	26,10	
06.201	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemertapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	192.783.000,00	50.306.100,00	(142.456.900,00)	26,10	
06.201.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	192.783.000,00	50.306.100,00	(142.456.900,00)	26,10	
06.201.06.5.1	BELANJA OPERASI	192.783.000,00	50.306.100,00	(142.456.900,00)	26,10	
06.201.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	192.783.000,00	50.306.100,00	(142.456.900,00)	26,10	
	SURPLUS / DEFISIT	(28.780.628.234,00)	(28.417.098.173,00)	362.922.061,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(28.780.628.234,00)	(28.417.098.173,00)	362.922.061,00	0	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ISKANDAR KAMARU

Lampiran I.4 : Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Tahun Anggaran 2024

Nomor : 1 Tahun 2025
Tanggal : 4 Agustus 2025



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

	Urutan Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	275.695.511.163,50	259.468.421.630,15	94.019.207.765,78	90.720.200.890,00	-	-	-	-
1.01	PENDIDIKAN	117.856.795.670,00	111.521.077.320,00	10.379.081.556,78	9.735.817.861,00	-	-	-	-
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	87.002.449.415,00	82.015.064.366,05	19.960.000,00	19.957.800,00	-	-	-	-
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	87.238.347.840,00	81.391.548.886,00	-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	87.183.707.465,00	81.337.670.508,00	-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	54.840.375,00	54.278.380,00	-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	87.149.025,00	86.440.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	87.149.025,00	86.440.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.05	Administrasi Akupresidan Perangkat Daerah	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Kebijakan Perimbangan Anggaran	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Peruntukan Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	19.960.000,00	19.957.800,00	-	-	-	-
1.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	19.960.000,00	19.957.800,00	-	-	-	-
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Peruntukan Urusan Pemerintahan Daerah	371.329.950,00	331.382.880,00	-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54.214.440,00	43.792.618,00	-	-	-	-	-	-

Handwritten signature

	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
		Operasi		Modal		Tidak Terhuga		Anggaran	Realisasi
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Urusan Kantor	316.915.510,00	287.290.262,00	-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Peranggung Urusan Pemerintahan Daerah	205.472.600,00	205.292.600,00	-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	205.472.600,00	205.292.600,00	-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Perbaikan dan Mesin Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	29.954.346.255,00	29.506.012.963,00	10.259.121.558,78	6.713.860.061,00	-	-	-	-
1.01.02.2.01	Pengadaan Pendidikan Sekolah Dasar	11.578.957.720,00	13.546.966.190,00	6.694.666.956,78	6.294.931.911,00	-	-	-	-
1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	-	-	251.240.000,00	248.753.000,00	-	-	-	-
1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	-	-	371.603.257,00	91.663.450,00	-	-	-	-
1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	337.000.000,00	336.800.000,00	656.197.000,00	647.643.000,00	-	-	-	-
1.01.02.2.01.07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah / Guru/Pengajar Sekolah	-	-	199.794.000,00	199.709.000,00	-	-	-	-
1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	-	-	211.027.999,78	209.888.000,00	-	-	-	-
1.01.02.2.01.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Pengajar Sekolah	-	-	596.463.000,00	599.236.000,00	-	-	-	-
1.01.02.2.01.16	Pengadaan Peningkatan Sekolah	-	-	130.425.000,00	130.000.000,00	-	-	-	-
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Pansani Peserta Didik Sekolah Dasar	29.000.000,00	20.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	86.656.000,00	84.924.300,00	-	-	-	-	-	-
1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.031.204.000,00	1.029.629.200,00	-	-	-	-	-	-
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	427.046.200,00	396.118.900,00	24.975.000,00	24.808.500,00	-	-	-	-
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1.731.047.420,00	1.652.757.548,00	300.000.000,00	294.594.000,00	-	-	-	-
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	5.503.264.300,00	5.503.193.622,00	1.151.935.700,00	1.151.886.961,00	-	-	-	-

ca

	Urutan Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terbuka		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	142.140.000,00	137.080.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01.02.2.01.31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	1.105.000,00	1.000.000,00	1.048.150.000,00	981.471.000,00	-	-	-	-
1.01.02.2.01.46	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	2.309.491.900,00	2.387.643.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01.02.2.01.51	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	-	-	1.777.906.000,00	1.715.479.000,00	-	-	-	-
1.01.02.2.02	Perencanaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	8.854.361.350,00	8.701.031.528,00	3.463.930.600,00	3.326.409.150,00	-	-	-	-
1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	-	-	908.571.000,00	854.974.000,00	-	-	-	-
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	-	-	1.281.586.300,00	1.233.466.000,00	-	-	-	-
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Gerank, Prasarana dan Utilitas Sekolah	-	-	199.885.000,00	199.790.000,00	-	-	-	-
1.01.02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	171.147.700,00	171.030.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personel Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	37.500.000,00	27.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01.02.2.02.38	Pembiayaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	296.473.500,00	365.435.000,00	766.771.250,00	731.556.050,00	-	-	-	-
1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.153.073.700,00	1.112.412.900,00	-	-	-	-	-	-
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	83.590.000,00	29.933.992,00	-	-	-	-	-	-
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	2.288.032.600,00	2.254.084.998,00	-	-	-	-	-	-
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	3.336.032.900,00	3.336.313.539,00	307.137.050,00	306.623.100,00	-	-	-	-
1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	273.630.000,00	272.020.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01.02.2.02.62	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1.234.880.900,00	1.233.781.500,00	-	-	-	-	-	-
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	6.716.297.185,00	6.571.441.485,00	3.114.000,00	3.114.000,00	-	-	-	-
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	212.091.500,00	211.829.500,00	-	-	-	-	-	-

CA

	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.0102.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	50.000.000,00	49.950.000,00	-	-	-	-	-	-
1.0102.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	955.350.000,00	917.302.150,00	-	-	-	-	-	-
1.0102.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	1.102.848.000,00	1.068.941.297,00	-	-	-	-	-	-
1.0102.2.03.17	Pembinaan Kelengkapan dan Manajemen PAUD	1.995.347.685,00	1.955.960.298,00	-	-	-	-	-	-
1.0102.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	1.530.766.000,00	1.530.726.500,00	3.114.000,00	3.114.000,00	-	-	-	-
1.0102.2.03.19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	617.994.000,00	585.091.750,00	-	-	-	-	-	-
1.0102.2.03.41	Pengadaan Peringkat/Resort Didik	231.890.000,00	231.640.000,00	-	-	-	-	-	-
1.0102.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Keasetaraan	704.730.000,00	688.573.750,00	107.410.000,00	91.405.000,00	-	-	-	-
1.0102.2.04.14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Keasetaraan	181.800.000,00	163.443.750,00	-	-	-	-	-	-
1.0102.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Keasetaraan	523.130.000,00	523.130.000,00	107.410.000,00	91.405.000,00	-	-	-	-
1.01	KESEHATAN	103.135.478.436,50	95.329.094.184,15	11.349.912.717,00	9.901.138.024,00	-	-	-	-
1.0201	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	55.683.809.800,00	52.135.748.832,00	5.015.403.623,00	4.231.589.300,00	-	-	-	-
1.0201.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	53.208.928.615,00	49.536.690.818,00	-	-	-	-	-	-
1.0201.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	53.114.961.365,00	49.458.583.818,00	-	-	-	-	-	-
1.0201.2.02.03	Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	93.967.290,00	81.107.000,00	-	-	-	-	-	-
1.0201.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	168.210.000,00	163.760.000,00	-	-	-	-	-	-
1.0201.2.03.06	Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD	168.210.000,00	163.760.000,00	-	-	-	-	-	-
1.0201.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	282.292.890,00	266.811.097,00	-	-	-	-	-	-
1.0201.2.06.05	Penyediaan Barang Cebisan dan Pengadaan	13.730.890,00	7.253.300,00	-	-	-	-	-	-
1.0201.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	268.562.000,00	259.457.797,00	-	-	-	-	-	-
1.0201.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.784.185,00	30.175.275,00	5.015.403.623,00	4.231.589.300,00	-	-	-	-

Ca

	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
		Operasi		Modal		Tidak Tertuga		Anggaran	Realisasi
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
1.0201.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	999.000,00	999.000,00	-	-	-	-
1.0201.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	35.891.850,00	35.578.300,00	-	-	-	-
1.0201.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.794.185,00	30.175.275,00	4.978.512.773,00	4.196.812.000,00	-	-	-	-
1.0201.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.901.577.290,00	1.846.304.872,00	-	-	-	-	-	-
1.0201.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	163.022.500,00	159.553.572,00	-	-	-	-	-	-
1.0201.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.738.554.790,00	1.686.850.400,00	-	-	-	-	-	-
1.0201.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	292.016.808,00	289.007.570,00	-	-	-	-	-	-
1.0201.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	47.484.500,00	44.590.700,00	-	-	-	-	-	-
1.0201.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	222.294.300,00	222.355.000,00	-	-	-	-	-	-
1.0201.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.352.900,00	16.347.500,00	-	-	-	-	-	-
1.0201.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.785.320,00	5.714.370,00	-	-	-	-	-	-
1.0202	PROGRAM PEMENJAHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	40.876.360.888,50	37.166.985.127,15	6.334.909.094,00	5.667.748.724,00	-	-	-	-
1.0202.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kawasan/daerah Kabupaten/Kota	3.747.227.200,00	3.704.371.548,00	5.466.232.992,00	4.841.618.725,00	-	-	-	-
1.0202.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	-	-	12.678.022,00	-	-	-	-	-
1.0202.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	-	-	108.149.870,00	-	-	-	-	-
1.0202.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12.371.850,00	12.371.850,00	-	-	-	-	-	-

50

	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kategori Belanja						Transfer	
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Anggaran	Realisasi
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	5.344.404.800,00	4.841.518.725,00	-	-	-	-
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	63.483.000,00	56.428.914,00	-	-	-	-	-	-
1.02.02.2.01.23	Pengadaan Obat, Bahan habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	3.652.390.350,00	3.616.390.794,00	-	-	-	-	-	-
1.02.02.2.01.26	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	18.980.000,00	18.980.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	36.681.681.726,30	31.058.089.655,15	771.256.602,00	729.128.999,00	-	-	-	-
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	223.670.000,00	210.750.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	180.647.400,00	79.956.400,00	-	-	-	-	-	-
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	33.845.330,00	29.200.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	35.352.000,00	31.946.300,00	-	-	-	-	-	-
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	341.535.450,00	325.424.300,00	-	-	-	-	-	-
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	7.284.000,00	6.210.800,00	-	-	-	-	-	-
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	33.552.000,00	35.546.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	9.672.000,00	9.052.800,00	-	-	-	-	-	-
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	178.613.775,00	178.571.250,00	-	-	-	-	-	-
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	49.920.000,00	49.160.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	504.170.100,00	190.214.000,00	-	-	-	-	-	-

CG

	Urutan Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terwujud		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Transmisi HIV	40.015.450,00	36.500.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2.022.539.347,00	1.891.223.800,00	-	-	-	-	-	-
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	385.320.450,00	334.611.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	176.454.000,00	160.609.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	388.581.550,00	363.370.900,00	-	-	-	-	-	-
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.584.311.215,00	1.452.793.500,00	-	-	-	-	-	-
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	27.086.298.749,50	24.925.748.029,15	771.256.502,00	729.129.993,00	-	-	-	-
1.03.02.2.02.29	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial ICB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	46.800.000,00	45.500.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02.02.2.02.31	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.801.697.000,00	1.402.879.461,00	-	-	-	-	-	-
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	34.865.000,00	34.865.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02.02.2.02.35	Peleaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Bukaan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	72.480.450,00	69.550.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02.02.2.02.37	Peleaksanaan Kewaspadaan Diri dan Respon Wabah	2.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	77.450.450,00	68.590.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02.02.2.02.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	18.510.000,00	11.410.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	193.182.500,00	149.994.400,00	-	-	-	-	-	-
1.02.02.2.02.44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	164.713.450,00	161.110.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02.02.2.02.46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.066.760.000,00	1.003.222.500,00	-	-	-	-	-	-
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	406.251.750,00	406.523.929,00	97.020.000,00	97.000.000,00	-	-	-	-

Sa

	Urutan Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Anggaran	Realisasi
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
1.0203.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	450.251.750,00	408.523.929,00	97.020.000,00	97.000.000,00	-	-	-	-
1.0203	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	5.995.843.950,00	5.697.238.422,00	-	-	-	-	-	-
1.0203.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendeiyagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	5.174.753.150,00	4.875.328.650,00	-	-	-	-	-	-
1.0203.2.03.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	4.933.300.150,00	4.637.465.650,00	-	-	-	-	-	-
1.0203.2.02.03	Pembinaan dan Penguasaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	341.453.000,00	237.863.000,00	-	-	-	-	-	-
1.0203.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	822.090.800,00	821.909.772,00	-	-	-	-	-	-
1.0203.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	822.090.800,00	821.909.772,00	-	-	-	-	-	-
1.0204	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN HIGIENIS	250.401.000,00	214.497.300,00	-	-	-	-	-	-
1.0204.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	67.380.000,00	64.775.000,00	-	-	-	-	-	-
1.0204.2.03.01	Pengendalian dan Penguasaan serta Tindak Lanjut Penguasaan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	67.380.000,00	64.775.000,00	-	-	-	-	-	-
1.0204.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	183.021.000,00	149.722.300,00	-	-	-	-	-	-

4

	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Anggaran	Realisasi
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
1.0204.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minum Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	183.021.090,00	148.722.300,00	-	-	-	-	-	-
1.0205	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	125.063.090,00	112.624.303,00	-	-	-	-	-	-
1.0205.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peas serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	49.016.305,00	-	-	-	-	-	-
1.0205.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	50.000.000,00	49.016.305,00	-	-	-	-	-	-
1.0205.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	75.063.000,00	73.607.998,00	-	-	-	-	-	-
1.0205.2.03.01	Bintangin Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	75.063.000,00	73.607.998,00	-	-	-	-	-	-
1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	19.255.967.465,00	18.418.129.825,00	63.569.080.902,00	63.386.152.725,00	-	-	-	-
1.0301	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.642.967.647,00	3.648.025.522,00	50.210.850,00	49.378.000,00	-	-	-	-
1.0301.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
1.0301.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
1.0301.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-
1.0301.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-
1.0301.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-
1.0301.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
1.0301.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.495.821.977,00	3.316.932.812,00	-	-	-	-	-	-
1.0301.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.467.661.977,00	3.288.772.812,00	-	-	-	-	-	-
1.0301.2.02.03	Pelaksanaan Pertanggungjawaban dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	28.160.000,00	28.160.000,00	-	-	-	-	-	-

	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
		Operasi		Modal		Tidak Terhuga		Anggaran	Realisasi
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
1.0301.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-
1.0301.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-
1.0301.2.03	Administrasi Bersing Milk Daerah pada Perangkat Daerah	23.400.000,00	23.400.000,00	-	-	-	-	-	-
1.0301.2.03.06	Perusahaan Bersing Milk Daerah pada SKPD	23.400.000,00	23.400.000,00	-	-	-	-	-	-
1.0301.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	79.069.770,00	78.949.300,00	-	-	-	-	-	-
1.0301.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.115.770,00	3.082.000,00	-	-	-	-	-	-
1.0301.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-
1.0301.2.06.04	Penyempurnaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.954.000,00	75.867.300,00	-	-	-	-	-	-
1.0301.2.07	Pengadaan Bersing Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	50.210.850,00	49.578.000,00	-	-	-	-
1.0301.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	50.210.850,00	49.578.000,00	-	-	-	-
1.0301.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	192.995.900,00	183.753.400,00	-	-	-	-	-	-
1.0301.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	63.664.200,00	54.889.400,00	-	-	-	-	-	-
1.0301.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	128.931.700,00	128.874.000,00	-	-	-	-	-	-
1.0301.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.980.000,00	44.980.210,00	-	-	-	-	-	-
1.0301.2.09.01	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	51.980.000,00	44.980.210,00	-	-	-	-	-	-
1.0302	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	2.161.602.000,00	2.135.693.640,00	6.204.910.900,00	6.072.951.450,00	-	-	-	-
1.0302.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pergerakan Perairan pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	368.758.000,00	368.534.794,00	3.005.451.900,00	2.887.975.000,00	-	-	-	-
1.0302.2.01.12	Rehabilitasi Bendungan	76.966.000,00	76.800.000,00	2.452.980.000,00	2.336.547.000,00	-	-	-	-
1.0302.2.01.15	Pembangunan Tanggul Sungai	-	-	1.132.106.000,00	1.111.319.000,00	-	-	-	-

CGP

	Urutan Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kategori Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.0302.2.01.93	Normalisasi/Restorasi Sungai	291.792.000,00	291.734.794,00	1.420.365.902,00	1.420.309.000,00	-	-	-	-
1.0302.2.02	Pengembangan dan Penguasaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.792.844.000,00	1.767.138.854,00	1.199.465.000,00	1.184.976.450,00	-	-	-	-
1.0302.2.02.04	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	-	-	799.465.000,00	787.542.450,00	-	-	-	-
1.0302.2.02.23	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	1.004.966.000,00	992.966.000,00	-	-	-	-	-	-
1.0302.2.02.32	Pengelolaan dan Penguasaan Alokasi Air Irigasi	788.276.000,00	774.592.854,00	400.000.000,00	397.434.000,00	-	-	-	-
1.0303	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.409.408.000,00	1.195.940.891,00	17.893.236.645,00	17.842.698.770,00	-	-	-	-
1.0303.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota	1.409.408.000,00	1.195.940.891,00	17.893.236.645,00	17.842.698.770,00	-	-	-	-
1.0303.2.01.25	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknik Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	271.558.000,00	232.942.591,00	200.000.000,00	197.996.250,00	-	-	-	-
1.0303.2.01.28	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	717.850.000,00	546.998.300,00	16.881.738.087,00	16.834.172.520,00	-	-	-	-
1.0303.2.01.29	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	420.000.000,00	416.000.000,00	282.966.558,00	282.000.000,00	-	-	-	-
1.0303.2.01.32	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	-	-	548.530.000,00	548.530.000,00	-	-	-	-
1.0305	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.582.246.000,00	1.587.832.450,00	3.959.999.905,00	3.915.791.005,00	-	-	-	-
1.0305.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.582.246.000,00	1.587.832.450,00	3.959.999.905,00	3.915.791.005,00	-	-	-	-
1.0305.2.01.23	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Pemukiman Berbasis Masyarakat	1.535.806.000,00	1.531.832.450,00	3.959.999.905,00	3.915.791.005,00	-	-	-	-
1.0305.2.01.33	Penyediaan Jasa Penyediaan Lumpur Tinja	-	-	-	-	-	-	-	-
1.0305.2.01.38	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	46.440.000,00	36.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.0306	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINAGE	-	-	969.337.000,00	962.592.990,00	-	-	-	-

Sh

	Urutan Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terfungs		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pemeliharaan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	969.337.000,00	962.533.850,00	-	-	-	-
1.03.06.2.01.12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	-	-	969.337.000,00	962.533.850,00	-	-	-	-
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	2.215.268.350,00	2.022.639.293,00	523.344.000,00	523.026.000,00	-	-	-	-
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laku Fungsional Bangunan Gedung	2.215.268.350,00	2.022.639.293,00	523.344.000,00	523.026.000,00	-	-	-	-
1.03.08.2.01.18	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000,00	199.713.000,00	483.344.000,00	483.344.000,00	-	-	-	-
1.03.08.2.01.19	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	81.674.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.03.08.2.01.20	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	1.096.449.350,00	1.096.129.350,00	-	-	-	-	-	-
1.03.08.2.01.21	Pembangunan, Pemeliharaan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	449.871.000,00	449.871.000,00	40.000.000,00	39.682.000,00	-	-	-	-
1.03.08.2.01.23	Penyelenggaraan Penerbitan Perizinan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laku Fungsional (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBRBG), Rencana Teknik Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Ahli Teknik Sipil (TATS), dan Tim Ahli Teknik Struktur (TATS)	385.274.000,00	276.925.943,00	-	-	-	-	-	-
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	2.394.049.750,00	2.328.056.913,00	200.000.000,00	199.299.000,00	-	-	-	-
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	2.394.049.750,00	2.328.056.913,00	200.000.000,00	199.299.000,00	-	-	-	-
1.03.09.2.01.08	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	1.999.074.000,00	1.999.074.000,00	200.000.000,00	199.299.000,00	-	-	-	-

Ca

	Urutan Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.03.09.2.01.09	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	384.975.750,00	328.982.813,00	-	-	-	-	-	-
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	4.697.315.300,00	4.631.639.104,00	33.768.041.600,00	33.720.304.650,00	-	-	-	-
1.03.10.2.01	Penyediaan/Perbaikan Jalan Kabupaten/Kota	4.697.315.300,00	4.631.639.104,00	33.768.041.600,00	33.720.304.650,00	-	-	-	-
1.03.10.2.01.32	Pembangunan Jalan	-	-	1.989.362.000,00	1.989.362.000,00	-	-	-	-
1.03.10.2.01.33	Rekonstruksi Jalan	3.807.319.300,00	3.741.643.104,00	29.679.448.600,00	29.657.749.100,00	-	-	-	-
1.03.10.2.01.38	Pemeliharaan Rutin Sambatan	-	-	99.799.000,00	94.799.550,00	-	-	-	-
1.03.10.2.01.40	Pembangunan Jembatan	-	-	99.441.000,00	89.441.000,00	-	-	-	-
1.03.10.2.01.46	Pemeliharaan Rutin Jalan	889.996.000,00	889.996.000,00	1.900.000.000,00	1.878.953.000,00	-	-	-	-
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	963.210.418,00	888.302.004,00	-	-	-	-	-	-
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (KTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRN) Kabupaten/Kota	963.210.418,00	888.302.004,00	-	-	-	-	-	-
1.03.12.2.01.05	Pelaksanaan Perizinan Substansi KTRW Kabupaten/Kota	963.210.418,00	888.302.004,00	-	-	-	-	-	-
1.04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	23.434.228.648,00	22.990.729.511,00	8.788.084.100,00	7.774.593.280,00	-	-	-	-
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.783.254.524,00	2.652.986.578,00	194.261.100,00	176.212.000,00	-	-	-	-
1.04.01.2.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.805.286.244,00	1.750.518.377,00	-	-	-	-	-	-
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.782.856.244,00	1.728.438.377,00	-	-	-	-	-	-
1.04.01.2.02.03	Pelaksanaan Perencanaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan APBD	22.430.000,00	22.080.000,00	-	-	-	-	-	-
1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	58.500.000,00	51.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.04.01.2.03.06	Peralaksanaan Barang Milik Daerah pada APBD	58.500.000,00	51.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	720.249.080,00	711.628.201,00	-	-	-	-	-	-
1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	114.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.832.680,00	3.908.000,00	-	-	-	-	-	-
1.04.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.413.290,00	410.000,00	-	-	-	-	-	-

Gp

	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Anggaran	Realisasi
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
1.0401.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.006.450,00	30.070.800,00	-	-	-	-	-	-
1.0401.2.06.05	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPO	679.692.500,00	677.239.401,00	-	-	-	-	-	-
1.0401.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	194.261.100,00	176.212.000,00	-	-	-	-
1.0401.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	79.377.100,00	76.500.000,00	-	-	-	-
1.0401.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	115.884.000,00	99.712.000,00	-	-	-	-
1.0401.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	155.589.200,00	137.054.900,00	-	-	-	-	-	-
1.0401.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.789.200,00	13.058.900,00	-	-	-	-	-	-
1.0401.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Urusan Kantor	132.800.000,00	124.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.0401.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.730.000,00	42.783.200,00	-	-	-	-	-	-
1.0401.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.330.000,00	39.483.200,00	-	-	-	-	-	-
1.0401.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.400.000,00	3.300.000,00	-	-	-	-	-	-
1.0403	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	256.914.520,00	225.771.433,00	-	-	-	-	-	-
1.0403.2.02	Powasan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	103.062.960,00	82.830.320,00	-	-	-	-	-	-
1.0403.2.02.04	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	25.210.520,00	16.152.520,00	-	-	-	-	-	-
1.0403.2.02.14	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	77.652.460,00	66.678.000,00	-	-	-	-	-	-
1.0403.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	153.851.580,00	142.940.913,00	-	-	-	-	-	-
1.0403.2.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Perumahan/Perumahan Permukiman Kumuh	153.851.580,00	142.940.913,00	-	-	-	-	-	-

	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
		Operasi		Modal		Tidak Tarduga		Anggaran	Realisasi
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	18.284.281.495,00	18.135.797.000,00	-	-	-	-	-	-
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	18.284.281.495,00	18.135.797.000,00	-	-	-	-	-	-
1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	18.284.281.495,00	18.135.797.000,00	-	-	-	-	-	-
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UHUM (PSU)	2.099.678.109,00	1.936.174.500,00	8.603.823.000,00	7.596.380.280,00	-	-	-	-
1.04.05.2.01	Uraian Penyelenggaraan PSU Perumahan	2.099.678.109,00	1.936.174.500,00	8.603.823.000,00	7.596.380.280,00	-	-	-	-
1.04.05.2.01.09	Kerja Sama Penyelenggaraan / Pengelolaan PSU Perumahan	2.099.678.109,00	1.936.174.500,00	8.603.823.000,00	7.596.380.280,00	-	-	-	-
1.05	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UHUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	7.561.244.703,00	7.077.840.070,00	-	-	-	-	-	-
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.066.311.328,00	4.662.889.320,00	-	-	-	-	-	-
1.05.01.2.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.962.704.953,00	3.605.871.419,00	-	-	-	-	-	-
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.966.942.453,00	3.590.271.419,00	-	-	-	-	-	-
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15.762.500,00	15.600.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	23.140.000,00	18.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	23.140.000,00	18.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	546.110.960,00	541.073.600,00	-	-	-	-	-	-
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.865.580,00	1.644.700,00	-	-	-	-	-	-
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.761.500,00	2.772.700,00	-	-	-	-	-	-
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	339.463.880,00	336.456.200,00	-	-	-	-	-	-
1.05.01.2.09	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	260.214.175,00	248.876.113,00	-	-	-	-	-	-
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	575.000,00	570.000,00	-	-	-	-	-	-

	Uraian Uraian, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.070.250,00	25.395.613,00	-	-	-	-	-	-
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	726.568.105,00	720.930.500,00	-	-	-	-	-	-
1.05.01.2.09	Pereliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	254.141.340,00	251.166.188,00	-	-	-	-	-	-
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	86.700.600,00	86.757.988,00	-	-	-	-	-	-
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	158.271.500,00	157.401.380,00	-	-	-	-	-	-
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.169.140,00	7.009.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.627.557.375,00	1.613.890.850,00	-	-	-	-	-	-
1.05.02.2.01	Pencegahan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.579.785.375,00	1.566.243.850,00	-	-	-	-	-	-
1.05.02.2.01.15	Pencegahan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Diri dan Cegah Diri, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengawasan, dan Pengawasan	1.579.785.375,00	1.566.243.850,00	-	-	-	-	-	-
1.05.02.2.02	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten / Kota	47.772.000,00	47.647.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05.02.2.02.06	Pengembangan Kapasitas dan Karir PPNS	47.772.000,00	47.647.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	490.376.000,00	415.767.400,00	-	-	-	-	-	-
1.05.03.2.02	Pelatihan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	382.083.900,00	365.531.200,00	-	-	-	-	-	-
1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	310.949.900,00	308.401.800,00	-	-	-	-	-	-

	Urutan Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Anggaran	Realisasi
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
1.05.03.2.02.17	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	71.135.000,00	57.129.600,00	-	-	-	-	-	-
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	52.029.000,00	28.046.100,00	-	-	-	-	-	-
1.05.03.2.03.09	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	52.029.000,00	28.046.100,00	-	-	-	-	-	-
1.05.03.2.04	Perataan Sistem Dasar Perangulangan	46.263.100,00	22.190.100,00	-	-	-	-	-	-
1.05.03.2.04.10	Koordinasi penanganan PascaBencana Kabupaten/Kota	46.263.100,00	22.190.100,00	-	-	-	-	-	-
1.05.04	PROGRAM Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	387.000.000,00	385.192.500,00	-	-	-	-	-	-
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Perangulan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	387.000.000,00	385.192.500,00	-	-	-	-	-	-
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	387.000.000,00	385.192.500,00	-	-	-	-	-	-
1.06	SOSIAL	4.451.896.241,00	4.121.560.711,00	23.042.490,00	22.500.000,00	-	-	-	-
1.06.01	PROGRAM PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.855.254.871,00	2.704.712.071,00	23.042.490,00	22.500.000,00	-	-	-	-
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.325.117.829,00	2.183.431.822,00	-	-	-	-	-	-
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.316.316.629,00	2.175.631.822,00	-	-	-	-	-	-
1.06.01.2.02.03	Pelaksanaan Perincisahean dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8.799.000,00	7.800.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	14.200.000,00	14.200.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14.200.000,00	14.200.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	237.855.750,00	234.859.118,00	-	-	-	-	-	-
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.409.250,00	5.239.768,00	-	-	-	-	-	-
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	230.246.500,00	229.619.350,00	-	-	-	-	-	-

Ca

	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Anggaran	Realisasi
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.265.122,00	2.264.123,00	23.042.490,00	22.500.000,00	-	-	-	-
1.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.265.122,00	2.264.123,00	23.042.490,00	22.500.000,00	-	-	-	-
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	201.108.870,00	197.482.808,00	-	-	-	-	-	-
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	201.108.870,00	197.482.808,00	-	-	-	-	-	-
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.907.500,00	72.472.200,00	-	-	-	-	-	-
1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	74.907.500,00	72.472.200,00	-	-	-	-	-	-
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	253.248.750,00	248.250.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	253.248.750,00	248.250.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	253.248.750,00	248.250.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	42.865.800,00	42.321.900,00	-	-	-	-	-	-
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	42.865.800,00	42.321.900,00	-	-	-	-	-	-
1.06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	42.865.800,00	42.321.900,00	-	-	-	-	-	-
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN BANTUAN SOSIAL	631.058.880,00	767.108.490,00	-	-	-	-	-	-
1.06.05.2.02	Pengumpulan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	631.058.880,00	767.108.490,00	-	-	-	-	-	-
1.06.05.2.02.02	Pengumpulan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	631.058.880,00	767.108.490,00	-	-	-	-	-	-
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	450.310.600,00	345.310.600,00	-	-	-	-	-	-
1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	417.301.360,00	360.496.500,00	-	-	-	-	-	-

	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub- Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Anggaran	Realisasi
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	359.467.948,00	359.168.250,00	-	-	-	-	-	-
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	359.467.948,00	359.168.250,00	-	-	-	-	-	-
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	280.108.500,00	278.970.750,00	-	-	-	-	-	-
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	89.359.448,00	80.197.500,00	-	-	-	-	-	-
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	47.565.992.438,50	45.651.711.670,00	3.310.181.100,00	3.229.872.400,00	-	-	-	-
2.07	TENAGA KERJA	2.956.175.600,00	2.879.202.200,00	-	-	-	-	-	-
2.07.03	PROGRAM PELATYAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	99.974.000,00	98.466.200,00	-	-	-	-	-	-
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	99.974.000,00	98.466.200,00	-	-	-	-	-	-
2.07.03.2.01.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyelesaian Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	99.974.000,00	98.466.200,00	-	-	-	-	-	-
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.856.201.600,00	2.790.736.000,00	-	-	-	-	-	-
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	2.856.201.600,00	2.790.736.000,00	-	-	-	-	-	-
2.07.05.2.02.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	2.856.201.600,00	2.790.736.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.001.137.950,00	983.253.973,00	22.755.000,00	22.635.800,00	-	-	-	-
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.989.300,00	-	-	-	-	-	-	-
2.08.02.2.01	Pelibatan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	1.989.300,00	-	-	-	-	-	-	-
2.08.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	1.989.300,00	-	-	-	-	-	-	-
2.08.03	PROGRAM PELINDUNGAN PEREMPUAN	74.909.800,00	72.649.600,00	-	-	-	-	-	-
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Ungkup Daerah Kabupaten / Kota	33.000.000,00	32.780.000,00	-	-	-	-	-	-

Signature

	Uraian Uraian, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Anggaran	Realisasi
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	33.000.000,00	32.780.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	20.110.000,00	19.870.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	20.110.000,00	19.870.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	21.799.800,00	19.999.800,00	-	-	-	-	-	-
2.08.03.2.03.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	21.799.800,00	19.999.800,00	-	-	-	-	-	-
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	599.099.750,00	596.486.073,00	22.755.000,00	22.635.000,00	-	-	-	-
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Menwujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	424.099.400,00	423.844.630,00	22.755.000,00	22.635.000,00	-	-	-	-
2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	424.099.400,00	423.844.630,00	22.755.000,00	22.635.000,00	-	-	-	-
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Menwujudkan KG dan Hak Anak yang Wajahnya Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	174.999.350,00	172.641.443,00	-	-	-	-	-	-
2.08.04.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	174.999.350,00	172.641.443,00	-	-	-	-	-	-
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	325.140.100,00	314.118.100,00	-	-	-	-	-	-

	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Anggaran	Realisasi
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
2.06.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peringatan Kualitas Hidup Anak Pemerintahan Kabupaten/Kota	325.148.100,00	314.118.100,00	-	-	-	-	-	-
2.06.06.2.02.02	Koordinasi dan Sinergisasi Pelaksanaan Pendampingan Peringatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	325.148.100,00	314.118.100,00	-	-	-	-	-	-
2.06	PANGAN	3.862.190.278,00	3.767.243.406,00	-	-	-	-	-	-
2.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.077.633.629,00	1.989.190.148,00	-	-	-	-	-	-
2.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	662.500,00	637.500,00	-	-	-	-	-	-
2.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	662.500,00	637.500,00	-	-	-	-	-	-
2.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.677.430.899,00	1.593.717.812,00	-	-	-	-	-	-
2.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.672.550.899,00	1.588.637.812,00	-	-	-	-	-	-
2.06.01.2.02.03	Pelaksanaan Penetbusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.380.000,00	5.280.000,00	-	-	-	-	-	-
2.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.900.000,00	13.900.000,00	-	-	-	-	-	-
2.06.01.2.03.06	Perusahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.900.000,00	13.900.000,00	-	-	-	-	-	-
2.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	261.676.500,00	261.482.000,00	-	-	-	-	-	-
2.06.01.2.06.09	Peningkatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	261.676.500,00	261.482.000,00	-	-	-	-	-	-
2.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.770.030,00	76.932.836,00	-	-	-	-	-	-
2.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.490.339,00	6.708.336,00	-	-	-	-	-	-
2.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	70.280.691,00	70.224.500,00	-	-	-	-	-	-
2.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perorangan Urusan Pemerintahan Daerah	42.812.800,00	42.640.000,00	-	-	-	-	-	-
2.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas lainnya	42.812.800,00	42.640.000,00	-	-	-	-	-	-

	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Anggaran	Realisasi
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
2.09.01	PROGRAM PENDORONGAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.771.306.846,00	1.764.623.458,00	-	-	-	-	-	-
2.09.01.2.01	Penyediaan dan Penyikuran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	736.299.027,50	734.707.026,00	-	-	-	-	-	-
2.09.01.2.01.08	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	720.315.027,50	729.687.026,00	-	-	-	-	-	-
2.09.01.2.01.14	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemeriksaan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	5.354.000,00	5.020.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09.01.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	947.016.000,00	947.016.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09.01.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	947.016.000,00	947.016.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09.01.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	88.021.811,50	83.100.432,00	-	-	-	-	-	-
2.09.01.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	13.219.579,00	11.862.400,00	-	-	-	-	-	-
2.09.01.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Panganokuragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	69.662.232,50	66.198.032,00	-	-	-	-	-	-
2.09.01.2.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	5.140.000,00	5.040.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	13.229.800,00	13.229.800,00	-	-	-	-	-	-
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	13.229.800,00	13.229.800,00	-	-	-	-	-	-
2.09.05.2.01.09	Penggiatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	13.229.800,00	13.229.800,00	-	-	-	-	-	-
2.18	PERTANAHAN	349.951.408,00	349.213.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18.10	PROGRAM PENATAAGAMAAN TANAH	349.951.408,00	349.213.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18.10.2.01	Pengurusan Tanah yang Hampirannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	349.951.408,00	349.213.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18.10.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	349.951.408,00	349.213.000,00	-	-	-	-	-	-

su

	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
		Operasi		Modal		Tidak Terbuka		Anggaran	Realisasi
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
2.11	LINGKUNGAN HIDUP	4.840.804.850,00	4.642.020.980,00	630.000.000,00	630.000.000,00	-	-	-	-
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.629.074.750,00	2.477.407.423,00	-	-	-	-	-	-
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.283.500,00	7.073.500,00	-	-	-	-	-	-
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	906.000,00	906.000,00	-	-	-	-	-	-
2.11.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	997.500,00	997.500,00	-	-	-	-	-	-
2.11.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	990.000,00	990.000,00	-	-	-	-	-	-
2.11.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	997.500,00	787.500,00	-	-	-	-	-	-
2.11.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	990.000,00	990.000,00	-	-	-	-	-	-
2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Tahap Realisasi Kinerja SKPD	1.522.500,00	1.522.500,00	-	-	-	-	-	-
2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	800.000,00	800.000,00	-	-	-	-	-	-
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.108.416.024,00	1.967.801.457,00	-	-	-	-	-	-
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.091.688.024,00	1.954.203.457,00	-	-	-	-	-	-
2.11.01.2.02.03	Pelaksanaan Peratausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.015.000,00	10.015.000,00	-	-	-	-	-	-
2.11.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.121.500,00	1.074.000,00	-	-	-	-	-	-
2.11.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.591.500,00	1.649.000,00	-	-	-	-	-	-
2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	14.124.000,00	14.124.000,00	-	-	-	-	-	-
2.11.01.2.03.06	Peratausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14.124.000,00	14.124.000,00	-	-	-	-	-	-
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	315.854.800,00	314.374.800,00	-	-	-	-	-	-
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bergantung Karter	2.945.000,00	2.959.000,00	-	-	-	-	-	-
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.192.800,00	9.558.800,00	-	-	-	-	-	-

Se

	Urutan Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	302.867.000,00	301.867.000,00	-	-	-	-	-	-
2.11.01.2.06	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	123.248.980,00	126.060.100,00	-	-	-	-	-	-
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.480.000,00	1.480.000,00	-	-	-	-	-	-
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.140.000,00	6.140.000,00	-	-	-	-	-	-
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	125.628.960,00	118.440.100,00	-	-	-	-	-	-
2.11.01.2.06	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.147.486,00	48.053.586,00	-	-	-	-	-	-
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43.620.000,00	41.526.100,00	-	-	-	-	-	-
2.11.01.2.06.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.918.300,00	3.918.300,00	-	-	-	-	-	-
2.11.01.2.06.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.609.166,00	2.609.166,00	-	-	-	-	-	-
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	610.373.600,00	605.169.112,00	-	-	-	-	-	-
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	610.373.600,00	605.169.112,00	-	-	-	-	-	-
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	610.373.600,00	605.169.112,00	-	-	-	-	-	-
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	101.919.000,00	101.909.750,00	-	-	-	-	-	-
2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	101.919.000,00	101.909.750,00	-	-	-	-	-	-
2.11.05.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Pembunaran	101.919.000,00	101.909.750,00	-	-	-	-	-	-
2.11.11	PROGRAM PENGENDALIAN PERSAMPAHAN	1.499.437.500,00	1.457.454.685,00	630.000.000,00	630.000.000,00	-	-	-	-

6

	Unsur Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	1.463.210.000,00	1.413.274.665,00	630.000.000,00	630.000.000,00	-	-	-	-
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten / Kota	772.275.000,00	763.817.895,00	630.000.000,00	630.000.000,00	-	-	-	-
2.11.11.2.01.09	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	690.435.000,00	609.956.800,00	-	-	-	-	-	-
2.11.11.2.03	Pembinaan dan Penguasaan Pengelolaan Sampah yang Dikelola/Operasikan oleh Pihak Swasta	36.227.500,00	31.680.000,00	-	-	-	-	-	-
2.11.11.2.03.01	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	36.227.500,00	31.680.000,00	-	-	-	-	-	-
2.11	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.045.152.451,00	2.940.443.510,00	87.250.000,00	87.100.000,00	-	-	-	-
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.555.796.411,00	2.451.579.619,00	87.250.000,00	87.100.000,00	-	-	-	-
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.806.547.658,00	1.806.147.858,00	-	-	-	-	-	-
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.899.512.458,00	1.799.115.858,00	-	-	-	-	-	-
2.12.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengajian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.033.000,00	7.032.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.800.000,00	13.800.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.800.000,00	13.800.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	418.654.000,00	417.988.011,00	-	-	-	-	-	-
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	418.654.000,00	417.988.011,00	-	-	-	-	-	-
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	87.250.000,00	87.100.000,00	-	-	-	-
2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	-	-	87.250.000,00	87.100.000,00	-	-	-	-
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	132.899.455,00	129.990.750,00	-	-	-	-	-	-
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	132.899.455,00	129.990.750,00	-	-	-	-	-	-
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.895.300,00	83.653.000,00	-	-	-	-	-	-

	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kategori Belanja						Transfer	
		Operasi		Modal		Tidak Tertuga		Anggaran	Realisasi
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
2.1201.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perbrangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	48.945.200,00	48.715.000,00	-	-	-	-	-	-
2.1201.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Personil Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34.940.000,00	34.938.000,00	-	-	-	-	-	-
2.1202	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	389.392.920,00	389.266.500,00	-	-	-	-	-	-
2.1202.2.01	Poliklinik Pendaftaran Penduduk	389.392.920,00	389.266.500,00	-	-	-	-	-	-
2.1202.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	389.392.920,00	389.266.500,00	-	-	-	-	-	-
2.1204	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	99.973.120,00	99.597.400,00	-	-	-	-	-	-
2.1204.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemeliharaan dan Penyajian Database Kependudukan	99.973.120,00	99.597.400,00	-	-	-	-	-	-
2.1204.2.01.02	Kerja Sama Pemeliharaan Data Kependudukan	99.973.120,00	99.597.400,00	-	-	-	-	-	-
2.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.102.126.929,00	3.875.397.699,00	46.620.000,00	46.545.000,00	-	-	-	-
2.1301	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.807.825.214,00	3.657.414.661,00	46.620.000,00	46.545.000,00	-	-	-	-
2.1301.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.876.972.564,00	1.793.602.634,00	-	-	-	-	-	-
2.1301.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.868.172.564,00	1.785.802.634,00	-	-	-	-	-	-
2.1301.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8.800.000,00	7.800.000,00	-	-	-	-	-	-
2.1301.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.800.000,00	7.800.000,00	-	-	-	-	-	-
2.1301.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.800.000,00	7.800.000,00	-	-	-	-	-	-
2.1301.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	366.896.440,00	366.536.054,00	-	-	-	-	-	-
2.1301.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.402.700,00	8.194.000,00	-	-	-	-	-	-
2.1301.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.922.740,00	3.922.190,00	-	-	-	-	-	-

	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
		Operasi		Modal		Tidak Terbuka		Anggaran	Realisasi
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
2.1101.2.06.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	354.571.000,00	354.410.904,00	-	-	-	-	-	-
2.1101.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	46.620.000,00	46.545.000,00	-	-	-	-
2.1101.2.07.05	Pengadaan Mebel	-	-	19.980.000,00	19.980.000,00	-	-	-	-
2.1101.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	26.640.000,00	26.565.000,00	-	-	-	-
2.1101.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.514.753.530,00	1.449.479.123,00	-	-	-	-	-	-
2.1101.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.300.000,00	14.537.779,00	-	-	-	-	-	-
2.1101.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.478.255.530,00	1.434.891.344,00	-	-	-	-	-	-
2.1101.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	41.400.690,00	40.046.650,00	-	-	-	-	-	-
2.1101.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan, Perangin Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.430.000,00	34.076.000,00	-	-	-	-	-	-
2.1101.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prakerja Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.970.690,00	5.970.650,00	-	-	-	-	-	-
2.1103	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	21.322.850,00	-	-	-	-	-	-	-
2.1103.2.01	Facilitasi Kerja Sama antar Desa	21.322.850,00	-	-	-	-	-	-	-
2.1103.2.01.01	Facilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	21.322.850,00	-	-	-	-	-	-	-
2.1103.2.01.02	Facilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten / Kota	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1104	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	233.300.375,00	196.867.700,00	-	-	-	-	-	-
2.1104.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	233.300.375,00	196.867.700,00	-	-	-	-	-	-
2.1104.2.01.02	Facilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	31.272.000,00	8.794.000,00	-	-	-	-	-	-
2.1104.2.01.03	Facilitasi Penyusunan Pemecatan Perimbangan Desa	21.300.000,00	21.300.000,00	-	-	-	-	-	-

60

	Urutan Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.13.04.2.01.04	Facilitasi Peningkatan Kualitas Desa	93.210.000,00	93.007.300,00	-	-	-	-	-	-
2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	-	-	-	-	-	-	-	-
2.13.04.2.01.15	Facilitasi Penetapan dan Peningkatan Badan Desa	51.111.700,00	38.037.700,00	-	-	-	-	-	-
2.13.04.2.01.18	Facilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lemha Desa dan Kelurahan	35.406.675,00	35.727.800,00	-	-	-	-	-	-
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KOMUNIKASIONAL, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	29.678.880,00	21.115.338,00	-	-	-	-	-	-
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Komunikasional yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	39.678.880,00	21.115.338,00	-	-	-	-	-	-
2.13.05.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Komunikasional Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	23.024.890,00	5.100.000,00	-	-	-	-	-	-
2.13.05.2.01.06	Facilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	16.653.600,00	16.015.338,00	-	-	-	-	-	-
2.14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	5.947.461.617,00	5.602.640.809,00	811.988.000,00	789.658.000,00	-	-	-	-
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG LURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.494.850.789,00	2.306.650.309,00	13.000.000,00	12.950.000,00	-	-	-	-
2.14.01.2.01	Pemencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.029.000,00	14.737.650,00	-	-	-	-	-	-
2.14.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Pemencanaan Perangkat Daerah	6.061.000,00	5.998.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.019.000,00	5.843.650,00	-	-	-	-	-	-
2.14.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.949.000,00	2.896.000,00	-	-	-	-	-	-

GA

	Uraian Uraian, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Tertuga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.1401.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.018.151.000,00	1.873.816.622,00	-	-	-	-	-	-
2.1401.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.005.045.889,00	1.860.711.422,00	-	-	-	-	-	-
2.1401.2.02.03	Pelaksanaan Perencanaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13.105.400,00	13.105.200,00	-	-	-	-	-	-
2.1401.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	18.480.000,00	16.200.000,00	-	-	-	-	-	-
2.1401.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	18.480.000,00	16.200.000,00	-	-	-	-	-	-
2.1401.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	88.566.000,00	83.495.400,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	-	-
2.1401.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000,00	-	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	-	-
2.1401.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	7.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.1401.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.466.000,00	76.495.400,00	-	-	-	-	-	-
2.1401.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Perungjung Urusan Pemerintahan Daerah	10.588.200,00	7.390.600,00	7.000.000,00	6.950.000,00	-	-	-	-
2.1401.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000,00	-	7.000.000,00	6.950.000,00	-	-	-	-
2.1401.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.488.200,00	7.390.600,00	-	-	-	-	-	-
2.1401.2.08	Penyediaan Jasa Perungjung Urusan Pemerintahan Daerah	181.235.500,00	151.362.637,00	-	-	-	-	-	-
2.1401.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.110.000,00	8.242.437,00	-	-	-	-	-	-
2.1401.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	167.125.500,00	143.120.400,00	-	-	-	-	-	-
2.1401.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perungjung Urusan Pemerintahan Daerah	159.800.000,00	159.847.200,00	-	-	-	-	-	-
2.1401.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan, Perawatan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	159.800.000,00	159.847.200,00	-	-	-	-	-	-
2.14.02	PROGRAM PENYENDALIAN PEMBERUK	680.400.852,00	641.400.000,00	-	-	-	-	-	-
2.1402.2.02	Penataan Perkiraan Penghasilan Pribadi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	680.400.852,00	641.400.000,00	-	-	-	-	-	-

CS

	Urutan Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub- Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terbaga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.14.02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	59.600.000,00	59.400.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	75.600.000,00	75.600.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14.02.2.02.18	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	545.400.852,00	506.400.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14.03	PROGRAM PEMBIYAAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.981.709.976,00	1.905.225.500,00	798.980.000,00	776.700.000,00	-	-	-	-
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.039.200.000,00	1.031.260.500,00	-	-	-	-	-	-
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KBPK	80.000.000,00	76.330.500,00	-	-	-	-	-	-
2.14.03.2.01.10	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	347.200.000,00	347.200.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14.03.2.01.11	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minitak)	105.000.000,00	104.730.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14.03.2.01.12	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14.03.2.01.13	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14.03.2.01.14	Advokasi Program Bangga Kencana oleh peka advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	297.000.000,00	290.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14.03.2.02	Pengayamanan Tenaga Penyuluh KB/Pelugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	243.000.000,00	243.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Instansi Masyarakat Pedesaan (MIP)	243.000.000,00	243.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	272.245.000,00	243.715.000,00	798.980.000,00	776.700.000,00	-	-	-	-

60

	Urutan Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.14.03.2.03.01	Pengembangan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	11.700.000,00	6.490.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	245.595.000,00	221.335.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14.03.2.03.06	Pemediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	50.000,00	-	798.080.000,00	776.700.000,00	-	-	-	-
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	14.900.000,00	14.890.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesehatan Ber-KB	407.264.976,00	388.250.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14.03.2.04.01	Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesehatan Ber-KB	73.014.976,00	54.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14.03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	3.750.000,00	3.750.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14.03.2.04.08	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas	330.500.000,00	330.500.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEHATYTERA (KS)	810.300.000,00	749.385.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	300.000.000,00	239.085.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14.04.2.01.18	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (RKG, BKG, BK, PPKG, PK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Apeskor (UPPKA)	300.000.000,00	239.085.000,00	-	-	-	-	-	-

	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terbaga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.1404.2.02	Pelaksanaan dan Peringatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan (Tingkat Daerah Kabupaten) Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketenangan dan Kesejahteraan Keluarga	510.300.000,00	510.300.000,00	-	-	-	-	-	-
2.1404.2.02.05	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja-Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Beduga/Belta)	243.000.000,00	243.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.1404.2.02.06	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Beduga/Belta)	267.300.000,00	267.300.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15	PERHUBUNGAN	3.600.042.181,00	3.476.441.386,00	36.913.500,00	28.971.000,00	-	-	-	-
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.803.439.181,00	2.695.111.186,00	-	-	-	-	-	-
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.790.057.541,00	1.593.772.936,00	-	-	-	-	-	-
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.769.992.541,00	1.685.972.936,00	-	-	-	-	-	-
2.15.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SAPD	10.065.000,00	7.800.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.800.000,00	13.800.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada DPRD	13.800.000,00	13.800.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	513.238.500,00	509.510.600,00	-	-	-	-	-	-
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.635.000,00	1.250.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tahun	-	-	-	-	-	-	-	-
2.15.01.2.06.09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	508.603.500,00	508.260.600,00	-	-	-	-	-	-
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	175.241.670,00	162.554.600,00	-	-	-	-	-	-
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.960.000,00	6.400.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	163.181.670,00	156.154.600,00	-	-	-	-	-	-

	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Tertuga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang M&A Daerah Penumpang Utusan Pemerintahan Daerah	321.101.470,00	315.473.050,00	-	-	-	-	-	-
2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.050.000,00	37.721.200,00	-	-	-	-	-	-
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	266.980.000,00	263.682.850,00	-	-	-	-	-	-
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.071.470,00	14.069.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15.02	PROGRAM PENYELANGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	796.613.000,00	781.330.200,00	30.913.500,00	28.971.000,00	-	-	-	-
2.15.02.2.02	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-	-	30.913.500,00	28.971.000,00	-	-	-	-
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-	-	30.913.500,00	28.971.000,00	-	-	-	-
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jembatan Jalan Kabupaten/Kota	6.890.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2.15.02.2.06.14	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jembatan Jalan Kabupaten/Kota	6.890.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	789.713.000,00	781.330.200,00	-	-	-	-	-	-
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	789.713.000,00	781.330.200,00	-	-	-	-	-	-
2.18	KOMUNIKASI & INFORMATIKA	6.138.891.625,00	6.027.183.037,00	-	-	-	-	-	-
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.345.985.725,00	2.246.797.712,00	-	-	-	-	-	-
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.355.285.725,00	2.256.997.712,00	-	-	-	-	-	-
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.345.985.725,00	2.246.797.712,00	-	-	-	-	-	-

	Unitas Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan Penetapannya dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.200.000,00	10.200.000,00	-	-	-	-	-	-
2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	11.400.000,00	11.400.000,00	-	-	-	-	-	-
2.16.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.400.000,00	11.400.000,00	-	-	-	-	-	-
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	330.836.000,00	329.686.862,00	-	-	-	-	-	-
2.16.01.2.06.04	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	330.836.000,00	329.686.862,00	-	-	-	-	-	-
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penyungging Urusan Pemerintahan Daerah	111.925.000,00	110.421.000,00	-	-	-	-	-	-
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.200.000,00	28.960.000,00	-	-	-	-	-	-
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	81.725.000,00	81.461.000,00	-	-	-	-	-	-
3.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penyungging Urusan Pemerintahan Daerah	38.530.000,00	38.476.000,00	-	-	-	-	-	-
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perantara Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	38.530.000,00	38.476.000,00	-	-	-	-	-	-
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.590.492.000,00	2.589.867.800,00	-	-	-	-	-	-
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.590.492.000,00	2.589.867.800,00	-	-	-	-	-	-
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Publik	2.540.492.000,00	2.539.867.800,00	-	-	-	-	-	-
2.16.02.2.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	700.202.900,00	690.329.662,00	-	-	-	-	-	-
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Dibagikan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	418.066.900,00	412.936.564,00	-	-	-	-	-	-
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	418.066.900,00	412.936.564,00	-	-	-	-	-	-
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	282.136.000,00	277.393.099,00	-	-	-	-	-	-

	Urutan Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.16.03.2.02.02	Sistemisasi Pengelompokan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	142.972.800,00	141.994.000,00	-	-	-	-	-	-
2.16.03.2.02.08	Penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	1.79.164.000,00	1.35.409.099,00	-	-	-	-	-	-
2.17	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.895.392.667,00	2.745.034.743,00	73.158.990,00	73.158.000,00	-	-	-	-
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.294.836.012,00	2.215.304.460,00	73.158.990,00	73.158.000,00	-	-	-	-
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.906.429.917,00	1.812.799.960,00	-	-	-	-	-	-
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.898.229.917,00	1.812.589.960,00	-	-	-	-	-	-
2.17.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.300.000,00	10.200.000,00	-	-	-	-	-	-
2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.200.000,00	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.17.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.200.000,00	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	219.170.000,00	217.867.900,00	-	-	-	-	-	-
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	219.170.000,00	217.867.900,00	-	-	-	-	-	-
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	130.866,00	-	73.158.990,00	73.158.000,00	-	-	-	-
2.17.01.2.07.06	Pengadaan Perakitan dan Mesin Lainnya	130.866,00	-	73.158.990,00	73.158.000,00	-	-	-	-
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Perijinan Urusan Pemerintahan Daerah	112.810.376,00	110.666.900,00	-	-	-	-	-	-
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.005.000,00	1.121.900,00	-	-	-	-	-	-
2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	109.810.376,00	108.465.000,00	-	-	-	-	-	-
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.294.850,00	38.929.700,00	-	-	-	-	-	-
2.17.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Sebatan	40.294.850,00	38.929.700,00	-	-	-	-	-	-
2.17.08	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	147.827.177,00	131.268.400,00	-	-	-	-	-	-

Sw

	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.13.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	147.827.277,00	131.368.400,00	-	-	-	-	-	-
2.13.06.2.01.05	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Peningkatan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	147.827.277,00	131.368.400,00	-	-	-	-	-	-
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	234.396.000,00	224.790.500,00	-	-	-	-	-	-
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Yimtraan, Kemudahan Perolehan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	234.396.000,00	224.790.500,00	-	-	-	-	-	-
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	234.396.000,00	224.790.500,00	-	-	-	-	-	-
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	218.133.378,00	173.763.353,00	-	-	-	-	-	-
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	218.133.378,00	173.763.353,00	-	-	-	-	-	-
2.17.08.2.01.06	Produksi dan Pengalihan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	218.133.378,00	173.763.353,00	-	-	-	-	-	-
2.18	PENANAMAN MODAL	2.556.833.640,50	2.412.244.248,00	354.774.020,00	353.652.000,00	-	-	-	-
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.346.616.983,00	2.204.183.905,00	354.774.020,00	353.652.000,00	-	-	-	-
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.778.800,00	6.257.750,00	-	-	-	-	-	-
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.998.150,00	1.998.250,00	-	-	-	-	-	-
2.18.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	709.050,00	700.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	761.750,00	681.750,00	-	-	-	-	-	-
2.18.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DFA-SKPD	761.750,00	691.500,00	-	-	-	-	-	-

	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
		Operasi		Modal		Tidak Terbuka		Anggaran	Realisasi
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
2.1801.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	761.750,00	668.250,00	-	-	-	-	-	-
2.1801.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD	960.900,00	-	-	-	-	-	-	-
2.1801.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.825.050,00	1.318.000,00	-	-	-	-	-	-
2.1801.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.888.677.100,00	1.781.967.423,00	-	-	-	-	-	-
2.1801.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.878.534.300,00	1.778.167.423,00	-	-	-	-	-	-
2.1801.2.02.03	Pelaksanaan Perencanaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9.983.200,00	7.800.000,00	-	-	-	-	-	-
2.1801.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	999.600,00	-	-	-	-	-	-	-
2.1801.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	550.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2.1801.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.800.000,00	13.800.000,00	-	-	-	-	-	-
2.1801.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.800.000,00	13.800.000,00	-	-	-	-	-	-
2.1801.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.865.965,00	9.154.200,00	-	-	-	-	-	-
2.1801.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	749.750,00	-	-	-	-	-	-	-
2.1801.2.05.10	Solusiasi Peraturan Perundang-Undangan	7.028.915,00	6.068.100,00	-	-	-	-	-	-
2.1801.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3.687.300,00	3.086.100,00	-	-	-	-	-	-
2.1801.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	255.782.629,00	244.279.732,00	-	-	-	-	-	-
2.1801.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.112.280,00	1.664.000,00	-	-	-	-	-	-
2.1801.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	8.999.897,00	8.794.350,00	-	-	-	-	-	-
2.1801.2.06.06	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-Undangan	2.079.130,00	-	-	-	-	-	-	-
2.1801.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	3.199.750,00	3.160.000,00	-	-	-	-	-	-
2.1801.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	221.327.300,00	220.477.132,00	-	-	-	-	-	-

56

	Uraian Uraian, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Anggaran	Realisasi
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
2.18.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	16.864.472,00	10.184.250,00	-	-	-	-	-	-
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	354.774.020,00	353.652.000,00	-	-	-	-
2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	354.774.020,00	353.652.000,00	-	-	-	-
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	108.507.100,00	99.064.100,00	-	-	-	-	-	-
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	290.800,00	-	-	-	-	-	-	-
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.099.250,00	37.308.100,00	-	-	-	-	-	-
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	66.117.050,00	61.738.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.205.388,00	49.660.700,00	-	-	-	-	-	-
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Peranginan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.980.000,00	40.955.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.998.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.892.200,00	8.705.700,00	-	-	-	-	-	-
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.235.188,00	-	-	-	-	-	-	-
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN DILIH PENANAMAN MODAL	610.900,00	609.700,00	-	-	-	-	-	-
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	610.900,00	609.700,00	-	-	-	-	-	-
2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	610.900,00	609.700,00	-	-	-	-	-	-
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	13.451.638,00	13.409.300,00	-	-	-	-	-	-
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Merajut Kewirausahaan	13.451.638,00	13.409.300,00	-	-	-	-	-	-
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	13.451.638,00	13.409.300,00	-	-	-	-	-	-

	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Anggaran	Realisasi
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
2.1805	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	60.727.826,00	60.720.963,00	-	-	-	-	-	-
2.1805.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Merajai Kawasan Daerah Kabupaten/Kota	60.727.826,00	60.720.963,00	-	-	-	-	-	-
2.1805.2.01.06	Pengawasan Pehanaman Modal	60.727.826,00	60.720.963,00	-	-	-	-	-	-
2.1806	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	135.426.294,50	133.320.380,00	-	-	-	-	-	-
2.1806.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	135.426.294,50	133.320.380,00	-	-	-	-	-	-
2.1806.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	135.426.294,50	133.320.380,00	-	-	-	-	-	-
2.18	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	3.219.355.621,00	3.030.825.482,00	145.241.150,00	131.673.980,00	-	-	-	-
2.1901	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.756.033.485,00	1.630.979.935,00	57.527.840,00	56.229.090,00	-	-	-	-
2.1901.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.386.500,00	5.988.000,00	-	-	-	-	-	-
2.1901.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.482.000,00	2.425.000,00	-	-	-	-	-	-
2.1901.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.000.000,00	988.000,00	-	-	-	-	-	-
2.1901.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.000.000,00	900.000,00	-	-	-	-	-	-
2.1901.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	995.500,00	750.000,00	-	-	-	-	-	-
2.1901.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	900.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2.1901.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	1.000.000,00	925.000,00	-	-	-	-	-	-
2.1901.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.436.948.245,00	1.341.076.580,00	-	-	-	-	-	-
2.1901.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.420.883.245,00	1.325.318.580,00	-	-	-	-	-	-
2.1901.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.988.000,00	5.866.500,00	-	-	-	-	-	-
2.1901.2.02.03	Pelaksanaan Perencanaan dan Pengukuran/Verifikasi Keuangan SKPD	8.070.000,00	7.940.000,00	-	-	-	-	-	-

6

	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Anggaran	Realisasi
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	997.000,00	852.500,00	-	-	-	-	-	-
2.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.000.000,00	899.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	11.400.000,00	10.300.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15.01.2.03.06	Perencanaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.400.000,00	10.300.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.888.000,00	2.268.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.800.000,00	1.778.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15.01.2.05.07	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3.794.000,00	490.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15.01.2.05.11	Seminar Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3.294.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	77.153.500,00	74.991.550,00	-	-	-	-	-	-
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.985.000,00	11.470.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	450.000,00	397.500,00	-	-	-	-	-	-
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Dataran dan Penggandaan	7.043.000,00	5.965.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15.01.2.06.08	Facilitas Kumpulan Tamu	2.987.500,00	2.800.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15.01.2.06.09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54.688.000,00	54.399.050,00	-	-	-	-	-	-
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Perungjung Urusan Pemerintah Daerah	-	-	57.527.840,00	50.229.090,00	-	-	-	-
2.15.01.2.07.08	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	54.992.750,00	32.990.000,00	-	-	-	-
2.15.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	-	-	22.535.090,00	17.239.090,00	-	-	-	-
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Perungjung Urusan Pemerintahan Daerah	150.233.250,00	144.589.625,00	-	-	-	-	-	-
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.960.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	148.273.250,00	143.589.625,00	-	-	-	-	-	-

hw

	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.1801.2.01	Pemeliharaan Bering Milik Daerah Pemanjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.024.000,00	51.866.200,00	-	-	-	-	-	-
2.1801.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.980.000,00	41.891.250,00	-	-	-	-	-	-
2.1801.2.09.06	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2.1801.2.09.07	Pemeliharaan Aed Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1801.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung, Kantor dan Bangunan Lainnya	11.994.000,00	5.725.000,00	-	-	-	-	-	-
2.1801.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000,00	4.250.000,00	-	-	-	-	-	-
2.1802	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SANGK KEPEREMUDAAN	181.825.750,00	182.114.587,00	-	-	-	-	-	-
2.1802.2.01	Penyediaan, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	181.825.750,00	182.114.587,00	-	-	-	-	-	-
2.1802.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapastias Daya Sangk Pemuda Pelopor	102.667.000,00	98.704.987,00	-	-	-	-	-	-
2.1802.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapastias Daya Sang Pemuda Kader Kabupaten/Kota	79.158.750,00	63.409.700,00	-	-	-	-	-	-
2.1802.2.01.04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Pergunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminasi, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1803	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SANGK KEOLAHRAGAAN	1.281.496.376,00	1.237.730.860,00	87.713.310,00	81.444.810,00	-	-	-	-

	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Anggaran	Realisasi
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
2.18.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jaring Pendidikan yang Berjeda Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	115.804.978,00	104.320.850,00	87.713.310,00	81.444.810,00	-	-	-	-
2.18.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	115.804.978,00	104.320.850,00	87.713.310,00	81.444.810,00	-	-	-	-
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuruan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	1.365.991.400,00	1.133.410.210,00	-	-	-	-	-	-
2.19.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuruan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	118.525.000,00	104.341.000,00	-	-	-	-	-	-
2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuruan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	44.130.000,00	28.955.000,00	-	-	-	-	-	-
2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuruan	1.005.236.400,00	999.713.210,00	-	-	-	-	-	-
2.21	PERSANDIAN	53.857.000,00	47.267.900,00	-	-	-	-	-	-
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	53.057.000,00	47.267.900,00	-	-	-	-	-	-
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	38.641.000,00	35.414.600,00	-	-	-	-	-	-
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	24.829.000,00	23.630.500,00	-	-	-	-	-	-
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	13.814.000,00	11.784.100,00	-	-	-	-	-	-
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sende Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	14.414.000,00	11.853.300,00	-	-	-	-	-	-
2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sende Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	14.414.000,00	11.853.300,00	-	-	-	-	-	-
2.22	KEBUDAYAAN	647.272.220,00	625.649.467,00	1.096.121.000,00	1.045.120.000,00	-	-	-	-
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	581.258.120,00	562.702.567,00	-	-	-	-	-	-
2.22.02.2.01	Pengabdian Kebudayaan yang Masyarakat Pelaksananya dalam Daerah Kabupaten/Kota	581.258.120,00	562.702.567,00	-	-	-	-	-	-

	Urutan Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Anggaran	Realisasi
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
2.22.02.2.01.01	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Peringatan Kebudayaan	458.234.220,00	448.389.847,00	-	-	-	-	-	-
2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	125.024.000,00	114.332.720,00	-	-	-	-	-	-
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	64.014.000,00	62.946.900,00	1.096.121.000,00	1.045.120.000,00	-	-	-	-
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	63.564.000,00	62.946.900,00	-	-	-	-	-	-
2.22.05.2.01.02	Penetapan Cagar Budaya	63.564.000,00	62.946.900,00	-	-	-	-	-	-
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	490.000,00	-	1.096.121.000,00	1.045.120.000,00	-	-	-	-
2.22.05.2.02.01	Perlindungan Cagar Budaya	490.000,00	-	1.096.121.000,00	1.045.120.000,00	-	-	-	-
2.23	PERPUSTAKAAN	2.263.901.399,00	2.167.134.387,00	21.367.500,00	21.367.500,00	-	-	-	-
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.993.292.069,00	1.896.766.086,00	21.367.500,00	21.367.500,00	-	-	-	-
2.23.01.2.01	Pencapaian, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.342.500,00	5.342.500,00	-	-	-	-	-	-
2.23.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Pencapaian Perangkat Daerah	2.152.500,00	2.152.500,00	-	-	-	-	-	-
2.23.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.580.000,00	1.580.000,00	-	-	-	-	-	-
2.23.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-
2.23.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	1.610.000,00	1.610.000,00	-	-	-	-	-	-
2.23.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.641.431.895,00	1.557.599.799,00	-	-	-	-	-	-
2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.633.751.895,00	1.552.319.799,00	-	-	-	-	-	-
2.23.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pencapaian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.680.000,00	5.280.000,00	-	-	-	-	-	-
2.23.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	11.400.000,00	11.400.000,00	-	-	-	-	-	-
2.23.01.2.03.04	Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.400.000,00	11.400.000,00	-	-	-	-	-	-
2.23.01.2.08	Administrasi Umum Perangkat Daerah	72.241.350,00	69.769.820,00	-	-	-	-	-	-
2.23.01.2.08.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.315.350,00	-	-	-	-	-	-	-

hw

	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Anggaran	Realisasi
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
2.2301.2.06.09	Pemeringkatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.525.000,00	63.791.820,00	-	-	-	-	-	-
2.2301.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	21.387.500,00	21.387.500,00	-	-	-	-
2.2301.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	21.387.500,00	21.387.500,00	-	-	-	-
2.2101.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	175.500.000,00	170.095.097,00	-	-	-	-	-	-
2.2301.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000,00	9.005.097,00	-	-	-	-	-	-
2.2301.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	163.500.000,00	161.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.2301.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87.376.324,00	82.668.850,00	-	-	-	-	-	-
2.2301.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.983.000,00	38.022.750,00	-	-	-	-	-	-
2.2301.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perorangan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	47.063.000,00	39.390.300,00	-	-	-	-	-	-
2.2301.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.330.324,00	5.255.800,00	-	-	-	-	-	-
2.2302	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	270.609.330,00	270.348.321,00	-	-	-	-	-	-
2.2302.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	270.609.330,00	270.348.321,00	-	-	-	-	-	-
2.2302.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	270.609.330,00	270.348.321,00	-	-	-	-	-	-
2.24	KEARSIPAN	86.405.000,00	80.495.434,00	-	-	-	-	-	-
2.2402	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	86.405.000,00	80.495.434,00	-	-	-	-	-	-
2.2402.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	86.405.000,00	80.495.434,00	-	-	-	-	-	-
2.2402.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	51.526.000,00	48.561.434,00	-	-	-	-	-	-
2.2402.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	34.879.000,00	31.934.000,00	-	-	-	-	-	-
3	WILAYAH PEMERINTAHAN PELAJARAN	17.496.175.326,28	16.503.435.181,01	306.156.000,00	295.779.800,00	-	-	-	-

	Urutan Urutan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Anggaran	Realisasi
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
3.28	KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.839.306.286,00	4.788.261.377,00	-	-	-	-	-	-
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.481.179.031,00	2.153.449.371,00	-	-	-	-	-	-
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	490.000,00	210.000,00	-	-	-	-	-	-
3.25.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	210.000,00	210.000,00	-	-	-	-	-	-
3.25.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	70.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.25.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	70.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.25.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	70.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.25.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	70.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.977.179.841,00	1.833.143.671,00	-	-	-	-	-	-
3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.925.804.841,00	1.824.843.671,00	-	-	-	-	-	-
3.25.01.2.02.03	Penyediaan Pembayaran dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11.575.000,00	8.500.000,00	-	-	-	-	-	-
3.25.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	19.050.000,00	18.600.000,00	-	-	-	-	-	-
3.25.01.2.03.08	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	19.050.000,00	18.600.000,00	-	-	-	-	-	-
3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13.613.200,00	13.593.300,00	-	-	-	-	-	-
3.25.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	13.613.200,00	13.593.300,00	-	-	-	-	-	-
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	297.338.090,00	290.443.300,00	-	-	-	-	-	-
3.25.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	356.000,00	70.000,00	-	-	-	-	-	-
3.25.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.292.000,00	6.375.000,00	-	-	-	-	-	-
3.25.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	288.690.090,00	283.998.300,00	-	-	-	-	-	-
3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Perangkat Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
3.25.01.2.07.05	Pengadaan Mobil	-	-	-	-	-	-	-	-
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Perundang Urusan Pemerintahan Daerah	171.870.400,00	159.407.500,00	-	-	-	-	-	-
3.25.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	-	-	-	-	-

66

	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Anggaran	Realisasi
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
1.25.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	171.870.400,00	155.407.500,00	-	-	-	-	-	-
1.25.01.2.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	41.637.500,00	36.051.600,00	-	-	-	-	-	-
1.25.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.480.000,00	33.469.600,00	-	-	-	-	-	-
1.25.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.157.500,00	2.582.000,00	-	-	-	-	-	-
1.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	2.316.387.255,00	2.313.138.596,00	-	-	-	-	-	-
1.25.03.2.01	Penggiatan Perangkasan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Gerakan Air Lainya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	2.304.285.155,00	2.301.062.906,00	-	-	-	-	-	-
1.25.03.2.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	2.092.717.475,00	2.091.462.906,00	-	-	-	-	-	-
1.25.03.2.01.03	Terjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	211.567.680,00	209.600.000,00	-	-	-	-	-	-
1.25.03.2.02	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	12.102.100,00	12.075.600,00	-	-	-	-	-	-
1.25.03.2.03.02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	12.102.100,00	12.075.600,00	-	-	-	-	-	-
1.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	41.740.000,00	41.673.500,00	-	-	-	-	-	-
1.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyusunan Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	41.740.000,00	41.673.500,00	-	-	-	-	-	-
1.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	41.740.000,00	41.673.500,00	-	-	-	-	-	-
3.24	PARISWATA	2.897.138.600,00	2.770.984.961,00	42.706.000,00	42.656.000,00	-	-	-	-
1.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.547.096.600,00	2.524.572.150,00	42.706.000,00	42.656.000,00	-	-	-	-
1.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.782.000,00	12.690.300,00	-	-	-	-	-	-
1.26.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.100.000,00	1.078.500,00	-	-	-	-	-	-

4

	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
		Operasi		Modal		Tidak Tertuga		Anggaran	Realisasi
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
1.26.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.390.000,00	1.378.408,00	-	-	-	-	-	-
1.26.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.342.000,00	1.312.600,00	-	-	-	-	-	-
1.26.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.162.500,00	1.159.220,00	-	-	-	-	-	-
1.26.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.578.000,00	1.561.280,00	-	-	-	-	-	-
1.26.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	2.586.500,00	2.573.200,00	-	-	-	-	-	-
1.26.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.133.500,00	3.127.040,00	-	-	-	-	-	-
1.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.992.842.109,00	1.902.075.449,00	-	-	-	-	-	-
1.26.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.981.452.109,00	1.890.686.009,00	-	-	-	-	-	-
1.26.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban/Verifikasi Keuangan SKPD	11.390.000,00	11.389.440,00	-	-	-	-	-	-
1.26.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	16.200.000,00	16.200.000,00	-	-	-	-	-	-
1.26.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16.200.000,00	16.200.000,00	-	-	-	-	-	-
1.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	327.612.000,00	323.655.893,00	-	-	-	-	-	-
1.26.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Kerja	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.26.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	325.612.000,00	323.655.893,00	-	-	-	-	-	-
1.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Peruntukan Urusan Pemerintah Daerah	260.000,00	-	42.796.000,00	42.656.000,00	-	-	-	-
1.26.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	260.000,00	-	42.796.000,00	42.656.000,00	-	-	-	-
1.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Perungjung Urusan Pemerintahan Daerah	248.130.000,00	237.750.000,00	-	-	-	-	-	-
1.26.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	570.000,00	500.000,00	-	-	-	-	-	-
1.26.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.560.000,00	6.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.26.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	241.000.000,00	231.250.000,00	-	-	-	-	-	-
1.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perungjung Urusan Pemerintahan Daerah	49.250.000,00	38.300.500,00	-	-	-	-	-	-

	Urutan Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.26.01.2.01.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.580.000,00	37.350.500,00	-	-	-	-	-	-
1.26.01.2.01.02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lain-lain	4.670.000,00	850.000,00	-	-	-	-	-	-
1.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	250.043.000,00	246.432.811,00	-	-	-	-	-	-
1.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	250.043.000,00	246.432.811,00	-	-	-	-	-	-
1.26.03.2.01.02	Realisasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	250.043.000,00	246.432.811,00	-	-	-	-	-	-
1.27	PERTANIAN	6.580.848.758,00	6.009.901.863,00	1.200.000,00	-	-	-	-	-
1.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.036.737.973,00	5.491.271.383,00	-	-	-	-	-	-
1.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.331.525,00	15.198.800,00	-	-	-	-	-	-
1.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.440.530,00	3.362.150,00	-	-	-	-	-	-
1.27.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.994.575,00	2.904.200,00	-	-	-	-	-	-
1.27.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.988.500,00	2.907.500,00	-	-	-	-	-	-
1.27.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.953.750,00	2.953.800,00	-	-	-	-	-	-
1.27.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.958.150,00	2.911.350,00	-	-	-	-	-	-
1.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.288.132.298,00	4.785.836.140,00	-	-	-	-	-	-
1.27.01.2.02.01	Penyediaan Cad dan Tunjangan ASN	5.258.142.928,00	4.757.831.640,00	-	-	-	-	-	-
1.27.01.2.02.03	Penaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	29.989.370,00	27.804.500,00	-	-	-	-	-	-
1.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	22.963.875,00	22.963.750,00	-	-	-	-	-	-
1.27.01.2.03.02	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	22.963.875,00	22.963.750,00	-	-	-	-	-	-
1.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	301.704.500,00	291.364.000,00	-	-	-	-	-	-
1.27.01.2.06.01	Peningkatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	301.704.500,00	291.364.000,00	-	-	-	-	-	-

6

	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kolompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah	191.845.775,00	184.757.787,00	-	-	-	-	-	-
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Kimunkes, Sumber Daya Air dan Listrik	8.600.000,00	7.205.867,00	-	-	-	-	-	-
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	183.245.775,00	177.552.500,00	-	-	-	-	-	-
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah	215.680.000,00	183.350.900,00	-	-	-	-	-	-
3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	87.460.000,00	56.425.700,00	-	-	-	-	-	-
3.27.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Alat Besar	129.200.000,00	126.925.200,00	-	-	-	-	-	-
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	43.574.000,00	27.137.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	6.130.000,00	2.180.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	3.900.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	2.230.000,00	2.180.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	32.984.000,00	22.797.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27.02.2.02.02	Peringkatan Kualitas SDG Hewan / Tanaman	29.584.000,00	19.437.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	3.400.000,00	3.360.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran bibit/Bibit Ternak, dari Hewan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten / Kota	4.560.000,00	2.180.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27.02.2.05.09	Pengendalian Penyediaan Derivatif/Bibit Ternak dan Hewan Pakan Ternak	4.560.000,00	2.150.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-	1.380.000,00	-	-	-	-	-
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	-	-	1.380.000,00	-	-	-	-	-

	Urutan Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Anggaran	Realisasi
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
1.22.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	-	-	1.280.000,00	-	-	-	-	-
1.22.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	30.050.000,00	30.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.22.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	30.050.000,00	30.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.22.05.2.01.07	Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	30.050.000,00	30.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.22.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	470.394.785,00	461.493.500,00	-	-	-	-	-	-
1.22.07.2.03	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	470.394.785,00	461.493.500,00	-	-	-	-	-	-
1.22.07.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	461.564.785,00	457.743.500,00	-	-	-	-	-	-
1.22.07.2.03.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	7.830.000,00	3.750.000,00	-	-	-	-	-	-
3.38	PERDAGANGAN	225.797.100,00	144.310.800,00	210.000.000,00	201.773.000,00	-	-	-	-
3.38.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	225.797.100,00	144.310.800,00	210.000.000,00	201.773.000,00	-	-	-	-
3.38.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	225.797.100,00	144.310.800,00	210.000.000,00	201.773.000,00	-	-	-	-
3.38.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	81.641.700,00	155.400,00	210.000.000,00	201.773.000,00	-	-	-	-
3.38.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	144.155.400,00	144.155.400,00	-	-	-	-	-	-
3.31	PERINDUSTRIAN	2.921.626.973,28	2.839.484.681,00	52.170.000,00	51.350.000,00	-	-	-	-
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.336.745.526,00	2.260.858.791,00	52.170.000,00	51.350.000,00	-	-	-	-
3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.670.729.246,00	1.796.825.031,00	-	-	-	-	-	-
3.31.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.809.543.846,00	1.786.173.631,00	-	-	-	-	-	-
3.31.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11.195.400,00	10.655.400,00	-	-	-	-	-	-
3.31.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	17.124.000,00	16.200.000,00	-	-	-	-	-	-
3.31.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	17.124.000,00	16.200.000,00	-	-	-	-	-	-
3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	277.396.500,00	270.191.400,00	-	-	-	-	-	-

4

	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Tertaga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
3.31.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	2.998.000,00	2.898.000,00	-	-	-	-	-	-
3.31.01.2.06.09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SIPD	268.398.500,00	267.193.400,00	-	-	-	-	-	-
3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	203.000,00	200.000,00	52.170.000,00	51.350.000,00	-	-	-	-
3.31.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	203.000,00	200.000,00	52.170.000,00	51.350.000,00	-	-	-	-
3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	129.547.780,00	129.525.350,00	-	-	-	-	-	-
3.31.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.000.000,00	3.994.750,00	-	-	-	-	-	-
3.31.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	125.547.780,00	125.530.600,00	-	-	-	-	-	-
3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.645.000,00	47.641.000,00	-	-	-	-	-	-
3.31.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Iklan Pejak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	47.645.000,00	47.641.000,00	-	-	-	-	-	-
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	594.881.447,28	578.837.900,00	-	-	-	-	-	-
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	594.881.447,28	578.837.900,00	-	-	-	-	-	-
3.31.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Penyelesaian Industri	46.037.000,00	43.673.900,00	-	-	-	-	-	-
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	538.844.447,28	534.864.000,00	-	-	-	-	-	-
3.31	TRANSMIGRASI	31.459.600,00	30.481.500,00	-	-	-	-	-	-
3.32.02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	31.459.600,00	30.481.500,00	-	-	-	-	-	-
3.32.02.2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	31.459.600,00	30.481.500,00	-	-	-	-	-	-
3.32.02.2.01.04	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	31.459.600,00	30.481.500,00	-	-	-	-	-	-
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	38.422.545.205,00	38.358.949.811,00	4.029.497.729,00	3.971.728.370,00	-	-	-	-

	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Anggaran	Realisasi
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	33.968.523.199,00	31.663.185.233,00	1.788.571.539,00	1.757.510.570,00	-	-	-	-
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	30.732.109.579,00	28.579.742.488,00	1.788.571.539,00	1.757.510.570,00	-	-	-	-
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.421.273.297,00	11.784.149.344,00	-	-	-	-	-	-
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.380.359.787,00	11.745.297.344,00	-	-	-	-	-	-
4.01.01.2.02.03	Penyediaan Perencanaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	40.913.500,00	38.852.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	37.351.425,00	36.574.400,00	-	-	-	-	-	-
4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	37.351.425,00	36.574.400,00	-	-	-	-	-	-
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21.912.000,00	11.253.400,00	-	-	-	-	-	-
4.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	21.912.000,00	11.253.400,00	-	-	-	-	-	-
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.058.082.545,00	4.997.269.820,00	4.997.000,00	4.975.000,00	-	-	-	-
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Perakitan dan Perengkapan Kantor	-	-	4.997.000,00	4.975.000,00	-	-	-	-
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.993.045,00	8.539.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01.01.2.06.08	Facilitas Kunjungan Tamu	683.890.000,00	633.112.500,00	-	-	-	-	-	-
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.765.199.500,00	4.355.817.320,00	-	-	-	-	-	-
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.563.593.235,00	1.532.762.600,00	-	-	-	-
4.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Pemeliharaan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	252.100.000,00	252.100.000,00	-	-	-	-
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Listriki	-	-	1.311.493.235,00	1.280.662.600,00	-	-	-	-
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.633.190.358,00	5.667.372.604,00	-	-	-	-	-	-
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	353.650.000,00	307.794.730,00	-	-	-	-	-	-
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.279.540.358,00	5.359.577.874,00	-	-	-	-	-	-
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.644.212.272,00	2.411.806.043,00	219.983.300,00	219.772.970,00	-	-	-	-
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.738.291.800,00	1.587.981.751,00	-	-	-	-	-	-

lu

	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	161.806.300,00	83.581.781,00	-	-	-	-	-	-
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	744.313.883,00	740.230.511,00	219.983.300,00	219.772.970,00	-	-	-	-
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	732.637.177,00	663.579.743,00	-	-	-	-	-	-
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	196.030.937,00	167.960.406,00	-	-	-	-	-	-
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Akibat Kekurangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	297.018.240,00	294.900.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	18.100.000,00	14.032.677,00	-	-	-	-	-	-
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	221.480.000,00	186.688.680,00	-	-	-	-	-	-
4.01.01.2.12	Facilitas Kereaktifan Sekretaris Daerah	1.365.605.280,00	1.215.599.030,00	-	-	-	-	-	-
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	754.702.960,00	726.953.830,00	-	-	-	-	-	-
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	561.254.320,00	470.967.200,00	-	-	-	-	-	-
4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah	8.738.000,00	8.658.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01.01.2.13	Peningkatan Organisasi	218.545.750,00	213.852.880,00	-	-	-	-	-	-
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	25.781.000,00	25.007.606,00	-	-	-	-	-	-
4.01.01.2.13.02	Facilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	55.780.750,00	53.425.280,00	-	-	-	-	-	-
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	125.134.000,00	133.620.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.379.209.475,00	1.376.286.234,00	-	-	-	-	-	-
4.01.01.2.14.01	Facilitas Keprwakilan	736.948.875,00	736.831.204,00	-	-	-	-	-	-
4.01.01.2.14.02	Facilitas Komunikasi Pimpinan	370.253.000,00	369.756.243,00	-	-	-	-	-	-
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	472.007.600,00	471.396.787,00	-	-	-	-	-	-

	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
4.01.02	PROGRAM POKERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	2.273.313.000,00	2.624.476.497,00	-	-	-	-	-	-
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	2.445.843.000,00	2.298.855.718,00	-	-	-	-	-	-
4.01.02.2.02.01	Fasilitas Pengiriman Bina Mental Spiritual	1.422.333.400,00	1.322.864.253,00	-	-	-	-	-	-
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Tokoh	1.023.709.600,00	875.171.465,00	-	-	-	-	-	-
4.01.02.2.03	Fasilitas dan Koordinasi Hukum	127.470.000,00	126.440.779,00	-	-	-	-	-	-
4.01.02.2.03.01	Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	48.360.000,00	48.352.100,00	-	-	-	-	-	-
4.01.02.2.03.02	Fasilitas Bantuan Hukum	243.646.000,00	242.689.979,00	-	-	-	-	-	-
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	35.464.000,00	35.398.700,00	-	-	-	-	-	-
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	463.100.620,00	458.886.248,00	-	-	-	-	-	-
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	73.629.620,00	70.837.498,00	-	-	-	-	-	-
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	73.629.620,00	70.837.498,00	-	-	-	-	-	-
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	129.995.800,00	129.982.100,00	-	-	-	-	-	-
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	129.995.800,00	129.982.100,00	-	-	-	-	-	-
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	259.475.200,00	258.066.650,00	-	-	-	-	-	-
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	155.462.400,00	155.389.900,00	-	-	-	-	-	-
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	79.474.000,00	78.590.250,00	-	-	-	-	-	-
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	24.538.800,00	24.086.500,00	-	-	-	-	-	-
4.01	SEKRETARIAT DPRD	25.454.022.000,00	24.687.844.698,00	2.230.928.190,00	2.214.217.800,00	-	-	-	-
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEKERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.157.678.136,00	17.422.778.833,00	2.230.928.190,00	2.214.217.800,00	-	-	-	-
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52.427.940,00	50.685.500,00	-	-	-	-	-	-
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	42.095.800,00	40.794.200,00	-	-	-	-	-	-
4.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-DPRD	941.500,00	837.800,00	-	-	-	-	-	-
4.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan RKA-DPRD	1.748.250,00	1.428.750,00	-	-	-	-	-	-

	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kekompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
4.0201.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.141.190,00	2.078.500,00	-	-	-	-	-	-
4.0201.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	2.452.900,00	2.834.350,00	-	-	-	-	-	-
4.0201.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.948.300,00	2.913.100,00	-	-	-	-	-	-
4.0201.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.060.158.823,00	1.988.170.528,00	-	-	-	-	-	-
4.0201.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.041.487.148,00	1.967.811.028,00	-	-	-	-	-	-
4.0201.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	16.105.000,00	16.080.000,00	-	-	-	-	-	-
4.0201.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.087.800,00	1.070.200,00	-	-	-	-	-	-
4.0201.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.878.875,00	1.207.300,00	-	-	-	-	-	-
4.0201.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.800.000,00	13.800.000,00	-	-	-	-	-	-
4.0201.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.800.000,00	13.800.000,00	-	-	-	-	-	-
4.0201.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.896.000,00	12.885.600,00	-	-	-	-	-	-
4.0201.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12.896.000,00	12.885.600,00	-	-	-	-	-	-
4.0201.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	526.370.720,00	517.873.850,00	-	-	-	-	-	-
4.0201.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.114.470,00	21.383.000,00	-	-	-	-	-	-
4.0201.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	128.621.250,00	130.177.500,00	-	-	-	-	-	-
4.0201.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	376.435.000,00	376.433.350,00	-	-	-	-	-	-
4.0201.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Peringkat Urutan Pemerintah Daerah	630.000,00	-	2.211.223.690,00	2.207.567.800,00	-	-	-	-
4.0201.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	1.545.500.000,00	1.545.500.000,00	-	-	-	-
4.0201.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	630.000,00	-	321.388.490,00	320.917.800,00	-	-	-	-
4.0201.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	344.455.200,00	341.150.000,00	-	-	-	-
4.0201.2.08	Penyediaan Jasa Peringkat Urutan Pemerintahan Daerah	2.543.478.400,00	2.477.492.389,00	19.702.500,00	6.650.000,00	-	-	-	-
4.0201.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.938.600,00	3.330.000,00	-	-	-	-	-	-

6

	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Anggaran	Realisasi
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
4.0201.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	152.042.620,00	146.880.189,00	-	-	-	-	-	-
4.0201.2.08.01	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	76.299.180,00	60.623.250,00	29.702.500,00	6.650.000,00	-	-	-	-
4.0201.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.310.198.000,00	2.266.658.950,00	-	-	-	-	-	-
4.0201.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Peruntukan Urusan Pemerintahan Daerah	315.685.720,00	314.058.600,00	-	-	-	-	-	-
4.0201.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Sebatan	216.625.000,00	215.226.000,00	-	-	-	-	-	-
4.0201.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.132.700,00	15.056.650,00	-	-	-	-	-	-
4.0201.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	84.118.000,00	83.775.750,00	-	-	-	-	-	-
4.0201.2.15	Layanan Keuangan dan Konsultansi DPRD	7.999.365.533,00	7.417.941.871,00	-	-	-	-	-	-
4.0201.2.15.01	Peningkatan Administrasi Keuangan DPRD	7.536.237.533,00	7.000.541.971,00	-	-	-	-	-	-
4.0201.2.15.02	Penyediaan Pakaihan Dinas dan Atribut DPRD	373.121.000,00	372.499.900,00	-	-	-	-	-	-
4.0201.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	90.007.000,00	44.500.000,00	-	-	-	-	-	-
4.0201.2.16	Layanan Administrasi DPRD	4.632.666.000,00	4.631.869.095,00	-	-	-	-	-	-
4.0201.2.16.03	Facilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	4.632.666.000,00	4.631.869.095,00	-	-	-	-	-	-
4.0202	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	7.296.342.870,00	7.265.065.865,00	-	-	-	-	-	-
4.0202.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	757.245.720,00	744.265.410,00	-	-	-	-	-	-
4.0202.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	275.460.000,00	265.593.110,00	-	-	-	-	-	-
4.0202.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	17.482.500,00	17.337.500,00	-	-	-	-	-	-
4.0202.2.01.03	Peningkatan Kajian Perundang-Undangan	44.516.920,00	42.370.180,00	-	-	-	-	-	-
4.0202.2.01.04	Facilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	417.200.000,00	417.200.000,00	-	-	-	-	-	-
4.0202.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	2.586.300,00	1.804.700,00	-	-	-	-	-	-
4.0202.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	152.211.500,00	150.957.800,00	-	-	-	-	-	-
4.0202.2.02.01	Pembahasan KJA dan PPKS	18.721.250,00	18.687.500,00	-	-	-	-	-	-

64

	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Anggaran	Realisasi
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Peraturan Etik dan Perubahan PPAS	16.731.250,00	16.675.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	28.687.250,00	28.513.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	28.687.250,00	28.418.300,00	-	-	-	-	-	-
4.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester	28.687.250,00	27.966.400,00	-	-	-	-	-	-
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	28.687.250,00	28.385.600,00	-	-	-	-	-	-
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	5.474.634.700,00	5.461.600.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02.02.2.04.01	Orientasi DPRD	440.457.500,00	434.769.250,00	-	-	-	-	-	-
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	4.371.140.000,00	4.365.597.750,00	-	-	-	-	-	-
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pokok dan Tim Ahli	360.070.000,00	360.000.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	117.000.000,00	117.000.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02.02.2.04.06	Penyenggaraan Hubungan Masyarakat	170.143.200,00	170.090.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	3.108.000,00	2.680.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02.02.2.04.08	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12.693.000,00	11.553.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	127.500,00	-	-	-	-	-	-	-
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	127.500,00	-	-	-	-	-	-	-
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02.02.2.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	912.123.450,00	908.662.655,00	-	-	-	-	-	-
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	809.493.400,00	808.629.255,00	-	-	-	-	-	-
4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	5.000.550,00	4.673.400,00	-	-	-	-	-	-
4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	4.938.000,00	4.200.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	2.041.500,00	1.160.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02.02.2.08.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	600.000,00	-	-	-	-	-	-	-

44

	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Anggaran	Realisasi
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	35.092.411.107,45	28.914.478.798,00	282.570.135,00	268.525.500,00	2.852.134.000,00	1.661.945.000,00	101.177.261.963,00	102.816.957.425,00
5.01	PERENCANAAN	8.322.484.363,00	7.904.847.840,00	198.356.835,00	183.647.000,00	-	-	-	-
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/SOTA	4.990.193.299,00	4.750.192.596,00	198.356.835,00	183.647.000,00	-	-	-	-
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.935.045,00	26.500.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.689.640,00	12.456.700,00	-	-	-	-	-	-
5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKD-SKPD	2.776.185,00	2.330.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.953.710,00	2.496.350,00	-	-	-	-	-	-
5.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPP- SKPD	2.149.080,00	2.102.500,00	-	-	-	-	-	-
5.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPP-SKPD	2.393.165,00	2.301.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.873.270,00	4.813.250,00	-	-	-	-	-	-
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.218.236.487,00	4.023.214.633,00	-	-	-	-	-	-
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.007.805.487,00	4.013.014.833,00	-	-	-	-	-	-
5.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	10.431.000,00	10.200.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	18.650.000,00	18.600.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	18.650.000,00	18.600.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	230.697.310,00	229.961.890,00	-	-	-	-	-	-
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.324.500,00	3.211.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01.01.2.06.08	Fasilitas Kurungan Tantu	2.232.500,00	2.187.500,00	-	-	-	-	-	-
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	225.160.310,00	224.563.390,00	-	-	-	-	-	-
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	128.330,00	-	198.356.835,00	183.647.000,00	-	-	-	-
5.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Operasional atau Lapangan	53.320,00	-	33.458.175,00	31.450.000,00	-	-	-	-
5.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.000,00	-	164.898.660,00	152.197.000,00	-	-	-	-
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	440.255.227,00	403.001.573,00	-	-	-	-	-	-
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	97.242.000,00	87.673.673,00	-	-	-	-	-	-

	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
		Operasi		Modal		Tidak Terbuka		Anggaran	Realisasi
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	343.013.227,00	335.338.100,00	-	-	-	-	-	-
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Bangun Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.290.900,00	48.914.500,00	-	-	-	-	-	-
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.490.300,00	44.076.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.250.000,00	858.500,00	-	-	-	-	-	-
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Persewaan dan Mesin Listrik	6.550.600,00	3.980.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	3.441.885.710,00	3.350.471.343,00	-	-	-	-	-	-
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	3.148.068.560,00	3.077.705.943,00	-	-	-	-	-	-
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	18.481.500,00	12.100.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah / Untas Perangkat Daerah	9.672.100,00	9.410.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musorbang Kabupaten/Kota	27.716.700,00	19.354.500,00	-	-	-	-	-	-
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1.092.138.260,00	1.036.941.443,00	-	-	-	-	-	-
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	242.826.150,00	227.871.500,00	-	-	-	-	-	-
5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	202.829.500,00	190.661.500,00	-	-	-	-	-	-
5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	39.999.650,00	37.209.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	51.048.000,00	49.893.900,00	-	-	-	-	-	-
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	51.048.000,00	49.893.900,00	-	-	-	-	-	-

6

	Urutan Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Anggaran	Realisasi
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.800.415.354,00	1.804.183.981,00	-	-	-	-	-	-
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Masyarakat	465.152.520,00	426.973.693,00	-	-	-	-	-	-
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Masyarakat	239.186.130,00	218.811.180,00	-	-	-	-	-	-
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Masyarakat	225.966.390,00	208.162.513,00	-	-	-	-	-	-
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	516.299.494,00	488.227.788,00	-	-	-	-	-	-
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RPJPD)	263.316.921,00	266.260.469,00	-	-	-	-	-	-
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	71.017.548,00	67.181.800,00	-	-	-	-	-	-
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RPJPD)	98.142.000,00	90.959.200,00	-	-	-	-	-	-
5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	63.923.025,00	61.826.300,00	-	-	-	-	-	-
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Pemasaran	908.863.340,00	888.982.439,00	-	-	-	-	-	-
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	-	-	-	-	-	-	-	-
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	615.815.120,00	598.902.455,00	-	-	-	-	-	-

	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Anggaran	Realisasi
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kesejahteraan	-	-	-	-	-	-	-	-
5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan	293.248.220,00	293.079.984,00	-	-	-	-	-	-
5.02	KEUANGAN	21.496.059.956,45	15.963.948.560,00	60.106.500,00	59.549.500,00	2.852.134.000,00	1.661.945.000,00	103.177.261.963,00	102.816.957.425,00
5.02.01	PROGRAM PERJUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.111.705.561,45	11.301.876.254,00	60.106.500,00	59.549.500,00	-	-	-	-
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.765.499.878,45	6.524.637.903,00	-	-	-	-	-	-
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.470.800.379,45	6.429.793.403,00	-	-	-	-	-	-
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	94.890.500,00	94.844.500,00	-	-	-	-	-	-
5.02.01.2.03	Administrasi Berang Milk Daerah pada Perangkat Daerah	47.765.000,00	36.600.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02.01.2.03.06	Penatausahaan Berang Milk Daerah pada SKPD	47.765.000,00	36.600.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.476.112.090,00	1.731.421.062,00	-	-	-	-	-	-
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.197.500,00	16.190.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.499.950,00	24.742.750,00	-	-	-	-	-	-
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.430.414.600,00	1.890.518.312,00	-	-	-	-	-	-
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milk Daerah Perundang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	60.106.500,00	59.549.500,00	-	-	-	-
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	-	-	60.106.500,00	59.549.500,00	-	-	-	-
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Perundang Urusan Pemerintahan Daerah	3.666.562.133,00	2.933.963.989,00	-	-	-	-	-	-
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.875.000,00	1.825.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	151.000.000,00	96.835.291,00	-	-	-	-	-	-
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.511.687.133,00	2.815.303.698,00	-	-	-	-	-	-

	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
5.0201.2.09	Pemeliharaan Biring Millik Daerah Penzriang Urusan Pemerintahan Daerah	155.368.500,00	75.233.300,00	-	-	-	-	-	-
5.0201.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan, Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55.000.000,00	40.117.300,00	-	-	-	-	-	-
5.0201.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Lainnya	78.016.500,00	12.605.000,00	-	-	-	-	-	-
5.0201.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.550.000,00	22.531.000,00	-	-	-	-	-	-
5.0202	PROGRAM PENGELOLAAN KEURANGAN DAERAH	3.426.196.733,00	2.352.088.727,00	-	-	2.852.124.000,00	1.681.945.000,00	103.177.261.963,00	112.816.957.425,00
5.0202.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.758.874.120,00	1.509.106.974,00	-	-	-	-	-	-
5.0202.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	46.950.900,00	43.592.295,00	-	-	-	-	-	-
5.0202.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	30.669.845,00	27.712.300,00	-	-	-	-	-	-
5.0202.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Penetapan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1.091.362.230,00	889.983.279,00	-	-	-	-	-	-
5.0202.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	541.951.815,00	515.367.300,00	-	-	-	-	-	-
5.0202.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	43.729.130,00	32.441.860,00	-	-	-	-	-	-
5.0202.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.098.794.255,00	932.340.383,00	-	-	-	-	801.385.142,00	587.031.875,00
5.0202.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	256.598.350,00	255.235.905,00	-	-	-	-	801.385.142,00	587.031.875,00
5.0202.2.02.05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	399.765.775,00	291.950.299,00	-	-	-	-	-	-

	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
		Operasi		Modal		Tidak Tertuga		Anggaran	Realisasi
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PEK)	134.507.030,00	119.941.943,00	-	-	-	-	-	-
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	307.923.100,00	265.252.226,00	-	-	-	-	-	-
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	570.228.358,00	510.641.390,00	-	-	-	-	-	-
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	227.030.931,00	175.640.640,00	-	-	-	-	-	-
5.02.02.2.03.04	Koordinasi Laporan Keuangan SKPD, SLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	235.044.512,00	223.697.100,00	-	-	-	-	-	-
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	113.152.915,00	111.303.750,00	-	-	-	-	-	-
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	500.000,00	-	-	-	2.852.134.000,00	1.661.945.000,00	102.375.676.821,00	102.229.925.590,00
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyusunan Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	-	102.375.676.821,00	102.229.925.590,00
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	500.000,00	-	-	-	2.852.134.000,00	1.661.945.000,00	-	-
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILK DAERAH	925.168.662,00	781.254.284,00	-	-	-	-	-	-
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milk Daerah	925.168.662,00	781.254.284,00	-	-	-	-	-	-
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	159.993.603,00	154.576.700,00	-	-	-	-	-	-
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milk Daerah	17.022.352,00	11.853.800,00	-	-	-	-	-	-
5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milk Daerah	33.512.000,00	32.149.550,00	-	-	-	-	-	-
5.02.03.2.01.05	Penyediaan Barang Milk Daerah	103.431.800,00	74.253.650,00	-	-	-	-	-	-
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milk Daerah	301.602.305,00	295.721.700,00	-	-	-	-	-	-
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milk Daerah	65.971.600,00	42.152.800,00	-	-	-	-	-	-

	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kedompok Belanja						Transfer	
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Anggaran	Realisasi
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Perencanaan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	151.938.983,00	110.072.100,00	-	-	-	-	-	-
5.02.03.2.01.11	Rekonstruksi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	16.767.757,00	11.245.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	22.177.294,00	18.960.494,00	-	-	-	-	-	-
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengesahan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	66.789.558,00	70.158.500,00	-	-	-	-	-	-
5.02.04	PROGRAM PENGELUARAN PENDAPATAN DAERAH	1.018.989.000,00	928.729.295,00	-	-	-	-	-	-
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengesahan Pendapatan Daerah	1.018.989.000,00	928.729.295,00	-	-	-	-	-	-
5.02.04.2.01.11	Pemagihan Pajak Daerah	308.386.180,00	229.725.350,00	-	-	-	-	-	-
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengesahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	710.602.820,00	699.003.945,00	-	-	-	-	-	-
5.05	KEPEGAWAIAN	4.072.657.131,00	3.857.707.481,00	24.087.000,00	23.330.000,00	-	-	-	-
5.0101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN MOGOTA	3.808.270.251,00	3.593.461.882,00	24.087.000,00	23.330.000,00	-	-	-	-
5.0301.3.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.707.000,00	2.694.500,00	-	-	-	-	-	-
5.0301.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.707.000,00	2.694.500,00	-	-	-	-	-	-
5.0301.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.179.509.081,00	2.977.781.678,00	-	-	-	-	-	-
5.0301.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.163.763.681,00	2.962.046.178,00	-	-	-	-	-	-
5.0301.2.02.03	Pelaksanaan Perencanaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15.745.399,00	15.735.500,00	-	-	-	-	-	-
5.0301.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	14.572.000,00	14.556.000,00	-	-	-	-	-	-
5.0301.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14.572.000,00	14.556.000,00	-	-	-	-	-	-
5.0301.3.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	327.744.730,00	327.461.347,00	-	-	-	-	-	-
5.0301.2.06.01	Penyediaan Kebutuhan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.218.430,00	6.641.000,00	-	-	-	-	-	-
5.0301.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	331.026.300,00	330.820.347,00	-	-	-	-	-	-

Ln

	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
5.0101.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	24.087.000,00	23.330.000,00	-	-	-	-
5.0101.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin, Lainnya	-	-	24.087.000,00	23.330.000,00	-	-	-	-
5.0301.2.06	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	218.828.950,00	206.791.600,00	-	-	-	-	-	-
5.0301.2.06.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	114.000.000,00	109.994.600,00	-	-	-	-	-	-
5.0301.2.06.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum, Kantor	104.828.950,00	96.797.000,00	-	-	-	-	-	-
5.0301.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.908.520,00	54.189.757,00	-	-	-	-	-	-
5.0301.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.526.000,00	37.819.457,00	-	-	-	-	-	-
5.0301.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gudang Kantor atau Bangunan Lainnya	16.382.520,00	16.370.300,00	-	-	-	-	-	-
5.0302	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	264.386.870,00	264.242.600,00	-	-	-	-	-	-
5.0302.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	218.477.000,00	218.386.000,00	-	-	-	-	-	-
5.0302.2.01.03	Kordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	218.477.000,00	218.386.000,00	-	-	-	-	-	-
5.0302.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	45.909.870,00	45.856.600,00	-	-	-	-	-	-
5.0302.2.02.02	Pengadaan Kembali Pangkat ASN	45.909.870,00	45.856.600,00	-	-	-	-	-	-
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	830.728.411,00	825.711.814,00	-	-	-	-	-	-
5.0402	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	830.728.411,00	825.711.814,00	-	-	-	-	-	-
5.0402.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	830.728.411,00	825.711.814,00	-	-	-	-	-	-
5.0402.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Manajerial	830.728.411,00	825.711.814,00	-	-	-	-	-	-
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	370.471.246,00	362.263.100,00	-	-	-	-	-	-
5.0502	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	370.471.246,00	362.263.100,00	-	-	-	-	-	-
5.0502.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	165.906.735,00	160.509.950,00	-	-	-	-	-	-

Lu

	Urutan Urutan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
		Operasi		Modal		Tidak Tertuga		Anggaran	Realisasi
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
5.05.02.2.01.04	Pendidikan dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	165.906.735,00	160.509.950,00	-	-	-	-	-	-
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	204.594.511,00	201.753.130,00	-	-	-	-	-	-
5.05.02.2.04.03	Otomisasi Jenis, Prosedur dan Metode Pendonggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	204.594.511,00	201.753.130,00	-	-	-	-	-	-
II	URUGR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	12.566.518.728,00	12.343.202.400,00	189.590.100,00	189.204.325,00	-	-	-	-
6.01	INSPEKTORAT	12.566.518.728,00	12.343.202.400,00	189.590.100,00	189.204.325,00	-	-	-	-
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	6.453.085.696,00	6.243.278.150,00	189.590.100,00	189.204.325,00	-	-	-	-
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.862.023,00	2.800.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	788.100,00	710.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	857.475,00	772.500,00	-	-	-	-	-	-
6.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	789.488,00	-	-	-	-	-	-	-
6.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	774.325,00	687.500,00	-	-	-	-	-	-
6.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	632.645,00	620.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	642.690,00	-	-	-	-	-	-	-
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	377.400,00	-	-	-	-	-	-	-
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.734.383.737,00	6.575.650.190,00	-	-	-	-	-	-
6.01.01.2.02.01	Penyediaan GejI dan Tunjangan ASN	6.706.115.111,00	6.547.828.490,00	-	-	-	-	-	-
6.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Privatiasuhan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	25.408.150,00	25.246.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	390.000,00	390.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	557.500,00	530.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.463.833,00	1.452.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan	498.163,00	493.750,00	-	-	-	-	-	-
6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.888.378,00	12.750.000,00	-	-	-	-	-	-

	Urutan Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kategori Belanja						Transfer	
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Anggaran	Realisasi
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
6.0101.2.01.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	799.200,00	720.000,00	-	-	-	-	-	-
6.0101.2.01.06	Pendaftaran Barang Milik Daerah pada SKPD	12.081.178,00	12.030.000,00	-	-	-	-	-	-
6.0101.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	879.081.730,00	856.459.135,00	-	-	-	-	-	-
6.0101.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	389.700,00	-	-	-	-	-	-	-
6.0101.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	778.403.630,00	767.256.592,00	-	-	-	-	-	-
6.0101.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100.207.400,00	89.202.543,00	-	-	-	-	-	-
6.0101.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	567.623.307,00	566.307.925,00	10.878.000,00	10.852.000,00	-	-	-	-
6.0101.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	213.130,00	195.000,00	10.878.000,00	10.852.000,00	-	-	-	-
6.0101.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	124.487,00	-	-	-	-	-	-	-
6.0101.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	6.543.050,00	6.816.650,00	-	-	-	-	-	-
6.0101.2.06.09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	580.342.650,00	559.296.275,00	-	-	-	-	-	-
6.0101.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	704.850,00	-	178.712.100,00	178.352.325,00	-	-	-	-
6.0101.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	704.850,00	-	178.712.100,00	178.352.325,00	-	-	-	-
6.0101.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	155.233.081,00	162.150.730,00	-	-	-	-	-	-
6.0101.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menerima	13.648.571,00	13.589.750,00	-	-	-	-	-	-
6.0101.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.357.420,00	3.353.500,00	-	-	-	-	-	-
6.0101.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	178.225.910,00	165.205.500,00	-	-	-	-	-	-
6.0101.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.217.650,00	47.160.150,00	-	-	-	-	-	-
6.0101.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.630.800,00	47.160.150,00	-	-	-	-	-	-
6.0101.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertamax Kendaraan Dinas Operasional atau Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-

Se

	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Tertuga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
6.01.01.2.09.06	Perteliharaan Perbaikan dan Mesin Lain-lain	7.585.850,00	-	-	-	-	-	-	-
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.680.777.175,00	1.677.758.050,00	-	-	-	-	-	-
6.01.02.2.01	Penyenggaraan Pengawasan Internal	2.934.482.973,00	2.911.588.050,00	-	-	-	-	-	-
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	987.917.415,00	987.859.700,00	-	-	-	-	-	-
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	875.298.680,00	875.175.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01.02.2.01.03	Revisi Laporan Kinerja	494.353.580,00	494.276.950,00	-	-	-	-	-	-
6.01.02.2.01.04	Revisi Laporan Keuangan	43.499.867,00	43.270.150,00	-	-	-	-	-	-
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	264.629.220,00	264.240.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01.02.2.01.06	Korji Sama Pengawasan Internal	89.175.018,00	87.905.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APJH	179.609.188,00	178.861.250,00	-	-	-	-	-	-
6.01.02.2.02	Penyenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	746.294.200,00	746.170.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	746.294.200,00	746.170.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	432.735.859,00	422.166.200,00	-	-	-	-	-	-
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	84.355.126,00	83.741.100,00	-	-	-	-	-	-
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	80.529.688,00	80.126.700,00	-	-	-	-	-	-
6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	3.815.438,00	3.614.400,00	-	-	-	-	-	-
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	348.380.733,00	338.425.100,00	-	-	-	-	-	-
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	248.825.700,00	248.130.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	7.497.120,00	6.997.600,00	-	-	-	-	-	-
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencapaian dan Pemberantasan Korupsi	83.118.763,00	77.307.600,00	-	-	-	-	-	-
6.01.03.2.03.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	8.799.150,00	8.369.900,00	-	-	-	-	-	-
7	UNDAH KOWILAYAHAN	13.250.404.601,00	12.534.655.904,00	42.096.710,00	41.280.500,00	-	-	-	-
7.01	KECAMATAN	13.250.404.601,00	12.534.655.904,00	42.096.710,00	41.280.500,00	-	-	-	-

64

	Uraian Urutan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Anggaran	Realisasi
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
7.01.01	PROGRAM PERUBAHAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.030.991.240,00	12.373.735.804,00	42.096.710,00	41.280.500,00	-	-	-	-
7.01.01.2.01	Pencapaian, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.727.370,00	10.668.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.360.650,00	1.435.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.108.095,00	2.256.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.225.000,00	2.490.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.250.425,00	2.136.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.356.000,00	1.331.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.427.000,00	1.030.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.725.130.956,00	10.205.148.341,00	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.659.211.789,00	10.145.749.591,00	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.689.000,00	2.118.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.02.03	Penaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	58.732.607,00	53.517.150,00	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.398.800,00	1.903.600,00	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.100.000,00	1.860.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	60.008.350,00	56.780.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	60.008.350,00	56.780.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	41.595.100,00	31.761.400,00	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.05.01	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.423.100,00	580.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	727.500,00	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.05.11	Simbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	29.444.500,00	31.181.400,00	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.178.420.965,00	1.121.230.170,00	26.510.640,00	26.510.500,00	-	-	-	-

62

	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
		Operasi		Modal		Tidak Terbaga		Anggaran	Realisasi
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Koneksi Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.363.900,00	3.426.650,00	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000,00	-	26.510.640,00	26.510.500,00	-	-	-	-
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.487.630,00	5.722.150,00	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	21.194.875,00	18.973.290,00	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.343.074.540,00	1.093.108.170,00	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Perunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	15.386.070,00	14.770.000,00	-	-	-	-
7.01.01.2.07.08	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	15.386.070,00	14.770.000,00	-	-	-	-
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Perunjang Urusan Pemerintahan Daerah	699.269.751,00	665.963.480,00	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menerima	902.500,00	420.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.936.400,00	41.114.804,00	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	651.430.851,00	624.427.676,00	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perunjang Urusan Pemerintahan Daerah	308.740.714,00	282.185.483,00	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pejak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	269.790.694,00	246.716.183,00	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.765.100,00	5.587.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.182.920,00	28.882.300,00	-	-	-	-	-	-
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	91.714.400,00	89.561.825,00	-	-	-	-	-	-
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	91.714.400,00	89.561.825,00	-	-	-	-	-	-
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	73.233.550,00	62.302.691,00	-	-	-	-	-	-
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	18.480.850,00	2.258.975,00	-	-	-	-	-	-
7.01.03	PROGRAM PEMBUDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	18.559.280,00	11.354.930,00	-	-	-	-	-	-

Ca

	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Anggaran	Realisasi
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	10.559.280,00	11.354.900,00	-	-	-	-	-	-
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.559.280,00	11.354.900,00	-	-	-	-	-	-
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.542.500,00	-	-	-	-	-	-	-
7.01.04.7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.542.500,00	-	-	-	-	-	-	-
7.01.04.7.03.02	Memelihara Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1.542.500,00	-	-	-	-	-	-	-
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	107.597.175,00	80.003.175,00	-	-	-	-	-	-
7.01.06.2.01	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	107.597.175,00	80.003.175,00	-	-	-	-	-	-
7.01.06.2.01.02	Fasilitas Administrasi Tatal Pemerintahan Desa	13.827.525,00	10.275.275,00	-	-	-	-	-	-
7.01.06.2.01.03	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Holidaygahuaan Aset Desa	57.361.450,00	42.888.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01.06.2.01.09	Fasilitas Sinkronisasi Pemecahan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	3.188.700,00	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.06.2.01.11	Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	14.059.000,00	11.360.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.06.2.01.12	Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	17.003.500,00	11.128.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendorongan Desa di Wilayahnya	2.157.000,00	1.450.000,00	-	-	-	-	-	-
II	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	28.780.620.234,00	28.417.698.173,00	-	-	-	-	-	-
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	28.780.620.234,00	28.417.698.173,00	-	-	-	-	-	-
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.072.747.040,00	989.085.353,00	-	-	-	-	-	-
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.700.925,00	2.600.750,00	-	-	-	-	-	-
8.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RPA-SKPD	1.240.925,00	1.202.500,00	-	-	-	-	-	-
8.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RPA-SKPD	807.500,00	803.250,00	-	-	-	-	-	-

	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
R.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan CPA-SKPD	847.300,00	-	-	-	-	-	-	-
R.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD	805.000,00	595.000,00	-	-	-	-	-	-
R.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	847.462.470,00	805.589.828,00	-	-	-	-	-	-
R.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	830.382.470,00	798.509.828,00	-	-	-	-	-	-
R.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Perbukitan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	17.080.000,00	17.080.000,00	-	-	-	-	-	-
R.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	35.400.000,00	21.000.000,00	-	-	-	-	-	-
R.01.01.2.03.06	Perbukitan Barang Milik Daerah pada SKPD	35.400.000,00	21.000.000,00	-	-	-	-	-	-
R.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	98.370.345,00	83.351.000,00	-	-	-	-	-	-
R.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralihan dan Peralengkapan Kantor	19.593.205,00	11.285.000,00	-	-	-	-	-	-
R.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.469.890,00	6.885.000,00	-	-	-	-	-	-
R.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.307.450,00	65.181.000,00	-	-	-	-	-	-
R.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.634.500,00	41.224.500,00	-	-	-	-	-	-
R.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Melayan	2.834.500,00	1.912.000,00	-	-	-	-	-	-
R.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	45.000.000,00	39.312.500,00	-	-	-	-	-	-
R.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.178.800,00	35.319.185,00	-	-	-	-	-	-
R.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.178.800,00	35.319.185,00	-	-	-	-	-	-
R.01.02	PROGRAM PENGUKTAN IDEOLOGI PANCA-SILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.702.945.470,00	1.617.313.262,00	-	-	-	-	-	-
R.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.702.945.470,00	1.617.313.262,00	-	-	-	-	-	-
R.01.02.2.01.08	Pembentukan Panitia	1.702.945.470,00	1.617.313.262,00	-	-	-	-	-	-

40

	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Anggaran	Realisasi
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
B.01.01	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEHBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	25.752.414.724,00	25.760.993.548,00	-	-	-	-	-	-
B.01.01.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,	25.752.414.724,00	25.760.993.548,00	-	-	-	-	-	-
B.01.01.2.01.02	Penyusunan Bahan Penyusunan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pembantuan	289.622.929,00	289.333.033,00	-	-	-	-	-	-
B.01.01.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pembantuan Situasi Politik di Daerah	25.449.748.815,00	25.447.410.515,00	-	-	-	-	-	-
B.01.01.2.01.06	Pelaksanaan tugas Pensiunira	43.043.000,00	25.230.000,00	-	-	-	-	-	-
B.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	30.650.000,00	-	-	-	-	-	-	-
B.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	30.650.000,00	-	-	-	-	-	-	-
B.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	30.650.000,00	-	-	-	-	-	-	-

CH

	Unitas Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	192.763.000,00	50.306.100,00	-	-	-	-	-	-
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	192.763.000,00	50.306.100,00	-	-	-	-	-	-
8.01.06.2.01.01	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	192.763.000,00	50.306.100,00	-	-	-	-	-	-

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ISKANDAR KAMARU

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Tahun Anggaran 2024
Nomor : 1 Tahun 2025
Tanggal : 4 Agustus 2025



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	2024	2023
Saldo Anggaran Lebih Awal	45.570.594.736,51	65.365.829.545,30
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	45.881.232.973,51	64.356.838.666,30
Sub Total	(310.638.237,00)	1.008.990.879,00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	24.913.038.067,47	45.570.594.736,51
Sub Total	24.602.399.830,47	46.579.585.615,51
Koreksi SILPA	310.638.237,00	(1.008.990.879,00)
Saldo Anggaran Lebih Akhir	24.913.038.067,47	45.570.594.736,51

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ISKANDAR KAMARU



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2024	SALDO 2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
	KEGIATAN OPERASIONAL				
7	PENDAPATAN - LO	973.277.350.924,49	906.327.927.129,87	66.949.423.794,62	13,22
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	21.028.124.011,24	20.348.425.499,78	679.698.511,46	3,34
7.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	3.887.293.295,00	6.579.721.885,00	(2.692.428.590,00)	(19,00)
7.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	11.285.575.225,00	9.049.944.043,00	2.235.631.182,00	24,70
7.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dialihkahi - LO	646.020.257,00	532.989.435,00	113.030.822,00	20,29
7.1.4	Lain-lain PAD yang Sah - LO	3.115.236.130,24	4.185.740.116,78	(1.070.503.986,54)	(25,58)
7.2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	534.732.877.668,00	464.506.509.951,00	70.226.487.717,00	15,55
7.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	518.580.318.500,00	447.284.247.917,00	71.296.070.583,00	15,94
7.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah - Lainnya - LO	16.152.559.168,00	17.222.262.034,00	(609.702.866,00)	(3,54)
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	15.514.239.245,25	21.473.991.879,09	(5.959.752.633,84)	(27,74)
7.3.1	Pendapatan Hibah - LO	11.345.369.752,25	12.434.645.272,09	(6.989.276.519,84)	(34,00)
7.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LO	4.168.869.493,00	4.039.346.607,00	129.522.886,00	3,28
8	BEBAN	618.503.881.138,97	530.943.640.804,62	87.560.220.334,35	16,49
8.1.1	Beban Pegawai	225.946.227.257,00	201.404.279.733,00	24.541.947.524,00	12,00
8.1.2	Beban Barang dan Jasa	195.205.532.243,00	174.495.362.363,28	20.710.169.880,72	11,87
8.1.3	Beban Bunga	-	-	-	-
8.1.4	Beban Subsidi	898.000.000,00	-	898.000.000,00	-
8.1.5	Beban Hibah	33.246.983.172,00	10.026.022.767,00	23.220.960.405,00	231,61
8.1.6	Beban Bantuan Sosial	15.877.298.500,00	2.981.211.000,00	12.896.087.500,00	435,93
8.1.7	Beban Penyisihan Piutang	108.758.181,14	108.029.878,67	728.302,57	2,57
8.1.8	Beban Lain-lain	-	-	-	-
8.2.1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	24.907.442.385,20	25.562.393.431,30	(654.951.046,10)	(12,56)
8.2.2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	9.793.893.662,00	9.004.815.624,00	789.078.038,00	8,74
8.2.3	Beban Penyusutan Jalan, Jembatan dan Jangkar	71.267.763.632,00	66.087.477.961,00	5.180.285.671,00	8,63
8.2.4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	5.518.221,00	8.622.000,00	(3.103.779,00)	(14,67)
8.2.5	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	567.432.548,73	535.298.949,72	32.133.600,00	6,00
8.2.8	Beban Penyusutan Properti Investasi	48.076.800,00	48.076.800,00	-	-
8.3.1	Beban Beperluan	587.031.875,00	703.096.917,00	(116.027.042,00)	(16,50)
8.3.2	Beban Bantuan Keuangan	29.344.324.550,00	29.941.009.800,00	(596.685.250,00)	(2,00)
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(45.226.530.214,48)	(24.615.723.674,75)	(20.610.786.539,73)	83,73
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
7.4.1	Surplus Penyisihan Aset Non Lancar - LO	754.576.996,00	-	754.576.996,00	-
7.4.2	Surplus Penyisihan Kewajiban Jangka Panjang - LO	-	-	-	-
7.4.3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	(21.854.398,00)	-	(21.854.398,00)	-
8.5.1	Defisit Penyusutan Aset Non Lancar - LO	-	-	-	-
8.5.2	Defisit Penyusutan Kewajiban Jangka Panjang - LO	-	-	-	-
8.5.3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	-	-	-	-
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	732.722.598,00	-	732.722.598,00	-
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(44.493.797.616,48)	(24.615.723.674,75)	(19.878.043.941,73)	80,75

Ch

B.4.1	POS LUAR BIASA				
	Belanja Tak Tertutup	1.683.121.574,00	887.000.000,00	996.121.574,00	145,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	(1.683.121.574,00)	(687.900.000,00)	(996.121.574,00)	145,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(46.176.919.180,48)	(25.302.733.674,75)	(20.874.185.515,73)	82,50


 BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 ISKANDAR KAMARU

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Tahun Anggaran 2024

Nomor : 1 Tahun 2025
Tanggal : 4 Agustus 2025



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	1.137.063.931.898,81	1.163.399.662.897,06
SURPLUS/DEFISIT-LO	(46.176.919.190,48)	(25.302.733.674,75)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBLIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :		
Koreksi Nilai Persediaan	-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	-	-
Koreksi ekuitas lainnya	695.302.870,06	(1.032.997.323,50)
EKUITAS AKHIR	1.091.582.315.578,39	1.137.063.931.898,81

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN



ISKANDAR KAMARU



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NERACA

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	2024	2023
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Kas Daerah	23.934.782.662,18	44.523.090.013,51
Kas di Bendahara Penerimaan	43.964.550,00	6.872.500,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas di BLUD	-	-
Kas Dana BOSP	7.377.981,00	6.631.712,00
Kas Dana Kapitasi Pada FKTP	41.654.872,29	97.339.674,00
Kas Dana BOK Puskesmas	992.828.250,00	1.351.912.296,00
Kas Lainnya	500.000,00	157.500,00
Setara Kas	-	-
Investasi Jangka Pendek	-	-
Piutang Pajak Daerah	1.104.437.285,00	1.188.778.359,00
Piutang Retribusi Daerah	34.877.500,00	22.947.500,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	342.078.000,00	300.616.000,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-
Piutang Transfer Antar Daerah	9.543.260.996,00	7.957.018.300,00
Piutang Lainnya	1.410.584.790,16	3.291.895.372,60
Penyisihan Piutang	(1.111.593.482,43)	(1.044.300.648,92)
Beban Dibayar Dimuka	90.087.671,00	92.869.588,00
Persediaan	10.503.142.228,50	13.032.046.532,56
JUMLAH ASET LANCAR	46.937.983.303,70	70.827.874.698,75
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	-	-
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	-	-
Investasi dalam Obligasi	-	-
Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
Dana Bergulir	-	-
Deposito Jangka Panjang	-	-
Investasi Non Permanen Lainnya	-	-
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	-	-
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal	4.487.034.100,00	4.487.034.100,00
Investasi Permanen Lainnya	-	2.452.102.817,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	4.487.034.100,00	6.939.136.917,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	4.487.034.100,00	6.939.136.917,00
ASET TETAP		
Tanah	20.948.450.295,00	20.916.860.295,00
Peralatan dan Mesin	290.541.878.944,65	276.314.835.571,65
Gedung dan Bangunan	504.234.186.376,33	496.777.962.231,63
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.115.776.485.789,32	1.049.207.042.544,21
Aset Tetap Lainnya	13.194.308.664,00	13.194.308.664,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	33.238.514.737,76	21.084.292.205,00
Akumulasi Penyusutan	(985.204.286.930,82)	(879.664.668.522,62)
JUMLAH ASET TETAP	992.729.537.876,24	997.830.632.988,87
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	-	13.179.146.800,00
JUMLAH DANA CADANGAN	-	13.179.146.800,00

GA

ASET LAINNYA		
Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
Tuntutan Ganti Rugi	7.282.792.756,80	6.889.175.777,77
Kemitaan dengan Pihak Ketiga	-	-
Aset Tidak Berwujud	33.447.869.806,69	32.303.102.056,42
Aset Lain-lain	5.613.183.288,00	5.704.533.492,00
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	506.742.000,00	5.935.291.000,00
JUMLAH ASET LAINNYA	46.850.587.851,49	50.832.102.326,19
PROPERTI INVESTASI		
Properti Investasi	2.840.722.000,00	-
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(436.695.783,00)	-
JUMLAH PROPERTI INVESTASI	2.404.026.217,00	-
JUMLAH ASET	1.093.409.169.348,43	1.139.608.893.730,81
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	108.070.248,00	415.408.959,00
Utang Bunga	-	-
Utang Pinjaman Jangka Pendek	-	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	94.050.000,00	94.050.000,00
Utang Belanja	1.282.415.355,60	1.683.435.306,56
Utang Jangka Pendek Lainnya	342.318.166,44	352.067.566,44
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1.826.853.770,04	2.544.961.832,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang kepada Pemerintah Pusat	-	-
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	-	-
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-
Utang kepada Masyarakat	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN	1.826.853.770,04	2.544.961.832,00
EKUITAS		
Ekuitas	1.091.582.315.578,39	1.137.063.931.898,81
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.093.409.169.348,43	1.139.608.893.730,81



 BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
LAPORAN ARUS KAS

Per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam Rp/ribu)

URAIAN	2024	2023
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Pendapatan Pajak Daerah	6.073.470.873,00	7.359.403.697,00
Pendapatan Retribusi Daerah	11.273.645.225,00	9.049.035.543,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	640.020.357,00	532.969.455,00
Lain-lain PAD Yang Sifat	3.032.231.670,11	4.119.565.779,21
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	586.294.368.350,00	507.809.340.110,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	16.566.536.622,00	18.084.745.935,00
Pendapatan Hibah	500.000,00	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4.170.870.493,00	4.038.346.407,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	628.051.643.590,11	550.993.406.926,21
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Belanja Pegawai	225.670.587.199,00	202.467.128.676,00
Belanja Barang dan Jasa	184.112.128.465,15	167.626.124.422,00
Belanja Subsidi	696.600.000,00	-
Belanja Hibah	33.727.951.522,00	8.046.729.170,00
Belanja Bantuan Sosial	15.977.296.500,00	7.537.906.400,00
Belanja Tak Terduga	1.661.945.000,00	687.000.000,00
Belanja Bagi Hasil	587.031.875,00	703.058.917,00
Belanja Bantuan Keuangan	102.229.925.550,00	101.846.130.600,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	564.863.466.111,15	488.914.078.185,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	63.388.177.478,96	62.079.328.741,21
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Pencairan Dana Cadangan	13.179.146.800,00	1.820.853.200,00
Hasil Penjualan Peralatan/Mesin - LRA	1.179.072.800,00	-
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	14.358.219.600,00	1.820.853.200,00
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Belanja Modal Tanah	-	694.407.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.610.106.510,00	13.719.412.601,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	12.753.623.470,00	11.924.655.670,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	70.346.498.755,00	47.729.991.400,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	114.339.000,00	1.117.999.200,00
Belanja Modal Aset Lainnya	890.024.250,00	-
Pembentukan Dana Cadangan	-	7.500.000.000,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	98.714.591.985,00	82.686.425.871,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(84.356.372.385,00)	(80.865.572.671,00)
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	40.061.436.906,23	34.926.344.019,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	40.061.436.906,23	34.926.344.019,00

<i>Arus Kas Keluar</i>		
Koreksi Saldo Awal Kas Pada Arus Kas Tahun Sebelumnya	-	60.400.334,00
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	40.368.775.617,23	34.921.355.367,00
Koreksi SILPA	(310.638.237,00)	1.008.990.879,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	40.058.137.380,23	35.990.746.580,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	3.299.526,00	(1.064.402.561,00)
Kenaikan / (Penurunan) Kas	(20.964.895.380,04)	(19.850.646.490,79)
Saldo Awal Kas	45.986.003.695,51	65.836.650.186,30
Saldo Akhir Kas	25.021.108.315,47	45.986.003.695,51
Saldo Akhir Kas Terdiri Dari:	25.021.108.315,47	45.986.003.695,51
Kas di Kas Daerah	23.934.782.662,18	44.523.090.013,51
Kas di Bendahara Penerimaan	43.964.550,00	6.872.500,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas di BLUD	-	-
Kas Dana BOSP	7.377.981,00	6.631.712,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	41.654.872,29	97.339.674,00
Kas Dana BOK Puskesmas	992.828.250,00	1.351.912.296,00
Kas Lainnya	500.000,00	157.500,00
Setara Kas	-	-

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ISKANDAR KAMARU

Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Tahun Anggaran 2024
Nomor : 1 Tahun 2025
Tanggal : 4 Agustus 2025

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

- Bab I PENDAHULUAN**
- 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.4. Sistematika Pemulisan Catatan atas Laporan Keuangan
- Bab II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**
- 2.1. Ekonomi Makro
 - 2.2. Kebijakan Keuangan
 - 2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD
- Bab III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**
- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
 - 3.2. Hambatan dan Kendala Pencapaian Target Keuangan
- Bab IV KEBIJAKAN AKUNTANSI**
- 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan
 - 4.2. Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- Bab V PENJELASAN POS LAPORAN KEUANGAN**
- 5.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
 - 5.3. Neraca
 - 5.4. Laporan Operasional (LO)
 - 5.5. Laporan Arus Kas (LAK)
 - 5.6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- Bab VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN**
- 6.1. Domisili dan Bentuk Hukum
 - 6.2. Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok
 - 6.3. Ketentuan Perundang-undangan yang Melandasi Kegiatan Operasional
- Bab VII PENUTUP**

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara baik Presiden maupun Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) diwajibkan untuk menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD kepada DPR/DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan pertanggungjawaban dimaksud diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan serta disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan konsolidasi atas laporan keuangan SKPD sebagai entitas akuntansi. Adapun penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Pemerintah Daerah dan SKPD sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi berkewajiban menyelenggarakan sistem akuntansi untuk memenuhi amanat PP tersebut. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel. Laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami mutlak dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan manajerial.

Pada Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Keuangan terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Demi “**Terwujudnya Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Madani Berbasis Perikanan Yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan**” Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan bersama-sama dengan DPRD menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2024 sebagai alat akuntabilitas kepada publik dan manajemen pemerintahan.

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efisiensi dan efektivitas keuangan pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan penyusunan laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan;

1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

Lu

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 66 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; dan
17. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 70 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
2. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
3. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
4. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan;
5. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas; dan
6. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBLIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara. Letak geografis wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan disebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, disebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, disebelah selatan berbatasan dengan Teluk Tomini, dan disebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bone Bolango-Provinsi Gorontalo, dengan luas wilayah 3.497,46 km². Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada awal pembentukannya terbagi menjadi lima kecamatan dengan pusat pemerintahan terletak di Molibagu Kecamatan Bolaang Uki. Seiring dengan berjalannya waktu, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dilakukan pemekaran terhadap dua kecamatan yaitu Kecamatan Posigadan dan Kecamatan Bolaang Uki yang masing-masing membentuk kecamatan baru yaitu Kecamatan Helumo di tahun 2015 dan Kecamatan Tomini di tahun 2016 sehingga jumlah kecamatan sampai dengan tahun 2023 berjumlah sebanyak tujuh kecamatan.

Dari data Bolaang Mongondow Selatan Dalam Angka 2025 yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2024 mencapai 75.374 jiwa. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2023 sebanyak 73.046 jiwa, penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengalami pertumbuhan sebesar 2.328 jiwa atau 0,03%. Kecamatan Bolaang Uki memiliki penduduk paling banyak dengan jumlah penduduk 18.746 jiwa atau 24,87% diikuti Kecamatan Posigadan dengan jumlah penduduk mencapai 15.906 atau 21,10%. Kepadatan penduduk di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 mencapai 39,01 jiwa/km². Sementara itu besarnya angka rasio jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 107 yang artinya setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 107 jiwa penduduk laki-laki.

Grafik 2.1 Jumlah Penduduk per Kecamatan



Sumber: Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Dalam Angka 2025

2.1. Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 mengacu pada

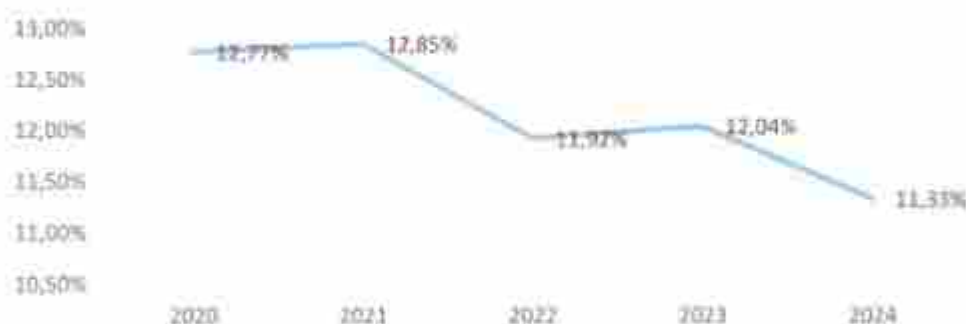
indikator ekonomi makro tahun 2023 atau tahun sebelumnya. Asumsi makro ekonomi berdasarkan data yang disusun oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2023 meliputi :

1. Tingkat Kemiskinan 12,04%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 2,55%
3. Gini Ratio sebesar 0,310
4. Indeks Pembangunan Manusia 66,40
5. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 5,33%
6. Tingkat Inflasi 4,20%

2.1.1. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengalami penurunan pada tahun 2024 dari tahun sebelumnya 12,04% menjadi 11,33%. Pandemi Covid-19 menjadi faktor yang sangat mempengaruhi terhadap naiknya angka kemiskinan tahun sebelumnya di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dimana terjadi penurunan aktivitas ekonomi serta akselerasi percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah mengalami kendala, mengingat masyarakat lapisan bawah menjadi kalangan yang paling merasakan dampaknya. Di Tahun 2022 sejalan dengan upaya dan program pemerintah daerah tingkat kemiskinan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan kembali dapat diturunkan menjadi 11,92%, namun pada tahun 2023 kembali mengalami kenaikan dan pada tahun 2024 mengalami penurunan 11,33%.

Grafik 2.2 Tingkat Kemiskinan



Sumber : Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Dalam Angka 2025

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan telah melakukan beberapa upaya dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Program penanggulangan kemiskinan tersebut bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan penduduk miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan hak dasar, menurunkan angka kemiskinan, dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Sasaran penanggulangan kemiskinan adalah rumah tangga, keluarga, dan atau individu dengan kategori miskin berdasarkan hasil pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditetapkan oleh Pemerintah. Program pengentasan kemiskinan yang dilakukan Pemerintah Daerah berupa pemberian bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan telah melaksanakan upaya lain dalam rangka penanggulangan kemiskinan, antara lain berupa Penyediaan Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH) dan Penyediaan Sanitasi Desa serta Pemberdayaan dan Penggerakan Ekonomi Masyarakat melalui BUMDES melalui Pembiayaan APBD-Desa. Namun dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan masih menghadapi hambatan dan kendala

4

dalam pencapaian target indikator kemiskinan berupa *refocusing* anggaran sehingga pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan kurang maksimal.

Rincian program/kegiatan di bidang pengentasan kemiskinan tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Program/Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase	OPD Penanggungjawab
1. Program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis zonasi target, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin							
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengalokasian Pendidikan Sekolah Dasar	Pemediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	20.200.000,00	20.200.000,00	100%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Pengadaan Peningkatan Peserta Didik	2.380.467.300,00	2.381.941.200,00	99,92	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengalokasian Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pemediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	27.000.000,00	27.000.000,00	100%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Pengadaan Peningkatan Peserta Didik	1.224.880.900,00	1.223.791.500,00	99,91	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengalokasian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengadaan Peningkatan Peserta Didik	201.000.000,00	201.000.000,00	100%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	PROGRAM PEMBERUNGAN UJUK KESEHATAN PERORANGAN DAN UJUK KESEHATAN MASYARAKAT	Pengalokasian Layanan Kesehatan untuk UJUK dan UJUK Risetan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengalokasian Jaminan Kesehatan Masyarakat	27.057.350,00	21.430.540,00	78,95	DINAS KESEHATAN
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengalokasian dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Persebaran	17.280.980,00	17.281.770.000,00	99,75	DINAS PERENCANAAN, UJUK DAN TATA RUANG
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengalokasian dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	482.268.980,00	479.300.000,00	99,21	DINAS PERENCANAAN, UJUK DAN TATA RUANG
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN KUMUH	Pengalokasian Pemukiman dan Kawasan Pemukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Peningkatan Tolak-tolak Tambak dan Sektornya Pemukiman Kumuh di Luar Kawasan Pemukiman Kumuh dengan Luas 3 Dikawatir 10 (Dekawitir)	18.204.281.400,00	18.120.747.000,00	99,55	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN DAN PERTANAHAN
	PROGRAM PERENCANAAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengalokasian Data Fajar Miskin Capaian Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitas Bantuan Sosial Kesehatan Keluarga	450.210.000,00	362.710.000,00	80,55	DINAS SOSIAL
	PROGRAM PERENCANAAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengalokasian Data Fajar Miskin Capaian Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	417.201.200,00	390.480.000,00	93,59	DINAS SOSIAL
2. Program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan							
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA RUMAH TANGGA (URUG), DAN USAHA MIKRO (UMK)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Diakui Miskin Pemukiman Kumuh, Kemitraan Perantara, Pengalokasian dan Koordinasi dengan Para Pihak yang Berkepentingan	Pemberdayaan Kemitraan Perantara dan Pengembangan Usaha Mikro	234.200.000,00	224.740.000,00	95,91	DINAS KOPERASI DAN UJUK, TRANSKRIPSI DAN TENAGA KERJA

CW

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase	OPD Penanggungjawab
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA BENDAHARA USAHA REKOL, DIRK (USAHA BERSI) (AKRON)	Pengembangan Usaha Mikro Dengan Cemas Pengkajian Baku Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengalihan, Perawatan, Sember Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	215.333.375,00	173.763.303,36	79,98	DINAS KEPERAWATAN DAN UKM, TRANSFORMASIDAN TENAGA KERJA
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kapasitas Sosial Dasar KabupatenKuto	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kecamatan KutoarjoKuto	250.248.750,00	248.290.000,36	98,82	DINAS SOSIAL
	PROGRAM PENGELOLAAN PERKAWAN TANGKAP	Pengalihan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai Dasar, Baku, Sawa, dan Gerakan ke Lainnya yang Dapat Dihasilkan Sisa 1 (sisa) Dasar KabupatenKuto	Penyediaan Peralatan Usaha Perikanan Tangkap	2.082.717.475,00	2.071.462.888,36	99,44	DINAS PERKAWAN
			Pengiriman Kelambakan Sawa Usaha Perikanan Tangkap	211.567.680,00	208.887.000,36	98,73	DINAS PERKAWAN
	PROGRAM PENGELOLAAN OPERASIKAS DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pengalihan dan Kelembakan Cadangan Pangan KabupatenKuto	Pengalihan Cadangan Pangan Pemerintah KabupatenKuto	947.818.000,00	947.218.000,36	100,30	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.	Program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan Baku Desa						
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan KabupatenKuto	Pertambangan Jalan	1.888.382.800,00	1.888.382.000,36	100,30	DINAS PERENCANAAN UMUM DAN TATA RUANG
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan KabupatenKuto	Rekonstruksi Jalan	33.486.708.800,00	33.388.387.884,36	99,71	DINAS PERENCANAAN UMUM DAN TATA RUANG
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan KabupatenKuto	Pemeliharaan Jalan	2.788.980.000,00	2.788.940.000,36	99,20	DINAS PERENCANAAN UMUM DAN TATA RUANG
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan KabupatenKuto	Pembangunan Jembatan	88.441.800,00	88.441.000,36	100,30	DINAS PERENCANAAN UMUM DAN TATA RUANG
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan KabupatenKuto	Pemeliharaan Jalan Lainnya	95.788.000,00	94.788.550,36	98,90	DINAS PERENCANAAN UMUM DAN TATA RUANG

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Jumlah angkatan kerja di tahun 2024 adalah 35.485 jiwa. Artinya terdapat 35.485 penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan yang mencari pekerjaan. Dari angka tersebut sebanyak 34.593 jiwa penduduk dikategorikan bekerja, sedangkan sisanya sebanyak 892 jiwa tidak bekerja atau pengangguran terbuka.

Tabel 2.2 Angkatan Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Pendidikan	Bekerja	Pengangguran	Jumlah	Persentase Bekerja
≤ SD	15.325	89	15.414	99,42
SMP	7.386	36	7.422	99,51
SMA	8.027	609	8.636	92,95
Perguruan Tinggi	3.855	158	4.013	96,06
Jumlah	34.593	892	35.485	97,49

Sumber : Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Dalam Angka 2023

Dilihat dari pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan jumlah yang bekerja dari angkatan kerja, pendidikan belum tentu memiliki pengaruh terhadap pekerjaan. Persentase jumlah yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja dengan pendidikan tertinggi yaitu Sekolah Menengah

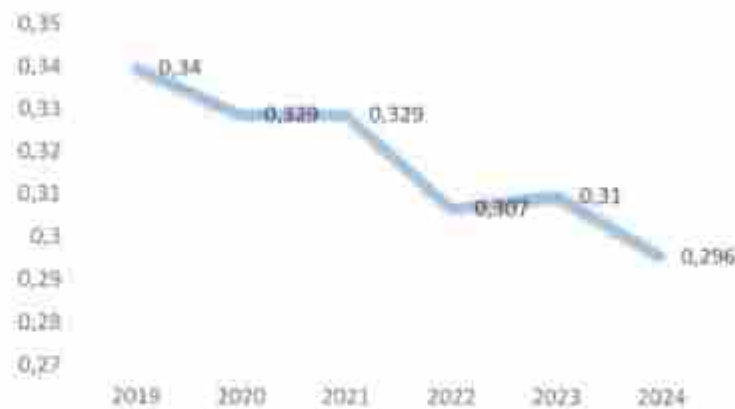
4

Pertama (SMP) sederajat yang mencapai 99,51%. Persentase tertinggi berikutnya diikuti oleh angkatan kerja dengan pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD) mencapai 99,42%, diikuti dengan Perguruan Tinggi dengan persentase mencapai 96,06% dan di posisi terakhir adalah mereka yang memiliki Pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat dengan persentase penduduk yang bekerja dibandingkan jumlah penduduk angkatan kerja mencapai 92,95%. Secara keseluruhan persentase penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang bekerja dibanding penduduk angkatan kerja adalah 97,49%.

2.1.3. Gini Ratio

Gini ratio adalah alat untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi dan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Jika dilihat dari angka gini ratio di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2019-2024 maka gini ratio di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2024 sebesar 0,296% masih dikategorikan ketimpangan rendah karena masih berada pada kisaran 0,20% sampai dengan 0,35%.

Grafik 2.3 Gini Ratio

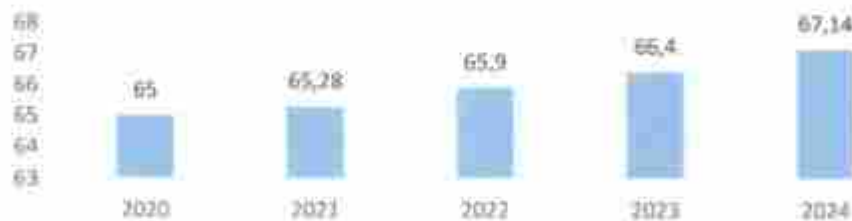


Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Sulawesi Utara 2024

2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia

Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat dilihat dari perkembangan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menunjukkan tren baik dari tahun ke tahun. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.4 Indeks Pembangunan Manusia



Sumber : Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Dalam Angka 2023

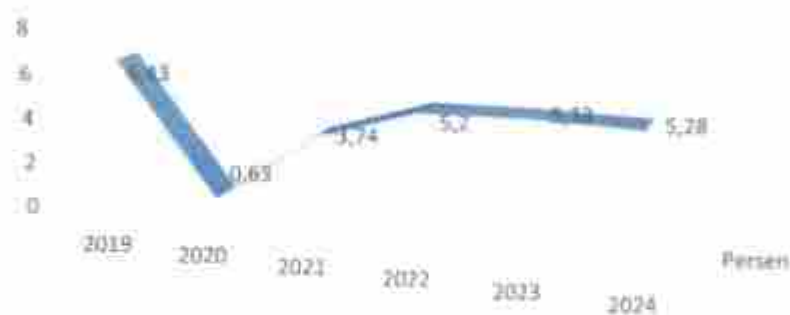
64

2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi memberikan gambaran kenaikan nilai tambah yang dicapai oleh suatu daerah pada tahun tertentu. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada tahun 2023 mencapai 5,33%, kemudian pada Tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melambat diangka 5,28%. Tren pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2018, namun pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi melambat di angka 6,43% dan turun pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19.

Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan terus mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019-2024 laju pertumbuhan ekonomi masih cenderung stabil. Di tahun 2020 adanya pandemi Covid-19 menyebabkan kontraksi dan perlambatan ekonomi, namun hal tersebut tidak berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi Bolaang Mongondow Selatan. Jika dibandingkan dengan 15 Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara Pertumbuhan Ekonomi Bolaang Mongondow Selatan tahun 2020 tumbuh 0,63%. Pada tahun 2021 terjadi pemulihan ekonomi dan mulai mengalami peningkatan kembali sebesar 3,74% kemudian pada tahun 2022 meningkat kembali mencapai 5,20% dan 5,33% pada tahun 2023 dan mengalami perlambatan pada tahun 2024 sebesar 5,28%.

Grafik 2.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi



Sumber : Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Dalam Angka 2025

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan nilai barang dan jasa yang dihasilkan sebagai hasil dari aktivitas ekonomi masyarakat disuatu wilayah pada periode tertentu. Nilai PDRB Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sampai dengan tahun 2024 terlihat terus menunjukkan peningkatan. PDRB Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan atas dasar harga berlaku tahun 2024 mencapai Rp2.974,36 Miliar, sedangkan berdasarkan harga konstan mencapai Rp1.617,98 Miliar (Statistik Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 2024). Adapun distribusi PDRB Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dari 17 kategori/Lapangan Usaha, kategori pertunian masih menjadi penyumbang terbesar PDRB yaitu mencapai 38,09%, diikuti oleh kategori konstruksi sebesar 14,68% dan kategori administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib sebesar 10,54%. Perlu adanya upaya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk bisa mengoptimalkan lagi kategori/lapangan usaha penyumbang kontribusi terhadap PDRB.

62

Grafik 2.6 Produk Domestik Regional Bruto ADIB (milyar rupiah)

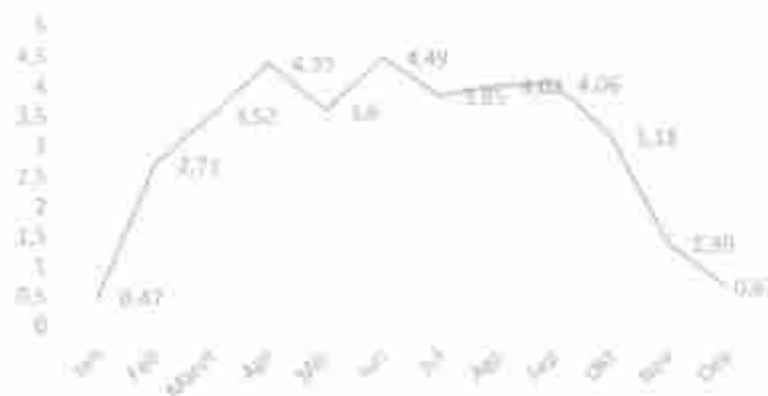


Sumber: Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Dalam Angka 2025

2.1.6. Tingkat Inflasi

Inflasi adalah kenaikan barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu, perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Inflasi terjadi jika terjadi kenaikan harga barang tidak pada satu atau dua barang saja, melainkan meluas atau mengakibatkan kenaikan pada barang lainnya. BPS belum melakukan rilis tingkat inflasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sehingga asumsi yang digunakan dalam penyusunan APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengacu pada tingkat inflasi Kota Kotamobagu. Kota Kotamobagu mengalami inflasi Year on Year (YoY) sebesar 0,67% pada bulan Desember 2024. Inflasi tersebut disebabkan oleh adanya penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 120,06 pada bulan Desember 2023 menjadi 108,71 pada bulan Desember 2024.

Grafik 2.7 Laju Inflasi (Januari – Desember 2024)



Sumber: Badan Pusat Statistik

Andil inflasi terbesar berasal dari kelompok pengeluaran makanan, minuman dan tembakau dengan komoditas penyumbang inflasi tertinggi yaitu cabai rawit sebesar 1,84%.

2.3. Kebijakan Keuangan

Prioritas pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tidak lepas dari arah dan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi Sulawesi Utara. Penelahaan arah dari kebijakan tersebut bertujuan agar tercipta keselarasan, sinkronisasi dan kesesuaian prioritas pembangunan, program dan kegiatan sehingga target-target indikator yang telah ditentukan baik secara nasional, provinsi dan kabupaten dapat tercapai. Prioritas pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan juga memperhatikan kapasitas anggaran dan kebutuhan belanja pembangunan daerah dengan mempertimbangkan fiskal daerah di tengah ketidakpastian perekonomian nasional. Prioritas pembangunan dalam perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang

hr

Mongondow Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan dan kesehatan;
2. Menurunkan angka kemiskinan;
3. Meningkatkan ketahanan sosial dan ketahanan pangan;
4. Meningkatkan sektor UMKM; dan
5. Peningkatan pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan.

Kebijakan pendapatan daerah untuk memperkuat struktur pendapatan asli daerah yang mandiri, stabil dan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Kemampuan dalam rangka memperkuat struktur pemerintahan daerah diarahkan pada penguatan otonomi daerah, serta optimalisasi pengelolaan jenis-jenis pendapatan asli daerah. Alokasi belanja yang tepat mempunyai peranan cukup penting untuk mencapai stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Di samping itu, belanja juga merupakan alat informasi bagi masyarakat mengenai pelaksanaan pembangunan yang sekaligus dapat dijadikan sebagai alat kontrol dan akuntabilitas kinerja pemerintah. Kebijakan belanja daerah di arahkan untuk ekspansif namun terarah dan terukur, dalam pengertian selain dimanfaatkan untuk pendanaan pembangunan, juga didesain untuk penanggulangan permasalahan sosial-ekonomi sesuai prioritas pembangunan pemerintah daerah tahun ini

Memperhatikan kondisi peningkatan kebutuhan pembangunan daerah, pengalokasian belanja tetap menggunakan pendekatan sistem skala prioritas dengan berpedoman pada KUPA dan PPASP serta Perubahan RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2024 maka dalam mengalokasikan Belanja Daerah pada R-PAPBD Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja;
- 2) Pemenuhan belanja wajib (*Mandatory Spending*);
- 3) Mengalokasikan kebutuhan belanja *fixedcost*, *regularcost*, dan *variablecost* secara terukur dan terarah, yaitu:
 - a. Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor.
 - b. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan tupoksi organisasi perangkat daerah yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.
 - c. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan daerah.
 - d. Program/ kegiatan yang telah menjadi komitmen pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (*Committedbudget*).
- 4) Meningkatkan alokasi anggaran yang makin diorientasikan bagi kesejahteraan masyarakat dengan berfokus pada penurunan angka kemiskinan dan penurunan angka pengangguran; dan
- 5) Penggunaan anggaran berbasis pada prioritas pembangunan dalam penentuan anggaran belanja dengan visi dan misi 2021-2026, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur.

Pemenuhan kewajiban alokasi belanja sesuai Peraturan Perundang-undangan (*mandatory spending*) yaitu 20% belanja pendidikan, 10% belanja kesehatan, 10% dari DAU dan DBH untuk Alokasi Dana Desa, 1% untuk kegiatan pengawasan, 40% untuk belanja Infrastruktur, serta 30% belanja pegawai sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024. Pemenuhan alokasi *mandatory spending* dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3 Alokasi Mandatory Spending

No	Uraian	Alokasi			Realisasi	
		Jumlah Anggaran	Jumlah Alokasi	Persen	Jumlah Realisasi	Persen
1	Fungsi Pembelian	698.078.854.364,00	127.735.835.912,00	18,28	130.433.688.552,00	18,71
2	Fungsi Kesehatan	483.012.133.190,55	114.485.391.153,50	23,70	105.240.232.208,35	21,82
3	Infrastruktur Daerah	394.901.392.481,00	263.021.967.043,05	66,72	250.649.817.957,00	63,50
4	Alokasi Dana Desa	292.025.997.000,00	39.944.325.200,00	13,68	39.944.324.550,00	13,68
5	Pengawasan	698.078.854.364,00	3.834.673.617,00	0,55	5.984.778.285,00	0,86
6	Belanja Pegawai	698.078.854.364,00	243.650.092.253,45	34,90	199.172.713.473,00	28,54

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk menerapkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan telah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja pada setiap program dan kegiatan serta sub kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi target prioritas pembangunan daerah tahunan, meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan serta sub kegiatan yang telah ditata dapat memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya. Program dan kegiatan serta sub kegiatan harus dapat dilaksanakan seoptimal mungkin untuk dapat memberikan manfaat dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Selain itu dalam rangka percepatan penurunan stunting, pemerintah daerah telah melakukan intervensi penurunan stunting sejak tahun 2018 dimana angka stunting sebelumnya berada di angka 50,01% telah berkurang menjadi 33,8% pada tahun 2019 dan 14,08% pada tahun 2020. Program intervensi stunting pada APBD tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.4 Alokasi Anggaran Untuk Penurunan Prevalensi Stunting

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN BELANJA PADA SKPD	JUMLAH (Rp) P-APBD TA 2024
1	DINAS KESEHATAN	36.240.852.599,00
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	31.252.489.448,00
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP (Rujukan Tingkat Dasar), Kabupaten Kota	31.252.489.448,00
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	223.670.000,00
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100.687.400,00
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	33.845.350,00
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	35.552.000,00
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	7.164.000,00
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	385.720.450,00
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat	2.023.578.347,00
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	178.454.000,00
	Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana Kesehatan	388.381.550,00
	Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	27.857.555.551,00

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH (Rp)
	DELANJA PADA SKPD	P-APRD TA 2024
	PROGRAM PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEDIAAN	4.933.300.150,00
	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten Kota	4.933.300.150,00
	Sub Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	4.933.300.150,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	75.063.000,00
	Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Berbasis Daya Masyarakat (UKDM) Tingkat Daerah Kabupaten Kota	75.063.000,00
	Sub kegiatan Hibridasi Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Berbasis Daya Masyarakat (UKDM)	75.063.000,00
2	DINAS SOSIAL	767.004.370,00
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	513.757.630,00
	Kegiatan Pengisian Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten Kota	513.757.630,00
	Sub Kegiatan Pengisian Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten Kota	63.446.820,00
	Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	450.310.800,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	253.246.750,00
	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten Kota	253.246.750,00
	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kemasyarakatan Kabupaten Kota	253.246.750,00
3	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.428.095.000,00
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	139.600.000,00
	Kegiatan Penyelesaian Perkara Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten Kota	139.600.000,00
	Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	59.600.000,00
	Sub Kegiatan Pengendalian Program KKHPK	80.000.000,00
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	778.195.000,00
	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kegiatan Budidaya Laka	255.000.000,00
	Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KKHPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	150.000.000,00
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKHPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minitok)	105.000.000,00
	Kegiatan/Pendayagunaan Tenaga Perencana KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	243.000.000,00
	Sub Kegiatan Penggerak Kader Institut Masyarakat Pedesaan (IMP)	243.000.000,00
	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten Kota	272.195.000,00
	Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penyanggah Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Terpadu Jaringan dan Jejaringnya	11.700.000,00
	Sub Kegiatan Peningkatan Kesertian Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	245.595.000,00
	Sub Kegiatan Pembiayaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Terpadu Jaringan dan Jejaringnya	14.900.000,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	518.300.000,00
	Kegiatan Pelaksanaan Pemberdayaan Keluarga Melalui Pembinaan, Ketrampilan dan Kesejahteraan Keluarga	373.300.000,00
	Sub Kegiatan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca melahirkan, Balita/Balita)	243.000.000,00
	Sub Kegiatan Peningkatan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca melahirkan, Balita/Balita)	267.300.000,00
4	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	183.913.565,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	23.024.890,00
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelaksana Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten Kota	23.024.890,00
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Kelurahan (RT, RW, PKK, Pemuda, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	23.024.890,00
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	160.888.675,00
	Kegiatan Perbaikan dan Penguatan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	160.888.675,00
	Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Prosidir Hukum Desa	31.272.000,00

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN BELANJA PADA RKPD	JUMLAH (Rp) P-APBD TA 2024
	Sub Kegiatan Fasilitas Pengalihan Keuangan Desa	83.210.000,00
	Sub Kegiatan Fasilitas Fasilitas Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	36.406.875,00
5	DINAS PENDIDIKAN	4.053.545.685,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	4.053.545.685,00
	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	4.053.545.685,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	955.350.000,00
	Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	1.182.848.000,00
	Sub Kegiatan Pembiayaan Kebutuhan dan Manajemen PAUD	1.995.347.685,00
6	DINAS PERTANIAN	7.820.000,00
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	7.820.000,00
	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	7.820.000,00
	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kebutuhan Petani di Kecamatan dan Desa	7.820.000,00
7	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	239.186.130,00
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	239.186.130,00
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan Pembangunan Manusia	239.186.130,00
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	239.186.130,00
8	DINAS KOPERASI DAN UKM, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	234.396.000,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	234.396.000,00
	Kegiatan Pembinaan Usaha Mikro yang Didukung Melalui Fasilitas, Kemudahan, Kemitraan, Perizinan, Penguatan Kebutuhan, dan Konektivitas dengan Para Pemungku Kepentingan	234.396.000,00
	Sub Kegiatan Pelatihan Petani dan Pengusaha Usaha Mikro	234.396.000,00
9	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	24.373.332.880,00
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	18.831.086.645,00
	Kegiatan Pengalihan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	18.831.086.645,00
	Sub Kegiatan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	17.595.588.087,00
	Sub Kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	548.570.000,00
	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	682.968.558,00
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	3.542.245.905,00
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.542.245.905,00
	Sub Kegiatan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perumahan Berbasis Masyarakat	3.495.805.905,00
	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	46.440.000,00
	JUMLAH	66.753.141.528,00

Pada tahun 2024 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan telah mengambil kebijakan melakukan Perubahan APBD sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 pada umumnya dimaksudkan untuk penyesuaian kembali pendapatan daerah yang mengalami perubahan terutama pada sisi pendapatan transfer pusat dan perubahan program dan kegiatan sesuai Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta penggunaan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya untuk memenuhi belanja program kegiatan akibat perubahan asumsi-asumsi yang mendasar.

APBD pada hakikatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus berupaya secara

Ln

nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas publik, atau disebut dengan istilah Anggaran Berbasis Kinerja (ABK).

Penyusunan APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2024, pada dasarnya senantiasa mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi serta aspek-aspek lainnya yang diharapkan akan berpengaruh terhadap peningkatan sosial/ekonomi daerah. Kebijakan keuangan yang ditempuh dalam rangka mengantisipasi kondisi tahun 2024 berupa kebijakan peningkatan pendapatan, efisiensi belanja, dan penentuan sumber dan penggunaan pembiayaan.

Kondisi perekonomian nasional yang sedang dalam tahap pemulihan ekonomi berdampak pada pendapatan daerah yang tertekan baik itu pendapatan asli daerah maupun pendapatan dana transfer pusat ke daerah serta pendapatan lain-lain. Hal ini berpengaruh pada kondisi dan kebijakan pendapatan daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Dalam rangka meningkatkan pendapatan, kebijakan yang ditempuh berupa upaya untuk meningkatkan sumber pendapatan asli daerah terutama dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah karena merupakan potensi dan sumber pendapatan asli daerah yang memberikan kontribusi terbesar terhadap peningkatan pendapatan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Kebijakan efisiensi belanja diupayakan dengan mengutamakan prioritas dan rasionalitas belanja, baik belanja operasional maupun belanja modal, dengan melakukan penghematan melalui peningkatan disiplin anggaran, serta mengarahkan tersusunnya anggaran berbasis kinerja. Sedangkan kebijakan penentuan sumber dan penggunaan pembiayaan, yaitu apabila diperoleh surplus akan ditentukan pemanfaatan surplus dalam pengeluaran pembiayaan, namun apabila diperoleh defisit akan ditentukan sumber-sumber pembiayaan dalam penerimaan pembiayaan.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Secara umum capaian realisasi APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun anggaran 2024 dapat digambarkan sebagai berikut.

1. Pendapatan

Pendapatan yang ditargetkan sebesar Rp639.329.112.828,00 dapat terealisasi sebesar Rp629.230.716.390,11 atau 98,42% dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Daerah terealisasi sebesar Rp22.198.440.925,11 atau 110,50% dari target yang ditetapkan sebesar Rp20.088.994.856,00.
- b. Pendapatan Transfer terealisasi Rp602.860.904.972,00 atau 98,39% dari target yang ditetapkan sebesar Rp612.741.829.148,00.
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terealisasi sebesar Rp4.171.370.493,00 atau sebesar 64,19% dari target yang ditetapkan sebesar Rp6.498.288.824,00.

2. Belanja

Belanja yang ditetapkan pada perubahan APBD sebesar Rp698.078.854.364,51 terealisasi sebesar Rp663.378.058.096,15 atau 95,03% dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Operasi terealisasi sebesar Rp460.184.563.686,15 atau 93,94% dari alokasi anggaran sebesar Rp489.870.178.801,73.
- b. Belanja Modal terealisasi sebesar Rp98.714.591.985,00 atau 96,61% dari alokasi anggaran sebesar Rp102.179.279.599,78.
- c. Belanja Tak Terduga terealisasi sebesar Rp1.661.945.000,00 atau 58,27% dari alokasi sebesar Rp2.852.134.000,00.
- d. Belanja Transfer terealisasi sebesar Rp102.816.957.425,00 atau 99,65% dari alokasi sebesar Rp103.177.261.963,00.

3. Pembiayaan

Pembiayaan netto terealisasi sebesar Rp59.060.379.773,51 atau 100,54 dari total target sebesar Rp58.749.741.536,51. Pembiayaan netto ini diperhitungkan dari Penerimaan Pembiayaan berupa Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) pada perubahan APBD terealisasi sebesar Rp45.881.232.973,51 atau 100,69 dari total target sebesar Rp45.570.594.736,51 ditambah realisasi pencairan dana cadangan sebesar Rp13.179.146.800,00 atau 100% dari pagu anggaran yang ditetapkan.

3.2. Hambatan dan Kendala Pencapaian Target Keuangan

Secara umum dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perubahan APBD. Jika dilihat lebih rinci sebagaimana Lampiran I, terdapat beberapa pos pendapatan asli daerah yang tidak mencapai target. Tidak tercapainya pendapatan daerah tersebut terhadap target yang telah ditetapkan pada Perubahan APBD disebabkan belum optimalnya pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan masih

hw

perlu meningkatkan kesadaran para wajib pajak daerah akan pentingnya pengelolaan pajak rumah makan dengan baik. Pemerintah daerah dalam hal ini masih terus berupaya dan tidak berhenti untuk terus melakukan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah tersebut dengan kebijakan digitalisasi dan sosialisasi kepada masyarakat terutama para pemilik usaha atau objek pajak.

Pada penerimaan transfer pemerintah pusat meskipun penerimaan Dana Bagi Hasil melampaui alokasi yang telah ditetapkan, masih terdapat beberapa pos yang tidak tercapai diantaranya pada pos Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan DAK Non Fisik. Tidak tercapainya DAK Fisik dikarenakan penyaluran dilakukan sesuai nilai kontrak final, sedangkan tidak tercapainya DAK Non Fisik dikarenakan terdapat efisiensi dari pos Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru.

Selain itu pada pos pendapatan transfer antar daerah, tidak tercapainya target pendapatan bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara disebabkan oleh kebijakan *refocusing* anggaran yang menyebabkan penyaluran bagi hasil pajak hanya disalurkan hanya sampai dengan bulan April tahun 2024. Atas kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan telah mencatat bagi hasil pajak bulan Mei sampai dengan Desember 2024 sebesar Rp9.543.260.996,00 sebagai piutang berdasarkan dokumen penetapan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Selanjutnya, kurang terserapnya belanja dari alokasi yang ditetapkan pada perubahan APBD secara umum disebabkan oleh kurang optimalnya pelaksanaan dan pemanfaatan penggunaan anggaran oleh beberapa SKPD serta terdapat upaya pemerintah daerah dalam melakukan efisiensi terhadap belanja yang belum terlalu mendesak pada tahun anggaran 2024.

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Domisili kantor Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berada di Kecamatan Bolaang Uki, Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sampai dengan tahun 2024 meliputi tujuh Kecamatan yaitu Kecamatan Bolaang Uki, Kecamatan Posigadan, Kecamatan Pinolosian, Kecamatan Pinolosian Tengah, Kecamatan Pinolosian Timur, Kecamatan Helumo dan Kecamatan Tomini.

Dalam laporan keuangan ini, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan merupakan entitas tunggal, sedangkan entitas akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan total entitas sebanyak 36 SKPD yang terbagi dalam satu Sekretariat Daerah, satu Sekretariat DPRD, 21 Dinas, lima Badan, satu Inspektorat, dan tujuh Kantor. Selain 36 SKPD tersebut, terdapat unit satuan pendidikan yang berjumlah 70 Sekolah Dasar Negeri, 18 Sekolah Menengah Pertama, satu satuan pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar, satu satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri, sembilan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), dan satu Rumah Sakit Umum Daerah. Daftar SKPD sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1 Daftar SKPD Tahun 2024

NO	KODE	NAMA SKPD	NAMA/NIP PIMPINAN	
1	SEKRETARIAT	SEKRETARIAT DAERAH	MARZANZIUS A. OHY, S.STP.	19770318 199511 1 001
2	SEKRETARIAT	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	LA ODE SAHYUDIN, SKM	19690508 199103 1 011
3	DINAS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	RANTE HATTANI, S.Pd., M.Si	19750617 200501 2 026
4	DINAS	DINAS KESEHATAN	SAIPUL N. BOTUTHI, SKM	19740911 199703 1 004
5	DINAS	DINAS PEKERJAAN UMUM TATA RUANG	ABDILLAH GONIBALA, S.STP	19841220 200312 1 001
6	DINAS	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	KADEK WEAYANTO, SII, MH	19820921 201001 1 007
7	DINAS	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	MULJONO ROCHIM, SE	19660629 199103 1 010
8	DINAS	DINAS SOSIAL	dr. SRI S. PAKAYA, M.Kes.	19800721 200604 2 022
9	DINAS	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	NASHRUDDIN M. GOBEL, ST., ME	19680823 200701 1 014
10	DINAS	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	GUNAWAN OTUH, S.Pd., M.Pd.	19690719 199512 1 003
11	DINAS	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	RAMLI ABDUL MADIID, S.Pd., M.Si	19720601 199502 1 001
12	DINAS	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERINDUNGAN ANAK	Des. SUHARTINI DAMO, ME	19660731 199203 2 002
13	DINAS	DINAS PERHUBUNGAN	AWALUDIN LAMALANI, SIK	19761231 200212 1 008
14	DINAS	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	MARWAN MAKALALAG, S.Pd	19670305 199203 1 011
15	DINAS	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	SUMITRO PAIDIKO, SE	19680621 200212 1 008

NO	KODE	NAMA SKPD	NAMA/NIP PIMPINAN
16	DINAS	DINAS PERPUSTAKAAN	EKA PRIE H. VAN GOBEL, S.STP 19840105 200212 1 001
17	DINAS	DINAS PERIKANAN	BOHBY SETIA HUDI SAMPE, S.IK 19771004 201001 1 002
18	DINAS	DINAS PARIWISATA	WAHYUDIN KADU LAH, S.IP 19750520 200212 1 005
19	DINAS	DINAS PERTANIAN	ANAS KANGIDEN, SP 19730728 201001 1 006
20	DINAS	DINAS KETAHANAN PANGAN	KASMAN DJAUHARI, S.Pi, M.Si 19800703 200604 1 009
21	DINAS	DINAS PERINDUSTRIAN	SUPRIN MOHIL LAINGO, SH 19841123 201001 1 007
22	DINAS	DINAS KOOPERASI DAN UKM, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	MUHAMMAD BASRI SUTRIMO, S.STP 19801103 200112 1 002
23	DINAS	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	ALDY SETIAWAN GOBEL, S.IE 19741204 200212 1 008
24	BADAN	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BOHBY SETIA HUDI SAMPE, S.IK 19771004 201001 1 002
25	BADAN	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	RIKSON PAPUTUNGAN, S.Pi, M.Pi 19791009 200212 1 005
26	BADAN	BADAN PENGHELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	LASYA L. MAMONTO, S.Pi, ME 19780905 200212 2 003
27	BADAN	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	RASTON MOODUTO 19750118 200701 1 018
28	BADAN	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	ALSYAFRI U. KADULLAH, S.Pi, ME 19710401 199901 1 002
29	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT DAERAH	Des. HIDEI D. PAPUTUNGAN 19660720 199001 1 013
30	KANTOR	KECAMATAN POSIGADAN	HARMIN MANOPPO, S.Pi 19800406 201001 1 005
31	KANTOR	KECAMATAN BOLAANG UKI	NURHAEDA YASIN, SE 19690430 200701 2 017
32	KANTOR	KECAMATAN PINOLOSAN	MUHAMAD MUKHSAN KUNSI, S.Ag 19721207 200604 1 003
33	KANTOR	KECAMATAN PINOLOSAN TENGAH	ONI PODOMI, SE 19720725 201104 2 001
34	KANTOR	KECAMATAN PINOLOSAN TIMUR	JUNAIDI PAPUTUNGAN, SE 19730103 199908 1 001
35	KANTOR	KECAMATAN HELUMO	MIDYAN KATELI, S.Pi 19680211 199403 1 008
36	KANTOR	KECAMATAN TOMINI	SISKA SARIFI, S.AP 19840327 201503 2 002

4.2. Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan ini disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010), terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan keuangan ini disertai lampiran-lampiran berbentuk daftar sebagai referensi terhadap pos-pos laporan keuangan utama maupun Catatan atas Laporan Keuangan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan:

1. Basis Akuntansi;
2. Prinsip Nilai Perolehan (*Historical Cost Principle*);
3. Prinsip Realisasi (*Realization Principle*);
4. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form Principle*);

5. Prinsip Periodisitas (*Periodicity Principle*);
6. Prinsip Konsistensi (*Consistency Principle*);
7. Prinsip Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure Principle*); dan
8. Prinsip Penyajian Wajar (*Fair Presentation Principle*).

4.2.1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam laporan operasional. Dalam hal peraturan perundangan-undangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas maka entitas pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di rekening kas umum daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening kas umum daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan piutang luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula di LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas maka LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau entitas pelaporan, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

4.2.2. Prinsip Nilai Perolehan (*Historical Cost Principle*)

Aset dicatat sebesar jumlah kas atau setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

Penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

4.2.3. Prinsip Realisasi (*Realization Principle*)

Ketersediaan pendapatan (basis kas) yang telah diotorisasi melalui APBD selama 1 (satu) tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja daerah dalam periode tahun anggaran dimaksud atau membayar utang. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching cost against revenue principle*) tidak mendapatkan penekanan dalam akuntansi pemerintah daerah, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.

4.2.4. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form Principle*)

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2.5. Prinsip Periodisitas (*Periodicity Principle*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.

Periode utama pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan. Namun periode bulanan, triwulanan, dan semesteran sangat dianjurkan.

4.2.6. Prinsip Konsistensi (*Consistency Principle*)

Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh pemerintah daerah (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.

Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2.7. Prinsip Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure Principle*)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2.8. Prinsip Penyajian Wajar (*Fair Presentation Principle*)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampaui rendah atau sengaja mencatat kewajiban dan belanja yang terlampaui tinggi, sehingga laporan keuangan tidak netral dan tidak andal.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.3.1. Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

4.3.1.1. Aset lancar

Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, beban dibayar dimuka dan persediaan.

1. Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar.
2. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu tiga bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.
 - b. Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas.
 - c. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.
3. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang diakui ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat :

- a. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi; dan
- b. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria :

- a. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
- b. Jumlah piutang dapat diukur.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau

entitas lain. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitemnya. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 4.2 Kualitas Piutang Tak Tertagih

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	Lancar	0,5
2	Kurang Lancar	10
3	Diragukan	50
4	Macet	100

Sumber: Peraturan Bupati Kab.Boluang Mongondow Selatan Nomor 75 Tahun 2019

- a. Kualitas lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
 - b. Kualitas kurang lancar, apabila dalam jangka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
 - c. Kualitas diragukan, apabila dalam jangka waktu 2 tahun terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
 - d. Kualitas macet, apabila dalam jangka waktu 3 tahun terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.
4. Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah. Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban. Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/ dibayarkan.
5. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan diakui:
- a) Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
 - b) Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau penguasaannya berpindah.
- Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.

4.3.1.2. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu :

1. Investasi jangka panjang non permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

2. Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.

Investasi jangka panjang non permanen :

1. Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya.
2. Investasi jangka panjang non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek Perkebunan Inti Rakyat) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah daerah maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

4.3.1.3. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :

1. Berwujud;
2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
3. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas dan/atau untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga;
5. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
6. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Pengakuan aset tetap yang berasal dari pengadaan barang dan jasa dan perolehan lainnya yang sah, diakui pada saat barang diterima sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

lh

Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Pekerjaan yang telah selesai 100 dan diserahkan dengan Berita Acara Serah Terima (PHO) walaupun sampai dengan tanggal laporan keuangan belum dilakukan pembayaran, diakui sebagai aset tetap.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Aset tetap yang sudah tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau tidak memenuhi definisi aset tetap, harus disajikan pada pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Khusus pengakuan aset tetap-renovasi atas aset tetap yang bukan milik diakui sebagai berikut:

1. Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial aset tetap misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasikan ke dalam aset tetap-renovasi dan diklasifikasikan ke dalam aset tetap lainnya. Apabila renovasi aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomis, maka dianggap sebagai beban operasional.
2. Apabila manfaat ekonomis renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi butir 1 di atas, maka biaya renovasi dikapitalisasikan sebagai aset tetap-renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomis renovasi kurang dari satu tahun, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai beban operasional tahun berjalan.
3. Apabila jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut material, dan memenuhi syarat butir 1 dan 2 di atas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai aset tetap-renovasi, apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai beban operasional.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap yang diperoleh melalui pengadaan/pembangunan baru aset tetap berupa peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan tanah adalah sebagai berikut :

a. Peralatan dan mesin :

1. Alat besar Rp75.000.000,00,
2. Alat angkutan Rp1.500.000,00.
3. Alat bengkel dan alat ukur Rp500.000,00.
4. Alat pertanian Rp500.000,00.
5. Alat kantor dan rumah tangga Rp500.000,00
6. Alat studio, komunikasi dan pemancar Rp500.000,00.
7. Alat kedokteran dan kesehatan Rp1.500.000,00.
8. Alat laboratorium Rp1.500.000,00.
9. Alat persenjataan Rp500.000,00.
10. Komputer Rp500.000,00.

11. Alat eksplorasi Rp1.500.000,00.
 12. Alat pengeboran Rp75.000.000,00.
 13. Alat produksi, pengolahan dan pemurnian Rp1.500.000,00.
 14. Alat bantu eksplorasi Rp1.500.000,00.
 15. Alat keselamatan kerja Rp1.500.000,00.
 16. Alat peraga Rp500.000,00.
 17. Peralatan proses/produksi Rp75.000.000.
 18. Rambu-rambu Rp5.000.000,00.
 19. Peralatan olahraga Rp500.000,00.
- b. Gedung dan bangunan Rp30.000.000,00.
- c. Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp50.000.000,00.
- d. Aset tetap lainnya :
1. Bahan perpustakaan Rp100.000,00.
 2. Barang bercorak kesenian/ kebudayaan dan olahraga Rp1.500.000,00.
 3. Hewan Rp500.000,00.
 4. Biota perairan Rp500.000,00.
 5. Tanaman Rp500.000,00.
 6. Barang koleksi non budaya Rp1.500.000,00.
 7. Aset tetap dalam renovasi Rp10.000.000,00.
- e. Tanah tanpa memperhatikan nilai pengadaannya dikapitalisasi sebagai aset tetap.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Aset-aset tersebut diperlakukan sebagai persediaan/aset lainnya.

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada akumulasi penyusutan aset tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Masa Manfaat Aset Tetap

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3				ASET TETAP	
1	3	2			Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01		Alat Besar	
1	3	2	01	01	Alat Besar Darat	10
1	3	2	01	02	Alat Besar Apung	8
1	3	2	01	03	Alat Basah	7
1	3	2	02		Alat Angkutan	
1	3	2	02	01	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	02	02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
1	3	2	02	03	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	02	04	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	02	05	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	03		Alat Bengkel dan Alat Ukur	
1	3	2	03	01	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	03	02	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	03	03	Alat Ukur	5
1	3	2	04		Alat Pertanian	
1	3	2	04	01	Alat Pengolahan	4
1	3	2	05		Alat Kantor dan Rumah Tangga	
1	3	2	05	01	Alat Kantor	5
1	3	2	05	02	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	05	03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	3
1	3	2	06		Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	
1	3	2	06	01	Alat Studio	5
1	3	2	06	02	Alat Komunikasi	5
1	3	2	06	03	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	06	04	Peralatan Komunikasi Navigasi	15
1	3	2	07		Alat Kedokteran dan Kesehatan	
1	3	2	07	01	Alat Kedokteran	5
1	3	2	07	02	Alat Kesehatan Umum	5
1	3	2	08		Alat Laboratorium	
1	3	2	08	01	Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	08	02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	08	03	Alat Peraga/Praktik Sekolah	10
1	3	2	08	04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1	3	2	08	05	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	08	06	Detritive Testing Laboratory	10
1	3	2	08	07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	08	08	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	08	09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	10
1	3	2	09		Alat Persenjataan	
1	3	2	09	01	Senjata Api	10
1	3	2	09	02	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	09	03	Senjata Sinar	5
1	3	2	09	04	Alat Khusus Kepolisian	4
1	3	2	10		Komputer	
1	3	2	10	01	Komputer Lini	4
1	3	2	10	02	Peralatan Komputer	4
1	3	2	11		Alat Eksplorasi	
1	3	2	11	01	Alat Eksplorasi Topografi	5
1	3	2	11	02	Alat Eksplorasi Geofisika	10
1	3	2	12		Alat Pengboran	
1	3	2	12	01	Alat Pengboran Mesin	10
1	3	2	12	02	Alat Pengboran Non Mesin	10
1	3	2	13		Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	
1	3	2	13	01	Sumur	10
1	3	2	13	02	Produksi	10
1	3	2	13	03	Pengolahan dan Pemurnian	15
1	3	2	14		Alat Bantu Eksplorasi	
1	3	2	14	01	Alat Bantu Eksplorasi	10
1	3	2	14	02	Alat Bantu Produksi	10
1	3	2	15		Alat Keselamatan Kerja	
1	3	2	15	01	Alat Deteksi	5
1	3	2	15	02	Alat Pelindung	5
1	3	2	15	03	Alat SAR	2
1	3	2	15	04	Alat Kerja Peningkatan	10
1	3	2	16		Alat Petaga	
1	3	2	16	01	Alat Petaga Pelatihan dan Percontohan	10
1	3	2	17		Peralatan Proses/Produksi	
1	3	2	17	01	Unit Peralatan Proses/Produksi	8
1	3	2	18		Rambu-rambu	
1	3	2	18	01	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	7
1	3	2	18	02	Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	5
1	3	2	18	03	Rambu-rambu Lalu Lintas Laut	15
1	3	2	19		Peralatan Olah Raga	
1	3	2	19	01	Peralatan Olah Raga	3
1	3	3			Gedung dan Bangunan	
1	3	3	01	01	Bangunan Gedung Terpadu Kerja	50
1	3	3	01	02	Bangunan Gedung Terpadu Tinggal	50

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	3	02	Momenan	
1	3	3	02	01 Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
1	3	3	03	Bangunan Memara	
1	3	3	03	01 Bangunan Memara Persegi	40
1	3	3	04	Tugu Titik Kontrol/Pasi	
1	3	3	04	01 Tugu Tanda Batas	50
1	3	4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4	01	Jalan dan Jembatan	
1	3	4	01	01 Jalan	10
1	3	4	01	02 Jembatan	50
1	3	4	02	Bangunan Air	
1	3	4	02	01 Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	02	02 Bangunan Pengaliran Pasang Surut	50
1	3	4	02	03 Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25
1	3	4	02	04 Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	02	05 Bangunan Pengaliran/Saluran Air dan Air Tawar	30
1	3	4	02	06 Bangunan Air Bersih/Air Baku	40
1	3	4	02	07 Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	03	Instalasi	
1	3	4	03	01 Instalasi Air Bersih/Air Baku	30
1	3	4	03	02 Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	03	03 Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	03	04 Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	03	05 Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	03	06 Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	03	07 Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	03	08 Instalasi Gas	30
1	3	4	03	09 Instalasi Pemanasan	20
1	3	4	03	10 Instalasi Lain	5
1	3	4	04	Jaringan	
1	3	4	04	01 Jaringan Air Minum	30
1	3	4	04	02 Jaringan Listrik	40
1	3	4	04	03 Jaringan Telepon	20
1	3	4	04	04 Jaringan Gas	30
1	3	5		Aset Tetap Lainnya	
1	3	5	01	Bahan Perpustakaan	-
1	3	5	01	Buku dan Perpustakaan	-
1	3	5	2	Barang Berwujud Kesehatan/Keluhan/Olahraga	5
1	3	5	3	Hewan	-
1	3	5	4	Biota Perairan	-

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	5	5		Tanaman	-
1	3	5	6		Bidang Koleksi Negeri Hidayat	5
1	3	5	7		Aset Tetap - Renovasi	5

Sumber : Peraturan Bupati Kab. Beluung Mengundang Selatan Nomor 75 Tahun 2019

Aset tetap— renovasi dilakukan penyusutan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

Aset tetap berikut tidak disusutkan yaitu tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan ternak, dan tanaman.

Aset tetap lainnya berupa hewan, tanaman, buku-buku perpustakaan, hewan ternak dan tanaman diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut tidak dapat digunakan atau mati.

Pelaksanaan penyusutan pertama kali dilakukan pada tahun 2015. Perhitungan penyusutan aset tetap dihitung secara bulanan, sedangkan penyajian laporan penyusutan dilakukan semesteran. Aset tetap yang direklasifikasikan sebagai aset lainnya dalam neraca berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga dan aset *idle* disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap aset tetap yang direklasifikasikan sebagai aset lainnya berupa:

- Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
- Aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Perbaikan aset tetap yang menambah masa manfaat atau menambah kapasitas aset tetap yang bersangkutan disebut pengeluaran modal (*capital expenditure*). Pengeluaran ini akan mempengaruhi nilai yang dapat disusutkan, perkiraan output dan bahkan masa manfaat aset yang bersangkutan. Pengeluaran modal ditambahkan pada nilai buku aset tetap yang bersangkutan. Nilai buku aset ditambah dengan pengeluaran modal akan menjadi nilai baru yang disusutkan selama sisa manfaat aset yang bersangkutan.

4.3.1.4. Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk di dalam aset lainnya adalah :

1. Tagihan piutang penjualan angsuran;
2. Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah;
3. Kemitraan dengan pihak ketiga;
4. Aset tidak berwujud; dan
5. Aset lain-lain.

64

Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat :

1. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
2. Diterima atau kepemilikannya dan / atau penguasaannya berpindah.

Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.3.2. Kebijakan Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

Kewajiban dapat timbul dari :

1. Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*).
2. Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan.
3. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*).
4. Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.

4.3.3. Kebijakan Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban. Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.

4.3.4. Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat :

- 1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
- 2) Pendapatan direalisasi yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.3.5. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan LRA terdiri dari :

1. Pendapatan Pajak Asli Daerah – LRA;
2. Pendapatan Transfer – LRA; dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA.

Pendapatan-LRA diakui pada saat :

1. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
2. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh bendahara penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
3. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
4. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
5. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.3.6. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui pada saat:

1. Timbulnya kewajiban;
2. Terjadinya konsumsi aset; dan
3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban diukur sesuai dengan :

1. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
2. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

4.3.7. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah dan bendahara pengeluaran yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui pada saat :

1. Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

4.3.8. Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada laporan realisasi anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke rekening kas umum daerah.

Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada laporan operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:

1. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
2. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada laporan realisasi anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke rekening kas umum daerah. Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada laporan operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.

4.3.9. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada rekening kas umum daerah. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

4.3.10. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan

Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Koreksi diakui saat ditemukannya kesalahan. Koreksi diukur sesuai dengan nilai kesalahan yang ditemukan.

Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi. Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya dan adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada laporan perubahan ekuitas dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain. Agar memperoleh laporan keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada laporan operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada laporan operasional tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut. Pengaruh perubahan terhadap laporan operasional periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain. Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada - harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

BAB V
PENJELASAN POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya selama 1 (satu) periode yakni 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024. Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp629.230.716.390,11 atau sebesar 98,42% dari alokasi anggaran sebesar Rp639.329.112.828,00 yang ditetapkan pada Perubahan APBD, sedangkan belanja daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp663.378.058.096,15 atau sebesar 95,03% dari alokasi anggaran sebesar Rp698.078.854.364,51 yang ditetapkan pada Perubahan APBD, sehingga menghasilkan Defisit LRA tahun 2024 sebesar Rp34.147.341.706,04. Pembiayaan Netto tahun 2024 terealisasi sebesar Rp59.060.379.773,51 atau sebesar 100,54% dari alokasi anggaran yang ditetapkan pada Perubahan APBD sebesar Rp58.749.741.536,51. Adapun rincian realisasi anggaran per sub rincian obyek dapat dilihat dalam Lampiran I pada laporan keuangan ini.

5.1.1. Pendapatan Daerah

Realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp629.230.716.390,11 atau sebesar 98,42% dari total anggaran yang ditetapkan pada perubahan APBD sebesar Rp639.329.112.828,00. Jika dibandingkan dengan pendapatan tahun 2023 sebesar Rp550.993.406.926,21, maka pendapatan tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp78.237.309.463,90 atau sebesar 14,20%. Jenis pendapatan daerah ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang diklasifikasikan menjadi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Tabel 5.1 Pendapatan LRA

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 Rp	REALISASI 2024 Rp	%	REALISASI 2023 Rp
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	20.088.994.856,00	22.198.440.925,11	110,50	21.060.974.474,21
2	Pendapatan Transfer	612.741.829.148,00	602.860.904.972,00	98,39	525.894.086.045,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	6.498.288.824,00	4.171.370.493,00	64,19	4.038.346.407,00
JUMLAH		639.329.112.828,00	629.230.716.390,11	98,42	550.993.406.926,21

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024

5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2024 mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal

94, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan telah menyusun Peraturan Daerah yang mengatur Pajak dan Retribusi Daerah dalam pengaturan satu Peraturan Daerah.

Tabel 5.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
		2024	2024		2023
		Rp	Rp		Rp
1	Pajak Daerah	4.750.287.502,00	6.073.470.873,00	127,85	7.359.403.697,00
2	Retribusi Daerah	10.449.422.400,00	11.273.645.225,00	107,89	9.049.035.543,00
3	Hasil Pengalokasian Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	640.020.357,00	640.020.357,00	100,00	532.969.435,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	4.249.264.597,00	4.211.304.470,11	99,11	4.119.565.779,21
JUMLAH		20.088.994.856,00	22.198.440.925,11	110,50	21.068.974.474,21

Sumber / Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024

Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp22.198.440.925,11 atau sebesar 110,50% dari total anggaran sebesar Rp20.088.994.856,00 yang ditetapkan pada perubahan APBD. Realisasi Pendapatan Asli Daerah ini mengalami kenaikan sebesar Rp1.137.466.450,90 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Uraian lebih lanjut atas Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut.

5.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

Tabel 5.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
		2024	2024		2023
		Rp	Rp		Rp
1	Pajak Hotel	39.900.000,00	39.831.700,00	99,83	36.472.950,00
2	Pajak Restoran	1.621.200.000,00	1.586.552.116,00	97,86	3.240.858.625,00
3	Pajak Hiburan	3.000.000,00	3.740.000,00	103,89	2.223.673,00
4	Pajak Reklame	124.377.000,00	150.261.442,00	120,81	132.887.498,00
5	Pajak Penerangan Jalan	1.084.075.500,00	1.812.829.715,00	167,22	1.561.278.399,00
6	Pajak Sarang Burung Walet	10.000.000,00	13.500.000,00	135,00	11.000.000,00
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	677.850.000,00	1.267.393.762,00	186,97	1.329.031.065,00
8	PBB P2	1.159.285.002,00	1.160.530.638,00	100,11	1.001.126.485,00
9	Rea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	30.000.000,00	38.831.500,00	129,44	44.425.000,00
JUMLAH		4.750.287.502,00	6.073.470.873,00	127,85	7.359.403.697,00

Sumber / Laporan Realisasi Anggaran Berdasarkan Objek Tahun 2024

Dari seluruh objek pendapatan pajak daerah, dapat dilihat terdapat 7 (tujuh) objek pajak yang melampaui target pendapatan pada Perubahan APBD tahun anggaran 2024 yaitu Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Meskipun terdapat beberapa objek pajak melampaui target yang ditetapkan dalam Perubahan APBD, namun secara keseluruhan penerimaan dari pajak daerah mengalami penurunan sebesar Rp1.285.932.824,00 jika dibandingkan dengan penerimaan pada tahun sebelumnya. Pendapatan Pajak Daerah dari masing-masing objek pajak dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Pajak hotel tahun 2024 terealisasi sebesar Rp39.831.700,00 atau sebesar 99,83% dari anggaran sebesar Rp39.900.000,00 yang ditetapkan pada Perubahan APBD. Meskipun tidak mencapai target yang ditetapkan pada Perubahan APBD, jenis pajak ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp3.358.750,00 atau sekitar 9,21%. Realisasi penerimaan pajak hotel ini berasal dari Rumah Penginapan dan Sejenisnya sebesar Rp39.481.700,00 dan Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (sepuluh) sebesar Rp350.000,00. Kurangnya realisasi Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (sepuluh) karena setelah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah daerah tidak lagi melakukan pungutan atas pajak tersebut. Pajak atas Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (sepuluh) tidak lagi termasuk dalam bagian objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Perhotelan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Realisasi Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (sepuluh) sebesar Rp350.000,00 merupakan Jasa Perhotelan tahun 2023 yang disetorkan oleh pemilik Rumah Kos pada tahun 2024.
2. Pendapatan pajak restoran tahun 2024 terealisasi sebesar Rp1.586.552.116,00 atau sebesar 97,86% dari anggaran yang ditetapkan pada Perubahan APBD sebesar Rp1.621.200.000,00. Realisasi pajak restoran ini terdiri dari pajak rumah makan dan sejenisnya sebesar Rp29.957.431,00 dan Pajak Jasa Boga/Katering dan sejenisnya sebesar Rp1.556.594.685,00. Adapun realisasi pajak restoran ini berasal dari pelunasan piutang pajak restoran tahun 2023 dan penerimaan untuk tahun 2024. Penerimaan pajak restoran terbanyak diperoleh dari PT Mawar Sharron Kuisin. PT Mawar Sharron Kuisin merupakan perusahaan penyedia makanan yang menggantikan PT Tata Wisata pada perusahaan tambang PT J-Resources yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
3. Pendapatan pajak hiburan tahun 2024 terealisasi sebesar Rp3.740.000,00 atau sebesar 103,89% dari anggaran yang ditetapkan pada Perubahan APBD. Realisasi pajak ini merupakan realisasi atas Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya.
4. Realisasi pendapatan pajak reklame tahun 2024 adalah sebesar Rp150.261.442,00 atau sebesar 120,81% dari anggaran yang ditetapkan pada Perubahan APBD sebesar Rp124.377.000,00. Pendapatan pajak reklame ini merupakan pendapatan dari pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron selama tahun 2024.
5. Pendapatan pajak penerangan jalan tahun 2024 adalah sebesar Rp1.812.829.715,00 atau sebesar 167,22% dari anggaran yang ditetapkan pada Perubahan APBD sebesar Rp1.084.075.500,00. Setoran pajak penerangan jalan ini bersumber dari PT PLN Persero Cabang Kotamobagu. Penerimaan pajak penerangan jalan ini terdiri dari pelunasan piutang pajak penerangan jalan Bulan Desember tahun 2023 sebesar Rp148.815.466,00 dan penerimaan pajak penerangan jalan bulan Januari s.d November tahun 2024 sebesar Rp1.664.014.249,00.

6. Pendapatan pajak sarang burung walet tahun 2024 adalah sebesar Rp13.500.000,00 atau sebesar 135,00% dari anggaran yang ditetapkan pada perubahan APBD sebesar Rp10.000.000,00. Realisasi penerimaan ini melebihi penerimaan pada tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp11.000.000,00. Adapun pelampauan target penerimaan pajak sarang burung walet dapat disebabkan oleh peningkatan pengambilan atau pengusahaan sarang burung walet ataupun meningkatnya nilai jual sarang burung walet. Setoran pajak sarang burung walet diterima setelah Perubahan APBD sehingga target anggaran penerimaannya tidak disesuaikan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
7. Realisasi pendapatan pajak mineral bukan logam dan batuan tahun 2024 sebesar Rp1.267.393.762,00 atau mencapai 186,97% dari anggaran pada Perubahan APBD sebesar Rp677.850.000,00. Adapun realisasi penerimaan dari pajak ini jauh melampaui target yang ditetapkan karena masuknya beberapa proyek pekerjaan dari luar daerah ke Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Adanya ketidakpastian berapa jumlah proyek pekerjaan dari luar daerah yang akan masuk di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2024 menyebabkan Pemerintah Daerah menetapkan target pendapatannya tidak jauh dari target tahun sebelumnya. Pendapatan pajak ini terdiri dari pendapatan pajak batu kapur sebesar Rp191.501.750,00, pajak pasir dan kerikil sebesar Rp854.665.229,00, pajak pasir kuarsa sebesar Rp86.224.104,00, dan Pajak Tanah Serap (*Fullers Earth*) sebesar Rp135.002.679,00.
8. Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) tahun 2024 adalah sebesar Rp1.160.530.638,00 atau sebesar 100,11% dari anggaran sebesar Rp1.159.285.002,00 pada Perubahan APBD. Pendapatan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun 2024 terdiri dari pajak bumi dan bangunan perkotaan sebesar Rp101.538.616,00 dan pajak bumi dan bangunan perdesaan sebesar Rp1.058.992.022,00. Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ini merupakan realisasi atas masa pajak tahun 2023 sebesar Rp4.159.662,00 dan masa pajak tahun 2024 sebesar Rp1.156.370.976,00.
9. Realisasi Pendapatan BPHTB tahun 2024 adalah sebesar Rp38.831.500,00 atau sebesar 129,44% dari anggaran sebesar Rp30.000.000,00 pada Perubahan APBD. Realisasi penerimaan ini merupakan realisasi dari BPHTB Pemberian Hak Baru selama tahun 2024. Penerimaan tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp5.593.500,00 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

Tabel 5.4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
		2024 Rp	2024 Rp		2023 Rp
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	10.114.470.400,00	11.034.842.535,00	109,10	8.757.960.223,00
2	Retribusi Pelayanan Pasar	179.952.000,00	196.923.500,00	109,43	171.209.000,00
3	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	10.000.000,00	-	-	-
4	Retribusi Tempat Pelelangan	100.000.000,00	-	-	88.567.500,00
5	Retribusi Perjudian Produksi Usaha Daerah	5.000.000,00	-	-	-

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
		2024 Rp	2024 Rp		2023 Rp
6	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	40.000.000,00	41.879.190,00	104,70	31.298.820,00
JUMLAH		10.449.422.400,00	11.273.645.225,00	107,89	9.049.035.543,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Berdasarkan Rincian Objek Tahun 2024

Realisasi pendapatan retribusi daerah pada tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp11.273.645.225,00 atau sebesar 107,89% dari anggaran pada Perubahan APBD sebesar Rp10.449.422.400,00. Realisasi penerimaan pendapatan retribusi daerah tahun 2024 lebih besar jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp9.049.035.543,00. Adapun rincian pendapatan retribusi daerah pada tabel 5.4 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Realisasi pendapatan retribusi pelayanan kesehatan tahun 2024 sebesar Rp11.034.842.535,00 terdiri dari realisasi pendapatan retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas, pendapatan retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas Keliling, pendapatan retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas Pembantu dan pendapatan retribusi rumah sakit umum daerah. Adapun rincian penerimaan retribusi pelayanan kesehatan di masing-masing unit kerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.5 Retribusi Pelayanan Kesehatan

NO	OPD/UPD	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (Dana Kapitasi)	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	TOTAL
1	DINAS KESIHATAN	-	1.125.836.000,00	-	-	-	1.125.836.000,00
2	PUSKESMAS MOLIBAGU	12.422.715,00	-	-	7.267.330,00	-	19.690.045,00
3	PUSKESMAS DUMINANGA	10.601.700,00	-	-	1.670.000,00	-	12.271.700,00
4	PUSKESMAS MILANGODAA	14.254.000,00	-	1.073.000,00	870.000,00	-	16.197.000,00
5	PUSKESMAS PINOLISIAN	34.303.800,00	-	-	300.000,00	-	34.603.800,00
6	PUSKESMAS ADOW	24.279.000,00	-	-	287.000,00	-	24.566.000,00
7	PUSKESMAS DUMAGIN	6.467.000,00	-	-	1.100.000,00	-	7.567.000,00
8	PUSKESMAS ONGGUNOI	1.170.000,00	-	-	770.000,00	-	1.940.000,00
9	PUSKESMAS MOMALIA	4.714.000,00	-	-	4.400.000,00	-	9.114.000,00
10	PUSKESMAS SINOMBAYUGA	1.400.000,00	-	100.000,00	1.000.000,00	-	2.500.000,00
11	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	-	-	-	-	8.775.252.500,00	8.775.252.500,00
JUMLAH		112.167.215,00	1.125.836.000,00	1.173.000,00	26.425.830,00	8.775.252.500,00	11.034.842.535,00

Sumber : Rekapitulasi Penerimaan Tahun 2024

Pendapatan retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas pada Dinas Kesehatan merupakan penerimaan Dana Non Kapitasi tahun 2024 untuk Puskesmas Molibagu sebesar Rp113.376.800,00, Puskesmas Duminanga sebesar Rp45.895.800,00, Puskesmas Milangodaa sebesar Rp35.971.000,00, Puskesmas Pinolosian sebesar Rp355.346.600,00, Puskesmas Adow sebesar Rp58.699.100,00, Puskesmas Dumagin sebesar Rp6.388.400,00, Puskesmas Momalia sebesar Rp493.574.500,00 dan Puskesmas Onggunoi sebesar Rp16.573.900,00.

2. Pendapatan retribusi pelayanan pasar tahun 2024 adalah sebesar Rp196.923.500,00 atau sebesar 109,43% dari anggaran sebesar Rp179.952.000,00 yang ditetapkan pada Perubahan APBD. Pendapatan retribusi pelayanan pasar ini terdiri dari pendapatan retribusi pelataran sebesar Rp58.936.000,00, pendapatan retribusi los sebesar Rp57.147.000,00 dan pendapatan retribusi kios sebesar Rp80.840.500,00. Retribusi pelayanan pasar ini dikelola oleh Dinas Perindustrian.
3. Tidak terdapat Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah selama tahun 2024. Target anggaran retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp10.000.000,00 merupakan Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor yang dianggarkan pada Dinas Pariwisata sebesar Rp5.000.000,00 dan retribusi Pemakaian Alat sebesar Rp5.000.000,00 yang dianggarkan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor pada Dinas Pariwisata tersebut belum diatur dengan Peraturan Daerah sehingga realisasinya hanya dicatat sebagai pendapatan lain-lain PAD yang sah lainnya.
4. Tidak terdapat realisasi pendapatan retribusi tempat pelelangan tahun 2024, namun ditetapkan target penerimaannya sebesar Rp100.000.000,00 pada Perubahan APBD. Pemerintah Daerah tidak lagi melakukan pemungutan retribusi tempat pelelangan karena sesuai Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 menyatakan bahwa pembayaran pungutan hasil perikanan pascaproduksi dilakukan ke kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBK.
5. Tidak terdapat realisasi pada Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah selama tahun 2024. Retribusi penjualan produksi usaha daerah ini berupa benih ikan yang dikelola oleh Dinas Perikanan. Dinas Perikanan menargetkan penerimaan ini sebesar Rp5.000.000,00 namun terdapat kendala teknis di lapangan sehingga tidak menghasilkan bibit ikan untuk dijual.
6. Realisasi pendapatan retribusi persetujuan bangunan gedung untuk tahun 2024 sebesar Rp41.879.190,00 atau sebesar 104,70% dari target penerimaan pada Perubahan APBD sebesar Rp40.000.000,00. Sebelumnya retribusi ini merupakan retribusi izin mendirikan bangunan yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Namun setelah diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 berubah menjadi retribusi persetujuan bangunan gedung.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 3 (tiga) penerimaan retribusi daerah yang memenuhi target bahkan melampaui target pada Perubahan APBD yakni retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan pasar dan retribusi persetujuan bangunan gedung. Terjadinya berbagai kendala teknis di lapangan menyebabkan beberapa target retribusi tidak tercapai.

5.1.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA

Realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2024 sebesar Rp640.020.357,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran pada Perubahan APBD. Realisasi ini merupakan penerimaan bagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada PT Bank SulutGo untuk tahun 2023.

5.1.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LRA

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan retribusi serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada tahun 2024 sebesar Rp4.211.304.470,11 atau sebesar 99,11% dari anggaran yang ditetapkan pada Perubahan APBD sebesar Rp4.249.264.597,00.

Tabel 5.6 Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah – LRA

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 Rp	REALISASI 2024 Rp	%	REALISASI 2023 Rp
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.179.072.800,00	1.179.072.800,00	100,00	-
2	Hasil Penunantuan BMD yang Tidak Dipisahkan	289.702.000,00	158.062.000,00	54,56	139.980.000,00
3	Jasa Giro	848.768.363,00	786.577.727,00	92,67	849.200.824,00
4	Pemadapan Bunga	1.574.110.563,00	1.574.110.563,00	100,00	2.318.701.289,00
5	Penerimaan atas Tamatan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	62.078.198,00	134.463.483,67	216,60	388.267.297,00
6	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Beban Lain/Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	144.951,00	25.923.861,44	17.88,37	6.619.767,00
7	Pendapatan Denda atau Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	113.492.413,00	-	77.413.118,07
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah	5.579.418,00	11.609.298,00	324,53	10.144.660,00
9	Pendapatan Hasil Eksekusi atau Jaminan	13.295.900,00	13.295.900,00	100,00	-
10	Pendapatan dari Pengembalian	278.512.404,00	214.696.424,00	77,09	329.238.824,14
JUMLAH		4.249.264.597,00	4.211.304.470,11	99,11	4.119.565.779,21

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Berdasarkan Objek Tahun 2024

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berdasarkan objek pendapatan dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Realisasi penerimaan hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan tahun 2024 sebesar Rp1.179.072.800,00 atau sebesar 100,00% dari target yang ditetapkan pada Perubahan APBD. Berbeda dengan tahun sebelumnya dimana tidak ada realisasi yang disebabkan oleh tidak dilaksanakannya lelang atau penjualan barang milik daerah yang sudah tidak terpakai. Realisasi penerimaan ini merupakan hasil penjualan peralatan/mesin yang sudah tidak terpakai/rusak dan terbagi pada beberapa OPD yaitu Sekretariat DPRD sebesar Rp349.550.800,00, Dinas PPKB PP dan PA sebesar Rp57.455.000,00, Dinas Perindustrian sebesar Rp4.916.000,00, BPKPD sebesar Rp27.854.000,00, Inspektorat Daerah sebesar Rp15.559.000,00, Bappelitbangda sebesar Rp8.049.750,00, Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp1.919.800,00, BKPSDM sebesar Rp6.041.000,00, Bagian Umum SETDA

44

sebesar Rp327.230.450,00, Kecamatan Bolaang Uki sebesar Rp300.000,00, Kecamatan Pinolosian Timur sebesar Rp7.843.000,00, Kecamatan Helumo sebesar Rp200.000,00, Dinas PUTR sebesar Rp353.701.800,00, dan Dinas Kesehatan sebesar Rp18.452.200,00.

2. Realisasi hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan tahun 2024 sebesar Rp158.062.000,00 atau sebesar 54,56% dari total anggaran sebesar Rp289.702.000,00 pada Perubahan APBD. Realisasi penerimaan ini terdiri dari hasil sewa BMD sebesar Rp32.662.000,00 dan hasil kerja sama pemanfaatan BMD sebesar Rp125.400.000,00. Hasil sewa BMD merupakan sewa atas lahan untuk ruang ATM Bank Sulutgo Kantor Kas Pembantu Cabang Molibagu sebesar Rp7.546.000,00, Sewa Rumah Makan/Tempat Kompleks Perkantoran Panango sebesar Rp3.000.000,00, dan sewa kantor kas pembantu Bank Sulut Cabang Molibagu sebesar Rp22.116.000,00. Sedangkan hasil kerja sama pemanfaatan BMD merupakan hasil kerja sama pemanfaatan Pabrik Es Milik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan selama tahun 2024.
3. Realisasi penerimaan jasa giro tahun 2024 sebesar Rp786.577.727,00 atau sebesar 92,67% dari anggaran sebesar Rp848.768.363,00 pada Perubahan APBD. Pendapatan jasa giro ini terdiri dari jasa giro kas daerah sebesar Rp662.645.456,00, jasa giro pada kas bendahara sebesar Rp13.854.801,00, jasa giro pada rekening Dana Cadangan sebesar Rp85.431.263,00, jasa giro pada rekening dana BOS sebesar Rp8.432.899,00, jasa giro dana Kapitasi pada FKTP sebesar Rp2.829.546,00 dan jasa giro pada rekening dana BOK Puskesmas sebesar Rp13.383.762,00.
4. Selain menerima pendapatan jasa giro, Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan juga menerima pendapatan bunga yang bersumber dari penempatan deposito pada PT Bank Sulutgo Cabang Molibagu selama tahun 2024 dan penerimaan remunerasi dari dana milik Pemerintah Daerah pada fasilitas *Treasury Deposit Facility* (TDF). Remunerasi merupakan imbalan bunga atas penyimpanan dana milik Pemerintah Daerah pada fasilitas TDF. Adapun realisasi pendapatan bunga deposito tahun 2024 adalah sebesar Rp1.574.110.563,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran pada Perubahan APBD yang terdiri dari bunga deposito pada Bank Sulutgo sebesar Rp1.506.986.291,00 dan remunerasi sebesar Rp67.124.272,00.
5. Realisasi penerimaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) tahun anggaran 2024 sebesar Rp134.463.483,67 atau sebesar 216,60% dari anggaran yang ditetapkan pada Perubahan APBD sebesar Rp62.078.198,00. Realisasi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) ini merupakan penerimaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
6. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain/Lain-lain PAD yang Sah Lainnya merupakan akun untuk menampung semua penerimaan yang tidak dapat diklasifikasi sebagai penerimaan jenis tertentu. Realisasi penerimaan ini adalah sebesar Rp25.923.861,44 atau sebesar 17,884,57% dari anggaran sebesar Rp144.951,00 yang ditetapkan pada Perubahan APBD. Penerimaan ini terdiri dari penerimaan atas tempat rekreasi pantai modisi sebesar Rp514.400,00 dan penerimaan atas sewa alat selam sebesar Rp3.220.000,00 pada Dinas Pariwisata serta penerimaan lain-lain PAD lainnya sebesar Rp22.189.461,44.
7. Terdapat realisasi pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan tahun 2024 sebesar Rp113.492.413,00 namun tidak dianggarkan target penerimaannya pada Perubahan APBD. Pendapatan ini diperoleh dari pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp10.973.413,00, dan pendapatan denda atas

keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp102.519.000,00. Tidak dianggarkannya penerimaan ini karena diharapkan semua pekerjaan dapat dilaksanakan tepat waktu.

8. Realisasi pendapatan denda pajak daerah tahun 2024 sebesar Rp11.609.298,00 atau sebesar 324,33% dari anggaran pada Perubahan APBD sebesar Rp3.579.418,00. Realisasi pendapatan denda pajak daerah ini terdiri dari pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak hotel sebesar Rp547.820,00, denda pajak restoran sebesar Rp1.746.309,00, denda pajak hiburan sebesar Rp44.220,00, denda pajak reklame sebesar Rp90.068,00, denda pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp1.892.214,00 dan pendapatan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebesar Rp7.288.667,00.
9. Realisasi pendapatan hasil eksekusi atas jaminan tahun 2024 sebesar Rp13.295.900,00 atau sebesar 100,00% dari total anggaran pada Perubahan APBD. Realisasi ini merupakan hasil eksekusi atas jaminan pengadaan barang/jasa pekerjaan pembangunan ruang UKS SMP Negeri Kombot atas nama CV. Kaisar Laut pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
10. Realisasi pendapatan dari pengembalian tahun 2024 sebesar Rp214.696.424,00 atau sebesar 77,09% dari total anggaran sebesar Rp278.512.404,00 pada Perubahan APBD. Adapun rincian pendapatan ini dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.7 Anggaran dan Realisasi Pendapatan dari Pengembalian

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
		2024 Rp	2024 Rp		2023 Rp
1	Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	231.352.004,00	103.793.545,00	44,86	164.979.193,00
2	Kelebihan Pembayaran Penjualan Dinas	13.600.050,00	240.000,00	1,76	31.463.211,00
3	Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	-	-	-	8.984.600,00
4	Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	33.560.350,00	32.630.018,00	97,23	820.424,00
5	Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-	10.000.000,00	-	-
6	Kelebihan Pembayaran Belanja Barisan Sosial kepada Individu	-	400.000,00	-	-
7	Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Perawatan dan Mesin-Komputer	-	16.206.500,00	-	-
8	Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	-	38.257.561,00	-	43.566.848,00

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
		2024 Rp	2024 Rp		2023 Rp
9	Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti	-	-	-	1.601.139,00
10	Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan-Jalan dan Jembatan	-	12.668.800,00	-	74.815.409,14
11	Kelebihan Pembayaran Belanja Tidak Terbaga	-	-	-	3.000.000,00
12	Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	-	500.000,00	-	-
JUMLAH		278.512.464,00	214.696.424,00	77,09	329.238.824,14

Sumber : Rincian Objek Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024

5.1.1.2. Pendapatan Transfer - LRA

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang diterima baik dari Pemerintah Pusat dalam bentuk dana perimbangan, dana insentif daerah dan dana desa maupun dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam bentuk bagi hasil pajak dan bantuan keuangan. Pendapatan transfer pada tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp602.860.904.972,00 atau sebesar 98,39% dari total target anggaran sebesar Rp612.741.829.148,00 pada perubahan APBD. Adapun jenis pendapatan transfer adalah sebagai berikut.

Tabel 5.8 Pendapatan Transfer - LRA

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
		2024 Rp	2024 Rp		2023 Rp
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	587.361.302.613,00	586.294.368.350,00	99,82	507.809.540.110,00
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	25.380.526.535,00	16.566.536.622,00	65,27	18.084.745.935,00
JUMLAH		612.741.829.148,00	602.860.904.972,00	98,39	525.894.086.045,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024

5.1.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp586.294.368.350,00 atau sebesar 99,82% dari anggaran sebesar Rp587.361.302.613,00 yang ditetapkan perubahan APBD. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi kenaikan realisasi penerimaan sebesar Rp78.485.028.240,00. Adapun pendapatan transfer pemerintah pusat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.9 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 Rp	REALISASI 2024 Rp	%	REALISASI 2023 Rp
1	Dana Perimbangan	524.970.635.613,00	512.267.844.350,00	97,58	439.590.536.110,00
2	Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	-	6.113.683.000,00
3	Dana Desa	62.390.667.000,00	62.285.601.000,00	99,83	61.905.121.000,00
4	Insentif Fisik	-	11.740.923.000,00	-	-
JUMLAH		587.361.302.613,00	586.294.368.350,00	99,82	507.809.340.110,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024

5.1.1.2.1.1 Dana Perimbangan

Dana perimbangan tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp512.267.844.350,00 atau sebesar 97,58% dari anggaran yang ditetapkan pada Perubahan APBD sebesar Rp524.970.635.613,00. Adapun rincian anggaran dan realisasi dana perimbangan selama tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.10 Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 Rp	REALISASI 2024 Rp	%	REALISASI 2023 Rp
1	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil (DBH)	26.695.609.000,00	26.695.609.000,00	100,00	28.345.540.103,00
2	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum (DAU)	365.330.388.000,00	364.751.801.275,00	99,84	345.342.407.000,00
3	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	79.076.593.938,00	78.191.816.657,00	98,88	26.481.608.264,00
4	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	53.868.044.674,00	42.628.817.418,00	79,14	39.420.980.653,00
JUMLAH		524.970.635.613,00	512.267.844.350,00	97,58	439.590.536.110,00

Sumber: Rincian Objek Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024

5.1.1.2.1.1.1 Dana Bagi Hasil (DBH)

Anggaran dan realisasi dana bagi hasil selama tahun 2024 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.11 Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH)

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 Rp	REALISASI 2024 Rp	%	REALISASI 2023 Rp
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	8.448.106.000,00	8.448.106.000,00	100,00	8.943.778.646,00
2	DBH PPh Pasal 21	2.355.278.000,00	2.670.031.000,00	96,91	2.610.991.034,00

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
		2024 Rp	2024 Rp		2023 Rp
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	5.237.000,00	90.485.000,00	1.727,80	243.440.509,00
4	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perumahan Panas Bumi	1.210.469.000,00	1.210.469.000,00	100,00	1.730.252.924,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Tambau-Landrem	-	375.360.000,00	-	418.155.869,00
6	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Tambau-Royalty	12.362.637.000,00	11.987.297.000,00	96,96	11.990.025.051,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provial Sumber Daya Hutan (PSDH)	31.061.000,00	31.061.000,00	100,00	33.719.949,00
8	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.882.900.000,00	1.882.800.000,00	100,00	2.377.176.211,00
JUMLAH		26.695.609.000,00	26.695.609.000,00	100,00	28.345.540.193,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Berdasarkan Rincian Objek Tahun 2024

1. Realisasi Bagi Hasil Dari Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2024 adalah sebesar Rp8.448.106.000,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran pada Perubahan APBD. Realisasi ini terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Migas sebesar Rp447.214.000,00, Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Non Migas sebesar Rp6.238.411.000,00, Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (TDF tahun 2023) sebesar Rp1.565.475.000,00, Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan sebesar Rp8.022.000,00, Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya sebesar Rp85.630.000,00 dan Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Panas Bumi sebesar Rp103.354.000,00.
2. Realisasi Dana Bagi Hasil PPh 21 tahun 2024 sebesar Rp2.670.031.000,00 atau sebesar 96,91% dari total anggaran yang ditetapkan pada Perubahan APBD sebesar Rp2.755.279.000,00. Realisasi penerimaan ini merupakan penerimaan atas alokasi DBH PPh 21 tahun 2024 dan Dana yang ada pada fasilitas TDF tahun 2023. Target penerimaan sebesar Rp2.755.279.000,00 merupakan alokasi berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 ditambah dengan dana yang ada pada fasilitas TDF tahun 2023. Adapun target penerimaan tersebut terdiri dari Dana Bagi Hasil PPh 21 sebesar Rp2.216.964.000,00 dan Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN sebesar Rp85.248.000,00, dan dana TDF tahun 2023 sebesar Rp453.067.000,00. Berdasarkan rincian tersebut, dapat dikatakan bahwa Dana Bagi Hasil PPh 21 terealisasi sebesar 100,00%. Hanya saja pada saat penyusunan Perubahan APBD tidak dipisahkan antara target penerimaan DBH PPh 21 dan DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN sehingga kelihatan tidak terealisasi sebesar 100,00%.
3. Realisasi Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN tahun 2024 sebesar Rp90.485.000,00 atau sebesar 1.727,80% dari anggaran yang ditetapkan pada Perubahan APBD sebesar Rp5.237.000,00. Target penerimaan pada Perubahan APBD sebesar Rp5.237.000,00 merupakan dana yang ada pada fasilitas TDF tahun 2023. Sebagaimana

telah dijelaskan sebelumnya bahwa target penerimaan dana bagi hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sekaligus pada dana bagi hasil PPh 21, sehingga jika dilihat dari angka realisasi maka dapat dikatakan bahwa target penerimaannya terealisasi sebesar 100,00%.

4. Realisasi penerimaan DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi tahun 2024 sebesar Rp1.210.469.000,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran sebesar Rp1.210.469.000,00 yang ditetapkan pada Perubahan APBD. Penerimaan ini terdiri dari alokasi DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi tahun 2024 sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp658.754.000,00 ditambah dengan dana yang ada pada fasilitas TDF tahun 2023 sebesar Rp551.715.000,00.
5. Realisasi DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent tahun 2024 sebesar Rp375.360.000,00. Tidak terlihat adanya target penerimaan untuk DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent karena pada Perubahan APBD tahun anggaran 2024 alokasi penerimaannya dicatat pada target penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty. Adapun target penerimaan DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent yang dicatat pada target penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty sebesar alokasi yang ada pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 yaitu Rp279.996.000,00 ditambah dengan dana yang ada pada fasilitas TDF tahun 2023 sebesar Rp95.364.000,00, sehingga dapat dikatakan bahwa DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent tahun 2024 terealisasi sebesar 100,00%.
6. Realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty tahun 2024 sebesar Rp11.987.297.000,00 atau sebesar 96,96% dari total anggaran sebesar Rp12.362.657.000,00 pada Perubahan APBD. Realisasi penerimaan ini merupakan penerimaan atas alokasi untuk tahun 2024 sebesar Rp8.748.315.000,00 berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 ditambah dengan dana yang ada pada fasilitas TDF tahun 2023 sebesar Rp3.238.982.000,00.
7. Realisasi DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) tahun 2024 sebesar Rp31.061.000,00 atau sebesar 100,00% dari total anggaran pada Perubahan APBD sebesar Rp31.061.000,00. Penerimaan ini merupakan penerimaan atas alokasi DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) untuk tahun 2024 berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.610.000,00 ditambah dengan Rp25.451.000,00 yang merupakan dana yang ada pada fasilitas TDF tahun 2023.
8. Penerimaan DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan tahun 2024 terealisasi sebesar Rp1.882.800.000,00 atau sebesar 100,00% dari total anggaran pada Perubahan APBD sebesar Rp1.882.800.000,00. Realisasi penerimaan ini merupakan penerimaan atas alokasi untuk tahun 2024 sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.882.800.000,00.

5.1.1.2.1.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

Penerimaan Dana Alokasi Umum pada tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp364.751.601.275,00 atau sebesar 99,84% dari anggaran pada Perubahan APBD sebesar Rp365.330.388.000,00. Alokasi anggaran DAU ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024. Adapun realisasi DAU tersebut termasuk didalamnya adalah realisasi tambahan DAU dalam rangka pemberian dukungan pendanaan tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas pegawai ASN guru yang gaji pokoknya bersumber dari APBD dan tidak menerima tambahan penghasilan tahun anggaran 2024 sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 416 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2024 Dalam Rangka Dukungan Pendanaan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Bagi Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah sebesar Rp3.160.186.000,00. Rincian anggaran dan realisasi DAU tahun 2024 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.12 Anggaran dan Realisasi DAU

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 Rp	REALISASI 2024 Rp	%	REALISASI 2023 Rp
1	DAU Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	251.882.282.000,00	251.882.282.000,00	100,00	215.749.130.000,00
2	DAU Yang Ditentukan Penggunaannya				
	Pengajian Formasi PJK	14.819.544.000,00	11.090.571.275,00	74,77	16.443.708.000,00
	Bidang Pendidikan	37.883.611.000,00	37.883.611.000,00	100,00	38.160.880.000,00
	Bidang Kesehatan	25.247.888.000,00	25.247.888.000,00	100,00	34.724.792.000,00
	Bidang Pekerjaan Umum	35.497.063.000,00	35.497.063.000,00	100,00	38.754.627.000,00
3	DAU Tambahan		3.160.186.000,00	-	1.509.270.000,00
	JUMLAH	365.330.388.000,00	364.751.601.275,00	99,84	345.342.407.000,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Berdasarkan Rincian Objek Tahun 2024

5.1.1.2.1.1.3 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik pada tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp78.191.816.657,00 atau sebesar 98,88% dari anggaran pada Perubahan APBD sebesar Rp79.076.593.939,00. Adapun rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah sebagai berikut.

64

Tabel 5.13 Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 Rp	REALISASI 2024 Rp	%	REALISASI 2023 Rp
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	245.219.000,00	244.907.000,00	99,87	459.619.000,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	2.218.508.000,00	2.123.939.000,00	95,74	3.170.272.000,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	2.361.305.000,00	2.259.512.700,00	95,69	2.839.077.000,00
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	-	-	-	646.817.200,00
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Pemangan-Pemurnan AKI dan AKH	-	-	-	561.288.064,00
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler KB	708.980.000,00	776.700.000,00	97,21	-
7	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	8.901.037.000,00	8.880.079.000,00	99,76	-
8	DAK Fisik-Bidang Jalan-Pemangan-Jalan	-	-	-	18.534.748.000,00
9	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Pemangan-Keluarga Berencana	-	-	-	340.900.000,00
10	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pemurnan AKI dan AKH	6.802.722.000,00	6.649.477.152,00	97,75	-
11	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengatan Sistem Kesehatan	3.129.480.000,00	2.748.638.000,00	88,08	107.987.000,00
12	DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Pengantian Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewan)	9.362.029.000,00	9.361.285.500,00	99,99	-
13	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Tematik Pengantian Permukiman Kumuh Terpadu	14.032.007.725,00	14.031.762.000,00	100,00	-
14	DAK Fisik-Bidang Sanitasi Tematik Pengantian Permukiman Kumuh Terpadu	4.347.112.214,00	4.346.145.305,00	99,98	-
15	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Tematik Pengantian Permukiman Kumuh Terpadu	22.107.958.000,00	22.107.958.000,00	100,00	-

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 Rp	REALISASI 2024 Rp	%	REALISASI 2023 Rp
16	DAK Fisik-Bidang Irigasi- Termasuk Pengisian Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewan)	2.513.446.000,00	2.397.013.000,00	95,37	-
17	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Termasuk Pengisian Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewan)	2.265.790.000,00	2.264.400.000,00	99,94	-
JUMLAH		79.076.593.939,00	78.191.816.657,00	98,88	26.481.608.264,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Berdasarkan Rincian Objek Tahun 2024

5.1.1.2.1.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik pada tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp42.628.817.418,00 atau sebesar 79,14% dari total anggaran sebesar Rp53.868.044.674,00 pada Perubahan APBD. Adapun rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan selama tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.14 Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 Rp	REALISASI 2024 Rp	%	REALISASI 2023 Rp
1	DAK Non Fisik-BOS- Reguler	8.856.406.370,00	9.766.655.694,00	110,28	9.847.176.967,00
2	DAK Non Fisik-BOS- Kinerja	525.000.000,00	525.000.000,00	100,00	610.000.000,00
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	17.181.847.000,00	15.980.323.000,00	93,01	15.147.676.704,00
4	DAK Non Fisik-Fasilitas Guru PNSD	752.977.000,00	1.860.165.000,00	247,04	542.712.950,00
5	DAK Non Fisik-TKG PNSD	11.740.923.000,00	-	-	-
6	DAK Non Fisik-ROF PAUD	1.533.880.000,00	1.533.880.000,00	100,00	1.489.860.000,00
7	DAK Non Fisik-ROF Pendidikan Kesetaraan	629.409.600,00	613.749.600,00	97,51	549.230.000,00
8	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK	-	-	-	7.629.648.612,00
9	DAK Non Fisik-BOKKB- BOKH	2.758.575.000,00	2.684.400.698,00	98,02	2.268.168.900,00
10	DAK Non Fisik-Fasilitas Peminatan Medis	-	-	-	335.027.000,00
11	DAK Non Fisik-PCZUKM	240.831.000,00	240.831.000,00	100,00	-

LP

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
		2024 Rp	2024 Rp		2023 Rp
12	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	406.000.000,00	366.269.275,00	90,21	438.600.000,00
13	DAK NonFisik-Dana Kesehatan Pangan dan Pertanian	-	-	-	562.678.520,00
14	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	3.087.282.000,00	2.802.629.447,00	93,19	-
15	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	250.401.000,00	250.401.000,00	100,00	-
16	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Pendidikan	6.094.512.704,00	6.094.512.704,00	100,00	-
JUMLAH		53.868.044.674,00	42.628.817.418,00	79,14	39.420.988.653,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Berdasarkan Rincian Objek Tahun 2024

Realisasi penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik tahun anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sudah dipotong dengan SilPA Dana DAK Non Fisik tahun 2023, sehingga pada beberapa objek penerimaan DAK Non Fisik terlihat tidak terealisasi sepenuhnya seperti pada DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB dipotong sebesar Rp54.174.302,00, DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak dipotong sebesar Rp39.730.725,00, dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota dipotong sebesar Rp204.652.553,00, sedangkan pagu anggaran DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp630.540.000,00 dipotong sebesar Rp16.790.400,00 yang merupakan SilPA Reguler tahun sebelumnya sebesar Rp790.400,00 dan kelebihan pembayaran yang disebabkan oleh ketidaksesuaian jumlah peserta didik penerima dana BOP Kesetaraan tahun 2023 sebesar Rp16.000.000,00. Adapun realisasi DAK Non Fisik-TPG PNSD kelihatan tidak terealisasi sepenuhnya disebabkan adanya perubahan pagu anggaran berdasarkan KMK Nomor 423 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dan Dana Pelayanan Kepariwisata Tahun Anggaran 2024 yakni sebesar Rp15.980.323.000,00, sedangkan pagu DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD dari yang sebelumnya sebesar Rp752.977.000,00 menjadi sebesar Rp1.860.165.000,00 sehingga realisasinya terlihat sebesar 247,04%.

5.1.1.2.1.2 Dana Insentif Daerah (DID)

Dana Insentif Daerah (DID) merupakan insentif/penghargaan kepada daerah atas kinerja pemerintah daerah dalam perbaikan/pencapaian kinerja di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik dan kesejahteraan masyarakat. Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongodow Selatan menerima Dana Insentif Daerah berupa insentif fiskal yang akan dijelaskan selanjutnya. Adapun tahun sebelumnya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongodow Selatan menerima dana DID sebesar Rp6.313.683.000,00.

5.1.1.2.1.3 Dana Desa

Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mendapat alokasi Dana Desa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp59.897.757.000,00 dan tambahan berupa insentif Desa sesuai KMK Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.492.910.000,00 sehingga total pagu penerimaan sebesar Rp62.390.667.000,00 dan terealisasi sebesar Rp62.285.601.000,00 atau sebesar 99,83%. Penerimaan Dana Desa tidak terealisasi 100,00% karena terdapat pemotongan Dana Desa terhadap Desa Motandoi Selatan sebesar Rp105.066.000,00 yang disebabkan adanya kelebihan salur Dana Desa Tahap III Tahun 2023 yang seharusnya Desa Motandoi Selatan tidak memenuhi syarat untuk menerima Dana Desa Tahap III Tahun 2023. Rincian anggaran dan realisasi penerimaan Dana Desa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.15 Anggaran dan Realisasi Dana Desa

NO	DESA	ANGGARAN 2024 Rp	REALISASI 2024 Rp	%	REALISASI 2023 Rp
1	Adow	817.074.000,00	817.074.000,00	100,00	810.476.000,00
2	Adow Selatan	714.789.000,00	714.789.000,00	100,00	969.504.000,00
3	Bakada	734.598.000,00	734.598.000,00	100,00	989.057.000,00
4	Scuilta	1.067.083.000,00	1.067.083.000,00	100,00	667.398.000,00
5	Biraha Selatan	622.198.000,00	622.198.000,00	100,00	756.440.000,00
6	Biraha Timur	856.315.000,00	856.315.000,00	100,00	856.216.000,00
7	Botaloda	693.541.000,00	693.541.000,00	100,00	887.510.000,00
8	Dayow	702.550.000,00	702.550.000,00	100,00	696.204.000,00
9	Dayga	696.856.000,00	696.856.000,00	100,00	690.564.000,00
10	Dudepo	777.338.000,00	777.338.000,00	100,00	772.893.000,00
11	Dudepo Barat	672.093.000,00	672.093.000,00	100,00	666.103.000,00
12	Dumagan A	776.945.000,00	776.945.000,00	100,00	764.869.000,00
13	Dumagan B	706.435.000,00	706.435.000,00	100,00	699.429.000,00
14	Duminanga	791.353.000,00	791.353.000,00	100,00	787.080.000,00
15	Habalolu	639.247.000,00	639.247.000,00	100,00	773.232.000,00
16	Bigan	634.998.000,00	634.998.000,00	100,00	629.480.000,00
17	Bobelama	703.772.000,00	703.772.000,00	100,00	938.895.000,00
18	Bomata	796.882.000,00	796.882.000,00	100,00	652.090.000,00
19	Inonota	653.645.000,00	653.645.000,00	100,00	787.292.000,00
20	Kombot	788.925.000,00	788.925.000,00	100,00	786.654.000,00
21	Kombot Timur	709.368.000,00	709.368.000,00	100,00	565.856.000,00
22	Linarwan	701.091.000,00	701.091.000,00	100,00	695.269.000,00
23	Linarwan I	947.310.000,00	947.310.000,00	100,00	686.363.000,00
24	Lion	816.254.000,00	816.254.000,00	100,00	811.367.000,00
25	Lungkap	682.731.000,00	682.731.000,00	100,00	677.588.000,00
26	Lurwo	960.161.000,00	960.161.000,00	100,00	814.755.000,00
27	Manggada	692.479.000,00	692.479.000,00	100,00	686.270.000,00
28	Matando	727.181.000,00	727.181.000,00	100,00	726.774.000,00
29	Matando Utara	746.929.000,00	746.929.000,00	100,00	739.975.000,00
30	Meyanbanga	702.273.000,00	702.273.000,00	100,00	696.547.000,00
31	Meyanbanga Timur	871.450.000,00	871.450.000,00	100,00	726.354.000,00
32	Milangodaa	719.825.000,00	719.825.000,00	100,00	853.873.000,00
33	Milangodaa Barat	1.199.305.000,00	1.199.305.000,00	100,00	1.058.931.000,00
34	Milangodaa Utara	720.158.000,00	720.158.000,00	100,00	714.319.000,00
35	Modiai	711.629.000,00	711.629.000,00	100,00	705.508.000,00
36	Moflaga	972.402.000,00	972.402.000,00	100,00	710.637.000,00
37	Molosipat	594.637.000,00	594.637.000,00	100,00	589.309.000,00
38	Momalia I	1.014.145.000,00	1.014.145.000,00	100,00	892.482.000,00
39	Momalia II	1.016.422.000,00	1.016.422.000,00	100,00	893.571.000,00
40	Momalia Tiga	808.415.000,00	808.415.000,00	100,00	662.747.000,00

NO	DESA	ANGGARAN 2024 Rp	REALISASI 2024 Rp	%	REALISASI 2023 Rp
41	Mutanloli	774.881.000,00	774.881.000,00	100,00	771.736.000,00
42	Mutanloli Selatan	698.309.000,00	593.243.000,00	84,95	694.665.000,00
43	Motolembu	660.218.000,00	660.218.000,00	100,00	653.906.000,00
44	Nunuk	796.135.000,00	796.135.000,00	100,00	913.087.000,00
45	Nunuka Raya	857.835.000,00	857.835.000,00	100,00	974.393.000,00
46	Onggani	848.172.000,00	848.172.000,00	100,00	700.546.000,00
47	Onggani Selatan	729.794.000,00	729.794.000,00	100,00	661.019.000,00
48	Pakbu Jaya	744.340.000,00	744.340.000,00	100,00	998.925.000,00
49	Paiga	955.329.000,00	955.329.000,00	100,00	693.332.000,00
50	Perjuritani	637.023.000,00	637.023.000,00	100,00	631.384.000,00
51	Pilang	606.477.000,00	606.477.000,00	100,00	600.829.000,00
52	Pilobahuga	1.004.677.000,00	1.004.677.000,00	100,00	882.051.000,00
53	Pisolanrungun	833.991.000,00	833.991.000,00	100,00	889.491.000,00
54	Pisolanran	646.762.000,00	646.762.000,00	100,00	633.181.000,00
55	Pisolanran Selatan	655.466.000,00	655.466.000,00	100,00	649.504.000,00
56	Pittada	784.808.000,00	784.808.000,00	100,00	780.040.000,00
57	Popoda	718.674.000,00	718.674.000,00	100,00	712.812.000,00
58	Posilagon	675.578.000,00	675.578.000,00	100,00	669.673.000,00
59	Sarbuah	791.550.000,00	791.550.000,00	100,00	924.423.000,00
60	Sakti	741.046.000,00	741.046.000,00	100,00	995.137.000,00
61	Salongo	687.292.000,00	687.292.000,00	100,00	679.511.000,00
62	Salongo Barat	676.245.000,00	676.245.000,00	100,00	670.393.000,00
63	Salongo Timur	581.007.000,00	581.007.000,00	100,00	575.755.000,00
64	Sirimtaka	721.721.000,00	721.721.000,00	100,00	715.561.000,00
65	Srombhayuga	784.053.000,00	784.053.000,00	100,00	922.441.000,00
66	Sopno	686.288.000,00	686.288.000,00	100,00	680.225.000,00
67	Sondara	677.486.000,00	677.486.000,00	100,00	671.137.000,00
68	Soputa	614.145.000,00	614.145.000,00	100,00	608.582.000,00
69	Tabilau	711.522.000,00	711.522.000,00	100,00	834.052.000,00
70	Tanrangih	1.053.967.000,00	1.053.967.000,00	100,00	1.056.248.000,00
71	Tobrayagan	764.380.000,00	764.380.000,00	100,00	757.970.000,00
72	Tobrayagan Selatan	681.518.000,00	681.518.000,00	100,00	936.375.000,00
73	Tolondadu	631.379.000,00	631.379.000,00	100,00	886.546.000,00
74	Tolondadu I	1.042.920.000,00	1.042.920.000,00	100,00	782.492.000,00
75	Tolondadu II	777.917.000,00	777.917.000,00	100,00	633.984.000,00
76	Tolomeyon	847.055.000,00	847.055.000,00	100,00	833.292.000,00
77	Toluaya	901.767.000,00	901.767.000,00	100,00	780.754.000,00
78	Tolutu	1.004.172.000,00	1.004.172.000,00	100,00	881.845.000,00
79	Tumala	935.403.000,00	935.403.000,00	100,00	931.199.000,00
80	Torosik	664.315.000,00	664.315.000,00	100,00	919.403.000,00
81	Transi Patan	624.168.000,00	624.168.000,00	100,00	618.742.000,00
	JUMLAH	62.399.667.999,00	62.285.601.099,00	99,83	61.905.121.000,00

5.1.1.2.1.4 Insentif Fiskal

Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diberikan kepada daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja Pemerintah Daerah dapat berupa pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional, dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan memperoleh Insentif Fiskal tahun 2024 sebesar Rp11.740.923.000,00. Alokasi Insentif Fiskal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan dimana Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan memperoleh Insentif Fiskal pada Kategori Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sebesar Rp5.854.865.000,00 dan Kategori Kinerja Penggunaan Produk Dalam Negeri sebesar Rp5.886.058.000,00.

5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Realisasi pendapatan transfer antar daerah tahun 2024 sebesar Rp16.566.536.622,00 atau sebesar 65,27% dari total Rp25.380.526.535,00 yang dianggarkan pada Perubahan APBD. Pendapatan transfer antar daerah merupakan pendapatan transfer dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berupa pendapatan bagi hasil pajak.

5.1.1.2.2.1 Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan bagi hasil pajak tahun 2024 dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terealisasi sebesar Rp16.566.536.622,00 atau sebesar 65,27% dari anggaran pada Perubahan APBD sebesar Rp25.380.526.535,00. Anggaran penerimaan Bagi Hasil Pajak pada Perubahan APBD ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 146 Tahun 2024 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok Tahun Anggaran 2024, penerimaan atas kurang bayar bagi hasil pajak bulan Juni sampai dengan Desember tahun 2023, serta kurang bayar bagi hasil pajak rokok bulan desember 2023. Adapun rincian realisasi pendapatan bagi hasil pajak tersebut dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.16 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 Rp	REALISASI 2024 Rp	%	REALISASI 2023 Rp
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	5.252.326.894,00	2.942.171.413,00	56,02	3.534.710.190,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.112.804.923,00	1.975.863.465,00	63,48	2.350.474.418,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	12.578.303.821,00	7.504.016.666,00	59,66	8.261.090.329,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	163.407.887,00	86.544.893,00	52,96	94.789.979,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	4.273.683.010,00	4.057.940.183,00	94,95	3.843.681.019,00
Jumlah		25.380.526.535,00	16.566.536.622,00	65,27	18.084.745.935,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Berdasarkan Rincian Objek Tahun 2024

1. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2024 sebesar Rp2.942.171.413,00 atau sebesar 56,02% dari anggaran pada Perubahan APBD sebesar Rp5.252.326.894,00, merupakan penerimaan atas bagi hasil pajak kendaraan bermotor untuk bulan Juni sampai dengan Desember tahun 2023 sebesar Rp1.864.682.786,00 serta penerimaan untuk bulan Januari sampai dengan April tahun 2024 sebesar Rp1.077.488.627,00.
2. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2024 sebesar Rp1.975.863.465,00 atau sebesar 63,48% dari anggaran pada Perubahan APBD sebesar Rp3.112.804.923,00, merupakan penerimaan atas bagi hasil bulan Juni sampai dengan Desember tahun 2023 sebesar Rp1.226.862.039,00 ditambah dengan penerimaan untuk bulan Januari sampai dengan April tahun 2024 sebesar Rp749.001.426,00.

3. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tahun 2024 sebesar Rp7.504.016.666,00 atau sebesar 59,66% dari anggaran pada Perubahan APBD sebesar Rp12.578.303.821,00, merupakan penerimaan atas bagi hasil bulan Juni sampai dengan Desember tahun 2023 sebesar Rp4.812.065.586,00 ditambah dengan penerimaan untuk bulan Januari sampai dengan April tahun 2024 sebesar Rp2.691.951.080,00.
4. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan tahun 2024 sebesar Rp86.544.893,00 atau sebesar 52,96% dari anggaran pada Perubahan APBD sebesar Rp163.407.887,00, merupakan penerimaan atas bagi hasil bulan Juni sampai dengan Desember tahun 2023 sebesar Rp53.407.889,00 ditambah dengan penerimaan untuk bulan Januari sampai dengan April tahun 2024 sebesar Rp33.137.004,00.
5. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok tahun 2024 sebesar Rp4.057.940.185,00 atau terealisasi sebesar 94,95% dari anggaran pada Perubahan APBD sebesar Rp4.273.683.010,00, merupakan penerimaan atas bagi hasil pajak rokok bulan Desember 2023 sebesar Rp612.395.355,00 ditambah dengan bagi hasil bulan Januari sampai dengan November tahun 2024 sebesar Rp3.445.544.830,00.

5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk Tahun 2024 memperoleh Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp4.171.370.493,00 atau terealisasi sebesar 64,19% dari anggaran pada Perubahan APBD sebesar Rp6.498.288.824,00 yang terdiri dari Pendapatan Hibah sebesar Rp500.000,00 dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan berupa Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebesar Rp4.170.870.493,00.

5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2024 sebesar Rp500.000,00. Pendapatan hibah ini merupakan sisa penggunaan dana hibah dari PT Bank SulutGo Cabang Molibagu atas pengajuan bantuan kegiatan Bolsel Paragliding Championship and Festival 2024.

5.1.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tahun 2024 sebesar Rp4.170.870.493,00 atau sebesar 64,18% dari anggaran yang ditetapkan pada Perubahan APBD sebesar Rp6.498.288.824,00. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan ini merupakan penerimaan atas Dana Kapitasi selama tahun 2024. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP untuk setiap Puskesmas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.17 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 Rp	REALISASI 2024 Rp	%	REALISASI 2023 Rp
1	Puskesmas Molihaqa	1.493.637.240,00	969.223.321,00	64,82	806.414.279,00
2	Puskesmas Pinolestan	1.178.973.858,00	749.373.148,00	63,56	665.850.905,00
3	Puskesmas Milanggodan	486.251.519,00	288.786.963,00	59,39	317.453.463,00
4	Puskesmas Momiola	1.500.126.800,00	735.284.769,00	49,01	805.547.311,00
5	Puskesmas Durugan	455.056.869,00	347.191.371,00	76,30	364.534.387,00
6	Puskesmas Adox	600.879.060,00	529.893.361,00	76,92	511.690.334,00
7	Puskesmas Onggrom	263.420.830,00	210.393.917,00	79,87	174.040.430,00
8	Puskesmas Duriwangi	410.942.642,00	307.327.870,00	74,79	332.815.098,00
9	Puskesmas Simontayuga	21.000.000,00	34.395.753,00	163,79	-
JUMLAH		6.498.288.824,00	4.170.870.493,00	64,18	4.038.346.407,00

Sumber : Buku Besar Pembantu Tahun 2024

Berdasarkan ketentuan pasal (6) ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, anggaran pendapatan dana kapitasi dicatat pada akun pendapatan daerah, kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah, jenis lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, objek pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP, rincian objek pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP, sub rincian objek pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sesuai kode rekening berkenaan.

5.1.2 Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Realisasi belanja pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2024 sebesar Rp663.378.058.096,15 atau sebesar 95,03% dari anggaran pada Perubahan APBD sebesar Rp698.078.854.364,51. Jenis belanja sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan diklasifikasikan menjadi belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, namun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, transfer masuk dalam kategori belanja.

Tabel 5.18 Belanja

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 Rp	REALISASI 2024 Rp	%	REALISASI 2023 Rp
1	Belanja Operasi	489.870.176.801,73	460.184.563.886,15	93,94	383.077.888.668,00
2	Belanja Modal	102.179.279.599,78	98.714.591.985,00	96,61	75.186.425.871,00
3	Belanja Tidak Terduga	2.852.134.000,00	1.661.945.000,00	58,27	667.000.000,00
4	Belanja Transfer	103.177.261.963,00	102.816.957.425,00	99,65	102.549.189.517,00
JUMLAH		698.078.854.364,51	663.378.058.096,15	95,03	564.100.504.056,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024

5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja operasi pada tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp460.184.563.686,15 atau sebesar 93,94% dari total anggaran sebesar Rp489.870.178.801,73 pada perubahan APBD. Adapun rincian belanja operasi dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.19 Belanja Operasi

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
		2024	2024		2023
		Rp	Rp		Rp
1	Belanja Pegawai	243.650.092.253,45	225.670.587.199,00	92,62	202.467.128.676,00
2	Belanja Barang dan Jasa	195.577.293.643,00	184.112.128.465,15	94,14	167.626.124.422,00
3	Belanja Subsidi	696.600.000,00	696.600.000,00	100,00	-
4	Belanja Hibah	33.771.589.645,28	33.727.951.522,00	99,87	8.046.729.179,00
5	Belanja Bantuan Sosial	16.174.601.260,00	15.977.296.500,00	98,78	7.537.906.400,00
JUMLAH		489.870.178.801,73	460.184.563.686,15	93,94	388.677.888.668,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Tabel 5.20 Belanja Pegawai

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
		2024	2024		2023
		Rp	Rp		Rp
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	162.211.587.377,45	150.860.272.329,00	93,00	128.339.897.668,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	52.855.153.796,00	48.264.486.678,00	91,35	46.346.478.384,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	20.629.674.610,00	19.170.639.155,00	92,93	19.112.610.212,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	7.425.357.533,00	6.899.341.971,00	92,92	6.790.431.401,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	196.038.937,00	167.980.406,00	85,69	168.579.456,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	332.280.000,00	287.866.660,00	86,63	310.299.992,00
7	Belanja Pegawai BOS	-	-	-	1.398.731.543,00
JUMLAH		243.650.092.253,45	225.670.587.199,00	92,62	202.467.128.676,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Berdasarkan Rincian Objek Tahun 2024

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara, gaji dan tunjangan DPRD, gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH, Belanja Pegawai BOS dan belanja gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dianggarkan dalam belanja pegawai.

42

Realisasi belanja pegawai tahun 2024 sebesar Rp225.670.587.199,00 atau sebesar 92,62% dari anggaran sebesar Rp243.650.092.253,45 pada Perubahan APBD. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai tahun 2023, terjadi kenaikan belanja sebesar Rp23.203.458.523,00. Hal ini disebabkan adanya penambahan jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) serta kenaikan pangkat dan gaji berkala serta penyesuaian jabatan bagi aparatur sipil negara.

Berdasarkan tabel 5.20 dapat dilihat bahwa Belanja Pegawai BOS untuk tahun 2024 tidak terdapat alokasi anggaran maupun realisasi belanjanya. Hal ini disebabkan pada Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) tidak terdapat rekening belanja pegawai BOS. Sehingga untuk belanja pegawai BOS dialokasikan pada Belanja Operasi atau pada APBD dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa BOS. Adapun rencana anggaran untuk belanja pegawai BOS yang masuk pada rekening belanja operasi berdasarkan data pada Aplikasi ARKAS adalah sebesar Rp1.215.427.030,00.

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja barang dan jasa tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp184.112.128.465,15 atau sebesar 94,14% dari total anggaran sebesar Rp195.577.295.643,00 yang ditetapkan pada Perubahan APBD. Berikut rincian belanja barang dan jasa.

Tabel 5.21 Belanja Barang dan Jasa

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 Rp	REALISASI 2024 Rp	%	REALISASI 2023 Rp
1	Belanja Barang Pakai Habis	31.923.179.455,00	28.603.817.595,00	89,60	25.544.206.361,00
2	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	562.146.000,00	561.802.976,00	99,94	-
3	Belanja Jasa Kantor	60.670.044.053,00	56.256.106.215,15	92,89	53.713.088.029,00
4	Belanja Jaran Jamitan/Asuransi	18.121.596.848,00	17.304.676.292,00	95,49	16.643.423.164,00
5	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	899.772.100,00	681.805.077,00	75,78	721.435.500,00
6	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.124.055.000,00	1.996.849.730,00	94,01	1.887.130.000,00
7	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	162.445.000,00	147.009.000,00	90,50	126.550.000,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	548.000.000,00	547.678.000,00	99,94	645.794.500,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.274.380.300,00	1.264.888.550,00	99,26	54.789.000,00
10	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-	-	-	100.000.000,00
11	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Hibriding Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	551.600.000,00	523.788.000,00	94,95	669.458.000,00

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 Rp	REALISASI 2024 Rp	%	REALISASI 2023 Rp
12	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.150.755.097,00	5.730.220.597,00	93,16	5.875.185.743,00
13	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	490.894.820,00	487.742.900,00	99,36	966.224.650,00
14	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jembatan, dan Jaringan	1.878.964.000,00	1.878.242.000,00	99,96	850.098.000,00
15	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	59.940.104.920,00	57.811.390.409,00	96,45	49.808.277.894,00
16	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.483.060.000,00	1.420.265.787,00	95,77	2.808.266.398,00
17	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	41.500.000,00
18	Belanja Barang dan Jasa BOS	8.764.297.250,00	8.763.865.337,00	100,00	7.170.697.183,00
JUMLAH		195.577.295.643,00	184.112.128.465,15	94,14	167.626.124.422,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Berdasarkan Rincian Objek Tahun 2024

Pada tabel 5.21 terdapat rincian obyek belanja yang realisasinya turun dan naik secara signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi untuk tahun 2024 terealisasi sebesar Rp561.802.976,00 atau sebesar 99,94% dari anggaran yang ditetapkan pada Perubahan APBD sebesar Rp562.146.000,00. Belanja ini digunakan untuk belanja barang yang jumlahnya diatas nilai kapitalisasi namun tidak memenuhi kriteria untuk dikapitalisasi pada asetnya. Belanja ini terdiri dari Belanja Peralatan dan Mesin - Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Angkutan Barang sebesar Rp72.251.976,00 yang merupakan belanja pembelian alat untuk perbaikan kendaraan dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah, Belanja Gedung dan Bangunan - Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Tinggal - Rumah Negara Golongan I sebesar Rp39.680.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, serta Belanja Gedung dan Bangunan - Monumen - Candi/Tugu Peringatan/Prasasti - Tugu sebesar Rp449.871.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Pada tahun 2023 tidak terdapat realisasi disebabkan belanja ini dianggarkan pada belanja pemeliharaan, baik untuk pemeliharaan kendaraan dinas maupun pemeliharaan gedung dan bangunan.
2. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi tahun 2024 terealisasi sebesar Rp1.264.888.550,00 atau sebesar 99,26% dari total anggaran yang ditetapkan pada Perubahan APBD sebesar Rp1.274.380.300,00, Belanja ini terdiri dari Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan - Jasa Survei sebesar Rp98.762.250,00 dan Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen sebesar Rp1.166.126.300,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp54.789.000,00 maka terjadi kenaikan yang cukup signifikan sebesar Rp1.210.099.550,00. Hal ini disebabkan pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melakukan belanja konsultansi untuk data base kondisi jalan serta survei daerah irigasi yang nantinya akan digunakan untuk perencanaan pembuatan jalan dan irigasi tahun berikutnya, serta melakukan survei zona nilai tanah yang nantinya digunakan dalam penetapan nilai NJOP tanah diwilayah Bolaang Mongondow Selatan tahun 2025.

3. Tahun 2024 tidak dialokasikan Belanja Beasiswa Pendidikan PNS. Berbeda dengan tahun sebelumnya dimana terdapat realisasi belanja sebesar Rp100.000.000,00. Hal ini disebabkan pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan lebih memprioritaskan belanja daerah lain yang lebih mendesak. Sehingga meskipun terdapat usulan beasiswa bagi PNS yang tugas belajar, hal tersebut tidak dapat dianggarkan dalam Perubahan APBD tahun 2024.
4. Realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan tahun 2024 sebesar Rp487.742.900,00 atau sebesar 99,36% dari anggaran yang ditetapkan pada Perubahan APBD sebesar Rp490.894.820,00. Jika dibandingkan dengan belanja tahun sebelumnya maka dapat dilihat terjadi penurunan jumlah belanja secara signifikan sebesar Rp478.481.750,00. Hal ini disebabkan belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi telah dipisahkan dari belanja pemeliharaan, dimana pada tahun sebelumnya masih diklasifikasikan sebagai belanja pemeliharaan.
5. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi tahun 2024 terealisasi sebesar Rp1.878.242.000,00 atau sebesar 99,96% dari anggaran yang ditetapkan pada Perubahan APBD sebesar Rp1.878.964.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan jumlah belanja yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp1.028.144.000,00. Hal ini disebabkan pemerintah daerah pada tahun 2024 lebih banyak melakukan pemeliharaan jalan dan jaringan irigasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun realisasi belanja pemeliharaan jalan sebesar Rp889.996.000,00 dan realisasi belanja pemeliharaan jaringan irigasi adalah sebesar Rp988.246.000,00.
6. Realisasi Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tahun 2024 sebesar Rp1.420.265.787,00 atau sebesar 95,77% dari anggaran yang ditetapkan pada Perubahan APBD sebesar Rp1.483.060.000,00. Realisasi belanja ini jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan belanja serupa pada tahun 2023. Belanja ini diperuntukan untuk hadiah yang bersifat perlombaan serta penghargaan untuk suatu prestasi. Sehingga semakin banyak pemerintah menyelenggarakan kegiatan lomba serta semakin banyak putra dan putri daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang berprestasi di kejuaraan-kejuaraan maka semakin besar pula anggaran dan realisasi belanja ini.

5.1.2.1.3 Belanja Subsidi

Belanja Subsidi merupakan belanja yang dilakukan Pemerintah dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan daya beli masyarakat secara umum. Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan merealisasikan belanja subsidi sebesar Rp696.600.000,00 atau sebesar 100,00% dari total anggaran yang ditetapkan pada Perubahan APBD. Realisasi belanja ini digunakan untuk mendukung Gerakan Pangan Murah (GPM). Gerakan Pangan Murah (GPM) merupakan program Pemerintah yang bertujuan membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam hal ini bekerjasama dengan BULOG untuk subsidi beras agar masyarakat mendapatkan harga murah.

5.1.2.1.4 Belanja Hibah

Belanja hibah tahun 2024 terealisasi sebesar Rp33.727.951.522,00 atau sebesar 99,87% dari total anggaran sebesar Rp33.771.589.645,28. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja hibah tahun 2023 sebesar Rp8.046.729.170,00, maka dapat dilihat terjadi kenaikan belanja hibah yang cukup signifikan sebesar Rp25.681.222.352,00. Adapun rincian belanja hibah dapat dilihat pada tabel berikut.

Cg

Tabel 5.22 Belanja Hibah

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
		2024 Rp	2024 Rp		2023 Rp
1.	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	-	-	-	1.820.853.200,00
2.	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	2.676.608.350,00	2.674.608.350,00	99,93	3.598.391.420,00
3.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	25.634.797.815,00	25.634.485.815,00	100,00	1.468.160.000,00
4.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3.064.030.447,28	3.024.062.500,00	98,70	894.081.000,00
5.	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Sekolah Swasta	469.000.000,00	467.641.824,00	99,71	-
6.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	288.083.033,00	288.083.033,00	100,00	265.243.550,00
7.	Belanja Hibah Dana BOSP- BOP PAUD	1.510.940.000,00	1.510.940.000,00	100,00	-
8.	Belanja Hibah Dana BOSP- BOP Kesetaraan	128.130.000,00	128.130.000,00	100,00	-
JUMLAH		33.771.589.645,28	33.727.951.522,00	99,87	8.046.729.170,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Berdasarkan Rincian Objek Tahun 2024

1. Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tidak memiliki Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat.
2. Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat tahun 2024 adalah sebesar Rp2.674.608.350,00 atau sebesar 99,93% dari total anggaran yang ditetapkan pada Perubahan APBD sebesar Rp2.676.608.350,00 yang merupakan belanja hibah barang di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berupa peningkatan jalan Markas Angkatan Laut sebesar Rp637.018.000,00, peningkatan jalan POLRES BOLSEL sebesar Rp981.141.000,00, hibah pembangunan Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Kotamobagu sebesar Rp958.000.000,00, dan pembayaran hutang pekerjaan pembangunan gedung Kejaksaan Negeri Kotamobagu tahun 2023 sebesar Rp98.449.350,00.
3. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan teralisasi sebesar Rp25.634.485.815,00 atau sebesar 99,99% dari total anggaran sebesar Rp25.634.797.815,00 yang ditetapkan pada Perubahan APBD merupakan belanja hibah di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebesar Rp17.063.127.515,00, hibah kepada Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

sebesar Rp4.679.146.800,00, hibah kepada Polres Bolaang Mongondow Selatan sebesar Rp3.100.000.000,00, dan hibah kepada Kodim 1303 Bolaang Mongondow (Korem 131) sebesar Rp519.870.000,00, hibah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk pembangunan area bermain beserta APE luar ruang TK Amanah sebesar Rp194.697.000,00, dan pengadaan Alat Permainan Edukatif PAUD sebesar Rp49.950.000,00 serta belanja hibah barang perlengkapan Karate pada Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp27.694.500,00. Atas penggunaan dana hibah kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, KPU dan Polres belum menyampaikan laporan penggunaan dana hibah, sedangkan Bawaslu telah menyampaikan laporan penggunaan dana hibah namun tanpa disertai bukti pengembalian ke kas daerah serta bukti penutupan rekening bank penampung. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019, pada Pasal 18 ayat (3) dinyatakan bahwa penyampaian laporan penggunaan belanja hibah dilakukan paling lambat tiga bulan setelah pengasulan pengesahan pengangkatan calon terpilih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Atas hibah tersebut, KPU dan Bawaslu wajib menyampaikan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp3.024.062.500,00 atau sebesar 98,70% dari total anggaran yang ditetapkan pada Perubahan APBD sebesar Rp3.064.030.447,28 terdiri dari belanja hibah di Dinas Perikanan berupa pengadaan Perahu Fiber untuk diserahkan kepada kelompok usaha sebesar Rp2.054.800.000,00 dan pengadaan Mesin Tempel untuk diserahkan kepada kelompok usaha sebesar Rp209.600.000,00; belanja hibah di Dinas Koperasi dan UKM Transmigrasi dan Tenaga Kerja untuk diserahkan kepada kelompok usaha sebesar Rp224.798.500,00; dan belanja hibah pada Dinas Perindustrian sebesar Rp534.864.000,00.
5. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta tahun 2024 sebesar Rp467.641.824,00 atau sebesar 99,71% dari anggaran yang ditetapkan pada Perubahan APBD sebesar Rp469.000.000,00. Belanja hibah ini terdiri dari belanja hibah uang dana BOS untuk pendidikan Sekolah Dasar sebesar Rp235.979.724,00 dan hibah uang dana BOS untuk Pendidikan Sekolah Menengah sebesar Rp231.662.100,00.
6. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik terealisasi sebesar Rp288.083.033,00 atau sebesar 100,00% dari total anggaran yang ditetapkan pada Perubahan APBD sebesar Rp288.083.033,00. Rincian Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.23 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 Rp	REALISASI 2024 Rp	%	REALISASI 2023 Rp
1	DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P)	170.813.500,00	170.813.500,00	100,00	153.882.500,00
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	13.787.584,00	13.787.584,00	100,00	12.233.650,00
3	Partai Persatuan Indonesia (Purdindo)	9.619.133,00	9.619.133,00	100,00	14.428.700,00

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 Rp	REALISASI 2024 Rp	%	REALISASI 2023 Rp
4	DPD Partai Amanat Nasional (PAN)	22.417.633,00	22.417.633,00	100,00	28.886.000,00
5	DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	14.762.366,00	14.762.366,00	100,00	10.417.550,00
6	DPD Partai Golongan Karya (Golkar)	28.154.316,00	28.154.316,00	100,00	27.062.750,00
7	DPD Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	22.217.434,00	22.217.434,00	100,00	18.332.600,00
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	6.311.067,00	6.311.067,00	100,00	-
TOTAL		288.083.833,00	288.083.833,00	100,00	265.243.550,00

Sumber: Buku Besar Pembantu Tahun 2024

- Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD tahun 2024 terealisasi sebesar Rp1.510.940.000,00 atau sebesar 100,00% dari total anggaran yang ditetapkan pada Perubahan APBD. Belanja hibah ini merupakan belanja hibah uang kepada lembaga swasta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan selama tahun 2024.
- Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan tahun 2024 terealisasi sebesar Rp128.130.000,00 atau sebesar 100,00% dari total anggaran yang ditetapkan pada Perubahan APBD. Belanja hibah ini merupakan hibah uang kepada lembaga swasta Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan selama tahun 2024.

5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Bantuan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk meringankan penderitaan, melindungi, dan memulihkan kondisi kehidupan fisik, mental, dan sosial (termasuk kondisi psikososial, dan ekonomi) serta memberdayakan potensi yang dimiliki agar seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar. Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat. Belanja bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2024 terealisasi sebesar Rp15.977.296.500,00 atau sebesar 98,78% dari total anggaran sebesar Rp16.174.601.260,00.

Tabel 5.24 Belanja Bantuan Sosial

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 Rp	REALISASI 2024 Rp	%	REALISASI 2023 Rp
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Dibayarkan kepada Individu	13.016.500.000,00	12.912.000.000,00	99,04	2.700.070.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Dibayarkan kepada Kelompok Masyarakat	2.928.101.260,00	2.895.296.500,00	99,04	4.827.876.400,00
3	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Dibayarkan kepada Lembaga Non Pemerintah (Masing Pendidikan, Kesehatan dan Bidang Lainnya)	210.000.000,00	200.000.000,00	95,24	-
JUMLAH		16.174.601.260,00	15.977.296.500,00	98,78	7.527.946.400,00

4

1. Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu sebesar Rp12.912.000.000,00 terdiri dari belanja bantuan sosial pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp47.000.000,00, belanja bantuan sosial pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp12.520.000.000,00, dan belanja bantuan sosial pada Dinas Sosial sebesar Rp345.000.000,00.
2. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat sebesar Rp2.865.296.500,00 merupakan belanja bantuan sosial pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp2.506.000.000,00, dan belanja pada Dinas Sosial sebesar Rp359.296.500,00.
3. Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) tahun 2024 sebesar Rp200.000.000,00 atau sebesar 95,24% dari anggaran pada Perubahan APBD sebesar Rp210.000.000,00. Bantuan sosial ini merupakan bantuan untuk pembangunan beberapa rumah ibadah (Masjid/Musholah dan Gereja) di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

5.1.2.2 Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai manfaat lebih dari 12 bulan atau satu periode akuntansi. Belanja modal pada tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp98.714.591.985,00 atau mencapai 96,61% dari total anggaran sebesar Rp102.179.279.599,78 pada perubahan APBD. Belanja modal sesuai dengan SAP diklasifikasikan menjadi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, jaringan, dan irigasi, serta belanja aset tetap lainnya.

Tabel 5.25 Belanja Modal

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 Rp	REALISASI 2024 Rp	%	REALISASI 2023 Rp
1.	Tanah	-	-	-	664.407.000,00
2.	Peralatan dan Mesin	15.306.677.426,00	14.610.106.510,00	95,45	13.719.412.601,00
3.	Gedung dan Bangunan	14.227.325.121,78	12.753.623.470,00	89,64	11.924.655.670,00
4.	Jalan, Jaringan dan Irigasi	71.629.355.052,00	70.346.498.755,00	98,21	47.729.991.406,00
5.	Aset Tetap Lainnya	115.922.000,00	114.339.000,00	98,63	1.117.959.200,00
6.	Aset Lainnya	900.000.000,00	890.024.250,00	98,89	-
	JUMLAH	102.179.279.599,78	98.714.591.985,00	96,61	75.186.425.871,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024

5.1.2.2.2 Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaaan/pembelian/pertibebasan, balik nama pematangan tanah sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai. Tahun anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tidak merencanakan belanja modal tanah.

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Belanja peralatan dan mesin tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp14.610.106.510,00 atau sebesar 95,45% dari total anggaran sebesar Rp15.306.677.426,00 yang ditetapkan pada Perubahan APBD. Rincian belanja peralatan dan mesin dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.26 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 Rp	REALISASI 2024 Rp	%	REALISASI 2023 Rp
1	Belanja Modal Alat Bantu	9.490.020,00	8.733.000,00	92,02	-
2	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	4.539.212.475,00	4.346.550.000,00	95,76	513.885.000,00
3	Belanja Modal Alat Ukur	7.881.000,00	-	-	15.440.000,00
4	Belanja Modal Alat Pengolahan	1.949.000,00	1.949.000,00	100,00	1.800.000,00
5	Belanja Modal Alat Kantor	339.878.160,00	336.605.690,00	99,04	182.357.840,00
6	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.876.138.969,00	2.796.441.410,00	97,23	4.947.056.604,00
7	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Raport Pejabat	64.150.790,00	63.753.500,00	97,82	51.386.770,00
8	Belanja Modal Alat Studio	95.320.900,00	93.628.500,00	98,22	104.493.750,00
9	Belanja Modal Alat Komunikasi	81.585.000,00	81.517.800,00	99,92	79.150.000,00
10	Belanja Modal Peralatan Pemancar	116.330.000,00	112.950.000,00	97,09	-
11	Belanja Modal Alat Kodokteran	3.788.884.192,00	3.440.698.725,00	90,81	3.385.811.923,00
12	Belanja Modal Komputer Ujic	1.196.712.100,00	1.160.923.599,00	97,01	2.332.113.208,00
13	Belanja Modal Peralatan Komputer	647.899.320,00	644.244.225,00	99,44	221.269.955,00
14	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	30.913.500,00	28.971.000,00	93,72	-
15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	1.510.332.000,00	1.494.140.061,00	98,93	1.884.646.951,00
JUMLAH		15.306.677.426,00	14.610.106.510,00	95,45	13.719.412.601,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Berdasarkan Rincian Objek Tahun 2024

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian gedung dan bangunan sampai dengan bangunan dan gedung dimaksud dalam kondisi siap digunakan. Belanja modal gedung dan bangunan tahun 2024 terealisasi sebesar Rp12.753.623.470,00 atau sebesar 89,64% dari total anggaran sebesar Rp14.227.325.121,78 yang ditetapkan pada Perubahan APBD. Rincian anggaran dan realisasi belanja modal gedung dan bangunan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.27 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 Rp	REALISASI 2024 Rp	%	REALISASI 2023 Rp
1.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1.356.104.300,00	1.304.574.970,00	96,20	350.607.700,00
2.	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	4.091.043.265,00	3.197.311.000,00	78,15	1.507.995.620,00
3.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Perumahan	-	-	-	149.000.000,00
4.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	7.178.688.556,78	6.694.037.450,00	93,25	7.196.381.350,00
5.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	707.000.000,00	672.792.050,00	95,16	-
6.	Belanja Modal Bangunan Terbuka	211.280.000,00	201.773.000,00	95,50	722.224.000,00
7.	Belanja Modal Asrama	-	-	-	719.364.000,00
8.	Belanja Modal Rumah Negara Golongan III	483.344.000,00	483.344.000,00	100,00	-
9.	Belanja Modal Pagar	199.865.000,00	199.790.000,00	99,96	1.279.083.000,00
JUMLAH		14.227.325.121,78	12.753.623.470,00	89,64	11.924.655.670,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sub-Kategori Objek Tahun 2024

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi adalah pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan di atas batas minimum nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi tahun 2024 terealisasi sebesar Rp70.346.498.755,00 atau 98,21% dari total anggaran sebesar Rp71.629.355.052,00 pada Perubahan APBD. Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.28 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 Rp	REALISASI 2024 Rp	%	REALISASI 2023 Rp
1.	Belanja Modal Jalan Kabupaten	33.333.518.600,00	33.290.771.100,00	99,87	36.630.139.700,00
2.	Belanja Modal Jalan Lainnya	9.039.116.000,00	8.032.972.240,00	88,87	691.234.000,00
3.	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	199.230.000,00	194.240.350,00	97,50	499.253.000,00

4	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	4.221.782.000,00	4.086.883.300,00	96,80	1.665.445.000,00
5	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	2.552.471.902,00	2.551.428.000,00	99,96	2.758.682.000,00
6	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	3.999.999.903,00	3.915.701.005,00	98,88	-
7	Belanja Modal Bangunan Pemusnahan Sampah	630.000.000,00	630.000.000,00	100,00	-
8	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	-	-	-	11.100.000,00
9	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	17.693.236.645,00	17.644.702.520,00	99,73	5.474.137.700,00
JUMLAH		71.629.355.052,00	70.346.498.785,00	98,21	47.729.991.400,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Berstruktur Sub Rincian Objek Tahun 2024

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja modal aset tetap lainnya tahun 2024 terealisasi sebesar Rp114.339.000,00 atau 98,63% dari total anggaran sebesar Rp115.922.000,00 yang ditetapkan pada Perubahan APBD. Belanja modal aset tetap lainnya ini merupakan belanja alat musik Marching Band pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp58.764.000,00, dan belanja modal aset tetap lainnya dari dana BOS sebesar Rp55.575.000,00. Belanja modal aset tetap lainnya dari dana BOS terdiri dari belanja modal aset tetap lainnya pada pendidikan Sekolah Dasar sebesar Rp47.950.000,00 dan belanja modal aset tetap lainnya pada pendidikan Sekolah Menengah sebesar Rp7.625.000,00.

5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja modal aset lainnya tahun 2024 terealisasi sebesar Rp890.024.250,00 atau sebesar 98,89% dari anggaran yang ditetapkan pada Perubahan APBD sebesar Rp900.000.000,00. Belanja modal aset lainnya ini terdiri dari Belanja Modal Aset Tidak Berwujud - Software sebesar Rp294.594.000,00 dan Belanja Modal Aset Tidak Berwujud - Kajian sebesar Rp595.430.250,00.

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga ini ditujukan untuk membiayai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam/non alam dan bencana sosial yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya serta termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja Tidak Terduga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan Pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Selama tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengeluarkan belanja tidak terduga sebesar Rp1.661.945.000,00 atau sebesar 58,27% dari total anggaran sebesar Rp2.852.134.000,00 yang ditetapkan pada Perubahan APBD. Belanja tidak terduga ini terdiri dari uang duka ahli waris bagi keluarga tidak mampu sebesar Rp582.000.000,00 dan belanja untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor sebesar Rp1.079.945.000,00.

CW

5.1.2.4 Belanja Transfer

Belanja Transfer Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2024 sebesar Rp102.816.957.425,00 atau 99,65% dari total anggaran yang ditetapkan pada Perubahan APBD sebesar Rp103.177.261.963,00. Belanja transfer Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan ini terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa.

5.1.2.4.1 Belanja Bagi Hasil

Belanja transfer bagi hasil pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan merupakan transfer bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah. Realisasi belanja bagi hasil pendapatan dalam bentuk Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang ditujukan kepada Pemerintah Desa sebesar Rp587.031.875,00 atau sebesar 73,25% dari anggaran sebesar Rp801.385.142,00 yang ditetapkan pada Perubahan APBD. Bagi Hasil Pajak Daerah dianggarkan berdasarkan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 465 Tahun 2024 tentang Rincian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2023, sedangkan realisasi belanja transfer bagi hasil terdiri dari realisasi atas kurang bayar tahun 2023 sebesar Rp194.690.906,00 dan penyaluran tahap 1 tahun 2024 sebesar Rp392.340.969,00. Adapun rincian anggaran dan realisasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.29 Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa

NO	DESA	ANGGARAN 2024 Rp	REALISASI 2024 Rp			%	REALISASI 2023 Rp
			SURANG BAYAR 2023	TAHAP 1 2024	JUMLAH		
1	Adiw	0.762.888,00	2.508.447,00	6.106.441,00	8.682.888,00	52,08	17.724.487,00
2	Adiw Selatan	9.941.383,00	4.356.001,00	5.843.995,00	10.200.000,00	80,60	7.267.460,00
3	Bakula	8.349.546,00	1.930.283,00	4.254.466,00	6.204.678,00	76,13	6.677.926,00
4	Bidiba	1.888.709,00	2.091.892,00	4.023.400,00	6.304.292,00	77,38	6.577.483,00
5	Bidiba Selatan	7.742.512,00	2.442.756,00	4.022.400,00	6.465.156,00	83,59	6.865.268,00
6	Bidiba Timur	3.001.790,00	1.945.172,00	4.248.262,00	6.393.434,00	77,40	6.536.254,00
7	Bitulubi	8.371.094,00	2.352.272,00	4.401.479,00	6.553.751,00	79,23	6.786.172,00
8	Dagew	13.304.778,00	2.353.852,00	6.711.078,00	8.965.080,00	57,82	10.872.856,00
9	Dagew	7.981.329,00	2.477.270,00	4.062.937,00	6.500.207,00	81,44	7.304.233,00
10	Dulopo	8.226.875,00	1.944.104,00	4.389.483,00	6.393.587,00	74,08	6.811.832,00
11	Dulopo Barat	7.830.424,00	2.464.888,00	4.365.160,00	6.830.048,00	84,59	6.959.473,00
12	Dumagin A	11.747.678,00	2.263.828,00	6.561.703,00	8.825.531,00	96,04	11.443.902,00
13	Dumagin B	11.782.376,00	2.583.388,00	6.121.104,00	8.704.502,00	93,38	11.963.749,00
14	Dumisanaga	8.396.857,00	2.803.880,00	4.234.463,00	6.342.343,00	77,37	6.580.809,00
15	Hakibiki	7.927.247,00	2.589.493,00	4.342.670,00	6.732.163,00	84,92	7.051.860,00
16	Higun	7.878.470,00	2.478.198,00	4.198.837,00	6.638.035,00	84,28	6.936.673,00
17	Kelakanta	9.386.884,00	4.273.379,00	5.729.658,00	10.063.037,00	104,34	7.26.806,00
18	Kinasa	8.895.393,00	2.207.897,00	4.248.072,00	6.456.240,00	76,78	6.817.411,00
19	Kinasa	7.780.489,00	2.437.504,00	4.022.400,00	6.459.904,00	82,88	6.842.383,00
20	Kemebet	9.445.548,00	3.170.363,00	4.489.893,00	7.660.256,00	86,21	8.334.432,00
21	Kemebet Timur	8.048.812,00	2.090.176,00	4.321.005,00	6.411.181,00	77,38	6.738.854,00
22	Luwatu	8.743.573,00	2.558.948,00	4.588.283,00	6.865.231,00	79,52	7.378.441,00
23	Luwatu I	7.836.281,00	2.645.836,00	4.021.495,00	6.667.331,00	79,92	8.547.393,00
24	Lusa	7.897.473,00	2.427.372,00	4.022.400,00	6.449.772,00	81,60	7.039.433,00
25	Lutikup	9.302.933,00	2.738.446,00	4.188.383,00	6.886.829,00	74,02	8.053.781,00
26	Luwu	8.000.659,00	1.950.830,00	4.804.983,00	6.755.813,00	76,44	6.824.097,00
27	Managidan	7.844.220,00	1.948.899,00	4.186.996,00	6.135.895,00	77,97	6.478.593,00
28	Maxambir	4.362.210,00	2.753.260,00	4.376.278,00	7.129.538,00	87,33	7.388.281,00
29	Maxambir Utara	8.257.426,00	2.662.875,00	4.387.878,00	7.050.753,00	85,39	7.411.289,00

NO	DESA	ANGGARAN 2024 Rp	REALISASI 2024 Rp			%	REALISASI 2023 Rp
			KURANG BAYAR 2023	TAHAP 1 2024	JUMLAH		
10	Meponbunga	8.240.893,00	2.257.494,00	4.255.459,00	6.502.953,00	79,04	6.376.901,00
11	Meponbunga Tanas	7.922.257,00	2.437.708,00	4.022.400,00	6.480.808,00	81,54	7.045.813,00
12	Milugodaa	7.878.821,00	1.947.777,00	4.360.083,00	6.306.860,00	80,18	6.502.914,00
13	Milugodaa Barat	7.934.941,00	1.843.383,00	4.362.367,00	6.307.749,00	79,47	6.569.320,00
14	Milugodaa Utara	7.836.348,00	2.511.070,00	4.301.591,00	6.188.661,00	84,08	6.935.007,00
15	Medisi	8.122.480,00	2.437.708,00	4.398.510,00	7.056.219,00	86,85	7.245.396,00
16	Mediaba	8.565.541,00	3.368.373,00	7.711.980,00	10.079.883,00	117,20	8.022.468,00
17	Melakipet	7.891.694,00	2.077.737,00	4.248.307,00	6.426.254,00	81,43	6.756.953,00
18	Motomali I	8.504.246,00	2.269.397,00	6.431.996,00	8.697.389,00	101,30	8.772.967,00
19	Motomali II	8.238.849,00	2.437.866,00	6.353.083,00	6.590.749,00	80,09	7.302.901,00
20	Motomali Tiga	8.091.718,00	2.528.424,00	4.232.255,00	6.761.679,00	83,56	7.255.481,00
21	Motandoi	8.517.318,00	2.842.107,00	6.428.802,00	9.261.603,00	108,80	10.088.972,00
22	Motandoi Selatan	8.234.897,00	2.305.910,00	6.393.531,00	8.290.444,00	100,55	8.301.828,00
23	Motokatu	7.878.893,00	2.562.365,00	4.022.400,00	6.584.765,00	83,58	6.995.227,00
24	Namuk	8.785.761,00	2.023.727,00	5.802.648,00	7.826.376,00	89,12	7.339.389,00
25	Namuka Raya	7.978.512,00	2.480.986,00	4.368.458,00	6.808.474,00	85,33	7.301.438,00
26	Onggani I	8.274.280,00	2.389.250,00	4.595.265,00	6.703.546,00	81,02	6.776.223,00
27	Onggani Selatan	8.033.848,00	2.065.164,00	4.253.707,00	6.317.871,00	78,45	6.731.050,00
28	Pakuku Jaya	8.333.080,00	2.438.971,00	4.381.510,00	6.549.880,00	78,38	7.261.081,00
29	Pangu	8.048.387,00	1.998.700,00	4.242.295,00	6.212.995,00	77,27	6.432.822,00
30	Perjantagan	7.663.840,00	2.433.708,00	4.069.303,00	6.508.821,00	84,91	6.786.232,00
31	Pilang	8.678.048,00	2.940.547,00	6.186.388,00	9.057.833,00	104,37	10.238.378,00
32	Pirulubunga	7.803.973,00	2.435.848,00	4.296.231,00	6.732.077,00	86,27	6.925.853,00
33	Pulakintaman	8.307.403,00	1.963.862,00	4.443.791,00	6.407.657,00	77,23	6.940.840,00
34	Pulubakir	8.416.438,00	2.333.528,00	4.388.881,00	6.842.810,00	81,27	8.393.866,00
35	Pulubakir Selatan	9.920.057,00	3.264.241,00	6.734.231,00	8.998.478,00	90,55	10.425.871,00
36	Pupudi	8.153.639,00	2.552.860,00	4.047.727,00	6.600.587,00	80,76	6.782.723,00
37	Pupudi	8.748.736,00	3.302.852,00	7.748.833,00	10.910.703,00	124,55	11.780.984,00
38	Puradagoe	7.866.243,00	2.538.680,00	4.022.400,00	6.381.080,00	81,00	6.988.821,00
39	Rakmah	7.966.333,00	2.438.907,00	4.287.101,00	6.727.007,00	84,44	7.089.249,00
40	Raku	7.950.301,00	1.972.066,00	4.445.239,00	6.418.093,00	80,72	6.624.673,00
41	Sakong	8.184.983,00	2.394.743,00	4.350.380,00	6.554.843,00	80,07	6.994.234,00
42	Sakong Barat	8.087.334,00	2.608.763,00	4.430.049,00	7.088.802,00	87,79	7.256.791,00
43	Sakong Timur	7.888.361,00	2.438.372,00	4.376.897,00	6.634.469,00	84,30	6.925.303,00
44	Sakudaka	7.882.398,00	2.578.974,00	4.223.802,00	6.803.786,00	86,27	7.245.543,00
45	Sakumbayaga	8.028.264,00	2.186.339,00	4.239.670,00	6.418.239,00	79,91	6.848.734,00
46	Sigoo	8.051.633,00	2.174.852,00	4.243.706,00	6.388.557,00	79,30	8.388.504,00
47	Sundani	8.764.094,00	2.591.527,00	6.683.606,00	9.275.113,00	105,84	10.220.840,00
48	Suzuta	7.829.822,00	2.052.113,00	4.358.873,00	6.211.036,00	79,33	6.463.371,00
49	Takuka	10.030.854,00	2.448.852,00	6.780.383,00	9.209.235,00	91,72	10.420.201,00
50	Tanggak	8.368.833,00	2.314.950,00	4.575.428,00	6.750.379,00	80,66	6.989.180,00
51	Tebayagan	8.738.730,00	2.343.932,00	6.493.066,00	8.713.098,00	100,76	10.092.888,00
52	Tebayagan Selatan	15.221.667,00	2.593.437,00	6.443.346,00	8.039.283,00	52,80	13.941.817,00
53	Tekendadu	7.931.726,00	2.043.789,00	4.330.303,00	6.353.947,00	80,10	6.658.233,00
54	Tekendadu I	8.093.353,00	1.994.458,00	4.371.533,00	6.363.991,00	78,65	6.637.697,00
55	Tekendadu II	8.324.070,00	2.399.444,00	6.395.987,00	8.895.817,00	106,81	10.983.084,00
56	Tekonyon	8.338.810,00	2.802.007,00	4.532.047,00	7.333.454,00	87,91	7.778.520,00
57	Tekonye	8.603.638,00	2.824.380,00	6.733.986,00	9.543.496,00	110,87	10.334.339,00
58	Tekota	8.478.816,00	2.467.092,00	4.583.938,00	7.051.830,00	83,30	7.552.868,00
59	Temaki	8.103.870,00	2.443.362,00	4.364.154,00	7.105.336,00	86,34	7.234.786,00
60	Temaik	8.352.717,00	2.242.344,00	4.089.403,00	6.341.847,00	74,35	7.018.383,00
61	Temas Patra	8.444.334,00	2.710.426,00	4.280.787,00	7.002.233,00	82,98	7.432.868,00
JUMLAH		80.135.942,00	24.698.906,00	392.340.969,00	587.031.875,00	73,25	708.058.917,00

Sumber: Buku Besar Pembiayaan Tahun 2024

5.1.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan

Realisasi belanja bantuan keuangan tahun 2024 sebesar Rp102.229.925.550,00 atau sebesar 99,86% dari total anggaran pada perubahan APBD sebesar Rp102.375.876.821,00. Adapun realisasi belanja bantuan keuangan tersebut merupakan belanja bantuan keuangan ke Desa selama tahun 2024.

Anggaran Belanja Alokasi Dana Desa ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024. Sedangkan anggaran belanja Dana Desa ditetapkan sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 ditambah dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024. Adapun rincian anggaran dan realisasi Dana Desa serta Alokasi Dana Desa Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.30 Anggaran dan Realisasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa

NO	DESA/BPJS 1%	ANGGARAN 2024 Rp	REALISASI 2024 Rp	%	REALISASI 2023 Rp
1	Adow	1.387.231.000,00	1.362.977.000,00	99,69	1.356.431.000,00
2	Adow Selatan	1.220.911.000,00	1.216.940.600,00	99,67	1.471.444.000,00
3	Bakida	1.292.350.000,00	1.287.670.600,00	99,64	1.542.208.800,00
4	Bimba	1.576.142.000,00	1.572.100.700,00	99,74	1.172.275.000,00
5	Bimba Selatan	1.050.082.000,00	1.046.678.800,00	99,68	1.180.978.400,00
6	Bimba Timur	1.310.444.000,00	1.307.040.800,00	99,74	1.306.999.400,00
7	Bituhulu	1.152.241.000,00	1.149.227.750,00	99,74	1.142.620.450,00
8	Dayow	1.194.261.000,00	1.190.432.400,00	99,68	1.184.131.200,00
9	Dega	1.119.649.000,00	1.116.813.000,00	99,75	1.109.985.650,00
10	Dukepo	1.302.069.621,00	1.257.386.400,00	96,57	1.253.006.200,00
11	Dukepo Barat	1.137.631.000,00	1.133.802.400,00	99,66	1.127.877.200,00
12	Dumagin A	1.300.642.000,00	1.296.388.000,00	99,67	1.284.538.250,00
13	Dumagin B	1.196.110.000,00	1.192.706.800,00	99,72	1.185.688.700,00
14	Dumanga	1.317.922.000,00	1.313.668.000,00	99,68	1.309.571.550,00
15	Halobola	1.069.793.000,00	1.066.531.600,00	99,70	1.200.606.650,00
16	Higon	1.091.528.000,00	1.088.372.950,00	99,71	1.082.908.350,00
17	Ilhelama	1.225.122.000,00	1.220.868.000,00	99,65	1.476.063.000,00
18	Homata	1.281.344.000,00	1.277.515.400,00	99,70	1.132.857.900,00
19	Imosota	1.092.206.000,00	1.088.802.800,00	99,69	1.222.507.400,00
20	Kombot	1.360.611.000,00	1.355.506.200,00	99,62	1.347.356.450,00
21	Kombot Timur	1.118.068.000,00	1.114.664.800,00	99,70	971.010.400,00
22	Linwan	1.207.583.000,00	1.203.896.200,00	99,69	1.197.997.200,00
23	Linwan I	1.446.976.000,00	1.442.792.900,00	99,71	1.181.847.000,00
24	Liron	1.284.182.000,00	1.280.353.400,00	99,70	1.275.531.200,00
25	Lungkap	1.148.107.000,00	1.144.278.400,00	99,67	1.139.304.750,00
26	Lusoo	1.528.113.000,00	1.523.929.900,00	99,73	1.378.525.000,00
27	Manggada	1.151.376.000,00	1.147.547.400,00	99,67	1.141.403.200,00
28	Matambo	1.211.238.000,00	1.208.260.200,00	99,75	1.201.903.600,00
29	Matambo Utara	1.220.766.000,00	1.217.433.700,00	99,73	1.210.048.200,00

NO	DISA/BJPS 1%	ANGGARAN 2024 Rp	REALISASI 2024 Rp	%	REALISASI 2023 Rp
30	Meyambanga	1.208.511.000,00	1.204.882.400,00	99,68	1.199.021.200,00
31	Meyambanga Timur	1.333.269.000,00	1.329.440.400,00	99,71	1.184.409.200,00
32	Milangodua	1.253.899.000,00	1.250.070.400,00	99,69	1.383.074.100,00
33	Milangodua Barat	1.730.036.000,00	1.725.782.000,00	99,75	1.585.480.000,00
34	Milangodua Utara	1.194.424.000,00	1.190.701.750,00	99,69	1.184.821.200,00
35	Modia	1.137.581.000,00	1.134.177.800,00	99,70	1.128.393.200,00
36	Molibaga	1.574.566.000,00	1.570.737.400,00	99,76	1.309.037.200,00
37	Molosipat	1.057.535.000,00	1.053.706.400,00	99,64	1.048.442.200,00
38	Momalia I	1.592.183.000,00	1.587.503.600,00	99,71	1.465.919.800,00
39	Momalia II	1.587.261.000,00	1.582.829.750,00	99,72	1.459.844.650,00
40	Momalia Tiga	1.282.769.000,00	1.278.940.400,00	99,70	1.134.337.200,00
41	Motandoi	1.234.866.000,00	1.231.462.800,00	99,72	1.228.375.400,00
42	Motandoi Selatan	1.132.004.000,00	1.023.534.800,00	90,42	1.125.328.050,00
43	Motoinbu	1.135.797.000,00	1.132.181.100,00	99,68	1.125.721.200,00
44	Naruk	1.335.918.000,00	1.331.664.000,00	99,68	1.448.688.000,00
45	Naruka Raya	1.346.344.000,00	1.342.515.400,00	99,72	1.459.173.050,00
46	Oggimoi	1.349.093.000,00	1.346.115.200,00	99,78	1.197.703.200,00
47	Oggimoi Selatan	1.165.801.000,00	1.162.397.800,00	99,71	1.093.680.400,00
48	Pakuku Jaya	1.186.134.000,00	1.182.730.800,00	99,71	1.437.373.400,00
49	Pangia	1.460.198.000,00	1.456.192.150,00	99,73	1.194.019.000,00
50	Perpuangan	1.044.793.000,00	1.041.389.800,00	99,67	1.036.156.900,00
51	Pikang	1.086.050.000,00	1.082.221.400,00	99,65	1.076.638.200,00
52	Piloluhunga	1.527.101.000,00	1.522.847.000,00	99,72	1.400.293.000,00
53	Pinolantungan	1.531.245.000,00	1.327.416.400,00	99,71	1.182.981.200,00
54	Pinololian	1.141.817.000,00	1.137.669.350,00	99,64	1.124.054.000,00
55	Pinololian Selatan	1.081.128.000,00	1.077.760.250,00	99,69	1.071.820.400,00
56	Pantada	1.207.083.000,00	1.203.879.800,00	99,72	1.198.933.250,00
57	Popodu	1.360.284.200,00	1.355.604.800,00	99,66	1.349.822.000,00
58	Posilagan	1.178.774.000,00	1.175.016.300,00	99,68	1.169.105.200,00
59	Sibwah	1.354.768.000,00	1.350.088.600,00	99,65	1.483.040.800,00
60	Sakti	1.259.440.000,00	1.255.186.000,00	99,66	1.509.349.000,00
61	Salongo	1.259.875.000,00	1.255.195.600,00	99,63	1.247.493.800,00
62	Salongo Barat	1.187.828.000,00	1.184.070.300,00	99,68	1.177.828.850,00
63	Salongo Timur	994.234.000,00	991.149.850,00	99,69	985.636.400,00
64	Sinandaka	1.279.056.000,00	1.274.802.000,00	99,65	1.219.027.650,00
65	Sisomitayuga	1.279.393.000,00	1.275.564.400,00	99,70	1.414.017.200,00
66	Sogau	1.167.834.000,00	1.164.005.400,00	99,67	1.158.007.200,00
67	Simlana	1.213.848.000,00	1.209.735.800,00	99,66	1.203.386.700,00
68	Srupa	1.068.545.000,00	1.064.716.400,00	99,64	1.059.218.200,00
69	Tahitaa	1.287.739.000,00	1.283.485.000,00	99,67	1.406.088.000,00
70	Tangagah	1.569.871.000,00	1.565.723.350,00	99,74	1.567.970.000,00
71	Tobuyagan	1.254.243.000,00	1.250.839.800,00	99,73	1.244.138.900,00
72	Tobuyagan Selatan	1.112.566.000,00	1.109.800.900,00	99,75	1.364.077.400,00
73	Tolondohi	1.100.680.000,00	1.097.099.550,00	99,67	1.352.083.200,00
74	Tolondohi I	1.490.728.000,00	1.487.329.600,00	99,77	1.226.954.400,00

NO	DESA/BPJS 1%	ANGGARAN 2024 Rp	REALISASI 2024 Rp	%	REALISASI 2023 Rp
75	Tolonidahi II	1.238.661.000,00	1.234.832.400,00	99,69	1.090.964.200,00
76	Tolotoyon	1.432.052.000,00	1.427.478.950,00	99,68	1.413.678.800,00
77	Toluya	1.395.397.000,00	1.391.710.200,00	99,74	1.270.655.050,00
78	Toluru	1.533.260.000,00	1.529.147.800,00	99,73	1.406.751.000,00
79	Tonala	1.470.049.000,00	1.466.397.650,00	99,75	1.462.185.750,00
80	Toronik	1.153.009.000,00	1.149.357.650,00	99,68	1.404.612.000,00
81	Trans Patoa	1.091.638.000,00	1.088.305.700,00	99,69	1.082.448.200,00
82	BPJS Kesehatan 1%	-	508.344.100,00	-	305.286.000,00
JUMLAH		102.375.876.821,00	102.229.925.550,00	99,86	101.846.130.600,00

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa desa menjadi subyek pembangunan, hal itu menyebabkan aliran dana baik APBD maupun APBN mengalir kepada desa sehingga menimbulkan kewajiban akuntabilitas dan transparansi keuangan desa. Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 dan hasil *high level meeting* standar pelaporan keuangan desa tanggal 22 April 2016 di Kementerian Keuangan RI, desa bukan merupakan entitas akuntansi, desa merupakan entitas pelaporan yang artinya desa harus membuat laporan keuangan serta melaporkannya secara mandiri dan terpisah dari laporan keuangan pemerintah daerah hanya saja standar baku sebagai instrumen belum ada. Ringkasan realisasi APBDes per desa dapat dilihat pada Laporan Ikhtisar Realisasi APBDes yang dibuat tersendiri.

5.1.3 Pembiayaan

5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan

5.1.3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode anggaran. Penerimaan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp45.570.594.736,51 dan terrealisasi sebesar Rp45.881.232.973,51 atau sebesar 100,69% yang diperoleh dari SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp45.570.594.736,51 ditambah Koreksi SiLPA sebesar Rp310.638.237,00. Adapun rincian SiLPA tahun sebelumnya terdiri dari pelampauan penerimaan PAD sebesar Rp3.798.410.378,21, pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebesar Rp2.342.065.393,00, dan penghematan belanja sebesar Rp39.430.118.965,30. Sedangkan koreksi SiLPA sebesar Rp310.638.237,00 terdiri dari saldo kas pada rekening dana BOP Paud TK Negeri Pembina atas penerimaan jasa giro tahun 2021 sebesar Rp12.072,00 dan jasa giro tahun 2022 sebesar Rp4.123,00 yang belum dicatat tahun sebelumnya dan belum disetor ke kas daerah per 31 Desember 2024, reklasifikasi utang PFK PPh 21 ke utang belanja pegawai atas pemungutan PPh 21 tahun 2018 s.d 2020 yang telah dikompensasikan pada kelebihan pembayaran PPh 21 berdasarkan LHP BPK Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp199.033.460,00, serta Koreksi SiLPA sebesar Rp111.588.582,00 atas pemotongan iuran Jaminan Kesehatan PTT/THL tahun 2021 yang telah dikompensasi atas kelebihan pembayaran PTT/THL yang tidak terdaftar sebagai peserta tahun 2020 dan tidak perlu dibayarkan ke BPJS berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi PPU 2021 serta Surat Konfirmasi dari BPJS.

5.1.3.1.2 Pencairan Dana Cadangan

Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mencairkan seluruh Dana Cadangan yang diperuntukan untuk membiayai penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp13.179.146.800,00. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan membentuk Dana Cadangan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Membiayai Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Besaran dana cadangan yang harus dianggarkan dan di transfer ke rekening dana cadangan yakni tahun 2022 sebesar Rp7.500.000.000,00 dan tahun 2023 sebesar Rp7.500.000.000,00 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Tahun 2023 telah dicairkan Dana Cadangan sebesar Rp1.820.853.200,00 untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang selanjutnya sisanya dicairkan pada tahun 2024.

5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

5.1.3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2024 tidak merencanakan untuk merealisasikan pengeluaran pembiayaan dalam bentuk Dana Cadangan ataupun lainnya guna membiayai suatu kegiatan. Adapun amanat Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Membiayai Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 telah berakhir pada tahun 2023.

5.1.4 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Berkenan

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun anggaran 2024 sebesar Rp24.913.038.067,47. Jumlah tersebut merupakan selisih realisasi pendapatan dan belanja, dengan memperhitungkan pembiayaan netto selama satu tahun anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan	619.250.718.390,11	
Belanja	<u>(663.378.058.096,15)</u>	
Defisit		(34.147.341.706,04)
Penerimaan Pembiayaan	59.060.379.773,51	
Pengeluaran Pembiayaan	<u>-</u>	
Pembiayaan Netto		59.060.379.773,51
SILPA		24.913.038.067,47

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun anggaran 2024 ini termasuk didalamnya merupakan SILPA dari sumber dana yang ditentukan penggunaannya (*Earmark*) sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.31 SILPA Dana Earmark

No	Sumber Pendanaan	SILPA T.A 2023	Pendapatan T.A 2024	Belanja T.A 2024	SILPA T.A 2024
1	DAU Spesifik Grant (SG)				
	Formasi Pegawai PPK	-	11.080.571.273,00	80.048.404.397,00	137.360.879,00
	Pendanaan Kabinahan	-	-	-	-
	Bidang Pendidikan	-	17.883.610.000,00	17.347.428.497,00	736.361.503,00
	Bidang Kesehatan	-	22.247.888.800,00	22.352.877.876,00	105.120.076,00
	Bidang Pekerjaan Umum	-	85.497.067.000,00	24.940.039.424,00	537.023.576,00

Lu

Tabel 5.31 SILPA Dana Earmark

No	Sumber Pendanaan	SILPA T.A 2023	Pendapatan T.A 2024	Belanja T.A 2024	SILPA T.A 2024
	DAU Tambahan (Dukung Pemenuhan THB dan Uji D Bagi Gam PNSD)	-	1.360.866.000,00	-	1.360.866.000,00
2	DID - Insentif Fiskal	-	11.540.821.000,00	11.506.105.793,00	11.480.720,00
3	DAK Fiskal				
	Pendidikan - PAUD	-	244.907.000,00	244.647.000,00	260.000,00
	Pendidikan - SD	-	2.323.829.000,00	2.323.821.000,00	88.000,00
	Pendidikan - SMP	-	2.239.522.790,00	2.239.470.000,00	42.790,00
	Kesehatan - Penguatan Pemenuhan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi	-	6.649.473.512,00	6.889.488.000,00	700.000.112,00
	Jalan - Jalan Mendukung Ketahanan Daerah	-	8.890.079.000,00	8.829.630.300,00	60.448.810,00
	Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan dan Hewan)	-	9.361.283.500,00	9.340.262.200,00	11.021.290,00
	Air Minum - Tematik Penguatan Pemenuhan Kebutuhan Kimah Terpadi	-	16.021.762.000,00	16.840.930.300,00	170.851.700,00
	Sanitasi - Tematik Penguatan Pemenuhan Kebutuhan Kimah Terpadi	-	4.346.363.300,00	4.335.635.300,00	10.728.000,00
	Pemukatan dan Pemukiman - Tematik Penguatan Pemukiman Kimah Terpadi	-	22.807.958.000,00	20.994.966.280,00	11.991.720,00
	Rigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan dan Hewan)	-	2.397.010.000,00	2.396.647.000,00	360.000,00
4	DAK Non Fiskal				
	Tanggungan Pembiayaan Gam PNSD	405.785.200,00	0.980.323.000,00	0.052.211.752,00	333.876.448,00
	Tambahan Penghasilan Gam PNSD	1.835.430,00	1.800.305.000,00	634.781.000,00	1.237.290.430,00
	Bantuan Operasional Kesehatan DINAS - BOK Kabupaten/Kota (BOK KAB)	208.652.553,00	2.892.629.447,00	2.844.574.430,00	362.707.563,00
	Bantuan Operasional Kesehatan DINAS - BOK Penguatan Obat dan Makanan (POM)	-	250.401.000,00	234.497.300,00	15.903.700,00
	Bantuan Operasional Keluarga Bermanfaat (BOKB)	54.374.302,00	2.654.480.698,00	2.645.680.500,00	92.964.500,00
	Dana Peningkatan Kapasitas Keperta (dan SMK)	-	240.831.000,00	00.446.553,00	60.384.447,00
	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (P P A)	39.710.722,00	366.269.273,00	386.767.908,00	8.233.800,00
5	SILPA Tahun 2023 Yang Tidak Digunakan Tahun 2024				
	Dana Kesehatan Pangan dan Pertanian	85.852.073,00	-	-	85.852.073,00
	Dana Fasilitas Pemukiman Mural	98.781.250,00	-	-	98.781.250,00
	Bidang Pendidikan	209.677.800,00	-	318.794.950,00	109.116.150,00
	Bidang Kesehatan (Dinas Kesehatan)	46.343.293,00	-	-	46.343.293,00
	Bidang Kesehatan (KB)	3.989.300,00	-	-	3.989.300,00
	Bidang Kesehatan (RSUD)	3.659.022,00	-	-	3.659.022,00
	Bidang Pekerjaan Umum (Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang)	9.465.798,00	-	-	9.465.798,00
	Bidang Pasar (Dinas Perindustrian)	63.651.000,00	-	-	63.651.000,00
6	Salah Lain PAD yang sah (JKN)	91.247.538,00	4.170.980.793,44	4.224.387.376,15	37.270.747,29

No	Sumber Pendanaan	SLPA T.A 2023	Pendapatan T.A 2024	Belanja T.A 2024	SLPA T.A 2024
7	Dana BOSP				
	BOS				2.501.447,00
	HOP PAID	-	22.800.000,00	22.800.500,00	39.500,00
	HOP Kestaraan	110.000,00	487.879.000,00	486.403.000,00	343.000,00
8	Dana BOK Paskesmas	133.192.296,00	6.004.327.704,00	6.364.821.261,00	99.180.729,00
	TOTAL	2.695.689.474,00	23.188.127.449,44	227.225.38193,25	2.348.21389,29

5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya. Berikut ini Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

Tabel 5.32 Saldo Anggaran Lebih

URAIAN	2024	2023
Saldo Anggaran Lebih Awal	45.570.594.736,51	65.395.829.545,20
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	45.881.232.973,51	64.258.838.666,30
Sub Total	(310.638.237,00)	1.088.990.879,00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	24.913.038.067,47	45.570.594.736,51
Sub Total	24.913.038.067,47	46.379.585.615,51
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	310.638.237,00	(1.088.990.879,00)
Saldo Anggaran Lebih Akhir	24.913.038.067,47	45.570.594.736,51

Sumber : LPSAL Tahun 2024

Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo anggaran lebih awal sebesar Rp45.570.594.736,51 berasal dari SiLPA Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun anggaran 2023.

5.2.1. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp45.881.232.973,51. Saldo tersebut diperoleh dari SiLPA tahun sebelumnya yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran tahun 2024 sebesar Rp45.570.594.736,51 ditambah Koreksi SiLPA sebesar Rp310.638.237,00 yang merupakan saldo kas pada rekening dana BOP Paud TK Negeri Pembina atas penerimaan jasa giro tahun 2021 sebesar Rp12.072,00 dan jasa giro tahun 2022 sebesar Rp4.123,00 yang belum dicatat tahun sebelumnya dan belum disetor ke kas daerah per 31 Desember 2024, reklusifikasi utang PFK PPh 21 ke utang belanja pegawai atas pemungutan PPh 21 tahun 2018 s.d 2020 yang telah dikompensasikan pada kelebihan pembayaran PPh 21 berdasarkan LHP BPK Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp199.033.460,00, serta Koreksi SiLPA sebesar Rp111.588.582,00 atas pemotongan iuran Jaminan Kesehatan PTT/THL tahun 2021 yang telah dikompensasi atas kelebihan pembayaran PTT/THL yang tidak terdaftar sebagai peserta tahun 2020 dan tidak perlu dibayarkan ke BPJS berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi PPU 2021 serta Surat Konfirmasi dari BPJS.

5.2.2. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun 2024 sebesar Rp24.913.038.067,47. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran ini berasal dari defisit tahun 2024 sebesar Rp34.147.341.706,04 ditambah pembiayaan netto tahun 2024 sebesar Rp59.060.379.773,51. Pembiayaan netto tahun 2024 terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp45.570.594.736,51, Koreksi SiLPA atas kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp310.638.237,00 dan Pencairan Dana Cadangan sebesar Rp13.179.146.800,00.

5.2.3. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Terdapat koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk tahun anggaran 2024 sebesar Rp310.638.237,00. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya ini merupakan Koreksi SiLPA atas saldo kas pada rekening dana BOP Paud TK Negeri Pembina yang merupakan penerimaan jasa giro tahun 2021 sebesar Rp12.072,00 dan jasa giro tahun 2022 sebesar Rp4.123,00 yang belum dicatat tahun sebelumnya dan belum disotor ke kas daerah per 31 Desember 2024, reklasifikasi utang PFK PPh 21 ke utang belanja pegawai atas pemungutan PPh 21 tahun 2018 s.d 2020 yang telah dikompensasikan pada kelebihan pembayaran PPh 21 berdasarkan LHP BPK Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp199.033.460,00, serta Koreksi SiLPA sebesar Rp111.588.582,00 atas pemotongan Iuran Jaminan Kesehatan PTT/THL tahun 2021 yang telah dikompensasi atas kelebihan pembayaran PTT/THL yang tidak terdaftar sebagai peserta tahun 2020 dan tidak perlu dibayarkan ke BPJS berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi PPU 2021 serta Surat Konfirmasi dari BPJS.

5.2.4. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo anggaran lebih akhir Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2024 sebesar Rp24.913.038.067,47. Saldo ini diperoleh dari defisit tahun berjalan sebesar Rp34.147.341.706,04 ditambah SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp45.570.594.736,51, Koreksi SiLPA sebesar Rp310.638.237,00 dan pencairan dana cadangan sebesar Rp13.179.146.800,00. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Saldo Anggaran Lebih dapat digunakan untuk menutupi defisit anggaran pada Pemerintah Daerah. Sedangkan pencairan dana cadangan pada penerimaan pembiayaan digunakan untuk membiayai kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 sebagaimana tujuan dibentuknya Dana Cadangan Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Membiayai Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.33 Rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir

KODE REKENING	URAIAN	SALDO
	Pelampunan Penerimaan PAD	
4.1.02.08	Pajak Hiburan	140.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	25.884.442,00
4.1.03.10	Pajak Penerangan Jalan	728.754.215,00
4.1.01.13	Pajak Sarung Baring Walet	3.500.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Bituan	589.543.762,00
4.1.02.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.245.636,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	8.831.500,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	937.343.635,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.879.190,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	72.385.285,67
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	25.778.810,44
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	113.492.413,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	8.029.880,00
	Pelampunan Penerimaan Pendapatan Transfer	
4.2.01.01.02.0001	DAU	3.160.196.000,00
	Pelampunan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	
4.3.01.05.01.0001	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SALDO
	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	10.887.662.654,45
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	570.667.118,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	459.035.455,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	526.015.562,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	28.058.531,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	44.417.340,00
5.1.02.01	Belanja Barang	315.601.884,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	533.112.436,85
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	424.409.220,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	128.575.011,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Masyarakat	62.794.213,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	431.913,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	2.000.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia	40.279.947,28
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	124.500.000,00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	62.804.760,00
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	10.000.000,00
	Penghematan Belanja-Belanja Modal	
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besi	757.020,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	192.662.475,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	7.881.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	84.367.319,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	5.139.600,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kodokteran dan Kesehatan	348.185.467,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	39.443.596,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	1.942.500,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	16.191.939,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	1.473.626.651,78
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Panti	75.000,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	1.053.880.670,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	136.142.602,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	44.298.900,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	48.534.128,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Berwujud Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	1.007.250,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	575.750,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	9.975.750,00
	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.190.189.000,00
	Sisa Belanja Transfer	
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	214.333.267,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	145.951.271,00
	SILPA	24.913.038.067,47

5.3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas.

5.3.1. Aset

Secara umum aset Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan per 31 Desember 2024 adalah sejumlah Rp1.093.409.169.348,43. Jika dibandingkan dengan aset per 31 Desember 2023 dengan jumlah Rp1.139.608.893.730,81 dapat dilihat terjadi penurunan nilai aset sebesar Rp46.199.724.382,38 atau 4,05%. Jenis aset ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dikelompokkan menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya, yang lebih lanjut dapat diuraikan sebagai berikut.

5.3.1.1. Aset Lancar

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antar lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angkurun, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Tabel 5.34 Aset Lancar

NO	URAIAN	SALDO 2024 Rp	SALDO 2023 Rp
1	Kas di Kas Daerah	23.934.782.662,18	44.523.090.013,51
2	Kas di Bendahara Penerimaan	43.964.550,00	6.872.500,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
4	Kas di BLUD	-	-
5	Kas Dana BOSP	7.377.981,00	6.631.712,00
6	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	41.654.872,29	97.339.674,00
7	Kas Dana BOK Puskesmas	992.828.250,00	1.351.912.296,00
8	Kas Lainnya	500.000,00	157.500,00
9	Setara Kas	-	-
10	Investasi Jangka Pendek	-	-
11	Piutang Pajak Daerah	1.104.437.285,00	1.188.778.359,00
12	Piutang Retribusi Daerah	34.877.500,00	22.047.500,00
13	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-
14	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	342.078.000,00	300.616.000,00
15	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-
16	Piutang Transfer Antar Daerah	9.543.260.996,00	7.957.018.300,00
17	Piutang Lainnya	1.410.584.790,16	3.291.895.372,60
18	Penyisihan Piutang	(1.111.593.482,43)	(1.044.300.648,92)
19	Beban Dibayar Dituaka	90.087.671,00	92.869.588,00
20	Persediaan	10.503.143.328,50	13.032.046.532,56
	JUMLAH	46.937.983.303,78	70.827.874.698,75

Sumber: Neraca Tahun 2024

lw

Saldo aset lancar per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp46.937.983.303,70. Saldo aset lancar mengalami penurunan sebesar Rp23.889.891,05 atau 33,73% jika dibandingkan dengan aset lancar tahun 2023. Kelompok aset lancar sebagaimana tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut.

5.3.1.1.1. Kas di Kas Daerah

Saldo kas di kas daerah per 31 Desember 2024 berjumlah sebesar Rp23.934.782.662,18. Saldo tersebut merupakan saldo yang telah direkonsiliasi sesuai rekening koran dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.35 Kas di Kas Daerah

NO	BANK NAMA REKENING	NOMOR REKENING	DIBUKA SEJAK	SALDO per 31 Des 2024	KETERANGAN
1	REKENING PENGELUARAN	030.012.000002-0	24/01/2022	-	DITUTUP
2	REKID	030.012.000003-0	04/11/2024	23.934.782.662,18	-
3	REKENING PENERIMAAN	030.012.000004-0	05/11/2024	-	DITUTUP
JUMLAH				23.934.782.662,18	

Sumber: Rekening Koran Per 31 Desember 2024

5.3.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Pengelolaan kas di bendahara penerimaan tahun 2024 dilaksanakan secara tunai. Pengelolaan kas di bendahara penerimaan secara tunai dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024. Dalam pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu bertugas menerima dan menyimpan seluruh penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke rekening penerimaan daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterima, kecuali terhadap penerimaan tempat pelelangan ikan, tempat rekreasi/objek wisata, dan puskesmas yang terdapat di luar Kecamatan Bolaang Uki dan Kecamatan Pinolosian. Penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud dilakukan paling lambat 10 hari kerja sejak diterima atau jika jumlah penerimaan telah mencapai Rp1.000.000,00. Selain pengelolaan kas bendahara penerimaan secara tunai, terdapat kebijakan pelaksanaan pengelolaan kas di bendahara penerimaan melalui rekening bank yaitu penerimaan Dana Non Kapitasi di Dinas Kesehatan dan penerimaan retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah. Hal tersebut disebabkan oleh jumlah penerimaan uang yang dikelola oleh Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah relatif besar.

Saldo kas di bendahara penerimaan merupakan kas di bendahara penerimaan karena alasan tertentu belum disetor ke kas daerah pada tanggal neraca, sehingga dilaporkan dalam neraca sebagai Kas di Bendahara Penerimaan. Saldo kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp43.964.550,00. Saldo kas di bendahara penerimaan sebagai dimaksud dapat dirinci sebagai berikut.

Ca

Tabel 5.36 Kas di Bendahara Penerimaan

NO	OPD/UPTD	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (Non Kapitasi)	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	Total
1	DINAS KESEHATAN	42.842.600,00	-	-	42.842.600,00
2	PUSKESMAS PINOLOSIAN	-	465.200,00	-	465.200,00
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	-	-	656.750,00	656.750,00
JUMLAH		42.842.600,00	465.200,00	656.750,00	43.964.550,00

Sumber: Rincian Saldo Buku Besar Tahun 2024

Saldo kas pada bendahara penerimaan per 31 Desember 2024 tersebut berasal dari:

1. Penerimaan retribusi pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan merupakan penerimaan tanggal 24 Desember 2024 Dana Non Kapitasi Puskesmas Adow Bulan Juni-Juli 2024 sebesar Rp3.651.300,00 dan Dana Non Kapitasi Puskesmas Pinolosian Bulan Juli 2024 sebesar Rp39.191.300,00 yang tidak diketahui telah diterima di rekening kas Dana Non Kapitasi Dinas Kesehatan dan telah disetorkan pada tanggal 14 Februari 2025 sebesar Rp42.842.600,00.
2. Penerimaan retribusi pelayanan di Puskesmas Pinolosian merupakan penerimaan retribusi tanggal 27 s.d 31 Desember 2024 sebesar Rp465.200,00 dan telah disetorkan pada tanggal 6 Januari 2025.
3. Penerimaan retribusi pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah merupakan penerimaan retribusi tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp656.750,00 dan telah disetorkan pada tanggal 7 Januari 2025.

5.3.1.1.3. Kas di Bendahara Pengeluaran

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tidak memiliki saldo pada kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024.

5.3.1.1.4. Kas di BLUD

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Sampai dengan tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD sehingga tidak terdapat saldo kas di BLUD.

5.3.1.1.5. Kas Dana BOSP

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) pada Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah terdiri dari Pengelolaan Dana BOS, Pengelolaan Dana BOP PAUD, dan Pengelolaan Dana BOP Kesetaraan. Dana BOSP tersebut merupakan dana alokasi khusus nonfisik untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi satuan pendidikan. Adapun kas dana BOSP tahun 2024 adalah sebesar Rp 7.377.981,00 yang terdiri dari Kas Dana BOS sebesar Rp 6.977.286,00, Kas Dana BOP PAUD sebesar Rp55.695,00 dan Kas Dana BOP Kesetaraan sebesar Rp345.000,00.

5.3.1.1.5.1. Kas Dana BOS

Kas Dana BOS per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp6.977.286,00 yang terdiri dari SILPA pada LRA sebesar Rp2.510.447,00 dan utang PFK sebesar Rp4.480.339,00. Rincian sisa kas dana BOS pada bendahara BOS per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.37 Kas Dana BOS

NO	NAMA SEKOLAH	SILPA LRA TA 2024 Rp	UTANG PFK 2024			SALDO KAS TA 2024 Rp
			PPN Rp	PPH 21 Rp	PPH 23 Rp	
1	SD NEGERI 1 KOMBOT	-	476.942,00	-	-	476.942,00
2	SD NEGERI 1 MOLIBAGU	659.500,00	-	-	-	659.500,00
3	SD NEGERI 1 SALONDO	691,00	986.036,00	125.000,00	32.874,00	1.144.601,00
4	SD NEGERI 1 TOLONDADU	405,00	-	-	-	405,00
5	SD NEGERI 2 KOMBOT	15,00	-	-	-	15,00
6	SD NEGERI 2 MOLIBAGU	10.991,00	-	-	28.648,00	39.639,00
7	SD NEGERI 2 MOTANDU	133.790,00	-	-	-	133.790,00
8	SD NEGERI 2 SALONDO	860,00	-	-	-	860,00
9	SD NEGERI 2 TOLONDADU	1.022,00	-	-	-	1.022,00
10	SD NEGERI 3 MOLIBAGU	15.071,00	-	-	-	15.071,00
11	SD NEGERI ADJOW	-	-	-	30.000,00	30.000,00
12	SD NEGERI BINIHA	193,00	-	-	-	193,00
13	SD NEGERI BOTULIUDU	4,00	-	-	-	4,00
14	SD NEGERI DUMAGEN A	83.213,00	-	-	-	83.213,00
15	SD NEGERI DUMAGEN B	1.777,00	-	-	-	1.777,00
16	SD NEGERI LOPON	1.071,00	-	75.000,00	12.500,00	88.571,00
17	SD NEGERI LUNGKAP	-	-	37.500,00	-	37.500,00
18	SD NEGERI MANGADAA	200,00	-	-	-	200,00
19	SD NEGERI MILANGDAA	346,00	-	-	-	346,00
20	SD NEGERI MILANGDAA BARAT	699,00	468.244,00	32.500,00	46.000,00	547.443,00
21	SD NEGERI MODISE	458,00	-	-	-	458,00
22	SD NEGERI MOMALLA 1	-	464.716,00	-	1.296,00	468.012,00

NO	NAMA SEKOLAH	SILPA LRA TA 2024 Rp	UTANG PFK 2024			SALDO KAS TA 2024 Rp
			PPN Rp	PPH 21 Rp	PPH 23 Rp	
23	SD NEGERI PIDUNG	57.318,00	-	-	-	57.318,00
24	SD NEGERI POSILAGAN	500.000,00	445.946,00	-	24.525,00	970.471,00
25	SD NEGERI SAIBUAH	-	287.389,00	-	10.000,00	297.389,00
26	SD NEGERI SINOMBAYUGA	-	-	-	204.723,00	204.723,00
27	SD NEGERI SOGUO	5.270,00	-	-	-	5.270,00
28	SD NEGERI SONDANA	31.881,00	-	-	-	31.881,00
29	SD NEGERI TRANS PATOA	898,00	-	-	-	898,00
30	SMP NEGERI MOLIBAGU	3.973,00	-	675.000,00	-	678.973,00
31	SMP NEGERI PINOLOSAN	750.000,00	-	-	-	750.000,00
32	SMP NEGERI SATU ATAP LUWOO	3,00	-	-	-	3,00
33	SMP NEGERI SINOMBAYUGA	2,00	-	-	-	2,00
34	SMP NEGERI TOHAYAGAN	250.796,00	-	-	-	250.796,00
JUMLAH		2.510.447,00	3.129.275,00	945.000,00	392.566,00	6.977.286,00

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Adapun rincian penambahan dan pengurangan Kas Dana BOS untuk tahun anggaran 2024 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.38 Rekapitulasi Penambahan dan Pengurangan Kas Dana BOS

NO	SEKOLAH	SALDO AWAL	PENDAPATAN 2024 Rp	BELANJA 2024 Rp	UTANG PFK 2024 Rp	KAS BOS 2024 Rp
1	SD NEGERI1 KOMBOT	-	84.390.000,00	84.390.000,00	476.942,00	476.942,00
2	SD NEGERI1 LAWAN	-	109.630.000,00	109.630.000,00	-	-
3	SD NEGERI1 MOLIBAGU	-	88.270.000,00	87.610.500,00	-	659.500,00
4	SD NEGERI1 MOTANDOI	-	91.180.000,00	91.180.000,00	-	-
5	SD NEGERI1 PINOLOSAN	-	145.500.000,00	145.500.000,00	-	-
6	SD NEGERI1 SALONGU	425,00	96.999.576,00	96.999.330,00	1.143.930,00	1.144.601,00
7	SD NEGERI1 TAHLAA	-	47.530.000,00	47.530.000,00	-	-
8	SD NEGERI1 TOLONDAJU	712,00	62.079.644,00	62.079.951,00	-	405,00
9	SD NEGERI2 KOMBOT	15,00	78.570.000,00	78.570.000,00	-	0,00
10	SD NEGERI2 LAWAN	-	122.220.000,00	122.220.000,00	-	-

CW

NO	SEKOLAH	SALDO AWAL	PENDAPATAN	BELANJA	UTANG PERK	KAS BOS
			2024 Rp	2024 Rp		
11	SD NEGERI 12 MOLBAJU	10.991,00	67.900.000,00	67.900.000,00	28.648,00	29.619,00
12	SD NEGERI 12 METANDOI	133.790,00	102.820.000,00	102.820.000,00	-	133.790,00
13	SD NEGERI 12 PNOLOSAN	-	128.980.000,00	128.980.000,00	-	-
14	SD NEGERI 12 SALONGO	-	122.220.000,00	122.219.140,00	-	880,00
15	SD NEGERI 12 TAHLAA	-	45.590.000,00	45.590.000,00	-	-
16	SD NEGERI 12 TOLODADU	302,00	61.180.000,00	61.180.280,00	-	1022,00
17	SD NEGERI 13 MOLBAJU	15.071,00	136.960.000,00	136.960.000,00	-	15.071,00
18	SD NEGERI ADOW	-	84.390.000,00	84.390.000,00	30.000,00	30.000,00
19	SD NEGERI ADOW SELATAN	-	58.260.000,00	58.260.000,00	-	-
20	SD NEGERI BAKDA	-	136.770.000,00	136.770.000,00	-	-
21	SD NEGERI BINSIA	193,00	136.770.000,00	136.770.000,00	-	193,00
22	SD NEGERI BOTULIDDU	10.066,00	58.189.938,00	58.200.000,00	-	4,00
23	SD NEGERI DAYOW	1.949,00	41.710.000,00	41.711.949,00	-	-
24	SD NEGERI DEGA	-	77.790.000,00	77.790.000,00	-	-
25	SD NEGERI DUREPO	-	115.430.000,00	115.430.000,00	-	-
26	SD NEGERI DUMAGNA	97.219,00	85.345.974,00	85.360.000,00	-	63.215,00
27	SD NEGERI DUMAGNB	10.277,00	75.651.500,00	75.660.000,00	-	1.777,00
28	SD NEGERI DUMBANGA	-	104.760.000,00	104.760.000,00	-	-
29	SD NEGERI EIGON	3.114,00	34.920.000,00	34.923.114,00	-	-
30	SD NEGERI EOMATA	-	81.390.000,00	81.390.000,00	-	-
31	SD NEGERI NOSOTA	-	82.640.000,00	82.640.000,00	-	-
32	SD NIGERILKON	-	100.300.000,00	100.300.000,00	-	-
33	SD NEGERI LOPON	4.011.071,00	36.920.000,00	40.930.000,00	87.500,00	88.571,00
34	SD NEGERI LUNGKAP	-	95.060.000,00	95.060.000,00	37.500,00	37.500,00
35	SD NEGERI LUWO	-	113.490.000,00	113.490.000,00	-	-
36	SD NEGERI MANGADAA	262,00	103.089.938,00	103.090.000,00	-	200,00
37	SD NEGERI MATANGU	-	148.410.000,00	148.410.000,00	-	-
38	SD NEGERI MEYAMBIANGA	-	169.750.000,00	169.750.000,00	-	-
39	SD NEGERI MEANGODAA	346,00	218.250.000,00	218.250.000,00	-	346,00
40	SD NEGERI MEANGODAA BARAT	699,00	167.810.000,00	167.810.000,00	548.744,00	547.443,00
41	SD NEGERI MODSI	958,00	88.459.500,00	88.460.000,00	-	458,00

NO	SEKOLAH	SALDO AWAL	PENDAPATAN 2024 Rp	RELANJA 2024 Rp	UTANG PFK 2024 Rp	KAS BOS 2024 Rp
42	SD NEGERI MOLOS PAT	24,00	75.849.976,00	75.850.000,00	-	-
43	SD NEGERI MOMALJA 1	42.500,00	240.566.000,00	240.602.500,00	468.012,00	468.012,00
44	SD NEGERI MOMALJA 2	-	117.370.000,00	117.370.000,00	-	-
45	SD NEGERI MOMALJA 3	-	181.390.000,00	181.390.000,00	-	-
46	SD NEGERI MOTOLOHU	-	93.120.000,00	93.120.000,00	-	-
47	SD NEGERI NUNUK	-	117.370.000,00	117.370.000,00	-	-
48	SD NEGERI ONGGUNCH	337,00	84.390.000,00	84.390.337,00	-	-
49	SD NEGERI PERING	57.318,00	62.270.000,00	62.270.000,00	-	57.318,00
50	SD NEGERI PELOLAHUNGA	-	347.630.000,00	347.630.000,00	-	-
51	SD NEGERI PINOLANTUNGAN	-	85.360.000,00	85.360.000,00	-	-
52	SD NEGERI POPODU	-	80.530.000,00	80.530.000,00	-	-
53	SD NEGERI POS LAGON	8.735,00	118.871.245,00	118.340.000,00	470.471,00	970.471,00
54	SD NEGERI SABUAH	28,00	110.770.000,00	110.770.028,00	297.389,00	297.389,00
55	SD NEGERI SAKTI	-	99.910.000,00	99.910.000,00	-	-
56	SD NEGERI SINDAKA	-	63.050.000,00	63.050.000,00	-	-
57	SD NEGERI SOMBAYUSIA	-	83.420.000,00	83.420.000,00	204.723,00	204.723,00
58	SD NEGERI SOGLUD	15.226,00	120.644.774,00	120.654.730,00	-	5.270,00
59	SD NEGERI SONDANA	43.834,00	95.048.027,00	95.060.000,00	-	31.881,00
60	SD NEGERI SOPUTA	-	58.260.000,00	58.260.000,00	-	-
61	SD NEGERI TANGAGAU	-	70.810.000,00	70.810.000,00	-	-
62	SD NEGERI TOHAYAGAN	-	166.840.000,00	166.840.000,00	-	-
63	SD NEGERI YOLUTU	-	98.030.000,00	98.030.000,00	-	-
64	SD NEGERI TONALA	-	132.890.000,00	132.890.000,00	-	-
65	SD NEGERI TOROSK	-	77.790.000,00	77.790.000,00	-	-
66	SD NEGERI TRANS PATOA	898,00	44.620.000,00	44.620.000,00	-	898,00
67	SMP NEGERI ADOW	184.366,00	164.467.229,00	164.647.595,00	-	-
68	SMP NEGERI BAKTIA	7.853,00	113.732.347,00	113.740.000,00	-	-
69	SMP NEGERI DAYOW	257.744,00	116.469.200,00	116.726.944,00	-	-
70	SMP NEGERI DUMAON	-	95.500.000,00	95.500.000,00	-	-
71	SMP NEGERI KOMBOT	-	176.660.000,00	176.660.000,00	-	-

NO	SEKOLAH	SALDO AWAL	PENDAPATAN 2024 Rp	BELANJA 2024 Rp	UTANG PFK 2024 Rp	KAS BOS 2024 Rp
72	SMP NEGERI LEDO	-	149.950.000,00	149.950.000,00	-	-
73	SMP NEGERI MELANGODAA	-	325.840.000,00	325.840.000,00	-	-
74	SMP NEGERI MOLIBAGU	3.973,00	463.430.000,00	463.430.000,00	675.000,00	678.973,00
75	SMP NEGERI NEMALJA	-	399.120.000,00	399.120.000,00	-	-
76	SMP NEGERI PANGGA	-	76.230.000,00	76.230.000,00	-	-
77	SMP NEGERI PINOLISIAN	-	348.060.000,00	345.310.000,00	-	750.000,00
78	SMP NEGERI SATU ATAP LUWU	3,00	72.600.000,00	72.600.000,00	-	3,00
79	SMP NEGERI SOMBAYUTTA	1.000,00	111.319.002,00	111.320.000,00	-	2,00
80	SMP NEGERI TANGGAH	-	108.900.000,00	108.900.000,00	-	-
81	SMP NEGERI TORAYAGAN	250.796,00	805.270.000,00	805.270.000,00	-	250.796,00
82	SMP NEGERI TONALA	-	202.070.000,00	202.070.000,00	-	-
83	SMP SATAP NEGERI MATAHEO	-	101.550.000,00	101.550.000,00	-	-
84	SMP SATAP NEGERI POSELAGON	-	111.320.000,00	111.320.000,00	-	-
JUMLAH		4.471.973,00	6.789.031.870,00	6.782.171.000,00	4.444.810,00	4.471.284,00

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dana BOS merupakan dana transfer dari Pemerintah Pusat langsung ke rekening sekolah, hal ini dilakukan untuk mengurangi beban administrasi pemerintah daerah sehingga prosesnya lebih efisien, tidak lagi melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah. Sisa Dana BOS tidak disetor ke RKUD Kabupaten/Kota dan digunakan oleh Satdikdas Negeri yang bersangkutan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS tahun berikutnya.

5.3.1.1.5.2. Kas Dana BOP PAUD

Dana BOP PAUD adalah dana BOSP untuk operasional Satuan Pendidikan dalam penyelenggaraan layanan PAUD. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk tahun 2024 memiliki Kas dari Dana BOP PAUD sebesar Rp55.695,00. Saldo kas ini merupakan penerimaan jasa giro tahun 2021 sebesar Rp12.072,00 dan tahun 2022 sebesar Rp4.123,00 yang tidak dicatat tahun sebelumnya dan belum disetorkan ke kas daerah per 31 Desember 2024 serta pengembalian belanja perjalanan dinas sebesar Rp39.500,00 tahun 2024.

5.3.1.1.5.3. Kas Dana BOP Kesetaraan

Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Kesetaraan) merupakan dana BOSP untuk operasional Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan kesetaraan. Kas Dana BOP Kesetaraan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2024 adalah sebesar Rp345.000,00 yang merupakan sisa kas pada SPNF Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Adapun sisa kas tersebut terdiri dari

SILPA BOP Kesetaraan Reguler sebesar Rp5.000,00 dan SILPA BOP Kesetaraan Kinerja sebesar Rp340.000,00.

5.3.1.1.6. Kas Dana Kapitasi pada FKTP

Kas di bendahara dana kapitasi pada FKTP merupakan kas atas pengelolaan dana kapitasi untuk jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden nomor 46 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah. Dana kapitasi merupakan besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP/Puskemas berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Dana kapitasi memiliki kekhususan terkait pengelolannya, sesuai dengan pasal 7 ayat (2) di Peraturan Presiden yang sama dinyatakan bahwa pendapatan dana kapitasi digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP. Setiap pendapatan dan belanja yang dilaksanakan oleh FKTP disajikan pada LRA agar pula memenuhi Interpretasi Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara (RKUN)/RKUD.

Kas di Bendahara Dana Kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp41.654.872,29. Saldo kas di bendahara dana kapitasi JKN pada FKTP ini diperoleh dari sisa kas tahun sebelumnya sebesar Rp97.339.674,00 ditambah dengan pendapatan dana kapitasi sebesar Rp4.170.870.493,00 dan pendapatan lain-lain sebesar Rp40.300,44, utang PFK tahun 2024 sebesar Rp3.884.125,00 serta pengembalian kelebihan belanja sebesar Rp19.341.846,00, dikurangi dengan belanja selama tahun 2024 sebesar Rp4.243.729.422,15 dan pelunasan utang PFK tahun sebelumnya sebesar Rp6.092.144,00. Adapun sisa saldo kas di bendahara dana kapitasi JKN dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.39 Kas Dana Kapitasi pada FKTP

NO	UPTD FKTP	SILPA ERA TA. 2024	UTANG PFK				NAS TAHUN 2024
			PPK 21	PPK 22	PPK 23	PPN	
1	PUSKEMAS PONGORAN	1825,394,00	-	-	15.000,00	-	1.810.394,00
2	PUSKEMAS ONGELING	30.831.844,00	2.470.549,00	10.400,00	-	420.200,00	34.272.993,00
3	PUSKEMAS MEANGODIA	15.877,44	-	-	-	-	15.877,44
4	PUSKEMAS MULJAGU	7.337.332,00	-	-	-	-	7.337.332,00
5	PUSKEMAS MIRI ALIN	44.783,83	-	-	-	-	44.783,83
6	PUSKEMAS ADON	836.934,00	-	410,00	40.300,00	238.040,00	1.275.284,00
7	PUSKEMAS DUMAJUK	2.036.893,00	-	-	-	-	2.036.893,00
8	PUSKEMAS TUMERANSA	587.449,00	21.081,00	-	-	-	608.530,00
9	PUSKEMAS SUNONHAYUG	34.221.526,00	-	-	-	-	34.221.526,00
TOTAL		37.770.747,29	2.491.751,00	106.810,00	63.300,00	1.649.040,00	41.654.872,29

Sumber: Buku Besar Pembantu Tahun 2024

Utang PFK pada kas dana kapitasi sebesar Rp3.884.125,00 telah disetorkan ke kas negara oleh masing-masing puskemas dalam kurun waktu tanggal 28 Februari 2025 sampai dengan tanggal 26 Maret 2025.

W

Rincian penambahan dan pengurangan kas dana Kapitasi pada FKTP untuk tahun anggaran 2024 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.40 Mutasi Penambahan dan Pengurangan Kas Dana Kapitasi pada FKTP

NO	UPTD FKTP	KAS TAHUN 2023	PENAMBAHAN				PENGURANGAN		KAS TAHUN 2024
			PENDAPATAN KAPITASI - UFR	PENDAPATA SALAIN - UFR	PENGEMBALIAN RELANSA	UTANG PFK 2023	UFR	PELUNASAN UTANG PFK TAHUN 2023	
1	PUSKESMAS PONGOLIAN	2.633.800,00	569.333.000,00	-	1.277.810,00	10.000,00	569.247.810,00	22.200,00	1.834.094,00
2	PUSKESMAS PANGGONA	16.708.033,00	230.343.917,00	-	4.253.900,00	3.224.000,00	213.213.617,00	5.792.492,00	18.273.951,00
3	PUSKESMAS MELANGGALA	33.324.734,00	200.789.000,00	0,00	-	-	329.094.000,00	-	11.071,00
4	PUSKESMAS AKOR-HATI	12.084.390,00	969.223.520,00	-	0,00	-	969.223.520,00	-	7.332.332,00
5	PUSKESMAS MEGALAH	774.870,00	735.254.780,00	-	-	-	735.094.674,10	-	84.703,90
6	PUSKESMAS ADOR	6.637.370,00	329.893.340,00	-	827.512,00	421.675,00	238.227.240,00	-	1.219.387,00
7	PUSKESMAS DUNDAWA	416.840,00	147.393.070,00	-	3.087.874,00	-	147.209.200,00	68.220,00	2.816.000,00
8	PUSKESMAS DUNDANDA	11.087.674,00	147.257.870,00	-	1.076.000,00	70.000,00	151.000,00	68.400,00	611.720,00
9	PUSKESMAS DUNDANDA	-	34.390.733,00	48.000,00	-	-	34.342.733,00	-	38.221.070,00
TOTAL		87.166.874,00	4.079.972.074,00	48.000,00	16.161.396,00	7.694.549,00	4.347.766.430,10	6.992.344,00	41.464.871,00

Sumber: Buku Besar Pembantu Tahun 2024

5.3.1.1.7 Kas Dana BOK Puskesmas

Kas Dana BOK di Puskesmas tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah sebesar Rp992.828.250,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.41 Kas Dana BOK Puskesmas

NO	UPTD PUSKESMAS	SAKDO AWAL	PENERIMAAN Rp.	RELANSA Rp.	PENGEMBALIAN RELANSA Rp.	UTANG PFK Rp.	SISA KAS DANA BOK Rp.
1	MELANGGALA	21.498.800,00	1.079.093.700,00	3.444.047.400,00	-	497.400,00	28.257.920,00
2	DUNDANDA	81.704.350,00	291.932.442,00	130.808.800,00	-	-	76.828.992,00
3	PONGOLIAN	124.789.500,00	721.431.024,00	749.211.500,00	1.000,00	77.600,00	24.949.924,00
4	DUNDANDA	39.884.270,00	619.009.822,00	479.148.100,00	-	226.150,00	90.269.442,00
5	MELANGGALA	47.600.000,00	313.916.994,00	149.489.370,00	-	-	145.027.624,00
6	DUNDANDA	20.444.250,00	314.473.300,00	434.471.000,00	396.000,00	47.310,00	47.281.710,00
7	MELANGGALA	64.494.500,00	1.000.816.500,00	1.277.272.000,00	-	-	27.039.000,00
8	DUNDANDA	281.722.000,00	245.077.400,00	392.090.000,00	-	-	134.709.400,00
9	ADOR	107.463.710,00	333.667.202,00	346.793.440,00	-	-	194.337.472,00
TOTAL		1.232.912.294,00	6.004.332.764,00	6.344.812.240,00	397.000,00	1.824.510,00	692.828.250,00

Sumber: Buku Besar Pembantu Tahun 2024

Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat (BOK Puskesmas) merupakan dana bantuan yang digunakan untuk belanja operasional program prioritas upaya kesehatan masyarakat.

Utang PFK pada kas dana BOK puskesmas sebesar Rp1.024.511,00 telah disetorkan ke kas negara oleh masing-masing puskesmas secara serentak pada tanggal 22 Mei 2025.

5.3.1.1.8. Kas Lainnya

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2024 memiliki saldo kas pada kas lainnya sebesar Rp500.000,00. Saldo kas lainnya ini merupakan sisa saldo kas dana hibah dari PT Bank SulutGo sebesar Rp30.000.000,00 pada bendahara kegiatan Bolsel Paragliding Championship and Festival tahun 2024 yang tidak digunakan lagi di Dinas Pemuda dan Olahraga.

5.3.1.1.9. Setara Kas

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Per 31 Desember 2024 tidak memiliki saldo setara kas.

5.3.1.1.10. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek ini dapat berupa deposito lebih dari 3 (tiga) bulan dan tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Per 31 Desember 2024 tidak memiliki investasi jangka pendek.

5.3.1.1.11. Piutang Pajak Daerah

Jumlah piutang pajak daerah per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.104.437.285,00. Saldo piutang pajak daerah per 31 Desember 2024 adalah pendapatan pajak daerah yang merupakan hak Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan akan tetapi belum diterima per 31 Desember 2024.

Tabel 5.42 Piutang Pajak Daerah

NO	URAIAN	SALDO 2024 Rp	SALDO 2023 Rp
1	Piutang Pajak Hotel	8.035.000,00	405.000,00
2	Piutang Pajak Restoran	21.132.254,00	153.994.884,00
3	Piutang Pajak Reklame	6.363.375,00	1.286.475,00
4	Piutang Pajak Penerangan Jalan	171.166.324,00	148.815.468,00
5	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	19.341.930,00	1.718.470,00
6	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	878.398.402,00	882.558.064,00
JUMLAH		1.104.437.285,00	1.188.778.359,00

Sumber: Daftar Saldo Buku Besar Tahun 2024

1. Piutang Pajak Hotel tahun 2024 sebesar Rp8.035.000,00. Piutang pajak hotel ini merupakan pendapatan pajak hotel dari Deaga Bay Resort bulan Desember tahun 2021 sebesar Rp100.000,00, pajak hotel dari penginapan Alncah bulan September s.d November 2022 sebesar Rp305.000,00, pajak hotel dari ARTA CITY tahun 2024 sebesar Rp6.825.000,00, pajak hotel dari PENGINAPAN 68 SPECIALITY tahun 2024 sebesar Rp180.000,00, pajak hotel dari KOS PUTRI ARISTA tahun 2023 sebesar Rp500.000,00 dan pajak hotel dari KOST DARREL tahun 2023 sebesar Rp125.000,00.
2. Piutang Pajak Restoran tahun 2024 sebesar Rp21.132.254,00. Piutang pajak restoran ini terdiri dari piutang pajak rumah makan dan sejenisnya sebesar Rp13.363.154,00 dan piutang pajak jasa boga/katering dan sejenisnya sebesar Rp7.769.100,00. Rincian piutang pajak restoran ini dapat dilihat pada Lampiran II Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih.

3. Piutang Pajak Reklame tahun 2024 sebesar Rp6.363.375,00. Piutang pajak reklame ini merupakan Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron dari J&T EXPRESS tahun 2023 sebesar Rp645.975,00, piutang pajak reklame dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) UNIT MOLIBAGU tahun 2024 sebesar Rp1.926.000,00, piutang pajak reklame dari AYAM SINGAPURA tahun 2024 sebesar Rp640.500,00, dan piutang pajak dari PT. NIPSEA PAINT AND CHEMICALS / NIPPON PAINT tahun 2024 sebesar Rp3.150.900,00.
4. Piutang Pajak Penerangan Jalan tahun 2024 sebesar Rp171.166.324,00. Piutang pajak penerangan jalan ini merupakan pendapatan pajak penerangan jalan bulan Desember 2024 yang seharusnya diterima, namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 belum diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
5. Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun 2024 sebesar Rp19.341.930,00. Saido Piutang ini terdiri dari piutang pajak batu kapur sebesar Rp1.788.910,00, piutang pajak pasir dan kerikil sebesar Rp15.265.340,00, piutang pajak pasir kuarsa sebesar Rp1.951.680,00, dan piutang pajak tanah serap (*fullers earth*) sebesar Rp336.000,00.
6. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) tahun 2024 sebesar Rp878.398.402,00. Piutang pajak ini diperoleh dari sisa piutang pajak tahun sebelumnya karena tidak ada penambahan piutang pajak pada tahun 2024.

5.3.1.1.11 Piutang Retribusi Daerah

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk tahun 2024 memiliki piutang retribusi daerah sebesar Rp34.877.500,00. Piutang retribusi daerah ini merupakan piutang atas retribusi pelayanan pasar – kios pada Dinas Perindustrian untuk tahun 2022 sebesar Rp7.939.500,00, piutang atas retribusi pelayanan pasar – kios tahun 2023 sebesar Rp7.931.000,00, dan piutang atas retribusi pelayanan pasar – kios tahun 2024 sebesar Rp19.007.000,00.

5.3.1.1.12 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tidak memiliki Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan untuk tahun 2024.

5.3.1.1.13 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang Lain-lain PAD yang Sah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk tahun 2024 sebesar Rp342.078.000,00. Piutang ini merupakan piutang sewa BMD yakni rumah makan kompleks perkantoran panango yang belum diterima pembayarannya sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp315.738.000,00, dan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan sebesar Rp26.340.000,00.

5.3.1.1.14 Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tidak memiliki Piutang Transfer Pemerintah Pusat untuk tahun 2024.

5.3.1.1.15 Piutang Transfer Antar Daerah

Piutang Transfer Antar Daerah tahun 2024 sebesar Rp9.543.260.996,00. Piutang transfer antar daerah ini merupakan bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang belum

diterima Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan per 31 Desember 2024. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara hanya melakukan penyaluran atas dana bagi hasil pajak tahun 2024 untuk periode bulan Januari s.d April. Sedangkan sisanya yakni bulan Mei s.d Desember 2024 dicatat sebagai piutang. Adapun rincian piutang transfer antara daerah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.43 Piutang Transfer Antar Daerah

NO	BULAN	JENIS PAJAK PROVINSI				JUMLAH
		PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	BEA WALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR	DBH PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR	DBH PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN	
1	MEI	248.880.029,00	893.233.873,00	621.425.862,00	1.683.480,00	3.075.323.224,00
2	JUNI	230.288.655,00	85.896.089,00	620.404.891,00	2.982.707,00	1.057.582.342,00
3	JULI	276.908.040,00	86.487.453,00	711.957.807,00	1.888.805,00	1.177.533.235,00
4	AGUSTUS	294.828.884,00	74.711.220,00	702.834.847,00	2.495.465,00	1.174.906.897,00
5	SEPTEMBER	307.232.475,00	84.870.088,00	737.904.991,00	1.582.510,00	1.233.80.084,00
6	OKTOBER	275.856.372,00	80.619.080,00	695.88.708,00	27.578.654,00	1.369.238.810,00
7	NOVEMBER	267.823.387,00	230.630.321,00	761.475.353,00	28.946.949,00	1.308.877.804,00
8	DESEMBER	406.641.641,00	210.256.384,00	666.846.778,00	1.338.201,00	1.329.096.740,00
	TOTAL	2.322.844.403,00	1.435.831.083,00	5.227.671.828,00	78.367.882,00	9.343.289.896,00

Sumber: Berita Acara Rekomendasi DBH Pajak Provinsi

5.3.1.1.16 Piutang Lainnya

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2024 memiliki piutang lainnya sebesar Rp1.410.584.790,16. Piutang lainnya ini terdiri dari uang muka hibah barang yang akan diserahkan kepada masyarakat Ipal Komunal tahun 2018 yang belum selesai dan belum diserahkan per 31 Desember 2024 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp360.691.198,66, uang muka hibah barang yang diserahkan kepada masyarakat atas Pekerjaan Swakelola Pembangunan IPAL Komunal Skala Permukiman Desa Bakida tahun 2024 sebesar Rp722.293.591,50, dan uang muka hibah barang yang diserahkan kepada masyarakat atas Pekerjaan Swakelola Pembangunan Tangki Septik Komunal Skala Permukiman Desa Bakida tahun 2024 sebesar Rp327.600.000,00. Perhitungan dan rincian piutang lainnya dapat dilihat pada Lampiran XIV Daftar Pekerjaan Yang Belum Diserahkan dalam laporan keuangan ini.

5.3.1.1.17 Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan sebagai berikut.

Tabel 5.44 Kualitas Piutang Tak Tertagih

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	Lancar	0,5 %
2	Kurang Lancar	10 %
3	Ditragikan	50 %
4	Macet	100 %

Sumber: Peraturan Bupati Kab. Bolaang Mongondow Selatan Nomor 75 Tahun 2019

1. Kualitas lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
2. Kualitas kurang lancar, apabila dalam jangka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
3. Kualitas diragukan, apabila dalam jangka waktu 2 tahun terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
4. Kualitas macet, apabila dalam jangka waktu 3 tahun terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Saldo penyisihan piutang Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.111.593.482,43 dengan rincian dan mutasi sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.45 Mutasi Penyisihan Piutang

No	Uraian	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Saldo Akhir Rp
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(880.253.257,41)	(3.333.331,15)	(1.624.856,12)	(881.751.732,44)
2	Penyisihan Piutang Retribusi	(568.990,00)	(913.095,00)	-	(1.682.085,00)
3	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sisa	(123.393.310,00)	(57.172.900,00)	(122.850,00)	(180.443.360,00)
4	Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	(39.785.091,51)	(47.716.304,99)	(39.785.091,51)	(47.716.304,99)
JUMLAH		(1.844.300.648,92)	(108.835.631,14)	(41.542.797,63)	(1.111.593.482,43)

Sumber: Buku Besar Pembantu Tahun 2024

Adapun perhitungan penyisihan piutang dapat dilihat pada Lampiran II Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih dalam laporan keuangan ini.

5.3.1.1.18 Beban Dibayar Dimuka

Saldo beban dibayar dimuka per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp90.087.671,00. Saldo ini merupakan pembayaran atas beban yang belum menjadi kewajiban sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sehingga menimbulkan hak tagih bagi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Saldo beban dibayar dimuka ini terdiri dari sewa bangunan gedung kantor dibayar dimuka sebesar Rp14.367.123,00, sewa bangunan gudang dibayar dimuka sebesar Rp14.926.027,00, dan sewa asrama dibayar dimuka sebesar Rp60.794.521,00. Rekapitulasi beban dibayar dimuka untuk setiap SKPD dapat dilihat pada Lampiran III dalam Laporan Keuangan ini.

5.3.1.1.19 Persediaan

Persediaan merupakan barang atau perlengkapan dalam mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah, barang persediaan dikelompokkan menjadi 3 obyek barang persediaan yaitu barang pakai habis, barang tidak pakai habis, dan barang bekas dipakai. Rincian obyek barang pakai habis adalah bahan, suku cadang, alat/bahan untuk kegiatan kantor, obat-obatan, persediaan untuk dijual/diserahkan, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, natura dan pakan, persediaan penelitian, dan persediaan dalam proses. Barang tidak pakai habis mempunyai dua rincian obyek yakni komponen dan pipa. Sedangkan

persediaan barang bekas dipakai terdiri dari komponen bekas, dan pipa bekas.

Saldo persediaan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.503.142.228,50. Adapun rincian saldo persediaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.46 Persediaan

NO	URAIAN	SALDO 2024 Rp	SALDO 2023 Rp
1.	Bahan Lainnya	2.658.830.641,21	2.408.504.872,07
2.	Alat Tulis Kantor	37.983.505,00	21.658.242,00
3.	Kertas dan Cover	67.669.500,00	107.895.816,00
4.	Bahan Cetak	73.373.271,27	69.242.799,27
5.	Benda Pos	1.050.000,00	345.000,00
6.	Peralat Kantor	1.984.000,00	7.601.200,00
7.	Alat Listrik	1.055.000,00	3.999.500,00
8.	Sarung/Cendera Mata	13.480.000,00	-
9.	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	-	12.402.824,00
10.	Obat	2.291.427.451,18	2.058.101.251,82
11.	Obat-obatan Lainnya	-	2.902.000,00
12.	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	2.449.751.713,50	7.431.065.226,06
13.	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	2.383.458.301,34	779.308.801,34
14.	Natura	523.078.845,00	122.539.000,00
15.	Paku	-	6.480.000,00
JUMLAH		10.503.142.228,50	13.032.046.532,56

Sumber : Daftar Saldo Buku Besar Tahun 2024.

Rincian atas saldo persediaan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran IV Rekapitulasi Persediaan. Saldo persediaan tersebut tidak termasuk persediaan yang telah rusak dan kedaluwarsa (*expired*) sebesar Rp626.198.026,00 yang dapat dirinci sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.47 Persediaan Rusak dan Kedaluwarsa

NO	NAMA KEPD	OBAT RUSAK	KADALUWARSA			TOTAL
			OBAT	RUP NYD29	ATN	
1	OBAT KESEHATAN	3.807.827,00	11.874.430,00	-	-	15.682.257,00
2	Persediaan NERBARE	-	33.310.442,00	-	-	33.310.442,00
3	Persediaan DEMOGANGA	-	22.811.801,00	-	-	22.811.801,00
4	Persediaan PENGUNJAN	913.447,00	61.603.120,00	-	-	62.516.567,00
5	Persediaan ATOM	-	72.204.046,00	-	-	72.204.046,00
6	Persediaan MOSKOWSKA	-	19.497.113,00	-	-	19.497.113,00
7	Persediaan JEMBRON	-	20.100.923,00	-	-	20.100.923,00
8	Persediaan ODORINE	-	24.894.917,00	-	-	24.894.917,00
9	Persediaan KORONA KORONA	-	24.800.117,00	-	-	24.800.117,00
10	Persediaan MORILLA	-	61.045.971,00	-	-	61.045.971,00
11	WALDI	-	20.344.373,00	1.128.823,00	-	21.473.196,00
12	WALDI	-	-	-	63.242.390,00	63.242.390,00
JUMLAH		4.721.274,00	224.121.427,00	1.128.823,00	63.242.390,00	234.199.814,00

Sumber : Dinkes

Ch

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

5.3.1.2.1. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Sampai dengan tahun 2024 pemerintah daerah tidak memiliki Investasi Jangka Panjang Non Permanen.

5.3.1.2.2. Investasi Jangka Panjang Permanen

5.3.1.2.2.1 Penyertaan Modal

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan memiliki kebijakan investasi jangka panjang permanen dalam bentuk penyertaan modal yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada PT Bank SulutGo dengan total rencana modal yang disertakan sebesar Rp50.000.000.000,00.

Sesuai dengan paragraf 36 Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, penilaian investasi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada PT Bank SulutGo dilakukan dengan menggunakan metode biaya. Dengan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan, penghasilan atas investasi diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada PT Bank SulutGo. Penggunaan metode biaya dikarenakan kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada PT Bank SulutGo di bawah 20%. Hasil investasi yang diperoleh berupa deviden tunai diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi.

Tabel 5.48 Rekapitulasi Investasi Jangka Panjang Permanen

URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	%
Penyertaan Modal Pemda	4.487.034.100,00	4.487.034.100,00	-	-
JUMLAH	4.487.034.100,00	4.487.034.100,00	-	-

Sumber: Daftar Saldo Buku Besar Tahun 2024

Di tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan belum melakukan penambahan nilai investasi pada PT Bank SulutGo. Rincian perhitungan Penyertaan Modal pada PT Bank SulutGo dapat dilihat pada Lampiran V laporan keuangan ini.

Tabel 5.49 Rincian Penyertaan Modal pada PT. Bank SulutGo

URAIAN	JUMLAH
Penyertaan Modal pada PT. Bank SulutGo	
Saham 39.724 lembar x Rp100.000,00	3.972.400.000,00
Ago Saham	514.602.586,00
Saldo Dana Setoran Modal	31.514,00
JUMLAH	4.487.034.100,00

Sumber: Diklah

Pada tanggal 5 Februari 2024 PT Bank SulutGo menggelar Rapat Umum Pemegang Saham untuk tahun buku 2023. Rapat Umum Pemegang Saham tersebut menyetujui dan mengesahkan penambahan modal dari beberapa pesaham lain dengan jumlah total sebesar Rp66.095.400.000,00 sehingga mengubah komposisi saham Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dari sebelumnya sebesar 0,32% menjadi 0,30%. Selain itu dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud menyetujui penggunaan 80% laba bersih untuk dibagikan kepada pemegang saham sebagai deviden secara proporsional sehingga Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mendapatkan deviden dalam bentuk tunai sebesar Rp640.020.357,00 yang telah dibayarkan pada tanggal 16 Februari 2024.

Pada tanggal 9 April 2025 PT Bank SulutGo menggelar Rapat Umum Pemegang Saham untuk tahun 2024. Rapat tersebut menyetujui dan penetapan penggunaan laba bersih sebesar Rp224.120.099.570,00, sejumlah 87,50% atau Rp196.105.087.124,00 dari laba bersih tersebut dibagikan kepada para pemegang saham sebagai deviden secara proporsional berdasarkan share saham per 31 Desember 2024. Berdasarkan share saham sebesar 30%, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mendapatkan deviden sebesar Rp586.354.211,00. Rapat tersebut juga menyetujui perubahan struktur modal disetor setelah konversi Dana Setoran Modal menjadi Modal Disetor pesaham lain sebesar Rp72.950.000.000,00 sehingga komposisi saham akhir Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berubah menjadi 0,28% dengan jumlah lembar saham sebanyak 39.724. Selain itu, rapat tersebut juga menetapkan Dana Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Keuangan Berkelanjutan sebesar Rp25.000.000.000,00 yang akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham secara proporsional berdasarkan share saham setelah konversi Dana Setoran Modal sehingga Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mendapatkan pembagian sebesar Rp71.000.000,00.

5.3.1.2.2.2 Investasi Permanen Lainnya

Investasi permanen lainnya merupakan implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 17 Properti Investasi dan penerapan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Investasi permanen lainnya terdiri atas properti investasi. Properti investasi sendiri adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya serta tanah yang belum ditentukan penggunaannya serta tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan, dan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 5.50 Rekapitulasi Investasi Jangka Panjang Permanen

URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	%
Investasi Permanen Lainnya	-	2.452.102.817,00	(2.452.102.817,00)	(100,00)
JUMLAH	-	2.452.102.817,00	- 2.452.102.817,00	-

Sumber : Daftar Saldo Buku Besar Tahun 2024

Investasi permanen lainnya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 100,00% atau Rp2.452.102.817,00 dari tahun sebelumnya. Pengurangan nilai investasi permanen lainnya disebabkan oleh reklasifikasi properti investasi ke akun baru sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.3.1.3. Aset Tetap

Pengakuan/pencatatan, pengukuran/perilaian, dan penyajian serta pengungkapan aset tetap menjadi fokus utama dikarenakan aset tetap memiliki nilai yang sangat signifikan dan memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi dalam neraca sebagai bagian dari laporan keuangan pemerintah. Aset tetap dalam PSAP 07 didefinisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Aset tetap diklasifikasi berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas, aset tetap dapat dibagi menjadi enam klasifikasi dan disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.51 Aset Tetap

NO	URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Tanah	20.948.450.295,00	20.916.860.295,00	31.590.000,00	0,15
2	Peralatan dan Mesin	290.541.878.944,65	276.314.835.571,65	14.227.043.373,00	5,15
3	Gedung dan Bangunan	504.234.186.376,33	496.777.962.231,63	7.456.224.144,70	1,50
4	Jalan, Irigasi, dan Jernang	1.115.776.485.789,32	1.049.207.042.544,21	66.569.443.245,11	6,34
5	Aset Tetap lainnya	13.194.308.664,00	13.194.308.664,00	-	-
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	33.238.514.737,76	21.004.292.205,00	12.154.222.532,76	57,65
7	Akumulasi Penyusutan	(985.204.286.930,82)	(879.664.668.522,62)	(105.539.618.408,20)	12,00
	JUMLAH	992.729.537.876,24	997.830.632.988,87	(5.101.095.112,63)	(0,51)

Sumber : Neraca Tahun 2023

Jika dibandingkan dengan saldo aset tetap tahun 2023 sebesar Rp997.830.632.988,87, aset tetap mengalami penurunan sebesar Rp5.101.095.112,63 atau 0,51% pada tahun 2024 sehingga saldo aset tetap per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp992.729.537.876,24. Penurunan aset tetap pada tahun 2024 berasal dari penambahan sebesar Rp125.440.881.765,60 dan pengurangan sebesar Rp130.541.976.878,23. Adapun rincian penambahan dan pengurangan aset tetap sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada aset berikut.

Tabel 5.52 Rincian Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap

NO	URAIAN	PENAMBAHAN 2024	PENGURANGAN 2024
1	Belanja modal aset tetap	97.830.722.735,00	6.155.000,00
2	Penerimaan hibah aset tetap	9.204.518.358,00	-
3	Penyesuaian belanja barang dan jasa	1.149.559.305,00	-
4	Koreksi aset tetap	-	7.118.410.685,00
5	Koreksi saldo awal aset tetap	31.590.000,00	-
6	Mutasi aset tetap antar SKPD	1.215.187.009,00	1.215.187.009,00
7	Reklasifikasi antar aset tetap	13.928.430.838,00	13.928.430.838,00
8	Reklasifikasi properti investasi	-	-
9	Reklasifikasi aset lainnya	595.430.250,00	288.135.112,03
10	Penyesuaian utang belanja modal	547.848.494,60	218.445.050,00
11	Penghapusan aset	-	1.290.000.000,00
12	Akumulasi penyusutan aset tetap	937.594.776,00	106.477.213.184,20
	JUMLAH	125.440.881.765,60	130.541.976.878,23

Sumber : Buku Besar Pembantu LKPD Tahun 2024

Dari rincian penambahan dan pengurangan aset tetap sebagaimana tabel di atas, mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

1. Penambahan aset tetap dari belanja modal sebesar Rp97.830.722.735,00 berasal dari:
 - Realisasi SP2D sebesar Rp96.136.598.675,00.
 - Realisasi SPB Dana Bantuan Operasional Sekolah sebesar Rp1.458.310.061,00.
 - Realisasi SPB Dana Kapitasi JKN sebesar Rp141.294.999,00.
 - Realisasi SPB Dana Bantuan Operasional Pendidikan PAUD sebesar Rp3.114.000,00
 - Realisasi SPB Dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan sebesar

Rp91.405.000,00.

Sedangkan pengurangan aset tetap dari belanja modal sebesar Rp6.155.000,00 berasal dari:

- Pengembalian belanja peralatan dan mesin sebesar Rp4.690.000,00 pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 - Pengembalian belanja peralatan dan mesin Dana Kapitasi JKN Puskesmas Onggunoi sebesar Rp1465.000,00.
2. Penerimaan hibah aset tetap sebesar Rp9.204.518.358,00 berasal dari:
- Penerimaan hibah atas Dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebesar Rp119.961.408,00.
 - Penerimaan hibah dari Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp107.472.950,00.
 - Penerimaan hibah dari Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI sebesar Rp181.000.000,00.
 - Penerimaan hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp8.796.084.000,00.
3. Penambahan aset tetap dari penyesuaian beban barang dan jasa sebesar Rp1.149.559.305,00 berasal dari:
- Penyesuaian biaya jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan pekerjaan pada aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp448.000.000,00 dan pada aset tetap konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp44.133.000,00.
 - Penyesuaian kapitalisasi biaya lain perolehan aset tetap peralatan mesin sebesar Rp3.942.305,00.
 - Penyesuaian beban barang dan jasa yang merupakan aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp3.900.000,00, aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp199.713.000,00, dan aset tetap konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp449.871.000,00.
4. Pengurangan aset tetap dari koreksi aset tetap sebesar Rp7.118.410.685,00 berasal dari:
- Koreksi belanja modal peralatan dan mesin yang memiliki nilai di bawah satuan minimum kapitalisasi sebesar Rp34.900.200,00.
 - Koreksi belanja modal gedung dan bangunan yang diserahkan kepada sekolah swasta sebesar Rp1.550.187.000,00.
 - Koreksi penerimaan hibah aset tetap peralatan dan mesin yang didalamnya terdapat barang habis pakai sebesar Rp124.989.358,00.
 - Koreksi belanja modal yang merupakan barang hibah barang yang diserahkan berupa peralatan dan mesin sebesar Rp20.200.000,00 dan jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp4.097.567.305,00.
 - Koreksi belanja modal yang merupakan barang habis pakai yang terealisasi dari belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp88.887.800,00, belanja modal gedung dan bangunan Rp50.853.952,00, dan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp1.150.825.070.

5. Koreksi saldo awal aset tetap sebesar Rp31.590.000,00 berasal dari koreksi penambahan aset tetap tanah yang belum dicatat tahun sebelumnya sebesar Rp31.590.000,00.
6. Mutasi aset tetap antar SKPD terdiri dari penambahan dan pengurangan masing-masing sebesar Rp1.215.187.009,00. Mutasi aset tetap antar SKPD terdiri dari:
 - Mutasi aset tetap peralatan dan mesin dari Dinas Perindustrian ke Sekretariat Daerah sebesar Rp532.130.009,00.
 - Mutasi aset tetap gedung dan bangunan dari Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ke Sekretariat Daerah sebesar Rp483.344.000,00.
 - Mutasi aset tetap gedung dan bangunan dari Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp199.713.000,00.
7. Reklasifikasi antar aset tetap terdiri dari penambahan dan pengurangan masing-masing sebesar Rp13.928.430.838,00. Penambahan dan pengurangan tersebut berasal dari:
 - Reklasifikasi aset tetap gedung dan bangunan ke aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp430.268.558,00.
 - Reklasifikasi aset tetap gedung dan bangunan ke aset tetap konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp4.269.754.000,00.
 - Reklasifikasi aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan ke aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp215.030.000,00.
 - Reklasifikasi aset tetap jalan, irigasi dan jaringan ke aset tetap konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp7.695.880.280,00.
 - Reklasifikasi aset tetap konstruksi dalam pengerjaan ke aset tetap gedung dan bangunan atas pekerjaan tahun sebelumnya yang telah selesai sebesar Rp850.505.000,00.
 - Reklasifikasi aset tetap konstruksi dalam pengerjaan ke aset tetap jalan irigasi dan jaringan atas pekerjaan tahun sebelumnya yang telah selesai sebesar Rp352.654.000,00.
 - Reklasifikasi aset tetap lainnya ke aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp114.339.000,00.
8. Reklasifikasi aset lainnya terdiri dari penambahan sebesar Rp595.430.250,00 yang berasal dari reklasifikasi belanja modal aset tetap lainnya kajian yang merupakan biaya perencanaan pembangunan fisik aset tetap jalan, irigasi dan jaringan dan pengurangan sebesar Rp288.135.112,03 berasal dari penyesuaian aset tetap atas kekurangan volume pekerjaan belanja modal gedung dan bangunan hasil pemeriksaan BPK RI TA 2024.
9. Penyesuaian utang belanja modal terdiri dari penambahan sebesar Rp547.848.494,60 yang merupakan pengakuan utang atas pekerjaan tahun 2024 yang fisiknya telah selesai dilaksanakan namun belum dibayarkan 100%, sedangkan pengurangan sebesar Rp218.445.050,00 berasal dari belanja modal yang merupakan pembayaran/pelunasan utang aset tetap tahun-tahun sebelumnya.
10. Pengurangan dari penghapusan aset tetap sebesar Rp1.290.000.000,00 dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 494 Tahun 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Tahun 2024. Penghapusan tersebut seluruhnya berasal dari aset tetap peralatan dan mesin sebesar.

11. Akumulasi penyusutan aset tetap terdiri dari penambahan sebesar Rp937.594.776,00 dan pengurangan sebesar Rp106.477.213.184,20. Penambahan akumulasi penyusutan aset tetap berasal dari penghapusan akumulasi penyusutan aset tetap sedangkan pengurangannya berasal dari penyesuaian beban penyusutan aset tetap tahun 2023.

5.3.1.3.1. Tanah

Tabel 5.53 Tanah

URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	%
ASET TETAP				
Tanah	20.948.450.295,00	20.916.860.295,00	31.590.000,00	0,15

Sumber : Neraca Tahun 2024

Tanah yang termasuk dalam aset tetap sesuai PSAP 07 Paragraf 08 adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

Tabel 5.54 Rincian Tanah

JENIS	NILAI (Rp.)
Tanah	20.948.450.295,00
Tanah	20.948.450.295,00
Tanah persil	11.070.706.345,00
Tanah bangunan perumahan/tempat tinggal	996.028.800,00
Tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan	2.030.725.230,00
Tanah untuk bangunan tempat kerja	7.990.196.225,00
Tanah untuk bangunan tempat ibadah	53.846.100,00
Tanah non persil	1.088.192.500,00
Tanah basah	470.000.000,00
Tanah kering	483.192.500,00
Tanah sandus	135.000.000,00
Lapangan	8.789.551.450,00
Tanah lapangan olah raga	1.967.490.000,00
Tanah untuk jalan	6.202.997.500,00
Tanah untuk bangunan air	216.248.950,00
Tanah untuk bangunan instalasi	50.000.000,00
Tanah untuk bangunan jaringan	12.652.500,00
Tanah untuk bangunan bersejarah	164.830.000,00
Tanah untuk taman	175.332.500,00

Sumber : Neraca RMD Tahun 2024

Jika dibandingkan dengan saldo aset tetap tanah tahun 2023 sebesar Rp20.916.860.295,00, aset tetap tanah mengalami peningkatan sebesar Rp31.590.000,00 atau 0,15% pada tahun 2024 sehingga saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp20.948.450.295,00. Adapun rincian penambahan dan pengurangan aset tetap tanah sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut.

CA

Tabel 5.55 Rincian Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Tanah

NO	URAIAN	PENAMBAHAN	PENGURANGAN
		2024	2024
1	Belanja modal aset tetap	-	-
2	Koreksi saldo awal aset tetap	31.590.000,00	-
JUMLAH		31.590.000,00	-

Sumber : Buku Besar Pembantu LKPD Tahun 2024

Tidak terdapat penganggaran belanja modal tanah pada APBD Tahun 2024, peningkatan aset tetap tanah pada tahun 2024 diperoleh dari koreksi saldo awal atas tanah untuk pembangunan Puskesmas Dumagin di Desa Dumagin A seluas 877,5 m² sesuai Surat Keterangan Hibah Sangadi Desa Dumagin A Wilmar P. Keni yang juga bertindak sebagai pemberi hibah tertanggal 20 Februari 2012 dan Sertipikat Hak Pakai NIB. 18.17.000002083.0 yang belum dicatat kedalam KIB karena keterbatasan informasi terhadap dokumen hibah yang baru disampaikan.

Nilai tanah yang disajikan terdiri dari 373 bidang tanah. Dari jumlah tersebut terdapat 42 bidang dengan nilai sebesar Rp460.580.550,00 masih dalam proses pengajuan pembuatan sertifikat secara bertahap. Daftar aset tetap tanah yang belum bersertifikat tersebut dapat dilihat dalam Lampiran XIII laporan keuangan ini.

Nilai tanah tersebut belum termasuk 63 bidang tanah dibawah aset tetap jalan milik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang diperoleh melalui hibah dari masyarakat dari tahun 2015 sampai dengan 2024. Tanah dibawah jalan tersebut perlu dilakukan inventarisasi dan peninjauan lokasi guna menentukan nilai tanah tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. 63 Bidang tanah sebagaimana dimaksud dapat dilihat dalam Lampiran XV pada laporan keuangan ini.

5.3.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Tabel 5.56 Peralatan dan Mesin

URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	%
ASET TETAP				
Peralatan dan Mesin	290.541.878.944,65	276.314.835.571,65	14.227.043.373,00	5,15

Sumber : Neraca Tahun 2024

Berdasarkan PSAP 07 Paragraf 10, peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Tabel 5.57 Rincian Peralatan dan Mesin

JENIS	NILAI (Rp.)
Peralatan dan mesin	290.541.878.944,65
Alat besar	13.588.423.610,00
Alat besar berat	10.024.809.610,00
Grader	3.538.347.100,00
Excavator	5.074.374.700,00
Hauler	633.681.985,00
Compacting equipment	1.358.465.825,00

LN

JENIS	NILAI (Rp.)
Alat berat	2.963.554.000,00
Feeder	2.728.250.000,00
Compressor	94.820.000,00
Pompa	128.484.000,00
Peralatan air mountingering	12.000.000,00
Alat angkutan	65.882.926.179,00
Alat angkutan darat bermotor	61.058.264.880,00
Kendaraan dinas bermotor penunjang	25.652.606.727,00
Kendaraan bermotor penumpang	3.566.648.630,00
Kendaraan bermotor angkutan barang	2.852.771.000,00
Kendaraan bermotor beroda dua	7.999.737.582,00
Kendaraan bermotor beroda tiga	39.500.000,00
Kendaraan bermotor khusus	20.589.074.794,00
Alat angkutan darat bermotor lainnya	157.926.153,00
Alat angkutan darat tak bermotor	424.470.500,00
Kendaraan tak bermotor angkutan barang	227.291.400,00
Kendaraan tak bermotor penumpang	197.179.100,00
Alat angkutan apung bermotor	3.254.221.793,00
Alat angkutan apung bermotor untuk penumpang	2.713.424.793,00
Alat angkutan apung bermotor khusus	540.797.000,00
Alat angkutan apung tak bermotor	1.145.969.000,00
Alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang	1.145.969.000,00
Alat bengkel dan alat ukur	1.911.069.029,00
Alat bengkel bermesin	201.290.300,00
Perkakas konstruksi logam terpasang pada pondasi	2.015.000,00
Perkakas bengkel service	2.800.000,00
Perkakas bengkel kayu	39.580.000,00
Perkakas pabrik es	5.285.300,00
Alat bengkel bermesin lainnya	151.602.000,00
Alat bengkel tak bermesin	128.525.892,00
Perkakas bengkel konstruksi logam	9.750.000,00
Perkakas bengkel listrik	3.666.000,00
Perkakas standard (standard tools)	12.700.330,00
Perkakas bengkel kreja	27.140.877,00
Peralatan ukur, gip dan leveling	3.669.800,00
Peralatan bengkel khusus peladati	71.599.085,00
Alat ukur	1.581.262.837,00
Alat ukur universal	343.122.050,00
Universal tester	13.791.000,00
Alat ukur/pembandingan	29.806.982,00
Alat ukur lain-lain	80.854.119,00
Alat timbangan/biaya	966.527.372,00
Alat ukur lainnya	147.161.314,00
Alat pertanian	1.760.106.285,00
Alat pengolahan	1.760.106.285,00
Alat pengolahan tanah dan tanamint	501.911.000,00
Alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak	188.853.500,00
Alat panen	44.883.850,00
Alat penyimpan hasil perolehan pertanian	329.893.435,00
Alat laboratorium pertanian	63.990.000,00
Alat pasca panen	181.533.000,00

JENIS	NILAI (Rp.)
Alat produksi perikanan	212.251.500,00
Alat-alat peternakan	71.220.000,00
Alat pengolahan lainnya	165.580.000,00
Alat kantor dan rumah tangga	57.408.533.362,95
Alat kantor	10.656.369.695,96
Mesin ketik	29.039.700,00
Mesin hitung/mesin jumlah	12.455.000,00
Alat perengkapan perlengkapan kantor	4.843.494.524,00
Alat kantor lainnya	5.771.380.471,96
Alat rumah tangga	41.523.475.011,20
Mebelair	20.287.674.874,32
Alat pengukur waktu	44.220.000,00
Alat pembersih	611.444.500,00
Alat pendingin	7.115.717.700,45
Alat dapur	664.608.987,00
Alat rumah tangga lainnya (home use)	12.425.986.851,43
Alat pemadam kebakaran	373.822.092,00
Meja dan kursi kerja/rapat pejabat	5.228.688.655,79
Meja kerja pejabat	1.907.448.307,17
Meja rapat pejabat	49.317.800,00
Kursi kerja pejabat	2.394.394.961,99
Kursi rapat pejabat	254.776.200,00
Kursi hadap depan meja kerja pejabat	12.000.000,00
Kursi tamu di ruangan pejabat	30.967.500,00
Lemari dan arsip pejabat	599.783.886,63
Alat studio, komunikasi dan pemancar	13.943.146.015,00
Alat studio	4.776.707.036,00
Peralatan studio audio	1.422.210.690,00
Peralatan studio video dan film	1.210.428.886,00
Peralatan cetak	38.349.960,00
Peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah	90.244.500,00
Alat studio lainnya	15.473.000,00
Alat komunikasi	1.208.516.180,00
Alat komunikasi telephone	894.817.880,00
Alat komunikasi radio sub	90.025.000,00
Alat komunikasi radio HF/FM	28.457.000,00
Alat komunikasi radio VHF	72.900.000,00
Alat komunikasi sosial	122.316.300,00
Peralatan pemancar	7.999.922.799,00
Peralatan antenna microwave	1.150.000,00
Peralatan antenna HF/parabola	125.029.000,00
Switcher/interana antenna	57.881.530,00
Peralatan antenna pemertama VHF	4.460.000,00
Sumber tenaga	7.771.403.263,00
Alat kedokteran dan kesehatan	64.450.816.038,20
Alat kedokteran	62.690.227.862,20
Alat kedokteran umum	22.079.814.213,20
Alat kedokteran gigi	1.870.618.512,00
Alat kedokteran keluarga berencana	519.967.617,00
Alat kedokteran bedah	3.873.444.960,00
Alat kesehatan kebidanan dan persiyak kandungan	4.497.449.337,00

JENIS	NILAI (Rp.)
Alat kedokteran tta	519.435.827,00
Alat kedokteran izata	5.078.102.705,00
Alat kedokteran bagian penyakit dalam	8.900.323.182,00
Alat kedokteran anak	1.818.267.817,00
Alat kedokteran poliklinik	657.870.908,00
Alat kesehatan rehabilitasi medis	384.949.712,00
Alat kedokteran neurologi (syaraf)	650.970.640,00
Alat kedokteran jantung	3.843.881.460,00
Alat kedokteran radiodiagnostic	1.081.950.823,00
Alat kedokteran transfusi darah	1.682.204.025,00
Alat kedokteran nuklir	681.190.656,00
Alat kedokteran gawat darurat	5.572.640.373,00
Alat kedokteran I C U	660.343.050,00
Alat kedokteran I C C U	313.852.045,00
Alat kedokteran lainnya	2.950.000,00
Alat kesehatan umum	1.760.588.176,00
Alat kesehatan olah raga	135.388.703,00
Alat kesehatan umum lainnya	1.625.199.473,00
Alat laboratorium	17.742.394.188,90
Unit alat laboratorium	4.865.875.344,00
Alat laboratorium kimia air teknik penyehatan	174.651.350,00
Alat laboratorium micro biologi teknik penyehatan	59.004.500,00
Alat laboratorium model hidrolika	38.500.000,00
Alat laboratorium bahan bangunan konstruksi	4.291.479,00
Alat laboratorium mekanika tanah dan batuan	1.977.800,00
Alat laboratorium umum	362.225.200,00
Alat laboratorium microbiologi	449.880.000,00
Alat laboratorium kimia	117.000.000,00
Alat laboratorium patologi	2.328.543.920,00
Alat laboratorium immunologi	103.725.000,00
Alat laboratorium hematologi	334.600.000,00
Alat laboratorium filter	15.956.000,00
Alat laboratorium makanan	21.292.184,00
Alat laboratorium fisika	401.028.292,00
Alat laboratorium proses teknologi keramik	2.770.000,00
Alat laboratorium pertanian	100.597.555,00
Alat laboratorium elektronika dan daya	3.065.000,00
Alat laboratorium lingkungan perikanan	9.999.000,00
Alat laboratorium biologi perikanan	23.690.000,00
Laboratorium karantina	23.159.524,00
Alat laboratorium lain	292.918.250,00
Unit alat laboratorium kimia nuklir	17.464.000,00
Laboratory safety equipment	17.464.000,00
Alat peraga praktik sekolah	8.860.270.127,00
Alat peraga praktik sekolah bidang studi : bahasa Indonesia	2.821.668.318,00
Alat peraga praktik sekolah bidang studi : matematika	299.535.203,00
Alat peraga praktik sekolah bidang studi : ipa dasar	5.939.406,00
Alat peraga praktik sekolah bidang studi : ipa lanjutan	183.294.136,00
Alat peraga praktik sekolah bidang studi : ipa menengah	1.414.448.465,00
Alat peraga praktik sekolah bidang studi : ipa atas	97.661.453,00
Alat peraga praktik sekolah bidang studi : ipa	109.501.309,00

JENIS	NILAI (Rp.)
Alat peraga praktik sekolah bidang studi : keterampilan	2.173.216.540,00
Alat peraga praktik sekolah bidang studi : kesenian	1.471.952.233,00
Alat peraga praktik sekolah bidang studi : olah raga	233.752.568,00
Alat peraga praktik sekolah bidang studi : pkn	18.000.000,00
Alat peraga kejuruan	13.598.000,00
Alat peraga paid/ik	17.723.996,00
Alat laboratorium fisika nukli/elektronika	123.352.500,00
Modular counting and scientific electronic	90.000.000,00
Recorder display	28.402.500,00
System/power supply	4.950.000,00
Alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan	493.172.028,00
Alat kesehatan kerja	218.672.028,00
Meteorological equipment	274.500.000,00
Radiation application and non destructive testing laboratory lainnya	3.000.000,00
Peralatan hidrologi	3.000.000,00
Alat laboratorium lingkungan hidup	3.146.422.190,00
Laboratorium lingkungan	28.197.650,00
Alat laboratorium penunjang	3.118.224.540,00
Peralatan laboratorium hydrodynamica	217.348.989,90
Data acquisition and analyzing system	207.999.999,90
Peralatan umum	9.150.000,00
Alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi	15.488.000,00
Alat laboratorium tekanan dan suhu	15.488.000,00
Alat persenjataan	482.414.225,00
Senjata api	900.000,00
Senjata lain-lain	900.000,00
Persenjataan non senjata api	449.279.225,00
Alat kemunian	445.558.000,00
Non senjata api	3.723.225,00
Alat khusus kepolisian	32.235.000,00
Alat darat/mal/dakum	32.235.000,00
Komputer	51.457.457.875,60
Komputer unit	42.558.460.062,60
Komputer jaringan	1.899.573.804,60
Personal komputer	40.658.886.258,00
Peralatan komputer	8.898.997.813,00
Peralatan mainframe	137.694.700,00
Peralatan mini komputer	294.952.800,00
Peralatan personal komputer	5.430.117.773,00
Peralatan jaringan	2.955.817.740,00
Peralatan komputer lainnya	80.414.800,00
Alat keselamatan kerja	638.999.300,00
Alat SAR	638.999.300,00
Alat pendukung pencarian	638.999.300,00
Rambu - rambu	353.459.590,00
Rambu-rambu lalu lintas darat	353.459.590,00
Rambu bersyarat	229.963.590,00
Rambu tidak bersyarat	123.496.000,00
Peralatan olah raga	920.133.246,00
Peralatan olah raga	920.133.246,00
Peralatan permainan	161.447.860,00

JENIS	NILAI (Rp.)
Peralatan umum	171.961.956,00
Peralatan olah raga air	211.565.430,00
Peralatan olah raga lainnya	175.155.000,00

Sumber : Neraca BMD Tahun 2024

Jika dibandingkan dengan saldo aset tetap peralatan dan mesin tahun 2023 sebesar Rp276.314.835.571,65, aset tetap peralatan dan mesin mengalami peningkatan sebesar Rp14.277.043.373,00 atau 5,15% pada tahun 2024 sehingga saldo aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp290.541.878.944,65. Peningkatan aset tetap peralatan dan mesin tahun 2024 diperoleh dari penambahan sebesar Rp16.324.305.740,00 dan pengurangan sebesar Rp2.097.262.367,00. Adapun rincian penambahan dan pengurangan aset tetap peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.58 Rincian Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin

NO	URAIAN	PENAMBAHAN	PENGURANGAN
		2024	2024
1	Belanja modal aset tetap	14.616.261.510,00	6.155.000,00
2	Penyerahan hibah aset tetap	408.434.358,00	-
3	Penyesuaian belanja barang dan jasa	7.842.305,00	-
4	Koreksi aset tetap	-	268.977.358,00
5	Mutasi aset tetap antar SKPD	532.130.009,00	532.130.009,00
6	Reklasifikasi antar aset tetap	759.637.558,00	-
7	Penghapusan aset	-	1.290.000.000,00
JUMLAH		16.324.305.740,00	2.097.262.367,00

Sumber : Buku Besar Pembantu LKPD Tahun 2024

Dari rincian penambahan dan pengurangan aset tetap peralatan dan mesin sebagaimana tabel di atas, mutasi penambahan dan pengurangan dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

1. Penambahan aset tetap peralatan dan mesin dari belanja modal sebesar Rp14.616.261.510,00 berasal dari:
 - Realisasi SP2D sebesar Rp12.977.712.450,00.
 - Realisasi SPB Dana Bantuan Operasional Sekolah sebesar Rp1.402.735.061,00.
 - Realisasi SPB Dana Kapitasi JKN sebesar Rp141.294.999,00.
 - Realisasi SPB Dana Bantuan Operasional Pendidikan PAUD sebesar Rp3.114.000,00.
 - Realisasi SPB Dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan sebesar Rp91.405.000,00.

Sedangkan pengurangan aset tetap peralatan dan mesin dari belanja modal sebesar Rp6.155.000,00 berasal dari:

- Pengembalian belanja pengadaan peralatan personal komputer berupa printer sebesar Rp4.690.000,00 pada Dinas Perencanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Pengembalian belanja Dana Kapitasi JKN karena telah melampaui pagu anggaran berupa printer sebesar Rp1.465.000,00 pada Puskesmas Onggouni.

2. Penambahan dari penerimaan hibah aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp408.434.358,00 berasal dari:
 - Penggunaan dana CSR dari PT Bank SulutGo atas pekerjaan Penataan Penerangan Jalan Utama Akses Jalan Islamic Center dan Jalan Utama Molibagu-Pintadia-Toluaya sebesar Rp119.961.408,00 pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
 - Penerimaan hibah aset tetap peralatan dan mesin dari Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara berupa 25 unit tabung oksigen beserta regulatornya dan 30.000 buah alkohol swab sebesar Rp107.472.950,00 sesuai Surat Bukti Barang Keluar Nomor 155/SDK&FARMALKES/XI/2024 tanggal 7 November 2024 yang dicatat pada Rumah Sakit Umum Daerah.
 - Penerimaan hibah aset tetap peralatan dan mesin dari Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI berupa lima unit alat deteksi dini kanker payudara Probe Linear sebesar Rp181.000.000,00 sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Nomor KN.01.08/C.II/6761/2024 tanggal 19 Desember 2024 yang dicatat pada Dinas Kesehatan.
3. Penambahan aset tetap peralatan dan mesin dari penyesuaian beban barang dan jasa sebesar Rp7.842.305,00 berasal dari:
 - Kapitalisasi biaya/atribusi beban jasa tenaga informasi dan teknologi berupa jasa pemasangan jaringan atas pekerjaan Pengadaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit sebesar Rp3.942.305,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah.
 - Penyesuaian beban barang dan jasa yang merupakan AT PM berupa peralatan olahraga atas Pekerjaan Belanja Alat Pendukung Olahraga (Net Tennis) sebesar Rp3.900.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Pengurangan dari koreksi aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp268.977.358,00 terdiri dari:
 - Koreksi aset tetap peralatan dan mesin atas belanja modal yang nilai di bawah satuan minimum kapitalisasi sebesar Rp34.900.200,00:
 - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp25.998.700,00.
 - 2) Dinas Lingkungan Hidup Rp3.030.000,00.
 - 3) Kecamatan Helumo sebesar Rp791.500,00.
 - 4) Puskesmas Momalia sebesar Rp3.800.000,00.
 - 5) Puskesmas Molibagu sebesar Rp1.280.000,00.
 - Koreksi aset tetap peralatan dan mesin yang berasal dari hibah yang didalamnya terdapat belanja barang habis pakai sebesar Rp124.989.358,00:
 - 1) Hibah dana CSR dari PT Bank SulutGo atas pekerjaan Penataan Penerangan Jalan Utama Akses Jalan Islamic Center dan Jalan Utama Molibagu-Pintadia-Toluaya yang didalamnya terdapat biaya pemeliharaan sebesar Rp111.836.408,00 pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

- 2) Penerimaan hibah aset tetap peralatan dan mesin dari Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang didalamnya terdapat 30.000 buah alkohol swab sebesar Rp13.152.950,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah.
- Koreksi aset tetap peralatan dan mesin yang merupakan hibah barang yang diserahkan ke Badan Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebesar Rp20.200.000,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
- Koreksi aset tetap dari belanja barang dan jasa sebesar Rp88.887.800,00 terdiri dari:
 - 1) Koreksi belanja modal yang didalamnya terdapat barang habis pakai Dana Bantuan Operasional Sekolah sebesar Rp53.958.900,00 dan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan sebesar Rp750.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 - 2) Koreksi belanja modal yang didalamnya terdapat barang habis pakai berupa bahan lainnya atas pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran Transfusi Darah sebesar Rp8.956.700,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah.
 - 3) Koreksi belanja modal yang didalamnya terdapat barang habis pakai berupa alat listrik atas pekerjaan Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya sebesar Rp7.300.000,00 pada Sekretariat Daerah – Bagian Umum.
 - 4) Koreksi belanja modal yang didalamnya terdapat barang habis pakai berupa alat listrik atas pekerjaan Pengadaan Wireless Microphone sebesar Rp1.465.200,00 pada Sekretariat DPRD.
 - 5) Koreksi belanja modal yang didalamnya terdapat barang habis pakai berupa alat listrik atas pekerjaan Pengadaan Sound System Kit sebesar Rp16.457.000,00 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
5. Mutasi aset tetap antar SKPD terdiri dari penambahan dan pengurangan masing-masing sebesar Rp532.130.009,00 berasal dari mutasi peralatan dan mesin Dinas Perindustrian ke Sekretariat Daerah – Bagian Umum berupa satu unit kendaraan dinas roda empat DB 8143 P sesuai dengan Berita Acara Mutasi Barang Milik Daerah Nomor 900/1883/Setda/V1/2024 tanggal 17 Juni 2024.
6. Penambahan aset tetap peralatan dan mesin dari reklasifikasi antar aset tetap sebesar Rp759.637.558,00. Penambahan reklasifikasi ini terdiri dari:
 - Reklasifikasi dari aset tetap gedung dan bangunan yang didalamnya terdapat peralatan dan mesin sebesar Rp430.268.558,00 pada:
 - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp271.332.840,00 terdiri atas:
 - a. Rehabilitasi Ruang Kelas tiga ruang SD Negeri Sakti sebesar Rp73.176.750,00.
 - b. Pembangunan Ruang Guru SD Negeri Sakti sebesar Rp17.571.300,00.
 - c. Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer SD Negeri Sakti sebesar Rp37.123.950,00.
 - d. Pembangunan Ruang UKS SMP Negeri Tonala sebesar Rp29.528.220,00.

- e. Pembangunan Laboratorium Komputer SMP Negeri Tonala sebesar Rp25.920.720,00.
 - f. Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer SD Negeri Lungkap sebesar Rp14.441.000,00.
 - g. Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer SD Negeri 1 Molibagu sebesar Rp14.441.100,00.
 - h. Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer SDN 2 Motandoi sebesar Rp14.441.100,00.
 - i. Pembangunan Ruang kelas 3 (Tiga) Ruang SDN 1 Salongo sebesar Rp16.883.100,00.
- 2) Sekretariat Daerah – Bagian Umum atas pekerjaan Rehabilitasi Gedung Kantor (Sayap Kiri - Bidang Anggaran) yang didalamnya terdapat aset tetap peralatan dan mesin berupa lemari, sofa, alat dapur, dan meja kerja sebesar Rp158.935.718,00.
- Reklasifikasi dari aset tetap jalan, irigasi dan jaringan yang didalamnya terdapat beberapa jenis aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp215.030.000,00 yang berasal dari pekerjaan Pembangunan Baru TPS3R Bakida Bangunan Penampung Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup.
 - Reklasifikasi dari aset tetap lainnya yang didalamnya terdapat peralatan dan mesin sebesar Rp114.339.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang berasal dari:
 - 1) Dana Bantuan Operasional Sekolah sebesar Rp55.575.000,00.
 - 2) Pengadaan Peralatan Musik *Marching Band* sebesar Rp58.764.000,00.
7. Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin dari penghapusan sebesar Rp1.290.000.000,00 berasal dari pelaksanaan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 494 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penghapusan BMD Tahun 2024 yang terdiri dari:
- Penghapusan aset atas penjualan langsung kendaraan roda empat station wagon Toyota Fortuner 2.4 VRZ A/T 4x2 Diesel 2.393 cc tahun 2019 pelat nomor DB 1175 P kepada Ketua DPRD periode 2019-2024 dengan nilai tercatat aset sebesar Rp570.000.000,00 pada Sekretariat DPRD.
 - Penghapusan aset atas penjualan langsung kendaraan roda empat Multi Purpose Vehicle (MPV) Toyota Innova 2.4 G M/T 2.393 cc tahun 2019 pelat nomor DB 1176 P kepada Wakil Ketua DPRD I periode 2019-2024 dengan nilai tercatat aset sebesar Rp360.000.000,00 pada Sekretariat DPRD.
 - Penghapusan aset atas penjualan langsung kendaraan roda empat Multi Purpose Vehicle (MPV) Toyota Innova 2.4 G M/T 2.393 cc tahun 2019 pelat nomor DB 1178 P kepada Wakil Ketua DPRD II periode 2019-2024 dengan nilai tercatat aset sebesar Rp360.000.000,00 pada Sekretariat DPRD.

5.3.1.3.3. Gedung dan Bangunan

Tabel 5.59 Gedung dan Bangunan

URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenalkan/(Penurunan)	
			(Rp)	%
ASET TETAP				
Gedung dan Bangunan	504.234.186.376,33	496.777.962.231,63	7.456.224.144,70	1,50

Sumber : Neteca Tahun 2024

Berdasarkan PSAP 07 Paragraf 9, gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kelompok gedung dan bangunan adalah gedung perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, bangunan menara, monumen/bangunan bersejarah, gudang, dan museum.

Gedung dan bangunan ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan gedung dan bangunan yang ada di atasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok aset tetap tanah.

Tabel 5.60 Rincian Gedung dan Bangunan

JENIS	NILAI (Rp.)
Gedung dan bangunan	504.234.186.376,33
Bangunan gedung	482.348.514.613,18
Bangunan gedung tempat kerja	458.078.151.815,18
Bangunan gedung kantor	119.062.291.957,78
Bangunan gudang	7.735.050.034,89
Bangunan gudang instalasi	1.546.460.100,00
Bangunan gedung laboratorium	6.813.073.496,00
Bangunan kesehatan	72.350.334.785,97
Bangunan gedung tempat ibadah	41.580.623.600,00
Bangunan gedung tempat pertemuan	3.778.520.113,26
Bangunan gedung tempat pendidikan	101.511.257.627,67
Bangunan gedung tempat olah raga	20.558.757.602,99
Bangunan gedung perkotaan/operasi/pasar	33.193.239.545,00
Bangunan gedung untuk peternakan	991.729.835,00
Bangunan gedung garasi/pool	49.780.000,00
Bangunan gedung perpustakaan	11.264.367.042,86
Bangunan gedung museum	1.946.475.000,00
Bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara	94.997.000,00
Bangunan pengujian kelainan	1.530.300.000,00
Bangunan peternakan/perikanan	658.669.000,00
Bangunan gedung tempat kerja lainnya	22.253.122.344,76
Bangunan fasilitas umum	2.442.951.215,00
Bangunan parkir	1.368.497.015,00
Bangunan gedung pabrik	57.225.000,00
Tanah	214.841.390,00
Bangunan gedung tempat kerja lainnya	7.087.468.109,00
Bangunan gedung tempat tinggal	24.270.362.798,00
Rumah negara golongan I	4.330.388.999,00
Rumah negara golongan II	2.020.598.000,00
Rumah negara golongan III	8.926.586.885,00

JENIS	Nilai (Rp)
Mesa/sofa/bungalow/terpas peristirahatan	1,270,235,577.00
Asrama	6,477,197,337.00
Flas/trumah umum	64,461,000.00
Bangunan gedung terpas tinggal lainnya	1,180,895,000.00
Museum	4,010,947,000.00
Candi/tugu peringatan/pasasi	4,010,947,000.00
Tugu	2,079,108,000.00
Bangunan peninggalan	1,377,125,000.00
Candi/tugu peringatan/pasasi lainnya	554,654,000.00
Tugu trik kontrol/pati	17,874,724,763.15
Tugu/tanda batas	17,874,724,763.15
Tugu/tanda batas administrasi	2,852,121,500.00
Pilar/tugu/tanda lainnya	189,800,178.00
Pagar	14,668,656,085.15
Tugu/tanda batas lainnya	144,147,000.00

Sumber : Neraca RMD Tahun 2024

Jika dibandingkan dengan saldo aset tetap gedung dan bangunan tahun 2023 sebesar Rp496.777.962.231,63, aset tetap gedung dan bangunan mengalami peningkatan sebesar Rp7.456.224.144,70 atau 1,50% pada tahun 2024 sehingga saldo aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp504.234.186.376,33. Kenaikan aset tetap gedung dan bangunan tahun 2024 diperoleh dari penambahan sebesar Rp14.579.695.420,00 dan pengurangan sebesar Rp7.123.471.275,30. Adapun rincian penambahan dan pengurangan aset tetap gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.61 Rincian Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

NO	URAIAN	PENAMBAHAN 2024	PENGURANGAN 2024
1	Belanja modal aset tetap	12.753.623.470,00	-
2	Penyesuaian belanja barang dan jasa	199.713.000,00	-
3	Koreksi aset tetap	-	1.601.040.952,00
4	Mutasi aset tetap antar SKPD	683.057.000,00	683.057.000,00
5	Reklasifikasi antar aset tetap	850.505.000,00	4.700.022.558,00
6	Reklasifikasi aset lainnya	-	37.705.015,30
7	Penyesuaian utang belanja modal	92.796.950,00	101.645.750,00
	JUMLAH	14.579.695.420,00	7.123.471.275,30

Sumber : Buku Besar Pembantu LKPD Tahun 2024

Dari rincian penambahan dan pengurangan aset tetap gedung dan bangunan sebagaimana tabel di atas, mutasi penambahan dan pengurangan dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Penambahan belanja modal aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp12.753.623.470,00 berasal dari realisasi pembayaran SP2D.
2. Penambahan aset tetap gedung dan bangunan dari penyesuaian beban barang dan jasa sebesar Rp199.713.000,00 berasal belanja pemeliharaan yang merupakan belanja modal gedung dan bangunan atas pekerjaan Rehabilitasi Asrama Mahasiswa Gorontalo pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

3. Pengurangan dari koreksi aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp1.601.040.952,00 terdiri dari :
- Koreksi belanja modal gedung dan bangunan yang diserahkan ke sekolah swasta sebesar Rp1.550.187.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atas pekerjaan:
 - 1) Pembangunan Ruang Laboratorium IPA sebesar Rp423.590.000,00, Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer sebesar Rp275.241.000,00, Pembangunan Ruang UKS sebesar Rp287.260.000,00 pada SMP PGRI Motandoi sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 1882/C.01/DIKBUD/XII/2024 dan Nomor 72/C.01/SMP PGRI/MTD/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024.
 - 2) Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer sebesar Rp268.373.000,00, Pembangunan Ruang UKS sebesar Rp295.723.000,00 pada SMP Cokroaminoto Salongo sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 1883/C.01/DIKBUD/XII/2024 dan Nomor 121/C.09/SMP-CAS/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024.
 - Koreksi belanja modul gedung dan bangunan yang didalamnya terdapat belanja barang habis pakai atas pekerjaan Rehabilitasi Gedung Kantor (Sayap Kiri - Bidang Anggaran) sebesar Rp50.853.952,00 pada Sekretariat Daerah – Bagian Umum.
4. Mutasi aset tetap gedung dan bangunan antar SKPD terdiri dari penambahan dan pengurangan masing-masing sebesar Rp683.057.000,00. Mutasi antar SKPD tersebut terdiri dari:
- Mutasi aset tetap gedung dan bangunan atas pekerjaan Rehabilitasi Gedung Guest House sebesar Rp483.344.000,00 dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ke Sekretariat Daerah – Bagian Umum dikarenakan aset induknya dicatat pada Bagian Umum.
 - Mutasi aset tetap gedung dan bangunan atas pekerjaan Rehabilitasi Asrama Mahasiswa Gorontalo sebesar Rp199.713.000,00 dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dikarenakan aset induknya dicatat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Reklasifikasi antar aset tetap terdiri dari penambahan sebesar Rp850.505.000,00 dan pengurangan sebesar Rp4.700.022.558,00.
- Penambahan sebesar Rp850.505.000,00 berasal dari reklasifikasi aset tetap konstruksi dalam pengerjaan atas pekerjaan Pembangunan Museum Kebudayaan Tahun 2022 yang telah selesai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 - Pengurangan sebesar Rp4.700.022.558 merupakan reklasifikasi ke aset tetap peralatan dan mesin dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Reklasifikasi belanja modal gedung dan bangunan yang didalamnya terdapat alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp271.332.840,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atas pekerjaan:
 - a. Rehabilitasi Ruang Kelas tiga ruang SD Negeri Sakti sebesar Rp73.176.750,00.
 - b. Pembangunan Ruang Guru SD Negeri Sakti sebesar Rp17.571.300,00.
 - c. Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer SD Negeri Sakti sebesar Rp37.123.950,00.

- d. Pembangunan Ruang UKS SMP Negeri Tonala sebesar Rp29.528.220,00.
 - e. Pembangunan Laboratorium Komputer SMP Negeri Tonala sebesar Rp25.920.720,00.
 - f. Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer SD Negeri Lungkap sebesar Rp14.441.000,00.
 - g. Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer SD Negeri 1 Molibagu sebesar Rp14.441.100,00.
 - h. Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer SDN 2 Motandoi sebesar Rp14.441.100,00.
 - i. Pembangunan Ruang kelas 3 (Tiga) Ruang SDN 1 Salongo sebesar Rp16.883.100,00.
- 2) Reklasifikasi ke aset tetap peralatan dan mesin atas pekerjaan Rehabilitasi Gedung Kantor (Sayap Kiri - Bidang Anggaran) yang didalamnya terdapat lemari, sofa, alat dapur, dan meja kerja sebesar Rp158.935.718,00 pada Sekretariat Daerah – Bagian Umum.
- 3) Reklasifikasi ke aset tetap konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp4.269.754.000,00 atas pekerjaan:
- a. Jasa Konsultansi Perencanaan Tugu Pemekaran Tahap I yang belum selesai tahapan pembangunannya sebesar Rp39.682.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
 - b. Pembangunan Unit Transfusi Darah (UTD) sebesar Rp3.037.600.000,00 yang belum selesai pekerjaan fisiknya per 31 Desember 2024 mencapai 83,16% dan diberikan kesempatan namun tetap tidak dapat diselesaikan oleh pihak pelaksana yaitu PT Simar Karya Irfani sesuai waktu pemberian kesempatan sampai dengan 19 Januari 2025. Pemutusan kontrak telah dilakukan oleh Direktur RSUD yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen melalui surat nomor 800/1.02.1.1/103/1/2025 dengan pekerjaan fisik mencapai 94,80% pada Rumah Sakit Umum Daerah.
 - c. Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan UTD sebesar Rp83.677.000,00 dan Jasa Konsultansi Pengawasan Perencanaan Pembangunan UTD sebesar Rp76.035.000,00 yang belum selesai pekerjaan fisiknya pada Rumah Sakit Umum Daerah.
 - d. Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri 1 Pinolosian yang belum selesai tahapan pembangunannya dan belum dapat dimanfaatkan sebesar Rp1.032.760.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Pengurangan aset tetap gedung dan bangunan dari reklasifikasi aset lainnya sebesar Rp37.705.015,30 berasal dari penyesuaian aset tetap atas kekurangan volume pekerjaan belanja modal gedung dan bangunan hasil pemeriksaan BPK RI TA 2024.
7. Penambahan aset tetap gedung dan bangunan dari penyesuaian utang belanja modal sebesar Rp92.796.950,00 berasal dari pekerjaan yang fisiknya telah selesai namun belum dibayar lunas dengan rincian sebagai berikut:

- Pengawasan Pembangunan Ruang kelas 3 (Tiga) Ruang SDN 1 Salongo sebesar Rp8.000.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Jaminan pemeliharaan pekerjaan 5% Pembangunan Lapangan Tenis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Jaminan pemeliharaan pekerjaan 5% Pembangunan Museum Kebudayaan Tahap III pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Sedangkan pengurangan dari penyesuaian utang belanja modal sebesar Rp101.645.750,00 berasal dari:

- Jaminan pemeliharaan pekerjaan 5% Rehabilitasi Gedung Kantor BPKPD TA 2023 sebesar Rp9.983.300,00 pada Sekretariat Daerah – Bagian Umum.
- Jaminan pemeliharaan pekerjaan 5% 7 Pembangunan Ruang UKS, Ruang Guru, Ruang Tata Usaha, Toilet (Jamban) di SMP Bakida, SDN 2 Salongo, SMPN Dumagin, SMPN Molibagu, SKB, dan SMPN Adow sebesar Rp91.662.450,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

5.3.1.3.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Tabel 5.62 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	%
ASSET TETAP				
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.115.776.485.789,32	1.049.207.042.944,21	66.569.443.245,11	6,34

Sumber: Neraca Tahun 2024

Berdasarkan PSAP 07 Paragraf 11, jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dalam kondisi siap dipakai. Jalan, irigasi, dan jaringan selain digunakan dalam kegiatan pemerintah juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam klasifikasi jalan, irigasi, dan jaringan adalah jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi air bersih, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan listrik, dan jaringan telepon.

Jalan, irigasi, dan jaringan ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok aset tetap tanah.

Tabel 5.63 Rincian Jalan, Irigasi, dan Jaringan

JENIS	NILAI (Rp.)
Jalan, jaringan dan irigasi	1.115.776.485.789,32
Jalan dan jembatan	841.442.813.184,06
Jalan:	797.343.897.658,06
Jalan kabupaten:	471.497.670.410,04
Jalan desa:	302.150.863.643,02
Jalan khusus:	23.261.319.605,00
Jalan lainnya:	434.044.000,00
Jembatan:	44.098.915.526,00
Jembatan pada jalan kabupaten:	20.759.727.556,00
Jembatan pada jalan desa:	10.717.787.000,00
Jembatan pada jalan khusus:	1.214.000.000,00

JENIS	NILAI (Rp.)
Jembatan penyeberangan	11,407,398,970.00
Bangunan air	172,123,444,405.76
Bangunan air irigasi	73,589,927,536.76
Bangunan waduk irigasi	527,254,620.00
Bangunan pengambilan irigasi	31,562,738,382.00
Bangunan pembawa irigasi	36,209,127,862.00
Bangunan pengaliran irigasi	1,063,168,700.00
Bangunan pelengkap irigasi	952,848,000.00
Bangunan sawah irigasi	100,000,000.00
Bangunan air irigasi lainnya	5,174,789,972.76
Bangunan pengaliran pasang surut	520,147,000.00
Bangunan pengaliran pasang surut	520,147,000.00
Bangunan pengembangan rawa dan polder	439,878,000.00
Bangunan pelengkap pengembangan rawa	439,878,000.00
Bangunan pengaman sungai/pantai & penanggulangan bencana alam	61,304,865,369.00
Bangunan pengaman sungai/pantai & penanggulangan bencana alam	634,249,000.00
Bangunan pembawa pengaman sungai/pantai	249,515,000.00
Bangunan pembuang pengaman sungai	14,771,282,209.00
Bangunan pengaman pengaliran sungai/pantai	44,042,106,160.00
Bangunan pelengkap pengaman sungai	1,007,713,000.00
Bangunan pengembangan sumber air dan air tanah	1,198,320,000.00
Bangunan pembawa pengembangan sumber air	1,198,320,000.00
Bangunan air bersih/air baku	32,209,330,500.00
Bangunan waduk air bersih/air baku	12,607,698,500.00
Bangunan pengambilan air bersih/air baku	1,115,683,000.00
Bangunan pembawa air bersih/air baku	16,038,250,000.00
Bangunan pelengkap air bersih/air baku	134,507,000.00
Bangunan air bersih/air baku lainnya	2,293,132,000.00
Bangunan air kotor	860,976,000.00
Bangunan pembawa air kotor	282,969,000.00
Bangunan pembuang air kotor	378,200,000.00
Bangunan pelengkap air kotor	199,807,000.00
Instalasi	55,158,033,977.00
Instalasi air bersih / air baku	20,198,367,600.00
Instalasi air sumber / mata air	11,673,141,800.00
Instalasi air tanah dangkal	468,000,000.00
Instalasi air bersih / air baku lainnya	8,055,226,000.00
Instalasi air kotor	7,160,477,000.00
Instalasi air bangsan domestic	1,270,900,000.00
Instalasi air kotor lainnya	5,889,577,000.00
Instalasi pengolahan sampah	19,209,824,000.00
Instalasi pengolahan sampah organik	16,085,390,000.00
Instalasi pengolahan sampah non organik	2,676,750,000.00
Instalasi pengolahan sampah lainnya	447,684,000.00
Instalasi pembangkit listrik	1,536,655,000.00
Instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS)	1,536,655,000.00
Instalasi gardu listrik	836,809,600.00
Instalasi gardu listrik induk	594,238,250.00
Instalasi pusat pengatur listrik	242,571,350.00
Instalasi pertahanan	4,448,553,007.00
Instalasi pertahanan di darat	4,448,553,007.00

JENIS	NILAI (Rp.)
Instalasi gas	1,415,004,020.00
Instalasi gas lainnya	1,415,004,020.00
Instalasi pengaman	354,343,750.00
Instalasi pengaman penangkal petir	354,343,750.00
Jaringan	47,052,194,222.50
Jaringan air minum	46,953,419,222.50
Jaringan pembawa	8,034,434,560.00
Jaringan induk distribusi	1,784,598,000.00
Jaringan air minum lainnya	36,234,386,662.50
Jaringan listrik	98,775,000.00
Jaringan distribusi	98,775,000.00

Sumber : Neraca BMD Tahun 2024

Jika dibandingkan dengan saldo aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan tahun 2023 sebesar Rp1.049.207.042.544,21, aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan mengalami kenaikan sebesar Rp66.569.443.245,11 atau 6,34% pada tahun 2024 sehingga saldo aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.115.776.485.789,32. Kenaikan aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan tahun 2024 diperoleh dari penambahan sebesar Rp80.059.040.205,00 dan pengurangan sebesar Rp13.489.596.959,89. Adapun rincian penambahan dan pengurangan aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.64 Rincian Penambahan dan Pengurangan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

NO	URAIAN	PENAMBAHAN 2024	PENGURANGAN 2024
1	Belanja modal aset tetap	70.346.498.755,00	-
2	Penerimaan hibah aset tetap	8.796.084.000,00	-
3	Penyesuaian belanja barang dan jasa	448.000.000,00	-
4	Koreksi aset tetap	-	5.248.392.375,00
5	Reklasifikasi antar aset tetap	352.654.000,00	7.910.910.280,00
6	Reklasifikasi aset lainnya	99.594.750,00	213.495.004,89
7	Penyesuaian utang belanja modal	16.208.700,00	116.799.300,00
	JUMLAH	80.059.040.205,00	13.489.596.959,89

Sumber : Buku Besar Pembantu LKPD Tahun 2024

Dari rincian penambahan dan pengurangan aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan sebagaimana tabel di atas mutasi penambahan dan pengurangan dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

1. Penambahan dari belanja modal aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp70.346.498.755,00 berasal dari realisasi pembayaran SP2D.
2. Penambahan aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan dari penerimaan hibah aset tetap sebesar Rp8.796.084.000,00 berasal dari Kementerian sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Barang Milik Negara Nomor 264/BA/DC/2024 dan Nomor 100/272/IV/2024/Sekr tanggal 26 Maret 2024 berupa:
 - SPAM Ibukota Kabupaten Bolaang Uki - Bak dan Jaringan Pipa tahun 2018 sebesar Rp2.282.130.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

- Penyusunan DED Pengembangan SPAM Milangodaa sebesar Rp97.500.000,00 tahun 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
 - Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan - Kolam Lindi sebesar Rp4.959.716.000,00 tahun 2017 pada Dinas Lingkungan Hidup.
 - Optimalisasi Tempat Pembuangan Akhir Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan - Hangar dan Jalan sebesar Rp1.456.738.000,00 tahun 2018 pada Dinas Lingkungan Hidup.
3. Penambahan aset tetap dari penyesuaian belanja barang dan jasa sebesar Rp448.000.000,00 berasal dari Jasa Konsultansi Pengawasan Dana Alokasi Khusus Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (DAK T-PPKT) SPAM Desa Bakida pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
4. Pengurangan aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan dari koreksi aset tetap sebesar Rp5.248.392.375,00 berasal dari:
- Koreksi belanja modal yang merupakan barang yang diserahkan sebesar Rp4.097.567.305,00 terdiri dari:
 - 1) Hibah barang kepada Pemerintah Pusat atas pekerjaan Pemasangan Paving Block Polres Bolaang Mongondow Selatan sebesar Rp199.299.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
 - 2) Barang yang diserahkan kepada masyarakat atas pekerjaan Pembangunan Jamban Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kecamatan Tomini dan Posigadan sebesar Rp199.456.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
 - 3) Barang yang diserahkan kepada masyarakat atas pekerjaan Pembangunan Jamban Penanganan Khusus Anak Stunting sebesar Rp199.167.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
 - 4) Hibah barang yang diserahkan kepada masyarakat atas pekerjaan Swakelola Pembangunan IPAL Komunal Skala Permukiman Desa Bakida sebesar Rp2.407.645.305,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
 - 5) Hibah barang yang diserahkan kepada masyarakat atas pekerjaan Swakelola Pembangunan Tangki Septik Komunal Skala Permukiman Desa Bakida sebesar Rp1.092.000.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
 - Koreksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi yang merupakan belanja barang jasa sebesar Rp1.150.825.070 yang terdiri dari:
 - 1) Belanja pemeliharaan rutin jembatan sebesar Rp94.799.550,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
 - 2) Belanja pemeliharaan air minum sebesar Rp262.000.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
 - 3) Belanja pemeliharaan SPAM IKK Adow sebesar Rp771.950.520,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
 - 4) Belanja barang habis pakai berupa kabel *sound system* dan perlengkapannya atas pekerjaan Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp22.075.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup.

5. Penambahan dari reklasifikasi antar aset sebesar Rp352.654.000,00 berasal dari reklasifikasi konstruksi dalam pengerjaan atas pekerjaan yang fisiknya telah selesai dilaksanakan:
- Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan (Tolotoyon, Momalia II, Meyambanga) tahun 2023 Rp99.295.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
 - Jasa Konsultansi Perencanaan Daerah Irigasi Biniha tahun 2023 sebesar Rp99.285.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
 - Jasa Konsultansi Perencanaan Daerah Irigasi Nunuk tahun 2023 sebesar Rp99.285.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
 - Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Baru TPS3R Bakida TA 2023 sebesar Rp54.789.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup.

Sedangkan untuk pengurangan dari reklasifikasi antar aset sebesar Rp7.910.910.280,00 berasal dari:

- Reklasifikasi ke aset tetap konstruksi dalam pengerjaan atas pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Drainase Lingkungan DAK PPKT Bakida sebesar Rp7.598.380.280,00 yang belum selesai pekerjaan fisiknya per 31 Desember 2024 mencapai 92,02% dan diberikan kesempatan sampai dengan 3 Februari 2025 sesuai dengan dokumen PHO Nomor 20/PPK-PERKIMTAN/BASTP/II/2025 pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
 - Reklasifikasi ke aset tetap konstruksi dalam pengerjaan atas hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupa Penyusunan DED Pengembangan SPAM Milangoda sebesar Rp97.500.000,00 tahun 2019 yang fisiknya akan dilaksanakan tahun 2025 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
 - Reklasifikasi ke aset tetap peralatan dan mesin atas atas belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi yang didalamnya terdapat beberapa jenis peralatan dan mesin atas pekerjaan Pembangunan Baru TPS3R Bakida Bangunan Penampung Sampah sebesar Rp215.030.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup.
6. Reklasifikasi aset lainnya terdiri dari penambahan sebesar Rp99.594.750,00 berasal dari pekerjaan Jasa Konsultansi Pembangunan Jaringan SPAM Desa Bakida yang terealisasi dari belanja modal aset lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, sedangkan pengurangannya sebesar Rp213.495.004,89 berasal dari penyesuaian aset tetap atas kekurangan volume pekerjaan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi hasil pemeriksaan BPK RI TA 2024.
7. Penambahan aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan dari penyesuaian utang belanja modal sebesar Rp16.208.700,00 berasal dari:
- Jaminan pemeliharaan 5% pekerjaan Pembangunan Drainase Desa Momalia 2 sebesar Rp6.238.150,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
 - Jaminan pemeliharaan 5% pekerjaan Rehabilitasi Saluran D.I Desa Bolangaso dan D.I Desa Tolondadu sebesar Rp9.970.550,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Pengurangan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan dari penyesuaian utang belanja modal sebesar Rp116.799.300,00 berasal dari:

Ca

- Pembayaran utang jaminan pemeliharaan pekerjaan 5% pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Belakang Kantor Bupati tahun 2023 sebesar Rp99.366.600,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
- Pembayaran utang belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat yang dianggarkan pada belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi atas pekerjaan Pembangunan Sanitasi di Lokus Stunting Kecamatan Bolaang Uki tahun 2023 sebesar Rp7.494.450,00.
- Pembayaran utang belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat yang dianggarkan pada belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi atas pekerjaan Pembangunan Sanitasi di Lokus Stunting Kecamatan Pinolosian TA 2023 sebesar Rp9.938.250,00.

5.3.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

Tabel 5.65 Aset Tetap Lainnya

URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenalkan/(Penurunan)	
			(Rp)	%
ASET TETAP				
Aset Tetap lainnya	13.194.308.664,00	13.194.308.664,00	0,00	-

Sumber : Neraca Tahun 2024

Berdasarkan PSAP 07 Paragraf 12, aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset yang termasuk dalam klasifikasi aset tetap lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, hewan, ikan, dan tanaman. Termasuk dalam kategori aset tetap lainnya adalah aset tetap renovasi yaitu biaya yang dikeluarkan untuk melakukan renovasi atas aset tetap yang bukan menjadi hak milik. Aset tetap renovasi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berasal dari pemeliharaan atau rehabilitasi bangunan milik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow sebelum diserahkan dan juga bangunan milik masyarakat yang disewa fungsikan sebagai kantor.

Tabel 5.66 Rincian Aset Tetap Lainnya

JENIS	NILAI (Rp.)
Aset tetap lainnya	13.194.308.664,00
Bahan perpustakaan	5.683.776.778,00
Bahan perpustakaan tercetak	5.577.301.778,00
Buku umum	5.183.308.478,00
Buku sains	35.363.200,00
Buku ilmu sosial	7.202.850,00
Buku ilmu bahasa	57.065.900,00
Buku matematika dan pengetahuan alam	119.979.250,00
Buku ilmu pengetahuan praktis	6.920.000,00
Buku arsitektur, kesenian, olah raga	46.030.100,00
Buku geografi, biografi, sejarah	1.432.000,00
Bahan perpustakaan tercetak dan bentuk mikro	39.875.000,00

JENIS	NILAI (Rp.)
Audio visual	39.875.000,00
Karya grafika (graphic material)	66.600.000,00
Karya grafika (graphic material)	66.600.000,00
Barang bercetak keserian/kebudayaan/silaturahmi	579.006.000,00
Barang bercetak keserian	275.159.000,00
Alat musik	278.159.000,00
Alat bercetak kebudayaan	302.847.000,00
Maket, miniat, replika, foto dokumen dan benda bersejarah	3.982.000,00
Barang keserian	298.865.000,00
Tanaman	893.911.600,00
Tanaman	893.911.600,00
Tanaman	893.911.600,00
Aset tetap dalam renovasi	6.037.614.286,00
Aset tetap dalam renovasi	6.037.614.286,00
Aset tetap dalam renovasi	6.037.614.286,00

Sumber : Neraca BMD Tahun 2024

Jika dibandingkan dengan saldo aset tetap lainnya tahun 2023 sebesar Rp13.194.308.664,00, aset tetap lainnya tidak mengalami kenaikan. Meskipun tidak mengalami kenaikan namun aset tetap lainnya mengalami mutasi penambahan sebesar Rp114.339.000,00 dan pengurangan sebesar Rp114.339.000,00. Adapun rincian penambahan dan pengurangan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.67 Rincian Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Lainnya

NO	URAIAN	PENAMBAHAN 2024	PENGURANGAN 2024
1	Belanja modal aset tetap	114.339.000,00	-
2	Reklasifikasi antar aset tetap	-	114.339.000,00
	JUMLAH	114.339.000,00	114.339.000,00

Sumber : Buku Besar Pembantu LKPD Tahun 2024

Dari rincian penambahan dan pengurangan aset tetap lainnya sebagaimana tabel di atas mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

1. Penambahan aset tetap lainnya dari belanja modal sebesar Rp114.339.000,00 berasal dari:
 - Realisasi SP2D sebesar Rp58.764.000,00.
 - Realisasi SPB Dana Bantuan Operasional Sekolah sebesar Rp55.575.000,00.
2. Pengurangan aset tetap lainnya dari reklasifikasi antar aset tetap sebesar Rp114.339.000,00 terdiri dari:
 - Reklasifikasi ke aset tetap peralatan dan mesin atas pekerjaan Pengadaan Peralatan Musik *Marching Band* sebesar Rp58.764.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 - Reklasifikasi ke aset tetap peralatan dan mesin atas belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah sebesar Rp55.575.000,00 pada Dinas Pendidikan.

5.3.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Tabel 5.68 Konstruksi Dalam Pengerjaan

URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	%
ASET TETAP				
Konstruksi dalam Pengerjaan	33.238.514.737,76	21.084.292.205,00	12.154.222.532,76	57,65

Sumber : Neraca Tahun 2024

Sesuai dengan PSAP 08 Paragraf 6, konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode tertentu dan belum selesai.

Jika dibandingkan dengan saldo konstruksi dalam pengerjaan tahun 2023 sebesar Rp21.084.292.205,00, konstruksi dalam pengerjaan mengalami kenaikan sebesar Rp12.154.222.532,76 atau 57,65% pada tahun 2024 sehingga saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp33.238.514.737,76. Peningkatan saldo konstruksi dalam pengerjaan tahun 2024 diperoleh dari penambahan sebesar Rp13.394.316.624,60 dan pengurangan sebesar Rp1.240.094.091,84. Adapun rincian penambahan dan pengurangan konstruksi dalam pengerjaan sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.69 Rincian Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan

NO	URAIAN	PENAMBAHAN 2024	PENGURANGAN 2024
1	Penyesuaian belanja barang dan jasa	494.004.000,00	-
2	Reklasifikasi antar aset tetap	11.965.634.280,00	1.203.159.000,00
3	Reklasifikasi aset lainnya	495.835.500,00	36.935.091,84
4	Penyesuaian utang belanja modal	438.842.844,60	-
	JUNLAH	13.394.316.624,60	1.240.094.091,84

Sumber : Buku Besar Pembantu LKPD Tahun 2024

Penambahan dan pengurangan konstruksi dalam pengerjaan sebagaimana tabel di atas dapat dirinci sebagai berikut:

1. Penambahan aset tetap konstruksi dalam pengerjaan dari penyesuaian belanja barang dan jasa sebesar Rp494.004.000,00 terdiri dari:
 - Penyesuaian belanja barang/jasa aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi atas pekerjaan Pembangunan Tugu Pemekaran Tahap I yang belum selesai tahapan pembangunannya dan belum dapat dimanfaatkan sebesar Rp449.871.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
 - Penyesuaian belanja jasa konsultasi atas pekerjaan Perencanaan RAB dan DED TPS3R Kawasan Motandai Selatan yang belum dilaksanakan fisiknya sebesar Rp44.133.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup.
2. Penambahan aset tetap konstruksi dalam pengerjaan dari reklasifikasi antar aset tetap sebesar Rp11.965.634.280,00 berasal dari:
 - Reklasifikasi dari aset tetap gedung dan bangunan sebesar 4.269.754.000,00 yang terdiri atas:

- 1) Pembangunan Unit Transfusi Darah (UTD) sebesar Rp3.037.600.000,00 yang belum selesai dengan pekerjaan fisik per 31 Desember 2024 mencapai 83,16% dan diberikan kesempatan namun tetap tidak dapat diselesaikan oleh pihak pelaksana yaitu PT Sinar Karya Irfani sesuai waktu pemberian kesempatan sampai dengan 19 Januari 2025. Pemutusan kontrak telah dilakukan oleh Direktur RSUD yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen melalui surat Nomor 800/1.02.1.1/103/I/2025 dengan pekerjaan fisik mencapai 94,80% pada Rumah Sakit Umum Daerah.
 - 2) Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan UTD sebesar Rp83.677.000,00 dan Jasa Konsultansi Pengawasan Perencanaan Pembangunan UTD sebesar Rp76.035.000,00 yang belum selesai pekerjaannya pada Rumah Sakit Umum Daerah.
 - 3) Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri 1 Pinolosian yang belum selesai tahapan pembangunannya dan belum dapat dimanfaatkan sebesar Rp1.032.760.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 - 4) Jasa Konsultansi Perencanaan Tugu Pemekaran Tahap I yang belum selesai tahapan pembangunannya sebesar Rp39.682.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
- Reklasifikasi dari aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp7.695.880.280,00 yang berasal dari:
- 1) Pembangunan Jalan Lingkungan dan Drainase Lingkungan DAK TEMATIK PPKT Bakida sebesar Rp7.598.380.280,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
 - 2) Hibah DED Pengembangan SPAM Milangodaa dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp97.500.000,00 tahun 2019 yang fisiknya akan dilaksanakan tahun 2025 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Pengurangan aset tetap konstruksi dalam pengerjaan dari reklasifikasi antar aset tetap sebesar Rp1.203.159.000,00 berasal dari:

- Reklasifikasi ke aset tetap gedung dan bangunan atas pekerjaan Pembangunan Museum Kebudayaan Tahun 2022 yang telah selesai sebesar Rp850.505.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
- Reklasifikasi ke aset tetap jalan, irigasi dan jaringan atas jasa konsultansi perencanaan tahun sebelumnya yang telah selesai dilaksanakan fisiknya sebesar Rp353.654.000,00 yang terdiri dari:
- 1) Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan (Tolotoyon, Momalia II, Meyambanga) tahun 2023 Rp99.295.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
 - 2) Jasa Konsultansi Perencanaan Daerah Irigasi Biniha tahun 2023 sebesar Rp99.285.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
 - 3) Jasa Konsultansi Perencanaan Daerah Irigasi Nunuk tahun 2023 sebesar Rp99.285.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
 - 4) Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Baru TPS3R Bakida TA 2023 sebesar Rp54.789.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup.

3. Reklasifikasi aset lainnya terdiri dari penambahan sebesar Rp495.835.500,00 dan pengurangan sebesar Rp36.935.091,84. Penambahan sebesar Rp495.835.500,00 berasal dari dokumen perencanaan pekerjaan fisik yang terealisasi pada belanja modal aset lainnya yang terdiri dari:

- Jasa Konsultasi Perencanaan Daerah Irigasi Tanggah sebesar Rp99.456.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
- Jasa Konsultasi Perencanaan Daerah Irigasi Onggunoi sebesar Rp99.289.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
- Jasa Konsultasi Perencanaan Daerah Irigasi Tolondadu sebesar Rp99.289.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
- Jasa Konsultasi Perencanaan Daerah Irigasi Tolotoyon sebesar Rp99.400.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
- Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Minum Matandoi sebesar Rp98.401.500,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Sedangkan pengurangan sebesar Rp36.935.091,84 berasal dari penyesuaian aset tetap atas kekurangan volume pekerjaan belanja modal gedung dan bangunan hasil pemeriksaan BPK RI TA 2024.

4. Penambahan dari penyesuaian utang belanja sebesar Rp438.842.844,60 berasal dari:

- Pembangunan UTD sebesar Rp119.985.200,00 yang belum selesai pekerjaan fisiknya per 31 Desember 2024 mencapai 83,16% dan diberikan kesempatan namun tetap tidak dapat diselesaikan oleh pihak pelaksana yaitu PT Sinar Karya Irfani sesuai waktu pemberian kesempatan sampai dengan 19 Januari 2025. Perhitungan utang pekerjaan Pembangunan UTD dapat dilihat dalam Lampiran IX Daftar Pekerjaan Yang Diberikan Kesempatan pada laporan keuangan ini.
- Pembangunan Jalan Lingkungan Drainase Lingkungan DAK PPKT Bakida sebesar Rp318.857.644,60 yang belum selesai pekerjaan fisiknya per 31 Desember 2024 mencapai 92,02% dan diberikan kesempatan sampai dengan 3 Februari 2025 sesuai dengan dokumen PHO Nomor 20/PPK-PERKIMTAN/BASTP/II/2025 pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Perhitungan utang pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Drainase Lingkungan DAK PPKT Bakida dapat dilihat dalam Lampiran IX Daftar Pekerjaan Yang Diberikan Kesempatan pada laporan keuangan ini.

Adapun daftar pekerjaan yang dicatat sebagai aset tetap konstruksi dalam pengerjaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.70 Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan

SKPD	NAMA PEKERJAAN	SALDO AWAL (Rp)	PENAMBAHAN (Rp)	PE-NGURANGAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
Dinas PU	1 Pekerjaan Pembuatan Tugu Perbatasan Botsul-Botmsung Yang Tidak Terlaksana Dengan Realisasi Fisik 30% Karena Permasalahannya Tanah TA 2015	147.279.000,00	-	-	147.279.000,00
	2 Pembangunan Jaringan Air Minum Desa Onggunoi	1.492.485.000,00	-	-	1.492.485.000,00

SKPD	NAMA PEKERJAAN	SALDO AWAL (Rp)	PENAMBAHAN (Rp)	PE-NGURANGAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	Tahun 2016. DAK REGULER				
3	Pembangunan Jaringan Air Minum Desa Sondana Tahun 2016. DAK REGULER	626.809.800,00	-	-	626.809.800,00
4	Peningkatan Jaringan SPAM IKK Bolaang Liris Tahun 2016. DAK REGULER	3.248.451.250,00	-	-	3.248.451.250,00
5	Peningkatan Jaringan SPAM IKK Pinelorian Tahun 2016. DAK	2.997.200.700,00	-	-	2.997.200.700,00
6	Pembangunan Jaringan Air Minum Desa Dadepo-Dadepo Barat Tahun 2016. DAK REGULER	619.011.100,00	-	-	619.011.100,00
7	Pembangunan Jaringan Air Minum Desa Manggada Tahun 2016. DAK REGULER	1.471.041.250,00	-	-	1.471.041.250,00
8	Perencanaan Jalan (Tolotoyon, Momufu II, Meyarabunga) TA 2023	99.285.000,00	-	99.285.000,00	-
9	Perencanaan Daerah Irigasi Hiriba TA 2023	99.285.000,00	-	99.285.000,00	-
10	Perencanaan Daerah Irigasi Nantik TA 2023	99.285.000,00	-	99.285.000,00	-
11	Pembangunan Tagu Persekarat Talup I TA 2024	-	489.553.000,00	-	489.553.000,00
12	Perencanaan Daerah Irigasi Tanggah TA 2024	-	99.456.000,00	-	99.456.000,00
13	Perencanaan Daerah Irigasi Oroganis TA 2024	-	99.289.000,00	-	99.289.000,00
14	Perencanaan Daerah Irigasi Tolondadu TA 2024	-	99.289.000,00	-	99.289.000,00
15	Perencanaan Daerah Irigasi Tolotoyon TA 2024	-	99.400.000,00	-	99.400.000,00
16	Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Minum Matandai TA 2024	-	98.401.500,00	-	98.401.500,00
17	Hibah dari Kementerian PUPR DED SPAM Milangdas TA 2019	-	97.500.000,00	-	97.500.000,00
RSUD	1. Pembangunan Unit Transfusi Darah (UTD) Rumah Sakit TA 2024	-	3.310.757.286,36	-	3.310.757.286,36
Disparbud	1. Perencanaan Pembangunan museum TA 2019	58.000.000,00	-	-	58.000.000,00
Dinas Pendidikan	1. Pembangunan Museum Kebudayaan TA 2022	850.505.000,00	-	850.505.000,00	-
	2. Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri 1 Pinoforan TA 2024	-	1.028.310.000,00	-	1.028.310.000,00
Dinas Perindustrian	1. Hibah Bangunan Pasar di Desa Damagan TA 2020	3.066.046.405,00	-	-	3.066.046.405,00
	2. Hibah Bangunan Pasar di Desa Daminanga TA 2020	3.199.717.500,00	-	-	3.199.717.500,00
	3. Hibah Bangunan Pasar di Desa Milangdas TA 2020	2.955.091.200,00	-	-	2.955.091.200,00
Dinas Lingkungan Hidup	1. Perencanaan RAB dan DES TPSIR TA 2023	54.789.000,00	-	54.789.000,00	-
	2. Perencanaan RAB dan DES TPSIR Kawasan Matandai Selatan TA 2024	-	44.133.000,00	-	44.133.000,00

SKPD	NAMA PEKERJAAN	SALDO AWAL (Rp)	PENAMBAHAN (Rp)	PE-NGURANGAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
Dinas Perumahan dan Perastimahan	1 Pembangunan Jalan Lingkungan Drainase Lingkungan DAK PPKT Hakula TA 2024	-	7.891.292.802,40	-	7.917.237.924,60
Jumlah		21.884.292.205,00	13.357.381.532,76	1.283.159.000,00	33.238.514.737,76

Sumber: Buku Besar Pembantu LKPD Tahun 2024

5.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan

Tabel 5.71 Akumulasi Penyusutan

URAIAN	2023 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	%
ASET TETAP				
Akumulasi Penyusutan	(983.204.286.930,82)	(979.644.668.522,67)	105.539.618.408,20	12,00

Sumber: Neraca Tahun 2024

Sesuai dengan PSAP 07 Paragraf 53, penyusutan didefinisikan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena dampak penggunaannya dalam kegiatan operasional pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun. Tujuan utama penyusutan bukan untuk menumpuk sumber daya bagi pembayaran utang atau penggantian aset tetap yang disusutkan, melainkan untuk menyesuaikan nilai aset tetap agar mencerminkan nilai wajarnya.

Penyusutan dapat dilakukan dalam 3 metode (i) metode garis lurus; (ii) metode saldo menurun ganda; dan (iii) metode unit produksi, namun metode yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam melakukan perhitungan penyusutan adalah metode garis lurus sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2023 tentang tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Metode garis lurus diambil karena metode ini merupakan metode yang paling populer dan dirasakan paling sederhana. Akan tetapi, diluar dari pertimbangan populer dan sederhana, metode penyusutan dapat dikaitkan dengan karakteristik aset, cara dan intensitas pemanfaatannya. Jika unit manfaat bersifat spesifik dan terkuantitatif, maka perhitungan penyusutan yang lebih logis dan proporsional dapat dilakukan dengan memakai metode unit produksi. Jika intensitas pemanfaatan bersifat menurun dalam artian pemanfaatan penyusutan yang lebih logis dan proporsional dapat dilakukan dengan memakai metode saldo menurun ganda. Akan tetap jika unit masa manfaat kurang spesifik dan tidak terkuantifikasi, atau walaupun unit masa manfaat dapat memenuhi unsur spesifik dan terkuantifikasi tetapi perhitungan hendak dilakukan semudah mungkin, maka perhitungan penyusutan yang lebih logis dan proporsional dapat dilakukan dengan memakai metode garis lurus.

Akumulasi penyusutan disajikan pada neraca dengan simbol minus dikarenakan akumulasi penyusutan merupakan pengurang nilai aset tetap. Laporan Rekapitulasi Penyusutan Aset Tetap dapat dilihat pada Lampiran VI dalam laporan keuangan ini. Berikut rekapitulasi akumulasi penyusutan per jenis aset tetap.

47

Tabel 5.72 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

NO	URAIAN	2024 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tanah	-
2	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	(229.404.431.397,51)
3	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	(77.365.255.665,00)
4	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	(671.817.979.642,31)
5	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(6.616.620.286,00)
Jumlah		(985.204.286.930,82)

Sumber: Saldo Buku Besar LKPD Tahun 2024

Jika dibandingkan dengan saldo akumulasi penyusutan tahun 2023 sebesar minus Rp879.664.668.522,62, akumulasi penyusutan mengalami kenaikan sebesar Rp105.539.618.408,20 atau 11,50% pada tahun 2024 sehingga saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2024 adalah sebesar minus Rp985.204.286.930,82. Adapun rincian penambahan dan pengurangan akumulasi penyusutan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.73 Rincian Penambahan dan Pengurangan Akumulasi Penyusutan

NO	URAIAN	PENAMBAHAN 2024	PENGURANGAN 2024
1	Beban Penyusutan	-	106.474.618.410,20
2	Penghapusan Aset	935.000.002,00	-
JUMLAH		935.000.002,00	106.474.618.410,20

Sumber: Buku Besar Pembantu LKPD Tahun 2024

Akumulasi penyusutan aset tetap terdiri dari penambahan sebesar Rp935.000.002,00 dan pengurangan sebesar Rp106.474.618.410,20. Penambahan dan pengurangan tersebut berasal dari:

1. Penambahan akumulasi penyusutan sebesar Rp935.000.002,00 berasal dari penghapusan aset atas penjualan langsung tiga unit kendaraan roda empat kepada Pimpinan DPRD periode 2019-2024 sesuai Keputusan Bupati Bojonegara Nomor 494 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penghapusan BMD Tahun 2024 pada Sekretariat DPRD.
2. Pengurangan akumulasi penyusutan sebesar Rp106.474.618.410,20 berasal dari:
 - Penyesuaian beban penyusutan aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp24.907.442.785,20.
 - Penyesuaian beban penyusutan aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp9.793.893.662,00.
 - Penyesuaian beban penyusutan aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp71.767.763.632,00.
 - Penyesuaian beban penyusutan aset tetap lainnya sebesar Rp5.518.331,00.

5.3.1.4. Dana Cadangan

Sesuai dengan PSAP 03 Paragraf 01, dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menetapkan pembentukan dana cadangan dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 sebesar Rp15.000.000.000,00 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 secara bertahap mulai tahun anggaran 2022 sampai dengan tahun anggaran 2023 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan telah merealisasikan pembentukan dana cadangan pada tanggal 6 Desember 2022 sebesar Rp7.500.000.000,00 dan tanggal 1 Desember 2023 sebesar Rp7.500.000.000,00 sesuai ketentuan besaran yang ditetapkan pada peraturan daerah melalui pos pengeluaran pembiayaan dan ditempatkan dalam Rekening Dana Cadangan Pemkab Bolssel pada Bank SulutGo Cabang Molibagu. Pada tanggal 29 September 2023, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 untuk memastikan tersedianya pendanaan kegiatan pemilihan umum sebagaimana dimaksud. Dalam surat edaran tersebut menegaskan kepada pemerintah daerah untuk menganggarkan 40% dana hibah yang disepakati dengan lembaga yang terkait dengan pemilihan umum pada APBD tahun 2023. Berdasarkan perjanjian hibah yang telah disepakati dengan Badan Pengawas Pemilu, pada tahun 2023 telah dicairkan dana cadangan sebesar Rp1.820.853.200,00 untuk disalurkan kepada Badan Pengawas Pemilu sesuai permohonan pencairan dana hibah, sehingga saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp13.179.146.800,00. Dalam rangka pelaksanaan pemilihan umum pada tahun 2024, sisa dana cadangan dicairkan dalam 3 tahap sesuai kebutuhan yaitu pada tanggal 7 Februari 2024 sebesar Rp6.825.251.006,00, tanggal 22 Juli 2024 sebesar Rp4.679.146.800,00, dan tanggal 1 Agustus 2024 sebesar Rp1.674.748.994,00 sehingga tidak terdapat saldo dana cadangan per 31 Desember 2024.

5.3.1.5. Aset Lainnya

Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah tagihan penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), aset tidak berwujud dan aset lain-lain.

Tabel 5.74 Aset Lainnya

NO	URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenalkan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
	ASET LAINNYA				
1	Tagihan Penjualan Anggaran	-	-	-	-
2	Tuntutan Ganti Rugi	7.282.792.756,80	6.889.175.777,77	393.616.979,03	5,71
3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-
4	Aset Tidak Berwujud	33.447.869.806,69	32.303.102.056,42	1.144.767.750,27	3,54
5	Aset Lain-lain	5.613.183.288,00	5.704.533.492,00	(91.350.204,00)	(1,60)
6	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	506.742.000,00	5.935.291.000,00	(5.428.549.000,00)	(91,46)
	JUMLAH	46.850.587.851,49	50.832.102.326,19	(3.981.514.474,70)	(7,83)

Sumber : Neraca Tahun 2024

Jika dibandingkan dengan saldo aset lainnya tahun 2023 sebesar Rp50.832.102.326,19, saldo aset lainnya mengalami penurunan sebesar Rp3.981.514.474,70 atau 7,83% pada tahun 2024 sehingga saldo aset lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp46.850.587.851,49. Dikarenakan karakteristik jenis aset lainnya berbeda antara satu dengan yang lain, maka penambahan dan pengurangan saldo aset lainnya secara umum akan dijelaskan pada masing-masing jenis akun aset lainnya sebagai berikut.

5.3.1.5.1. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak penjualan aset yang bersangkutan. Per 31 Desember 2024 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tidak memiliki tagihan penjualan angsuran sebagaimana dimaksud.

5.3.1.5.2. Tuntutan Ganti Rugi

Jika dibandingkan dengan saldo tuntutan ganti rugi tahun 2023 sebesar Rp6.889.175.777,77, tuntutan ganti rugi mengalami kenaikan sebesar Rp393.616.979,03 atau 5,71% pada tahun 2024 sehingga saldo tuntutan ganti rugi per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp7.282.792.756,80. Kenaikan saldo tuntutan ganti rugi tahun 2024 diperoleh dari penambahan sebesar Rp617.153.153,41 dan pengurangan sebesar Rp223.536.174,38. Penambahan sebesar Rp617.153.153,41 berasal dari:

1. Penyesuaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD tahun 2023 sebesar Rp329.018.041,38.
2. Penyesuaian aset tetap atas kekurangan volume pekerjaan belanja modal gedung dan bangunan hasil pemeriksaan BPK RI TA 2024

Sedangkan pengurangan sebesar Rp223.536.174,38 berasal dari:

1. Penyesuaian penyeteroran kerugian atas LK TA, 2009 s/d LK 2015 dan LHP APIP atas Perjalanan Dinas sebesar Rp12.864.300,00.
2. Penyesuaian penyeteroran atas LK Tahun 2018 sebesar Rp200.000,00.
3. Penyesuaian penyeteroran atas LK 2022 sebesar Rp300.000,00.
4. Penyesuaian penyeteroran atas LK 2023 sebesar Rp210.171.874,38.

5.3.1.5.3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan pihak ketiga menggambarkan nilai hak yang akan diperoleh atas suatu aset yang dibangun dengan cara kemitraan pemerintah dengan swasta berdasarkan perjanjian. Kemitraan dengan pihak ketiga dinilai sebesar nilai kontrak kerjasama antara pemerintah dengan pihak ketiga. Bentuk kemitraan tersebut antara lain Bangun Guna Serah/*Built Operate Transfer (BOT)*, Bangun Serah Guna/*Built Transfer Operate (BTO)* dan bentuk kemitraan lainnya. Per 31 Desember 2024 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tidak memiliki kemitraan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud.

5.3.1.5.4. Aset Tidak Berwujud

Aset tidak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset ini merupakan hasil

kegiatan dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset non keuangan artinya aset ini bukan merupakan kas atau setara kas atau aset yang akan diterima dalam bentuk kas yang jumlahnya pasti atau dapat ditentukan.

Pada Buletin Teknis SAP Nomor 17 tentang Akuntansi Aset tidak Berwujud Berbasis Akrual dijelaskan bahwa terdapat perlakuan khusus pencatatan transaksi aset tidak berwujud terkait amortisasi. Aset tidak berwujud disajikan pada lembar muka neraca sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan aset tidak berwujud secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Kebijakan penerapan amortisasi merupakan dampak dari perubahan konsep dalam Laporan Operasional dimana beban amortisasi harus disajikan. Amortisasi aset tidak berwujud sama prinsipnya seperti penyusutan pada aset tetap. Amortisasi dapat dilakukan dalam tiga metode (i) metode garis lurus; (ii) metode saldo menurun ganda; dan (iii) metode unit produksi, namun metode yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam melakukan perhitungan amortisasi adalah dengan metode garis lurus dengan masa manfaat terbatas selama lima tahun.

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mencatat aset tidak berwujud berupa hak cipta dan kajian per 31 Desember 2024 yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Sesuai dengan kebijakan akuntansi, aset tidak berwujud dengan masa manfaat tak terbatas tidak diamortisasi. Nilai aset tidak berwujud yang tidak diamortisasi ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah aset tidak berwujud tersebut masih memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Jika tidak lagi memiliki manfaat ekonomi di masa depan atau manfaat ekonominya berkurang dari nilai tercatat maka aset tidak berwujud dengan masa manfaat tak terbatas tersebut mengalami penurunan nilai. Jika aset tidak berwujud tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang, maka akan diajukan proses penghapusan aset tidak berwujud tersebut sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku.

Tabel 5.75 Aset Tidak Berwujud

URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	%
Hak Cipta				
Hak Cipta	170.528.000,00	170.528.000,00	-	-
Aset Tidak Berwujud				
Software	4.890.955.692,00	4.400.426.692,00	490.529.000,00	11,15
Kajian	31.746.662.682,00	30.524.991.382,00	1.221.671.300,00	4,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud				-
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	(3.360.276.567,31)	(2.792.844.017,58)	(567.432.549,73)	20,32
JUMLAH	33.447.869.806,69	32.303.102.056,42	1.144.767.750,27	3,54

Sumber: Daftar Saldo Buku Besar Tahun 2024

Jika dibandingkan dengan saldo aset tidak berwujud tahun 2023 sebesar Rp32.303.102.056,42, aset tidak berwujud mengalami peningkatan sebesar Rp1.144.767.750,27 atau 3,54% pada tahun 2024 sehingga saldo aset tidak berwujud per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp33.447.869.806,69. Adapun rincian penambahan dan pengurangan aset tidak berwujud dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.76 Rincian Penambahan dan Pengurangan Aset Tidak Berwujud

NO	URAIAN	PENAMBAHAN 2024	PENGURANGAN 2024
1	Hak Cipta	-	-
2	Software	490.529.000,00	-
3	Kajian	1.817.101.550,00	595.430.250,00
4	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	507.432.549,73
JUMLAH		2.307.630.550,00	1.162.862.799,73

Sumber: Buku Besar Pembantu LKPD Tahun 2024

Peningkatan saldo aset tidak berwujud pada tahun 2024 diperoleh dari penambahan sebesar Rp2.307.630.550,00 dan pengurangan sebesar Rp1.162.862.799,73. Penambahan dan pengurangan tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

1. Penambahan aset tidak berwujud sebesar Rp2.307.630.550,00 berasal dari:
 - Belanja modal aset lainnya yang merupakan aset tak berwujud sebesar Rp890.024.250,00 yang terdiri dari:
 - 1) Belanja modal software sebesar Rp294.594.000,00:
 - a. Aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sebesar Rp172.938.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 - b. Pengembangan Aplikasi DIKBUD sebesar Rp121.656.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 - 2) Belanja modal kajian berupa 6 paket dokumen perencanaan sebesar Rp595.430.250,00:
 - a. Jasa Konsultasi Perencanaan Daerah Irigasi Tangagah sebesar Rp99.456.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
 - b. Jasa Konsultasi Perencanaan Daerah Irigasi Onggunoi sebesar Rp99.289.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
 - c. Jasa Konsultasi Perencanaan Daerah Irigasi Tolondadu sebesar Rp99.289.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
 - d. Jasa Konsultasi Perencanaan Daerah Irigasi Tolotoyon sebesar Rp99.400.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
 - e. Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Jaringan SPAM Bakida sebesar Rp99.594.750,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
 - f. Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Minum Matandoi sebesar Rp98.401.500,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
 - Penyesuaian belanja jasa konversi aplikasi/sistem informasi berupa software sebesar Rp195.935.000,00 yang terdiri dari:
 - 1) Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIMPATDA) sebesar Rp72.967.500,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

- 2) Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (SIM PBB) sebesar Rp73.467.500,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
 - 3) Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pengendalian Stunting Terintegrasi (SI-PINTER) sebesar Rp49.500.000,00 pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- Penyesuaian belanja jasa konsultansi berupa kajian sebesar Rp1.221.671.300,00 yang terdiri dari:
- 1) Dokumen Upaya pengelolaan Lingkungan Hidup - Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) sebesar Rp49.439.400,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah.
 - 2) Dokumen Bisnis Plan TPST Linawan sebesar Rp55.250.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup.
 - 3) Dokumen Manajemen Perencanaan RAB/DED Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu (TPST) sebesar Rp82.917.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup.
 - 4) Dokumen Survey Data Kondisi Jembatan sebesar Rp99.678.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
 - 5) Dokumen Efaksi Daerah Irigasi sebesar Rp243.156.600,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
 - 6) Dokumen Data Base dan Kondisi Jalan sebesar Rp691.230.300,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
2. Pengurangan aset tidak berwujud sebesar Rp1.162.862.799,73 terdiri dari:
- Reklasifikasi ke aset tetap jalan, irigasi dan jaringan atas belanja modal kajian yang merupakan kapitalisasi dokumen perencanaan fisik atas pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan sebesar Rp99.594.750,00.
 - Reklasifikasi ke aset tetap konstruksi dalam pengerjaan atas belanja modal kajian yang merupakan dokumen perencanaan fisik yang fisiknya belum dilaksanakan sebesar Rp495.835.500,00.
 - Penyesuaian beban amortisasi aset tak berwujud tahun 2024 sebesar Rp567.432.549,73. Perhitungan amortisasi aset tidak berwujud dapat dilihat pada Lampiran VII dalam laporan keuangan ini.

5.3.1.5.5. Aset Lain-lain

Tabel 5.77 Aset Lain-lain

NO	URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenalkan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Aset Lain-lain lainnya	426.470.055,70	426.470.055,70	-	-
2	Aset Tetap Rusak Berat	7.053.595.526,62	17.010.007.669,03	(9.956.412.142,41)	(58,53)
3	Aset Tetap Hilang	1.966.992.700,00	1.966.992.700,00	-	-
4	Aset Tetap Dserahkan Kepada Masyarakat/Ketiga	11.806.020.654,00	11.806.020.654,00	-	-

4

NO	URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
5	Aset Tetap Yang Akan Diserahkan Ke Pemprov	210.767.105,00	210.767.105,00	-	-
6	Aset Tetap yg Merupakan Barang Habis Pakai	9.699.800,00	9.699.800,00	-	-
7	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(15.860.362.553,32)	(23.725.424.491,73)	9.865.061.938,41	(38,35)
	JUMLAH	5.613.183.288,00	5.704.533.492,00	(91.350.204,00)	(1,60)

Sumber : Daftar Saldo Buku Besar Tahun 2024

Jika dibandingkan dengan saldo aset lain-lain tahun 2023 sebesar Rp5.704.533.492,00, aset lain-lain mengalami penurunan sebesar Rp91.350.204,00 atau 1,60% pada tahun 2024 sehingga saldo aset lain-lain per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp5.613.183.288,00. Kenaikan saldo aset lain-lain di tahun 2024 diperoleh dari penambahan sebesar Rp9.865.061.938,41 dan pengurangan sebesar Rp9.956.412.142,41.

1. Aset lain-lain lainnya sebesar Rp426.470.055,70 terdiri dari:
 - Persediaan obat kedaluwarsa tahun 2016 sebesar Rp63.115.901,00 pada Puskesmas Onggunoi.
 - Persediaan obat kedaluwarsa tahun 2016 sebesar Rp150.986.865,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah.
 - Persediaan obat kedaluwarsa tahun 2017 sebesar Rp212.367.289,70 pada Rumah Sakit Umum Daerah.
2. Aset tetap rusak berat sebesar Rp7.053.593.595.526,62 merupakan aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif untuk selanjutnya diproses penghapusannya sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Aset tetap hilang sebesar Rp1.966.992.700,00 telah dikeluarkan pencatatannya dari aset tetap. Sebagian besar aset tetap yang hilang telah ditetapkan dengan tuntutan ganti rugi.
4. Aset tetap diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga sebesar Rp11.806.020.654,00 terdiri dari:
 - Belanja modal yang diserahkan kepada masyarakat yang belum memiliki berita acara serah terima barang sebesar Rp8.395.850.059,00:
 - 1) Dinas Perikanan sebesar Rp8.300.150.059,00.
 - 2) Dinas Pertanian sebesar Rp95.700.000,00.
 - Belanja modal yang diserahkan kepada sekolah swasta yang belum memiliki berita acara serah terima barang sebesar Rp3.410.170.595,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Aset tetap yang akan diserahkan ke Pemerintah Provinsi sebesar 210.767.105,00 merupakan sisa hibah aset tetap yang belum diserahkan terimakan dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Hibah aset tetap tersebut merupakan tindak lanjut pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya terkait kebijakan pengalihan kewenangan manajemen pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi.

Total aset tetap yang akan dihibahkan berdasarkan hasil inventaris yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berjumlah sebesar Rp12.720.061.634,00 (intrakomptabel) akan tetapi setelah dilakukan verifikasi oleh tim Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara total aset tetap yang diterima hanya sebesar Rp12.509.294.529,00 yang diserahkan dalam 2 tahap:

- Tahap I sebesar Rp12.469.267.230,00 pada tahun 2017 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Personil Sarana dan Prasarana dan Dokumen dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 060/327/IX/2016/Sekr dan Nomor 060/3729/Sekr-Ro-Org tanggal 30 September 2016 yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 33 Tahun 2017.
 - Tahap II sebesar Rp40.027.299,00 pada tahun 2018 sesuai Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 417 Tahun 2018.
6. Aset tetap yang merupakan barang pakai habis sebesar Rp9.699.800,00 berasal dari reklasifikasi aset tetap pada tahun 2018 atas barang pakai pada Dinas Kesehatan yang selanjutnya direncanakan untuk dilakukan penghapusan sesuai mekanisme ketentuan yang berlaku. Adapun rincian barang pakai habis tersebut terdiri dari:
- a. Alat kedokteran umum lainnya - Alat permainan edukatif tahun pengadaan 2016 sebesar Rp6.269.800,00.
 - b. Alat kedokteran umum lainnya - Food model tahun pengadaan 2016 sebesar Rp3.430.000,00.
7. Akumulasi penyusutan aset lain-lain lainnya sebesar minus Rp15.860.362.553,32 merupakan akumulasi penyusutan seluruh aset tetap yang direklasifikasi ke aset lainnya.

Adapun mutasi penambahan dan pengurangan aset lain-lain dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.78 Rincian Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain

NO	URAIAN	PENAMBAHAN 2024	PENGURANGAN 2024
1	Aset Lain-lain lainnya	-	-
2	Aset Tetap Rusak Berat	-	9.956.412.142,41
3	Aset Tetap Hilang	-	-
4	Aset Tetap Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	-	-
5	Aset Tetap Yang Akan Diserahkan Ke Pemerintah Provinsi	-	-
6	Aset Tetap Yang Merupakan Barang Habis Pakai	-	-
7	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	9.865.061.938,41	-
	JUMLAH	9.865.061.938,41	9.956.412.142,41

Sumber : Buku Besar Pembantu LKPD Tahun 2024

Penambahan akumulasi penyusutan aset lain-lain dan pengurangan aset tetap rusak berat saling berkaitan karena berasal dari penghapusan aset tetap rusak berat. Penghapusan aset tetap rusak berat dilakukan terhadap aset tetap intrakomptabel yang memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi, tidak termasuk aset tetap ekstrakomptabel yang tidak dicatat pada neraca. Penghapusan aset rusak berat sesuai Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 494 Tahun 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Tahun 2024 dapat dilihat pada table

berikut.

Tabel 5.79 Rincian Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain

NO	URAIAN	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	Dinas Perindustrian	43.585.000,00	40.796.190,00	2.788.810,00
2	Badan Pengelola Keuangan dan Pemipatan Daerah	784.437.018,41	782.607.850,41	1.829.168,00
3	Inspektorat	116.940.000,00	116.940.000,00	-
4	BKPSDM	30.000.000,00	30.000.000,00	-
5	KB	1.182.750.000,00	1.182.750.000,00	-
6	Bappeltbang	105.565.000,00	105.565.000,00	-
7	Dinas Lingkungan Hidup	55.580.000,00	41.955.000,00	13.625.000,00
8	Sekretariat Daerah - Bagian Umum	2.531.019.595,00	2.531.019.595,00	-
9	Dinas Kesehatan	591.650.000,00	591.650.000,00	-
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	4.135.876.500,00	4.067.769.274,00	68.107.226,00
11	Kecamatan Pitalisjan Timur	187.980.530,00	187.980.530,00	-
12	Kecamatan Heheho	64.074.000,00	64.074.000,00	-
13	Kecamatan Boliang Uki	126.954.499,00	121.954.499,00	5.000.000,00
JUMLAH		9.956.412.142,41	9.865.061.938,41	91.350.204,00

Sumber: Buku Besar Pembantu LKPD Tahun 2024

5.3.1.5.6. Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

Dana transfer TDF merupakan dana yang ditransfer dari pemerintah pusat yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari Rekening Kas Umum Negara dan ditempatkan dalam rekening lain TDF Transfer ke Daerah atas nama pemerintah daerah pada Bank Indonesia.

Pada tahun 2023, pemerintah menetapkan dana transfer dalam bentuk non tunai sebesar Rp5.935.291.000,00 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159 Tahun 2023 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38/KM.7/2023. Dana transfer TDF tersebut telah disalurkan dari rekening lain TDF pada Bank Indonesia ke RKUD pada tanggal 25 Maret 2024.

Pada tahun 2024, pemerintah pusat menetapkan kembali penyaluran transfer dalam bentuk non tunai sebesar Rp506.742.000,00 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2024 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2024 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 44/KM.7/2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2024. Sesuai dengan Nota Dinas Direktur Dana Transfer Umum Nomor ND-1097/PK.2/2024, penyaluran kurang bayar dan penyelesaian lebih bayar DBH pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

SH

Tabel 5.80 Rincian Dana Transfer TDF

NO	URAIAN	JUMLAH
1	DBH SDA Mineral dan Batubara - Royalty	391.726.000,00
2	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	79.869.000,00
3	DBH SDA Kehutanan	35.147.000,00
JUMLAH		506.742.000,00

Sumber : Nota Dinas Direktur DTU Nomor ND-1097/PK.2/2024

5.3.1.6. Properti Investasi

Properti investasi merupakan implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 17 dan penerapan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Properti investasi sendiri adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya serta tanah yang belum ditentukan penggunaannya serta tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan, dan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Properti investasi terdiri atas properti investasi dan akumulasi penyusutan properti investasi.

Tabel 5.81 Properti Investasi

NO	URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
PROPERTI INVESTASI					
1	Properti Investasi	2.840.722.000,00	-	2.840.722.000,00	-
2	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(436.695.783,00)	-	(436.695.783,00)	-
JUMLAH		2.404.026.217,00	-	2.404.026.217,00	-

Sumber : Neraca Tahun 2024

Jika dibandingkan dengan saldo properti investasi tahun 2023, saldo properti investasi mengalami kenaikan sebesar Rp2.404.026.217,00 dari sebelumnya tidak ada. Penambahan dan pengurangan saldo properti investasi dapat dijelaskan sebagaimana berikut.

5.3.1.6.1. Properti Investasi

Properti investasi tercatat sebesar Rp2.840.722.000,00 per 31 Desember 2024 dari sebelumnya tidak ada pada tahun 2023. Penambahan properti investasi berasal dari reklasifikasi dari akun lama pada investasi permanen lainnya sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Properti investasi terdiri dari:

1. Tanah bangunan industri pabrik es di Desa Tangagah dengan nilai perolehan sebesar Rp51.050.000,00.
2. Tanah bangunan pasar yang belum dipergunakan dan ditujukan untuk pasar tradisional di Desa Meyambang dengan nilai peroleh sebesar Rp80.000.000,00.
3. Tanah kampung lainnya yang belum dipergunakan dan ditujukan untuk relokasi masyarakat Buyat Parite Kecamatan Kotabunan di Desa Biniha Timur dengan nilai perolehan sebesar Rp55.842.000,00.

4. Tanah bangunan rumah negara golongan I yang belum dipergunakan dan ditujukan untuk pembangunan rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati di Desa Popodu dengan nilai perolehan sebesar Rp250.000.000,00.
5. Bangunan gedung pabrik permanen pabrik es di Desa Tangagah dengan nilai perolehan sebesar Rp2.403.830.000,00 yang disewakan kepada pihak ketiga Koperasi Produsen Perikanan Bonanza Mandiri sesuai Perjanjian Sewa Barang Milik Daerah Nomor 2/IK-BOLSEL/X/2021 dan Nomor 009/KBM/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 tentang Pemanfaatan Sewa Sebagian Tanah dan Bangunan Pabrik Es Milik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan jangka waktu perjanjian sewa selama lima tahun dengan nilai sewa per tahun sebesar Rp125.400.000,00.

5.3.1.6.2. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 17 Properti Investasi, Properti investasi disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Perhitungan penyusutan aset properti investasi dilakukan dengan metode garis lurus sesuai kebijakan akuntansi aset tetap, dikecualikan terhadap properti investasi tanah yang tidak disusutkan.

Akumulasi penyusutan properti investasi disajikan dengan simbol minus pada neraca dikarenakan akumulasi penyusutan merupakan pengurang nilai properti investasi. Akumulasi penyusutan properti investasi tercatat sebesar Rp436.695.783,00 per 31 Desember 2024 dari sebelumnya tidak ada pada tahun 2023. Penambahan akumulasi penyusutan properti investasi berasal dari:

1. Reklasifikasi dari akun lama pada investasi permanen lainnya sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebesar Rp388.619.183,00.
2. Perhitungan penyusutan properti investasi tahun 2024 sebesar Rp48.076.600,00.

Rekapitulasi penyusutan properti investasi dapat dilihat pada Lampiran VI laporan keuangan ini.

5.3.2. Kewajiban

Kewajiban Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.826.853.770,04. Jenis kewajiban ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Jumlah kewajiban tersebut secara keseluruhan merupakan kewajiban jangka pendek, karena Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tidak memiliki kewajiban jangka panjang seperti utang dalam negeri maupun kewajiban jangka panjang lainnya. Kewajiban jangka pendek tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.82 Kewajiban

NO	URAIAN	SALDO 2024 Rp	SALDO 2023 Rp
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	108.070.248,00	415.408.959,00
2	Utang Biaya	-	-
3	Utang Pinjaman Jangka Pendek	-	-
4	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
5	Pendapatan Diterima Dimuka	94.050.000,00	94.050.000,00
6	Utang Belanja	1.282.415.355,00	1.683.435.306,50
7	Utang Jangka Pendek Lainnya	342.318.166,44	352.067.566,44
	JUMLAH	1.826.853.770,04	2.544.961.832,00

Sumber : Neraca Tahun 2024

5.3.2.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Tabel 5.83 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

NO	URAIAN	SALDO 2024 Rp	SALDO 2023 Rp
1	Utang Iuran Jaminan Kesehatan	-	18.029,00
2	Utang Iuran Jaminan Kesehatan P.T.T.H.L.	-	111.588.582,00
3	Utang PPh 21	3.440.752,00	201.072.073,00
4	Utang PPh 22	922.089,00	2.005.000,00
5	Utang PPh 23	455.866,00	15.500,00
6	Utang PPN Pusat	4.556.768,00	2.015.000,00
7	Utang Jaminan	98.694.773,00	98.694.773,00
	JUMLAH	108.070.248,00	415.408.959,00

Sumber : Daftar Saldo Buku Besar Tahun 2024

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) tahun 2024 sebesar Rp108.070.248,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tidak memiliki utang iuran jaminan kesehatan tahun 2024. Tahun sebelumnya terdapat utang iuran jaminan kesehatan sebesar Rp18.029,00 yang merupakan utang Iuran Jaminan Kesehatan 1% atas belanja jasa tenaga kesehatan pada Puskesmas Duminanga per 31 Desember 2023 dan sudah disetorkan pada tahun 2024.
2. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan memiliki utang Utang PPh 21 per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.440.752,00 yang terdiri dari Utang PPh 21 pada bendahara dana BOS sebesar Rp945.000,00, serta utang PPh 21 pada bendahara dana Kapitasi JKN Puskesmas Duminanga sebesar Rp25.083,00 dan Puskesmas Onggunoi sebesar Rp2.470.669,00.
3. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan memiliki Utang PPh 22 per 31 Desember 2024 sebesar Rp922.089,00. Utang PPh 22 ini merupakan utang pada bendahara dana kapitasi Puskesmas Onggunoi sebesar Rp114.400,00, bendahara dana kapitasi Puskesmas Adow sebesar Rp41.613,00, bendahara dana BOK Puskesmas Pinolosian sebesar Rp6.723,00, bendahara dana BOK Puskesmas Onggunoi sebesar Rp45.513,00, bendahara dana BOK Puskesmas Molibagu sebesar Rp685.440,00, bendahara dana BOK Puskesmas Duminanga sebesar Rp28.400,00.
4. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan memiliki Utang PPh 23 per 31 Desember 2024 sebesar Rp455.866,00. Utang PPh 23 ini merupakan utang PPh 23 pada bendahara dana BOS sebesar Rp392.566,00, bendahara dana Kapitasi JKN Puskesmas Pinolosian sebesar Rp13.500,00, dan bendahara dana Kapitasi JKN Puskesmas Adow

Lh

sebesar Rp49.800,00.

5. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan memiliki Utang PPN Pusat per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.556.768,00 yang merupakan utang pada bendahara dana BOS sebesar Rp3.129.273,00, bendahara Dana Kapitasi JKN Puskesmas Adow sebesar Rp330.060,00, bendahara Dana Kapitasi JKN Puskesmas Onggunoi sebesar Rp839.000,00, bendahara dana BOK Puskesmas Pinolosian sebesar Rp50.285,00, dan bendahara dana BOK Puskesmas Duminanga sebesar Rp208.150,00.
6. Utang Jaminan tahun 2024 sebesar Rp98.694.773,00 merupakan utang jaminan pemeliharaan pekerjaan yang belum dibayarkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) per 31 Desember 2024 karena belum diajukan pembayaran oleh pihak ketiga. Adapun rincian utang jaminan pemeliharaan pekerjaan dapat dilihat pada Lampiran VIII dalam laporan keuangan ini.

5.3.2.2. Utang Bunga

Utang bunga merupakan biaya bunga yang harus dicatat atas biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Per 31 Desember 2024 tidak memiliki utang bunga.

5.3.2.3. Utang Pinjaman Jangka Pendek

Sampai dengan tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tidak melakukan pinjaman ke pihak lain, sehingga Per 31 Desember 2024 tidak memiliki utang pinjaman jangka pendek.

5.3.2.4. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang merupakan jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Per 31 Desember 2024 tidak terdapat bagian lancar utang jangka panjang pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

5.3.2.5. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka merupakan kas yang telah diterima dari pihak ketiga tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan memiliki pendapatan diterima dimuka sebesar Rp94.050.000,00. Pendapatan diterima dimuka ini merupakan pendapatan atas hasil kerjasama pemanfaatan BMD berupa Pabrik Es di OPD Dinas Perikanan sampai dengan tahun 2025 yang disetorkan pada bulan Oktober tahun 2024.

5.3.2.6. Utang Belanja

Tabel 5.84 Utang Belanja

NO	URAIAN	SALDO 2024 Rp	SALDO 2023 Rp
1	Utang Belanja Pegawai	302.774.081,00	128.339.201,00
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	296.115.264,00	1.128.761.613,56
3	Utang Belanja Hibah	-	98.449.350,00
4	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.750.474,00	3.750.474,00
5	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	319.293.618,00	221.029.068,00
6	Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	338.805.344,60	103.105.600,00
7	Utang Belanja Tidak Terdaftar	21.176.574,00	-
JUMLAH		1.282.415.355,60	1.683.435.306,56

Sumber : Daftar Saldo Buku Besar Tahun 2024

Utang belanja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2024 sebesar Rp1.282.415.355,60 dapat dirinci sebagai berikut.

1. Utang belanja pegawai sebesar Rp302.774.081,00 terdiri dari:
 - Utang belanja gaji dan tunjangan lainnya sebesar Rp103.740.621,00 berupa selisih kenaikan pangkat dan jabatan yang belum dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan per 31 Desember 2024.
 - Reklasifikasi utang PFK PPh 21 pada Bendahara Umum Daerah (BUD) tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp199.033.460,00 yang telah dipungut namun tidak dibayarkan karena terdapat kompensasi kelebihan pembayaran PPh 21 atas perubahan batas Perhitungan Tidak Kena Pajak atau PTKP hasil temuan pemeriksaan BPK RI TA 2016. Reklasifikasi utang ini bertujuan untuk dikembalikan kepada masing-masing pegawai jika memungkinkan sesuai data pemotongan PPh 21 tahun 2018 sampai dengan 2020.

Adapun rincian utang belanja pegawai dapat dilihat pada Lampiran X dalam laporan keuangan ini.

2. Utang belanja barang dan jasa tahun 2024 sebesar Rp296.115.264,00 terdiri dari utang belanja Jasa Tenaga Laboratorium sebesar Rp2.880.000,00, utang belanja Jasa Tenaga Kesehatan sebesar Rp214.793.914,00, utang belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi sebesar Rp11.100.000,00, utang belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan sebesar Rp15.784.200,00, utang belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN sebesar Rp2.268.800,00, utang belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp44.298.900,00, dan utang belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten sebesar Rp4.989.450,00. Adapun rincian utang belanja barang dan jasa dapat dilihat pada Lampiran XI dalam laporan keuangan ini.
3. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk tahun 2024 tidak memiliki utang belanja hibah.
4. Utang belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp3.750.474,00 merupakan utang belanja pengadaan Timbangan Beras tahun 2021 pada Dinas Pertanian sebesar Rp1.280.000,00 dan utang belanja Pengadaan Alat Peraga Pendidikan dan Sarana Penunjang SD tahun 2012 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp2.470.474,00.

5. Utang belanja modal gedung dan bangunan tahun 2024 sebesar Rp335.713.618,00 merupakan utang belanja bangunan gedung pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp131.474.018,00, Dinas Kesehatan sebesar Rp68.334.400,00, dan Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp19.985.200,00.
6. Utang belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp338.805.344,60 terdiri dari pengadaan Reservoir tahun 2014 pada Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp3.739.000,00, utang belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp16.208.700,00, dan utang belanja pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp318.857.644,60.
7. Utang belanja tidak terduga Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2024 sebesar Rp21.176.574,00. Utang belanja ini timbul akibat kesalahan pembayaran pajak ke kas daerah pada tanggal 30 Desember 2024 yang seharusnya dibayarkan ke kas negara sesuai dengan surat Sangadi Desa Iligon Nomor 01/SPPD/DI/05-2009/1/2025 tanggal 6 Januari 2025.

Adapun rincian utang belanja modal dapat dilihat pada Lampiran XII dalam laporan keuangan ini.

5.3.2.7. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan per 31 Desember tahun 2024 sebesar Rp342.318.166,44. Utang jangka pendek lainnya ini merupakan utang kelebihan pembayaran atas lain-lain PAD yang sah lainnya dengan rincian sebagai berikut.

- a. Utang jangka pendek lainnya kepada Subdivre Bulog cabang Kotamobagu atas kekurangan pembayaran hibah beras miskin TA 2012 sebesar Rp22.734.000,00.
- b. Utang jangka pendek lainnya atas kelebihan pembayaran tahun sebelumnya yang telah ditutup sebesar Rp313.087.366,44. Utang kelebihan pembayaran tahun sebelumnya ini mengalami penurunan sebesar Rp9.749.400,00 dari tahun sebelumnya Rp322.836.766,44. Penurunan tersebut berasal dari penghapusan utang jangka pendek lainnya atas kelebihan pembayaran kerugian daerah 14 orang PNSD sebesar Rp9.749.400,00 berdasarkan surat konfirmasi pernyataan bahwa tidak akan melakukan penagihan kembali.
- c. Utang Jangka Pendek Lainnya atas Pekerjaan Rehabilitasi RDG SD Muhammadiyah Molibagu TA 2014 (sekolah swasta) pada SKPD Dinas Pendidikan sebesar Rp6.496.800,00.

5.3.3. Ekuitas

Ekuitas Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.091.582.315.578,39. Jika dibandingkan dengan ekuitas tahun 2023 sebesar Rp1.137.063.931.898,81 dapat dilihat terjadi penurunan nilai ekuitas sebesar Rp45.481.616.320,42 atau 4,00%. Adapun penjelasan ekuitas lebih rinci dapat dilihat pada penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas.

5.4. Laporan Operasional

Laporan operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan – LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Rincian Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

5.4.1. Pendapatan – LO

Pendapatan – LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuivalensi dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Realisasi Pendapatan – LO Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2024 sebesar Rp573.277.360.924,49 yang dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.85 Pendapatan – LO

NO	URAIAN	SALDO 2024 Rp	SALDO 2023 Rp
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	21.028.124.011,24	20.348.425.499,78
2	Pendapatan Transfer – LO	536.732.997.668,00	464.506.509.851,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	15.516.239.245,25	21.472.991.679,09
JUMLAH		573.277.360.924,49	506.327.927.129,87

Sumber : Laporan Operasional Tahun 2024

5.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah – LO

Realisasi Pendapatan Asli Daerah – LO untuk tahun 2024 sebesar Rp21.028.124.011,24 yang dapat dirinci sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.86 Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO

NO	URAIAN	SALDO 2024 Rp	SALDO 2023 Rp
1	Pajak Daerah – LO	5.987.292.299,00	6.579.721.885,00
2	Retribusi Daerah – LO	11.285.575.225,00	9.049.894.043,00
3	Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	640.020.357,00	532.969.455,00
4	Lain-lain PAD yang Sah – LO	3.115.236.130,24	4.185.740.116,78
JUMLAH		21.028.124.011,24	20.348.425.499,78

Sumber : Laporan Operasional Tahun 2024

5.4.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah – LO

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah – LO untuk tahun 2024 sebesar Rp5.987.292.299,00 yang dapat dirinci sebagai tabel berikut.

Tabel 5.87 Pendapatan Pajak Daerah – LO

NO	URAIAN	SALDO 2024 Rp	SALDO 2023 Rp
1	Pajak Hotel – LO	47.461.700,00	36.472.950,00
2	Pajak Restoran – LO	1.453.041.986,00	2.436.070.784,00
3	Pajak Hiburan – LO	3.740.000,00	2.223.675,00
4	Pajak Reklame – LO	155.338.342,00	132.761.423,00
5	Pajak Penerangan Jalan – LO	1.835.180.573,00	1.582.642.549,00
6	Pajak Sirang Barang Walet – LO	13.500.000,00	11.000.000,00
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO	1.283.827.222,00	1.328.351.425,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) – LO	1.156.370.976,00	1.003.774.079,00
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO	28.831.500,00	44.425.000,00
JUMLAH		5.987.292.299,00	6.579.721.885,00

Sumber – Daftar Sulis Buku Besar Tahun 2024

1. Pajak Hotel – LO tahun 2024 sebesar Rp47.461.700,00 merupakan realisasi penerimaan pajak rumah penginapan dan sejenisnya – LO sebesar Rp46.486.700,00 dan pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) – LO sebesar Rp975.000,00. Terdapat selisih antara pendapatan pajak hotel – LRA dan pendapatan pajak hotel – LO sebesar Rp7.630.000,00. Selisih tersebut merupakan penambahan piutang pajak rumah penginapan dan sejenisnya tahun 2024 sebesar Rp7.005.000,00 dan penambahan piutang pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) tahun 2024 sebesar Rp625.000,00 yang hanya dicatat sebagai pendapatan LO.
2. Pajak Restoran – LO tahun 2024 sebesar Rp1.453.041.986,00 merupakan realisasi atas pajak rumah makan dan sejenisnya – LO sebesar Rp32.271.635,00 dan pajak jasa boga/katering dan sejenisnya – LO sebesar Rp1.420.770.351,00. Terdapat selisih nilai realisasi pendapatan pajak restoran – LRA jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan pajak restoran – LO sebesar Rp133.510.130,00. Selisih tersebut disebabkan oleh adanya penurunan dan penambahan piutang pajak restoran selama tahun 2024, dimana terjadi penurunan akibat pelunasan piutang pajak restoran tahun 2023 sebesar Rp140.467.484,00 dan penambahan piutang pajak restoran tahun 2024 sebesar Rp6.957.354,00. Penurunan piutang pajak restoran merupakan pelunasan piutang pajak restoran yang penerimaannya hanya dicatat pada pendapatan – LRA sedangkan penambahan piutang pajak restoran merupakan penetapan atas pajak restoran selama 2024 yang belum disetor sehingga hanya dicatat sebagai pendapatan – LO.
3. Pendapatan Pajak Hiburan – LO tahun 2024 sebesar Rp3.740.000,00 merupakan realisasi penerimaan pajak diskotek, karaoke, klub malam, dan sejenisnya – LO. Tidak terdapat selisih antara pendapatan pajak hiburan – LRA dan pendapatan pajak hiburan – LO.

4. Pendapatan Pajak Reklame – LO tahun 2024 sebesar Rp155.338.342,00 merupakan realisasi atas pajak reklame papan/*billboard*/videotron/megatron – LO. Terdapat selisih antara pendapatan pajak reklame – LRA dan pendapatan pajak reklame – LO sebesar Rp5.076.900,00. Selisih tersebut dipengaruhi oleh penurunan piutang pajak reklame sebesar Rp640.500,00 yang merupakan pelunasan piutang tahun 2023 atas nama PUTRI DJ. S. MOKODOMPIT (Ayam Singapore) serta penambahan piutang tahun 2024 sebesar Rp5.717.400,00 yang merupakan piutang pajak reklame atas nama PUTRI DJ. S. MOKODOMPIT (Ayam Singapore) sebesar Rp640.500,00, piutang atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) UNIT MOLIBAGU sebesar Rp1.926.000,00 dan piutang atas nama PT. NIPSEA PAINT AND CHEMICALS / NIPPON PAINT sebesar Rp3.150.900,00.
5. Pendapatan Pajak Penerangan Jalan – LO tahun 2024 sebesar Rp1.835.180.573,00. Terdapat selisih nilai realisasi pendapatan pajak penerangan jalan – LO jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan pajak penerangan jalan – LRA sebesar Rp22.350.858,00. Selisih tersebut dipengaruhi oleh penurunan piutang pajak penerangan jalan bulan Desember tahun 2023 sebesar Rp148.815.466,00 yang telah disetor oleh PT PLN (Persero) Kotamobagu dan hanya dicatat pada pendapatan – LRA serta penambahan piutang yang merupakan setoran pajak penerangan jalan bulan Desember 2024 yang belum disetor oleh PT PLN (Persero) Kotamobagu per 31 Desember 2024 sebesar Rp171.166.324,00 yang hanya dicatat sebagai pendapatan - LO.
6. Pajak Sarang Burung Walet – LO tahun 2024 sebesar Rp13.500.000,00. Tidak ada selisih antara pendapatan pajak sarang burung walet – LRA dan pendapatan pajak sarang burung walet – LO.
7. Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO tahun 2024 sebesar Rp1.283.827.222,00. Pendapatan ini terdiri dari pendapatan pajak batu kapur – LO sebesar Rp192.537.220,00, pasir dan kerikil – LO sebesar Rp868.529.459,00, pasir kuarsa – LO sebesar Rp87.757.864,00, dan pajak tanah scrap (*Fullers Earth*) – LO sebesar Rp135.002.679,00. Terdapat selisih antara Pendapatan pajak mineral bukan logam dan batuan – LRA dengan pendapatan pajak mineral bukan logam dan batuan – LO sebesar Rp16.433.460,00. Selisih tersebut dipengaruhi oleh penurunan piutang berupa penerimaan atas pelunasan piutang tahun 2023 sebesar Rp1.470.610,00 yang hanya dicatat pada pendapatan – LRA, serta penambahan nilai piutang tahun 2024 sebesar Rp17.904.070,00 yang hanya dicatat sebagai pendapatan – LO.
8. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LO tahun 2024 sebesar Rp1.156.370.976,00. Terdapat selisih antara pendapatan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan – LRA dan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan – LO sebesar Rp4.159.662,00. Selisih tersebut dipengaruhi oleh penurunan piutang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan tahun 2024. Penurunan piutang pajak ini terdiri dari pelunasan piutang pajak bumi dan bangunan Desa Sondana sebesar Rp319.660,00 dan pelunasan piutang pajak bumi dan bangunan Desa Popodu sebesar Rp3.840.002,00 yang hanya dicatat pada pendapatan - LRA.
9. Pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO tahun 2024 sebesar Rp38.831.500,00. Realisasi penerimaan ini merupakan realisasi atas BPHTB – pemberian hak baru – LO. Tidak terdapat selisih antara pendapatan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) – LRA dengan pendapatan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) – LO.

5.4.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Realisasi pendapatan retribusi daerah – LO tahun 2024 sebesar Rp11.285.575.225,00 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.88 Pendapatan Retribusi Daerah – LO

NO	URAIAN	SALDO 2024 Rp	SALDO 2023 Rp
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO	11.034.842.535,00	8.757.960.223,00
2	Retribusi Pelayanan Pasar – LO	208.853.500,00	172.167.500,00
3	Retribusi Tempat Pelelangan – LO	-	88.567.500,00
4	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung – LO	41.879.190,00	31.298.820,00
JUMLAH		11.285.575.225,00	9.049.994.043,00

Sumber : Daftar Saldo Buku Besar Tahun 2024

1. Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO tahun 2024 sebesar Rp11.034.842.535,00. Pendapatan ini merupakan realisasi dari pendapatan retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas – LO sebesar Rp1.237.993.315,00, Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling-LO sebesar Rp1.173.000,00, Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu-LO sebesar Rp20.423.830,00 dan pendapatan retribusi rumah sakit umum daerah – LO sebesar Rp9.775.252.390,00. Tidak terdapat selisih antara pendapatan retribusi pelayanan kesehatan – LRA dengan pendapatan retribusi pelayanan kesehatan – LO di tahun 2024.
2. Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar – LO tahun 2024 sebesar Rp208.853.500,00. Pendapatan ini merupakan realisasi dari pendapatan retribusi pelayanan pasar - pelataran – LO sebesar Rp58.936.000,00, pendapatan retribusi pelayanan pasar - los – LO sebesar Rp57.147.000,00 dan pendapatan retribusi pelayanan pasar - kios – LO sebesar Rp92.770.500,00. Terdapat selisih antara pendapatan retribusi pelayanan pasar – LRA dengan pendapatan retribusi pelayanan pasar – LO sebesar Rp11.930.000,00. Selisih tersebut dipengaruhi oleh penambahan nilai piutang retribusi pelayanan pasar selama tahun 2024 yang pendapatannya hanya dicatat pada pendapatan – LO sebesar Rp19.007.000,00, dan pengurangan piutang sebesar Rp7.077.000,00 yang hanya dicatat sebagai pendapatan – LRA.
3. Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tidak memiliki saldo Pendapatan Retribusi Tempat Pelelangan – LO. Pemerintah Daerah tidak lagi melakukan pemungutan retribusi tempat pelelangan karena sesuai Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 menyatakan bahwa pembayaran pungutan hasil perikanan pascaproduksi dilakukan ke kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBPN. Tidak terdapat selisih antara retribusi tempat pelelangan – LRA dengan retribusi tempat pelelangan – LO.
4. Pendapatan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung – LO tahun 2024 sebesar Rp41.879.190,00. Tidak terdapat selisih antara pendapatan retribusi persetujuan bangunan gedung – LO dengan pendapatan retribusi persetujuan bangunan gedung – LRA.

5.4.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan memiliki pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO pada tahun 2024 sebesar Rp640.020.357,00. Realisasi ini merupakan penerimaan bagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada PT Bank SulutGo untuk tahun 2023. Tidak terdapat selisih antara pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO dengan pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA.

5.4.1.1.4. Lain-Lain PAD yang Sah – LO

Tabel 5.89 Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah – LO

NO	URAIAN	SALDO 2024 Rp	SALDO 2023 Rp
1.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	197.754.000,00	182.452.000,00
2.	Jasa Giro – LO	786.577.727,00	849.200.824,00
3.	Pendapatan Bangun – LO	1.574.110.563,00	2.267.735.351,38
4.	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah – LO	134.463.483,67	388.267.297,00
5.	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Biaya Lain/Lain-lain PAD yang Sah Lainnya – LO	67.466.321,57	56.718.042,19
6.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO	113.492.413,00	77.413.118,07
7.	Pendapatan Denda Pajak Daerah – LO	11.609.298,00	10.144.660,00
8.	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan – LO	13.295.900,00	-
9.	Pendapatan dari Pengembalian – LO	216.466.424,00	353.808.824,14
	JUMLAH	3.115.236.130,24	4.185.740.116,78

Sumber: Daftar Saldo Buku Besar Tahun 2024

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah – LO tahun 2024 sebesar Rp3.115.236.130,24. Rincian Nilai Lain-lain PAD yang Sah – LO tahun 2024 menurut objek pendapatan dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO tahun 2024 sebesar Rp 197.754.000,00 merupakan pendapatan hasil sewa BMD – LO sebesar Rp72.354.000,00 dan pendapatan hasil kerjasama pemanfaatan BMD – LO sebesar Rp125.400.000,00. Terdapat selisih antara Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO dengan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan – LRA sebesar Rp39.692.000,00. Selisih tersebut merupakan kenaikan piutang pendapatan hasil sewa BMD selambat tahun 2024 yang hanya dicatat sebagai pendapatan – LO.
2. Penerimaan Jasa Giro – LO tahun 2024 sebesar Rp786.577.727,00 terdiri dari jasa giro kas daerah – LO sebesar Rp662.645.456,00, Jasa Giro pada Kas di Bendahara – LO sebesar Rp13.854.801,00, Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan – LO sebesar Rp85.431.263,00, Jasa Giro pada Rekening Dana BOS – LO sebesar Rp8.432.899,00, Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP – LO sebesar Rp2.829.546,00, dan Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas – LO sebesar Rp13.383.762,00. Tidak terdapat selisih antara penerimaan jasa giro – LRA dengan penerimaan jasa giro – LO.

3. Pendapatan Bunga – LO tahun 2024 sebesar Rp1.574.110.563,00. Pendapatan bunga ini merupakan realisasi atas pendapatan bunga deposito – LO, dimana pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menempatkan deposito pada PT Bank Sulutgo Cabang Molibagu. Tidak terdapat selisih antara pendapatan bunga – LRA dengan pendapatan bunga – LO tahun 2024.
4. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah – LO tahun 2024 sebesar Rp134.463.483,67 diperoleh dari penerimaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain – LO. Tidak terdapat selisih antara tuntutan ganti kerugian daerah – LRA dengan tuntutan ganti kerugian daerah – LO.
5. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain/Lain-lain PAD yang Sah Lainnya – LO tahun 2024 sebesar Rp67.466.321,57. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa akun Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain/Lain-lain PAD yang Sah Lainnya merupakan akun untuk menampung semua penerimaan yang tidak dapat diklasifikasi sebagai penerimaan jenis tertentu. Terdapat selisih antara Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain/Lain-lain PAD yang Sah Lainnya – LRA dengan Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain/Lain-lain PAD yang Sah Lainnya – LO sebesar Rp41.542.460,13. Selisih tersebut merupakan penyesuaian atas penyisihan piutang tahun sebelumnya yang telah diterima yang hanya dicatat pada Pendapatan – LO.
6. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO tahun 2024 sebesar Rp113.492.413,00. Pendapatan ini diperoleh dari pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp10.973.413,00, dan pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp102.519.000,00. Tidak terdapat selisih antara Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA dengan Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO.
7. Pendapatan Denda Pajak Daerah – LO tahun 2024 sebesar Rp11.609.298,00. Pendapatan ini terdiri keterlambatan pembayaran pajak hotel – LO sebesar Rp547.820,00, pajak restoran – LO sebesar Rp1.746.309,00, denda pajak hiburan – LO sebesar Rp44.220,00, denda pajak reklame – LO sebesar Rp90.068,00, denda pajak mineral bukan logam dan batuan – LO sebesar Rp1.892.214,00 dan pendapatan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) – LO sebesar Rp7.288.667,00. Tidak terdapat selisih antara Pendapatan Denda Pajak Daerah – LO dengan Pendapatan Denda Pajak Daerah – LRA.
8. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan – LO untuk tahun anggaran 2024 sebesar Rp13.295.900,00. Saldo ini merupakan hasil eksekusi atas jaminan pengadaaan barang/jasa pekerjaan pembangunan ruang UKS SMP Negeri Kombot atas nama CV. Kaisar Laut pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Tidak terdapat selisih antara Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan – LO dengan Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan – LRA.
9. Pendapatan dari Pengembalian – LO tahun 2024 sebesar Rp216.466.424,00. Terdapat selisih antara Pendapatan dari Pengembalian – LRA dengan Pendapatan dari Pengembalian LO sebesar Rp1.770.000,00. Selisih tersebut merupakan selisih atas kenaikan dan penurunan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan – Tunjangan dimana penurunan piutang sebesar Rp24.570.000,00 dan kenaikan piutang sebesar Rp26.340.000,00 Adapun rincian Pendapatan dari Pengembalian – LO dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.90 Pendapatan dari Pengembalian – LO dan LRA

NO	URAIAN	SALDO LO Rp	SALDO LRA Rp	SELISIH
1	Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	105.563.545,00	103.793.545,00	1.770.000,00
2	Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	240.000,00	240.000,00	-
3	Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	32.630.018,00	32.630.018,00	-
4	Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.000.000,00	10.000.000,00	-
5	Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	400.000,00	400.000,00	-
6	Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Komputer	16.206.500,00	16.206.500,00	-
7	Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	38.257.561,00	38.257.561,00	-
8	Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan-Jalan dan Jembatan	12.668.800,00	12.668.800,00	-
9	Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	500.000,00	500.000,00	-
JUMLAH		216.466.424,00	214.696.424,00	1.770.000,00

Sumber : Daftar Saldo Buku Besar Tahun 2024

Selain beberapa obyek penerimaan lain-lain PAD yang sah – LO yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat juga perbedaan antara pendapatan lain-lain PAD yang sah – LO dengan pendapatan lain-lain PAD yang sah – LRA yakni pada obyek Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan, dimana terdapat realisasi pada pendapatan – LRA sebesar Rp1.179.072.800,00 sedangkan pada pendapatan – LO tidak ada realisasi. Hal ini disebabkan pada Laporan Operasional Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan tidak dicatat sebagai lain-lain PAD yang sah, melainkan dicatat sebagai Surplus/Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO pada Kegiatan Non Operasional, dimana Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO sebesar Rp754.576.996,00 sedangkan Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO sebesar Rp21.854.398,00. Terjadi perbedaan angka pada Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan – LRA dengan Surplus/Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO pada Kegiatan Non Operasional. Hal ini disebabkan realisasi yang dicatat pada Laporan Realisasi Anggaran adalah sebesar nilai jual barang milik daerah, sedangkan pada Laporan Operasional yang dicatat adalah nilai buku barang milik daerah yang dijual.

5.4.1.2. Pendapatan Transfer – LO

Realisasi Pendapatan Transfer – LO tahun 2024 sebesar Rp536.732.997.668,00 terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO sebesar Rp518.580.218.350,00 dan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO sebesar Rp18.152.779.318,00.

5.4.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO tahun 2024 sebesar Rp518.580.218.350,00. Terdapat selisih antara realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat - LRA jika dibandingkan dengan pendapatan transfer pemerintah pusat – LO sebesar Rp67.714.150.000,00. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA tahun 2024 menurut objek pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.91 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO dan LRA

NO	URAIAN	LO 2024 Rp	LRA 2024 Rp	SELISIH 2024 Rp
1	Dana Perimbangan	506.839.295.350,00	512.267.844.350,00	5.428.549.000,00
2	Dana Desa	-	62.285.601.000,00	62.285.601.000,00
3	Insentif Fiskal	11.740.923.000,00	11.740.923.000,00	-
JUMLAH		518.580.218.350,00	586.294.368.350,00	67.714.150.000,00

Sumber : Daftar Saldo Buku Besar Tahun 2024

Selisih pada Dana Perimbangan sebesar Rp5.428.549.000,00 merupakan selisih yang terjadi karena penambahan dan pengurangan aset lainnya berupa pengakuan pendapatan LO atas Dana Bagi Hasil yang ada pada Fasilitas TDF. Sedangkan selisih pada Dana Desa karena penerimaan Dana Desa hanya dicatat pada Pendapatan – LRA dan tidak dicatat pada pendapatan – LO. Hal ini disebabkan Dana Desa merupakan transfer Pemerintah Pusat kepada Desa melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota, sehingga Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai entitas penerima tidak berhak menggunakan dana tersebut melainkan mempunyai kewajiban untuk menyalurkan dana hasil pemotongan ke Rekening Kas Desa yang berhak menerima sesuai ketentuan melalui surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari bupati.

Adapun rincian pendapatan transfer pemerintah pusat – LO tahun 2024 adalah sebagai berikut.

1. Dana Perimbangan – LO tahun 2024 sebesar Rp 506.839.295.350,00 terdiri dari:
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) – LO tahun 2024 sebesar Rp21.267.060.000,00. Terdapat selisih antara Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) – LRA dengan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) – LO sebesar Rp5.428.549.000,00. Selisih tersebut terjadi karena penambahan aset lainnya berupa Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) yang diakui sebagai pendapatan transfer dana bagi hasil pemerintah pusat tahun 2024, dan pengurangan Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) tahun 2023 karena telah diterima di Kas Daerah. Adapun selisih penambahan dan pengurangannya dapat dirinci sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.92 Rincian Selisih Dana Bagi Hasil (DBH)

NO	URAIAN	LO 2024 Rp	LRA 2024 Rp	SELISIH 2024 Rp
1.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	6.882.631.000,00	8.448.106.000,00	1.565.475.000,00
2.	DBH PPh Pasal 21	2.210.964.000,00	2.670.031.000,00	459.067.000,00
3.	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPON	85.248.000,00	90.485.000,00	5.237.000,00
4.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Penanganan Panas Bumi	738.623.000,00	1.210.469.000,00	471.846.000,00
5.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landasi	279.996.000,00	375.360.000,00	95.364.000,00
6.	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalti	9.140.041.000,00	11.987.297.000,00	2.847.256.000,00
7.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH)	40.757.000,00	31.061.000,00	(9.696.000,00)
8.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.882.800.000,00	1.882.800.000,00	-
JUMLAH		21.267.060.000,00	26.695.609.000,00	5.428.549.000,00

Sumber: Daftar Saldo Buku Besar Tahun 2024

- b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) – LO tahun 2024 sebesar Rp364.751.601.275,00. Tidak terdapat selisih antara Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA dengan Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU) – LO. Pendapatan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) – LO dicatat sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024. Realisasi DAU ini termasuk didalamnya adalah realisasi tambahan DAU dalam rangka pemberian dukungan pendanaan tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas pegawai ASN guru yang gaji pokoknya bersumber dari APBD dan tidak menerima tambahan penghasilan tahun anggaran 2024 sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 416 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2024 Dalam Rangka Dukungan Pendanaan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Bagi Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah sebesar Rp3.160.186.000,00.
- c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LO tahun 2024 sebesar Rp78.191.816.657,00. Tidak terdapat selisih antara Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LRA dengan Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LO.
- d. Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – LO tahun 2024 sebesar Rp42.628.817.418,00. Tidak terdapat selisih antara Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – LRA dengan Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK)

Non Fisik – LO.

2. Dana Desa tidak dicatat sebagai Pendapatan – LO. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Dana Desa merupakan transfer Pemerintah Pusat kepada Desa melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota, sehingga Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai entitas penerima tidak berhak menggunakan dana tersebut melainkan mempunyai kewajiban untuk menyalurkan dana hasil pemotongan ke Rekening Kas Desa yang berhak menerima sesuai ketentuan melalui surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari bupati. Meskipun demikian, Pemerintah Daerah berkewajiban menganggarkan Pendapatan dan Belanja Dana Desa sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.
3. Insentif Fiskal – LO tahun 2024 sebesar Rp11.740.923.000,00. Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diberikan kepada daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja Pemerintah Daerah dapat berupa pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional, dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional. Tidak terdapat selisih antara penerimaan Insentif Fiskal – LO dengan Insentif Fiskal – LRA.

5.4.1.2.2. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO tahun 2024 sebesar Rp18.152.779.318,00. Terdapat selisih antara Pendapatan Transfer Antar Daerah – LRA dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO sebesar Rp1.586.242.696,00 yang dapat dirinci sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.93 Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO dan LRA

NO	URAIAN	LO 2024 Rp	LRA 2024 Rp	SELISIH 2024 Rp
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	3.399.536.730,00	2.942.171.415,00	457.365.317,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.364.032.509,00	1.975.863.465,00	388.169.044,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	8.219.624.909,00	7.504.016.666,00	715.608.243,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	111.644.985,00	86.544.893,00	25.100.092,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	4.057.940.185,00	4.057.940.185,00	-
JUMLAH		18.152.779.318,00	16.566.536.622,00	1.586.242.696,00

Sumber : Daftar Saldo Buku Besar Tahun 2024

Selisih Pendapatan Transfer Antar Daerah – LRA dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO sebesar Rp1.586.242.696,00 merupakan selisih antara penurunan nilai piutang berupa penerimaan bagi hasil pajak untuk tahun 2023 atas Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pemanfaatan Air Permukaan bulan Juni s.d Desember 2023 yang hanya dicatat

sebagai Pendapatan – LRA sebesar Rp7.957.018.300,00, dengan penambahan piutang tahun 2024 sebesar Rp9.543.260.996,00 yang merupakan piutang dana bagi hasil bulan Mei s.d Desember 2024 yang hanya dicatat sebagai pendapatan – LO. Penjelasan rinci terkait Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO adalah sebagai berikut.

1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor – LO tahun 2024 sebesar Rp3.399.536.730,00 terdiri dari penerimaan bagi hasil bulan Januari s.d April 2024 sebesar Rp1.077.488.627,00, dan pendapatan dari pengakuan piutang bagi hasil bulan Mei s.d Desember 2024 sebesar Rp2.322.048.103,00. Terdapat selisih antara Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor – LO dengan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor – LRA sebesar Rp457.365.317,00. Selisih tersebut merupakan kenaikan nilai piutang Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor dari sebesar Rp1.864.682.786,00 menjadi sebesar Rp2.322.048.103,00.
2. Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor – LO tahun 2024 sebesar Rp2.364.032.509,00 terdiri dari penerimaan bagi hasil bulan Januari s.d April 2024 sebesar Rp749.001.426,00, dan pendapatan dari pengakuan piutang bagi hasil bulan Mei s.d Desember 2024 sebesar Rp1.615.031.083,00. Terdapat selisih antara Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor – LO dengan Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor – LRA sebesar Rp388.169.044,00. Selisih tersebut merupakan kenaikan nilai piutang Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2024 dari sebesar Rp1.226.862.039,00 menjadi sebesar Rp1.615.031.083,00.
3. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LO tahun 2024 sebesar Rp8.219.624.909,00 terdiri dari penerimaan bagi hasil bulan Januari s.d April 2024 sebesar Rp2.691.951.080,00, dan pendapatan dari pengakuan piutang bagi hasil bulan Mei s.d Desember 2024 sebesar Rp5.527.673.829,00. Terdapat selisih antara Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LO dengan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LRA sebesar Rp715.608.243,00. Selisih tersebut merupakan kenaikan nilai piutang Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tahun 2024 dari sebesar Rp4.812.065.586,00 menjadi sebesar Rp5.527.673.829,00.
4. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan – LO tahun 2024 sebesar Rp111.644.985,00 terdiri dari penerimaan bagi hasil bulan Januari s.d April 2024 sebesar Rp33.137.004,00, dan pendapatan dari pengakuan piutang bagi hasil bulan Mei s.d Desember 2024 sebesar Rp78.507.981,00. Terdapat selisih antara Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan – LO dengan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan – LRA sebesar Rp25.100.092,00. Selisih tersebut merupakan kenaikan nilai piutang Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan tahun 2024 dari sebesar Rp53.407.889,00 menjadi sebesar Rp78.507.981,00.
5. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok – LO tahun 2024 sebesar Rp4.057.940.185,00 terdiri dari bagi hasil pajak rokok bulan Desember 2023 sebesar Rp612.395.355,00 dan bagi hasil bulan Januari sampai dengan November tahun 2024 sebesar Rp3.445.544.830,00. Tidak terdapat selisih antara Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok – LRA dengan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok – LO.

5.4.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO

Realisasi Lain-lain pendapatan daerah yang sah – LO tahun 2024 sebesar Rp15.603.239.245,25 yang diperoleh dari Pendapatan Hibah – LO sebesar Rp11.432.368.752,25 dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan – LO

sebesar Rp4.170.870.493,00. Terdapat selisih antara Lain-lain pendapatan daerah yang sah – LRA dengan Lain-lain pendapatan daerah yang sah – LO sebesar Rp11.431.868.752,25. Selisih tersebut merupakan penerimaan hibah uang yang habis digunakan dan hibah barang yang hanya dicatat sebagai pendapatan – LO.

5.4.1.3.1. Pendapatan Hibah – LO

Pendapatan hibah – LO tahun 2024 sebesar Rp11.345.368.752,25. Pendapatan hibah ini terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat – LO sebesar Rp9.201.422.436,00, Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah – LO sebesar Rp1.914.126.316,25, dan Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis – LO sebesar Rp316.820.000,00. Rincian pendapatan hibah – LO dapat dilihat sebagai tabel berikut.

Tabel 5.94 Pendapatan Hibah - LO

NO	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	Penerimaan hibah dari BNPB atas pengajuan bantuan Dana Siap Pakai (DSP) Bencana Banjir dan Tanah Longsor 26-27 Agustus 2024 sebesar Rp200.000.000,00, dan sisa dana telah dikembalikan sebesar Rp37.689,00	199.962.311,00
		Penyetoran Penerimaan Hibah BHP dari Kementerian Kesehatan RI pada Dinas Kesehatan TA 2024	24.376.125,00
		Penerimaan hibah aset tetap - Penerimaan hibah Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa 5 unit Alat Deteksi Dini Kanker Payudara dari Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI sesuai Surat Bukti Barang Keluar No KN.01.02/K.1.5/ .02/2024 tanggal Desember 2024	181.000.000,00
		Penerimaan Hibah Barang Milik Negara dari Kementerian PUPR berupa Instalasi Pengolahan Sampah/TPA yang belum dicatat sesuai Naskah Perjanjian Hibah Barang Milik Negara Nomor 264/BA/DC/2024 dan Nomor 100/272/IV/2024/Sekr tanggal 26 Maret 2024	6.416.454.000,00
		Penerimaan Hibah Barang Milik Negara dari Kementerian PUPR berupa SPAM IKK Bol Uki dan DED SPAM Milangoda sesuai Naskah Perjanjian Hibah Barang Milik Negara Nomor 264/BA/DC/2024 dan Nomor 100/272/IV/2024/Sekr tanggal 26 Maret 2024	2.379.630.000,00
		Sub Total	9.201.422.436,00
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO	Penerimaan hibah aset tetap - Penerimaan hibah Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa 25 unit tabung oksigen dan regulator dan 30.000 pec alkohol Saab dari Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulut sesuai Surat Bukti Barang Keluar No 155/SOK&FARMALKE/SXI/2024 tanggal 7 November 2024	107.472.950,00
		Penyetoran Penerimaan Hibah Obat dan BHP Medis dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada Dinas Kesehatan TA 2024	1.806.653.366,25
		Sub Total	1.914.126.316,25

NO	REKENING	URAIAN	JUMLAH
3	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	Penerimaan hibah atas sisa bantuan dana dari PT Bank SulutGo Cabang Molibagu untuk kegiatan Bolsel Paragliding Championship and Festival 2024 sebesar Rp30.000.000,00 pada Dinas Pemuda dan Olahraga	500.000,00
		Penerimaan hibah aset tetap - Penerimaan hibah dari PT Bank SulutGo Cabang Molibagu atas Dana CSR kegiatan Penataan Penerangan Jalan Utama Akses Jalan Islamic Center dan Jalan Utama Molibagu-Pintadu-Toluaya	119.961.408,00
		Penerimaan hibah dari PT Bank SulutGo Cabang Molibagu atas Dana CSR kegiatan Penyediaan Lampu Jalan di Sepertaran Kawasan Ibukota Kabupaten	79.958.592,00
		Penerimaan hibah dari PT Bank SulutGo Cabang Molibagu atas Dana CSR kegiatan Pengecatan Alas-alun Molibagu	29.400.000,00
		Sub Total	229.820.000,00
		TOTAL	11.345.368.752,25

Sumber : Buku Besar Pembantu Tahun 2024

Selain itu terdapat penerimaan bantuan dana yang tidak dicatat dalam laporan operasional karena dikarenakan pertimbangan bahwa penggunaan bantuan dana tersebut tidak menghasilkan aset dan bukan merupakan operasional rutin pemerintah daerah. Bantuan dana sebagaimana dimaksud terdiri dari:

1. Bantuan dana dari PT Bank SulutGo Cabang Molibagu untuk kegiatan Bolsel Paragliding Championship and Festival 2024 sebesar Rp30.000.000,00 pada Dinas Pemuda dan Olahraga.
2. Bantuan dana dari PT Bank SulutGo Cabang Molibagu untuk kegiatan HUT Bolsel ke 16 sebesar Rp50.000.000,00 pada Sekretariat Daerah – Bagian Umum.
3. Bantuan dana dari PT Bank SulutGo Cabang Molibagu untuk kegiatan Pembangunan Internet Gratis Masyarakat di Kecamatan Pinolosian Timur, Kecamatan Tomini, dan Kecamatan Posigadan sebesar Rp7.500.000,00 pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

5.4.1.3.2. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan – LO tahun 2024 sebesar Rp4.170.870.493,00. Pendapatan ini merupakan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP – LO. Tidak terdapat selisih antara Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan – LRA dengan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan – LO.

5.4.2. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Total beban Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2024 adalah sebesar Rp618.503.881.138,97. Jika dibandingkan dengan beban tahun 2023 maka dapat dilihat terjadi kenaikan beban sebesar Rp87.560.220.334,35.

Tabel 5.95 Beban

NO	URAIAN	SALDO 2024 Rp	SALDO 2023 Rp
1	Beban Pegawai	225.646.227.057,00	201.464.279.733,00
2	Beban Barang dan Jasa	195.206.532.243,90	174.495.362.363,28
3	Beban Bangun	-	-
4	Beban Sewa	696.600.000,00	-
5	Beban Hibah	33.246.983.172,00	10.026.022.767,00
6	Beban Bantuan Sosial	15.977.296.500,00	2.981.211.000,00
7	Beban Penyisihan Piutang	108.758.181,14	106.029.878,62
8	Beban Lain-lain	-	-
9	Beban Penyusutan Perabotan dan Mesin	24.907.442.785,20	25.562.393.411,00
10	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	9.793.893.662,00	9.006.816.624,00
11	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jembatan	71.767.763.632,00	66.067.477.961,00
12	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	5.518.331,00	6.622.000,00
13	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	567.432.549,73	535.299.949,72
14	Beban Penyusutan Properti Investasi	48.076.600,00	48.076.600,00
15	Beban Bagi Hasil	587.031.875,00	703.058.917,00
16	Beban Bantuan Keuangan	39.944.324.550,00	39.941.009.600,00
	JUMLAH	618.503.881.138,97	530.943.660.804,62

Sumber: Laporan Operasional Tahun 2024

5.4.2.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai tahun 2024 sebesar Rp225.646.227.057,00. Terdapat selisih antara beban pegawai dengan belanja pegawai sebesar Rp24.360.142,00. Selisih tersebut merupakan penurunan jumlah utang belanja gaji dan tunjangan sebesar Rp24.598.580,00 yang sebelumnya sebesar Rp128.339.201,00 menjadi sebesar Rp103.740.621,00, dikurangi koreksi atas utang belanja gaji dan tunjangan yang disebabkan kesalahan perhitungan pada Aplikasi SIMGAJI TASPEN (*Error*) sebesar Rp238.438,00.

Tabel 5.96 Beban Pegawai dan Belanja Pegawai

NO	URAIAN	LO 2024 Rp	LRA 2024 Rp	SELISIH 2024 Rp
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	150.835.912.187,00	150.860.272.329,00	(24.360.142,00)
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	48.284.486.678,00	48.284.486.678,00	-
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	19.170.639.155,00	19.170.639.155,00	-
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	6.899.341.971,00	6.899.341.971,00	-
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDI/WKDH	167.980.406,00	167.980.406,00	-

NO	URAIAN	LO 2024 Rp	LRA 2024 Rp	SELISIH 2024 Rp
6	Belanja Peniripaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	287.866.660,00	287.866.660,00	-
JUMLAH		225.646.227.057,00	225.670.587.199,00	(24.360.142,00)

Sumber : Daftar Saldo Buku Besar Tahun 2024

5.4.2.2. Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 sebesar Rp195.206.532.243,90. Terdapat selisih antara belanja barang dan jasa dengan beban barang dan jasa sebesar Rp11.181.403.778,75 yang dapat dirinci sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.97 Beban Barang dan Jasa

NO	URAIAN	LO 2024 Rp	LRA 2024 Rp	SELISIH 2024 Rp
1	Barang Pakai Habis	42.212.380.143,75	28.605.817.595,00	13.606.562.548,75
2	Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	111.931.976,00	561.802.976,00	(449.871.000,00)
3	Jasa Kantor	55.786.104.911,15	56.356.106.215,15	(570.001.304,00)
4	Jasa Jaminan/Auransi	17.308.945.092,00	17.304.676.292,00	2.268.800,00
5	Sewa Tanah	-	-	-
6	Sewa Peralatan dan Mesin	686.945.388,00	681.805.077,00	5.140.311,00
7	Sewa Gedung dan Bangunan	1.999.631.647,00	1.996.849.730,00	2.781.917,00
8	Sewa Aset Tetap Lainnya	147.009.000,00	147.009.000,00	-
9	Jasa Konsultansi Konstruksi	-	547.678.000,00	(547.678.000,00)
10	Jasa Konsultansi Non Konstruksi	98.762.250,00	1.264.888.550,00	(1.166.126.300,00)
11	Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	523.768.000,00	523.768.000,00	-
12	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.921.678.197,00	5.730.220.597,00	191.457.600,00
13	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	305.058.050,00	487.743.900,00	(182.684.850,00)
14	Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.011.981.520,00	1.878.242.000,00	1.133.739.520,00
15	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	57.811.390.409,00	57.811.390.409,00	-
16	Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.420.265.787,00	1.420.265.787,00	-
17	Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	30.000.000,00	30.000.000,00	-
18	Barang Ekstra Komptable	34.900.200,00	-	34.900.200,00
19	Barang dan Jasa BOS	7.797.779.673,00	8.763.865.337,00	(966.085.664,00)
JUMLAH		195.206.532.243,90	184.112.128.465,15	11.094.403.778,75

Sumber : Daftar Saldo Buku Besar Tahun 2024

Selisih beban barang dan jasa dengan belanja barang dan jasa berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Beban barang pakai habis tahun 2024 sebesar Rp42.212.380.143,75. Terdapat selisih antara beban barang pakai habis dengan belanja barang pakai habis sebesar Rp13.606.562.548,75. Selisih tersebut dipengaruhi oleh penambahan beban barang pakai habis dari persediaan awal tahun sebesar Rp12.198.787.415,22, reklasifikasi aset tetap peralatan dan mesin ke beban sebesar Rp2.759.566.973,94, reklasifikasi aset tetap gedung dan bangunan ke beban sebesar Rp1.601.040.952,00, reklasifikasi aset tetap jalan jaringan dan irigasi ke beban sebesar Rp3.920.343.305,00, reklasifikasi uang muka ke beban sebesar Rp260.525.000,00, dan penambahan beban dari penerimaan hibah uang/barang sebesar Rp2.039.004.441,25, dikurangi dengan pengurangan beban dari persediaan akhir sebesar Rp8.101.779.447,16, reklasifikasi beban ke aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp3.900.000,00, reklasifikasi beban ke uang muka sebesar Rp1.049.893.591,50 dan pengurangan beban dari pelunasan utang belanja sebesar Rp17.132.500,00.
2. Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebesar Rp111.931.976,00. Terdapat perbedaan antara beban aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi dengan belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebesar Rp449.871.000,00. Selisih tersebut dipengaruhi oleh pengurangan beban berupa reklasifikasi beban ke konstruksi dalam pengerjaan (KDP).
3. Beban Jasa Kantor tahun 2024 sebesar Rp55.786.104.911,15. Terdapat selisih antara belanja jasa kantor dengan beban jasa kantor sebesar Rp570.001.304,00. Selisih tersebut diperoleh dari penambahan beban atas pengakuan utang belanja tahun 2024 sebesar Rp244.558.114,00 dikurangi dengan pengurangan beban atas pelunasan utang belanja sebesar Rp614.682.113,00, reklasifikasi beban ke aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp3.942.305,00, serta pengurangan beban dari reklasifikasi beban ke aset tidak berwujud sebesar Rp195.935.000,00.
4. Beban Iuran Jaminan/Asuransi tahun 2024 sebesar Rp17.306.945.092,00. Terdapat selisih antara belanja iuran Jaminan/Asuransi dengan beban Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp2.268.800,00. Selisih tersebut merupakan pengakuan utang belanja Barang/Jasa atas Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 4% Bulan Desember 2024 yang belum dibayarkan berdasarkan Berita Acara Hasil Rekonsiliasi dengan BPJS Kesehatan Nomor 900/050/BPKPD/1/2025 dan 260/BA/X-06/0125 tanggal 21 Januari 2025.
5. Beban sewa tanah tahun 2024 sebesar Rp5.000.000,00. Berbeda dengan belanja sewa tanah pada Laporan Realisasi Anggaran yang tidak memiliki realisasi. Beban sewa tanah ini merupakan penggunaan hibah dari PT Bank SulutGo Cabang Molibagu atas pengajuan bantuan kegiatan Bolsel Paragliding Championship and Festival tahun 2024.
6. Beban Sewa Peralatan dan Mesin tahun 2024 sebesar Rp686.945.388,00. Terdapat selisih antara belanja sewa peralatan dan mesin dengan beban sewa peralatan dan mesin sebesar Rp5.140.311,00. Selisih tersebut merupakan penambahan beban dari penggunaan hibah BNPB atas pengajuan bantuan Dana Siap Pakai (DSP) bencana banjir dan tanah longsor tanggal 26 s.d 27 Agustus 2024.
7. Beban Sewa Gedung dan Bangunan tahun 2024 sebesar Rp1.999.631.647,00. Terdapat selisih antara belanja sewa gedung dan bangunan dengan beban sewa gedung dan bangunan sebesar Rp2.781.917,00. Selisih tersebut dipengaruhi oleh penambahan beban berupa beban

dibayar dimuka tahun sebelumnya sebesar Rp92.869.588,00 dengan penurunan beban berupa beban dibayar dimuka tahun 2024 sebesar Rp90.087.671,00.

8. Beban Sewa Aset Tetap Lainnya tahun 2024 sebesar Rp147.009.000,00. Tidak terdapat selisih antara belanja sewa aset tetap lainnya dengan beban sewa aset tetap lainnya tahun 2024.
9. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tidak memiliki beban Jasa Konsultansi Konstruksi tahun 2024. Hal ini berbeda dengan belanja jasa konsultansi konstruksi yang memiliki realisasi sebesar Rp547.678.000,00. Tidak adanya beban Jasa Konsultansi Konstruksi karena adanya penyesuaian pengurangan beban berupa penyesuaian beban ke aset tetap jalan irigasi dan jaringan sebesar Rp448.000.000,00 dan penyesuaian beban ke aset tidak berwujud sebesar Rp99.678.000,00. Hal tersebut disebabkan belanja yang dilaksanakan merupakan belanja modal dan bukan belanja barang dan jasa.
10. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan memiliki beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi selama tahun 2024 sebesar Rp98.762.250,00. Terdapat selisih antara beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi dengan belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebesar Rp1.166.126.300,00. Selisih tersebut disebabkan adanya reklasifikasi beban ke aset tidak berwujud sebesar Rp1.121.993.300,00 dan reklasifikasi beban ke konstruksi dalam pengerjaan (KDP) sebesar Rp44.133.000,00 karena kesalahan penganggaran.
11. Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan tahun 2024 sebesar Rp523.768.000,00. Tidak terdapat selisih antara beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan dengan belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan.
12. Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin tahun 2024 sebesar Rp5.921.678.197,00. Terdapat selisih antara belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin dengan beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp191.457.600,00. Selisih tersebut merupakan penambahan beban dari reklasifikasi aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp111.836.408,00 dan penerimaan hibah dari PT Bank SulutGo Cabang Molibagu atas Dana CSR kegiatan Penyediaan Lampu Jalan di Seputaran Kawasan Ibukota Kabupaten sebesar Rp79.958.592,00, dikurangi dengan pelunasan utang belanja sebesar Rp337.400,00.
13. Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan tahun 2024 sebesar Rp305.058.050,00. Terdapat selisih antara belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan dengan beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp182.684.850,00. Selisih tersebut dipengaruhi oleh penambahan beban berupa penerimaan hibah sebesar Rp29.400.000,00 dan pengurangan beban dari penyesuaian beban ke aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp199.713.000,00 serta pengurangan dari pelunasan utang aset tetap gedung dan bangunan yang dilunasi menggutakan belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp12.371.850,00.
14. Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi tahun 2024 sebesar Rp3.011.981.520,00. Terdapat selisih antara belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi dengan beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp1.133.739.520,00. Selisih tersebut disebabkan adanya penambahan beban dari penyesuaian aset tetap jalan irigasi dan jaringan sebesar Rp1.128.750.070,00 dan penyesuaian pengakuan utang belanja sebesar Rp4.989.450,00.

15. Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah tahun 2024 sebesar Rp57.811.390.409,00. Tidak terdapat selisih antara belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dengan beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
16. Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tahun 2024 sebesar Rp1.420.265.787,00. Tidak terdapat selisih antara belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dengan beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tahun 2024.
17. Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tahun 2024 sebesar Rp30.000.000,00. Tidak terdapat selisih antara belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dengan beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tahun 2024.
18. Beban Barang Ekstrakompatabel tahun 2024 sebesar Rp34.900.200,00. Terdapat selisih antara beban Barang Ekstrakompatabel dengan belanja Barang Ekstrakompatabel karena pada Laporan Realisasi Anggaran tidak terdapat realisasi. Hal ini disebabkan Beban Barang Ekstrakompatabel hanya merupakan reklasifikasi dari aset tetap dibawah minimum kapitalisasi tahun 2024. Adapun beban barang ekstrakompatabel ini merupakan koreksi penambahan beban dari aset tetap peralatan dan mesin.
19. Beban Barang dan Jasa BOS tahun 2024 sebesar Rp7.797.779.673,00. Terdapat selisih antara belanja Barang dan Jasa BOS dengan beban Barang dan Jasa BOS sebesar Rp966.085.664,00. Selisih tersebut disebabkan adanya penambahan beban yang merupakan persediaan awal BOS sebesar Rp53.950.316,00, serta pengurangan beban berupa persediaan akhir BOS sebesar Rp985.035.980,00 dan reklasifikasi beban barang dan jasa BOS ke beban hibah sebesar Rp35.000.000,00.

5.4.2.3. Beban Bunga

Beban bunga merupakan biaya pinjaman yang dibayarkan kepada pihak lainnya atas kegiatan pemberian dana. Sampai dengan tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tidak memperoleh pinjaman dana dari pihak lain, sehingga tidak memiliki beban bunga.

5.4.2.4. Beban Subsidi

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk tahun 2024 memiliki beban subsidi sebesar Rp696.600.000,00. Beban subsidi ini untuk mendukung Gerakan Pangan Murah (GPM). Gerakan Pangan Murah (GPM) merupakan program Pemerintah yang bertujuan membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam hal ini bekerjasama dengan BULOG untuk subsidi beras agar masyarakat mendapatkan harga murah. Tidak terdapat selisih antara beban subsidi dengan belanja subsidi.

5.4.2.5. Beban Hibah

Beban hibah tahun 2024 sebesar Rp33.246.983.172,00. Beban hibah ini terdiri dari Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp2.158.640.000,00, Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp28.658.548.315,00, Beban Hibah Dana BOS sebesar Rp502.641.824,00, Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebesar Rp288.083.033,00, dan Beban Hibah Dana

BOSP sebesar Rp1.639.070.000,00.

Terdapat selisih antara beban hibah dengan belanja hibah sebesar Rp480.968.350,00. Selisih tersebut berasal dari penyesuaian penambahan beban hibah dari aset tetap yang dihibahkan sebesar Rp219.499.000,00, penambahan beban hibah dari koreksi beban barang dan jasa BOS sebesar Rp35.000.000,00, pengurangan beban hibah dari pelunasan utang belanja hibah sebesar Rp98.449.350,00, dan pengurangan beban hibah dari persediaan akhir hibah barang diserahkan sebesar Rp637.018.000,00.

5.4.2.6. Beban Bantuan Sosial

Beban bantuan sosial tahun 2024 sebesar Rp15.977.296.500,00. Beban bantuan sosial ini terdiri dari Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu sebesar Rp12.912.000.000,00, Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat sebesar Rp2.865.296.500,00, dan Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebesar Rp200.000.000,00. Tidak terdapat selisih antara beban bantuan sosial dengan belanja bantuan sosial.

5.4.2.7. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang tahun 2024 sebesar Rp108.758.181,14 yang dapat dirinci sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.98 Beban Penyisihan Piutang

NO	URAIAN	SALDO 2024 Rp	SALDO 2023 Rp
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	3.055.881,15	2.230.687,11
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	813.095,00	763.690,00
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sali	57.172.900,00	63.250.410,00
4	Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	47.716.304,99	39.785.091,51
	JUMLAH	108.758.181,14	106.029.878,62

Sumber : Daftar Saldo Buku Besar Tahun 2024

5.4.2.8. Beban Lain-lain

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk tahun 2024 tidak memiliki beban lain-lain.

5.4.2.9. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2024 sebesar Rp24.907.442.785,20. Rincian beban penyusutan peralatan dan mesin tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.99 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

NO	URAIAN	SALDO 2024 Rp	SALDO 2023 Rp
1	Alat angkutan apung bermotor	272.192.479,00	272.192.479,00
2	Alat angkutan darat bermotor	4.126.942.373,00	4.449.725.103,00
3	Alat angkutan darat tak bermotor	-	3.213.558,00
4	Alat bantu	396.978.794,00	400.844.315,00
5	Alat bengkel bermesin	18.756.280,00	19.354.863,00
6	Alat bengkel tak bermesin	14.319.816,00	14.930.815,00
7	Alat besar darat	381.967.079,00	382.300.409,00
8	Alat kantor	1.078.394.789,00	1.027.512.699,00
9	Alat kedokteran	5.069.215.253,20	4.920.006.418,00
10	Alat kesehatan umum	325.039.893,00	325.039.893,00
11	Alat komunikasi	135.803.198,00	124.561.182,00
12	Alat laboratorium fisika nuklir/elektronika	8.223.499,00	8.223.500,00
13	Alat laboratorium lingkungan hidup	1.441.057,00	1.441.057,00
14	Alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi	1.548.800,00	1.548.800,00
15	Alat pengolahan	53.394.047,00	127.139.972,00
16	Alat peraga praktek sekolah	187.371.290,00	233.861.606,00
17	Alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan	21.867.203,00	21.867.203,00
18	Alat rumah tangga	4.266.668.958,00	3.375.780.989,00
19	Alat studio	448.463.755,00	497.538.601,00
20	Alat ukur	203.649.218,00	222.995.971,00
21	Komputer unit	5.696.598.417,00	6.446.911.335,00
22	Meja dan kursi kerja/rapat pejabat	251.181.353,00	319.211.991,00
23	Peralatan komputer	1.046.614.563,00	1.136.536.947,00
24	Peralatan laboratorium hidrodinamika	14.489.999,00	14.490.000,00
25	Peralatan olah raga	64.708.690,00	124.818.419,00
26	Peralatan pemancaat	710.290.134,00	747.810.911,00
27	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	2.414.250,00	-
28	Senjata api	90.000,00	90.000,00
29	Unit Alat laboratorium	108.653.392,00	141.343.443,00
30	Unit Alat laboratorium kimia nuklir	164.266,00	1.080.932,00
	Total	24.907.442.785,20	25.562.393.411,00

Sumber : Bidang BMD

5.4.2.10. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2024 sebesar Rp9.793.893.662,00 dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.100 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

NO	URAIAN	SALDO 2024 Rp	SALDO 2023 Rp
1	Bangunan gedung tempat kerja	8.886.166.558,00	8.213.617.324,00
2	Bangunan gedung tempat tinggal	473.604.635,00	391.036.177,00
3	Candi/tugu peringatan/prasasti	80.218.940,00	80.218.940,00
4	Tugu/tanda batas	353.903.529,00	321.944.183,00
Total		9.793.893.662,00	9.006.816.624,00

Sumber : Bidang BMD

5.4.2.11. Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2024 sebesar Rp71.767.763.632,00 dapat dirinci sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.101 Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan

NO	URAIAN	SALDO 2024 Rp	SALDO 2023 Rp
1	Bangunan air bersih/air baku	1.083.960.812,00	737.363.587,00
2	Bangunan air irigasi	1.417.529.778,00	1.376.734.285,00
3	Bangunan air kotor	21.441.650,00	18.870.754,00
4	Bangunan pengaliran pasang surut	10.402.940,00	10.402.940,00
5	Bangunan penguatan sungai/pantai & penanggulangan bencana alam	2.819.981.024,00	2.840.091.547,00
6	Bangunan pengembangan rawa dan polder	17.595.120,00	17.595.120,00
7	Bangunan pengembangan sumber air dan air tanah	39.944.000,00	39.944.000,00
8	Instalasi air bersih / air baku	669.916.410,00	669.916.410,00
9	Instalasi air kotor	238.682.568,00	238.682.568,00
10	Instalasi gardu listrik	20.920.241,00	20.920.241,00
11	Instalasi gas	47.166.800,00	47.166.800,00
12	Instalasi pembangkit listrik	38.416.375,00	38.416.375,00
13	Instalasi pemukiman	17.717.188,00	17.717.188,00
14	Instalasi pengolahan sampah	4.655.713.850,00	595.505.100,00
15	Instalasi perikanan	148.285.099,00	148.285.100,00
16	Jalan	58.583.554.010,00	57.787.865.499,00
17	Jaringan air minum	1.058.835.940,00	780.028.167,00
18	Jaringan listrik	2.469.375,00	2.469.375,00
19	Jembatan	875.430.452,00	679.502.905,00
Total		71.767.763.632,00	66.067.477.961,00

Sumber : Bidang BMD

5.4.2.12. Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk tahun 2024 sebesar Rp5.518.331,00. Beban penyusutan ini merupakan beban penyusutan atas aset tetap lainnya berupa Barang Bercorak Kesenian.

5.4.2.13. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud tahun 2024 sebesar Rp567.432.549,73. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud ini merupakan Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud berupa Software.

5.4.2.14. Beban Penyusutan Properti Investasi

Beban penyusutan properti investasi pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk tahun 2024 sebesar Rp48.076.600,00. Tidak terjadi penambahan jumlah properti investasi di tahun 2024, sehingga beban yang ditimbulkan masih sama dengan tahun sebelumnya.

5.4.2.15. Beban Bagi Hasil

Beban Bagi Hasil tahun 2024 sebesar Rp587.031.875,00. Beban bagi hasil ini merupakan beban bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Desa. Tidak terdapat selisih antara belanja bagi hasil dengan beban bagi hasil tahun 2024.

5.4.2.16. Beban Bantuan Keuangan

Beban bantuan keuangan tahun 2024 sebesar Rp39.944.324.550,00. Beban bantuan keuangan ini merupakan realisasi dari Alokasi Dana Desa yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024.

Terdapat selisih antara belanja bantuan keuangan dengan beban bantuan keuangan sebesar Rp62.285.601.000,00. Selisih tersebut merupakan belanja dana desa yang hanya dicatat pada belanja bantuan keuangan di Laporan Realisasi Anggaran dan bukan merupakan beban Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

5.4.3. Surplus/Defisit dari Operasi

Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan. Sedangkan defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan. Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan memperoleh defisit dari kegiatan operasi sebesar Rp45.226.520.214,48. Defisit ini diperoleh dari pendapatan -LO sebesar Rp573.277.360.924,49 dikurangi dengan beban operasi selama tahun 2024 sebesar Rp618.503.881.138,97.

5.4.4. Kegiatan Non Operasional

Kegiatan Non Operasional merupakan pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk tahun 2024 memiliki kegiatan non operasional berupa penjualan aset tetap yang menghasilkan Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO sebesar Rp754.576.996,00 dan Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO sebesar Rp21.854.398,00 sehingga menghasilkan surplus dari kegiatan non operasional bersih sebesar Rp732.722.598,00. Jumlah tersebut merupakan nilai

buku atas aset yang dihapuskan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 494 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Tahun 2024.

5.4.5. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa

Surplus/defisit sebelum pos luar biasa merupakan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2024 mengalami defisit sebelum pos luar biasa sebesar Rp44.493.797.616,48 yang diperoleh dari defisit kegiatan operasional sebesar Rp45.226.520.214,48 ditambah dengan surplus kegiatan non operasional sebesar Rp732.722.598,00.

5.4.6. Pos Luar Biasa

Pos luar biasa menampung kenaikan atau penurunan Ekuitas akibat peristiwa luar biasa yaitu kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. Pos luar biasa terdiri dari pendapatan luar biasa dan beban luar biasa. Suatu transaksi digolongkan sebagai kejadian luar biasa apabila memenuhi kondisi kejadian yang tidak dapat diprediksi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan memiliki realisasi Pos Luar Biasa pada Beban Luar Biasa tahun 2024 sebesar Rp1.683.121.574,00. Beban luar biasa ini merupakan uang duka ahli waris bagi keluarga tidak mampu sebesar Rp582.000.000,00, pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor sebesar Rp1.079.945.000,00, dan utang jangka pendek lainnya atas kesalahan pembayaran pajak ke kas daerah pada tanggal 30 Desember 2025 yang seharusnya dibayarkan ke kas negara sesuai dengan surat Sangadi Desa Iligon Nomor 01/SPPD/DI/05-2009/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 sebesar Rp21.176.574,00.

5.4.7. Surplus/Defisit – LO

Surplus/Defisit – LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan pos luar biasa. Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengalami Defisit – LO sebesar Rp46.176.919.190,48. Saldo defisit – LO ini kemudian mengurangi ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2024. Adapun perhitungan surplus/defisit – LO adalah sebagai berikut:

Pendapatan - LO	573.277.360.924,49	
Beban	(618.503.881.138,97)	
Defisit dari Operasi		(45.226.520.214,48)
Surplus dari Kegiatan Non Operasional		732.722.598,00
Defisit Sebelum Pos Luar Biasa		(44.493.797.616,48)
Defisit dari Pos Luar Biasa		(1.683.121.574,00)
Defisit - LO		(46.176.919.190,48)

5.5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah. Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu.

5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tanpa mengandalkan sumber dana dari luar.

Tabel 5.102 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

URAIAN	2024 Rp	2023 Rp
Arus Kas Masuk	628.051.643.590,11	550.993.406.926,21
Arus Kas Keluar	564.663.466.111,15	488.914.078.185,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	63.388.177.478,96	62.079.328.741,21

Sumber: Laporan Arus Kas Tahun 2024

Jumlah saldo arus kas bersih dari aktivitas operasi per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp63.388.177.478,96. Saldo tersebut menunjukkan terjadi kenaikan kas bersih sebesar Rp1.308.848.737,75 jika dibandingkan dengan tahun 2023.

Arus kas bersih dari aktivitas operasi berasal dari selisih antara arus kas masuk dari pendapatan operasi (pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, pendapatan transfer pemerintah pusat, pendapatan transfer antar daerah, pendapatan hibah dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan) dengan arus kas keluar dari belanja operasi (belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja tidak terduga, belanja bagi hasil, dan belanja bantuan keuangan ke desa). Adanya selisih positif antara arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas operasi menunjukkan bahwa belanja operasi mampu dibiayai oleh pendapatan operasi yang diperoleh selama tahun 2024.

Jika dibandingkan dengan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2024, terdapat selisih arus kas masuk dari aktivitas operasi – LAK dengan pendapatan – LRA sebesar Rp1.179.072.800,00 yang disebabkan oleh pendapatan yang bersumber dari penjualan peralatan dan mesin yang merupakan arus kas masuk dari aktivitas investasi bukan dari aktivitas operasi. Adapun rincian selisih antara arus kas masuk dari aktivitas operasi - LAK dengan pendapatan – LRA dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.103 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi dan Pendapatan – LRA

NO	URAIAN	LRA Rp	LAK Rp	SELISIH Rp
1	Pajak Daerah	6.073.470.873,00	6.073.470.873,00	-
2	Retribusi Daerah	11.273.645.225,00	11.273.645.225,00	-
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	640.020.357,00	640.020.357,00	-
4	Lain-lain PAD yang Sbb.	4.211.304.470,11	3.032.231.670,11	(1.179.072.800,00)
5	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	586.294.368.350,00	586.294.368.350,00	-
6	Pendapatan Transfer Antar Daerah	16.566.536.622,00	16.566.536.622,00	-
7	Pendapatan Hibah	500.000,00	500.000,00	-
8	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4.170.870.493,00	4.170.870.493,00	-
JUMLAH		629.230.716.390,11	628.051.643.590,11	(1.179.072.800,00)

Sumber: LAK dan LRA Tahun 2024

Selain terdapat selisih antara arus kas masuk dari aktivitas operasi – LAK dengan pendapatan – LRA, terdapat juga selisih antara arus kas keluar dari aktivitas operasi dengan belanja operasi - LRA sebesar Rp104.478.902.425,00. Hal tersebut disebabkan karena belanja tidak terduga, belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan tidak diklasifikasikan sebagai belanja operasi pada Laporan Realisasi Anggaran. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.104 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi - LAK dan Belanja Operasi – LRA

NO	URAIAN	LRA Rp	LAK Rp	SELISIH Rp
1	Belanja Pegawai	225.670.587.199,00	225.670.587.199,00	-
2	Belanja Barang dan Jasa	184.112.128.465,15	184.112.128.465,15	-
3	Belanja Subsidi	696.600.000,00	696.600.000,00	-
4	Belanja Hibah	33.727.951.522,00	33.727.951.522,00	-
5	Belanja Bantuan Sosial	15.977.296.500,00	15.977.296.500,00	-
6	Belanja Tidak Terduga	-	1.661.945.000,00	1.661.945.000,00
7	Belanja Bagi Hasil	-	587.031.875,00	587.031.875,00
8	Belanja Bantuan Keuangan	-	102.229.925.550,00	102.229.925.550,00
JUMLAH		480.184.563.686,15	564.663.466.111,15	104.478.902.425,00

Sumber: LAK dan LRA Tahun 2024

5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Tabel 5.105 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

URAIAN	2024 Rp	2023 Rp
Arus Kas Masuk	14.358.219.600,00	1.820.853.200,00
Arus Kas Keluar	98.714.591.985,00	82.686.425.871,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(84.356.372.385,00)	(80.865.572.671,00)

Sumber : Laporan Arus Kas Tahun 2024

Arus kas bersih dari aktivitas investasi diperoleh dari selisih antara arus kas masuk dari pendapatan penjualan aset tetap, penjualan aset lainnya, pencairan dana cadangan, penerimaan dari investasi dan penjualan investasi dalam bentuk sekuritas, dengan arus kas keluar berupa perolehan aset tetap, perolehan aset lainnya, pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah, dan pembelian investasi dalam bentuk sekuritas. Pada tahun 2024 terdapat arus kas masuk dari pencairan dana cadangan sebesar Rp13.179.146.800,00 dan penjualan aset tetap berupa peralatan dan mesin sebesar Rp1.179.072.800,00 akan tetapi lebih kecil dari arus kas keluar sebesar Rp98.714.591.985,00 sehingga menghasilkan arus kas bersih dari aktivitas investasi minus sebesar Rp84.356.372.385,00. Hal ini menunjukkan bahwa arus kas keluar berupa belanja modal tidak dapat dibiayai oleh arus kas masuk dari aktivitas Investasi.

Jumlah saldo arus kas keluar dari aktivitas investasi per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp98.714.591.985,00. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi kenaikan sebesar Rp16.028.166.114,00. Tidak terdapat selisih antara perolehan aset berupa Belanja Modal – LRA dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi – LAK. Adapun rincian arus kas keluar dari aktivitas investasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.106 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi – LAK dan Belanja Modal – LRA

NO	URAIAN	LRA Rp	LAK Rp	SELISIH Rp
1	Belanja Modal Tanah	-	-	-
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.610.106.510,00	14.610.106.510,00	-
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	12.753.623.470,00	12.753.623.470,00	-
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	70.346.498.755,00	70.346.498.755,00	-
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	114.339.000,00	114.339.000,00	-
6	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	890.024.250,00	890.024.250,00	-
7	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-
8	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-
	JUMLAH	98.714.591.985,00	98.714.591.985,00	-

Sumber : LAK dan LRA Tahun 2024

5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Tabel 5.107 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

URAIAN	2024 Rp	2023 Rp
Arus Kas Masuk	40.061.436.906,23	34.926.344.019,00
Arus Kas Keluar	40.058.137.380,23	35.990.746.580,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	3.299.526,00	(1.064.402.561,00)

Sumber : Laporan Arus Kas Tahun 2024

Arus kas masuk dari aktivitas transitoris berupa penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) BUD selama tahun 2024 sebesar Rp40.061.436.906,23. Sedangkan arus kas keluar dari aktivitas transitoris sebesar Rp40.058.137.380,23 diperoleh dari arus kas keluar yang merupakan pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dari BUD selama tahun 2024 sebesar Rp40.368.775.617,23 dikurangi koreksi SiLPA sebesar Rp310.638.237,00 yang merupakan saldo kas pada rekening Dana BOP Paud TK Negeri Pembina atas penerimaan jasa giro tahun 2021 sebesar Rp12.072,00 dan tahun 2022 sebesar Rp4.123,00 yang belum dicatat pada tahun sebelumnya dan belum disetor sampai dengan 31 Desember 2024, reklasifikasi utang PFK PPh 21 ke utang belanja pegawai atas pemungutan PPh 21 tahun 2018 s.d 2020 yang telah dikompensasikan pada kelebihan pembayaran PPh 21 berdasarkan LHP BPK Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp199.033.460,00, serta Koreksi SiLPA sebesar Rp111.588.582,00 atas pemotongan iuran Jaminan Kesehatan PTT/THL tahun 2021 yang telah dikompensasi atas kelebihan pembayaran PTT/THL yang tidak terdaftar sebagai peserta tahun 2020 dan tidak perlu dibayarkan ke BPJS berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi PPU 2021 serta Surat Konfirmasi dari BPJS.

5.5.4. Saldo Akhir Kas

Tabel 5.108 Perhitungan Saldo Akhir Kas

URAIAN	2024 Rp	2023 Rp
Kenalkan / (Penurunan) Kas	(20.964.895.380,04)	(19.850.646.490,79)
Saldo Awal Kas	45.986.003.695,51	65.836.650.186,30
Saldo Akhir Kas	25.021.108.315,47	45.986.003.695,51
Saldo Akhir Kas Terdiri Dari:		
Kas di Kas Daerah	25.934.782.662,18	44.523.090.013,51
Kas di Bendahara Penerimaan	43.964.550,00	6.872.500,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas di BLUD	-	-
Kas Dana BOSP	7.377.981,00	6.631.712,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	41.654.872,29	97.359.674,00
Kas Dana BOK Puskesmas	992.828.250,00	1.351.912.296,00
Kas Lainnya	500.000,00	157.500,00
Setara Kas	-	-

Sumber : Laporan Arus Kas Tahun 2024

Penurunan Kas sebesar Rp20.964.895.380,04 diperoleh dari selisih antara arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp63.388.177.478,96, arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar minus Rp84.356.372.385,00 dan arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar Rp3.299.526,00. Saldo awal kas tahun 2024 sebesar Rp45.986.003.695,51 merupakan Saldo Akhir Kas tahun 2023 yang terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas Dana BOSP, Kas Dana Kapitasi pada FKTP, Kas Dana BOK Puskesmas dan Kas Lainnya, sedangkan saldo akhir kas per 31 Desember 2024 sebesar Rp25.021.108.315,47 diperoleh dari saldo akhir kas tahun sebelumnya sebesar Rp45.986.003.695,51 dikurangi dengan penurunan kas tahun 2024 sebesar Rp20.964.895.380,04. Saldo akhir kas pada Laporan Arus Kas ini sama dengan saldo kas pada Neraca Per 31 Desember 2024.

5.6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas akhir tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebesar Rp1.091.582.315.578,39. Ringkasan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.109 Perubahan Ekuitas

URAIAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	1.137.063.931.898,81	1.162.309.682.897,06
SURPLUS/DEFISIT-LO	(46.176.919.190,48)	(25.302.733.674,73)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEDAKAK/KEBALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan		-
Selisih Revaluasi Aset Tetap		-
Koreksi ekuitas lainnya	695.302.870,06	(1.032.987.323,59)
EKUITAS AKHIR	1.091.582.315.578,39	1.137.063.931.898,81

Sumber : Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2024

5.6.1. Ekuitas Awal

Saldo awal ekuitas sebesar Rp1.137.063.931.898,81 merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2023.

5.6.2. Surplus/Defisit -LO

Defisit – LO sebesar Rp46.176.919.190,48 merupakan defisit atas kegiatan operasional (basis akrual) yang mengurangi nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2024.

5.6.3. Koreksi Nilai Persediaan

Tidak terdapat koreksi nilai persediaan pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk tahun 2024.

5.6.4. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada tahun 2024 tidak melakukan revaluasi terhadap aset tetap sehingga tidak terdapat selisih nilai revaluasi aset tetap.

5.6.5. Koreksi Ekuitas Lainnya

Koreksi ekuitas lainnya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tercatat sebesar Rp695.302.870,06. Koreksi ekuitas lainnya berasal dari penambahan sebesar Rp695.379.982,56 dan pengurangan sebesar Rp77.112,50. Adapun rincian penambahan/pengurangan koreksi ekuitas lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Koreksi ekuitas – Kas sebesar Rp16.195,00. Koreksi ini merupakan koreksi ekuitas atas penerimaan jasa giro pada rekening dana BOP Paud TK Negeri Pembina tahun 2021 sebesar Rp12.072,00 dan tahun 2022 sebesar Rp4.123,00 yang belum dicatat tahun sebelumnya dan belum disetor ke kas daerah per 31 Desember 2024.
2. Koreksi ekuitas – Piutang sebesar Rp1.837.500,00. Koreksi ekuitas ini diperoleh dari pengurangan atas piutang jasa boga/katering dan sejenisnya atas double catat piutang tahun 2023 sebesar Rp67.500,00 serta penambahan sebesar Rp1.905.000,00 yang merupakan

koreksi atas piutang yang tidak dicatat tahun 2022 sebesar Rp715.000,00 dan piutang yang tidak dicatat tahun 2023 sebesar Rp1.190.000,00.

3. Koreksi ekuitas - Aset Tetap sebesar Rp31.590.000,00. Koreksi ini merupakan koreksi ekuitas atas penambahan aset tetap berupa tanah untuk pembangunan Puskesmas Dumagin Desa Dumagin A seluas 877,5 m² yang berasal dari hibah sesuai surat keterangan hibah tanggal 20 Februari 2012 yang belum dicatat.
4. Koreksi ekuitas - Aset Lainnya sebesar Rp105.481.867,00. Koreksi ini diperoleh dari selisih antara penambahan atas penyesuaian LHP BPK tahun 2023 sebesar Rp329.018.041,38 dan pengurangan atas penyeteroran kerugian sebesar Rp223.536.174,38. Penyeteroran kerugian ini terdiri dari penyeteroran kerugian atas Laporan Keuangan tahun anggaran 2009 s.d 2015 dan LHP APIP atas perjalanan dinas sebesar Rp12.864.300,00, penyeteroran atas Laporan Keuangan tahun 2018 sebesar Rp200.000,00, penyeteroran atas Laporan Keuangan tahun 2022 sebesar Rp300.000,00 dan penyeteroran atas Laporan Keuangan tahun 2023 sebesar Rp210.171.874,38.
5. Koreksi ekuitas - Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp556.454.420,56. Koreksi Ekuitas ini terdiri dari koreksi atas utang jasa tenaga kesehatan tahun 2023 pada RSUD sebesar Rp433.018.000,00 yang tidak lagi ditagih, utang jasa tenaga kesehatan tahun 2023 Puskesmas Dumagin sebesar Rp1.860.000,00 yang merupakan bagian Pemerintah Daerah berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 10% yang tidak lagi ditagih namun dicatat sebagai utang tahun 2023, utang jasa tenaga kesehatan tahun 2023 dana Kapitasi Puskesmas Milangodaa sebesar Rp0,56 yang tidak lagi ditagih karena pada Aplikasi SIPD tidak dapat menampilkan dua angka dibelakang koma, koreksi utang belanja pegawai tahun 2023 atas kesalahan perhitungan Aplikasi SIMGAJI TASPEN (*Error Aplikasi*) sebesar Rp238.438,00, koreksi atas pemotongan iuran Jaminan Kesehatan PTT/THL tahun 2021 yang telah dikompensasi atas kelebihan pembayaran PTT/THL yang tidak terdaftar sebagai peserta tahun 2020 dan tidak perlu dibayarkan ke BPJS berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi PPU 2021 serta Surat Konfirmasi BPJS sebesar Rp111.588.582,00, serta koreksi atas utang jangka pendek lainnya berupa pengembalian kelebihan pembayaran tahun 2010 s.d 2012 sebanyak 14 orang PNSD berdasarkan surat konfirmasi tidak akan mengajukan permintaan pengembalian sebesar Rp9.749.400,00.
6. Pengurangan koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp77.112,50 merupakan Koreksi ekuitas - Penyisihan Piutang. Koreksi ini terdiri dari pengurangan sebesar Rp337,50 yang merupakan koreksi atas piutang yang double catat tahun 2023, serta penambahan sebesar Rp77.450,00 merupakan koreksi atas penyisihan piutang yang tidak dicatat tahun 2022 sebesar Rp71.500 dan tahun 2023 sebesar Rp5.950,00.

Adapun mutasi penambahan dan pengurangan Koreksi Ekuitas Lainnya dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.110 Mutasi Penambahan dan Pengurangan Koreksi Ekuitas Lainnya

URAIAN	SALDO
Penambahan :	
Koreksi ekuitas - Kas	16.195,00
Koreksi ekuitas - Piutang	1.837.500,00
Koreksi ekuitas - Aset Tetap	31.590.000,00
Koreksi ekuitas - Aset Lainnya	105.481.867,00
Koreksi ekuitas - Kewajiban Jangka Pendek	556.454.420,56
Jumlah Penambahan	695.379.982,56
Pengurangan :	
Koreksi ekuitas - Penyisihan Piutang	77.112,50
Jumlah Pengurangan	77.112,50
Koreksi Ekuitas Lainnya	695.302.870,06

Sumber: Daftar Saldo Buku Besar Tahun 2024

5.6.6. Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir dalam Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.091.582.315.578,39. Jika dibandingkan dengan jumlah ekuitas tahun sebelumnya, maka tahun 2024 terjadi penurunan jumlah ekuitas sebesar Rp45.481.616.320,42 yang disebabkan oleh defisit kegiatan operasi sebesar Rp46.176.919.190,48 ditambah koreksi ekuitas lainnya tahun 2024 sebesar Rp695.302.870,06. Saldo akhir Ekuitas ini dicatat dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan per 31 Desember 2024.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Domisili dan Bentuk Hukum

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Bolaang Mongondow yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara. Secara geografis, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan terletak di antara 00°22'545" Lintang Utara dan 123°28'59,2" Bujur Timur. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mempunyai luas wilayah daratan sebesar 1.932,30 km² dan panjang garis pantai yang membentang sepanjang 294 km dan Wilayah Kawasan Lindung seluas 168.910,35 km². Sesuai dengan Undang-Undang tersebut, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan beribu kota di Desa Molibagu, akan tetapi pemerintahan dipusatkan di Desa Tabilaa Kecamatan Bolaang Uki.

Manajemen pemerintahan masa bakti 2010-2015 dipimpin oleh Bupati H. Herson Mayulu, S.IP dan Wakil Bupati Drs. Samir Badu, M.Pd (Alm.) yang terpilih melalui Pilkada tahun 2010. Pada tahun 2012 Drs. Samir Badu, M.Pd meninggal dunia sehingga jabatan Wakil Bupati digantikan oleh Drs. Sjamsul Bahri Badu sesuai ketentuan yang berlaku, serta pada tanggal 21 Juni 2013 dilakukan pelantikan oleh Gubernur Sulawesi Utara di Molibagu. Pada bulan Desember 2015 dilakukan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk masa bakti 2015 – 2020, pada periode ini H. Herson Mayulu S.IP kembali terpilih sebagai Bupati bersama H. Iskandar Kamaru, S.Pt sebagai Wakil Bupati.

Pada tanggal 03 Agustus 2018 DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menggelar Sidang Paripurna dalam rangka pengunduran diri dan usulan pengesahan pemberhentian Bupati Bolaang Mongondow Selatan H. Herson Mayulu S.IP. Bupati periode 2015-2020 tersebut mengajukan pengunduran diri dengan alasan mengikuti pemilihan Calon Legislatif DPR RI. Selanjutnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan, Gubernur Sulawesi Utara melantik Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan H. Iskandar Kamaru, S.Pt sebagai Bupati pada tanggal 01 Oktober 2018. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang kekosongan jabatan kepala daerah, kemudian terpilih Wakil Bupati melalui proses pemilihan di DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Bapak Dedi Abdul Hamid terpilih menjadi Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan meraih 18 suara dari 20 jumlah anggota DPRD. Selanjutnya pada tanggal 23 April 2019 Gubernur Sulawesi Utara melantik Bapak Dedi Abdul Hamid sebagai Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan. Masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati ini berakhir pada tanggal 17 Februari 2021.

Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020, Bapak H. Iskandar Kamaru, S.Pt., M.Si dan Bapak Dedi Abdul Hamid terpilih kembali sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan periode 2021-2024 dan resmi dilantik pada tanggal 26 Februari 2021 oleh Gubernur Sulawesi Utara di Manado. Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024 Bapak H. Iskandar Kamaru, S.Pt., M.Si dan Bapak Dedi Abdul Hamid terpilih kembali untuk periode masa jabatan tahun 2025-2030 dan resmi dilantik oleh Presiden RI pada tanggal 20 Februari 2025.

6.2. Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok

Sifat operasi dan kegiatan pokok Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintah konkuren yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Urusan pemerintahan wajib terbagi menjadi dua yaitu urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
6. Sosial.

Urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :

1. Tenaga kerja;
2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. Pangan;
4. Pertanahan;
5. Lingkungan hidup;
6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. Perhubungan;
10. Komunikasi dan informatika;
11. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
12. Penanaman modal;
13. Kepemudaan dan olah raga;
14. Statistik;
15. Persandian;
16. Kebudayaan;
17. Perpustakaan; dan
18. Kearsipan.

Urusan pemerintah pilihan meliputi :

1. Kelautan dan perikanan;
2. Pariwisata;
3. Pertanian;
4. Energi dan sumber daya mineral;
5. Perdagangan;
6. Perindustrian; dan
7. Transmigrasi.

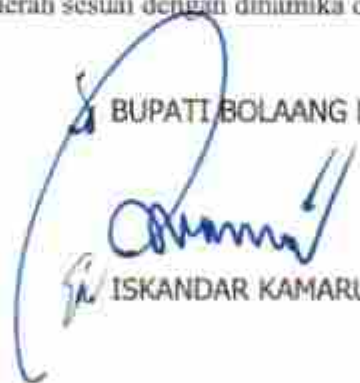
6.3. Ketentuan Perundang-undangan yang Melandasi Kegiatan Operasional

Landasan utama penyelenggaraan kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berdasarkan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Pelaksanaan kegiatan operasional tahun 2024 didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 66 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Di samping itu, adanya beberapa Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang Pendapatan Asli Daerah, yang menjadi dasar pijakan Pemerintah didalam melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

BAB VII P E N U T U P

Laporan keuangan pemerintah daerah ini merupakan hasil akhir dari suatu proses akuntansi yang memberikan gambaran tentang keadaan posisi keuangan, hasil yang diterima, serta perubahan dalam posisi keuangan Pemerintah Daerah. Laporan Keuangan ini disusun sebagai upaya konkret dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang bahwa diharuskan bagi setiap pengelola keuangan negara untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menegaskan atas pelaksanaan APBD, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan dan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Keuangan BUMD yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah harus mencerminkan adanya kemandirian entitas, dimana pemerintah daerah sebagai entitas pelapor mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan. Laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami sangat mutlak dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan. Di samping itu, laporan keuangan yang baik dan dapat dipercaya juga memudahkan pengukuran sejauh mana kinerja pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan dinamika dan tuntutan masyarakat.



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
ISKANDAR KAMARU



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Tahun Anggaran 2024
Nomor : 1 Tahun 2025
Tanggal : 4 Agustus 2025

NO	SKPD	JENIS PIUTANG	SALDO AWAL PIUTANG	PENAMBAHAN PIUTANG	PENGURANGAN PIUTANG	SALDO AKHIR PIUTANG
1	2	3	4	5	6	7 = 4 + 5 - 6
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Piutang Pajak Hotel	405.000,00	7.630.000,00	-	8.035.000,00
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Piutang Pajak Restoran	153.994.884,00	7.672.354,00	140.534.984,00	21.132.254,00
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Piutang Pajak Reklame	1.286.475,00	5.717.400,00	640.500,00	6.363.375,00
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Piutang Pajak Penerangan Jalan	148.815.466,00	171.166.324,00	148.815.466,00	171.166.324,00
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.718.470,00	19.094.070,00	1.470.610,00	19.341.930,00
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	882.558.064,00	-	4.159.662,00	878.398.402,00
7	Dinas Perindustrian	Piutang Retribusi Jasa Umum	22.947.500,00	19.007.000,00	7.077.000,00	34.877.500,00
8	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	276.046.000,00	39.692.000,00	-	315.738.000,00
9	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Piutang Pendapatan dari Pengembalian	24.570.000,00	26.340.000,00	24.570.000,00	26.340.000,00
10	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Piutang Bagi Hasil	7.957.018.300,00	9.543.260.996,00	7.957.018.300,00	9.543.260.996,00
JUMLAH			9.469.360.159,00	9.839.580.144,00	8.284.286.522,00	11.024.653.781,00

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ISKANDAR KAMARU

Lampiran D : Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
 Tahun Anggaran 2024
 Nomor : 1 Tahun 2025
 Tanggal : 4 Agustus 2025



**PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
 TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	JENIS PIUTANG	JUMLAH PIUTANG	JUMLAH PENYISIHAN	JUMLAH PIUTANG BERSIH
1	2	3	4	5
1	Piutang Pajak Hotel	8.035.000,00	118.650,00	7.916.350,00
2	Piutang Pajak Restoran	21.132.254,00	2.609.216,77	18.523.037,23
3	Piutang Pajak Reklame	6.363.375,00	93.184,50	6.270.190,50
4	Piutang Pajak Penerangan Jalan	171.166.324,00	855.831,62	170.310.492,38
5	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	19.341.930,00	233.306,35	19.108.623,65
6	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	878.398.402,00	877.841.543,20	556.858,80
8	Piutang Retribusi Jasa Umum	34.877.500,00	1.682.085,00	33.195.415,00
9	Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	315.738.000,00	180.311.660,00	135.426.340,00
10	Piutang Pendapatan dari Pengembalian	26.340.000,00	131.700,00	26.208.300,00
11	Piutang Bagi Hasil	9.543.260.996,00	47.716.304,99	9.495.544.691,01
	JUMLAH	11.024.653.781,00	1.111.593.482,43	9.913.060.298,57

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ISKANDAR KAMARU

Lampiran X : Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Tahun Anggaran 2024
Nomor : 1 Tahun 2025
Tanggal : 4 Agustus 2025



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	SKPD	JUMLAH DANA BERGULIR	JUMLAH PENYISIHAN DANA BERGULIR	JUMLAH DANA BERGULIR BERSIH
	JUMLAH			

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ISKANDAR KAMARU

Lampiran XI : Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Tahun Anggaran 2024
Nomor : 1 Tahun 2025
Tanggal : 4 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024



No.	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/Lembaga/ Pihak Ketiga	Dasar Hukum penyertaan	Bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Jumlah Penyertaan Modal Daerah	Jumlah Modal yang disertakan sampai dengan awal tahun	Penyertaan Modal tahun ini	Jumlah modal yang disertakan sampai dengan akhir tahun ini	Sisa Modal yang belum disertakan	Hasil Penyertaan Modal daerah tahun ini	Jumlah Modal yang diterima kembali tahun ini	Jumlah Sisa Modal yang disertakan sampai dengan tahun ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 + 8	10 = 6 - 9	11	12	13 = 9 - 12
1	2013	PT. BANK SULUTGO	Penda 1/2013	Pembelian Saham	50.000.000.000,00	4.487.034.100,00	-	4.487.034.100,00	45.512.965.900,00	586.354.211,00	-	4.487.034.100,00

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ISKANDAR KAMARU

Lampiran XII : Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Tahun Anggaran 2024

Nomor : 1 Tahun 2025
Tanggal : 4 Agustus 2025



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	SKPD	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 - 5
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	195.940.383.444,12	13.051.690.651,00	4.033.648.905,30	204.958.425.189,82
2	DINAS KESEHATAN	173.287.206.975,10	13.543.905.479,00	3.232.506.619,64	183.598.605.834,46
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	787.757.891.075,21	67.214.622.425,00	6.700.660.802,09	848.271.852.698,12
	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	779.755.437,00	15.811.791.612,60	7.710.216.688,00	8.881.330.361,60
4	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	3.224.041.610,00	-	-	3.224.041.610,00
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	10.301.174.662,00	-	-	10.301.174.662,00
6	DINAS SOSIAL	379.927.256,26	22.500.000,00	-	402.427.256,26
	DINAS KETAHANAN PANGAN	99.613.000,00	-	-	99.613.000,00
7	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	16.693.108.489,00	7.360.406.000,00	294.924.000,00	23.758.590.489,00
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.063.406.141,00	87.100.000,00	-	1.150.506.141,00
9	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3.842.236.501,00	46.545.000,00	-	3.888.781.501,00
10	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5.143.714.643,32	812.285.000,00	16.457.000,00	5.939.542.643,32
11	DINAS PERHUBUNGAN	8.924.140.317,00	28.971.000,00	-	8.953.111.317,00
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.834.159.411,00	-	-	5.834.159.411,00
	DINAS KOPERASI DAN UKM, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	121.586.360,00	73.158.000,00	-	194.744.360,00
13	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.437.827.451,00	358.342.000,00	4.690.000,00	4.791.479.451,00
14	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	8.099.625.545,99	131.673.900,00	-	8.231.299.445,99
15	DINAS PERPUSTAKAAN	1.212.532.856,00	21.367.500,00	-	1.233.900.356,00
16	DINAS PERIKANAN	15.153.839.537,00	-	-	15.153.839.537,00
17	DINAS PARIWISATA	5.903.259.903,98	42.656.000,00	-	5.945.915.903,98
18	DINAS PERTANIAN	31.071.786.780,00	-	-	31.071.786.780,00

No.	SKPD	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 - 5
19	DINAS PERINDUSTRIAN	50.108.410.146,00	253.123.000,00	532.130.009,00	49.829.403.137,00
20	SEKRETARIAT DAERAH	90.997.185.887,00	2.931.920.297,00	227.072.970,00	93.702.032.414,00
21	INSPEKTORAT DAERAH	1.007.493.186,00	189.204.325,00	-	1.196.697.511,00
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	8.704.511.199,00	183.647.000,00	-	8.888.158.199,00
23	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	(472.920.311.691,37)	62.144.274,00	106.497.413.184,20	(579.355.580.601,57)
24	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	4.117.760.643,00	23.330.000,00	-	4.141.090.643,00
25	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	18.915.140.518,00	3.149.217.802,00	1.291.465.200,00	20.772.893.120,00
26	KECAMATAN POSIGADAN	3.160.492.802,11	-	-	3.160.492.802,11
27	KECAMATAN BOLAANG UKI	2.848.292.000,15	-	-	2.848.292.000,15
28	KECAMATAN PINOLOSIAN	3.728.670.539,00	7.770.000,00	-	3.736.440.539,00
29	KECAMATAN PINOLOSIAN TENGAH	2.065.244.331,00	7.000.000,00	-	2.072.244.331,00
30	KECAMATAN PINOLOSIAN TIMUR	2.953.570.051,00	-	-	2.953.570.051,00
31	KECAMATAN HELUMO	2.343.921.894,00	26.510.500,00	791.500,00	2.369.640.894,00
32	KECAMATAN TOMINI	2.115.945.036,00	-	-	2.115.945.036,00
33	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	413.089.852,00	-	-	413.089.852,00
	JUMLAH	997.830.632.988,87	125.440.881.765,60	130.541.976.878,23	992.729.537.876,24

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ISKANDAR KAMARU

Lampiran XIII : Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Tahun Anggaran 2024

Nomor : 1 Tahun 2025
Tanggal : 4 Agustus 2025



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	URAIAN	NILAI ASET TETAP PER 31 DESEMBER 2023	MUTASI		NILAI ASET TETAP PER 31 DESEMBER 2024
			TAMBAH	KURANG	
1.	Tanah	20.916.860.295,00	31.590.000,00	-	20.948.450.295,00
2.	Peralatan dan Mesin	276.314.835.571,65	16.324.305.740,00	2.097.262.367,00	290.541.878.944,65
3.	Gedung dan Bangunan	496.777.962.231,63	14.579.695.420,00	7.123.471.275,30	504.234.186.376,33
4.	Jalan, Irigasi dan Instalasi	1.049.207.042.544,21	80.059.040.205,00	13.489.596.959,89	1.115.776.485.789,32
5.	Aset Tetap Lainnya	13.194.308.664,00	114.339.000,00	114.339.000,00	13.194.308.664,00
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	21.084.292.205,00	13.394.316.624,60	1.240.094.091,84	33.238.514.737,76
7.	Akumulasi Penyusutan	(879.664.668.522,62)	935.000.002,00	106.474.618.410,20	(985.204.286.930,82)
JUMLAH		997.830.632.988,87	125.438.286.991,60	130.539.382.104,23	992.729.537.876,24

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ISKANDAR KAMARU

Lampiran XIV : Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Tahun Anggaran 2024

Nomor : 1 Tahun 2025
Tanggal : 4 Agustus 2025



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN
PER 31 DESEMBER 2024

NO.	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI								BERKURANG	BERKURANG	SALDO PER 31 DESEMBER 2024	
			BERTAMBAH				BERKURANG							
			ASSET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRRIGASI DAN JALINAN	PERALATAN DAN MESIN	ASSET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRRIGASI DAN JALINAN	PERALATAN DAN MESIN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 2 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 - 9 - 10 - 11 - 12		
1.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	850.505.000,00	-	1.028.310.000,00	-	-	-	-	-	850.505.000,00	-	-	-	1.028.310.000,00
2.	DINAS KESEHATAN	-	-	3.310.757.230,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.310.757.230,36
3.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	10.900.143.100,00	-	489.553.000,00	593.135.500,00	-	-	-	-	-	297.865.000,00	-	-	11.685.168.000,00
4.	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANJAMAN	-	-	-	7.891.290.802,40	-	-	-	-	-	-	-	-	7.891.290.802,40
5.	SATUAN POLISE RAMONG PRAJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	DINAS SOSIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	DINAS KETAHANAN PANGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	54.789.000,00	-	-	44.133.000,00	-	-	-	-	-	54.789.000,00	-	-	44.133.000,00
10.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PERUMPAH DAN ISI INKLUSI ANAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	DINAS KOPERASI DAN UKM, TRANSPORTASI DAN TENAGA KERJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	DINAS PERANAHAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO.	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI								REKLASIFIKASI/ PENGHAPUSAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2024	
			BERTAMBAH				BERKURANG						
			ASSET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, TRIGASI DAN JALURAN	PERALATAN DAN MESIN	ASSET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, TRIGASI DAN JALURAN	PERALATAN DAN MESIN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 3 + 4 + 5 + 6 + 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12	
17	DINAS PERUDA DAN OLAHRAGA												
18	DINAS PERPLSTAKAAN												
19	DINAS PERKANTORAN												
20	DINAS PARIWISATA	58.000.000,00											58.000.000,00
21	DINAS PERTANIAN												
22	DINAS PERINDUSTRIAN	9.220.853.105,00											9.220.853.105,00
23	SEKRETARIAT DAERAH												
24	INSPEKTORAT DAERAH												
25	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, REKLITAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH												
26	BADAN PENGELOLAAN KEURANGAN DAN PENGEMPTAN DAERAH												
27	BADAN KEPEGAWAJAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA												
28	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH												
29	KECAMATAN POSIGADIM												
30	KECAMATAN BOLAANG UKI												
31	KECAMATAN PINOLOSAN												
32	KECAMATAN PINOLOSAN TINGGI												
33	KECAMATAN PINOLOSAN TENDU												
34	KECAMATAN HELIPI												
35	KECAMATAN TOHONG												
36	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK												
	Jumlah	21.684.293.200,00		4.828.620.230,36	8.526.761.302,40			850.501.000,00	152.634.000,00				33.236.514.732,76


 BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 ISKANDAR KAMARU

Lampiran XV : Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Tahun Anggaran 2024

Nomor : 1 Tahun 2025

Tanggal : 4 Agustus 2025



**PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2024**

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	4.343.881.602,39	336.749.015,30	219.567.300,00	4.461.063.317,69
2	DINAS KESEHATAN	3.218.985.009,94	647.629.369,64	599.050.000,00	3.267.564.379,58
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	12.140.799.770,00	5.936.704.551,09	4.731.306.750,00	13.346.197.571,09
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	-	-	-	-
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	6.650.000,00	-	-	6.650.000,00
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.123.751.800,00	-	-	2.123.751.800,00
7	DINAS SOSIAL	147.824.200,00	-	-	147.824.200,00
8	DINAS KETAHANAN PANGAN	-	-	-	-
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.125.660.000,00	180.122.000,00	55.580.000,00	1.250.202.000,00
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	137.080.000,00	-	-	137.080.000,00
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	59.835.000,00	-	-	59.835.000,00
12	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.960.698.800,00	1.182.750.000,00	1.182.750.000,00	1.960.698.800,00
13	DINAS PERHUBUNGAN	2.539.119.500,00	-	-	2.539.119.500,00
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	740.872.207,74	49.500.000,00	137.016.166,40	653.356.041,34
15	DINAS KOPERASI DAN UKM, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	-	-	-	-
16	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	225.400.000,00	-	-	225.400.000,00
17	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	-	-	-	-
18	DINAS PERPUSTAKAAN	135.632.000,00	-	-	135.632.000,00
19	DINAS PERIKANAN	8.300.150.059,00	-	-	8.300.150.059,00
20	DINAS PARIWISATA	626.141.620,00	-	-	626.141.620,00
21	DINAS PERTANIAN	1.028.278.212,00	-	-	1.028.278.212,00
22	DINAS PERINDUSTRIAN	287.710.000,00	40.796.190,00	43.585.000,00	284.921.190,00
23	SEKRETARIAT DAERAH	6.551.246.595,00	2.531.019.595,00	2.531.019.595,00	6.551.246.595,00
24	INSPEKTORAT DAERAH	152.440.000,00	116.940.000,00	116.940.000,00	152.440.000,00
25	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	15.466.313.400,00	105.565.000,00	145.405.000,00	15.426.473.400,00

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
26	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	(11.839.145.695,55)	1.764.802.891,79	7.037.508.276,12	(17.111.851.079,88)
27	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	260.992.916,67	30.000.000,00	99.365.000,00	191.627.916,67
28	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	640.797.800,00	-	-	640.797.800,00
29	KECAMATAN POSIGADAN	-	-	-	-
30	KECAMATAN BOLAANG UKI	142.254.499,00	121.954.499,00	126.954.499,00	137.254.499,00
31	KECAMATAN PINOLOSIAN	16.125.000,00	-	-	16.125.000,00
32	KECAMATAN PINOLOSIAN TENGAH	20.020.000,00	-	-	20.020.000,00
33	KECAMATAN PINOLOSIAN TIMUR	192.560.530,00	187.980.530,00	187.980.530,00	192.560.530,00
34	KECAMATAN HELUMO	64.074.000,00	64.074.000,00	64.074.000,00	64.074.000,00
35	KECAMATAN TOMINI	-	-	-	-
36	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	15.953.500,00	-	-	15.953.500,00
	JUMLAH	50.832.102.326,19	13.296.587.641,82	17.278.102.116,52	46.850.587.851,49

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ISKANDAR KAMARU

Lampiran XVI : Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Tahun Anggaran 2024

Nomor : 1 Tahun 2025

Tanggal : 4 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
PER 31 DESEMBER 2024



NO.	TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIRENCANAKAN	SALDO AWAL	TRANSFER DARI KAS DAERAH	TRANSFER KE KAS DAERAH	SALDO AKHIR	SISA DANA YANG BELUM DICADANGKAN
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9 = 4 - 5 - 6
1	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024	Perda Nomor 8 Tahun 2021	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	-	15.000.000.000,00	-	-

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ISKANDAR KAMARU

Lampiran XVII

: Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Tahun Anggaran 2024

Nomor

: 1 Tahun 2025

Tanggal

: 4 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
PER 31 DESEMBER 2024

NO.	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	415.408.959,00	9.375.475,00	316.714.186,00	108.070.248,00
	1) Utang Iuran Jaminan Kesehatan	18.029,00	-	18.029,00	-
	2) Utang Iuran Jaminan Kesehatan PTT/THL	111.588.582,00	-	111.588.582,00	-
	3) Utang Iuran Jaminan Kesehatan Perangkat Desa Utang Iuran Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	-	-	-	-
	4) Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	-	-	-	-
	5) Utang Iuran Jaminan Kematian	-	-	-	-
	6) Utang PPh 21	201.072.075,00	3.440.752,00	201.072.075,00	3.440.752,00
	7) Utang PPh 22	2.005.000,00	922.089,00	2.005.000,00	922.089,00
	8) Utang PPh 23	15.500,00	455.866,00	15.500,00	455.866,00
	9) Utang PPN Pusat	2.015.000,00	4.556.768,00	2.015.000,00	4.556.768,00
	10) Utang Taperum	-	-	-	-
	11) Utang Iuran Wajib Pegawai 1%	-	-	-	-
	12) Utang Iuran Wajib Pegawai 8%	-	-	-	-
	13) Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	-	-	-	-
	14) Utang Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan	98.694.773,00	-	-	98.694.773,00
2	Utang Pinjaman Jangka Pendek	-	-	-	-
3	Utang Bunga	-	-	-	-
4	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	-
5	Pendapatan Diterima Dimuka	94.050.000,00	94.050.000,00	94.050.000,00	94.050.000,00
	1) Sewa Tempat	94.050.000,00	94.050.000,00	94.050.000,00	94.050.000,00

NO.	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6
6	Utang Belanja	1.683.435.306,56	1.121.151.313,60	1.522.171.264,56	1.282.415.355,60
	1) Utang Belanja Pegawai	128.339.201,00	302.774.081,00	128.339.201,00	302.774.081,00
	2) Utang Belanja Barang dan Jasa	1.128.761.613,56	249.352.164,00	1.081.998.513,56	296.115.264,00
	3) Utang Belanja Hibah	98.449.350,00	-	98.449.350,00	-
	4) Utang Belanja Transfer	-	-	-	-
	5) Utang Belanja Modal	327.885.142,00	547.848.494,60	213.384.200,00	662.349.436,60
	5) Utang Belanja Tidak Terduga	-	21.176.574,00	-	21.176.574,00
7	Utang Jangka Pendek Lainnya	352.067.566,44	-	9.749.400,00	342.318.166,44
	1) Utang Kelebihan Pembayaran Transfer pemerintah Pusat - Lainnya	-	-	-	-
	2) Utang Jangka Pendek Lainnya	352.067.566,44	-	9.749.400,00	342.318.166,44
	3) Utang Pengadaan Aset Tetap	-	-	-	-
	JUMLAH	2.544.961.832,00	1.224.576.788,60	1.942.684.850,56	1.826.853.770,04

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ESKANDAR KAMARU

Lampiran XVIII : Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
 Tahun Anggaran 2024
 Nomor : 1 Tahun 2025
 Tanggal : 4 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
PER 31 DESEMBER 2024



NO.	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6
		-	-	-	-
	JUMLAH	-	-	-	-

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

 Iskandar Kamaru



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024
DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

Lampiran XIX : Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Tahun Anggaran 2024
Nomor : 1 Tahun 2025
Tanggal : 4 Agustus 2025

NO.	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH / KURANG	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Pembangunan Jalan Lingkungan Drainase Lingkungan DAK PPKT Bakida TA 2024	8.603.823.000,00	7.917.237.929,60	686.585.075,40	92,02%	686.585.075,40	
2	Rumah Sakit Umum Daerah	Pembangunan Unit Transfusi Darah (UTD) Rumah Sakit TA 2024	3.797.000.000,00	3.157.585.200,00	639.414.800,00	83,16%	441.970.800,00	
JUMLAH			12.400.823.000,00	11.074.823.124,60	1.325.999.875,40	-	1.128.555.875,40	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN


ISKANDAR KAMARU

Lampiran XX.1 : Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Tahun Anggaran 2024
Nomor : 1 Tahun 2025
Tanggal : 4 Agustus 2025



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No.	BUMD/ Perusahaan Daerah Tahun	Sumber a)	Status b)	Aset Lancar	Aset Tidak Lancar	Aset Lainnya	Total Aset	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang	Total Kewajiban	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	BPKYS	Ekuitas Lainnya	Labo Ditahan	Total Ekuitas	% Saham Daerah	Kepemilikan Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9	10	11=9+10	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 X 18	
JUMLAH				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

58

Lampiran XX.2 : Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Tahun Anggaran 2024
Nomor : 1 Tahun 2025
Tanggal : 4 Agustus 2025



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No.	BUMD/ Perusahaan Daerah Tahun	Sumber a)	Status b)	Pendapatan	Beban	Labā (Rugi) Kotor	Pendapatan di luar Usaha	Beban di luar Usaha	Labā (Rugi) sebelum Pajak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JUMLAH				-	-	-	-	-	-

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
ISKANDAR KAMARU
ISKANDAR KAMARU